2025
Laporan Tahunan
Annual Report

PLN Nusa Daya

Menjaga Keandalan Energi Mendorong Masa Depan Berkelanjutan

Ensuring Energy Reliability Advancing a Sustainable Future





Tentang Laporan Tahunan
About The Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PLN Nusa Daya) tahun 2025. Laporan Tahunan ini memiliki tema "Menjaga Keandalan Energi Mendorong Masa Depan Berkelanjutan", tema tersebut dipilih dan telah disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Perusahaan melakukan penyusunan Laporan Tahunan dengan tujuan untuk memberikan dan meningkatkan keterbukaan atas informasi terkait Perusahaan selama tahun buku. Laporan Tahunan ini sebagai sumber dokumentasi komprehensif yang berisi informasi kinerja Perusahaan selama satu tahun. Dalam Laporan Tahunan ini berisikan informasi mengenai profile perusahaan, struktur Perusahaan kinerja operasional, kinerja keuangan, tata Kelola Perusahaan berdasarkan *best practice*, dan aspek keberlanjutan *berdasarkan triple bottom line (People, Profit, Planet).*

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sehingga dapat dipahami oleh pembaca yang lebih luas. Dalam Laporan Tahunan ini memuat kata "PLN Nusa Daya", dan "Perusahaan" yang diasumsikan sebagai PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PT PLN Nusa Daya). Informasi lengkap mengenai Laporan Tahunan Perusahaan dapat diakses dan diunduh dalam website www.plnnusadaya.co.id.

Welcome to the 2025 Annual Report of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PLN Nusa Daya). This Annual Report carries the theme "Ensuring Energy Reliability Advancing a Sustainable Future", which was selected to reflect the Company's business developments.

The Company has prepared this Annual Report to provide and enhance transparency regarding information on the Company throughout the financial year. The Annual Report serves as a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance during the year. It includes information on the Company's profile, corporate structure, operational performance, financial performance, corporate governance practices based on best practices, and sustainability aspects based on the triple bottom line (People, Profit and Planet).

This Annual Report is presented in both Indonesian and English to make it accessible to a wider audience. In this Annual Report, the terms "PLN Nusa Daya" and the "Company" refer to PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya. Complete information regarding the Company's Annual Report can be accessed and downloaded from the Company's website at www.plnnusadaya.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limits of Responsibility

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan mengenai kinerja operasional, keuangan, dan proyeksi bisnis Perusahaan. Informasi yang bersifat historis, pernyataan-pernyataan lainnya yang memiliki prospek risiko ketidakpastian, atau yang dapat mengakibatkan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang dilaporkan. Pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis Perusahaan. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan, atau pun sebaliknya.

This Annual Report contains statements concerning the Company's operational and financial performance, as well as its business projections. Historical information and other statements contained herein may be subject to risks and uncertainties that could cause actual developments to differ materially from those reported. These forward-looking statements are based on various assumptions regarding current conditions and forecasts of future conditions within the Company's business environment. The Company provides no assurance that documents whose validity has been verified will produce any particular results, whether in line with expectations or vice versa.

Tema dan Kesinambungan Tema

Theme and Its Continuity



Tema Theme

Menjaga Keandalan Energi Mendorong Masa Depan Berkelanjutan

Ensuring Energy Reliability Advancing a Sustainable Future

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi PLN Nusa Daya untuk memperkuat perannya sebagai perusahaan pengelola aset dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan yang andal di wilayah Indonesia Timur. Di tengah dinamika industri energi, Perusahaan terus memastikan keandalan operasional pembangkit, transmisi, distribusi, serta pelayanan pelanggan sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keandalan energi merupakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, PLN Nusa Daya terus memperkuat kapabilitas operasional, transformasi digital, tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan sistem ketenagalistrikan yang andal sekaligus menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui komitmen tersebut, PLN Nusa Daya tidak hanya menjaga keberlangsungan layanan energi hari ini, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, PLN Nusa Daya terus memperkuat *operational excellence* melalui peningkatan kualitas pengelolaan aset, transformasi digital, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai inisiatif tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat budaya keselamatan dan kepatuhan, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, tema ini juga merefleksikan upaya Perusahaan dalam mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. PLN Nusa Daya meyakini bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi, inovasi, dan tata kelola yang kuat, PLN Nusa Daya terus bergerak menjadi perusahaan pengelola aset ketenagalistrikan yang terpercaya, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan energi yang andal untuk mendorong masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

The year 2025 marked an important milestone for PLN Nusa Daya as it strengthened its role as an asset management company and a provider of reliable operation and maintenance services for electricity systems across Eastern Indonesia. Amid the evolving dynamics of the energy industry, the Company remained committed to ensuring the operational reliability of power plant, transmission and distribution systems, as well as customer services, as a key foundation for supporting economic growth and public welfare.

Reliable energy is fundamental to sustainable development. Accordingly, PLN Nusa Daya continues to strengthen its operational capabilities, digital transformation, governance, and develop its human capital to ensure the reliability of electricity systems while creating sustainable economic, social, and environmental value. Through this commitment, PLN Nusa Daya not only maintains the continuity of energy services today, but also contributes to building a greener, more resilient, and competitive future.

To fulfil this commitment, PLN Nusa Daya continues to strengthen operational excellence by improving the quality of asset management, digital transformation, developing human capital competencies and implementing good corporate governance. These initiatives are undertaken to enhance operational effectiveness, reinforce a culture of safety and compliance, and ensure the long-term sustainability of the business.

Moreover, this theme reflects the Company's efforts to support the energy transition and sustainable development agendas. PLN Nusa Daya believes that business success is measured not only by financial performance, but also by its ability to create balanced economic, social, and environmental benefits for all stakeholders.

Through synergy, innovation, and robust governance, PLN Nusa Daya continues to strengthen its position as a trusted electricity asset management company that is responsive to change and capable of delivering reliable energy to advance a greener, more inclusive, and sustainable future for Indonesia.

Kesinambungan Tema | Theme Continuity



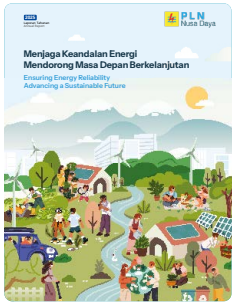
2024

Mempercepat Transisi Energi dan Digitalisasi dalam Penyediaan Energi yang Berkelanjutan

Accelerating Energy Transition and Digitalization in Providing Sustainable Energy

Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses energi, serta layanan yang lebih adaptif dan responsif. Dengan pemanfaatan teknologi pintar dan sistem digital, Perusahaan menghadirkan solusi energi berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi menujuenergi hijau, sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional.

Digital transformation enables greater operational efficiency, broader energy access, and more adaptive and responsive services. By leveraging smart technologies and integrated digital systems, PLN Nusa Daya delivers sustainable energy solutions that accelerate the shift toward green energy while enhancing its regional competitiveness.



2025

Menjaga Keandalan Energi, Mendorong Masa Depan Berkelanjutan

Ensuring Energy Reliability, Advancing a Sustainable Future

Keandalan energi merupakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, PLN Nusa Daya terus memperkuat kapabilitas operasional, transformasi digital, tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan sistem ketenagalistrikan yang andal sekaligus menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan

Reliable energy is fundamental to sustainable development. Accordingly, PLN Nusa Daya continues to strengthen its operational capabilities, digital transformation, governance, and develop its human capital to ensure reliable electricity systems while creating sustainable economic, social, and environmental value.



2022

Menciptakan Keunggulan dan Pertumbuhan dengan Pemikiran Besar

Achieving Sustainable Performance Through Business Transformation

Di tahun 2022, Perusahaan berhasil memberikan peningkatan kinerja keuangan yaitu meningkatnya jumlahpendapatan usaha dan laba usaha. Peningkatan ini dikarenakan oleh bertambahnya jumlah kontrak selamatahun buku 2022. Kinerja baik akan terus diupayakan dan ditingkatkan untuk mendukung transformasibisnis yang berkelanjutan.Seluruh insan Perusahaan berkomitmen memberikan dedikasi untuk menghasilkan pelayanan dan kinerjaterbaik dalam mewujudkan transformasi bisnis berkelanjutan.

In 2022, the Company managed to improve its financial performance, namely increasing the amount ofoperating revenues and operating profits. This increase was due to the increase in the number of contractsduring the 2022 fiscal year. Good performance will continue to be sought and improved to supportsustainable business transformation.All Company personnel are committed to providing dedication to produce the best service and performancein realizing sustainable business transformation.



2023

Meraih Kinerja yang Berkelanjutan dengan Transformasi Bisnis

Ensuring Excellence and Growth through Moonshot Thinking

PT PLN Nusa Daya terus memperkuat keandalan layanan guna meningkatkan kualitas kontribusi di tengah percepatan laju pembangunan Indonesia. Hal tersebut antara lain tercermin melalui pencapaian kinerja operasional yang secara umum memperlihatkan hasil positif. Selain itu, situasi kondusif dampak stabilitas pertumbuhan ekonomi pada 2023 juga telah memacu PLN ND untuk terus menghadirkan pengembangan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan jangka panjang melalui inovasi.

PT PLN Nusa Daya continued to strengthen service reliability to improve the quality of contributions amidst the accelerating pace of Indonesia's development. This was reflected, among other things, in achieving operational performance which generally shows positive results. In addition, the conducive situation resulting from the stability of economic growth in 2023 has also spurred PLN ND to continue providing business development to realize long-term growth through innovation.

Daftar Isi
Table of Contents

Pendahuluan
Introduction

3	Tentang Laporan Tahunan About the Annual Report
3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limits of Responsibility
4	Tema dan Kesinambungan Tema Theme and Its Continuity
6	Daftar Isi Table of Contents
9	Pencapaian Penting Tahun 2025 Significant Achievements in 2025
10	Pencapaian Program Utama 2025 2025 Key Programme Achievements
14	Ikhtisar data Keuangan Penting Highlight of Key Financial Data
19	Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Highlights
20	Ikhtisar Kinerja Lainnya Other Performance Highlights
21	Ikhtisar Saham Share Highlights
21	Ikhtisar Obligasi Bond Information
21	Aksi Korporasi Corporate Actions
22	Peristiwa Penting Keberlanjutan Tahun 2025 Important Sustainability Events in 2025
28	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

Laporan Manajemen
Management Report

36	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners
48	Laporan Direksi Report of the Board of Directors
62	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya Statement of Responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Annual Report of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Profil Perusahaan
Company Profile

66	Informasi Perusahaan Company Information
67	Riwayat Singkat Perusahaan Company at a Glance
70	Jejak Langkah Perusahaan Company Milestones
72	Visi dan Misi Perusahaan Vision and Mission
74	Budaya Perusahaan Corporate Culture
75	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan Company Purpose, Objectives, and Business Activities
77	Demografi Karyawan Employee Demographics.
78	Struktur Organisasi Organizational Structure
80	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
81	Profil Direksi Board of Directors Profile
84	Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025 Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors During and After the 2025 Fiscal Year
84	Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas, Asosiasi, dan Perusahaan Patungan Company Group Structure, Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures
87	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information
90	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing
90	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Listing of Other Securities
91	Wilayah Operasional Perusahaan Operational Area
92	Alamat Kantor Perwakilan dan Kantor Regional Addresses of Representative Office and Regional Offices
93	Daftar Keanggotaan Asosiasi List of Association Memberships
93	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perusahaan Public Accountant and Public Accounting Firm of the Company
94	Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Supporting Institutions and Professionals
95	Informasi Pada Website Perusahaan Information on the Company's Website

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

98	Sumber Daya Manusia Human Capital
106	Teknologi Informasi Information Technology

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

114	Analisis Industri Industry Analysis
117	Analisis Operasi Per Segmen Usaha Operating Analysis by Business Segment
125	Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspects and Market Share
126	Profitabilitas Per Segmen Profitability by Segment
127	Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis
138	Rasio Keuangan Financial Ratio
140	Struktur Modal Capital Structure
141	Kebijakan Dividen Dividend Policy
142	Aspek Perpajakan Taxation Aspects
144	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Goods Investment
145	Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
146	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 Comparison between the Company's 2025 Performance Target and Realisation
149	Key Performance Indicator
152	Prospek Usaha Business Outlook
156	Target Kinerja Perusahaan Tahun 2026 Company Performance Target for 2026
158	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi Information on Material Transactions Involving Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties
162	Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Material Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
163	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after Accountant's Reporting Date
163	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Unusual Events
163	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Actual Use of Proceeds from Public Offering
163	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan Changes in Legislation and Their Impact on the Company
166	Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Company
169	Informasi Kelangsungan Usaha Going Concern Information

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

172	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance
181	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
187	Direksi Board of Directors
195	Dewan Komisaris Board of Commissioners
208	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners
212	Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

213	Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee
214	- Komite Audit Audit Committee
223	- Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
231	- Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee
240	Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi Other Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors
241	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners
243	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
248	Unit Audit Internal Internal Audit Unit
254	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
257	Sistem Manajemen Risiko Perusahaan Risk Management System
267	Perkara Penting Perusahaan Company Important Matters
270	Kode Etik Perusahaan Code of Conduct
272	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees
272	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
277	Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan Company's Anti-Corruption Policy
283	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy
286	Perlindungan Hak Kreditur Creditor Rights Protection
287	Governansi Perpajakan Taxation Governance
288	Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy
288	Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan Implementation of Corporate Governance Code

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

310	Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy
315	Governansi Berkelanjutan Sustainable Governance
319	Budaya Keberlanjutan pada Insan Perusahaan Sustainability Culture Among Employees
320	Kinerja Ekonomi dalam Pilar Keberlanjutan Economic Performance within the Pillars of Sustainability
322	Memenuhi Harapan Pelanggan dan Inovasi Berkelanjutan Delivering Customer Expectation and Continuous Innovation
327	Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Employee Welfare and Protection
330	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan Community Empowerment for Sustainable Development
336	Pengelolaan Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan Environmental Management for a Sustainable Future

Pencapaian Penting Tahun 2025

Significant Achievements in 2025

Realisasi Pertumbuhan Tahun 2025 *High Quality Growth*, kenaikan terhadap realisasi tahun 2024: Pendapatan audited tahun 2025 sebesar **Rp4.323 Miliar, naik 133%** dan **melampaui 7% dari RKAP 2025, Laba Usaha Rp395,8 M naik 150%** dengan **rasio operasi 90,85%,** pertumbuhan **Beyond kWh 312%,** Total Kontrak berjalan **354 kontrak,** Pencapaian **KPI hijau 102,26** serta **restitusi pajak 2025** sebesar **Rp120,7 M** tumbuh 51% dari 2024 atas berhasilnya PLN ND berstatus sebagai **PKP Berisiko Rendah.**

In 2025, audited Revenue reached Rp4.323 Billion, representing growth of 133% and exceeding the WP&B target by 7%, Operating Profit increased by 150% to Rp395.8 Billion, with an operating ratio of 90.85%, the Beyond kWh grew by 312%, the Number of Ongoing Contracts reached 354, the Company achieved a Green KPI score of 102.26, and a tax refund of Rp120.7 Billion, 51% higher than in 2024, following its designation as a Low-Risk Taxable Entrepreneur.

296 **Pegawai** Employees
26.186 **TK Project**

1082 MW
Kapasitas Pembangkit
Power Plant Capacity

107.874 kms JTM
133.196 kms JTR

14,8 juta million
Pelanggan PLN
PLN Customers

20.328,41 kms **Jar Transmisi** Transmission Jar
280 **Gardu Induk** Substations

Rp4.323 M
133%
Pendapatan Usaha
Revenue

Rp395,8 M
150%
Laba Usaha
Operating Profit

90,85%
101%
Rasio Operasi
Operating Ratio

Rp48,1 M
312%
Beyond kWh
Beyond kWh

354
106%
Jumlah Kontrak
Number of Contracts

102,26
Pencapaian KPI
KPI Achievement

Pencapaian Program Utama 2025

2025 Key Programme Achievements

01 KEBANGKITAN POWER PLANT

Kapasitas Pembangkit | Power Plant Capacity

1.082 MW

Naik 58% dari 2024
Increased by 58% from 2024

EFOR

6,18 %

Membaik 24,2% dari tahun 2024 dan melampaui target RKAP (PO–P5 dan P6–P8)
Improved by 24,2% from 2024and exceeded the WP&B target (P0–P5 and P6–P8)

EAF

85,25 %

Naik 0,2% dari 2024(hasil pemeliharaan periodik 195 unit mesin PLTD)
Increased by 0,2% from 2024 (resulting from periodic maintenance of 195 DPP generating units)

SFC (L/kWh)

0,3171

Lebih baik dibandingkan 2024 dengan pemanfaatan BESS simple hybrid
Improved compared with 2024 through the utilisation of a simple hybrid BESS

02 TRANSMISI & DISTRIBUTION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

SAIDI

213,41 minutes/customer
menit/pelanggan

Membaik 29% dibandingkan 2024 danmelampaui 27,7% dari target RKAP 2025
Improved by 29% compared with 2024 and outperformed the 2025 WP&B target by 27.7%

RPT

22,58 minutes/customer
menit/pelanggan

Melampaui 20,8% dari target RKAP 2025
Outperformed the 2025 WP&B target by 20.8%

SAIFI

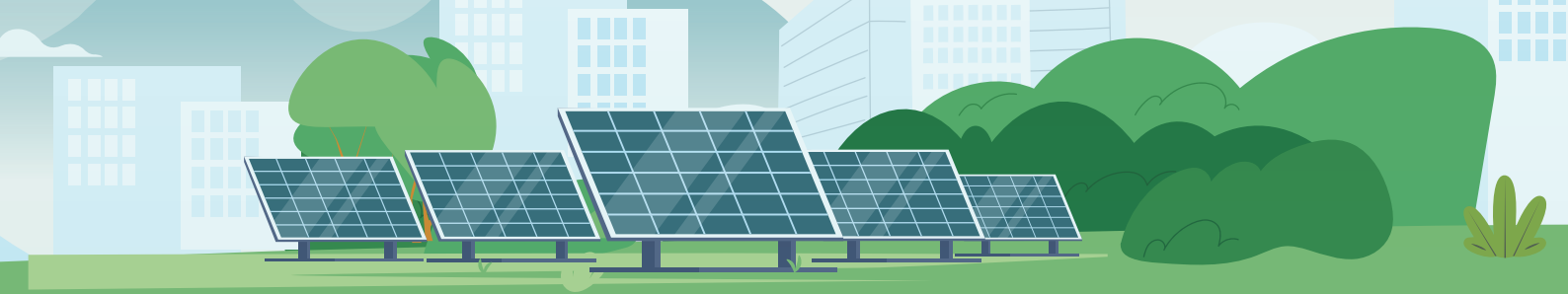
3,73 kali/customer
times/pelanggan

Membaik 30,8% dibandingkan 2024 danmelampaui 29,3% dari target RKAP 2025
Improved by 30,8% compared with 2024 and outperformed the 2025 WP&B target by 29.3%

RCT

40,50 minutes/customer
menit/pelanggan

Melampaui 5,3% dari target RKAP 2025
Outperformed the 2025 WP&B target by 5.3%



03 BEYOND kWH & FINANCIAL
BEYOND kWH & FINANCIAL

Keuangan | Financial

EBITDA
Rp **475** miliar billion
(+47,5% YoY; +10,2% vs RKAP)

ROIC
30,59 %
(+1,6% YoY; +6,5% vs WP&B)

Dividend
Rp **3** miliar billion
(+50% YoY)

EBITDA Margin
10,91 %
(+10,1% YoY; +2,3% vs WP&B)

Rasio Operasi | Operating Ratio
90,85 %
(lebih efisien dari 2024 dan RKAP)
(more efficient than in 2024 and WP&B)

Beyond kWh

Pendapatan | Revenue
Rp **48,13** miliar billion

Grew | Grew
212 %

30 %
di atas RKAP 2025
above the 2025 WP&B

Jumlah kontrak
Total contracts
35

04 TRANSMISI & DISTRIBUTION
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

ULTIMA "Easy Charging, Easy Living" menghadirkan pengisian EV di rumah yang cepat, aman, dan praktis, sekaligus mendukung Net Zero Emission 2060 dan gaya hidup berkelanjutan.
ULTIMA "Easy Charging, Easy Living" provides fast, safe, and convenient home EV charging solutions, while supporting the Net Zero Emissions by 2060 and promoting a sustainable lifestyle.



Teknologi BESS akan menjadi elemen penting dalam sstem kelistrikan, beroperasinya **BESS 8 MW IKN** memastikan bahwa kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan optimal.
BESS technology is set to become an important element of the electricity system, with the operation of the **8 MW BESS at IKN** helping to ensure that electricity demand can be met optimally.



RMB PLN Nusa Daya telah beroperasi di **Tanjung Selor 4 MW, Pulau Selayar 3 MW dan Malinau 3 MW** untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik di **wilayah kepulauan.**
PLN Nusa Daya's RMB has commenced operations in **Tanjung Selor with 4 MW, Pulau Selayar with 3 MW**, and Malinau with 3 MW to maintain the reliability and continuity of electricity supply in island regions,



PLN Nusa Daya resmi mengoperasikan pasokan listrik untuk **PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) dengan tarif I4.** sehingga tonggak penting bagi PLN Nusa Daya untuk **penetrasi pasar** O&M transmisi dan distribusi.
PLN Nusa Daya officially commenced the operation of electricity supply for **PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) under the I4 tarif**, marking an important milestone in the Company's **market penetration** into the O&M transmission and distribution.



Percepatan perkuatan sistem kelistrikan **50 MW Aceh** sebagai komitmen PLN Nusa Daya mendukung PT PLN dalam menjaga keandalan pasokan, dan memperkuat infrastruktur kelistrikan.
The accelerated strengthening of the **50 MW Aceh** electricity system reflects PLN Nusa Daya's commitment to supporting PLN in maintaining the reliability of electricity supply and strengthening electricity infrastructure.



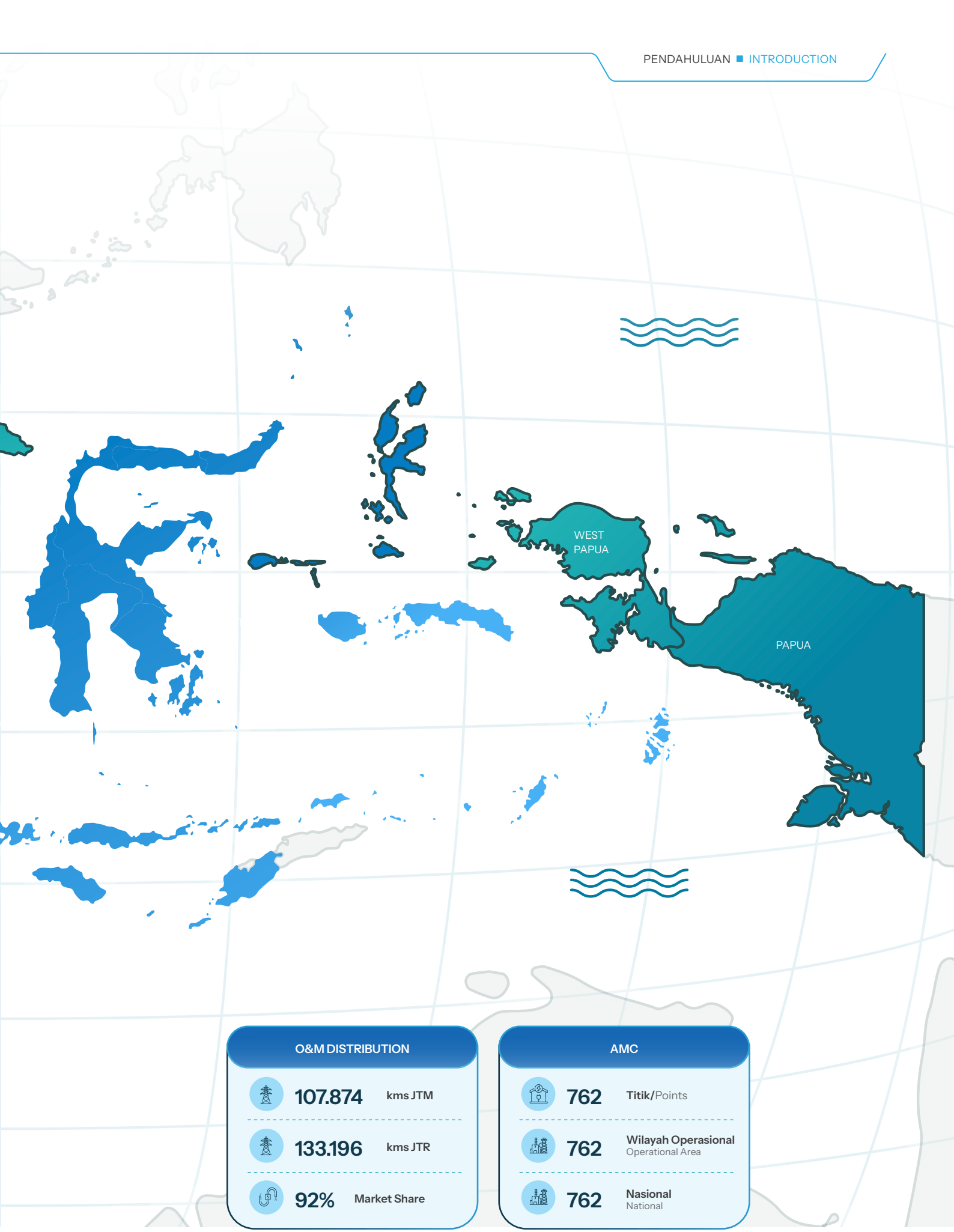
Sistem Khatulistiwa 150 MW menjadi tulang punggung keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat.
ULTIMA "Easy Charging, Easy Living"
The **150 MW Khatulistiwa System** serves as the backbone of reliable electricity supply in West Kalimantan.



Rentang Kendali PLN Nusa Daya
PLN Nusa Daya Operational Coverage



AMC		POWER PLANT RENTAL		O&M TRANSMISSION & SUBSTATION	
762	Site	103	Site	20.328,41	kms Jaringan Transmisi | Transmission Network
3.013	Unit	12	Unit Pelaksana Nasional National Implementation Unit	280	Gardu Induk Substations
1.082	MW	762	MW	100%	Market Share



O&M DISTRIBUTION	
107.874	kms JTM
133.196	kms JTR
92%	Market Share

AMC	
762	Titik/Points
762	Wilayah Operasional Operational Area
762	Nasional National

Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Highlight of Key Financial Data

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlight

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar | Total Current Assets	1.645.938	1.010.767	739.943	509.571	376.212
Jumlah Aset Tidak Lancar | Total Non-Current Assets	555.127	339.571	292.592	293.956	312.894
Jumlah Aset | Total Assets	2.201.065	1.350.338	1.032.535	803.527	689.106
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.247.090	684.065	535.734	407.438	365.605
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	136.092	68.375	55.783	60.676	72.200
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	1.383.182	752.440	591.517	468.114	437.805
Jumlah Ekuitas | Total Equity	817.883	597.898	441.018	335.413	251.301
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	2.201.065	1.350.338	1.032.535	803.527	689.106

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan | Revenue	4.323.648	3.246.092	2.360.997	1.790.105	1.519.406
Beban pokok pendapatan | Cost of revenue	(3.725.236)	(2.839.074)	(2.031.832)	(1.550.759)	(1.311.340)
Laba Bruto | Gross Profit	598.412	407.018	329.165	239.346	208.066
Beban usaha | Operating expenses	(202.618)	(143.588)	(118.350)	(88.616)	(68.704)
Penghasilan keuangan | Finance income	752	985	1.032	807	509
Beban keuangan | Finance expenses	(34.063)	(22.080)	(10.538)	(6.931)	(5.392)
Beban lain-lain, bersih | Other expenses, net	(76.723)	(13.290)	(45.302)	(34.315)	(39.374)
Laba Sebelum Pajak | Profit before Tax	285.760	229.045	156.007	110.291	95.105
Beban pajak penghasilan | Income tax expenses	(71.155)	(70.077)	(47.579)	(28.862)	(22.462)
Laba Tahun Berjalan | Profit for the Year	214.605	158.968	108.428	81.429	72.643
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Other comprehensive income for the year	8.380	(88)	(1.824)	2.683	13.440
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	222.985	158.880	106.604	84.112	86.083
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Income for the year attributable to:					
- Pemilik entitas induk | Owners of the parent entity	214.605	158.968	108.427	81.435	72.640
- Kepentingan non-pengendali | Non-controlling interests	-	-	1	(6)	3
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:					
- Pemilik entitas induk | Owners of the parent entity	222.985	158.880	106.603	84.118	86.080
- Kepentingan non-pengendali | Non-controlling interests	-	-	1	(6)	3

Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash provided by operating activities	(88.119)	103.554	10.259	178.836	106.819
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(143.006)	(69.988)	(44.800)	(65.724)	(12.340)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities	334.314	(44.919)	(50.743)	(51.109)	(27.400)
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Decrease in Cash and Cash Equivalents	103.189	(11.353)	(85.284)	62.003	67.079
Kas dan setara kas awal tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	137.933	149.286	239.656	177.653	110.574
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	241.122	137.933	154.372	239.656	177.653

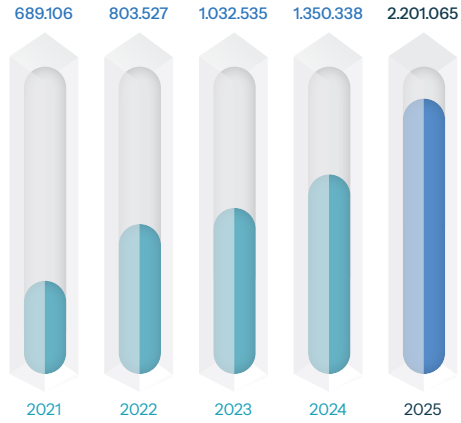
Rasio Keuangan
Financial Ratios

(dalam %)
(in %)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar Current Ratio	132%	148%	138%	125%	103%
Rasio Cepat Quick Ratio	119%	140%	123%	115%	102%
Rasio Kas Cash Ratio	19%	20%	29%	59%	49%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio	63%	56%	57%	58%	64%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	169%	126%	134%	140%	174%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Pengembalian Ekuitas Return on Equity	26%	27%	25%	24%	29%
Rasio Pengembalian Aset Return on Assets	10%	12%	11%	10%	11%
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	14%	13%	14%	13%	14%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	5%	5%	5%	5%	5%

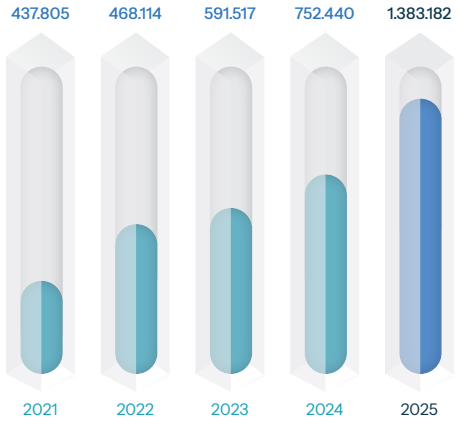
Jumlah Aset
Total Assets

Rp Juta I Rp Million



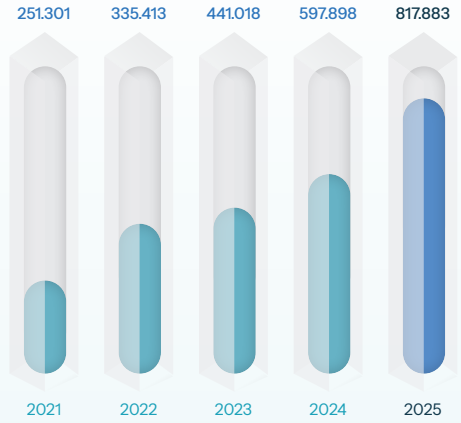
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Rp Juta I Rp Million



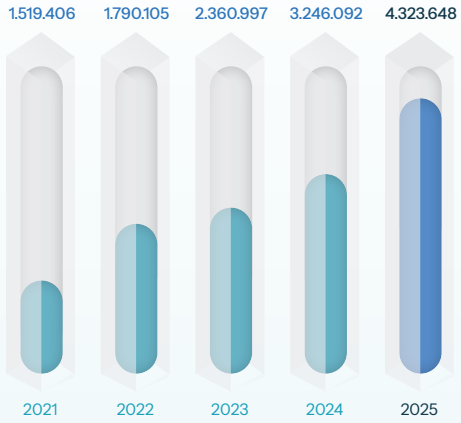
Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp Juta I Rp Million



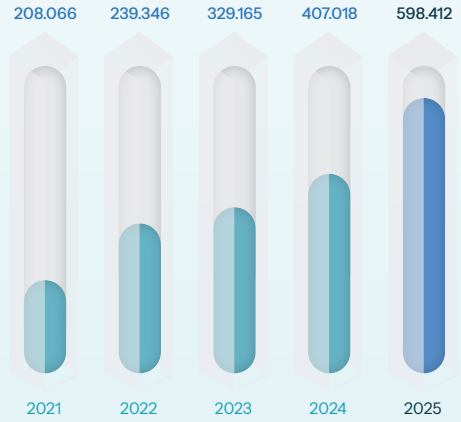
Pendapatan
Revenue

Rp Juta I Rp Million



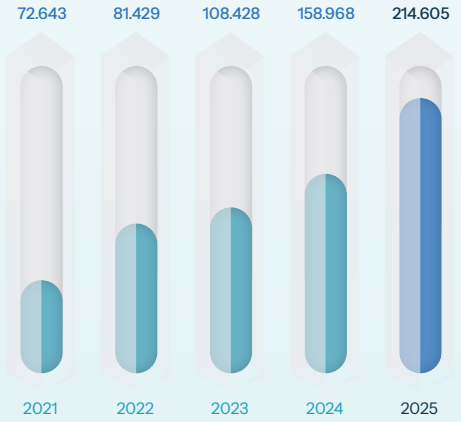
Laba Bruto
Gross Profit

Rp Juta I Rp Million



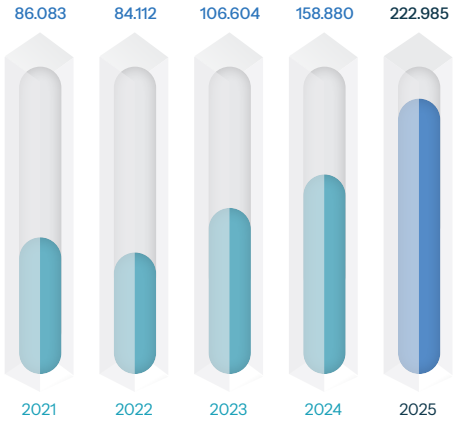
Laba Tahun Berjalan
Profit for The Year

Rp Juta I Rp Million



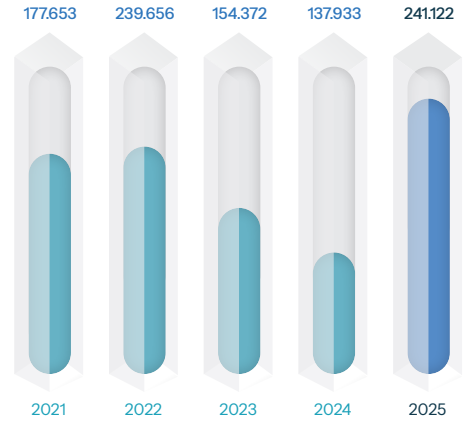
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income for the Year

Rp Juta I Rp Million



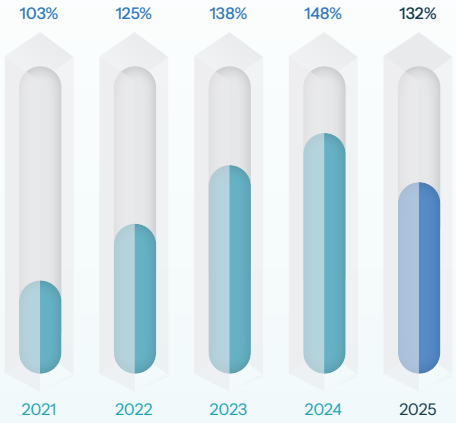
Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

Rp Juta I Rp Million



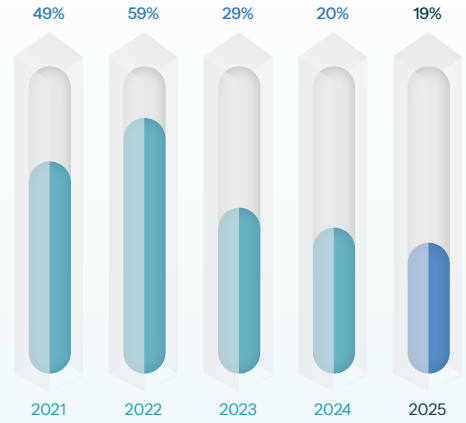
Rasio Lancar
Current Ratio

%



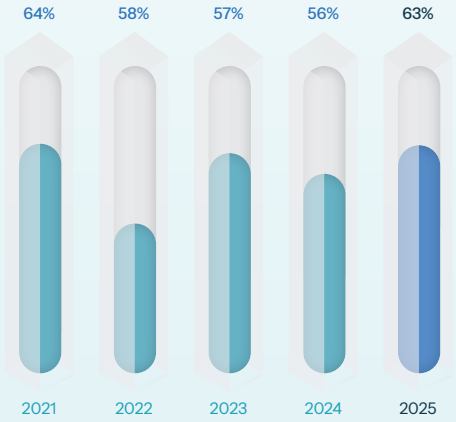
Rasio Kas
Cash Ratio

%



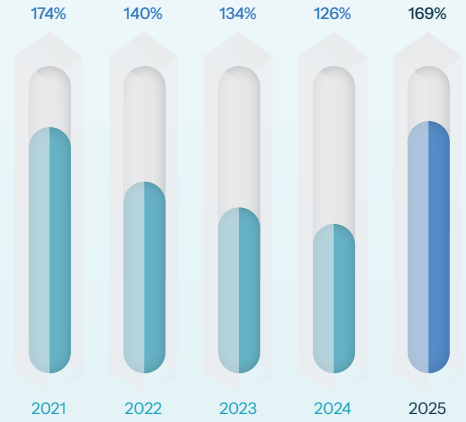
Rasio Liabilitas terhadap Aset
Liabilities to Assets Ratio

%



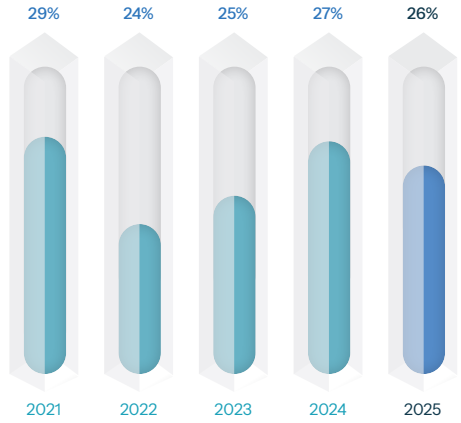
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
Liabilities to Equity Ratio

%



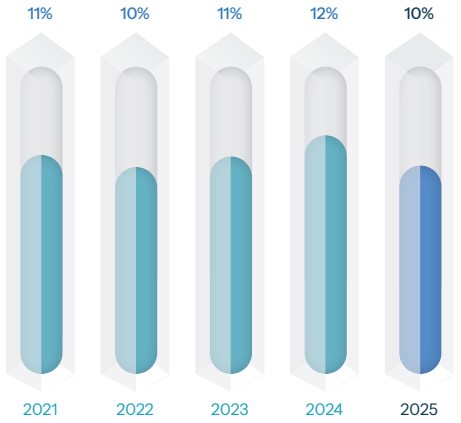
Rasio Pengembalian Ekuitas
Return on Equity

%



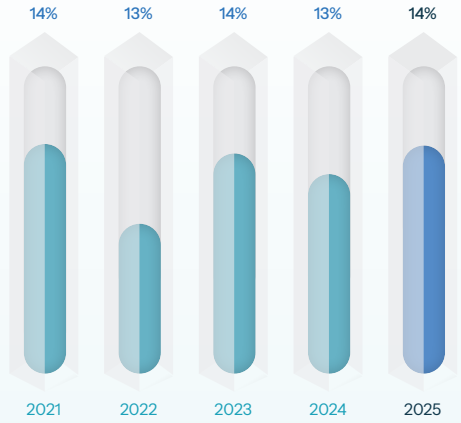
Rasio Pengembalian Aset
Return on Assets

%



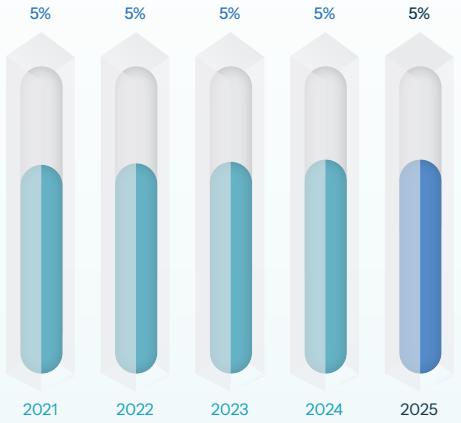
Margin Laba Bruto
Gross Profit Margin

%



Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

%

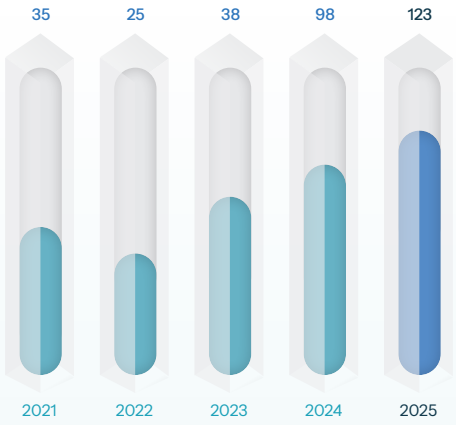


Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

Kontrak Baru dan Kontrak Berjalan
New Contracts and Ongoing Contracts

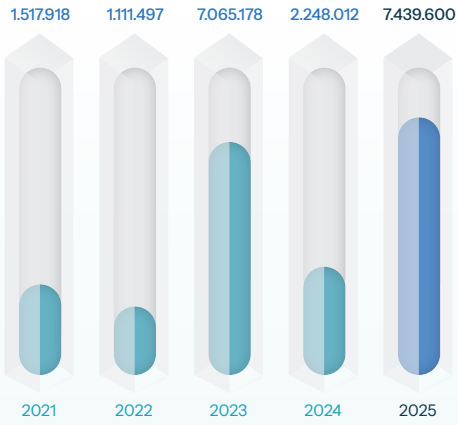
Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Kontrak Baru | Total New Contracts	123	98	38	25	35
Jumlah Nilai Kontrak Baru (Rp juta) Total Value of New Contracts (Rp million)	7.439.600	2.248.012	7.065.178	1.111.497	1.517.918
Jumlah Kontrak Berjalan | Total Ongoing Contracts	124	300	177	139	161
Jumlah Nilai Kontrak Berjalan (Rp juta) Total Value of Ongoing Contracts (Rp million)	7.439.600	20.125.183	14.541.530	7.476.351	8.681.129

Jumlah Kontrak Baru
Total New Contracts

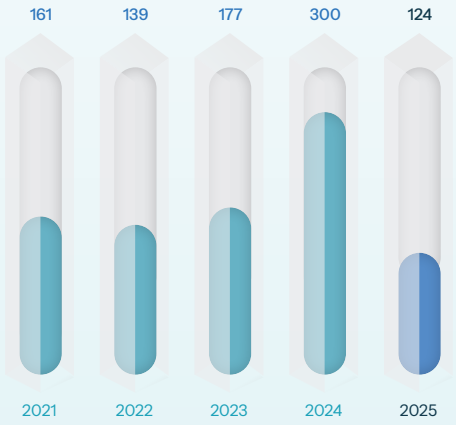


Jumlah Nilai Kontrak Baru
Total Value of New Contracts

Rp Juta I Rp Million

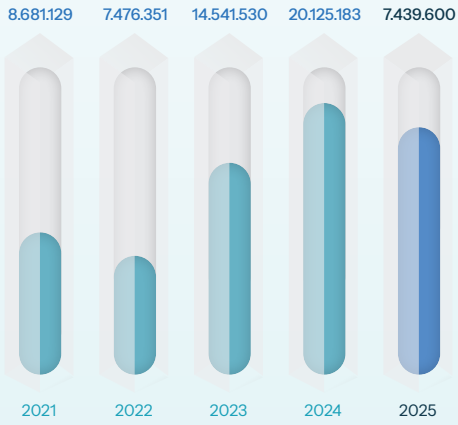


Jumlah Kontrak Berjalan
Total Ongoing Contracts



Jumlah Nilai Kontrak Berjalan
Total Value of Ongoing Contracts

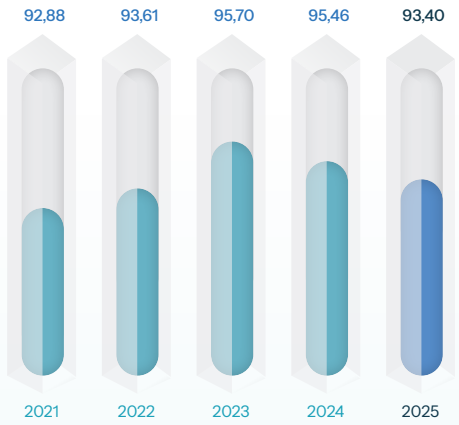
Rp Juta I Rp Million



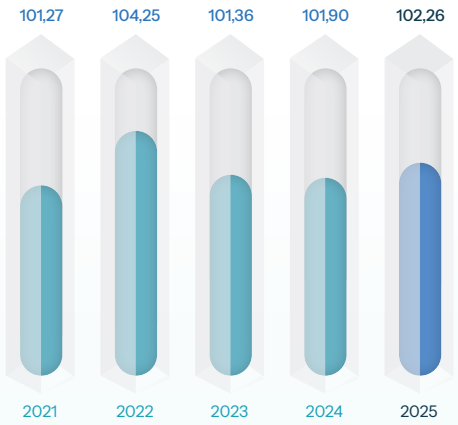
Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Highlights

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Survei Kepuasan Pelanggan (%) Customer Satisfaction Survey (%)	93,40	95,46	95,70	93,61	92,88
Pencapaian KPI (nilai) KPI Achievement (score)	102,26	101,90	101,36	104,25	101,27

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey
%



Pencapaian KPI
KPI Achievement
Nilai I Score



Ikhtisar saham
Share Highlights

Hingga 31 Desember 2025, kepemilikan saham PLN Nusa Daya terdiri dari PT PLN (Persero) sebesar 99,99% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebesar 0,01%. Dikarenakan PLN Nusa Daya tidak melakukan penerbitan saham di bursa efek manapun, tidak terdapat adanya komposisi saham yang dimiliki oleh publik. Dengan demikian, tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

As at 31 December 2025, PLN Nusa Daya's shareholding comprised 99.99% ownership by PT PLN (Persero) and 0.01% ownership by PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation (YPK PLN). As PLN Nusa Daya has not listed its shares on any stock exchange, the Company has no public shareholders. Accordingly, information on the highest, lowest, and closing share prices, as well as the volume of shares traded, is not applicable.

Informasi Obligasi
Bond Information

Sampai akhir tahun buku 2025, PLN Nusa Daya belum melakukan penerbitan obligasi di bursa efek manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga informasi yang berkaitan dengan ikhtisar kinerja obligasi Perseroan belum dapat dijabarkan dalam Laporan Tahunan ini.

As at the end of the 2025 fiscal year, PLN Nusa Daya had not issued any bonds on any stock exchange, either in Indonesia or overseas. Accordingly, information on the Company's bond performance is not presented in this Annual Report.

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Di tahun 2025, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan PLN Nusa Daya yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

During 2025, PLN Nusa Daya did not conduct any corporate actions that resulted in changes to its shares, including stock splits, reverse stock splits, share dividends, bonus shares, changes in the par value of shares, the issuance of convertible securities, and increases or reductions in capital.

Peristiwa Penting Keberlanjutan Tahun 2025

Important Sustainability Events in 2025



Januari | January 2025

Penandatanganan MoU *Joint Marketing Agreement* Produk dan Layanan PLN Group oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pelanggan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Signing of a Cooperation Agreement between PLN Nusa Daya and PLN Main Unit for Papua and West Papua Region for the Procurement of Customer Testing and Measuring Equipment.



24 Januari | January 2025

PLN Nusa Daya bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara melaksanakan audiensi dengan Komando Daerah Militer XV Pattimura untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelistrikan pada objek vital nasional.

PLN Nusa Daya, along with PLN Main Unit for Maluku and North Maluku Region, held an audience with the XV/ Pattimura Regional Military Command to strengthen synergy in safeguarding electricity supply for national vital objects.



27 Februari | February 2025

Penandatanganan MoU *Joint Marketing Agreement* oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat dalam menghadirkan layanan listrik yang lebih andal serta pelaksanaan *Customer Intimacy* Pelanggan.

Signing of a Joint Marketing Agreement MoU between PLN Nusa Daya and PLN Main Unit for West Nusa Tenggara Region to provide more reliable electricity services and implement Customer Intimacy initiatives.



21 Maret | March 2025

Penyaluran bantuan berupa mesin pengolahan pakan ternak silase dan pelet, serta pelatihan teknis pengolahan limbah jagung menjadi pakan berkualitas untuk masyarakat peternak di Desa Dete, Sumbawa.

Distribution of assistance in the form of silage and pellet animal feed processing machines, along with technical training on processing corn waste into quality animal feed for livestock communities in Dete Village, Sumbawa.



22 Maret | March 2025

Yayasan Baitul Maal PLN dan Srikandi PLN Nusa Daya menyalurkan bantuan kepada duafa dan mustahik untuk menyalurkan kabahagiaan dalam menyambut Idul fitri.

Yayasan Baitul Maal PLN and Srikandi PLN Nusa Daya distributed assistance to underprivileged communities and eligible beneficiaries to share joy in welcoming Eid al-Fitr.



17 April 2025

Penandatanganan MoU antara PLN Nusa Daya dengan PT Algatek Karbon Nusantara dan PT Putra Andalan Perkasa dalam pengembangan ekosistem *hydrogen* di Indonesia.

Signing of an MoU between PLN Nusa Daya, PT Algatek Karbon Nusantara, and PT Putra Andalan Perkasa for the development of the hydrogen ecosystem in Indonesia.



Maret | March 2025

Pemberian seragam, sepatu, serta sarana pendidikan kepada siswa di Jayawijaya, Wamena, guna mendukung terciptanya dunia pendidikan yang lebih baik.

Provision of uniforms, shoes, and educational facilities to students in Jayawijaya, Wamena, to support better access to quality education.



Mei | May 2025

Pelaksanaan program Srikandi PLN Nusa Daya *Goes to School* dengan edukasi pengelolaan sampah dan cinta lingkungan kepada anak-anak TK Antasari dan SDN Komet 1.

Implementation of the Srikandi PLN Nusa Daya Goes to School programme, providing education on waste management and environmental awareness to children at Antasari Kindergarten and SDN Komet 1.



9 Mei | May 2025

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) oleh PLN Nusa Daya kepada berbagai pemangku kepentingan untuk membahas terkait visi bersama dalam mendorong solusi energi bersih berbasis hidrogen serta pamanfaatan teknologi penangkapan karbon (CCUS).

PLN Nusa Daya held a Focus Group Discussion (FGD) with various stakeholders to discuss a shared vision for advancing hydrogen-based clean energy solutions and the utilisation of of carbon capture technology (CCUS).



Mei | May 2025

Penandatanganan Perjanjian Gabungan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur yang mencakup 9 Unit Layanan Pelanggan + *Command Center*.

Signing of a Joint Agreement for Distribution Operation and Maintenance Services between PLN Nusa Daya and PLN Main Unit for East Nusa Tenggara Region, covering 9 Customer Service Units + Command Centre.



11 Juni | June 2025

Penandatanganan MoU *Joint Marketing Agreement* Produk dan Layanan PLN Group oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pelanggan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

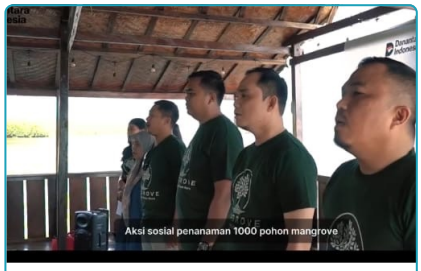
Signing of a Joint Marketing Agreement MoU for PLN Group Products and Services between PLN Nusa Daya and PLN Main Distribution Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan, aimed at optimising the fulfilment of customer needs in the South Kalimantan and Central Kalimantan regions.



12 Juni | June 2025

Pelaksanaan kegiatan *Zero Waste Warriors* di Pantai Lampurang, Balikpapan, yang diikuti oleh insan PLN berkolaborasi dengan Srikandi PLN Nusa Daya dan para relawan santri dari Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan.

Implementation of the Zero Waste Warriors activity at Lampurang Beach, Balikpapan, involving PLN personnel in collaboration with Srikandi PLN Nusa Daya and student volunteers from Bairuha Islamic Boarding School, Balikpapan.



27 Juni | June 2025

Pelaksanaan Aksi Sosial Peduli Lingkungan melalui penanaman 1000 pohon mangrove.

Implementation of an Environmental Care Social Action through the planting of 1,000 mangrove trees.



28-30 Juli | July 2025

Pelaksanaan Kampus Yantek PLN Nusa Daya *Site* Masohi Periode 2025 yang menjadi bentuk komitmen PLN Nusa Daya dalam meningkatkan kompetensi teknis petugas Yantek, memperkuat budaya K3, serta membentuk karakter kerja yang sigap, disiplin, dan berorientasi pada keselamatan.

Implementation of the 2025 PLN Nusa Daya Technical Services Campus at the Masohi Site, reflecting PLN Nusa Daya's commitment to improving the technical competencies of Technical Services personnel, strengthening the OHS culture, and developing a responsive, disciplined, and safety-oriented work character.



Agustus | August 2025

Direktorat Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Bersama PLN Nusa Daya melaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) yang membahas strategi percepatan transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan dan gasifikasi pada unit pembangkit serta ditindaklanjuti dengan penugasan hybridisasi pada 32 *site* PLTD.

The Directorate of Generation Management of PT PLN (Persero), along with PLN Nusa Daya, held a Focus Group Discussion (FGD) on strategies to accelerate the energy transition through the utilisation of renewable energy and gasification at power plant units. This was followed by the assignment of hybridisation at 32 DPP sites.



27 Agustus | August 2025

PLN melalui PLN ICON Plus dan PLN Nusa Daya meluncurkan inovasi ULTIMA (*Ultimate Home Charging Services*) yang menawarkan kemudahan pengisian daya kendaraan listrik di rumah secara lebih cepat, aman, dan praktis.

PLN, through PLN ICON Plus and PLN Nusa Daya, launched the ULTIMA innovation (Ultimate Home Charging Services) which offers faster, safer, and more practical electric vehicle charging at home.



28 Agustus | August 2025

PLN Nusa Daya Mamuju & Palopo berkolaborasi dengan PLN Unit Layanan Pelanggan Manakarra menyalurkan listrik ke SDN Bullung dengan listrik SuperSun.

PLN Nusa Daya Mamuju & Palopo collaborated with PLN Manakarra Customer Service Unit to supply electricity to SDN Bullung through SuperSun electricity.



September 2025

Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi di UP3 Manado, UP3 Palu, UP3 Gorontalo, UP3 Toli-Toli, UP3 Tahuna, dan UP3 Kotamobagu oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo.

Signing of an Agreement for Distribution Operation and Maintenance Services at UP3 Manado, UP3 Palu, UP3 Gorontalo, UP3 Toli-Toli, UP3 Tahuna, and UP3 Kotamobagu between PLN Nusa Daya and PLN Main Distribution Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo.



18 September 2025

Peresmian gedung kantor Unit Pelaksana Kalimantan 1 PLN Nusa Daya di Pontianak untuk mendukung ketahanan energi dan pelayanan terbaik bagi pelanggan di Kalimantan Barat.

Inauguration of the PLN Nusa Daya Kalimantan 1 Implementing Unit office building in Pontianak to support energy resilience and deliver excellent service to customers in West Kalimantan.



September 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Sewa Pembangkit Diesel 10 MW oleh PLN Nusa Daya dengan PLN Unit Induk Wilayah P2B untuk menunjang keandalan sistem kelistrikan di Indonesia Timur.

Signing of a Cooperation Agreement for the Procurement of a 10 MW DPP lease between PLN Nusa Daya and PLN P2B Main Unit to support the reliability of the electricity system in Eastern Indonesia.



1 Oktober | October 2025

Penandatanganan dan peresmian pengoperasian pasokan listrik antara PLN Nusa Daya dengan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) dengan tarif I4 Daya 30.000.000 VA.

Signing and inauguration of electricity supply operations between PLN Nusa Daya and PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) under the I4 tariff with a capacity of 30,000,000 VA.



15 Oktober | October 2025

Penyaluran listrik gratis dan pemberian bantuan kepada Yayasan Yatim Piatu di 5 titik penyaluran di Balikpapan, Samarinda, dan Lombok.

Provision of free electricity and assistance to Orphanage Foundations across 5 distribution points in Balikpapan, Samarinda, and Lombok.



Oktober | October 2025

Penandatanganan Perjanjian Pengadaan Sewa Pembangkit Berbahan Bakar Biosolar Kapasitas 10 MW di lokasi PLTD Merawang oleh PLN Nusa Daya dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung untuk memperkuat keandalan listrik Bangka Belitung.

Signing of an Agreement for the Procurement of a 10 MW biosolar-fuelled power plant lease at the Merawang DPP location between PLN Nusa Daya and PT PLN (Persero) Main Unit for Bangka Belitung Region to strengthen electricity reliability in Bangka Belitung.



Oktober | October 2025

Penandatangaan PKS Pembangunan Jaringan DIstribusi PLN PT SGM-BBE 2 oleh PLN Nusa Daya dengan PT Sawit Graha Manunggal.

Signing of a Cooperation Agreement for the Development of the PLN PT SGM-BBE 2 Distribution Network between PLN Nusa Daya and PT Sawit Graha Manunggal.



23 Oktober | October 2025

Pelaksanaan acara *Green Energy as a Service for Sustainable Tourism* sebagai wujud komitmen PLN Nusa Daya dalam mendorong transformasi energi bersih dan menciptakan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Implementation of the Green Energy as a Service for Sustainable Tourism event, reflecting PLN Nusa Daya's commitment to advancing clean energy transformation and supporting sustainable tourism in West Nusa Tenggara.



Oktober | October 2025

Penandatanganan PKS oleh PLN Nusa Daya dengan PT Bank Mandiri (Persero) untuk meningkatkan sinergi dalam optimalisasi layanan keuangan bagi karyawan PLN Nusa Daya.

Signing of a Cooperation Agreement between PLN Nusa Daya and PT Bank Mandiri (Persero) to strengthen synergy in optimising financial services for PLN Nusa Daya employees.



November 2025

Penandatanganan PKS Strategis oleh PLN Nusa Daya dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk optimalisasi pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Layanan Operasi Distribusi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Signing of a Strategic Cooperation Agreement between PLN Nusa Daya and PT PLN (Persero) Main Unit for East Nusa Tenggara Region to optimise the management of Diesel Power Plants (DPP) and Distribution Operation Services in the East Nusa Tenggara region.



November 2025

Penandatanganan MoU oleh PLN Nusa Daya dengan PT Terang Wahana Hijau (Icon Green) untuk penyediaan dan pengoperasian sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Signing of an MoU between PLN Nusa Daya and PT Terang Wahana Hijau (Icon Green) for the provision and operation of SoPP systems.



28 November 2025

PLN Nusa Daya bersama PLN *Group* Balikpapan melaksanakan aksi penanaman 1.500 pohon di kawasan Wisata Meranti, Hutan Lindung Daerah Aliran Sungai/Waduk Manggar sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

PLN Nusa Daya, together with PLN Group Balikpapan, conducted a tree-planting activity involving 1,500 trees in the Meranti Tourism Area, Manggar Watershed/Reservoir Protected Forest, as part of efforts to maintain ecosystem balance.



Desember | December 2025

Pengiriman 12 Relawan Pelayanan Teknik oleh PLN Nusa Daya Unit Pelaksana Kalimantan 2 untuk ikut serta dalam upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, terutama dalam upaya pemulihan instalasi kelistrikan.

Deployment of 12 Technical Services volunteers by PLN Nusa Daya Kalimantan 2 Implementing Unit to support recovery efforts in disaster-affected areas in Aceh, particularly the restoration of electricity installations.



Desember | December 2025

Penyaluran bantuan berupa uang tunai, paket sembako, pakaian baru layak pakai, serta 1 unit *excavator mini* dan 1 unit *dump truck* kepada masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Distribution of assistance in the form of cash, basic food packages, new wearable clothing, one unit of mini excavator, and one unit of dump truck to communities affected by disasters in Sumatra, particularly in Kuala Simpang, Aceh Tamiang Regency, and surrounding areas.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan Tahun 2025



3-5 Februari 2025 | 3-5 February 2025

Penghargaan Juara 2 kepada Tim Pelayanan Teknik (Yantek) PLN Nusa Daya pada Ajang Yantek *National Competition* 2025 oleh PT PLN (Persero).
2nd Place Award presented to the PLN Nusa Daya Technical Services (Yantek) Team at the Yantek National Competition 2025, organised by PT PLN (Persero).



11 Juni 2025 | 11 June 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. *Top CSR Awards* 2025 – Star 5
2. *Top Leader on CSR Commitment* 2025 kepada Bapak Zulhendri selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital

Pada Ajang TOP CSR Awards 2025 oleh Majalah Top Business.

PLN Nusa Daya received two awards at the TOP CSR Awards 2025, organised by Top Business Magazine, comprising:
1. TOP CSR Awards 2025 – Star 5
2. Top Leader on CSR Commitment 2025, awarded to Mr. Zulhendri as Director of Finance, Risk Management & Human Capital.

Awards in 2025



27 Februari 2025 | 27 February 2025

Penghargaan kategori *Best Performance Improvement of the Year* pada Ajang *Portofolio Awards* 2025 dalam acara *Portofolio Leadership Forum* oleh PLN *Group*, Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis.
Best Performance Improvement of the Year award at the Portfolio Awards 2025, held during the Portfolio Leadership Forum, organised by PLN Group, Directorate of Corporate Planning and Business Development.



3 Juli 2025 | 3 July 2025

Penghargaan kategori *Operation and Maintenance Services Electricity (Central and East Indonesia)* pada Ajang *The Seventh Best Soe Subsidiaries Awards* 2025 oleh The Iconomics Media dan Axia Research.

PLN Nusa Daya received the Operation and Maintenance Services Electricity (Central and East Indonesia) award at The Seventh Best SOE Subsidiaries Awards 2025, organised by The Iconomics Media and Axia Research.



4 Juli 2025 | 4 July 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. *Finalist Best Non IPP Company on Renewable Energy*
2. *The Best Electric Vehicle Company on Charging Insfrastructure*

Pada Ajang *Indonesia Best Electricity Awards* 2025 oleh Majalah Listrik Indonesia.

PLN Nusa Daya received two awards at the Indonesia Best Electricity Awards 2025, organised by Listrik Indonesia Magazine, comprising:
1. Finalist Best Non-IPP Company on Renewable Energy
2. The Best Electric Vehicle Company on Charging Infrastructure.



8 Agustus 2025 | 8 August 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. Penghargaan 6th PR *Popular Companies Awards* 2025 kategori *Operation & Maintenance Service Electricity (Central & East Indonesia)*
2. Penghargaan *Popular PR Person Awards* 2025 – Bapak P. Gading Aji, N. P., selaku Sekretaris Perusahaan PLN Nusa Daya

Pada Ajang Indonesia *Public Relations Summit* 2025 oleh The Iconomics Media.

PLN Nusa Daya received two awards at the Indonesia Public Relations Summit 2025, organised by The Iconomics Media, comprising:
1. 6th PR Popular Companies Awards 2025 in the Operation & Maintenance Service Electricity (Central & East Indonesia) category
2. Popular PR Person Awards 2025, awarded to Mr. P. Gading Aji, N. P., as Corporate Secretary of PLN Nusa Daya.



8 September 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. *Top GRC Awards* 2025 – Star 4
2. *The Most Committed GRC Leader* 2025

Pada Ajang *TOP GRC Awards* 2025 oleh Majalah Top Business.

PLN Nusa Daya received two awards at the TOP GRC Awards 2025, organised by Top Business Magazine, comprising:
1. TOP GRC Awards 2025 – Star 4
2. The Most Committed GRC Leader 2025.



9-11 Oktober 2025 | 9-11 October 2025

Peraihan penghargaan Top 10 atas kolaborasi UP3 Toli Toli dengan PLN Nusa Daya dalam Ajang PLN *Marketing Awards* 2025 oleh PT PLN (Persero).

The Company received a Top 10 Award for the collaboration between UP3 Toli-Toli and PLN Nusa Daya at the PLN Marketing Awards 2025, organised by PT PLN (Persero).



9 Oktober 2025 | 9 October 2025

Peraihan dua penghargaan yaitu:
1. *Top 50 Most Innovative CEO Awards* kepada Bapak Feby Joko Priharto selaku Direktur Utama PLN Nusa Daya
2. *Top 20 Most Innovative CFO Awards* kepada Bapak Zulhendri selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital

Pada Ajang *The ICONOMICS* 2025 oleh The Iconomics Media.

PLN Nusa Daya received two awards at The Iconomics 2025, organised by The Iconomics Media, comprising:
1. Top 50 Most Innovative CEO Awards, awarded to Mr. Feby Joko Priharto as President Director of PLN Nusa Daya
2. Top 20 Most Innovative CFO Awards, awarded to Mr. Zulhendri as Director of Finance, Risk Management & Human Capital.



9 Oktober 2025 | 9 October 2025

Peraihan penghargaan Indonesia *Performance Excellence Awards* 2025 kategori *"Best in Class"* pada Ajang Indonesia *Quality Exellence Festival* 2025 oleh Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI) dan PT Wahana Kendali Mutu (WKM).

PLN Nusa Daya received the Indonesia Performance Excellence Awards 2025 in the "Best in Class" category at the Indonesia Quality Excellence Festival 2025, organised by the Indonesia Quality and Productivity Management Association (IQPMA) and PT Wahana Kendali Mutu (WKM).



21 Oktober 2025 | 21 October 2025

Peraihan penghargaan kategori "*Renewable Energy Pioneer*" pada Ajang ESG Now Awards 2025 oleh Republika.

PLN Nusa Daya received the "Renewable Energy Pioneer" award at the ESG Now Awards 2025, organised by Republika.

21 Oktober 2025 | 21 October 2025

Peraihan penghargaan kategori *"Best Support Implementation of Program Transformasi 2.0, Moonshoot Smart Power Plant"* kepada PLN Nusa Daya UP Kalimantan 2 pada Ajang Power Awards 2025 oleh PT PLN (Persero).

PLN Nusa Daya UP Kalimantan 2 received the "Best Support Implementation of Transformation Programme 2.0 – Moonshot Smart Power Plant" award at the Power Awards 2025, organised by PT PLN (Persero).



4 November 2025 | 4 November 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. *Top Human Capital Awards* 2025 – Star 5
2. *The High Performing Human Capital Director* 2025 kepada Bapak Zulhendri selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital

Pada Ajang *TOP Human Capital Awards* 2025 oleh Majalah Top Business.

PLN Nusa Daya received two awards at the TOP Human Capital Awards 2025, organised by Top Business Magazine, comprising::
1. TOP Human Capital Awards 2025 – Star 5
2. The High Performing Human Capital Director 2025, awarded to Mr. Zulhendri, Director of Finance, Risk Management & Human Capital.

20 November 2025

Peraihan penghargaan *Best Hybrid Power Plant Solution* pada Ajang Electricity Connect 2025 oleh PLN Group.

PLN Nusa Daya received the Best Hybrid Power Plant Solution award at Electricity Connect 2025, organised by PLN Group.



28 November 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. *Gold Rating* – Laporan Keberlanjutan 2024
2. *Commendation for First Year Participation*

Pada Ajang Asia *Sustainability Reporting Rating* 2025 oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).

PLN Nusa Daya received two awards at the Asia Sustainability Reporting Rating 2025, organised by the National Center for Corporate Reporting (NCCR) and the Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), comprising:
1. Gold Rating – 2024 Sustainability Report
2. Commendation for First-Year Participation.



8 Desember 2025 | 8 December 2025

Peraihan penghargaan Juara 2 kategori BUMN Klaster 1T – 5T pada Ajang *Annual Report Awards* 2024 oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

PLN Nusa Daya received the 2nd Place Award in the SOE Cluster 1T–5T category at the Annual Report Awards 2024, organised by the National Committee on Governance Policy (KNKG).



17 Desember 2025 | 17 December 2025

Peraihan dua penghargaan berupa:
1. Penghargaan Indonesia *Top Good Corporate Governance Awards* 2025
2. Penghargaan Indonesia *Best Corporate Secretary Awards* 2025

Pada Ajang *The Iconomics* oleh The Iconomics Media.

PLN Nusa Daya received two awards at The Iconomics, organised by The Iconomics Media, comprising:
1. Indonesia Top Good Corporate Governance Awards 2025
2. Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2025.

Sertifikasi Tahun 2025 [GRI 2-23]

Certifications in 2025


Sertifikat

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya - PLN Nusa Daya

SNI ISO 9001:2015; SNI ISO 14001:2015;SNI ISO 45001:2018;
SNI ISO 37001:2016;SNI ISO 55001:2014

dengan ruang lingkup

MOHAMAD SOLIKHUDIN
PLN General Manager

1 November 2024 - 31 Oktober 2027
1 November 2024 - 31 October 2027

PAS 99:2012 - Sistem Manajemen Terintegrasi
PAS 99:2012 - Integrated Management System

Badan Sertifikasi | Certification Body:
LMK Certification


Sertifikat

SISTEM MANAJEMEN ASET

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya - PLN Nusa Daya

SNI ISO 55001:2014

MOHAMAD SOLIKHUDIN
PLN General Manager

1 November 2024 - 31 Oktober 2027
1 November 2024 - 31 October 2027

ISO 55001:2014 - Manajemen Aset
ISO 55001:2014 - Asset Management

Badan Sertifikasi | Certification Body:
LMK Certification



1 November 2024 - 31 Oktober 2027
1 November 2024 - 31 October 2027

ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 - Quality Management System

Badan Sertifikasi | Certification Body:
LMK Certification



1 November 2024 - 31 Oktober 2027
1 November 2024 - 31 October 2027

ISO 14001:2015 - Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2015 - Environmental Management System

Badan Sertifikasi | Certification Body:
LMK Certification



1 November 2024 - 31 Oktober 2027
1 November 2024 - 31 October 2027

ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan
ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management System

Badan Sertifikasi | Certification Body:
LMK Certification



23 September 2024 - 1 September 2025

ISO 45001:2018 - SMK3 di seluruh region (7 region) dan Kantor Pusat dalam rangka Peningkatan Tata Kelola K3
ISO 37001:2016 - OHSMS in all regions (7 regions) and Head Office in Improving OHS Governance

Badan Sertifikasi | Certification Body:
Worldwide Quality Assurance (WQA)

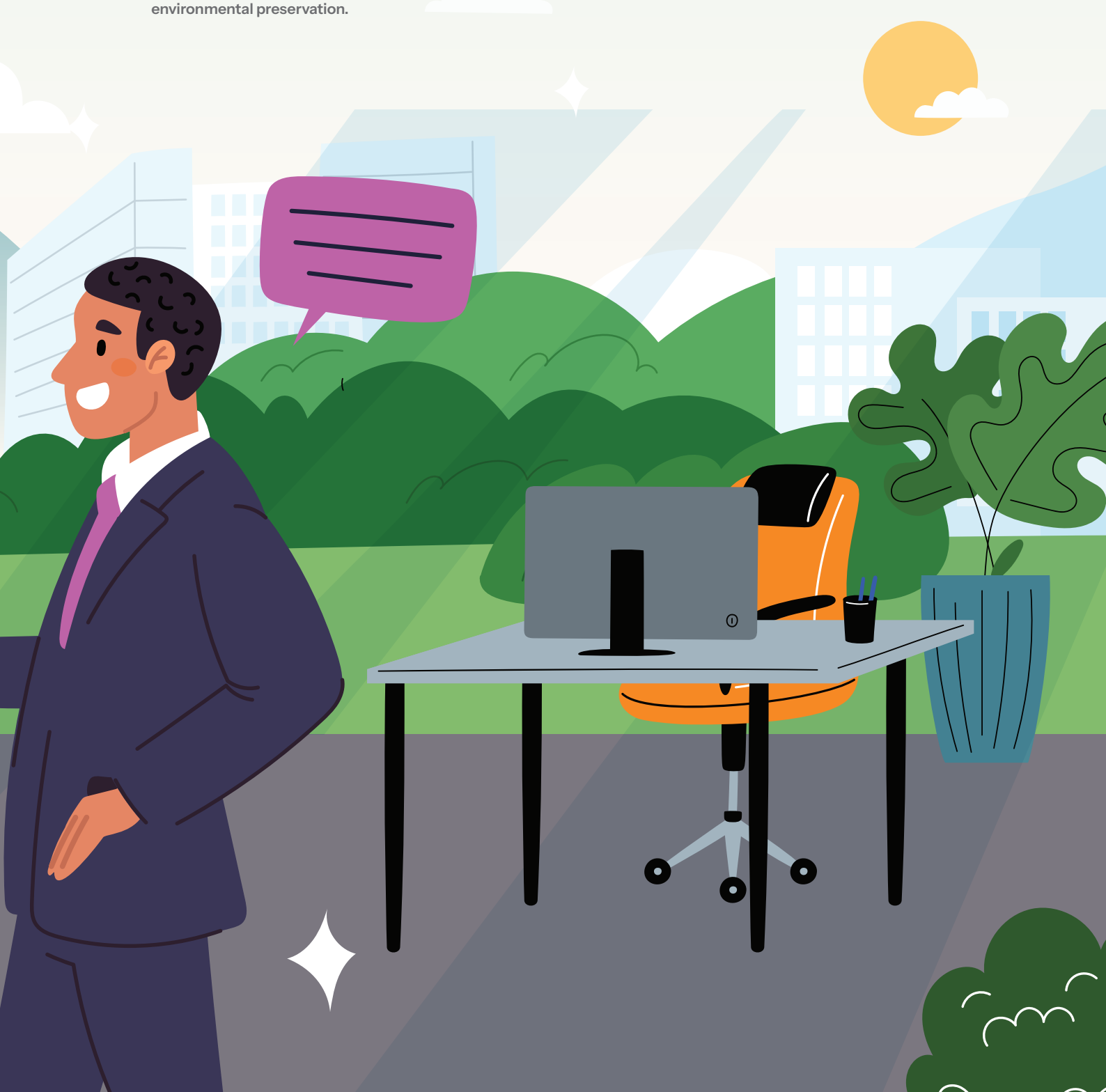
LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT



Bagi PLN Nusa Daya, tata kelola yang baik merupakan kunci untuk membangun kinerja yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu Perusahaan terus memperkuat penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap pengambilan keputusan dan proses bisnis, guna menghadirkan keseimbangan antara keunggulan operasional, tanggung jawab sosial, hingga kelestarian lingkungan.

PLN Nusa Daya recognises good governance as the foundation of reliable and sustainable performance. The Company therefore continues to embed Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across its decision-making and business processes, balancing operational excellence with social responsibility and environmental preservation.



Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners



Agung Nugraha
Komisaris Utama
President Commissioner

Pencapaian selama tahun 2025 menunjukkan peran PLN Nusa Daya yang semakin besar dalam mendukung kinerja konsolidasi PLN, khususnya sebagai pengelola aset kelistrikan dari hulu ke hilir di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

The achievements recorded in 2025 demonstrate PLN Nusa Daya's increasingly significant role in supporting PLN's consolidated performance, particularly as the manager of electricity assets from upstream to downstream, in Central and Eastern Indonesia.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT PLN Nusa Daya mampu melalui tahun buku 2025 dengan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika industri ketenagalistrikan, percepatan transisi energi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh insan PLN Nusa Daya atas dedikasi, integritas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Berbagai tantangan berhasil dikelola sehingga Perusahaan tetap mampu mempertahankan pertumbuhan usaha, meningkatkan kualitas layanan operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan, serta memberikan kontribusi terhadap transformasi PLN *Group*.

Sebagai bagian dari PLN *Group*, PLN Nusa Daya memiliki peran strategis dalam memastikan keandalan operasi pembangkit, transmisi, distribusi, serta berbagai layanan ketenagalistrikan lainnya. Dewan Komisaris memandang keberhasilan Perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian indikator keuangan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keandalan sistem, memperkuat tata kelola, meningkatkan keselamatan kerja, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kondisi Ekonomi Makro dan Industri Ketenagalistrikan Tahun 2025

Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun 2025 perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, tekanan inflasi di beberapa negara, serta

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

By the grace and blessings of God Almighty, PT PLN Nusa Daya successfully navigated the 2025 fiscal year while sustaining its performance amid the evolving dynamics of the electricity industry, the accelerating energy transition, technological advancements, and rising stakeholder expectations for good corporate governance implementation.

On behalf of the Board of Commissioners, we extend our appreciation to the Board of Directors and all PLN Nusa Daya personnel for their dedication, integrity, and hard work throughout 2025. The Company successfully managed various challenges, enabling it to sustain business growth, enhance the quality of electricity operation and maintenance services, and contribute to the transformation of PLN Group.

As part of PLN Group, PLN Nusa Daya has a strategic role in ensuring the operational reliability of power plants, transmission, distribution, and various other electricity services. The Board of Commissioners considers that the Company's success is measured not only by the achievement of financial indicators, but also by its ability to maintain system reliability, strengthen corporate governance, enhance occupational safety, develop human capital, and create sustainable added value for all stakeholders.

Macroeconomic Conditions and the Electricity Industry in 2025

The Board of Commissioners observed that the global economy continued to face various challenges throughout 2025 due to geopolitical uncertainty, fluctuations in energy prices, inflationary pressures in several countries, and

perubahan lanskap industri yang dipengaruhi oleh percepatan digitalisasi dan transisi menuju energi rendah karbon. Kondisi tersebut turut memengaruhi sektor ketenagalistrikan yang dituntut untuk semakin adaptif dalam menjaga keandalan sistem sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi.

Di tingkat nasional, kebutuhan energi listrik tetap menunjukkan tren pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju pencapaian *Net Zero Emissions* (NZE). Implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan kebutuhan layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit maupun jaringan ketenagalistrikan.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa PLN Nusa Daya berada pada posisi yang strategis untuk mendukung agenda transformasi PLN *Group*. Kompetensi Perusahaan dalam bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, serta pengembangan layanan beyond kWh menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga mencermati bahwa perubahan lingkungan bisnis membawa konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas pengelolaan risiko, kebutuhan investasi pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi digital, penguatan budaya keselamatan, serta peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar mampu mengantisipasi perubahan tersebut melalui strategi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi Tahun 2025

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan dengan baik sepanjang tahun 2025. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian Kontrak Manajemen dan RKAP, laporan manajemen berkala, kinerja keuangan dan operasional, implementasi strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, penerapan tata kelola, serta tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris.

Penilaian positif tersebut tercermin dari pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 102,26, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Dewan Komisaris mencermati masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama pada aspek keandalan aset dan profitabilitas. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk memperkuat efisiensi

changes in the industrial landscape driven by accelerating digitalisation and the transition towards low-carbon energy. These conditions also affected the electricity sector, which was required to become increasingly adaptive in maintaining system reliability while supporting the decarbonisation agenda.

At the national level, electricity demand continued to demonstrate a growth trend, in line with increased economic activity, infrastructure development, and the Government's commitment to accelerating the energy transition towards achieving Net Zero Emissions (NZE). The implementation of the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) was one of the key factors driving increased demand for operation and maintenance services for power plants and electricity networks.

In this context, the Board of Commissioners considers PLN Nusa Daya to be strategically positioned to support the transformation agenda of PLN Group. The Company's competencies in the operation and maintenance of power plants, transmission and distribution networks, as well as the development of beyond kWh services, represent important foundations for strengthening competitiveness and creating sustainable business growth.

Nevertheless, the Board of Commissioners also noted that changes in the business environment resulted in increasingly complex risk management, the need for investment in human capital competency development, the implementation of digital technology, the strengthening of the safety culture, and improvements in the quality of corporate governance. Accordingly, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to anticipate these changes through adaptive and innovative strategies focused on long-term value creation.

The Board of Commissioners' Assessment of the Board of Directors' Performance in 2025

Overall, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors performed its duties in managing the Company effectively throughout 2025. This assessment was based on an evaluation of the achievement of the Management Contract and WP&B targets, periodic management reports, financial and operational performance, implementation of the Company's strategies, risk management, corporate governance implementation, and follow-up actions on the directives and recommendations of the Board of Commissioners.

This positive assessment was reflected in the Organisational Performance Score of 102.26, an increase compared with the previous year. Nevertheless, the Board of Commissioners noted that several indicators remained below target, particularly those relating to asset reliability and profitability. Accordingly, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to

operasional, keandalan aset, pengendalian biaya, serta kualitas eksekusi strategi.

Pandangan Dewan Komisaris atas Strategi dan Kebijakan Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyusunan maupun implementasi strategi Perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi selaras dengan arah pengembangan PLN Group, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta mampu menjawab dinamika industri ketenagalistrikan yang terus berkembang.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi 4E yang terdiri atas *Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere,* dan *Establishing High Trust* merupakan kerangka strategis yang relevan dalam menjawab tantangan bisnis sekaligus mendukung transformasi PLN Nusa Daya menjadi perusahaan layanan ketenagalistrikan yang semakin adaptif, efisien, dan berdaya saing.

Dari aspek *Efficient Process*, Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai inisiatif peningkatan efisiensi proses bisnis telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan serta peningkatan produktivitas operasional. Pada aspek *Excellent Performance*, Dewan Komisaris menilai Direksi terus berupaya menjaga keandalan pengelolaan aset ketenagalistrikan melalui peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan.

Implementasi *Elegant Atmosphere* menunjukkan komitmen Direksi dalam membangun budaya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang semakin kuat. Sementara itu, *Establishing High Trust* diarahkan untuk memperkuat fondasi organisasi melalui pengembangan kompetensi SDM, peningkatan kualitas kepemimpinan, penguatan budaya AKHLAK, serta kolaborasi antarunit kerja.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai strategi yang diterapkan Direksi telah memberikan arah yang jelas bagi pertumbuhan Perusahaan. Namun demikian, implementasinya perlu terus dievaluasi secara berkala agar tetap responsif terhadap perubahan lingkungan usaha, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelanggan.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris mengapresiasi kemampuan Direksi dalam menjaga pertumbuhan kinerja keuangan Perusahaan sepanjang tahun 2025. Pendapatan usaha terealisasi sebesar Rp4,32 triliun atau sekitar 107% dari target RKAP. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan

strengthen operational efficiency, asset reliability, cost control, and the quality of strategy execution.

The Board of Commissioners' Views on the Strategies and Policies of the Board of Directors

Throughout 2025, the Board of Commissioners consistently performed its supervisory function over the formulation and implementation of the Company's strategies. This oversight was conducted to ensure that every strategic policy established by the Board of Directors was aligned with the development direction of PLN Group, the Company's Long-Term Plan (LTP), and the Company's Work Plan and Budget (WP&B), while remaining responsive to the evolving dynamics of the electricity industry.

The Board of Commissioners considers the 4E Strategy, comprising Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, and Establishing High Trust, to be a relevant strategic framework for addressing business challenges and supporting the transformation of PLN Nusa Daya into an increasingly adaptive, efficient, and competitive electricity services company.

With regard to Efficient Process, the Board of Commissioners considers that various initiatives to enhance business process efficiency contributed to revenue growth and increased operational productivity. Under Excellent Performance, the Board of Commissioners noted that the Board of Directors continued its efforts to maintain the reliability of electricity asset management by improving the quality of operations and maintenance.

The implementation of Elegant Atmosphere reflected the Board of Directors' commitment to fostering a stronger culture of occupational safety, health, and environmental stewardship. Meanwhile, Establishing High Trust was directed towards strengthening the Company's organisational foundations through human capital competency development, enhanced leadership quality, reinforcement of the AKHLAK culture, and collaboration among work units.

Overall, the Board of Commissioners considers that the strategies implemented by the Board of Directors provided clear direction for the Company's growth. Nevertheless, their implementation must continue to be evaluated periodically to ensure that they remain responsive to changes in the business environment, technological developments, and customer needs.

The Board of Commissioners' Assessment of Financial Performance

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' ability to sustain the growth of the Company's financial performance throughout 2025. The revenue was recorded at Rp4.32 trillion, equivalent to approximately 107% of the WP&B target. This achievement reflects the

dalam memanfaatkan peluang bisnis serta memperluas kontribusinya terhadap PLN Group.

Dewan Komisaris juga mencermati pertumbuhan aset Perusahaan yang mencapai sekitar Rp2,2 triliun, sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha, jumlah kontrak, dan kompleksitas proyek yang dikelola. Peningkatan aktivitas tersebut turut mendorong kebutuhan modal kerja dan biaya usaha. Biaya usaha tercatat sekitar 107% dari target RKAP, terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok pendapatan seiring bertambahnya volume pekerjaan dan kebutuhan pemeliharaan aset.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih tercatat sebesar Rp214,60 miliar atau sekitar 87% dari target RKAP. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian tersebut tetap menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Dewan Komisaris menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian agar peningkatan skala usaha dan pertumbuhan pendapatan dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap profitabilitas Perusahaan.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk semakin memperkuat kualitas pertumbuhan (quality of growth) melalui optimalisasi struktur biaya dan efisiensi operasional, pengelolaan modal kerja dan pengendalian piutang yang lebih efektif, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi usaha. Setiap pengembangan bisnis diharapkan didasarkan pada tingkat pengembalian yang memadai sehingga pertumbuhan pendapatan dapat dikonversi menjadi peningkatan profitabilitas dan penciptaan nilai Perusahaan secara berkelanjutan.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Operasional

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional sepanjang tahun 2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut perbaikan.

Equivalent Availability Factor (EAF) terealisasi sebesar 85,25% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 90,06%. Sementara itu, sejumlah indikator operasional menunjukkan capaian yang positif, antara lain EFOR sebesar 6,18%, lebih baik dari target 6,23%; *Response Time* sebesar 22,58 menit, lebih baik dari target 28,50 menit; *Recovery Time* sebesar 40,50 menit, lebih baik dari target 42,75 menit; serta LTIFR sebesar 0,074, lebih baik dari target 0,126. Adapun SLA terealisasi sebesar 99,23%, masih sedikit di bawah target 100%.

Atas capaian tersebut, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat preventive dan predictive maintenance, meningkatkan keandalan dan kesiapan aset, memastikan ketepatan pelaksanaan pemeliharaan periodik, serta meningkatkan efisiensi operasional. Budaya

Company's ability to capture business opportunities and expand its contribution to PLN Group.

The Board of Commissioners also noted that the Company's total assets reached approximately Rp2.2 trillion, in line with the increase in business activities, the number of contracts, and the complexity of the projects under management. The higher level of activity also resulted in increased working capital requirements and operating expenses. Operating expenses were recorded at approximately 107% of the WP&B target, primarily due to the increase in the cost of revenue in line with the higher volume of work and asset maintenance requirements.

In terms of profitability, net profit was recorded at Rp214.60 billion, or approximately 87% of the WP&B target. Although this result remained below the established target, it nevertheless represented growth compared with the previous year. The Board of Commissioners considers that this condition requires attention to ensure that the expansion of the Company's business scale and revenue growth make an increasingly optimal contribution to its profitability.

Going forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to further strengthen the quality of growth by optimising the cost structure and operational efficiency, improving working capital management and receivables control, and applying the principle of prudence in business expansion. Each business development initiative is expected to be based on an adequate rate of return, thereby enabling revenue growth to be converted into increased profitability and sustainable value creation for the Company.

The Board of Commissioners' Assessment of Operational Performance

The Board of Commissioners assessed that the Company's operational performance throughout 2025 generally demonstrated positive progress, although several indicators continued to require attention and appropriate follow-up actions.

The Equivalent Availability Factor (EAF) was recorded at 85.25%, representing 94.66% of the target of 90.06%. Meanwhile, several operational indicators delivered positive results, including EFOR of 6.18%, which was better than the target of 6.23%; Response Time of 22.58 minutes, which was better than the target of 28.50 minutes; Recovery Time of 40.50 minutes, which was better than the target of 42.75 minutes; and LTIFR of 0.074, which was better than the target of 0.126. SLA was recorded at 99.23%, slightly below the target of 100%.

Based on these achievements, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening preventive and predictive maintenance, improving asset reliability and readiness, ensuring the timely implementation of periodic maintenance, and enhancing operational efficiency.

keselamatan juga harus terus diperkuat agar menjadi nilai utama dalam setiap aktivitas Perusahaan dan mendukung pencapaian zero fatality secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Sepanjang tahun buku 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, serta berbagai ketentuan yang berlaku di lingkungan PLN Group. Fungsi pengawasan dijalankan secara independen, objektif, dan profesional guna memastikan Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Melalui dukungan tersebut, Dewan Komisaris memperoleh kajian dan telaah atas kebijakan strategis, laporan manajemen, efektivitas pengendalian internal, penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, serta berbagai isu strategis lainnya.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025 berlangsung secara konstruktif dan profesional dengan tetap mengedepankan prinsip checks and balances. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 44 kali rapat dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi realisasi RKAP, membahas laporan manajemen, memonitor pencapaian kinerja, menelaah pengelolaan risiko, serta memantau tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

Selain melalui mekanisme rapat, Direksi secara konsisten menyampaikan perkembangan pelaksanaan RKAP, kondisi operasional, proyek strategis, implementasi tata kelola, serta berbagai isu penting lainnya. Atas dasar informasi tersebut, Dewan Komisaris memberikan pandangan, arahan, rekomendasi, maupun persetujuan sesuai kewenangannya, antara lain terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik, rekomendasi penggunaan laba bersih, remunerasi Direksi, pemberian tanggapan dan rekomendasi atas RKAP Tahun 2026, investasi strategis, dan berbagai keputusan korporasi lainnya.

Pengawasan terhadap Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Dewan Komisaris memandang RKAP sebagai instrumen utama untuk memastikan strategi Perusahaan diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan memberikan nilai tambah. Pengawasan

The Board of Commissioners further emphasises that safety must be embedded as a core value across all Company activities to sustain the achievement of zero fatality.

Implementation of Supervisory Function and Working Relationship with the Board of Directors

Throughout the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners conducted its supervisory function as mandated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, and various applicable provisions within PLN Group. This supervisory function was performed independently, objectively, and professionally to ensure that the Board of Directors managed the Company in accordance with the principles of prudence and Good Corporate Governance, as well as in the interests of the Company and the Shareholder.

In performing its duties, the Board of Commissioners was supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee. With the support of these organs, the Board of Commissioners received analyses and reviews of strategic policies, management reports, the effectiveness of internal controls, governance implementation, risk management, and various other strategic issues.

Throughout 2025, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors remained constructive and professional, while continuing to uphold the principle of checks and balances. A total of 44 meetings were held during the year, with an attendance rate of 100%. These forums were utilised to evaluate WP&B implementation, discuss management reports, monitor performance achievements, review risk management, and oversee follow-up actions on the recommendations of the Board of Commissioners.

In addition to the meeting mechanism, the Board of Directors consistently reported on developments in WP&B implementation, operational conditions, strategic projects, governance implementation, and various other significant matters. Based on the information received, the Board of Commissioners provided views, directives, recommendations, and approvals in accordance with its prescribed authority, including those concerning the appointment of a Public Accounting Firm, the appropriation of net profit, remuneration of the Board of Directors, responses and recommendations on the 2026 WP&B, strategic investments, and various other corporate decisions.

Oversight of the Implementation of the Company's Work Plan and Budget (WP&B)

The Board of Commissioners regards the WP&B as the principal instrument through which the Company's strategy is translated into measurable and realistic work programmes designed to create added value. Oversight was conducted

dilakukan melalui pembahasan realisasi RKAP dalam rapat berkala dan rapat bersama Direksi, dengan fokus pada pencapaian target, efektivitas program kerja, realisasi anggaran, perkembangan proyek strategis, dan risiko yang berpotensi memengaruhi sasaran Perusahaan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap deviasi terhadap target memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang memadai dari Direksi. Pada akhir tahun buku, Dewan Komisaris menilai bahwa secara umum implementasi RKAP telah berjalan sesuai arah yang ditetapkan, tercermin dari pencapaian mayoritas indikator kinerja dalam Kontrak Manajemen maupun RKAP Tahun 2025.

Pengawasan terhadap Manajemen Risiko dan Penguatan Budaya Risiko

Dewan Komisaris memandang efektivitas penerapan manajemen risiko sebagai salah satu faktor penentu kesinambungan usaha, daya saing, dan pencapaian sasaran strategis Perusahaan. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan berkala dengan Direksi, evaluasi laporan manajemen, serta telaah Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2025, implementasi manajemen risiko menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, hasil audit masih mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan, terutama penyempurnaan kebijakan berbasis risiko, dokumentasi *risk-based decision making,* integrasi prosedur dengan *risk control matrix*, sosialisasi kebijakan, dan monitoring berkala. Sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, sedangkan beberapa rekomendasi strategis masih dalam proses penyelesaian dengan target implementasi pada tahun 2026.

Dewan Komisaris menekankan bahwa budaya risiko perlu terus diperkuat agar manajemen risiko tidak diposisikan semata-mata sebagai fungsi kepatuhan, tetapi menjadi bagian dari proses bisnis dan pengambilan keputusan. Direksi didorong untuk meningkatkan kematangan *Enterprise Risk Management* (ERM), memperkuat koordinasi antarunit, serta memastikan kebijakan strategis mempertimbangkan profil risiko Perusahaan secara memadai.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan dan Budaya Integritas

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai Perusahaan secara berkelanjutan.

through discussions on WP&B implementation at regular meetings and joint meetings with the Board of Directors, focusing on target achievement, the effectiveness of work programmes, budget realisation, the progress of strategic projects, and risks that could potentially affect the achievement of the Company's objectives.

The Board of Commissioners ensured that any deviations from the established targets received appropriate attention and follow-up from the Board of Directors. At the end of the fiscal year, the Board of Commissioners assessed that, overall, the WP&B had been implemented in accordance with the established direction, as reflected in the achievement of the majority of the performance indicators stipulated in the Management Contract and the 2025 WP&B.

Oversight of Risk Management and Strengthening of Risk Culture

The Board of Commissioners considers the effective implementation of risk management to be a key factor in ensuring business continuity, competitiveness, and achieving the Company's strategic objectives. Oversight was conducted through regular discussions with the Board of Directors, evaluations of management reports, and reviews by the Risk Management and Compliance Committee.

Based on its oversight throughout 2025, the Board of Commissioners noted positive progress in the implementation of risk management. Nevertheless, audit findings continued to identify several areas requiring further strengthening, particularly the refinement of risk-based policies, documentation of risk-based decision-making, integration of procedures with the risk control matrix, policy dissemination, and periodic monitoring. Most of the recommendations have been followed up, while several strategic recommendations remain in progress, with implementation targeted for 2026.

The Board of Commissioners emphasises that the risk culture must continue to be strengthened to ensure that risk management is not regarded merely as a compliance function, but is embedded in business processes and decision-making. The Board of Directors is encouraged to enhance the maturity of Enterprise Risk Management (ERM), strengthen inter-unit coordination, and ensure that the Company's risk profile is adequately considered in the formulation of strategic policies.

The Board of Commissioners' Views on the Implementation of Corporate Governance and an Integrity Culture

The Board of Commissioners believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as a fundamental basis for maintaining business sustainability, strengthening the confidence of the Shareholder and stakeholders, and creating sustainable value for the Company.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris mengawasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran melalui pembahasan laporan manajemen, evaluasi tata kelola, pemantauan tindak lanjut hasil audit, serta pemberian rekomendasi strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris juga mengapresiasi upaya penyempurnaan kebijakan internal, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan, termasuk penerapan rujukan tata kelola seperti PUG-KI dan ACGS.

Throughout 2025, the Board of Commissioners oversaw the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness through discussions of management reports, governance evaluations, monitoring of follow-up actions on audit findings, and the provision of strategic recommendations to the Board of Directors. The Board of Commissioners also appreciates the efforts made to refine internal policies and strengthen the internal control system, risk management, and compliance functions, including the adoption of governance references such as Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) and ACGS.

Budaya integritas terus diperkuat melalui Kode Etik, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, kebijakan *Anti-Fraud*, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta mekanisme *Whistleblowing System*. Dewan Komisaris memandang instrumen tersebut harus terus diinternalisasikan agar tidak berhenti sebagai perangkat kepatuhan, melainkan menjadi bagian dari perilaku dan budaya organisasi yang menjunjung profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan nilai AKHLAK.

The integrity culture continued to be strengthened through the Code of Conduct, the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016, the Anti-Fraud Policy, gratuity control, conflict of interest management, and the Whistleblowing System. The Board of Commissioners considers that these instruments should continue to be internalised across the organisation to ensure that they are not limited to fulfilling compliance requirements, but are firmly embedded in organisational conduct and culture that uphold professionalism, transparency, accountability, and the AKHLAK values.

Pengawasan terhadap Implementasi ESG, Keselamatan Kerja, dan Keberlanjutan

Oversight of ESG Implementation, Occupational Safety, and Sustainability

Dewan Komisaris memandang implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai faktor strategis yang menentukan keberlanjutan, daya saing, dan kemampuan Perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan perhatian terhadap integrasi ESG ke dalam strategi bisnis, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan operasional.

The Board of Commissioners considers the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles a strategic factor in determining the Company's sustainability, competitiveness, and ability to create long-term value. Accordingly, the Board of Commissioners paid particular attention to the integration of ESG principles into the business strategy, decision-making, risk management, and operations.

Dari aspek lingkungan, Dewan Komisaris mengapresiasi inisiatif efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan melalui *Photovoltaic Rooftop* dan *Hybrid Power System*, rehabilitasi lingkungan melalui penanaman 4.000 pohon, serta penguatan pengelolaan limbah dan sumber daya air.

From an environmental perspective, the Board of Commissioners appreciates the Company's initiatives in energy efficiency, greenhouse gas emissions reduction, the utilisation of renewable energy through Photovoltaic Rooftop and Hybrid Power System, environmental rehabilitation through the planting of 4,000 trees, and the strengthening of waste and water resource management.

Dari aspek sosial, perhatian diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, kepuasan pelanggan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dewan Komisaris juga mencermati hasil audit implementasi K3L yang masih menunjukkan beberapa area perbaikan, antara lain penguatan budaya keselamatan, efektivitas monitoring, dokumentasi, aplikasi pendukung keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur.

From a social perspective, attention was directed towards human capital development, occupational health and safety, customer satisfaction, and the implementation of Corporate Social and Responsibility (CSR). The Board of Commissioners also noted that the results of the HSE implementation audit continued to identify several Areas of Improvement, including the strengthening of the safety culture, monitoring effectiveness, documentation, occupational safety support applications, and more structured environmental management.

Dari aspek tata kelola, Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan terus memperkuat integrasi prinsip ESG ke dalam kerangka tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses pengambilan keputusan.

From a governance perspective, the Board of Commissioners considers that the Company continued to strengthen the integration of ESG principles into its governance framework, risk management, internal controls, and decision-making

Penguatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan tidak berdiri sebagai program tersendiri, tetapi menjadi bagian integral dari pengelolaan dan strategi Perusahaan. Ke depan, Direksi didorong untuk meningkatkan kematangan ESG melalui indikator kinerja keberlanjutan yang lebih terukur, tata kelola data ESG, kualitas pengungkapan, serta integrasi ESG ke dalam perencanaan strategis, investasi, dan pengelolaan risiko.

Pengawasan terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Audit

Dewan Komisaris memandang efektivitas sistem pengendalian internal sebagai elemen penting dalam menjaga keandalan proses bisnis, kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan, dan perlindungan aset Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang secara berkala membahas hasil Audit Internal, efektivitas pengendalian internal, serta tindak lanjut rekomendasi audit.

Sepanjang tahun 2025, audit operasional, audit tematik, audit berbasis risiko, audit implementasi K3L, audit pengembangan bisnis beyond kWh, maupun audit pada anak perusahaan menghasilkan sejumlah Area of Improvement. Dewan Komisaris mencermati bahwa sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

Dewan Komisaris tetap menekankan agar penyelesaian rekomendasi audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan (*sustainable improvement*). Hasil audit juga perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran organisasi (*organizational learning*) untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

Evaluasi Dewan Komisaris atas Penciptaan Nilai Jangka Panjang

Dewan Komisaris berpandangan bahwa keberhasilan PLN Nusa Daya tidak semata-mata diukur dari pencapaian target keuangan dan operasional dalam satu tahun buku, tetapi juga dari kemampuan Perusahaan membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan Direksi telah mengarah pada penciptaan nilai jangka panjang. Hal tersebut tercermin melalui penguatan keandalan sistem ketenagalistrikan, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan layanan *beyond* kWh, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko, serta integrasi prinsip ESG dalam pengelolaan Perusahaan.

processes. Such strengthening is essential to ensure that sustainability is not treated as a standalone programme, but instead forms an integral part of the Company's management and strategy. Going forward, the Board of Directors is encouraged to enhance ESG maturity through more measurable sustainability performance indicators, ESG data governance, disclosure quality, and the integration of ESG considerations into strategic planning, investment, and risk management.

Oversight of the Effectiveness of Internal Control System and Audit

The Board of Commissioners considers an effective internal control system essential to maintaining the reliability of business processes, the quality of financial reporting, compliance, and the protection of the Company's assets. In performing this function, the Board of Commissioners was supported by the Audit Committee, which periodically reviewed internal audit results, the effectiveness of internal controls, and follow-up actions on audit recommendations.

Throughout 2025, operational audits, thematic audits, risk-based audits, audits of HSE implementation, audits of beyond kWh business development, and audits of subsidiaries identified a number of Areas of Improvement. The Board of Commissioners noted that the majority of the recommendations had been followed up and declared complete.

The Board of Commissioners continues to emphasise that follow-up actions on audit recommendations should not be merely administrative, but should result in genuine and sustainable improvements to business processes. Audit findings should also be utilised as a source of organisational learning to prevent the recurrence of similar issues.

The Board of Commissioners' Assessment of Long-Term Value Creation

The Board of Commissioners considers that PLN Nusa Daya's success is measured not only by the achievement of financial and operational targets within a single fiscal year, but also by the Company's ability to establish a foundation for sustainable growth and create long-term value for the Shareholder and all stakeholders.

Based on its oversight throughout 2025, the Board of Commissioners considers that the various transformation initiatives implemented by the Board of Directors have contributed to long-term value creation. This was reflected in the strengthening of electricity system reliability, improvements in operational efficiency, the development of beyond kWh services, the utilisation of digital technology, the development of new and renewable energy, the enhancement of human capital competencies, the strengthening of risk management, and the integration of ESG principles into the Company's management.

Dewan Komisaris memandang bahwa penciptaan nilai jangka panjang harus terus menjadi orientasi utama dalam setiap keputusan strategis. Setiap investasi, pengembangan bisnis, inovasi, maupun transformasi organisasi perlu memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat daya saing, ketahanan usaha, kualitas lingkungan dan sosial, serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Sepanjang tahun 2025, masing-masing komite telah menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan.

Komite Audit memberikan dukungan dalam penelaahan laporan keuangan, evaluasi efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan Audit Internal dan eksternal, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit. Komite Nominasi dan Remunerasi berkontribusi dalam pengawasan kebijakan nominasi dan remunerasi, pengembangan talenta, serta pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan berperan dalam penelaahan profil dan strategi risiko, penerapan manajemen risiko, kepatuhan, serta penguatan tata kelola terintegrasi.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa dukungan ketiga komite tersebut telah meningkatkan kedalaman kajian dan kualitas rekomendasi sebagai dasar bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Keberadaan komite juga mendukung identifikasi dan pemantauan berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi program kerja, kualitas telaah dan rekomendasi, serta kontribusi masing-masing komite dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sepanjang tahun 2025.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong seluruh komite untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi secara lebih sistematis, serta pendalaman kajian terhadap isu strategis, aspek ESG, dan berbagai faktor yang dapat memengaruhi

The Board of Commissioners considers that long-term value creation must remain the primary focus of every strategic decision. Every investment, business development, innovation, and organisational transformation should deliver economic benefits while strengthening competitiveness, business resilience, environmental and social performance, and stakeholder trust.

The Board of Commissioners' Assessment of the Performance of Committees under the Board of Commissioners

In performing its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners was supported by the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee. Throughout 2025, each committee performed its functions in accordance with its respective duties and responsibilities and supported the Board of Commissioners in enhancing the quality of oversight of the Company's management.

The Audit Committee supported the review of financial statements, evaluation of the effectiveness of internal controls, oversight of the implementation of internal and external audits, and monitoring of follow-up actions on audit findings. The Nomination and Remuneration Committee contributed to the oversight of nomination and remuneration policies, talent development, and human capital management. Meanwhile, the Risk Management and Compliance Committee supported the review of the Company's risk profile and strategy, the implementation of risk management and compliance, and the strengthening of integrated governance.

The Board of Commissioners considers that the support provided by the three committees enhanced the depth of its reviews and the quality of recommendations used as a basis for conducting its supervisory and advisory functions towards the Board of Directors. The committees also supported the identification and monitoring of various strategic issues requiring the attention of the Board of Commissioners.

Based on its evaluation of the implementation of work programmes, the quality of reviews and recommendations, and the contribution of each committee to the discharge of its supervisory functions, the Board of Commissioners considers that the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee performed their duties and responsibilities effectively throughout 2025.

Going forward, the Board of Commissioners encourages all committees to continue enhancing the effectiveness of their duties, particularly by strengthening risk-based oversight, systematically monitoring follow-up actions on recommendations, and conducting more in-depth reviews of strategic issues, ESG aspects, and various

keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai Perusahaan dalam jangka panjang.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Usaha Tahun 2026

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2026 akan menghadirkan tantangan sekaligus peluang pertumbuhan bagi PLN Nusa Daya. Meskipun ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan percepatan perkembangan teknologi diperkirakan masih berlanjut, prospek industri ketenagalistrikan nasional tetap positif sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan energi listrik, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan transisi energi.

Pelaksanaan RUPTL 2025-2034 dipandang sebagai salah satu katalis yang dapat mendorong kebutuhan layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, serta infrastruktur pendukung sistem ketenagalistrikan. Pengembangan energi baru dan terbarukan, digitalisasi sistem ketenagalistrikan, pemanfaatan *Artificial Intelligence*, dan kebutuhan layanan operasi yang semakin efisien juga membuka ruang bagi Perusahaan untuk memperluas portofolio bisnis.

Dewan Komisaris memandang prospek yang disusun Direksi relevan dengan arah perkembangan industri dan kompetensi inti Perusahaan. Namun demikian, realisasi peluang tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengendalian biaya, produktivitas aset, inovasi, dan disiplin eksekusi agar pertumbuhan benar-benar memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Arahan Strategis Dewan Komisaris kepada Direksi

Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris memberikan sejumlah arahan strategis kepada Direksi. Pertama, memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan produktivitas, efektivitas pengelolaan biaya, optimalisasi aset, dan kualitas pengelolaan proyek agar pertumbuhan pendapatan diikuti peningkatan profitabilitas.

Kedua, mempercepat transformasi digital pada proses operasi, pemeliharaan, pengelolaan aset, keuangan, pengadaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, terus memperkuat budaya keselamatan kerja (*safety culture*) agar keselamatan menjadi nilai utama dalam setiap aktivitas dan mendukung pencapaian *zero accident* serta *zero fatality*.

Keempat, mempercepat pengembangan kompetensi SDM melalui penguatan kepemimpinan, kapasitas talenta, kompetensi digital, dan budaya organisasi yang adaptif. Kelima, memperkuat penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis.

factors that may affect the Company's long-term business sustainability and value creation.

The Board of Commissioners' Views on the 2026 Business Prospects

The Board of Commissioners considers that 2026 will present both challenges and growth opportunities for PLN Nusa Daya. Although global economic uncertainty, geopolitical developments, energy price volatility, and rapid technological advancement are expected to persist, the outlook for the national electricity industry remains positive, supported by growing demand for electricity, infrastructure development, and energy transition policies.

The implementation of the RUPTL 2025–2034 is viewed as one of the catalysts expected to drive demand for operation and maintenance services for power plant, transmission, distribution, and supporting electricity system infrastructure. The development of new and renewable energy, the digitalisation of the electricity system, the utilisation of Artificial Intelligence, and the growing demand for more efficient operational services also provide opportunities for the Company to expand its business portfolio.

The Board of Commissioners considers the business prospects prepared by the Board of Directors to be relevant to the direction of industry development and the Company's core competencies. Nevertheless, the realisation of these opportunities must be supported by stronger governance, human capital competencies, risk management, cost control, asset productivity, innovation, and execution discipline to ensure that growth delivers sustainable added value.

Strategic Directives of the Board of Commissioners to the Board of Directors

Entering 2026, the Board of Commissioners issued a number of strategic directives to the Board of Directors. First, the Company should strengthen its business fundamentals by enhancing productivity, cost management effectiveness, asset optimisation, and the quality of project management to ensure that revenue growth is accompanied by increased profitability.

Second, the Company should accelerate digital transformation across its operations, maintenance, asset management, finance, procurement, and data-driven decision-making processes. Third, the Company should continue to strengthen its safety culture, ensuring that safety becomes a core value in every activity and supports the achievement of zero accidents and zero fatalities.

Fourth, the Company should accelerate human capital competency development by strengthening leadership, talent capabilities, digital competencies, and an adaptive organisational culture. Fifth, the Company should strengthen the implementation of integrated risk management within its business processes and strategic decision-making.

Keenam, meningkatkan kualitas implementasi GCG melalui penguatan pengendalian internal, keterbukaan informasi, optimalisasi peran organ tata kelola, dan penyelesaian *Area of Improvement* hasil audit maupun asesmen tata kelola. Ketujuh, memperluas peluang bisnis yang sejalan dengan kompetensi inti Perusahaan, khususnya layanan *beyond* kWh, operasi dan pemeliharaan energi baru terbarukan, layanan berbasis digital, serta peluang lain yang mendukung transformasi PLN Group.

Sixth, the Company should improve the quality of GCG implementation by strengthening internal controls, enhancing information transparency, optimising the roles of governance bodies, and addressing Areas of Improvement identified through audits and governance assessments. Seventh, the Company should expand business opportunities aligned with its core competencies, particularly beyond kWh services, new and renewable energy operation and maintenance, digital-based services, and other opportunities that support the transformation of PLN Group.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2025, jabatan Komisaris Utama tetap dijabat oleh Agung Nugraha.

Changes in the Composition of the Board of Directors

Throughout 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners remained unchanged. As at 31 December 2025, Mr. Agung Nugraha continued to serve as President Commissioner.

Apresiasi Dewan Komisaris

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh insan PLN Nusa Daya atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemegang Saham, PT PLN (Persero), pelanggan, regulator, pemerintah, mitra kerja, auditor, lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada PLN Nusa Daya.

Kepercayaan tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi Perusahaan untuk terus berkembang, memperkuat daya saing, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional.

The Board of Commissioners' Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, we extend our highest appreciation to the Board of Directors and all PLN Nusa Daya personnel for their dedication, professionalism, and commitment throughout 2025.

We would also like to express our gratitude to the Shareholder, PT PLN (Persero), as well as customers, regulators, the Government, business partners, auditors, financial institutions, and all other stakeholders for the trust, support, and cooperation extended to PLN Nusa Daya.

This trust represents an invaluable foundation for the Company to continue growing, strengthen its competitiveness, and make an increasingly significant contribution to the development of the national electricity sector.

Balikpapan, 25 Juni | June 2026

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioner



Agung Nugraha
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors



Feby Joko Priharto
Direktur Utama
President Director

Pencapaian selama tahun 2025 menunjukkan peran PLN Nusa Daya yang semakin besar dalam mendukung kinerja konsolidasi PLN, khususnya sebagai pengelola aset kelistrikan dari hulu ke hilir di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

The achievements recorded in 2025 demonstrate PLN Nusa Daya's increasingly significant role in supporting PLN's consolidated performance, particularly as the manager of electricity assets from upstream to downstream, in Central and Eastern Indonesia.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT PLN Nusa Daya dapat menutup tahun buku 2025 dengan capaian kinerja yang positif, pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, serta kondisi keuangan yang sehat. Pencapaian tersebut diraih di tengah dinamika lingkungan usaha yang semakin kompleks, tantangan ekonomi global yang masih berlanjut, serta transformasi sektor energi yang berlangsung secara cepat.

Laporan Direksi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan selama tahun buku 2025, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai langkah strategis, capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri

Tahun 2025 ditandai dengan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh meningkatnya proteksionisme perdagangan, fragmentasi geopolitik, serta dinamika transisi energi di berbagai negara. International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,2% pada tahun 2025 dan 3,1% pada tahun 2026, dibandingkan realisasi 3,3% pada tahun 2024. Perlambatan tersebut terjadi seiring penyesuaian ekonomi dunia terhadap kebijakan perdagangan yang lebih protektif, meskipun tekanan tersebut relatif mereda dibandingkan proyeksi sebelumnya berkat moderasi eskalasi tarif di beberapa kawasan utama.

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to God Almighty for His mercy and grace, which have enabled PT PLN Nusa Daya to close the 2025 fiscal year with positive performance, sustainable business growth and a sound financial position. These achievements were attained amid an increasingly complex business environment, ongoing global economic challenges, and the rapid transformation of the energy sector.

This Board of Directors' Report has been prepared as a form of accountability for the management of the Company during the 2025 fiscal year, as well as a means of communicating the Company's strategic initiatives, performance achievements, challenges encountered and efforts undertaken to create added value for the Company and its stakeholders.

Macroeconomic and Industry Overview

The year 2025 was marked by persistently high global economic uncertainty, driven by rising trade protectionism, geopolitical fragmentation and the dynamics of the energy transition across various countries. In its World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) projected that global economic growth would slow to 3.2% in 2025 and 3.1% in 2026, compared with actual growth of 3.3% in 2024. This slowdown occurred as the global economy adjusted to more protectionist trade policies, although pressures eased somewhat compared with previous projections, supported by a moderation in tariff escalation in several key regions.

Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7%–5,5% dan berpotensi meningkat menjadi 4,9%–5,7% pada tahun 2026. Stabilitas harga juga tetap terjaga dengan inflasi yang diperkirakan berada pada kisaran sasaran 2,5±1%. Berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan melalui hilirisasi sumber daya alam, industrialisasi, peningkatan pembiayaan ekonomi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan percepatan digitalisasi.

Kondisi makroekonomi yang relatif stabil tersebut memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagalistrikan nasional. Pertumbuhan aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan energi di berbagai wilayah mendorong permintaan terhadap pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Di sisi lain, agenda transisi energi yang terus didorong Pemerintah melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dekarbonisasi sektor energi, serta digitalisasi sistem kelistrikan semakin meningkatkan kebutuhan akan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance*/O&M) yang profesional, efisien, dan berbasis teknologi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, serta layanan pendukung ketenagalistrikan, PLN Nusa Daya berada pada posisi yang strategis untuk mendukung transformasi sektor energi nasional tersebut. Keandalan aset pembangkit dan jaringan kelistrikan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pasokan listrik kepada masyarakat dan sektor industri. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap layanan O&M yang berkualitas terus meningkat seiring bertambahnya kapasitas pembangkit, perluasan jaringan, serta implementasi teknologi digital dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan.

Selain peluang pertumbuhan, industri jasa operasi dan pemeliharaan juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan standar keselamatan dan keandalan operasi, kebutuhan penguasaan teknologi baru, tuntutan efisiensi biaya, serta kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan industri energi. Perusahaan merespons tantangan tersebut melalui penguatan kapabilitas organisasi, penerapan digitalisasi proses bisnis, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan, keandalan, dan inovasi.

Amid these global challenges, the Indonesian economy continued to demonstrate strong resilience. National economic growth in 2025 was projected to be in the range of 4.7%–5.5%, with the potential to increase to 4.9%–5.7% in 2026. Price stability was also maintained, with inflation expected to remain within the target range of 2.5±1%. Various policies implemented by the Government and Bank Indonesia were aimed at maintaining macroeconomic stability while strengthening growth momentum through the downstream processing of natural resources, industrialisation, increased economic financing, the strengthening of the people's economy and the acceleration of digitalisation.

These relatively stable macroeconomic conditions had a positive impact on the national electricity sector. Growth in industrial activity, infrastructure development and rising energy demand across various regions drove the need for a reliable and sustainable electricity supply. At the same time, the energy transition agenda, which continues to be promoted by the Government through the development of new and renewable energy (NRE), energy sector decarbonisation, and electricity system digitalisation, further increased the need for professional, efficient, and technology-based operation and maintenance (O&M) services.

As a company dedicated to the operation and maintenance of power plant, transmission, and distribution facilities, as well as supporting services for the electricity sector, PLN Nusa Daya is strategically positioned to support the transformation of the national energy sector. The reliability of power plant assets and electricity networks is a key factor in maintaining the quality of electricity supply for the public and the industrial sector. Accordingly, demand for high-quality O&M services continues to increase in line with growing power plant capacity, electricity network expansion, and the application of digital technologies in electricity system management.

In addition to growth opportunities, the O&M services industry also faces various challenges, including increasingly stringent safety and operational reliability standards, the need to master new technologies, demands for cost efficiency, and the need to develop human capital competencies that are able to adapt to developments in the energy industry. Companies are responding to these challenges by strengthening organisational capabilities, digitalising business processes, enhancing workforce competencies, and fostering a work culture focused on safety, reliability, and innovation.

Dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif serta meningkatnya kebutuhan terhadap layanan ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan, PLN Nusa Daya memandang tahun 2025 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis PLN Group dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung agenda transformasi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan 2025

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PLN Nusa Daya secara konsisten mengacu pada arah strategis dan kebijakan portofolio yang telah ditetapkan secara terintegrasi dalam ekosistem PLN Group. Sebagai bagian dari PLN Group, Perusahaan berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran strategis *Holding* maupun *Subholding* melalui penyediaan layanan operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi "Perusahaan Layanan Ketenagalistrikan Terkemuka se-Asia Tenggara", PLN Nusa Daya menetapkan empat aspirasi utama yang menjadi fondasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perusahaan sepanjang tahun 2025. Keempat aspirasi tersebut dirumuskan dalam konsep 4E, yang menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

1. ***Efficient Process***
   Menghasilkan layanan ketenagalistrikan yang optimal dari aspek biaya dan risiko, mendukung unit PLN untuk menghasilkan tenaga listrik yang optimum/ generating low cost energy, serta menstimulasi pertumbuhan melalui layanan bisnis *beyond* kWh. Perusahaan berupaya mewujudkan proses bisnis yang efisien dan bernilai tambah melalui optimalisasi biaya, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan produktivitas operasional. Aspirasi ini diarahkan untuk mendukung unit-unit PLN dalam menyediakan energi listrik yang kompetitif melalui penciptaan biaya pembangkitan yang lebih efisien (*generating low-cost energy*). Selain itu, PLN Nusa Daya terus mengembangkan peluang usaha baru guna memperluas sumber pendapatan dan memperkuat keberlanjutan bisnis di luar model bisnis konvensional.

Amid a positive national economic outlook and rising demand for reliable and sustainable electricity services, PLN Nusa Daya views 2025 as an important milestone in strengthening its role as a strategic partner of the PLN Group in maintaining the reliability of the national electricity system, while supporting Indonesia's energy transformation agenda towards a more sustainable future.

Company Strategy and Policy in 2025

In conducting its business activities, PT PLN Nusa Daya consistently adheres to the strategic direction and portfolio policies established as an integral part of the PLN Group ecosystem. As part of the PLN Group, the Company is committed to supporting the achievement of the strategic objectives of both the Holding Company and the Subholding through the provision of reliable, efficient and sustainable electricity operation and maintenance services.

In line with its vision to become the "Leading Electricity Services Company in South-East Asia", PLN Nusa Daya has established four key aspirations that serve as the foundation for the formulation of the Company's strategies and policies throughout 2025. These four aspirations are embodied in the 4E concept, which serves as a guiding principle for all Company personnel in creating added value for customers, shareholders, and stakeholders.

1. **Efficient Process**
   This aspiration focuses on delivering electricity services that are optimal in terms of cost and risk, supporting PLN units in generating low cost energy, and driving growth through business services beyond kWh. The Company strives to establish efficient and value-adding business processes through cost optimisation, effective risk management, and improved operational productivity. This aspiration is intended to support PLN units in providing competitive electricity through the creation of more efficient generation costs, or low-cost energy. In addition, PLN Nusa Daya continues to develop new business opportunities to expand revenue streams and strengthen business sustainability beyond conventional business models.

2. ***Excellent Performance***
Peningkatan kinerja aset fisik yang dikelola oleh PLN-ND dalam aspek *Reliability*, *Availability*, dan *Maintanability* hingga mencapai kondisi *best practice* dan dihasilkan pemenuhan *Service Level Agreement* 100%. PLN Nusa Daya berkomitmen untuk menghadirkan kinerja operasional yang unggul melalui pengelolaan aset ketenagalistrikan yang andal, tersedia secara optimal, dan mudah dipelihara. Berbagai program peningkatan keandalan, efisiensi pemeliharaan, serta penerapan praktik terbaik (*best practices*) dilakukan untuk memastikan seluruh layanan memenuhi atau melampaui target *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan. Aspirasi ini menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan pelanggan sekaligus mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

3. ***Elegant Atmosphere***
Penciptaan lingkungan kerja dalam instalasi ketenagalistrikan PLN-ND yang aman, nyaman serta berwawasan lingkungan dengan tujuan melebihi standar peraturan K3L yang ada/ *beyond compliance.*
Perusahaan menempatkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. Melalui aspirasi ini, PLN Nusa Daya berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif, dan ramah lingkungan di seluruh unit kerja dan instalasi ketenagalistrikan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mendorong penerapan budaya keselamatan yang melampaui standar kepatuhan (*beyond compliance*) sebagai bagian dari upaya mewujudkan operasi yang berkelanjutan.

4. ***Establishing High Trust***
Peningkatan keterikatan hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis PLN-ND melalui kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dan kesiapan organisasi dalam aspek *alignment*, *leadership*, *culture*, & *team work*. Keberhasilan Perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat kepercayaan yang terbangun di dalam organisasi. Oleh karena itu, PLN Nusa Daya terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas insan perusahaan melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas kepemimpinan, penguatan budaya kerja berbasis nilai AKHLAK, serta pembangunan kolaborasi yang harmonis dan produktif. Aspirasi ini bertujuan menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. **Excellent Performance**
This aspiration focuses on improving the performance of physical assets managed by PLN Nusa Daya in terms of Reliability, Availability, and Maintainability, in order to achieve best-practice standards and ensure 100% compliance with the Service Level Agreement. PLN Nusa Daya is committed to delivering excellent operational performance through the management of electricity assets that are reliable, optimally available, and maintainable. Various programmes to improve reliability, maintenance efficiency, and the implementation of best practices are carried out to ensure that all services meet or exceed the established Service Level Agreement (SLA) targets. This aspiration forms the foundation for maintaining customer trust while supporting the reliability of the national electricity system.

3. **Elegant Atmosphere**
This aspiration focuses on creating a safe, comfortable, and environmentally responsible working environment within PLN Nusa Daya's electricity installations, with the aim of exceeding applicable OHS and environmental standards, beyond compliance. The Company prioritises occupational health, safety and the environment in all operational activities. Through this commitment, PLN Nusa Daya strives to create a safe, comfortable, productive, and environmentally friendly working environment across all work units and power facilities. The Company not only focuses on regulatory compliance, but also promotes a safety culture that goes beyond compliance as part of its efforts to achieve sustainable operations.

4. Establishing High Trust
This aspiration focuses on strengthening the bond between the Company and its workforce to support the achievement of PLN Nusa Daya's strategic objectives through human capital readiness in terms of capacity and capability, as well as organisational readiness in the areas of alignment, leadership, culture, & teamwork. The Company's success is largely determined by the quality of its human capital and the level of trust built within the organisation. Therefore, PLN Nusa Daya continues to strengthen the capacity and capabilities of its workforce through competency development, leadership enhancement, reinforcement of a work culture based on the AKHLAK values, and the development of harmonious and productive collaboration. This aspiration aims to create a resilient and adaptive organisation that is trusted by all stakeholders.

Direksi meyakini bahwa setiap program strategis, inisiatif transformasi, dan proyek usaha yang dijalankan sepanjang tahun 2025 memiliki kontribusi penting dalam mendukung pertumbuhan kinerja PLN Group secara berkelanjutan. Dengan dukungan Dewan Komisaris, manajemen, dan seluruh insan PLN Nusa Daya, Perusahaan terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara disiplin dan konsisten.

Melalui implementasi strategi 4E, PLN Nusa Daya tidak hanya berfokus pada pencapaian target kinerja jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham, pelanggan, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan. Direksi optimistis bahwa fondasi yang telah dibangun akan semakin memperkuat posisi Perusahaan sebagai mitra strategis PLN Group dalam mendukung keandalan pasokan listrik dan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perusahaan guna memastikan keberlanjutan usaha, peningkatan daya saing, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam menyusun strategi dan kebijakan tahun 2025, Direksi melakukan kajian menyeluruh terhadap perkembangan lingkungan bisnis, kondisi industri ketenagalistrikan, arah transformasi PLN Group, serta berbagai faktor eksternal dan internal yang berpotensi memengaruhi kinerja Perusahaan.

Proses perumusan strategi dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan, kapasitas organisasi, kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan. Dalam proses tersebut, Direksi juga memperoleh masukan dan arahan dari Dewan Komisaris guna memastikan bahwa strategi yang ditetapkan selaras dengan visi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta kebijakan strategis PLN Group.

Sebagai bentuk implementasi strategi yang terukur, Direksi menetapkan sasaran dan target kinerja perusahaan yang dituangkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI). Target tersebut kemudian diturunkan secara berjenjang (*cascading*) ke seluruh unit kerja dan individu sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Melalui mekanisme ini, setiap insan PLN Nusa Daya memiliki pemahaman yang sama mengenai arah strategis perusahaan serta kontribusi yang diharapkan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

The Board of Directors believes that every strategic programme, transformation initiative, and business project undertaken throughout 2025 will make a significant contribution to supporting the sustainable growth of the PLN Group's performance. With the support of the Board of Commissioners, management, and all PLN Nusa Daya personnel, the Company continues to demonstrate a strong commitment to implementing its established strategies in a disciplined and consistent way.

Through the implementation of the 4E strategy, PLN Nusa Daya focuses not only on achieving short-term performance targets, but also on creating sustainable long-term value for shareholders, customers, employees, and all stakeholders. The Board of Directors is optimistic that the foundations that have been established will further strengthen the Company's position as a strategic partner of the PLN Group in supporting the reliability of electricity supply and the transformation of the national electricity sector.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Policy

The Board of Directors plays a central role in formulating the Company's strategies and policies to ensure business sustainability, enhance competitiveness, and create long-term value for shareholders and stakeholders. In formulating the 2025 strategies and policies, the Board of Directors conducted a comprehensive review of developments in the business environment, conditions in the electricity industry, the direction of PLN Group transformation, as well as various external and internal factors that could affect the Company's performance.

The Company develops its strategies through a structured approach that considers existing opportunities and challenges, organisational capacity, customer expectations, technological progress, and the need to improve the quality of electricity operation and maintenance services. In this process, the Board of Directors also receives input and direction from the Board of Commissioners to ensure that the strategies adopted are aligned with the Company's vision, the Company's Long-Term Plan (LTP), the Company's Work Plan and Budget (WP&B), and the strategic policies of the PLN Group.

As part of the implementation of a measurable strategy, the Board of Directors establishes the Company's performance objectives and targets, which are set out in Key Performance Indicators (KPIs). These targets are subsequently cascaded down to all work units and individuals in accordance with their respective roles and responsibilities. Through this mechanism, every member of PLN Nusa Daya has a shared understanding of the Company's strategic direction and the expected contribution to achieving the established objectives.

Proses yang Dilakukan Direksi Untuk Memastikan Implementasi Strategi

Direksi memastikan implementasi strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RKAP 2025 dan RJPP berjalan secara efektif di seluruh lini organisasi melalui pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui rapat manajemen, rapat evaluasi kinerja, serta berbagai mekanisme pengendalian internal untuk mengukur pencapaian target, mengidentifikasi risiko, dan menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat kerja, *coffee morning*, dan forum komunikasi internal guna memastikan seluruh pegawai memahami arah strategis perusahaan dan perannya dalam pencapaian target. Direksi juga melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi operasional serta tantangan yang dihadapi unit kerja.

Melalui evaluasi berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan bersama jajaran manajemen dan seluruh unit kerja, Direksi memastikan pelaksanaan strategi tetap selaras dengan tujuan perusahaan, responsif terhadap dinamika bisnis, serta mendukung pencapaian kinerja PLN Nusa Daya secara berkelanjutan.

Kinerja Perusahaan Tahun 2025

Melalui penerapan strategi bisnis yang efektif dan efisien, PLN Nusa Daya berhasil mempertahankan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari capaian skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 102,26, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 101,90. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi, mendorong inovasi, mengembangkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Capaian tersebut merupakan hasil implementasi strategi 4E, yaitu *Efficient Process*, *Excellent Performance*, *Elegant Atmosphere*, dan *Establishing High Trust*, yang secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan. Secara keseluruhan, mayoritas target kinerja tahun 2025 berhasil dicapai dengan baik. Berbagai capaian tersebut semakin memperkuat kontribusi PLN Nusa Daya dalam mendukung kinerja PLN Group serta penyediaan layanan ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan.

Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

The Board of Directors ensures that the strategies and policies set out in the 2025 WP&B and the LTP are effectively implemented across all levels of the organisation through continuous monitoring, evaluation, and performance control. Oversight is carried out through management meetings, performance review meetings, and various internal control mechanisms to measure target achievement, identify risks and determine the necessary corrective actions.

In addition, the Board of Directors regularly holds working meetings, coffee mornings, and internal communication forums to ensure that all employees understand the Company's strategic direction and their respective roles in achieving the established targets. The Board of Directors also conducts site visits to gain a more comprehensive understanding of operational conditions and the challenges faced by business units.

Through periodic evaluations held at least once a month with management and all business units, the Board of Directors ensures that strategy implementation remains aligned with the Company's objectives, is responsive to business dynamics, and supports PLN Nusa Daya's sustainable performance.

Company Performance in 2025

Through the implementation of effective and efficient business strategies, PLN Nusa Daya successfully maintained positive performance throughout 2025. This was reflected in its Key Performance Indicator (KPI) score of 102.26, an increase from 101.90 in 2024. This achievement demonstrates the Company's ability to create economic value, drive innovation, develop human capital, optimise technology utilisation, and implement good corporate governance.

These achievements were supported by the implementation of the 4E strategy, comprising Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, and Establishing High Trust, which made a tangible contribution to improving the Company's operational and financial performance. Overall, the majority of the Company's 2025 performance targets were successfully achieved. These achievements further strengthened PLN Nusa Daya's contribution to supporting the performance of the PLN Group and the delivery of reliable and sustainable electricity services.

Kinerja Keuangan

Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025 memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perusahaan. Peningkatan pendapatan dan laba tahun berjalan menjadi bukti nyata dari pencapaian ini, yang berhasil diraih berkat dedikasi serta kerja keras seluruh karyawan dan anak perusahaan di bawah naungan grup PLN Nusa Daya.

Pada tahun 2025, PLN Nusa Daya membukukan pertumbuhan posisi keuangan yang kuat dengan total aset mencapai Rp2,2 triliun , yaitu tercapai 127,34% dibandingkan target RKAP sebesar Rp1,73 triliun. Realisasi jumlah liabilitas Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,38 triliun, yaitu tercapai 161,23% dibandingkan target RKAP sebesar Rp857,92 miliar. Realisasi jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp817,88 miliar, yaitu tercapai 93,95% dibandingkan target RKAP sebesar Rp870,58 miliar.

Pada tahun 2025, realisasi jumlah pendapatan adalah sebesar Rp4,32 triliun, yaitu tercapai 106,98% dibandingkan target RKAP sebesar Rp4,04 triliun. Realisasi jumlah laba bersih pada tahun 2025 adalah sebesar Rp214,61 miliar, yaitu mencapai 86,55% dibandingkan target RKAP sebesar Rp247,97 miliar. Meskipun realisasi laba bersih belum mencapai target RKAP, Perusahaan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional dan kebutuhan pemeliharaan aset untuk menjaga keandalan layanan ketenagalistrikan, seiring dengan pertumbuhan volume pekerjaan yang dikelola Perusahaan.

Sejalan dengan kenaikan volume pendapatan, beban pokok pendapatan PLN Nusa Daya pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp3.7 triliun atau setara 106,74% dari target RKAP. Kendati demikian, Perusahaan berhasil membuktikan efektivitas pengelolaan efisiensi operasional dan menjaga profitabilitas secara berkelanjutan. Hal ini tecermin dari realisasi laba tahun berjalan yang sukses menembus Rp214.60 miliar, menandakan pertumbuhan yang kuat sebesar 35% dibandingkan perolehan tahun 2024 sebesar Rp158,97miliar. Secara keseluruhan, capaian keuangan tahun 2025 menunjukkan ketahanan bisnis PLN Nusa Daya di tengah dinamika industri energi serta keberhasilan Perusahaan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Financial Performance

The Government's success in maintaining Indonesia's economic stability in 2025 had a positive impact on the Company's financial performance. The increase in revenue and profit for the year reflected this achievement, supported by the dedication and hard work of all employees and subsidiaries within PLN Nusa Daya Group.

In 2025, PLN Nusa Daya recorded strong growth in its financial position, with total assets reaching Rp2.2 trillion, equivalent to 127.34% of the WP&B target of Rp1.73 trillion. The realisation of the Company's liabilities in 2025 amounted to Rp1.38 trillion, or 161.23% of the WP&B target of Rp857.92 billion. Meanwhile, equity realisation was recorded at Rp817.88 billion, equivalent to 93.95% of the WP&B target of Rp870.58 billion.

In 2025, revenue realisation reached Rp4.32 trillion, equivalent to 106.98% of the WP&B target of Rp4.04 trillion. Net profit realisation for 2025 amounted to Rp214.61 billion, or 86.55% of the WP&B target of Rp247.97 billion. Although net profit realisation had not yet reached the WP&B target, the Company was still able to record a 35% increase in profit compared with the previous year. This was influenced by higher operating costs and the need for asset maintenance to ensure the reliability of electricity services, in line with the increased volume of work managed by the Company.

In line with the increase in revenue volume, PLN Nusa Daya's cost of revenue in 2025 increased to Rp3.7 trillion, equivalent to 106.74% of the WP&B target. Nevertheless, the Company continued to demonstrate effective operational efficiency management while maintaining sustainable profitability. This was reflected in profit for the year, which exceeded Rp214.60 billion, representing strong growth of 35% compared with Rp158.97 billion in 2024. Overall, the 2025 financial results demonstrate the resilience of PLN Nusa Daya's business amid the dynamics of the energy industry, as well as the Company's ability to maintain healthy and sustainable growth.

Kinerja positif yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2025 juga memperoleh pengakuan dari berbagai pihak melalui sejumlah penghargaan bergengsi di bidang operasional, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, komunikasi korporasi, sumber daya manusia, keberlanjutan, dan inovasi. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti atas komitmen Perusahaan dalam menghadirkan kinerja unggul, tata kelola yang baik, serta layanan ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan.

The positive performance achieved throughout 2025 was also recognised by various parties through a number of prestigious awards in the fields of operations, corporate governance, risk management, corporate communications, human capital, sustainability, and innovation. These awards reflect the Company's commitment to delivering excellent performance, good governance, as well as reliable and sustainable electricity services.

Kinerja Operasional

Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya berhasil mempertahankan kinerja operasional yang baik melalui pengelolaan aset dan layanan ketenagalistrikan yang andal. Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator operasional utama yang sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan.

Operational Performance

Throughout 2025, PLN Nusa Daya successfully maintained strong operational performance through asset management and the provision of reliable electricity services. This was reflected in the achievement of several key operational indicators, most of which exceeded the established targets.

Perusahaan mencatatkan *Equivalent Availability Factor* (EAF) sebesar 90,06%, lebih tinggi dibandingkan target 85,25%, serta *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) sebesar 6,18%, lebih baik dari target 6,23%. Dari aspek efisiensi operasional, *Response Time* atas Gangguan tercatat 22,58 menit dan *Recovery Time* atas Gangguan 40,50 menit, keduanya lebih baik dibandingkan target masing-masing sebesar 28,50 menit dan 42,75 menit.

The Company recorded an Equivalent Availability Factor (EAF) of 90.06%, exceeding the target of 85.25%, and an Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of 6.18%, outperforming the target of 6.23%. In terms of operational efficiency, the Company recorded a Response Time to Faults of 22.58 minutes and a Recovery Time to Faults of 40.50 minutes, both of which were better than the respective targets of 28.50 minutes and 42.75 minutes.

Kualitas layanan kepada pelanggan juga menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari capaian SAIDI sebesar 154,26 menit per pelanggan dan SAIFI sebesar 2,56 kali per pelanggan, yang lebih baik dibandingkan target masing-masing sebesar 213,41 menit per pelanggan dan 3,75 kali per pelanggan. Selain itu, tingkat pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) mencapai 99,23%, menunjukkan konsistensi Perusahaan dalam menjaga kualitas layanan operasional.

Customer service quality also showed positive performance, as reflected in a SAIDI of 154.26 minutes per customer and a SAIFI of 2.56 times per customer, outperforming the respective targets of 213.41 minutes per customer and 3.75 times per customer. Furthermore, the Service Level Agreement (SLA) compliance rate reached 99.23%, demonstrating the Company's consistency in maintaining the quality of its operational services.

Di bidang keselamatan kerja, Perusahaan mencatatkan *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR) sebesar 0,074, lebih baik dari target 0,126. Capaian ini mencerminkan komitmen PLN Nusa Daya dalam menerapkan budaya keselamatan kerja dan pengelolaan risiko operasional secara berkelanjutan.

In the area of occupational safety, the Company recorded a Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) of 0.074, which was better than the target of 0.126. This achievement reflects PLN Nusa Daya's commitment to implementing an occupational safety culture and managing operational risks on a sustainable basis.

Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga keandalan operasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat budaya keselamatan sebagai fondasi utama dalam mendukung penyediaan layanan ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan.

These achievements demonstrate the Company's success in maintaining operational reliability, improving service quality, and strengthening its safety culture as a foundation for supporting the provision of reliable and sustainable electricity services.

Tantangan yang Dihadapi Tahun 2025 dan Penyelesaiannya

Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh percepatan transisi energi, perkembangan teknologi ketenagalistrikan, serta meningkatnya tuntutan penerapan praktik bisnis berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan, Perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan industri, penguatan aspek lingkungan, peningkatan standar keselamatan dan keandalan operasional, serta kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan digitalisasi proses bisnis.

Transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih memerlukan kesiapan teknologi, peningkatan kapabilitas SDM, dan penyesuaian proses bisnis agar mampu mendukung pengembangan energi baru terbarukan dan digitalisasi sektor ketenagalistrikan. Di sisi lain, Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pencapaian target keberlanjutan di tengah dinamika regulasi serta perkembangan industri yang semakin cepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN Nusa Daya secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnis dan operasional perusahaan. Perusahaan memperkuat implementasi *Green Operation,* meningkatkan budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), mengembangkan kompetensi pegawai, mempercepat digitalisasi proses bisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung efisiensi dan keandalan operasional.

Selain itu, Perusahaan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai langkah tersebut memungkinkan PLN Nusa Daya menjaga kinerja operasional dan keuangan secara optimal sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam mendukung transformasi energi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Challenges Encountered in 2025 and Mitigation Measures

Throughout 2025, PLN Nusa Daya faced various challenges arising from the acceleration of the energy transition, developments in electricity technology, and growing expectations for the implementation of sustainable business practices. As a company engaged in electricity operations and maintenance, the Company is required to continuously adapt to evolving industry needs, strengthen environmental considerations, improve safety standards and operational reliability, and address the need for human capital development and business process digitalisation.

The transition towards a cleaner energy system requires technological readiness, enhanced human capital capabilities, and adjustments to business processes to support the development of new and renewable energy and the digitalisation of the electricity sector. At the same time, the Company also faces challenges in maintaining operational efficiency, service quality, and the achievement of sustainability targets amid regulatory changes and the rapid pace of industry development.

To address these challenges, PLN Nusa Daya consistently integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the Company's business and operational strategies. The Company continues to strengthen the implementation of Green Operations, enhance its Health, Safety and Environment (HSE) culture, develop personnel competencies, accelerate business process digitalisation, and optimise the use of technology and innovation to support operational efficiency and reliability.

Furthermore, the Company continues to strengthen good corporate governance, integrated risk management, and the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) programmes that provide benefits to the community. Through these measures, PLN Nusa Daya is able to maintain optimal operational and financial performance while strengthening its competitiveness in supporting energy transformation and sustainable business growth.

Prospek Usaha Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, perekonomian global diperkirakan masih diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan dinamika harga energi. Meskipun demikian, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan ekonomi global tetap tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2027, didukung oleh perkembangan teknologi, investasi pada Artificial Intelligence (AI), serta kebijakan ekonomi yang semakin adaptif di berbagai negara.

Di tingkat nasional, prospek sektor ketenagalistrikan tetap menunjukkan arah yang positif seiring pertumbuhan kebutuhan energi listrik, pembangunan infrastruktur, serta komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menjadi pendorong utama pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional, termasuk peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan, dan pengembangan energi baru terbarukan guna mendukung target *Net Zero Emissions* (NZE).

Bagi PLN Nusa Daya, kondisi tersebut menghadirkan peluang yang signifikan untuk memperkuat peran sebagai penyedia layanan operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan yang andal dan berdaya saing. Implementasi RUPTL 2025–2034 yang mendorong penambahan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta pengembangan energi baru terbarukan diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan layanan operasi dan pemeliharaan yang menjadi kompetensi inti Perusahaan. Didukung oleh pengalaman, kapabilitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang terus berkembang, PLN Nusa Daya optimistis dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Dengan fondasi bisnis yang kuat, dukungan PLN Group, serta implementasi strategi 4E yang konsisten, Direksi optimistis PLN Nusa Daya dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan kinerja operasional, memperluas kontribusi terhadap transformasi sektor ketenagalistrikan nasional, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Business Outlook for 2026

Entering 2026, the global economy is expected to continue facing a range of challenges, including geopolitical uncertainty, financial market volatility, and fluctuations in energy prices. Nevertheless, the International Monetary Fund (IMF) projects that the global economy will grow by 3.1% in 2026 and increase to 3.2% in 2027, supported by technological developments, investment in Artificial Intelligence (AI), and increasingly adaptive economic policies across various countries.

At the national level, the outlook for the electricity sector remains positive, driven by growing electricity demand, infrastructure development, and the Government's commitment to accelerating the transition towards a cleaner and more sustainable energy system. The implementation of the 2025–2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) serves as a key driver of national electricity system development, including the expansion of power plant capacity, strengthening of the grid, and development of new and renewable energy sources to support the Net Zero Emissions (NZE) target.

For PLN Nusa Daya, these conditions present significant opportunities to strengthen its role as a reliable and competitive provider of electricity operations and maintenance services. The implementation of the 2025–2034 RUPTL, which encourages the expansion of power plant capacity, the strengthening of transmission and distribution networks, and the development of new and renewable energy, is expected to increase demand for operations and maintenance services, which represent the Company's core competencies. Supported by its experience, human capital capabilities, and the utilisation of continuously evolving technology, PLN Nusa Daya is confident in its ability to seize on these opportunities to drive sustainable business growth while strengthening its contribution to the transformation of the national electricity sector.

With a solid business foundation, support from the PLN Group, and the steady execution of the 4E strategy, the Board of Directors believes that PLN Nusa Daya is well positioned to leverage these growth opportunities to enhance operational performance, broaden its role in the transformation of the national electricity sector, and generate sustainable value for all stakeholders.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari PLN Group dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN Nusa Daya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten, profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi setiap organ perusahaan, peningkatan efektivitas pengelolaan bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam memperkuat praktik tata kelola, Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta mengadopsi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat nasional dan regional. Penerapan berbagai standar tersebut menjadi landasan bagi Perusahaan dalam membangun tata kelola yang adaptif, berintegritas, dan berdaya saing.

Pada tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan pemetaan implementasi tata kelola menggunakan alat uji PUG-KI yang menunjukkan bahwa Perusahaan memenuhi 43 aspek *Apply* dan 38 aspek *Explain*. Hasil tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan nilai jangka panjang. Sementara itu, hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) menunjukkan capaian sebesar 73,18 poin, yang menggambarkan semakin baiknya kualitas tata kelola Perusahaan serta keselarasan dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik di kawasan ASEAN.

Perusahaan senantiasa menindaklanjuti setiap rekomendasi *area of improvement* yang dihasilkan dari proses asesmen dan evaluasi tata kelola. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur, penguatan fungsi pengawasan dan manajemen risiko, peningkatan kualitas keterbukaan informasi, penguatan peran organ tata kelola, serta pengembangan kapasitas sumber daya perusahaan. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Perusahaan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha di masa depan.

Commitment to Sustainable Corporate Governance

As part of the PLN Group and a State-Owned Enterprise (SOE), PLN Nusa Daya is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles consistently, professionally, transparently, and accountably. This commitment is realised through the strengthening of the functions of each corporate organ, the enhancement of business management effectiveness, and compliance with applicable laws and regulations to create sustainable added value for all stakeholders.

In strengthening its governance practices, the Company refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, adopts the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI), and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) as benchmarks for best practice at the national and regional levels. The implementation of these standards provides a foundation for the Company in developing a governance framework that is adaptive, integrity-driven and competitive.

In 2025, the Company conducted an assessment of corporate governance implementation using the PUG-KI assessment tool, which showed that the Company fulfilled 43 “Apply” aspects and 38 “Explain” aspects. These results reflect the Company’s commitment to implementing corporate governance principles effectively and transparently, with a focus on long-term value creation. Meanwhile, the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment resulted in a score of 73.18 points, reflecting the continued improvement in the quality of the Company’s governance and its alignment with best corporate governance practices in the ASEAN region.

The Company consistently follows up on every recommendation for improvement arising from the corporate governance assessment and evaluation process. These follow-up actions are carried out through the refinement of policies and procedures, the strengthening of oversight and risk management functions, the improvement of information disclosure quality, the strengthening of the role of governance organs, and the development of the Company’s human capital. These measures form part of the Company’s ongoing commitment to enhancing the effectiveness of Good Corporate Governance practices, strengthening stakeholder confidence, and supporting sustainable business growth in the future.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan terus melakukan penyempurnaan sistem dan praktik tata kelola yang tercermin dari peningkatan kualitas implementasi GCG di berbagai aspek pengelolaan perusahaan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Direksi dan seluruh jajaran manajemen dalam menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Throughout 2025, the Company continued to refine its governance systems and practices, as reflected in the improved quality of Good Corporate Governance (GCG) implementation across various aspects of the Company's management. These achievements demonstrate the commitment of the Board of Directors and the entire management team to conducting business professionally, transparently, and responsibly.

Selain itu, PLN Nusa Daya telah menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi berdasarkan kerangka *Three Lines of Defense* untuk memperkuat fungsi pengawasan, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas organisasi. Melalui pendekatan tersebut, Perusahaan mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko secara lebih efektif sehingga mendukung keberlangsungan usaha serta ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis yang terus berkembang.

Furthermore, PLN Nusa Daya has implemented an integrated internal control system based on the Three Lines of Defence framework to strengthen the organisation's oversight, risk management, and accountability functions. Through this approach, the Company is able to identify, control and mitigate risks more effectively, thereby supporting business continuity and strengthening the Company's resilience in facing evolving business dynamics and challenges.

Ke depan, Direksi akan terus memperkuat budaya tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Going forward, the Board of Directors will continue to strengthen the corporate governance culture, risk management, and compliance as key foundations for supporting sustainable business growth and creating long-term value for shareholders and all stakeholders.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Composition of the Board of Directors

Selama tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi PT PLN Nusa Daya. Dengan demikian, susunan Direksi Perusahaan tetap mengacu pada keputusan Pemegang Saham yang berlaku sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 22 Agustus 2023. Komposisi Direksi Perusahaan terdiri atas:

Throughout 2025, the composition of the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya remained unchanged. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors remained in accordance with the applicable Shareholders' Resolution, as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated 22 August 2023. The composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama President Director	Feby Joko Priharto
Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	Reny Wahyu Setiawan
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital Director of Finance, Risk Management, and Human Capital	Zulhendri

Keberlanjutan struktur kepemimpinan tersebut memberikan stabilitas dalam pengelolaan perusahaan, memperkuat konsistensi pelaksanaan strategi, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika bisnis dan operasional. Dengan dukungan Direksi yang berpengalaman dan solid, Perusahaan mampu menjaga kesinambungan program transformasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong pencapaian kinerja yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

The continuity of this leadership structure provided stability in the Company's management, strengthened the consistency of strategy implementation, and supported effective decision-making in responding to business and operational dynamics. With the support of an experienced and solid Board of Directors, the Company was able to maintain the continuity of its transformation programmes, improve service quality, and drive sustainable performance throughout 2025.

Apresiasi

Pencapaian kinerja positif yang diraih PLN Nusa Daya sepanjang tahun 2025 merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang kuat antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Atas capaian tersebut, Direksi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan kontribusi bagi keberhasilan Perusahaan.

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan, serta kepada Dewan Komisaris atas arahan strategis, nasihat, dan pengawasan yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat menjalankan bisnis secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh insan PLN Nusa Daya atas profesionalisme, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan berbagai program dan aktivitas perusahaan sepanjang tahun 2025. Kontribusi setiap insan perusahaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keandalan layanan, mendorong pertumbuhan bisnis, serta memperkuat daya saing Perusahaan.

Ke depan, Direksi berharap sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memperkuat peran PLN Nusa Daya sebagai mitra strategis PLN Group dalam menyediakan layanan ketenagalistrikan yang andal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Appreciation

The positive performance achieved by PLN Nusa Daya throughout 2025 was the result of hard work, dedication, and strong collaboration between the Company and all its stakeholders. In recognition of these achievements, the Board of Directors would like to express its sincere gratitude and appreciation to all parties who have placed their trust in the Company, provided support, and contributed to its success.

The Board of Directors extends its gratitude to the Shareholders for their continued trust and support, and to the Board of Commissioners for its strategic guidance, advice, and constructive oversight, which have enabled the Company to conduct its business effectively, accountably, and sustainably. The Board of Directors also expresses its appreciation to all customers, business partners and other stakeholders for the strong cooperation that has been established over the years.

The Board of Directors also conveys its sincere appreciation and gratitude to all PLN Nusa Daya personnel for their professionalism, loyalty and dedication in carrying out the Company's various programmes and activities throughout 2025. The contribution of every member of personnel forms a key foundation for maintaining service reliability, driving business growth and strengthening the Company's competitiveness.

Looking ahead, the Board of Directors hopes that the synergy, collaboration, and trust that have been successfully established will continue to be strengthened in order to support sustainable growth and reinforce PLN Nusa Daya's role as a strategic partner of the PLN Group in providing reliable electricity services to the public and national development.

Balikpapan, 25 Juni | June 2026

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Feby Joko Priharto
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Statement of Responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Annual Report of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Nusa Daya tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

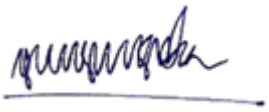
We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya has been presented in full, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Balikpapan, 25 Juni | June 2026

Dewan Komisaris
Board of Commisioners



Agung Nugraha
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



Feby Joko Priharto
Direktur Utama
President Director



Zulhendri
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Human Capital
Director of Finance, Risk Management, and Human Capital



Reny Wahyu Setiaswan
Direktur Operasi Dan Pengembangan
Director of Operations and Business Development



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



PT PLN Nusa Daya berawal dari perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 dengan nama PT PLN Tarakan sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero). Seiring dengan transformasi bisnis PT PLN (Persero), berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 28 November 2023, PT PLN Tarakan melakukan proses rebranding dengan perubahan nama menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya atau disingkat PT PLN Nusa Daya.

PT PLN Nusa Daya was originally established in 2003 as PT PLN Tarakan, a subsidiary of PT PLN (Persero). In line with PT PLN (Persero)'s business transformation, and pursuant to the Circular Shareholders' Resolution outside the Annual General Meeting dated 28 November 2023, PT PLN Tarakan underwent a rebranding process and changed its name to PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya, abbreviated as PT PLN Nusa Daya.



Informasi Perusahaan
Company Information

Logo Perusahaan
Company Logo

PLN Nusa Daya

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PT PLN Nusa Daya)

Status Perusahaan
Company Status

Anak Perusahaan PT PLN (Persero)
Subsidiary of PT PLN (Persero)

Tahun Pendirian
Year of Establishment

2003

Bidang Usaha
Line of Business

Penyedia Jasa Operasi dan Pemeliharaan Transmisi, Distribusi, Pembangkit dan Pelayanan Pelanggan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Provider of Operation and Maintenance Services of the Transmission, Distribution, Power Plant, and Customer Service in Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua.

Dasar Hukum
Legal Basis

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 258-1/010/DIR/2003 tanggal 17 Oktober 2003, dan disahkan berdasarkan Akta Notaris H Haryanto SH, MBA No. 18 tanggal 15 Desember 2003
PT PLN (Persero) Board of Directors Decree No. 258-1/010/DIR/2003 dated 17 October 2003, as legalised under Notarial Deed No. 18 dated 15 December 2003, drawn up before H. Haryanto, S.H., MBA.

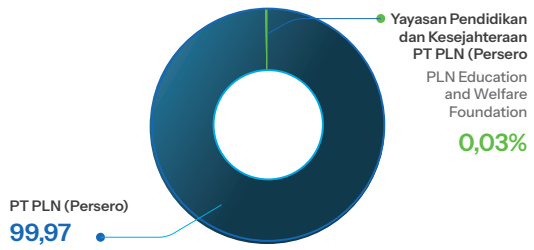
Modal Dasar
Authorised Capital

Rp 316 miliar billion

Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh
Issued and Fully Paid-up Capital

Rp 79 miliar billion

Kepemilikan Saham
Shareholding



Jumlah Pegawai (per 31 Desember 2025)
Number of Employees (as at 31 December 2025)

347 orang employees

Entitas Anak
Subsidiary

PT Paguntaka Cahaya Nusantara (99,96%)

Alamat Kantor
Office Address

Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No.78
Kelurahan Damai Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, 76114

(0542) 8703981
(0542) 8506674
plnnd@plnnusadaya.co.id
www.plnnusadaya.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

Company at a Glance



PT PLN Nusa Daya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Pulau Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Perusahaan ini bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan yang mencakup transmisi, distribusi, pembangkit, serta pelayanan pelanggan. Wilayah operasional PLN Nusa Daya meliputi kawasan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Melalui layanan yang profesional dan berkelanjutan, PLN Nusa Daya berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal dalam mendukung ketersediaan dan keandalan pasokan listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Pada tahun 1978, pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan pada awalnya berada di bawah perusahaan daerah dengan nama PLN Ranting Tarakan Cabang Balikpapan. Seiring perkembangan organisasi, pada tahun 1990 tanggung jawab pengelolaan beralih dan nama perusahaan berubah menjadi PLN Cabang Tarakan yang berada di bawah struktur PT PLN (Persero) untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan pusat kedudukan di Banjarbaru. Setelah beroperasi selama 11 tahun dengan status tersebut, pada tahun 2001 dilakukan persiapan perubahan status menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).

PT PLN Nusa Daya is a subsidiary of PT PLN (Persero) headquartered on Tarakan Island, North Kalimantan Province. The Company is engaged in the operation and maintenance of electricity systems, covering transmission, distribution, power generation, and customer services. PLN Nusa Daya's operational areas include Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua. Through professional and sustainable services, PLN Nusa Daya is committed to making an optimal contribution to supporting the availability and reliability of electricity supply as part of the effort to realise national energy sovereignty.

In 1978, electricity management in Tarakan City was initially carried out by a regional company under the name PLN Ranting Tarakan Cabang Balikpapan. As the organisation developed, in 1990 the management responsibility was transferred and the company's name was changed to PLN Cabang Tarakan, operating under the organisational structure of PT PLN (Persero) for the South Kalimantan, Central Kalimantan, and East Kalimantan regions, with its headquarters in Banjarbaru. After operating for 11 years under this status, preparations were made in 2001 to change its status to become a subsidiary of PT PLN (Persero).

Pada tahun 2003, setelah melalui proses persiapan perubahan status selama dua tahun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 258-1/010/DIR/2003 tanggal 17 Oktober 2003 serta pengesahan melalui Akta Notaris H. Haryanto, S.H., M.B.A. Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003, PLN Cabang Tarakan resmi berganti nama menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLNT). Sejak saat itu, perusahaan mulai beroperasi sebagai salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Pulau Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pada kurun waktu 2003 hingga 2016, PT PLN Nusa Daya menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan penjualan tenaga listrik secara terintegrasi dengan menerapkan tarif regional yang berbeda dari Tarif Dasar Listrik (TDL) nasional. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah setempat mengusulkan agar penerapan tarif listrik kembali mengacu pada TDL nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2016, Gubernur Kalimantan Utara menetapkan Surat Keputusan Nomor 188.44/K.564/2016 mengenai pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik perusahaan. Keputusan tersebut menyebabkan perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan tenaga listrik di Pulau Tarakan. Selanjutnya, pengelolaan pelayanan ketenagalistrikan kepada pelanggan di wilayah Tarakan dialihkan kepada PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui Unit Layanan Khusus (ULK) Kota Tarakan.

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Nomor 109/DIR/2016 tanggal 30 November 2016, dalam rangka mengantisipasi dinamika bisnis PT PLN Nusa Daya, para pemegang saham memberikan arahan kepada PT PLN Nusa Daya untuk melaksanakan pengelolaan sewa pembangkit bersama PT PLN (Persero). Selain itu, perusahaan juga ditugaskan untuk menjalankan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit serta jasa operasi dan pemeliharaan distribusi yang berada di wilayah kerja Pulau Tarakan.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika bisnis PT PLN Nusa Daya, berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler Nomor 109/DIR/2016 tanggal 30 November 2016 yang kemudian dikukuhkan melalui Perubahan Anggaran Dasar PLN Nusa Daya Nomor 5 tanggal 7 Desember 2016, para pemegang saham memberikan penugasan kepada perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit (KIT), Jasa Operasi dan Pemeliharaan Transmisi, Jasa Operasi dan Pemeliharaan Distribusi (YANTEK), serta Pelayanan Pelanggan (BILLMAN) di wilayah Indonesia Timur. Cakupan wilayah operasional tersebut meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan kantor pusat perusahaan berkedudukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, pada tahun 2017, guna mendukung transformasi dan pengembangan bisnis perusahaan, PLN Nusa Daya mendirikan anak perusahaan bernama PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN).

In 2003, following a two-year preparation process for the change in status, and pursuant to PT PLN (Persero) Board of Directors Decree No. 258-1/010/DIR/2003 dated 17 October 2003, as well as legalisation under Notarial Deed No. 18 dated 15 December 2003, made before H. Haryanto, S.H., M.B.A., PLN Cabang Tarakan officially changed its name to PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLNT). Since then, the Company has operated as one of the subsidiaries of PT PLN (Persero), headquartered on Tarakan Island, North Kalimantan Province.

From 2003 to 2016, PT PLN Nusa Daya carried out integrated electricity supply and sales business activities by applying regional tariffs that differed from the national Basic Electricity Tariff (TDL). In its development, the local government proposed that electricity tariffs be reapplied in accordance with the national TDL. Following up on this matter, on 12 October 2016, the Governor of North Kalimantan issued Decree No. 188.44/K.564/2016 concerning the revocation of the Company's Electricity Supply Business Licence (IUPTL). This decision resulted in the Company no longer having the authority to sell electricity on Tarakan Island. Subsequently, the management of electricity services for customers in the Tarakan area was transferred to PT PLN (Persero) East Kalimantan and North Kalimantan Region through the Tarakan City Special Service Unit (ULK).

Based on Circular GMS Resolution No. 109/DIR/2016 dated 30 November 2016, in anticipation of PT PLN Nusa Daya's business dynamics, the shareholders directed PT PLN Nusa Daya to manage power plant leasing together with PT PLN (Persero). In addition, the Company was also assigned to carry out power plant operation and maintenance services as well as distribution operation and maintenance services within the Tarakan Island working area.

In anticipation of PT PLN Nusa Daya's business dynamics, based on Circular GMS Resolution No. 109/DIR/2016 dated 30 November 2016, which was subsequently affirmed through the Amendment to PLN Nusa Daya's Articles of Association No. 5 dated 7 December 2016, the shareholders assigned the Company to manage Power Plant Operation and Maintenance Services (KIT), Transmission Operation and Maintenance Services, Distribution Operation and Maintenance Services (YANTEK), and Customer Services (BILLMAN) in Eastern Indonesia. The Company's operational coverage includes Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, with the Company's headquarters located in Balikpapan City, East Kalimantan Province.

Subsequently, in 2017, to support the Company's business transformation and development, PLN Nusa Daya established a subsidiary, PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN).

Pada tahun 2019, diterbitkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 51 tanggal 23 Desember 2019 sebagai bentuk penegasan atas peralihan bisnis utama PT PLN Nusa Daya yang turut mengubah maksud dan tujuan perusahaan. Sebelumnya, perusahaan berfokus pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Kota Tarakan maupun wilayah lainnya. Namun, melalui perubahan tersebut, maksud dan tujuan perusahaan diperluas menjadi penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik yang diperuntukkan bagi PT PLN (Persero) dan badan usaha lainnya dalam rangka melayani kepentingan umum.

In 2019, the Company's Articles of Association No. 51 dated 23 December 2019 were issued as an affirmation of the shift in PT PLN Nusa Daya's main business, which also amended the Company's purposes and objectives. Previously, the Company focused on electricity supply for public purposes in Tarakan City and other areas. Through this amendment, however, the Company's purposes and objectives were expanded to include electricity supply business activities and electricity supporting services intended for PT PLN (Persero) and other business entities in serving the public interest.

Pada tahun 2023, PT PLN Nusa Daya memperoleh penugasan baru untuk mengelola *Asset Management Contract* (AMC) PLTD *Holding*. AMC merupakan proses pengelolaan aset Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan, dengan tujuan mengoptimalkan kinerja, risiko, serta biaya sepanjang siklus hidup (*life cycle*) asset. Dalam implementasinya, PLN Nusa Daya menerima pengelolaan aset berupa PLTD untuk dioperasikan dan dikelola guna memastikan tercapainya aspek kinerja yang optimal, pengendalian risiko yang efektif, serta efisiensi biaya dalam pengelolaan aset. Seluruh pelaksanaan tersebut kemudian dituangkan dalam pencapaian kinerja yang diukur melalui *Service Level Agreement* (SLA).

In 2023, PT PLN Nusa Daya received a new assignment to manage the Asset Management Contract (AMC) for PLTD Holding. AMC is a systematic, structured, and continuous process for managing Diesel Power Plant (DPP) assets, aimed at optimising performance, risk, and cost throughout the asset life cycle. In its implementation, PLN Nusa Daya receives DPP assets to be operated and managed in order to ensure the achievement of optimal performance, effective risk control, and cost efficiency in asset management. All such implementation is then reflected in performance achievements measured through Service Level Agreements (SLAs).

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 28 November 2023, PT PLN Tarakan melakukan proses rebranding dengan perubahan nama menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya atau disingkat PT PLN Nusa Daya.

In accordance with the Shareholders' Resolution Outside the GMS (Circular Resolution) dated 28 November 2023, PT PLN Tarakan underwent a rebranding process, changing its name to PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya, abbreviated as PT PLN Nusa Daya.

Peresmian Depo Sewatama di Balikpapan

PT PLN Nusa Daya meresmikan Depo Sewatama di Balikpapan sebagai langkah strategis dalam memperkuat dukungan operasional sistem kelistrikan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Fasilitas ini difungsikan sebagai pusat layanan logistik serta penyimpanan peralatan yang dirancang untuk meningkatkan keandalan operasional dan mempercepat respons terhadap kebutuhan kelistrikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Inauguration of the Sewatama Depot in Balikpapan

PT PLN Nusa Daya inaugurated the Sewatama Depot in Balikpapan as a strategic step to strengthen operational support for electricity systems in Central and Eastern Indonesia. This facility functions as a logistics service and equipment storage centre designed to improve operational reliability and accelerate responses to electricity needs, particularly in remote areas.

Dukungan Kelistrikan di IKN (Ibu Kota Nusantara)

PT PLN Nusa Daya berperan aktif dalam mendukung keandalan pasokan listrik di Ibu Kota Nusantara melalui penambahan kapasitas daya sebesar 12 MW. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemasangan genset, UPS (*Uninterruptible Power Supply*), serta SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan IKN yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan penggunaan energi bersih.

Electricity Support in Nusantara Capital City (IKN)

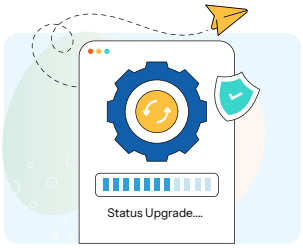
PT PLN Nusa Daya plays an active role in supporting the reliability of electricity supply in Nusantara Capital City through an additional power capacity of 12 MW. In addition, the Company has installed generator sets, UPS (Uninterruptible Power Supply), and SPKLU (Public Electric Vehicle Charging Stations) to support the electric vehicle ecosystem. These efforts form part of the Company's commitment to supporting the development of IKN, which is oriented towards environmental sustainability and the use of clean energy.

Jejak Langkah Perusahaan

Company Milestones

1978

Berawal dari Perusahaan Pengelola Kelistrikan Kota Tarakan, yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PERUSDA)
Originated as the Electricity Management Company for Tarakan City, managed by a Regional Government-Owned Enterprise (PERUSDA).



1990

Peningkatan status dari PLN Ranting Tarakan Cabang Balikpapan menjadi PLN Cabang Tarakan
Status upgrade from PLN Ranting Tarakan, Balikpapan Branch, to PLN Tarakan Branch.

2003

Pembubaran PLN Cabang Tarakan dan resmi berganti menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLNT) dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero)
Dissolution of PLN Tarakan Branch and its official transformation into PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLNT), with the status of a subsidiary of PT PLN (Persero).

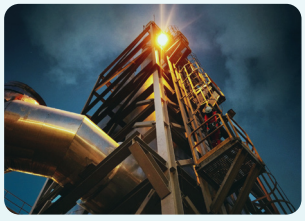


1978

Pembentukan PLN Ranting Tarakan Cabang Balikpapan
Establishment of PLN Ranting Tarakan, Balikpapan Branch.

2001

Persiapan pembentukan PLN Cabang Tarakan menjadi Anak Perusahaan PT PLN (Persero) di Tarakan
Preparations began for the transformation of PLN Tarakan Branch into a subsidiary of PT PLN (Persero) in Tarakan.



2006

Pada 12 Oktober 2016 terjadi Transisi Perubahan Skema Bisnis PLN Nusa Daya dari Utility menjadi Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi
On 12 October 2016, PLN Nusa Daya underwent a business scheme transition from a utility company to an operation and maintenance services provider for power plant, transmission, and distribution.

2007

- Pada 12 Oktober 2016 terjadi Transisi Perubahan Skema Bisnis PLN Nusa Daya dari *Utility* menjadi Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi.
- Pembentukan anak perusahaan PLN Nusa Daya yaitu PT Paguntaka Cahaya Nusantara.
- PLN Nusa Daya underwent a business scheme transition from a utility company to an operation and maintenance services provider for power generation, transmission, and distribution.
- Establishment of PLN Nusa Daya's subsidiary, PT Paguntaka Cahaya Nusantara.

2022

Perpindahan Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan PLN Tarakan:
Relocation of PLN Tarakan's Head Office and Representative Office:

- Alamat Kantor Pusat sebelumnya di Jl. MT Haryono, Komplek Balikpapan Baru No.5A, blok 1-5, berpindah menjadi di Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No.78, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- Alamat Kantor Perwakilan sebelumnya di Jl. Sungai Sambas 1, No.108A, berpindah menjadi di Jl. Tirtayasa IV No.18, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12160
- The Head Office, previously located at Jl. MT Haryono, Komplek Balikpapan Baru No. 5A, Block 1–5, was relocated to Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No. 78, Damai Bahagia Subdistrict, South Balikpapan District, Balikpapan City, East Kalimantan.
- The Representative Office, previously located at Jl. Sungai Sambas 1 No. 108A, was relocated to Jl. Tirtayasa IV No. 18, Kebayoran Baru, South Jakarta 12160.

2023

Pada 28 November 2023, perubahan nama dari PT PLN Tarakan menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya atau PLN Nusa Daya.
On 28 November 2023, the Company changed its name from PT PLN Tarakan to PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya, abbreviated as PLN Nusa Daya.

2024

- 7 Maret 2024, Peresmian Depo Sewatama di Balikpapan, sebagai mitra strategis untuk mendukung pekerjaan kelistrikan wilayah Tengah-Timur.
- Mendukung keandalan listrik di IKN dengan menambah kapasitas 12 MW dan memasang genset, UPS, serta SPKLU untuk EV.
- On 7 March 2024, the Sewatama Depot in Balikpapan was inaugurated as a strategic partner to support electricity-related works across Central and
- Eastern Indonesia.

  The Company supported electricity reliability in IKN by adding 12 MW of capacity and installing generators, UPS, and EV charging stations (SPKLU).

2025

Peresmian gedung kantor Unit Pelaksana Kalimantan 1 PLN Nusa Daya di Pontianak untuk mendukung ketahanan energi dan pelayanan terbaik bagi pelanggan di Kalimantan Barat.
Inauguration of the PLN Nusa Daya Kalimantan 1 Implementing Unit office building in Pontianak to support energy resilience and deliver excellent service to customers in West Kalimantan.



Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan

Hingga akhir tahun 2025, PLN Nusa Daya mengacu pada Visi dan Misi yang telah disahkan melalui RKAP Tahun 2024 pada tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Through the end of 2025, PLN Nusa Daya will adhere to the Vision and Mission approved through the 2024 Annual Work and Budget Plan (RKAP) on December 22, 2023, as follows:

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Pengelola Aset Ketenagalistrikan Terkemuka di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia dan tumbuh berkelanjutan.

To be a Leading Electricity Asset Management Company in Central and Eastern Indonesia and Achieve Sustainable Growth

Penjelasan Visi Perusahaan

Explanation of The Company's Vision

Perusahaan pengelola Aset Ketenagalistrikan

Electricity Asset Management Company

- Perusahaan memiliki layanan bisnis sebagai *Asset Manager* dan/atau *Asset Operator/Service Provider* atas aset ketenagalistrikan dari hulu-hilir
- Pembangkitan, Transmisi dan GI, Distribusi, *Billing Management* dan jasa lainnya.

- The Company operates as an Asset Manager and/or Asset Operator/Service Provider, managing electricity assets for upstream and downstream
- Power Plant, Transmission & Substation, Distribution, Billing management, and other services.

Terkemuka

Leading

Proses pengelolaan aset ketenagalistrikan PLN Nusa Daya dijadikan standar bagi pengelola aset lainnya dikarenakan:

- Terkemuka dalam proses: (1) Pelaksanaan bisnis ekselen berbasis *Baldrige Excellence Framework* telah masuk dalam kategori *world class*, dalam ajang se-kelas Asia Pasifik; (2) Pengelolaan Manajemen Risiko masuk dalam *level Optimizing*.
- Terkemuka dalam operasional: (1) Pencapaian SLA 100%; (2) Level EAF Pembangkitan sebesar 91%; dan (3) Tingkat *Response Time* dan *Recovery Time* sebesar 19 dan 30 menit/plg.

PLN Nusa Daya's electricity asset management process has been adopted as a standard for other asset managers because:

- Leading in processes: (1) The Company implements business excellence based on the Baldrige Excellence Framework, having reached the world-class category in competitions at the Asia-Pacific level. (2) Its risk management practices have also achieved the "Optimizing"level.
- Leading in operations: (1) 100% SLA Achievement, (2) EAF Generation Level of 91%; and (3) Response Time and Recovery Time of 19 and 30 minutes per customer.

Wilayah Tengah dan Timur Indonesia

Central and Eastern Indonesia

Menunjukkan wilayah kerja perusahaan yaitu mencakup Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua sesuai dengan Perdir PT PLN (Persero) Nomor 0030.P/DIR/2017.

This refers to the Company's operational coverage area, which includes the regions of Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, and Papua, in accordance with Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017.

Tumbuh berkelanjutan

Sustainable growth

Perusahaan memproyeksikan akan tumbuh sebesar 2,5 kali lipat dibandingkan prognosa tahun 2023, atau mencapai Rp5,5 Triliun pada tahun 2028 secara kontinyu. Berkelanjutan juga menunjukkan fokus perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan aspek ESG (*Environmental, Social, & Governance*).

The Company is projected to grow by 2.5 times compared to its 2023 forecast, targeting revenue of Rp5.5 trillion by 2028. The term "sustainable" also reflects the Company's commitment to responsible business practices that integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

Misi Mission

1. Memberikan nilai tambah yang optimal kepada PLN Group dengan memastikan ketersediaan layanan dan keberlangsungan usaha *(securing business sustainibility),* optimasi dan efisiensi biaya *(optimizing cost efficiency)* dan keunggulan kompetensi dalam industri ketenagalistrikan *(leading industry capabilities).*
2. Menjalankan bisnis asset Operator dan *Asset Manager* sistem ketenagalistrikan yang berkualitas, unggul dan efisien.
3. Berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit listrik skala <100 MW di Kawasan Timur Indonesia di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk memastikan keandalan pasokan tenaga listrik sekaligus meningkatkan kontribusi laba *(increasing profit contribution)* untuk PLN Group dengan memanfaatkan potensi pasar eksternal.
4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme *Human Capital* untuk menjamin kepuasan pelanggan.
5. Mewujudkan citra prefesionalitas dalam menunjang pelayanan penyediaan tenaga listrik.

1. Providing optimal added value to the PLN Group by securing business sustainability, optimization and optimizing cost efficiency, and leading industry capabilities.
2. Running a quality, excellent and efficient electricity system Asset Operator and Asset Manager business.
3. Participating in the development of <100 MW scale power plants in Eastern Indonesia to ensure reliable power supply while increasing profit contribution for the PLN Group by exploiting the external market potential.
4. Developing Human Capital competence and professionalism to ensure customer satisfaction.
5. Creating an image of professionalism in supporting electricity supply service.

Pernyataan Manajemen
Statement from Management

Visi dan Misi tahun 2025 telah ditinjau ulang oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan untuk tahun buku 2025.

The Vision and Mission have been reviewed by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to be appropriate for the 2025 fiscal year.

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Sejak tahun 2020, PT PLN Nusa Daya telah menyesuaikan budaya Perusahaan dengan mengadopsi nilai-nilai inti *(Core Values)* AKHLAK, yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman utama dalam membentuk sikap dan perilaku seluruh insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Adapun penjelasan mengenai tata nilai dan budaya perusahaan secara lebih jelas dijelaskan sebagai berikut:

Since 2020, PT PLN Nusa Daya has aligned its corporate culture by adopting the AKHLAK Core Values, comprising Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. These values serve as the main guidelines in shaping the attitudes and behaviour of all Company personnel in carrying out their daily work activities. A more detailed explanation of the Company's values and culture is presented below:

A

Amanah Trustworthy

Memegang Teguh Kepercayaan yang diberikan
Doing the best for the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika
- Keeping promises and commitments
- Responsible for tasks, decisions and actions performed
- Keeping the moral and ethical values

K

Kompeten Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continue learning and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
- Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
- Help others in learning
- Complete tasks with the best quality

H

Harmonis Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Caring for each other and respecting differences

- Menghadapi setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Respect everyone regardless of their background
- Helping others a lot
- Building a conducive working environment

L

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritizing the nation interests

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
- Maintain the personal image of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal
- Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics

A

Adaptif Adaptive

Terus berinovasi dan antuasias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
Continue to innovate and be enthusiastic in facing change

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif
- Quickly adapt to be better
- Continuously making improvements following technological developments
- Act proactively

K

Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerjasama yang sinergi
Building a synergistic collaboration

- Memberi Kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Provide opportunities for various parties to contribute
- Open in working together to generate added value
- Mobilise the use of various resources for a shared goal

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan

Company Purpose, Objectives, and Business Activities

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 51 tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik serta jasa penunjang ketenagalistrikan yang ditujukan bagi PT PLN (Persero) maupun badan usaha lainnya guna memenuhi kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung dan menunjang kegiatan usaha Pemegang Saham. Seluruh kegiatan tersebut dijalankan dengan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), kepatutan, dan etika bisnis yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Based on the Company's Articles of Association No. 51 dated 23 December 2019, the Company's purpose and objectives are to carry out business activities in electricity supply and electricity supporting services intended for PT PLN (Persero) and other business entities to serve the public interest. In its implementation, the Company refers to the provisions of the prevailing laws and regulations and carries out assignments from the Majority Shareholder in order to support and sustain the Shareholder's business activities. All such activities are carried out by prioritising the implementation of Good Corporate Governance principles, propriety, and business ethics applicable to limited liability companies.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN ND adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
   Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   a. Pembangkitan Tenaga Listrik.
   b. Transmisi Tenaga Listrik.
   c. Distribusi tenga listrik.
   d. Aktivitas Penunjang Kelistrikan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Kegiatan usaha penunjang Perusahaan terdiri atas:
   a. Penunjang tenaga listrik, yang meliputi:
      i. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.
      ii. Konstruksi Bangunan Elektrikal.
      iii. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi lainnya.
      iv. Instalasi listrik.
      v. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.
      vi. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa.
      vii. Pendidikan Teknik Swasta.
      viii. Kegiatan Penunjang Pendidikan.

   b. Industri penunjang tenaga listrik yang meliputi jenis usaha:
      i. Industri Mesin Pembangkit Listrik.
      ii. Industri Pengubah Tegangan *(Transformator),* Pengubah Arus *(Rectifier)* dan Pengontrol Tegangan *(Voltage Stabilizer).*
      iii. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.
      iv. Industri Peralatan Listrik Lainnya

Business Activities

In accordance with the Company's Articles of Association, the business activities of PLN ND are as follows:

1. Main Business Activities
   The Company's core operations involve electricity provision, including:
   a. Power Plant.
   b. Electricity Transmission.
   c. Electricity Distribution.
   d. Electricity-Related Support Activities.

2. The Company's supporting business activities consist of:
   a. Electricity support, which includes:
      i. Engineering and Related Technical Consultation Activities.
      ii. Electrical Building Construction.
      iii. Construction of other Electrical and Telecommunication Networks.
      iv. Electrical installation.
      v. Technology and Engineering Research and Development.
      vi. Research and Development of Natural Sciences and Engineering Technology.
      vii. Private Engineering Education.
      viii. Educational Support Activities.

   b. Electricity support industry which includes:
      i. Power Plant Machinery Industry.
      ii. Transformer, Rectifier, and Voltage Stabiliser Industry.
      iii. Electrical Equipment Control and Distribution Industry.
      iv. Other Electrical Equipment

Layanan Jasa

PLN Nusa Daya menyediakan berbagai layanan jasa yang menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Melalui layanan tersebut, perusahaan berperan dalam mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan sektor ketenagalistrikan di seluruh wilayah kerjanya. Layanan jasa yang diberikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik.
2. Jasa Operasi dan Pemeliharaan Distribusi.
3. Jasa Operasi dan Pemeliharaan Transmisi.
4. Jasa Billing Management.
5. Jasa kontrak manajemen aset.

Selama tahun 2025, tidak terdapat produk dan layanan Perusahaan yang dilarang atau ditarik kembali dari pasar.

Services

PLN Nusa Daya provides various services covering Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua. Through these services, the Company plays a role in supporting the operational needs and development of the electricity sector across its working areas. The services provided by the Company are as follows:

1. Power Pant Operation and Maintenance Service.
2. Distribution Operation and Maintenance Service.
3. Transmission Operation and Maintenance Service.
4. Billing Management Service.
5. Asset Management Contract Service.

Throughout 2025, there were no products or services that were banned or withdrawn from the market.



Demografi Karyawan
Employee Demographics

Jumlah sumber daya manusia PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025 berjumlah 347 dengan komposisi karyawan sebagai berikut:

As at 31 December 2025, PLN Nusa Daya had a total workforce of 347 employees, with the following composition:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Demographics by Employment Status

No	Status Kepegawaian Employment Status	2025	2024
1	Direksi | Board of Directors	3	3
2	Organik | Organic	63	63
3	Tugas Karya dari PLN | Secondment from PLN	231	151
4	Tugas Karya PLN ND ke PLN | Secondment from PLN ND to PLN	10	151
5	Tugas Karya PLN ND ke PCN | Secondment from PLN ND to PCN	-	-
6	Tugas Karya PCN ke PLN ND | Secondment from PCN to PLN ND	25	27
7	*Pro Hire*	13	15
8	Tugas Karya dari AP PLN ke PLN ND Secondment from PLN Subsidiaries to PLN ND	2	2

Komposisi Karyawan Berdasarkan Penempatan Kerja
Employee Demographics by Placement Status

No	Penempatan Placement	2025	2024
1	Kantor Pusat Head Office	79	81
2	Unit	246	142

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tenaga Kerja

Dalam mendukung berjalannya *Project* PT PLN Nusa Daya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, maka pengelolaan tenaga kerja PLN ND grup per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 25.142 Orang yang tersebar pada Wilayah Kerja *Project* PT PLN Nusa Daya diantaranya:

Employee Composition by Workforce

To support the implementation of PT PLN Nusa Daya's projects in accordance with the agreed contracts, as at 31 December 2025, PLN Nusa Daya Group managed a total workforce of 25,142 personnel deployed across the Company's project work areas, comprising:

No	Pengelola Management	2025	2024
1	O&M Pembangkit | O&M Generation	4.358	4.133
2	O&M Transmisi/GI | O&M Transmission/Substation	2.941	3.070
3	O&M Distribusi | O&M Distribution	9.966	9.399
4	Billman	2.842	2.840
5	Management Building	-	-
6	Serpo	103	107

Struktur Organisasi

Organisational Structure

Berikut adalah struktur organisasi PT PLN Nusa Daya berdasarkan Peraturan Direksi yang baru ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 yaitu Peraturan Direksi PT PLN Nusa Daya Nomor 0044.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusa Daya:

The following is the organisational structure of PT PLN Nusa Daya based on the newly stipulated Board of Directors Regulation dated 1 October 2025, namely PT PLN Nusa Daya Board of Directors Regulation No. 0044.P/DIR/2025 on the Organisation and Work Procedures of PT PLN Nusa Daya:



Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama
President Commisioner
Agung Nugraha

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
P. Gading Aji N.P

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Audit Unit
Supono

Komite Audit
Audit Committee

Ketua | Chairman	**Agung Nugraha**
Anggota | Member	▪ **Edy Kartono** ▪ **I Made Suamba**

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Ketua | Chairman	**Agung Nugraha**
Anggota | Member	**Setiawati**

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee

Ketua | Chairman	**Agung Nugraha**
Anggota | Member	▪ **Ubet Gunawan** ▪ **Rino Gumpar Hutasoit**

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners
Harya Sidharta

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris PLN Nusa Daya Per 31 Desember 2025:

The following is the composition of the Board of Commissioners of PLN Nusa Daya as of 31 December 2025:



Agung Nugraha

Komisaris Utama
President Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Bantul, 28 Desember 1969
Bantul, 28 December 1969

Usia | Age

56 tahun | years old

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Pendidikan | Educational Background

Sarjana Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (1992)
Bachelor of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada (1992)

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 19 September 2023
Circular GMS Resolution dated 19 September 2023

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun pada institusi lain
He does not hold any concurrent positions within the Company or in any other institution

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Komisaris Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (2023-sekarang).
- Executive Vice President Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan pada Divisi Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan Direktorat Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-2023).
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (2019 - 2022).
- General Manager PT PLN (persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (2017-2019).
- President Commissioner, PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (2023–present)
- Executive Vice President of Distribution Operations for Sumatra and Kalimantan, Distribution Operations Division, Directorate of Distribution, PT PLN (Persero) Head Office (2022–2023)
- General Manager, PT PLN (Persero) West Java Distribution Main Unit (2019–2022)
- General Manager, PT PLN (Persero) Central Java and D.I. Yogyakarta Distribution Unit (2017–2019)

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham
He does not have any affiliations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan | Term of Office and Tenure

Periode pertama dan masa jabatan 2023-Sekarang.
First term, serving from 2023 to present.

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2025
Statement of Independence, Shareholding and Training in 2025

Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance chapter, under the Board of Commissioners subsection of this Annual Report.

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors



Feby Joko Priharto

Direktur Utama
President Director

Tempat dan Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Palembang, 10 Februari 1969
Palembang, 10 February 1969

Usia | Age

56 tahun | years old

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Pendidikan | Educational Background

Sarjana Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya (1992)
Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Sriwijaya (1992)

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 03 Agustus 2023
GMS Circular Resolution dated 03 August 2023

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun pada institusi lain
He does not hold any concurrent positions within the Company or in any other institution.

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2023-Sekarang).
- Senior Spesialis Direktorat Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) (2022-2023)
- EVP RJP Divisi Perencanaan Dan Pengendalian Regional Jawa, Madura dan Bali Direktorat Transmisi Dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) (2021 – 2022).
- EVP Retail Reg Jamali Divisi Retail Regional Jawa, Madura dan Bali Direktorat Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) (2020 – 2021).
- President Director, PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2023–present)
- Senior Specialist, Directorate of Distribution, PT PLN (Persero) Head Office (2022–2023);
- EVP of RJP, Planning and Control Division for Java, Madura, and Bali Region, Directorate of Transmission and System Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2021–2022);
- EVP of Retail, Java-Madura-Bali Regional Retail Division, Directorate of Java-Madura-Bali Regional Business, PT PLN (Persero) Head Office (2020–2021).

Sertifikasi | Certification

Qualified Chief Risk Officer

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
He does not have any affiliations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan | Term of Office and Tenure

Periode pertama dan masa jabatan 2023-Sekarang.
First term, serving from 2023 to present.

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2025
Statement of Independence, Shareholding and Training in 2025

Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance chapter, under the Board of Directors subsection of this Annual Report.



Zulhendri

Direktur Keuangan, Manajemen Resiko dan Human Capital
Director of Finance, Risk Management, and Human Capital

Tempat dan Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Padang, 23 Oktober 1977
Padang, 23 October 1977

Usia | Age

48 tahun | years old

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Depok

Pendidikan | Educational Background

- S2 - Master of Finance, Curtin University of Technology, Perth, Australia (2010).
- S1 - Sarjana Akuntansi, Universitas Andalas (2001).
- Master of Finance, Curtin University of Technology, Perth, Australia (2010)
- Bachelor of Accounting, Universitas Andalas (2001)

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler sejak 12 November 2020
Circular GMS Resolution dated 12 November 2020

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun pada institusi lain.
He does not hold any concurrent positions within the Company or in any other institution.

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Keuangan & Administrasi PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2019-sekarang).
- Manajer Portfolio Management 1 pada Bidang Portfolio Management Divisi Portfolio Management Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018).
- Deputi Manajer Kemitraan Bisnis pada Bidang Kemitraan Bisnis Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2018).
- Deputi Manajer Anggaran dan Keuangan pada Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016).
- Director of Finance & Administration, PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2019–present);
- Portfolio Management 1 Manager, Portfolio Management Division, Corporate Planning Directorate, PT PLN (Persero) Head Office (2018);
- Deputy Manager of Business Partnership, Business Partnership Division, Electricity Transaction & Business Partnership Directorate, Corporate Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2016–2018);
- Deputy Manager of Budget and Finance, Finance, HC, and Administration Division, PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016).

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
He does not have any affiliations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan | Term of Office and Tenure

Periode pertama dan masa jabatan 2023-Sekarang.
First term, serving from 2023 to present.

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2025
Statement of Independence, Shareholding and Training in 2025

Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance chapter, under the Board of Directors subsection of this Annual Report.



Reny Wahyu Setiaswan

Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha
Director of Operations and Business Development

Tempat dan Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Jakarta, 16 Juli 1971
Jakarta, 16 July 1971

Usia | Age

54 tahun | years old

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Pendidikan | Educational Background

Sarjana Teknik Listrik, S.T.TEKNIK YPLN (1996)
Bachelor of Electrical Engineering, ST Teknik YPLN (1996)

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 3 Agustus 2023
Circular GMS Resolution dated 3 August 2023

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun pada institusi lain
He does not hold any concurrent positions within the Company or in any other institution.

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Direktur Operasi & Pengembangan Usaha PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2023-sekarang).
- VP KIN dan STD KBJ Distribusi Bidang Kinerja dan Standarisasi Kebijakan Distribusi Divisi Perencanaan Strategis Distribusi Direktorat Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) (2022–2023).
- SRM DIST Bidang Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PT PLN (Persero) (2022).
- SRM REN Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara PT PLN (Persero) (2021–2022).
- Director of Operations & Business Development, PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (2023–present);
- VP KIN and STD KBJ Distribution Performance and Standardization Policy, Strategic Distribution Planning Division, Directorate of Distribution, PT PLN (Persero) Head Office (2022-2023);
- SRM DIST Distribution Division, PT PLN (Persero) South Sumatra, Jambi and Bengkulu Regional Main Unit (2022);
- SRM REN Planning Division, PT PLN (Persero) North Sumatra Regional Main Unit (2021-2022).

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
He does not have any affiliations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan | Term of Office and Tenure

Periode pertama dan masa jabatan 2023-Sekarang.
First term, serving from 2023 to present.

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2025
Statement of Independence, Shareholding and Training in 2025

Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance chapter, under the Board of Directors subsection of this Annual Report.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025

Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors During and After the 2025 Fiscal Year

Sepanjang Tahun Buku dan setelah tahun buku 2025 hingga tanggal penyampaian Laporan Tahunan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi PLN Nusa Daya, sehingga tidak ada informasi terkait alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Nusa Daya.

Throughout the fiscal year and after the end of the 2025 fiscal year up to the date of submission of this Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners or the Board of Directors of PLN Nusa Daya. Accordingly, there is no information to disclose regarding the reasons for any changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya.

Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan

Company Group Structure, Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Struktur Grup Perusahaan

PT PLN Nusa Daya (PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya) adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, serta jasa operasi dan pemeliharaan untuk infrastruktur kelistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi) di wilayah Indonesia.

Struktur grup perusahaan PLN Nusa Daya terdiri dari:

Company Group Structure

PT PLN Nusa Daya (PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya) is a subsidiary of PT PLN (Persero) engaged in the provision of electricity, as well as operation and maintenance services for electrical infrastructure (power generation, transmission, and distribution) throughout Indonesia.

The Company group structure of PLN Nusa Daya consists of:



Entitas Anak

Subsidiary



PT Paguntaka Cahaya Nusantara merupakan entitas anak yang berada di bawah pengendalian PLN Nusa Daya. Sebagai entitas yang dikendalikan sepenuhnya, PLN Nusa Daya memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan keuangan dan operasional PT Paguntaka Cahaya Nusantara, dengan tujuan memperoleh manfaat dari aktivitas usaha yang dijalankan. Melalui pengelolaan entitas anak tersebut, PLN Nusa Daya memperkuat sinergi serta mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan, khususnya dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah operasionalnya.

PT Paguntaka Cahaya Nusantara is a subsidiary under the control of PLN Nusa Daya. As a fully controlled entity, PLN Nusa Daya has the authority to determine the financial and operational policies of PT Paguntaka Cahaya Nusantara, with the aim of obtaining benefits from the business activities carried out. Through the management of this subsidiary, PLN Nusa Daya strengthens synergy and supports the achievement of the Company's vision, mission, and strategy, particularly in maintaining the reliability of electricity supply across its operational areas.

Nama Name	PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN)
Alamat Address	Jalan RE Martadinata, No.35, RT.52, Kel. Gunungsari Hilir, Kec. Balikpapan Tengah Kota Kalimantan Timur 76112
Telepon Phone	(0542) 8507238
Bidang Usaha Line of Business	• Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Pelayan Pelanggan Ketenagalistrikan • Penyediaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan lainnya *(Management Building)* • Provision and Management of Operation and Maintenance of Power Plant, Transmission, Distribution and Customer Service on Electricity. • Provision of other Electricity Support Services (Building Management).
Total Aset Total Asset	Rp352.190 juta per 31 Desember 2025 Rp352,190 million as of 31 December 2025
Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)	99,96%
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi merupakan perusahaan atau entitas di mana suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan, namun tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan keuangan dan operasionalnya. Pengaruh signifikan tersebut umumnya tercermin dari kepemilikan saham sebesar 20% hingga 50% dari hak suara entitas terkait. Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya tidak memiliki entitas asosiasi.

Joint Venture dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)

Joint Venture (usaha bersama) merupakan bentuk kerja sama di mana para pihak memiliki bagian partisipasi dan diatur melalui perjanjian untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Dalam entitas tersebut, keputusan strategis keuangan dan operasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha harus disepakati secara konsensus oleh seluruh pihak yang memiliki pengendalian bersama. Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya tidak memiliki *Joint Venture Company.*

Special Purpose Vehicle (SPV) merupakan suatu entitas perusahaan yang dibentuk dengan tujuan atau fokus yang terbatas untuk melaksanakan aktivitas tertentu atau bersifat sementara. Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Associates

An associate is a company or entity in which a company has significant influence, but does not have full control over its financial and operational policies. Such significant influence is generally reflected in share ownership of 20% to 50% of the voting rights of the relevant entity. As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya had no associates.

Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV)

A Joint Venture is a form of cooperation in which the parties have participating interests and are governed by an agreement to share control over an activity. In such an entity, strategic financial and operational decisions related to the business activities must be agreed upon by consensus of all parties that share joint control. As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya did not have any Joint Venture Company.

A Special Purpose Vehicle (SPV) is a corporate entity established with a limited purpose or focus to carry out specific or temporary activities. As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya did not have any Special Purpose Vehicle (SPV).

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information

Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham Perusahaan terdiri atas PT PLN (Persero) dengan porsi kepemilikan sebesar 99,97% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN sebesar 0,03%. Dengan kepemilikan tersebut, PT PLN (Persero) bertindak sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang kendali Perusahaan. Komposisi modal saham yang berlaku sejak 1 Januari 2023 mengacu pada Akta Notaris Nomor 72 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0000004. AH.01.02.TAHUN 2023 adalah sebagai berikut:

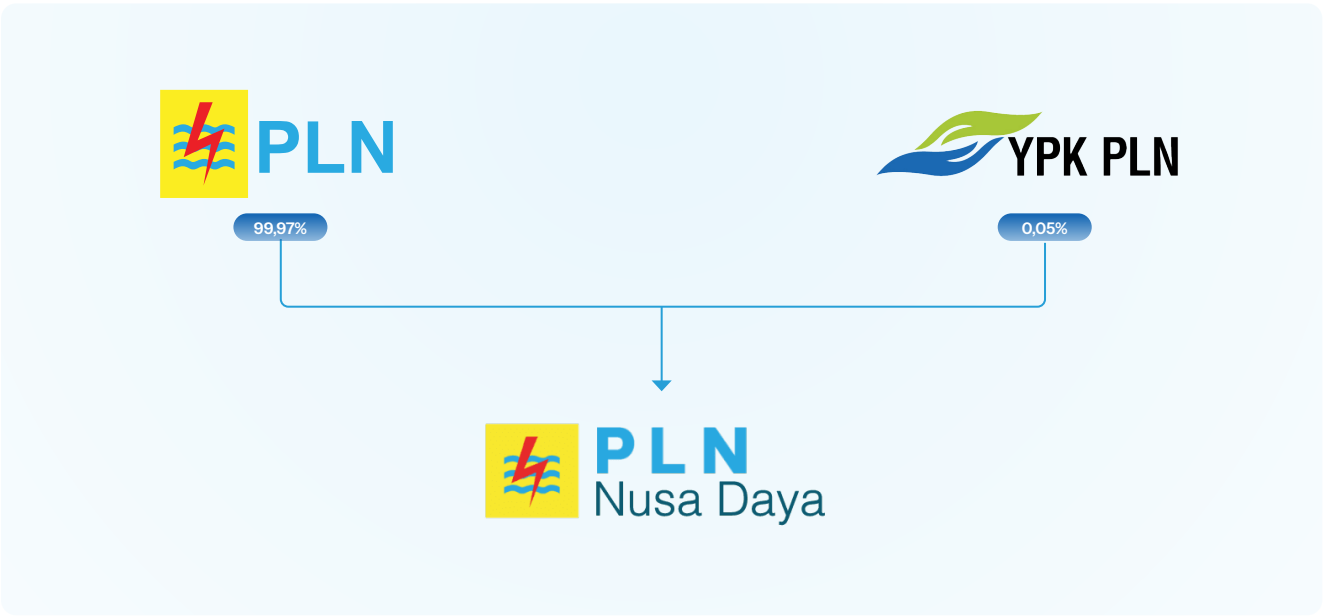
Shareholding Composition

The Company's shareholding structure consists of PT PLN (Persero) with an ownership portion of 99.97% and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN Education and Welfare Foundation), with an ownership portion of 0.03%. With this ownership, PT PLN (Persero) acts as the majority shareholder as well as the controlling shareholder of the Company. The composition of share capital effective since 1 January 2023 refers to Notarial Deed No. 72 dated 30 December 2022 on the Amendment to the Company's Articles of Association, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0000004.AH.01.02.TAHUN 2023, as follows:

Keterangan Description	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham Par Value of Rp1,000,000 per share		
	Jumlah saham Total shares	Jumlah (Rp Juta) Total (Rp Milion)	%
Modal Dasar Authorised Capital	79.000.000	79.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Issued and Fully Paid Capital:			
PT PLN (Persero)	78.975.00	78.975	99,97
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN) PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation	25.000	25	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid Capital	79.000.000	79.000	100

Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham sampai dengan pemegang saham pengendali akhir *(ultimate shareholder)* dapat dilihat pada skema berikut:

A diagram showing the structure and shareholding composition up to the ultimate shareholder is presented in the following scheme.



Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hingga akhir Desember 2025, PT PLN (Persero) tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PLN Nusa Daya dengan kepemilikan sebesar 99,97% atau setara dengan 78.975.000 lembar saham. Dengan komposisi kepemilikan tersebut, PT PLN (Persero) berperan sebagai Pemegang Saham Utama PLN Nusa Daya.

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Pembangkitan, Distribusi, Transmisi, dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan. PT PLN (Persero) Pertama kali berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 kemudian menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero) berdasarkan Akta 169, 30 Juli 1994 dari Notaris Sutjipto.

Sesuai keterbukaan informasi Perseroan tanggal 27 Maret 2025, struktur kepemilikan saham PT PLN (Persero) terdiri atas Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Negara Republik Indonesia tetap menjadi pemegang kendali melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak istimewa, sedangkan Saham Seri B dialihkan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai bagian dari penataan struktur pengelolaan BUMN.

Selanjutnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berubah nama menjadi PT Danantara Asset Management (Persero) pada tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, pemegang Saham Seri B Perseroan adalah PT Danantara Asset Management (Persero), yang merupakan bagian dari struktur pengelolaan investasi strategis negara. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan struktur kepemilikan secara administratif, PT PLN (Persero) tetap berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengendalian Perseroan tetap berada pada Negara Republik Indonesia.

Hingga 31 Desember 2025, PTL PLN (Persero) memiliki 7 (tujuh) entitas Anak Perusahaan dan 4 (empat) entitas Subholding.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Profil Perusahaan

Hingga Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham PLN Nusa Daya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, terdapat kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

Information on Majority and Controlling Shareholder

As at the end of December 2025, PT PLN (Persero) was the majority shareholder of PLN Nusa Daya, with a 99.97% shareholding, equivalent to 78,975,000 shares. Based on this ownership structure, PT PLN (Persero) acts as the Majority Shareholder of PLN Nusa Daya.

PT PLN (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in Power Plant, Distribution, Transmission and other Electricity-related Services. PT PLN (Persero) was first established as the Electricity and Gas Authority pursuant to Government Decree No. 1 SD/1945 dated 27 October 1945, and was subsequently established as a limited liability company under the name PT PLN (Persero) pursuant to Deed No. 169 dated 30 July 1994, made before Notary Sutjipto.

In accordance with the Company's disclosure dated 27 March 2025, the shareholding structure of PT PLN (Persero) consists of Dual-Class Series A Shares and Series B Shares. The Republic of Indonesia remains the controlling shareholder through its ownership of Dual-Class Series A Shares, which carry special rights, while the Series B Shares were transferred to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as part of the restructuring of SOE governance.

In 2025, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) subsequently changed its name to PT Danantara Asset Management (Persero). As at 31 December 2025, the holder of the Series B Shares was PT Danantara Asset Management (Persero), which forms part of the state's strategic investment management structure. Accordingly, notwithstanding the administrative changes to the ownership structure, PT PLN (Persero) retains its status as a State-Owned Enterprise (SOE), while control of the Company remains with the Republic of Indonesia.

As at 31 December 2025, PT PLN (Persero) had 7 (seven) subsidiaries and 4 (four) Subholding entities.

Shareholding by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 2025, no members of the Board of Commissioners or Board of Directors held shares in PLN Nusa Daya, either directly or indirectly. However, there were shareholdings by members of the Board of Commissioners and Board of Directors in other companies, as further described in the Corporate Governance Chapter.

Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% atau Lebih 5%

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PLN Nusa Daya. Oleh karena itu, pemegang saham yang memiliki kepemilikan sebesar 5% atau lebih dalam Perusahaan adalah PT PLN (Persero).

Shareholders with Ownership of 5% or More

As of 31 December 2025, PT PLN (Persero) was the majority shareholder of PLN Nusa Daya. Therefore, the shareholder with ownership of 5% or more in the Company is PT PLN (Persero).

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Hingga Desember 2025, PLN Nusa Daya belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki pemegang saham dari masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Public Shareholders with Ownership of Less than 5%

As of December 2025, PLN Nusa Daya had not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, the Company does not have public shareholders with individual share ownership of less than 5%.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Hingga akhir tahun 2025, seluruh kepemilikan saham PLN Nusa Daya dimiliki oleh entitas domestik, yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), yang keduanya berkedudukan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification

As of the end of 2025, all shares of PLNNusa Daya are owned by domestic entities, namely PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation, both of which are based in Indonesia, as shown in the following table:

Kepemilikan saham Stock Ownership	**Jumlah dan Persentase Kepemilikan Saham** Number and Percentage of Stock Ownership
Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership	1. PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 78.975.000 lembar saham (99,97%) 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN) dengan kepemilikan saham 25.000 lembar saham (0,03%) 1. PT PLN (Persero), with a shareholding of Rp2,298,716,000,000 (99.97%) 2. PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation (YPK PLN), with a shareholding of Rp1,000,000 (0.03%)
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu lokal Local individual ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu asing Foreign individual ownership	Tidak ada None

Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Hingga 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya belum melakukan pencatatan saham di bursa efek, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologi pencatatan saham, tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa efek yang terkait. Dengan demikian, tidak terdapat riwayat pencatatan saham maupun informasi saham lainnya yang dapat diungkapkan. Kepemilikan saham Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN).

As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya had not listed its shares on any stock exchange, either in Indonesia or overseas. Accordingly, there is no information regarding the chronology of share listing, corporate actions, changes in the number of shares, or the names of any relevant stock exchanges. Therefore, there is no share listing history or other share-related information to be disclosed. The Company's shares are fully owned by PT PLN (Persero) and Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) (YPK PLN).

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Listing of Other Securities

Hingga 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya belum melakukan pencatatan efek lainnya di Bursa Efek, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kronologi pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa efek, maupun peringkat efek yang dapat dilaporkan.

As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya had not listed any other securities on any stock exchange, either in Indonesia or overseas. Accordingly, there is no information to be reported regarding the listing chronology, corporate actions, changes in the number of securities, the names of any stock exchanges, or securities ratings.

Wilayah Operasional Perusahaan
Operational Area



Area operasi PLN Nusa Daya mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
PLN Nusa Daya's operational area covers the regions of Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua.

Keterangan / Information:

- Kantor Pusat di Balikpapan / Head Office in Balikpapan
- Kantor Perwakilan di Jakarta / Representative Office in Jakarta
- Kantor Unit Pelaksana Kalimantan 1 di Pontianak / Kalimantan 1 Implementation Unit Office in Pontianak
- Kantor Unit Pelaksana Kalimantan 2 di Banjarbaru / Kalimantan 2 Implementation Unit Office in Banjarbaru
- Kantor Unit Pelaksana Kalimantan 3 di Balikpapan / Kalimantan 3 Implementation Unit Office in Balikpapan
- Kantor Unit Pelaksana Sulawesi 1 di Manado / Sulawesi 1 Implementation Unit Office in Manado
- Kantor Unit Pelaksana Sulawesi 2 di Makassar / Sulawesi 1 Implementation Unit Office in Makassar
- Kantor Unit Pelaksana Nusa Tenggara di Mataram / Nusa Tenggara Implementation Unit Office in Mataram
- Kantor Unit Pelaksana Maluku di Ambon / Maluku Implementation Unit Office in Ambon
- Kantor Unit Pelaksana Papua di Jayapura / Papua Implementation Unit Office in Jayapura

Alamat Kantor Perwakilan dan Kantor Regional

Addresses of Representative Office and Regional Offices

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No.78
Kelurahan Damai Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, 76114

(0542) 8703981 / (0542) 8506674
plnnd@plnnusadaya.co.id

Kantor Operasional
Operational Office

Jl. Tirtayasa II No.12, RT.3/RW.2, Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

Kantor Pelaksana
Implementation Unit Office

Unit Pelaksana Kalimantan
Kalimantan Implementation Unit
Jl. Alteri Supadio, Komplek Villa Ceria
Lestari Rukan, No. 20 Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Kalimantan 2
Kalimantan 2 Implementation Unit
Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 22
Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Unit Pelaksana Kalimantan 3
Kalimantan 3 Implementation Unit
Jl. RE Martadinata, Gunungsari
Ilir, Kec. Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Unit Pelaksana Sulawesi 1
Sulawesi 1 Implementation Unit
Jl. Santu Yosep No.39, Kelurahan
Kleak, Kecamatan Malalayang,
Manado, Sulawesi Utara

Unit Pelaksana Sulawesi 2
Sulawesi 2 Implementation Unit
Jl. Bonto Ramba, No. 09,
Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalat
Makassar, Sulawesi Selatan

Unit Pelaksana Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Implementation Unit
Jl. Langko No. 43, Dasan Agung
Baru, Kecamatan Selaparan,
Mataram, Nusa Tenggara Barat

Unit Pelaksana Maluku
Maluku Implementation Unit
Jl. Said Perintah no 53, Kel
Ahusen, Kec Sirimau, Kota Ambon

Unit Pelaksana Papua
Papua Implementation Unit
Jl. Perum Jaya Asri, Blok E-5
Entrop Jayapura, Papua

Daftar Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

2023 - 2027

Indonesia Hydropower Association (INAHA)

Anggota Aktif | Active Member

2022 - 2025

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI)
Indonesian Electrical Power Society

Anggota Aktif | Active Member

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perusahaan
Public Accountant and Public Accounting Firm of the Company

Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024 Business Licence Number: KEP-315/KM.1/2024
Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Dedy Lesmana, S.E.,CPA Nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1782 Public Accountant's Licence No. AP.1782
Alamat KAP KAP Address	WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 29, RT. 4/RW. 2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Indonesia 12920 Telp : (021) 5099 2901/3119 2901 Fax : (021) 5290 5555/5290 5050 Email : www.pwc.com/id
Periode Penugasan KAP KAP Assignment Period	Periode ke 3 3rd Period
Periode Penugasan AP AP Assignment Period	Periode ke 1 1st Period
Biaya jasa *(fee)* audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025 Audit fees for each assignment assigned during the 2025 fiscal year	

No	Jasa Audit Audit Services	Biaya Audit Fee Audit
1	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Rp848.060.000
2	Audit Laporan Kepatuhan Compliance Report Audit	
3	Audit Laporan Evaluasi Kinerja Audit of the Performance Evaluation Report	

Biaya jasa *(fee)* Non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025 Non-audit service fees for each engagement assigned during the 2025 fiscal year	Pada tahun buku 2025, tidak terdapat pembayaran biaya non-audit kepada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan *(PricewaterhouseCoopers)* karena tidak ada kerja sama selain untuk pelaksanaan audit tersebut. In fiscal year 2025, no non-audit fees were paid to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PricewaterhouseCoopers) because there was no collaboration other than the performance of the audit.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Supporting Institutions and Professionals

Notaris Notary	
Nama Name	Monadha, S.H.,M.Kn.
Izin Notaris Notarial License	SK Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-00015.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 07 Februari 2022 Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00015.AH.01.02. in 2022 dated 7 February 2022
Alamat Address	Jl. Puri Mutiara Raya, No. 7B, Jeruk Purut, Cilandak Barat Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telp | Phone	08129029604 / 087771032258
Situs web | website	monadha.not21@gmail.com
Jasa yang Diberikan Service Rendered	Notaris untuk RUPST RKAP & LPT PT PLN Nusa Daya Notary for PLN Nusa Daya's AGMS WP&B and AR

Notaris Notary	
Nama Name	Novianti, S.H.,M.Kn.
Izin Notaris Notarial License	SK Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-00849.AH.02.01. Tahun 2016 tanggal 21 September 2016 Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00849.AH.02.01. in 2016 dated 21 September 2016
Alamat Address	Jl. D.I. Panjaitan, RT. 29, No. 19, Kelurahan Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telp | Phone	(0542) 80509076 / 0819870974
Email	noviantinotaris@gmail.com
Jasa yang Diberikan Service Rendered	Notaris untuk RUPS luar biasa atau sirkuler PT PLN Nusa Daya Notary for the extraordinary or circular GMS of PT PLN Nusa Daya

Informasi Pada *Website* Perusahaan

Information on the Company's Website

Informasi mengenai Perusahaan dapat diakses melalui situs www.plnnusadaya.co.id. Di dalamnya memuat informasi mengenai profil, kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan.

Information about the Company can be accessed through its website at www.plnnusadaya.co.id. The website provides information on the Company's profile, operational activities, and performance.

Situs web ini disajikan dalam Bahasa Indonesia. Berikut fitur menu pada *website* Perusahaan:

The website is available in Indonesian. The following are the menu features available on the Company's website:

No	Fitur Feature	Keterangan Description
1	*Home*	Informasi yang disajikan mencakup jumlah proyek, jumlah tenaga kerja, kantor unit pelaksana, tahun Perusahaan berdiri, *Service,* berita terkini Perusahaan, portofolio, serta profil direksi. Information presented includes the number of projects, number of personnel, implementing unit offices, year of establishment of the Company, services, the latest Company news, portfolio, and profiles of the Board of Directors.
2	Profil Profile	Informasi yang disajikan dalam menu Profil Perusahaan berupa: tentang kami (PLN Nusa Daya), Visi Misi, Tata Nilai, Profil Direksi, Profil Komisaris, Anak perusahaan, Wilayah Kerja, Buku saku "Aku Jago", dan Kontak Kami. Information presented under the Company Profile menu includes About Us (PLN Nusa Daya), Vision and Mission, Corporate Values, Profile of the Board of Directors, Profile of the Board of Commissioners, Subsidiaries, Work Areas, the "Aku Jago" pocket book, and Contact Us.
3	Tata Kelola Governance	Pada menu tata Kelola, informasi yang disajikan berupa: Board Manual, Code of Conduct, Pedoman GCG, Annual Report, Sustainability Report, Risk Management, Total Nilai Resiko, Kepatuhan, Pedoman Transparansi, Whistle Blowing System, Budaya K3, Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan, RUPS, dan Anggaran Dasar. The Governance menu presents information including the Board Manual, Code of Conduct, GCG Guidelines, Annual Report, Sustainability Report, Risk Management, Total Risk Score, Compliance, Transparency Guidelines, Whistleblowing System, OHS Culture, Employee Reward Management System, GMS, and Articles of Association.
4	Layanan Services	Informasi yang disajikan mencakup Drups (*Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply*) dan yang ListriQu merupakan layanan aplikasi mobile masalah kelistrikan di Rumah. Information presented includes DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply) and ListriQu, a mobile application service for household electricity-related issues.
5	Laporan Manajemen Management Report	Informasi pada Laporan Manajemen berupa Laporan Triwulan dan Laporan semester. The Management Report menu contains quarterly reports and semi-annual reports.
6	Pengadaan Procurement	Berisi informasi Pengadaan dan Pedoman Pengadaan. Contains information on procurement and procurement guidelines.
7	Media	Berita mengenai PLN Nusa Daya Contains news regarding PLN Nusa Daya
8	*Privacy Policy*	Kebijakan Privasi untuk menghormati privasi dan melindungi data pribadi konsumen. Contains the Privacy Policy to respect consumers' privacy and protect their personal data.
9	AKHLAK	Sebagai core value dalam membangun hubungan kerja yang profesional, jujur, beretika, dan berintegritas. Presented as the core values for building professional, honest, ethical and integrity-based working relationships.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT OVERVIEW



Penguatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas operasional serta pencapaian kinerja Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya terus mengoptimalkan pengelolaan kedua aspek tersebut sebagai enabler bagi keberlanjutan bisnis.

Strengthening Human Capital (HC) and Information Technology (IT) capabilities remained a key foundation for enhancing operational effectiveness and achieving the Company's performance objectives. Throughout 2025, PLN Nusa Daya continued to optimize the management of these two strategic enablers to support sustainable business growth.



Sumber Daya Manusia

Human Capital

PLN Nusa Daya menempatkan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas strategis dalam mendukung keberlanjutan kinerja dan pencapaian tujuan Perusahaan. Keberadaan SDM yang kompeten, adaptif, dan berintegritas menjadi modal utama bagi Perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta dinamika industri yang terus berkembang. Untuk itu, PLN Nusa Daya menerapkan sistem pengelolaan SDM yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu maupun organisasi. Seluruh proses pengelolaan SDM dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pendekatan tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap program pengembangan SDM berjalan secara optimal, selaras dengan kebutuhan bisnis, serta memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengelola SDM

Pengelolaan SDM di PLN Nusa Daya dilakukan oleh Divisi Manajemen *Human Capital* di bawah Direktorat Keuangan dan Administrasi. Pengelola ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusa Daya No. 0044.P/DIR/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PLN Nusa Daya.

Sistem Manajemen SDM

Untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha PLN Nusa Daya dalam menjalankan penugasan di wilayah kerja Indonesia Timur serta mendukung pencapaian Visi, Misi, dan agenda Transformasi *Moonshot* PLN, Perusahaan terus memperkuat pengelolaan SDM secara terencana dan berkelanjutan. Pengelolaan SDM yang efektif menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis sekaligus memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan upaya tersebut, tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan berbagai inisiatif pengembangan serta implementasi aplikasi SDM, baik yang dikembangkan secara internal maupun melalui sinergi dengan PLN Group. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan tata kelola SDM yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pengalaman pegawai melalui pendekatan *Human Experience Management System* (HXMS). Implementasi tersebut selaras dengan program ratifikasi PLN Group yang berfokus pada penerapan prinsip 4 *Rights*, yaitu:

PLN Nusa Daya places the development and management of Human Capital (HC) as one of its strategic priorities in supporting sustainable performance and the achievement of the Company's objectives. Competent, adaptive, and high-integrity human capital serves as a key asset for the Company in responding to changes in the business environment and evolving industry dynamics. Accordingly, PLN Nusa Daya implements a structured HC management system that is oriented towards enhancing both individual and organisational capabilities. All HC management processes are carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance, upholding professionalism, transparency, and accountability. Through this approach, the Company strives to ensure that each HC development programme is implemented optimally, aligned with business needs, and compliant with prevailing labour laws and regulations.

HC Management Function

HC management at PLN Nusa Daya is carried out by the Human Capital Management Division under the Directorate of Finance and Administration. This function is established pursuant to Board of Directors' Regulation of PT PLN Nusa Daya No. 0044.P/DIR/2025 dated 1 October 2025 on the Organisation and Work Procedures of PLN Nusa Daya.

HC Management System

To support the growth and development of PLN Nusa Daya's business in carrying out its assignments across Eastern Indonesia, as well as to support the achievement of PLN's Vision, Mission, and Moonshot Transformation agenda, the Company continues to strengthen HC management in a planned and sustainable manner. Effective HC management is an important factor in addressing increasingly dynamic business challenges while meeting stakeholder expectations.

In line with these efforts, in 2025 the Company implemented various HC development initiatives and HC application implementations, both developed internally and through synergy with the PLN Group. These initiatives were carried out to support the implementation of modern, integrated, and employee experience-oriented HC governance through the Human Experience Management System (HXMS) approach. The implementation is aligned with the PLN Group ratification programme, which focuses on the application of the 4 Rights principles, namely:

HUMAN EXPERIENCES MANAGEMENT SYSTEM (HXMS)



Dengan mengedepankan prinsip utama HXMS yaitu menciptakan *Experience* melalui dukungan teknologi untuk mendorong penciptaan *Value Creation.* Sehingga teknologi menjadi peran penting dalam HXMS. PLN Nusa Daya telah mengembangkan dan terus mengembangkan beberapa teknologi yang mendukung penciptaan *value creation* dalam pengelolaan pegawai antara lain namun tidak terbatas pada:

1. SAP Success Factor Modul Succession Planning & Development Planning (SAP SF SCDP) Program PLN Pusat;
2. SAP Success Factor Modul Performance Management & Goal Management (SAP SF PMGM) Program PLN Pusat;
3. Portal Human Experience Management System (HXMS) program PLN Pusat dalam mengkonsolidasikan seluruh data kepegawaian PLN Group;
4. Aplikasi Komando Program PLN Pusat dalam mendukung penciptaan Budaya AKHLAK di lingkungan PLN Nusa Daya;
5. Portal PLN Nusa Daya;
6. Aplikasi Knowledge Management melalui PLN Kita yang terintegrasi di seluruh PLN Group;

With HXMS centred on the creation of experiences through technology to drive value creation, technology plays a key role in its implementation. PLN Nusa Daya has developed, and continues to develop, various technologies that support value creation in employee management, including, but not limited to:

1. SAP Success Factors Succession Planning & Development Planning Module (SAP SF SCDP), PLN Head Office Programme;
2. SAP Success Factors Performance Management & Goal Management Module (SAP SF PMGM), PLN Head Office Programme;
3. Human Experience Management System (HXMS) Portal, PLN Head Office Programme, to consolidate employee data across the PLN Group;
4. Komando application, PLN Head Office Programme, to support the development of the AKHLAK Culture within PLN Nusa Daya;
5. PLN Nusa Daya Portal;
6. Knowledge Management application through PLN Kita, integrated across the PLN Group;

7. Aplikasi Next Human Resource Information System (Next HRIS);
8. Sistem Manajemen Kontrak dan Invoice (SIMKOIN);
9. Key Performance *Indicator* PLN Nusa Daya;
10. AMS Terpusat;
11. Aplikasi Absensi berbasis Titik Koordinat (Sebatik);

12. Aplikasi Safety of Essensial (SOE);
13. Seluruh aplikasi yang berhubungan langsung dengan proses bisnis PLN Nusa Daya akan diintegrasikan melalui 1 aplikasi yaitu aplikasi TEAMS merupakan pedoman yang terpadu dan reliable secara digital sebagai Super Apps Perusahaan.

Analisis Kecukupan SDM

Pada akhir tahun 2025, jumlah karyawan PLN Nusa Daya adalah sebanyak 347 karyawan. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 262 karyawan.

Manajemen menilai bahwa jumlah karyawan yang dimiliki hingga akhir tahun 2025 telah memadai untuk mendukung kebutuhan operasional Perusahaan. Namun demikian, seiring dengan dinamika bisnis yang terus berkembang dan perubahan kebutuhan organisasi, jumlah karyawan pada masa mendatang berpotensi mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja secara adaptif dan berkelanjutan guna memastikan ketersediaan SDM yang tepat dari sisi jumlah maupun kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Secara lebih rinci, demografi karyawan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Statistik Karyawan dalam Laporan Tahunan ini.

Program Pengembangan Kompetensi SDM

PLN Nusa Daya mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi yang sistematis dan berkesinambungan. Inisiatif tersebut disusun untuk memperkuat kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan bisnis, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja individu maupun produktivitas perusahaan secara optimal dan berkelanjutan.

7. Next Human Resource Information System (Next HRIS) application;
8. Contract and Invoice Management System (SIMKOIN);
9. PLN Nusa Daya Key Performance Indicator system;
10. Centralised AMS;
11. Coordinate Point-based Attendance Application (Sebatik);
12. Safety of Essential (SOE) application; and
13. All applications directly related to PLN Nusa Daya's business processes will be integrated into a single application, namely TEAMS, which serves as an integrated and reliable digital guideline as the Company's Super App.

HC Adequacy Analysis

As of the end of 2025, PLN Nusa Daya employed a total of 347 employees, an increase from 262 employees in 2024.

Management considers that the number of employees as of the end of 2025 was sufficient to support the Company's operational needs. Nevertheless, in line with evolving business dynamics and changes in organisational requirements, the number of employees may fluctuate in the future. Accordingly, the Company continues to carry out adaptive and sustainable workforce planning to ensure the availability of the right human capital in terms of both number and competence, in accordance with business needs.

More detailed employee demographic information is presented in the Company Profile Chapter, Employee Statistics Sub-chapter, of this Annual Report.

HC Competency Development Programme

PLN Nusa Daya implements various strategic initiatives focused on improving the quality of its human capital through systematic and continuous competency development. These initiatives are designed to strengthen employees' capabilities, knowledge, and skills so that they can become more adaptive to business needs, thereby supporting improvements in individual performance and overall Company productivity in an optimal and sustainable manner.



UP SKILLING

Program yang meliputi kegiatan:
- Peningkatan Kompetensi Bidang Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan *Billing Management;*
- Penguatan Tata Nilai AKHLAK; dan
- *Refreshment* K3.

The programme comprises the following activities:
- Competency enhancement in Power Plant, Transmission, Distribution, and Billing Management;
- Strengthening of AKHLAK Core Values; and
- OHS refreshment.



SERTIFIKASI KOMPETENSI
COMPETENCY CERTIFICATION

Sertifikasi Kompetensi TK *Project* pekerjaan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi.
Competency Certification for project-based technical personnel in Power Plant, Transmission, and Distribution work.



AKADEMI YANTEK
YANTEK ACADEMY

Peningkatan Kompetensi TK Yantek meliputi kegiatan:
- Pembelajaran Yantek;
- Penguatan Tata Nilai AKHLAK; dan
- *Refreshment* K3.

Competency development for Yantek (Technical Services) personnel comprises the following activities:
- Yantek learning;
- Strengthening of AKHLAK Core Values; and
- OHS refreshment.

Realisasi Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2025

Program pengembangan kompetensi yang dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisation of HC Competency Development in 2025

The competency development programme carried out by the Company to improve employee competencies in 2025 is presented below:

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2025
Employee Competency Development Realisation in 2025.

No	Region	Jumlah Peserta per Program Pengembangan Kompetensi (karyawan) Number of Participants per Competency Development Programme (employees)		
		Up Skilling	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Akademik Yantek Yantek Academy
1.	Kalimantan 1	-	200	62
2.	Kalimantan 2	367	265	234
3.	Kalimantan 3	14	352	21
4.	Sulawesi 1	83	30	-
5.	Sulawesi 2	321	149	-
6.	Nusa Tenggara	76	456	1.036
7.	Maluku	539	111	-
8.	Papua	78	284	453
		102	200	-
Jumlah Total		**1.580**	**2.047**	**1.806**

Biaya Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi sebesar Rp3.941.297.518 yaitu meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp746.000.000. Alokasi dana tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dirancang guna memperkuat kompetensi teknis (*hard skill*) maupun kompetensi perilaku dan interpersonal (*soft skill*) karyawan, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja individu serta pencapaian target bisnis Perusahaan secara berkelanjutan.

HC Competency Development Costs in 2025

Throughout 2025, the Company allocated a competency development budget of Rp3,941,297,518, reflecting an increase compared with the 2024 realisation of Rp746,000,000. The allocation was used effectively to implement various training and development programmes designed to strengthen employees' technical competencies (hard skills), as well as behavioural and interpersonal competencies (soft skills), thereby supporting improvements in individual performance and the sustainable achievement of the Company's business targets.

Rencana Pengembangan SDM Tahun 2026

Rencana program strategi Perusahaan dalam melakukan pengembangan karyawan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

HC Development Plan for 2026

The Company's strategic programme plan for employee development is presented below:

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2026
Employee Competency Development Plan for 2026.

No	Region	Jumlah Peserta per Program Pengembangan Kompetensi (karyawan) Number of Participants per Competency Development Programme (employees)		
		Up Skilling	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Akademik Yantek Yantek Academy
1.	Kalimantan 1	150	67	105
2.	Kalimantan 2	200	100	27
3.	Kalimantan 3	100	167	152
4.	Sulawesi 1	150	67	29
5.	Sulawesi 2	200	67	103
6.	Nusa Tenggara	200	200	259
7.	Maluku	150	1.000	58
8.	Papua	100	333	544
		100	100	29
Jumlah **Total**		**1.350**	**2.100**	**1.306**

Kebijakan Kesetaraan Gender, Pekerja di Bawah Umur, dan Pekerja Paksa

PLN Nusa Daya memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan tanpa membedakan *gender*, serta menolak segala bentuk pekerja anak dan kerja paksa dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja dilakukan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Policy on Gender Equality, Child Labour and Forced Labour

PLN Nusa Daya is strongly committed to implementing human capital management practices based on the principle of equal opportunity regardless of gender, while rejecting all forms of child labour and forced labour across the Company's operational activities. The implementation of this policy aims to ensure that recruitment and workforce management processes are carried out appropriately, professionally, and in accordance with organisational needs.

Di samping itu, PLN Nusa Daya senantiasa menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh karyawan. Perusahaan juga menerapkan kode etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Perusahaan serta menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses secara transparan. Seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perusahaan dalam memperkuat kinerja organisasi, mendukung pertumbuhan usaha, serta menciptakan keberlanjutan jangka panjang.

In addition, PLN Nusa Daya consistently provides a safe, comfortable, and productivity-supporting work environment, equipped with adequate facilities and infrastructure for all employees. The Company also implements a code of conduct as behavioural guidance for all Company personnel and provides an open, accountable, and transparently accessible whistleblowing mechanism. All of these initiatives form part of the Company's ongoing efforts to strengthen organisational performance, support business growth, and create long-term sustainability.

Pengembangan Talenta

Program pengembangan talenta PLN Nusa Daya disusun secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan kesiapan talenta terpilih dalam menghadapi tuntutan bisnis yang terus berkembang. Melalui program ini, Perusahaan berupaya membekali talenta dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan. Adapun target *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan terkait pelaksanaan pengembangan talenta adalah sebagai berikut:

Talent Development

PLN Nusa Daya's talent development programme is structured to enhance the competence, capability, and readiness of selected talent in responding to evolving business demands. Through this programme, the Company aims to equip talent with relevant knowledge, skills, and experience, enabling them to contribute more optimally to the achievement of the Company's strategic objectives. The Key Performance Indicator (KPI) targets established for the implementation of talent development are presented below:

Tabel Pencapaian KPI *Talent Diversity* Tahun 2025
Table of Talent Diversity KPI Achievement Target for 2025

Uraian Description	Target	Realisasi Realisation	Pencapaian Achievement
Millennial Talent	18%	75%	107,08%
Women Talent	24%	25%	

Sistem Penghargaan Karyawan

Dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian kinerja perusahaan, PLN Nusa Daya menerapkan sistem remunerasi yang disusun secara adil, kompetitif, dan berbasis kinerja. Sistem ini dirancang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang diberikan oleh seluruh karyawan melalui pemberian kompensasi finansial yang sesuai, serta berbagai manfaat dan fasilitas pendukung lainnya. Selain penghargaan yang bersifat ekstrinsik, Perusahaan juga memberikan penghargaan intrinsik melalui penyediaan berbagai program dan fasilitas yang mendukung kenyamanan, motivasi, serta pengembangan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Employee Reward System

To support operational effectiveness and the achievement of corporate performance, PLN Nusa Daya implements a remuneration system that is fair, competitive, and performance-based. This system is designed as a form of appreciation for the contributions made by all employees through appropriate financial compensation, as well as various benefits and other supporting facilities. In addition to extrinsic rewards, the Company also provides intrinsic rewards through various programmes and facilities that support employee comfort, motivation, and development in carrying out their duties and responsibilities.

Informasi sistem penghargaan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan adalah sebagai berikut:

Further information on the Company's employee reward system is presented below:

Ekstrinsik Extrinsic	Intrinsik Intrinsic
• *Pay for Person* (P1); • *Pay for Position* (P2); • *Pay for Performance* (P3); • Tunjangan Hari Raya Keagamaan; • Tunjangan Cuti Tahunan; • Tunjangan Cuti Besar; • Penghargaan Kesetiaan Masa Kerja; • Kompensasi Pelepasan; • Manfaat Umum; • Manfaat Khusus. • Pay for Person (P1); • Pay for Position (P2); • Pay for Performance (P3); • Religious Holiday Allowance; • Annual Leave Allowance; • Long Leave Allowance; • Length of Service Award; • Severance Pay; • General Benefits; • Special Benefits.	a. Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/Profesi; b. Program Keseimbangan Hidup; c. Bantuan Hukum. a. Learning and Competency/Professional Certification Programmes; b. Work-Life Balance Programme; c. Legal Assistance.

Tingkat Keterikatan Kayawan

PLN Nusa Daya melaksanakan survei keterikatan karyawan menggunakan tools terpusat dari PT PLN (Persero). Pada tahun 2025, tingkat keterikatan karyawan tercatat sebesar 85%, yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepuasan karyawan secara umum terhadap Perusahaan.

Employee Engagement Level

PLN Nusa Daya measures employee engagement through a centralized survey platform administered by PT PLN (Persero). In 2025, the Company's employee engagement score reached 85%, reflecting a high level of employee trust, commitment, and overall satisfaction with the Company.

Hubungan Industrial

Pengelolaan hubungan industrial memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkesinambungan antara manajemen dan karyawan. Untuk mendukung tujuan tersebut, PLN Nusa Daya senantiasa membangun hubungan industrial yang berlandaskan prinsip kemitraan, keterbukaan, serta keadilan bagi seluruh pihak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan dan perwakilan pekerja dalam membahas berbagai isu ketenagakerjaan secara konstruktif dan berkesinambungan.

PLN Nusa Daya telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang pada awal pembentukannya pada tahun 2022 berstatus sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PLN Tarakan yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Nomor 568.9/362/Disnaker tanggal 15 Desember 2022.

Industrial Relations

Industrial relations management plays an important role in creating harmonious, productive, and sustainable working relationships between management and employees. To support this objective, PLN Nusa Daya continues to build industrial relations based on the principles of partnership, openness, and fairness for all parties. One of the initiatives undertaken is the management of the Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) as a communication and consultation forum between the Company and employee representatives to discuss various employment-related issues in a constructive and sustainable manner.

PLN Nusa Daya has a Workers' Union organisation, which at the time of its establishment in 2022 held the status of Central Executive Board (DPP), as stated in the Registration Certificate of the PLN Tarakan Workers' Union issued by the Balikpapan City Manpower Office No. 568.9/362/Disnaker dated 15 December 2022.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2024, status organisasi Serikat Pekerja PLN Nusa Daya mengalami perubahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PLN Nusa Daya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 01/SK/MUSDALUB/SP PLN Nusa Daya/2024. Untuk mendukung terciptanya tata kelola ketenagakerjaan yang tertib, profesional, dan sejalan dengan arah strategis Perusahaan, PLN Nusa Daya memberlakukan Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00.00.2108/2011/B/III/2022. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya di lingkungan kerja Perusahaan.

Subsequently, on 12 June 2024, the organisational status of the PLN Nusa Daya Workers' Union changed from the Central Executive Board (DPP) to the Regional Executive Board (DPD) of PLN Nusa Daya pursuant to the Resolution of the Extraordinary Regional Meeting of the PT PLN (Persero) Workers' Union No. 01/SK/MUSDALUB/SP PLN Nusa Daya/2024. To support orderly and professional labour governance that is aligned with the Company's strategic direction, PLN Nusa Daya implements Company Regulations that have been ratified by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia through the Director General of Industrial Relations Development and Labour Social Security No. KEP.4/HI.00.00/00.00.2108/2011/B/III/2022. These regulations serve as guidelines for all employees in exercising their rights, obligations, and responsibilities within the Company's work environment.

Penyusunan Peraturan Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan dinamika operasional dan kebutuhan organisasi. Selain berfungsi sebagai pedoman kerja, peraturan tersebut juga menjadi landasan dalam menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati, meningkatkan disiplin dan profesionalisme, serta memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi.

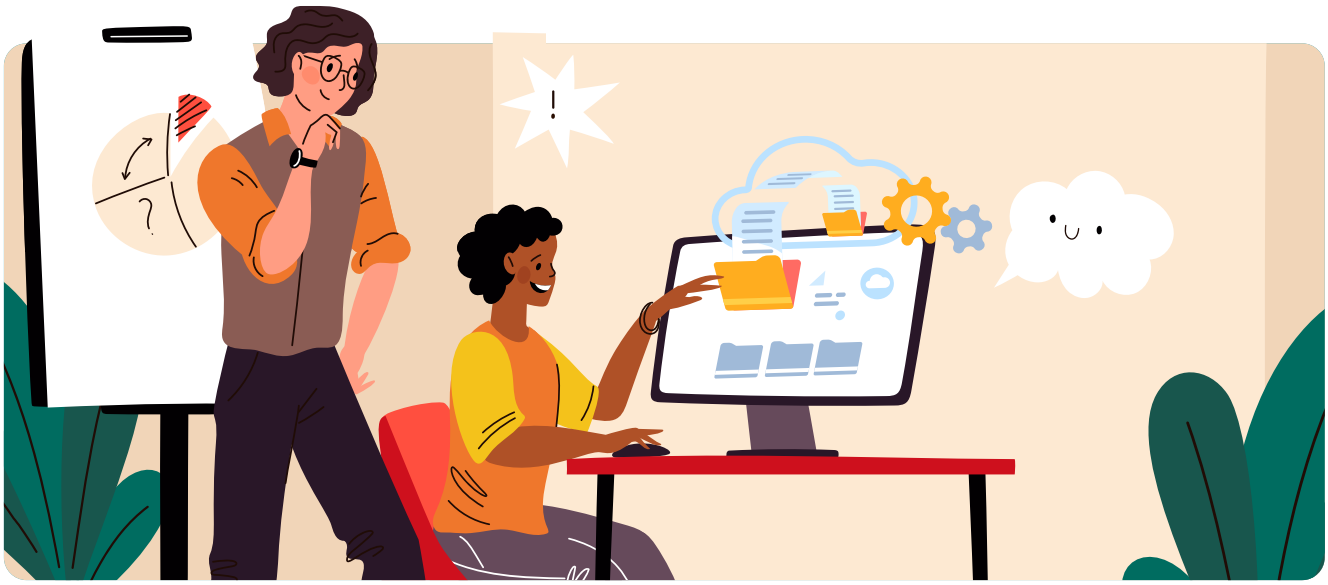
The Company Regulations were prepared with reference to applicable laws and regulations, while taking into account operational dynamics and organisational needs. In addition to serving as work guidelines, these regulations also provide a foundation for creating mutually respectful working relationships, strengthening discipline and professionalism, and reinforcing a culture of integrity and accountability across all levels of the organisation.

Selama tahun 2025, PLN Nusa Daya tidak menghadapi permasalahan maupun perselisihan hubungan industrial yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara manajemen dan karyawan berjalan secara efektif, didukung oleh mekanisme penyelesaian permasalahan yang terbuka dan konstruktif. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang sehat dan kondusif sebagai fondasi penting untuk mendukung produktivitas, keberlangsungan usaha, serta peningkatan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan.

Throughout 2025, PLN Nusa Daya did not face any industrial relations issues or disputes that had a significant impact on its business activities. This condition indicates that communication between management and employees was effective, supported by open and constructive problem-resolution mechanisms. This achievement reflects the Company's commitment to maintaining healthy and conducive industrial relations as an important foundation for supporting productivity, business continuity, and the improvement of stakeholder welfare.

Teknologi Informasi

Information Technology



PLN Nusa Daya memandang Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu *enabler* utama dalam mendukung pencapaian strategi bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin cepatnya transformasi digital di berbagai sektor industri, Perusahaan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan serta pengembangan sistem dan infrastruktur TI guna mendukung efektivitas proses bisnis dan operasional. Melalui penerapan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada inovasi, PLN Nusa Daya berkomitmen untuk menjawab berbagai tantangan bisnis yang dinamis sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Fungsi Pengelola TI

Pengelolaan TI di PLN Nusa Daya dilakukan oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha (Bidang Sistem dan Teknologi Informasi) di bawah Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha. Pengelola ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusa Daya No. 0044.P/DIR/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PLN Nusa Daya.

Master Plan Pengelolaan TI

Master Plan Pengelolaan TI menjadi kerangka strategis komprehensif yang disusun untuk memandu pelaksanaan pengelolaan TI secara terpadu dan berkelanjutan. Penyusunan *Master Plan* TI PLN Nusa Daya didasarkan pada visi dan misi perusahaan, strategi bisnis, evaluasi kondisi eksisting TI, serta analisis kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Secara garis besar, berikut ini disajikan gambaran umum *Master Plan* TI PLN Nusa Daya:

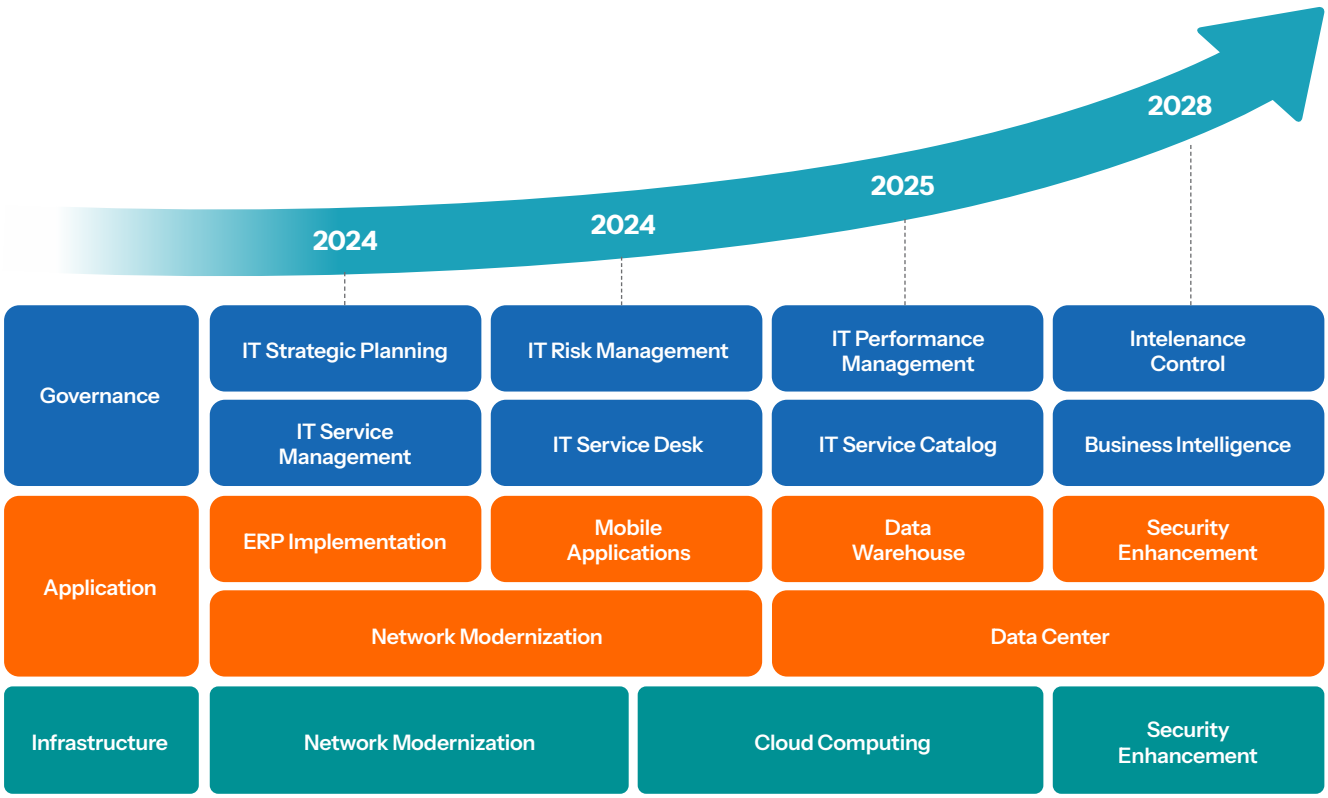
PLN Nusa Daya views Information Technology (IT) as one of the key enablers in supporting the achievement of its business strategy and improving the Company's performance. In line with technological advancement and the accelerating pace of digital transformation across various industries, the Company continues to optimise the management and development of its IT systems and infrastructure to support the effectiveness of business and operational processes. Through an adaptive and innovation-oriented approach, PLN Nusa Daya is committed to addressing dynamic business challenges while strengthening its competitiveness in creating sustainable added value.

IT Management Function

The IT management at PLN Nusa Daya is overseen by the Business Planning and Development Division (Information Systems and Technology), which operates under the Director of Operations and Business Development. This structure is established pursuant to Board of Directors' Regulation of PT PLN Nusa Daya No. 0044.P/DIR/2025 dated 1 October 2025 on the Organisation and Work Procedures of PLN Nusa Daya.

IT Management Master Plan

The IT Management Master Plan serves as a comprehensive strategic framework designed to guide the implementation of integrated and sustainable IT management. The preparation of PLN Nusa Daya's IT Master Plan is based on the Company's vision and mission, business strategy, evaluation of existing IT conditions, and analysis of short- and long-term needs. In general, an overview of PLN Nusa Daya's IT Master Plan is presented below:



IT Risk (Disruption) dan Mitigasinya

Sebagai wujud komitmen PLN Nusa Daya dalam memperkuat kualitas tata kelola TI, Perusahaan secara proaktif melaksanakan pemetaan profil risiko TI beserta implementasi strategi mitigasi yang efektif. Berikut ini disajikan daftar *IT Top Risk* yang menjadi fokus utama pada tahun 2025:

IT Risk (Disruption) and Its Mitigation

As part of PLN Nusa Daya's commitment to strengthening the quality of IT governance, the Company proactively conducted IT risk profiling and implemented effective mitigation strategies. The following presents the Top IT Risks that became the main focus in 2025:

Profil Risiko TI Tahun 2025 dan Mitigasinya
2025 IT Risk Profile and Its Mitigation

No	Risiko Risk	Mitigasi yang Dilaksanakan Mitigation Implemented
1.	Serangan siber *(ransomware, phishing, malware)* Cyberattacks (ransomware, phishing, and malware)	MFA, EDR, SIEM/SOC, *awareness, patch management, incident response* MFA, EDR, SIEM/SOC, awareness, patch management, and incident response
2.	Kegagalan integrasi aplikasi Application integration failure	API *governance*, UAT, *change management,* monitoring integrasi API governance, UAT, change management, and integration monitoring
3.	Kebocoran data Data leakage	Enkripsi, *least privilege*, DLP, klasifikasi informasi, audit akses Encryption, least privilege access, DLP, information classification, and access audits

Implementasi *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan Ketersediaan *Disaster Recovery Center* (DRC)

PLN Nusa Daya, sebagai bagian integral dari infrastruktur kelistrikan nasional, sangat mengutamakan keandalan operasional. Dalam konteks ini, implementasi *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) menjadi krusial untuk memastikan keberlangsungan layanan listrik meskipun terjadi gangguan tak terduga. DRP di PLN Nusa Daya mencakup serangkaian prosedur dan strategi komprehensif yang dirancang untuk memulihkan sistem dan operasi pasca-bencana. Ini meliputi identifikasi risiko, pembentukan tim tanggap darurat, penentuan prioritas pemulihan sistem kelistrikan, serta prosedur komunikasi yang efektif selama dan setelah insiden. Tujuan utamanya adalah meminimalkan waktu henti layanan dan dampak finansial yang mungkin timbul akibat gangguan besar, seperti bencana alam atau kegagalan sistem utama.

Sejalan dengan DRP, PLN Nusa Daya juga telah membangun dan mengoperasikan DRC. DRC ini berfungsi sebagai fasilitas cadangan yang menampung duplikasi sistem dan data kritis operasional PLN Nusa Daya, berlokasi terpisah secara geografis dari pusat operasi utama. Keberadaan DRC memungkinkan PLN Nusa Daya untuk secara cepat mengalihkan operasional ke lokasi cadangan jika terjadi kegagalan total pada pusat data utama. Dengan implementasi DRP dan DRC yang matang, PLN Nusa Daya berupaya keras untuk menjaga stabilitas pasokan listrik, melindungi data penting, dan memastikan bahwa layanan vital bagi masyarakat tetap terjaga dalam segala kondisi.

Penguatan Sistem Keamanan TI

Arsitektur keamanan Teknologi Informasi di PLN Nusa Daya dirancang secara menyeluruh dengan tujuan utama menjamin integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan data dan sistem informasi yang menjadi fondasi utama dalam mendukung kelancaran operasional Perusahaan. PLN Nusa Daya menerapkan pendekatan *defense-in-depth* dalam arsitektur keamanan TI, termasuk proteksi berlapis mulai dari infrastruktur, aplikasi, hingga data. Sistem keamanan dilengkapi dengan *firewall* generasi terbaru, antivirus terintegrasi, dan sistem deteksi serta pencegahan intrusi (IDS/IPS). Selain itu, Perusahaan mengembangkan kesadaran keamanan siber melalui pelatihan berkala kepada pegawai. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kesesuaian dengan standar internasional, PLN Nusa Daya telah tersertifikasi ISO/IEC 27001:2022 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Disaster Recovery Plan (DRP) Implementation and Disaster Recovery Centre (DRC) Availability

PLN Nusa Daya, as an integral part of the national electricity infrastructure, places strong emphasis on operational reliability. In this context, the implementation of the Disaster Recovery Plan (DRP) and the availability of a Disaster Recovery Centre (DRC) are crucial to ensuring the continuity of electricity services in the event of unexpected disruptions. The DRP at PLN Nusa Daya comprises a comprehensive set of procedures and strategies designed to restore systems and operations following a disaster. These include risk identification, establishment of an emergency response team, prioritisation of electricity system recovery, and effective communication procedures during and after an incident. The main objective is to minimise service downtime and the financial impact that may arise from major disruptions, such as natural disasters or critical system failures.

In line with the DRP, PLN Nusa Daya has also established and operates a Disaster Recovery Centre (DRC). The DRC serves as a backup facility that houses duplicate systems and critical operational data of PLN Nusa Daya, and is located in a geographically separate location from the main operations centre. The DRC enables PLN Nusa Daya to quickly transfer operations to the backup site in the event of a total failure at the main data centre. Through the mature implementation of DRP and DRC, PLN Nusa Daya strives to maintain the stability of electricity supply, protect critical data, and ensure that vital services to the public remain available under all conditions.

IT Security System Enhancement

PLN Nusa Daya's Information Technology (IT) security architecture is comprehensively designed with the primary objective of ensuring the integrity, confidentiality, and availability of data and information systems that serve as a key foundation for supporting the Company's operational continuity. PLN Nusa Daya applies a defence-in-depth approach to its IT security architecture, including layered protection across infrastructure, applications, and data. The security system is equipped with next-generation firewalls, integrated antivirus, and Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS). In addition, the Company strengthens cybersecurity awareness through regular employee training. To enhance trust and ensure alignment with international standards, PLN Nusa Daya has obtained ISO/IEC 27001:2022 certification for its Information Security Management System.

Cloud Aplikasi NEXT (Nusa Daya Excellence Tools)

Dalam rangka pencapaian sasaran program Teknologi Informasi dalam mendukung proses bisnis dan memudahkan penyelesaian pekerjaan pada *Project* PLN Nusa Daya dan mengimplementasikan SSoT (*Single Source of Truth*), PLN Nusa Daya membuat *single platform* aplikasi yaitu *Cloud* Aplikasi NEXT (Nusa Daya Excellence Tools) yang terdiri dari beberapa modul dari berbagai bidang dan beberapa modul Aplikasi Next tersebut sudah terintegrasi dengan SAP PLN Nusa Daya. Berikut adalah aplikasi yang diterapkan di PLN Nusa Daya:

1. Aplikasi Next (Nusa Daya Excellence Tools), dengan modul:
2. HRIS (Human Resource Information System).
3. Serkom (Sertifikat Kompetensi).
4. SMT (Sistem Manajemen Terintegrasi).
5. FICO (Finance & Controlling).
6. Index (System Inventory).
7. SCM (Supply Chain Management).
8. CRM (Customer Relationship Management).
9. Digikit (Digital Pembangkit).
10. Digilearn (Digital Learning).
11. CSMS (Contractor Safety Management System).
12. Adkon (Administrasi Kontrak).
13. KPI (Key Performance Indicator).
14. Digitrans (Digital Transmisi).
15. Aska (Aset Kantor).
16. Aplikasi SOE (Safety on Essential).
17. Aplikasi Yantek (Pelayanan Teknik).
18. Aplikasi Matrik (Management Tagihan Rekening Listrik).
19. Aplikasi HCM PCN (Human Capital Management)
20. Aplikasi Sebatik PCN (Sistem Absensi Berbasis Titik Koordinat).

Maturity Level TI

TI PLN Nusa Daya telah dilakukan pengukuran *maturity level* yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Adapun skor IT *maturity level* per tahun 2025 adalah sebesar 3,10 (skala 5) sesuai dengan target sebesar 3,10.

Pengukuran *maturity level* TI dilakukan berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 dan diselaraskan dengan kebijakan internal pengembangan TI PLN Group. Pada tahun 2025, skor IT *maturity level* PLN Nusa Daya adalah 3,10 *(Established)*, sesuai dengan target yang ditetapkan. Perusahaan terus melakukan perbaikan proses melalui *roadmap maturity* yang mencakup peningkatan dokumentasi, integrasi layanan digital, serta otomatisasi proses pengawasan dan evaluasi.

NEXT Cloud Application (Nusa Daya Excellence Tools)

To achieve the objectives of the Information Technology programme in supporting business processes, facilitating work completion across PLN Nusa Daya projects, and implementing SSoT (Single Source of Truth), PLN Nusa Daya developed a single application platform, namely the NEXT Cloud Application (Nusa Daya Excellence Tools). The platform comprises several modules across various functions, some of which have been integrated with SAP PLN Nusa Daya. The applications implemented at PLN Nusa Daya are as follows:

1. NEXT Application (Nusa Daya Excellence Tools), comprising the following modules:
2. HRIS (Human Resource Information System)
3. Serkom (Competency Certificate)
4. SMT (Integrated Management System)
5. FICO (Finance & Controlling);
6. Index (System Inventory)
7. SCM (Supply Chain Management)
8. CRM (Customer Relationship Management)
9. Digikit (Digital Power Plant)
10. Digilearn (Digital Learning)
11. CSMS (Contractor Safety Management System)
12. Adkon (Contract Administration)
13. KPI (Key Performance Indicator)
14. Digitrans (Digital Transmission); and
15. Aska (Office Assets).
16. SOE Application (Safety on Essential).
17. Yantek Application (Technical Services).
18. Matrik Application (Electricity Bill Management).
19. HCM PCN Application (Human Capital Management).
20. Sebatik PCN Application (Coordinate-Based Attendance System).

IT Maturity Level

PLN Nusa Daya's IT maturity level is assessed regularly each year. In 2025, the Company achieved a score of 3.10 on a scale of 5, in line with its target for the year.

The assessment is conducted based on the COBIT 2019 framework and aligned with PLN Group's internal IT development policies. The 2025 score of 3.10 places PLN Nusa Daya at the (Established) level, in line with the set target. The Company continues to enhance its processes through a maturity roadmap that covers improved documentation, digital service integration, and the automation of monitoring and evaluation processes.

Program Pengelolaan TI Tahun 2025

Di sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya melakukan pengelolaan dan pengembangan TI dengan aktivitas yang dilakukan selama tahun buku dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Integrasi Cloud Aplikasi NEXT (Nusa Daya Excellence Tools)
   PLN Nusa Daya melanjutkan pengembangan platform Cloud Aplikasi NEXT sebagai *Single Source of Truth* yang mendukung digitalisasi proses bisnis perusahaan. Aktivitas yang dilakukan meliputi penyempurnaan berbagai modul aplikasi seperti HRIS, SCM, CRM, KPI, Digikit, Digilearn, Adkon, FICO, dan Aska, serta peningkatan integrasi data dengan sistem SAP PLN Nusa Daya melalui layanan API sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

2. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi
   Perusahaan melaksanakan penguatan infrastruktur TI untuk meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan digital. Aktivitas yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas *server* dan *storage*, implementasi sistem monitoring infrastruktur secara *real-time,* optimalisasi mekanisme *backup* dan *Disaster Recovery Center* (DRC), penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA), penguatan *endpoint security, patch management, vulnerability assessment,* serta peningkatan kompetensi pegawai melalui program *awareness* keamanan siber sesuai praktik terbaik ISO/IEC 27001:2022.
3. Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Teknologi Informasi
   PLN Nusa Daya terus meningkatkan tata kelola TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Aktivitas yang dilakukan meliputi penyusunan roadmap pengembangan TI, pengukuran IT *Maturity Level* berdasarkan COBIT 2019, standardisasi proses layanan TI, penguatan manajemen perubahan *(Change Management),* pengelolaan risiko TI, serta pengembangan *dashboard* analitik dan pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Biaya Pengelolaan TI

Pada tahun 2025, PLN Nusa Daya telah merealisasikan biaya pengembangan TI sejumlah Rp2.421.727.626, yaitu meningkat jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp905.345.582. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Menindaklanjuti Rapat Direksi (Sirkuler) untuk peran Digitalisasi Pembangkit diharapkan mampu memberikan *value creation* untuk Kinerja Pembangkit dengan skema AMC *(Asset Management Contract).*
2. Pengadaan perangkat internet satelit untuk operasional koneksi internet.

IT Management Programme in 2025

Throughout 2025, PT PLN Nusa Daya carried out a range of IT management and development with activities conducted during the fiscal year, with details as follows:

1. Development and Integration of the NEXT (Nusa Daya Excellence Tools) Cloud Application
   PLN Nusa Daya continued to develop the NEXT Cloud Application platform as a Single Source of Truth to support the digitalisation of the Company's business processes. Activities carried out included refining various application modules, such as HRIS, SCM, CRM, KPI, Digikit, Digilearn, Adkon, FICO, and Aska, as well as enhancing data integration with PLN Nusa Daya's SAP system through API services, enabling business processes to become faster, more accurate, and more integrated
2. Strengthening Information Technology Infrastructure and Security
   The Company strengthened its IT infrastructure to improve the reliability, availability, and security of its digital services. Activities carried out included increasing server and storage capacity, implementing real-time infrastructure monitoring systems, optimising backup mechanisms and the Disaster Recovery Centre (DRC), implementing Multi-Factor Authentication (MFA), strengthening endpoint security, conducting patch management and vulnerability assessments, and enhancing employee competencies through cybersecurity awareness programmes in accordance with ISO/IEC 27001:2022 best practices
3. Improvement of Information Technology Governance and Services
   PLN Nusa Daya continued to improve its IT governance to ensure alignment with business needs and the principles of Good Corporate Governance (GCG). Activities carried out included preparing an IT development roadmap, measuring the IT Maturity Level based on COBIT 2019, standardising IT service processes, strengthening Change Management, managing IT risks, and developing analytical dashboards and reporting to support data-driven decision-making.

IT Management Costs

In 2025, PLN Nusa Daya recorded IT development costs of Rp2,421,727,626, representing an increase from Rp905,345,582 in 2024. The increase was primarily driven by:

1. Follow-up to the Board of Directors' Circular Meeting regarding the role of power plant digitalisation, which is expected to create value for power plant performance under the AMC (Asset Management Contract) scheme.
2. Procurement of satellite internet equipment for operational internet connectivity.

3. Memperbaiki Tata Kelola AMC Pembangkit dengan digitalisasi.
4. Monitoring Asset & SDM AMC Pembangkit dapat terpenuhi secara realtime dan tepat dengan Aplikasi Digikit dan MAPP.

Sasaran Program Pengelolaan TI Tahun 2026

Sebagai kelanjutan dari upaya pengelolaan TI yang telah dilakukan, PT PLN Nusa Daya telah menyusun beberapa fokus program strategis untuk tahun 2026. Program-program ini dirancang untuk memastikan keberlangsungan operasional, peningkatan efisiensi, dan optimalisasi layanan kelistrikan melalui pemanfaatan teknologi terkini.

1. Meningkatkan Integrasi dan Pengembangan Platform Digital Perusahaan
   Melanjutkan pengembangan Cloud Aplikasi NEXT sebagai *platform* digital terintegrasi melalui penambahan fitur, peningkatan interoperabilitas antar aplikasi, serta optimalisasi integrasi dengan SAP dan sistem pendukung lainnya guna mewujudkan *Single Source of Truth*.
2. Memperkuat Keamanan Siber dan Ketahanan Infrastruktur Teknologi Informasi
   Meningkatkan kapabilitas keamanan informasi melalui penguatan sistem deteksi ancaman siber, implementasi *Zero Trust Security*, optimalisasi *Security Operation Center* (SOC), serta pemeliharaan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
3. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang Selaras dengan Strategi Bisnis
   Melaksanakan penyempurnaan tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 melalui peningkatan IT *Maturity Level,* penguatan manajemen risiko TI, pengelolaan layanan TI (IT *Service Management*), serta penerapan proses pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital untuk Mendukung Pengambilan Keputusan
   Mengoptimalkan pemanfaatan *Business Intelligence* (BI), *dashboard* manajemen, analitik data, dan teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence*/AI) untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).
5. Meningkatkan Keandalan Infrastruktur dan Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi
   Mengembangkan infrastruktur TI yang andal, aman, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pusat data, optimalisasi layanan cloud, penguatan *Disaster Recovery Center* (DRC), pelaksanaan uji *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala, serta modernisasi infrastruktur jaringan untuk mendukung operasional perusahaan secara optimal.

3. Improvement of AMC governance for power plants through digitalisation.
4. Real-time and accurate monitoring of AMC power plant assets and human capital through the Digikit and MAPP applications.

2026 IT Management Programme Objectives

As a continuation of its ongoing IT management efforts, PT PLN Nusa Daya has prepared several strategic programmes focuses for 2026. These programmes are designed to ensure operational continuity, improve efficiency, and optimise electricity services through the utilisation of the latest technologies.

1. Enhancing the Integration and Development of the Company's Digital Platform
   Continuing the development of the NEXT Cloud Application as an integrated digital platform through the addition of new features, improved interoperability between applications, and optimised integration with SAP and other supporting systems to realise a Single Source of Truth.
2. Strengthening Cybersecurity and Information Technology Infrastructure Resilience
   Enhancing information security capabilities by strengthening cyber threat detection systems, implementing Zero Trust Security, optimising the Security Operations Centre (SOC), and maintaining ISO/IEC 27001:2022 certification to ensure the confidentiality, integrity, and availability of information.
3. Improving Information Technology Governance in Alignment with Business Strategy
   Improving IT governance based on the COBIT 2019 framework through enhancement of the IT Maturity Level, strengthened IT risk management, IT Service Management, and the implementation of continuous monitoring and evaluation processes.
4. Developing the Use of Data and Digital Technology to Support Decision-Making
   Optimising the use of Business Intelligence (BI), management dashboards, data analytics, and Artificial Intelligence (AI) to generate faster and more accurate information that supports data-driven decision-making.
5. Enhancing Infrastructure Reliability and Continuity of Information Technology Services
   Developing reliable, secure, and sustainable IT infrastructure by increasing data centre capacity, optimising cloud services, strengthening the Disaster Recovery Centre (DRC), conducting regular Disaster Recovery Plan (DRP) testing, and modernising network infrastructure to optimally support the Company's operations.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



PLN Nusa Daya

Kinerja operasional dan keuangan PLN Nusa Daya pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan peningkatan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya sebagai hasil dari perbaikan kinerja usaha dan efektivitas operasional.

PLN Nusa Daya recorded improved operational and financial performance in 2025, with net profit increasing year-on-year, reflecting the Company's successful efforts to strengthen business performance and enhance operational efficiency.



Analisis Industri

Industry Analysis

Sekilas Perkembangan Ekonomi

Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada April 2026, perekonomian global pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 3,4%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dunia masih mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah meningkatnya tantangan eksternal, seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta fluktuasi harga energi dan komoditas.

Resiliensi pertumbuhan global didukung oleh tetap kuatnya aktivitas sektor swasta di berbagai negara, meningkatnya investasi pada sektor teknologi, termasuk pengembangan *Artificial Intelligence* (AI), serta keberlanjutan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif di sejumlah negara utama. Di sisi lain, inflasi global diproyeksikan terus mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 4,1% pada tahun 2025. Meski demikian, proses normalisasi inflasi diperkirakan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda di setiap negara, khususnya di Amerika Serikat yang diperkirakan mengalami penyesuaian lebih bertahap dibandingkan negara-negara ekonomi besar lainnya.

Di balik prospek tersebut, perekonomian global masih dihadapkan pada sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pertumbuhan. Ketidakpastian arah kebijakan perdagangan internasional, meningkatnya tensi geopolitik, serta potensi gangguan rantai pasok global diperkirakan dapat memberikan tekanan terhadap aktivitas perdagangan dan investasi dunia. Selain itu, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap perkembangan teknologi AI juga berpotensi memicu perlambatan investasi maupun koreksi pasar keuangan apabila tidak diiringi peningkatan produktivitas yang nyata.

Namun demikian, peluang pertumbuhan ekonomi global tetap terbuka apabila pemanfaatan teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara berkelanjutan, didukung oleh meredanya ketegangan perdagangan internasional serta stabilitas harga energi. Dalam konteks tersebut, penguatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pengendalian inflasi, penguatan sistem keuangan, pemulihan kapasitas fiskal, dan percepatan reformasi struktural menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah.

Sumber: *World Economic Outlook (WEO),* International Monetary Fund (IMF), April 2026.

Overview of Economic Developments

According to the World Economic Outlook (WEO) published by the International Monetary Fund (IMF) in April 2026, the global economy recorded growth of 3.4% in 2025. This achievement indicates that the global economy remained capable of sustaining its growth momentum amid increasing external challenges, including geopolitical tensions, fragmentation of international trade, and fluctuations in energy and commodity prices.

The resilience of global growth was supported by continued strength in private-sector activity across various countries, rising investment in the technology sector, including the development of Artificial Intelligence (AI), and the continuation of accommodative fiscal and monetary policies in several major economies. Meanwhile, global inflation is projected to decline gradually, reaching 4.1% in 2025. However, the pace of inflation normalisation is expected to vary across countries, particularly in the United States, where adjustment is forecast to be more gradual than in other major economies.

Despite this outlook, the global economy continues to face a number of risks that could potentially constrain growth. Uncertainty over the direction of international trade policy, rising geopolitical tensions, and potential disruptions to global supply chains are expected to weigh on global trade and investment activity. In addition, overly optimistic expectations regarding the development of AI technology could potentially trigger a slowdown in investment or a correction in financial markets if not accompanied by tangible productivity gains.

Nevertheless, opportunities for global economic growth remain open if the utilisation of AI technology can sustainably improve efficiency and productivity, supported by easing international trade tensions and stable energy prices. In this context, strengthening economic policies focused on inflation control, financial system stability, restoring fiscal capacity, and accelerating structural reforms will be key to maintaining sustainable global economic growth over the medium term.

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2026.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dan resilien meskipun masih menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti dinamika geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter di tingkat global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4.

Secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03% (c-to-c). Pertumbuhan tersebut mencerminkan tetap terjaganya daya tahan ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi global.

Di sisi stabilitas makroekonomi, tingkat inflasi tahunan *(year-on-year)* tercatat sebesar 2,92%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,92. Tingkat inflasi yang tetap terkendali menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas harga meskipun terdapat tekanan pada beberapa kelompok pengeluaran. Kondisi tersebut turut menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi dapat terus tumbuh secara sehat sepanjang tahun 2025.

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekilas Industri Ketenagalistrikan

Pada tahun 2025, industri ketenagalistrikan Indonesia memasuki fase baru transformasi seiring diterbitkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional selama sepuluh tahun ke depan dengan menitikberatkan pada peningkatan ketahanan energi, percepatan transisi menuju energi bersih, serta penyediaan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam RUPTL 2025–2034, Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034. Dari total kapasitas tersebut, sekitar 76% merupakan pembangkit berbasis energi bersih yang terdiri atas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 61% dan sistem penyimpanan energi (*energy storage*) sebesar 15%, sedangkan sisanya berasal dari pembangkit berbasis gas dan batubara sebagai pembangkit transisi. Arah kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan bauran energi nasional sekaligus menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan selama masa transisi energi.

In line with global economic developments, the Indonesian economy continued to demonstrate solid and resilient performance in 2025, despite facing various external challenges, including geopolitical dynamics, commodity price volatility, and shifts in global monetary policy. According to data from the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp23,821.1 trillion, with GDP per capita recorded at Rp83.7 million, equivalent to USD5,083.4.

On a year-on-year basis, the Indonesian economy grew by 5.11%, higher than the 5.03% growth recorded in 2024 (c-to-c). This growth reflects the continued resilience of the national economy, supported by domestic consumption, increased investment, and export performance that remained robust amid the global economic slowdown.

In terms of macroeconomic stability, annual inflation stood at 2.92% year-on-year, with the Consumer Price Index (CPI) reaching 109.92. Controlled inflation demonstrates the effectiveness of policies in maintaining price stability, despite pressures in certain expenditure categories. These conditions helped create a conducive economic climate, enabling household consumption and investment to continue growing at a healthy pace throughout 2025.

Source: Official Statistics Bulletin, Statistics Indonesia (BPS).

Overview of the Electricity Sector

In 2025, Indonesia's electricity sector entered a new phase of transformation following the issuance of PLN's 2025–2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). The document serves as the primary guideline for the development of the national electricity sector over the next ten years, with a focus on strengthening energy security, accelerating the transition to clean energy, and ensuring reliable electricity supply to support national economic growth.

Under the 2025–2034 RUPTL, the Government aims to increase generation capacity by 69.5 GW by 2034. Of this total capacity, approximately 76% will come from clean energy-based power generation, comprising 61% from New and Renewable Energy (NRE) sources and 15% from energy storage systems, while the remainder will come from gas- and coal-fired power plants serving as transitional energy sources. This policy direction reflects the Government's commitment to improving the national energy mix while maintaining the reliability of the electricity system during the energy transition.

Selain pembangunan pembangkit, RUPTL juga menargetkan penguatan infrastruktur transmisi dan distribusi melalui pembangunan sekitar 47.758 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dan penambahan kapasitas gardu induk sebesar 107.950 MVA, pembangunan jaringan distribusi sebesar 197.998 kms, serta pembangunan gardu distribusi sebesar 18.407 MVA. Pengembangan infrastruktur tersebut ditujukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, memperluas akses listrik di berbagai wilayah, serta mendukung integrasi pembangkit energi terbarukan yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

Dari sisi permintaan, kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan kawasan industri, hilirisasi mineral, pembangunan pusat data (*data center*), kendaraan listrik, serta pengembangan kawasan ekonomi strategis. RUPTL memproyeksikan konsumsi listrik meningkat dari sekitar 306 TWh pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034, sehingga industri ketenagalistrikan diharapkan mampu menyediakan kapasitas pembangkitan dan jaringan yang memadai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan RUPTL 2025–2034 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui kebutuhan investasi sekitar Rp2.967 triliun, dengan porsi besar melibatkan partisipasi sektor swasta melalui skema *Independent Power Producer* (IPP). Selain itu, implementasi program ini diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja, terutama pada sektor pembangkit energi terbarukan, transmisi, distribusi, serta industri penunjang ketenagalistrikan.

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034

In addition to power plant development, the RUPTL also targets the strengthening of transmission and distribution infrastructure through the construction of approximately 47,758 circuit kilometres (kms) of transmission lines and an additional 107,950 MVA of substation capacity, as well as the construction of 197,998 kms of distribution networks and distribution substations with a capacity of 18,407 MVA. This infrastructure development is intended to improve the reliability of the electricity system, expand access to electricity across various regions, and support the integration of renewable energy power plants across Indonesia.

On the demand side, national electricity demand is projected to continue increasing in line with the growth of industrial estates, mineral downstreaming, data centre development, electric vehicles, and the development of strategic economic zones. The RUPTL projects electricity consumption to increase from approximately 306 TWh in 2024 to 511 TWh in 2034. Accordingly, the electricity sector is expected to provide adequate generation and grid capacity to support national economic growth targets.

The implementation of the 2025–2034 RUPTL is also projected to deliver significant economic benefits through investment requirements of approximately Rp2,967 trillion, with a substantial portion involving private-sector participation through the Independent Power Producer (IPP) scheme. In addition, the implementation of this programme is estimated to create more than 1.7 million jobs, particularly in renewable energy generation, transmission and distribution, as well as supporting industries within the electricity sector.

Source: PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2025–2034.

Analisis Operasi Per Segmen Usaha

Operating Analysis by Business Segment

PLN Nusa Daya mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam dua segmen utama berdasarkan karakteristik layanan yang diberikan, yaitu Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik serta Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik. Pengelompokan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing lini usaha terhadap kinerja Perseroan sekaligus mendukung pengelolaan bisnis yang lebih efektif dan terarah.

Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik merupakan lini usaha utama yang mencakup layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, serta pengelolaan tagihan (*billing management*). Melalui segmen ini, Perseroan berperan dalam mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional dengan menyediakan layanan teknis yang berfokus pada efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Sementara itu, Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik mencakup berbagai layanan pendukung, termasuk jasa pengelolaan gedung (*building management*) serta beragam layanan lainnya yang dijalankan melalui entitas anak perusahaan. Segmen ini berkontribusi dalam memperluas portofolio bisnis Perseroan sekaligus mendukung optimalisasi layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

Analisis terhadap kinerja masing-masing segmen usaha didasarkan pada laporan internal yang secara berkala ditelaah oleh Direksi, sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja operasional.

Uraian Kinerja Per Segmen

Selaras dengan pembagian segmen operasi PLN Nusa Daya, berikut disampaikan kinerja perolehan kontrak baru serta kontrak berjalan dalam dua tahun terakhir. Data ini mencerminkan capaian operasional Perseroan dalam masing-masing segmen, baik Jasa Teknik maupun Non-Teknik.

Kinerja Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik

Operasi dan pemeliharaan jasa teknik terdiri dari operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, dan distribusi, serta *billing management* dan *beyond* kWh.

PLN Nusa Daya classifies its business activities into two main segments based on the characteristics of the services provided, namely the Technical Services Operation and Maintenance Segment and the Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment. This classification is intended to provide a more comprehensive overview of the contribution of each business line to the Company's performance, while supporting more effective and targeted business management.

The Technical Services Operation and Maintenance Segment represents the Company's main business line, covering the operation and maintenance of power plant, transmission and distribution facilities, as well as billing management. Through this segment, the Company contributes to supporting the reliability of the national electricity system by providing technical services that focus on operational efficiency, service quality and the sustainability of energy supply.

Meanwhile, the Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment comprises various support services, including building management and other services carried out through subsidiaries. This segment contributes to the expansion of the Company's business portfolio, while supporting the optimisation of services for customers and stakeholders.

The performance analysis of each business segment is based on internal reports that are regularly reviewed by the Board of Directors and serve as the basis for strategic decision-making, particularly in relation to resource allocation and operational performance evaluation.

Segment Performance Overview

In line with PLN Nusa Daya's business segmentation, the following presents the performance of new contract acquisitions and ongoing contracts over the past two years. These figures reflect the Company's operational achievements in both the Technical and Non-Technical Services segments.

Performance of Technical Services Operation and Maintenance Segment

This segment comprises the operation and maintenance of power plant, transmission, and distribution, as well as billing management, and beyond-kWh.

Jumlah dan Nilai Kontrak Baru Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik

Number and Value of New Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

Tabel Jumlah Kontrak Baru Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik
Table of Number of New Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

(dalam satuan jumlah kontrak)
(in units of the number of contracts)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik Technical Services Operation and Maintenance Segment					
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Operation and Maintenance	12	18	10	(6)	(33,33)%
Operasi dan Pemeliharaan Transmisi Transmission Operation and Maintenance	10	16	6	(6)	(37,50)%
Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Distribution Operation and Maintenance	32	44	13	(12)	(27,27)%
Billing Management	9	4	6	5	125,00%
Beyond kWh	60	16	3	44	275,00%
Jumlah Kontrak Baru **Total New Contracts**	**123**	**98**	**38**	**25**	**25,51%**

Jumlah kontrak baru untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebanyak 123 kontrak. Jumlah ini meningkat dibandingkan kontrak baru pada tahun 2024 sebanyak 98 kontrak. Hal ini terutama disebabkan oleh strategi pemasaran yang agresif dan efektif dan meningkatnya kepercayaam pelanggan kepada PLN Nusa Daya.

In 2025, the number of new contracts in the Technical Services Operation and Maintenance segment reached 123 contracts, an increase compared with 98 new contracts in 2024. This growth was primarily driven by aggressive and effective marketing strategies, as well as increased customer confidence in PLN Nusa Daya.

Tabel Nilai Kontrak Baru Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik
Table of Value of New Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

(dalam satuan jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik Technical Services Operation and Maintenance Segment					
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Operation and Maintenance	1.791.431	570.492	4.846.591	1.220.939	214,02%
Operasi dan Pemeliharaan Transmisi Transmission Operation and Maintenance	1.870.539	420.122	273.288	1.450.417	345,24%
Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Distribution Operation and Maintenance	1.903.345	1.323.696	1.590.234	579.649	43,79%
Billing Management	1.834.153	127.047	323.984	1.707.106	1.343,68%
Beyond kWh	40.133	6.653	31.081	33.480	503,23%
Jumlah Kontrak Baru **Total New Contracts**	**7.439.601**	**2.248.012**	**7.065.180**	**5.191.589**	**230,94%**

Nilai kontrak baru untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,44 yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,25 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh strategi pemasaran yang agresif dan efektif dan meningkatnya kepercayaan pelanggan kepada PLN Nusa Daya.

The total value of new contracts in the Technical Services Operation and Maintenance segment in 2025 amounted to Rp7.44 trillion, an increase compared with Rp2.25 trillion in 2024. This growth was primarily driven by aggressive and effective marketing strategies, as well as increased customer confidence in PLN Nusa Daya.

Jumlah dan Nilai Kontrak Berjalan Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik

Number and Value of Ongoing Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

Tabel Jumlah Kontrak Berjalan Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik
Table of Number and Value of Ongoing Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

(dalam satuan jumlah kontrak)
(in units of the number of contracts)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik Technical Services Operation and Maintenance Segment					
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Operation and Maintenance	12	89	58	(77)	(86,52)%
Operasi dan Pemeliharaan Transmisi Transmission Operation and Maintenance	10	54	31	(44)	(81,48)%
Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Distribution Operation and Maintenance	32	124	52	(92)	(74,19)%
Billing Management	9	71	33	(62)	(87,32)%
Beyond kWh	61	12	3	48	400,00
Jumlah Kontrak Berjalan **Total Ongoing Contracts**	**124**	**300**	**177**	**(177)**	**(59,00)%**

Jumlah kontrak berjalan untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebanyak 123 kontrak. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan kontrak berjalan pada tahun 2024 sebanyak 300 kontrak.

The number of ongoing contracts in the Technical Services Operation and Maintenance segment in 2025 was 123 contracts, lower than the 300 ongoing contracts recorded in 2024.

Tabel Nilai Kontrak Berjalan Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik
Table of Value of Ongoing Contracts in Technical Services Operation and Maintenance Segment

(dalam satuan jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Operasi dan Pemeliharaan Jasa Teknik Technical Services Operation and Maintenance Segment					
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Operation and Maintenance	1.791.431	8.020.040	7.352.228	(6.228.609)	(77,66)%
Operasi dan Pemeliharaan Transmisi Transmission Operation and Maintenance	1.870.539	2.219.688	1.252.287	(349.149)	(15,73)%
Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Distribution Operation and Maintenance	1.903.345	8.415.938	4.573.288	(6.512.593)	(77,38)%
Billing Management	1.834.153	1.462.617	1.332.646	371.536	25,40%
Beyond kWh	40.133	6.897	31.081	33.236	481,89%
Jumlah Kontrak Berjalan **Total Ongoing Contracts**	**7.439.601**	**20.125.183**	**14.541.530**	**(12.685.582)**	**(63,03)%**

Nilai kontrak berjalan untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,44 triliun, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp20,13 triliun.

The value of ongoing contracts in the Technical Services Operation and Maintenance segment in 2025 amounted to Rp7.44 trillion, lower than Rp20.13 trillion in 2024.

Kinerja Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik

Performance of Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment

Jumlah dan Nilai Kontrak Baru Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik

Number and Value of New Contracts in Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment

Tabel Jumlah dan Nilai Kontrak Baru Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik
Table of Number and Value of New Contracts in Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
					Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Kontrak Baru Total New Contracts	Kontrak Contract	64	64	29	31	93,94%
Nilai Kontrak Baru Value of New Contracts	Rp juta Rp million	153.286	153.286	188.300	(192.165)	(55,63)%

Jumlah kontrak baru untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa non-teknik pada tahun 2025 adalah sebanyak 64 kontrak. Jumlah ini meningkat dibandingkan kontrak baru pada tahun 2024 sebanyak 33 kontrak.

In 2025, the number of new contracts in the Non-Technical Services Operation and Maintenance segment totalled 64 contracts, an increase compared with 33 new contracts in 2024.

Sementara itu, nilai kontrak baru untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp153,29 miliar, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp345,45 miliar.

Meanwhile, the value of new contracts in the Non-Technical Services Operation and Maintenance segment in 2025 amounted to Rp153.29 billion, lower than Rp345.45 billion in 2024.

Jumlah dan Nilai Kontrak Berjalan Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik

Number and Value of Ongoing Contracts in Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment

Tabel Jumlah dan Nilai Kontrak Berjalan Segmen Operasi dan Pemeliharaan Jasa Non-Teknik
Table of Number and Value of Ongoing Contracts in Non-Technical Services Operation and Maintenance Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
					Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Kontrak Berjalan Total Ongoing Contracts	Kontrak Contract	51	40	100	11	27,50%
Nilai Kontrak Berjalan Value of Ongoing Contracts	Rp juta Rp million	1.765.383	785.367	1.275.701	980.016	124,78%

Jumlah kontrak berjalan untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa non-teknik pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 kontrak. Jumlah ini meningkat dibandingkan kontrak baru pada tahun 2024 sebanyak 40 kontrak.

In 2025, the number of ongoing contracts in the Non-Technical Services Operation and Maintenance segment totalled 51 contracts, an increase compared with 40 ongoing contracts in 2024.

Sementara itu, nilai kontrak berjalan untuk segmen operasi dan pemeliharaan jasa teknik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,77 triliun, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp785,37 miliar.

Meanwhile, the value of ongoing contracts in the Non-Technical Services Operation and Maintenance segment in 2025 amounted to Rp1.77 trillion, an increase compared with Rp785.37 billion in 2024.

Keandalan Distribusi Tenaga Listrik

Pada Tahun 2025, PLN Nusa Daya berhasil mencatat kinerja keandalan distribusi tenaga listrik yang sangat baik, ditunjukkan melalui indikator *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) sebagai berikut:

System Average Interruption Duration Index (SAIDI)

SAIDI merupakan rata-rata lama padam per pelanggan dalam suatu periode tertentu dengan tujuan melakukan evaluasi atas lama waktu pemadaman listrik yang dirasakan pelanggan dalam rangka meningkatkan kualitas keandalan sistem kelistrikan. Pemadaman yang dihitung mencakup seluruh pemadaman pada pelanggan AMC Distribusi dimana pelanggan AMC Distribusi mencakup UP3 Gorontalo dan UP3 Bima.

Realisasi SAIDI yang dilayani tahun 2025 sebanyak 154.26 menit/pelanggan, yaitu tercapai 110,00% dari target yang ditetapkan 213,41 menit/pelanggan.

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

SAIFI merupakan rata-rata jumlah/kali terjadi pemadaman per pelanggan dalam suatu periode tertentu dengan tujuan melakukan evaluasi atas kali pemadaman listrik yang dirasakan pelanggan dalam rangka meningkatkan kualitas keandalan sistem kelistrikan. Pemadaman yang dihitung mencakup seluruh pemadaman pada pelanggan AMC Distribusi dimana pelanggan AMC Distribusi mencakup UP3 Gorontalo dan UP3 Bima.

Realisasi SAIFI yang dilayani tahun 2025 sebanyak 2,65 kali/pelanggan, yaitu tercapai 110,00% dari target yang ditetapkan 3,75 kali/pelanggan.

Keandalan dan Efisiensi Operasi Pembangkit AMC

Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan dan efisiensi operasi pembangkit di lingkungan *Asset Management Contract* (AMC) antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Specific Fuel Consumption* (SFC). Ketiga indikator ini memberikan gambaran menyeluruh terkait ketersediaan pembangkit, frekuensi gangguan tak terencana, serta efisiensi pemanfaatan bahan bakar dalam proses pembangkitan.

Electricity Distribution Reliability

In 2025, PLN Nusa Daya recorded strong performance in electricity distribution reliability, as reflected in the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), as follows:

System Average Interruption Duration Index (SAIDI)

SAIDI measures the average duration of electricity interruptions experienced by each customer over a specific period. This indicator is used to evaluate the duration of interruptions affecting customers, with a view to improving the reliability of the electricity system. The interruptions included in the calculation comprise all outages affecting AMC Distribution customers, namely customers of UP3 Gorontalo and UP3 Bima.

In 2025, actual SAIDI was recorded at 154.26 minutes per customer, equivalent to 110.00% of the target of 213.41 minutes per customer.

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

SAIFI measures the average number of electricity interruptions experienced by each customer over a specific period. This indicator is used to evaluate the frequency of interruptions affecting customers, with a view to improving the reliability of the electricity system. The interruptions included in the calculation comprise all outages affecting AMC Distribution customers, namely customers of UP3 Gorontalo and UP3 Bima.

In 2025, actual SAIFI was recorded at 2.65 times per customer, equivalent to 110.00% of the target of 3.75 times per customer.

AMC Power Plant Operational Reliability and Efficiency

Several key indicators are used to measure the reliability and operational efficiency of power plants under the Asset Management Contract (AMC), including the Equivalent Availability Factor (EAF), Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), and Specific Fuel Consumption (SFC). These three indicators provide a comprehensive overview of power plant availability, the frequency of unplanned outages, and fuel utilisation efficiency in the power generation process.

EAF Pembangkit AMC

Indikator EAF bertujuan untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan daya mampu netto pada periode tertentu. Indikator kinerja ini menggunakan polaritas positif, dimana semakin tinggi angka EAF mengindikasikan bahwa kesiapan operasi unit pembangkit semakin baik.

Pengukuran indikator kinerja EAF berdasarkan realisasi kinerja EAF pada seluruh unit PLTD pada 6 Unit Induk Distribusi/Wilayah mengacu data aset pembangkit pada Perjanjian Pengelolaan Aset atau *Asset Management Contract* antara PLN Nusa Daya dengan Unit Induk Distribusi/Wilayah.

Pencapaian kinerja EAF pembangkit AMC tahun 2025 adalah sebesar 85,25% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 90,06%.

EFOR Pembangkit AMC

Indikator EFOR bertujuan untuk mengukur tingkat ketidaksiapan unit pembangkit karena adanya gangguan (*outage*) dan ataupun *derating* yang tidak direncanakan. Diukur dari persentase jam gangguan dan jam derating yang tidak direncanakan terhadap jumlah jam pelayanan pembangkit dalam satu periode setelah dilakukan STOP.

Indikator kinerja ini menggunakan polaritas negatif, semakin rendah angka EFOR mengindikasikan bahwa durasi tidak beroperasinya unit PLTD semakin kecil yang berarti bahwa hal tersebut semakin baik.

Pengukuran indikator kinerja EFOR berdasarkan realisasi kinerja EFOR pada seluruh unit PLTD pada 6 Unit Induk Distribusi/Wilayah mengacu data aset pembangkit pada Perjanjian Pengelolaan Aset atau *Asset Management Contract* antara PLN Nusa Daya dengan Unit Induk Distribusi/Wilayah.

Realisasi EFOR 2025 sebesar 6,18%, lebih rendah dari target yang diajukan adalah 6,23% sehingga dengan polaritas negatif pencapaian realisasi terhadap target untuk indikator ini adalah 100,80%.

SFC Pembangkit AMC

Indikator SFC bertujuan untuk melakukan monitoring efisiensi dari penggunaan bahan bakar pembangkit dengan cara mengukur rasio volume pemakaian bahan bakar terhadap total kWh produksi bruto pada pembangkit.

Semakin rendah angka SFC mengindikasikan bahwa unit pembangkit semakin efisien dalam penggunaan bahan bakar. Pengukuran indikator kinerja SFC berdasarkan realisasi kinerja SFC pada seluruh unit PLTD pada 6 Unit

AMC Power Plant EAF

The EAF indicator is used to measure the availability factor of a power plant to operate at net capacity over a specific period. This performance indicator uses a positive scale, whereby a higher EAF figure indicates stronger operational readiness of the power generation unit.

The EAF performance indicator is measured based on the actual EAF performance of all diesel power plant units across the six Distribution/Regional Parent Units, with reference to power plant asset data under the Asset Management Contract between PLN Nusa Daya and the Distribution/Regional Parent Units.

In 2025, EAF performance achievement for AMC power plants was recorded at 85.25%, equivalent to 94.66% of the target of 90.06%.

AMC Power Plant EFOR

The EFOR indicator is used to measure the level of unavailability of power generation units due to unplanned outages and/or derating. It is calculated as the percentage of unplanned outage hours and derating hours against the total operating hours of the power plant within a specific period following a STOP event.

This performance indicator uses a negative scale, whereby a lower EFOR figure indicates a shorter downtime duration for diesel power plant units and, therefore, better performance.

The EFOR performance indicator is measured based on the actual EFOR performance of all diesel power plant units across the six Distribution/Regional Parent Units, with reference to power plant asset data under the Asset Management Contract between PLN Nusa Daya and the Distribution/Regional Parent Units.

In 2025, EFOR realisation was recorded at 6.18%, lower than the proposed target of 6.23%. As this indicator has a negative polarity, achievement against the target was recorded at 100.80%.

AMC Power Plant SFC

The SFC indicator aims to monitor the efficiency of power plant fuel consumption by measuring the ratio of fuel volume consumed to total gross kWh production at the power plant.

A lower SFC figure indicates that the power generation unit is more efficient in its use of fuel. The measurement of the SFC performance indicator is based on the actual SFC performance across all diesel power plants (PLTD)

Induk Distribusi/Wilayah mengacu data aset pembangkit pada Perjanjian Pengelolaan Aset atau *Asset Management Contract* antara PLN Nusa Daya dengan Unit Induk Distribusi/Wilayah.

Realisasi SFC pembangkit AMC tahun 2025 adalah sebesar 0,3171 liter/kWh atau tercapai 99,46% dari target sebesar 0,3154 liter/kWh.

Pencapaian Response *Time* dan *Recovery Time*

Pada Tahun 2025, kinerja PLN Nusa Daya pada aspek pemulihan gangguan dijelaskan sebagai berikut:

Response Time atau Rata-rata Pemulihan Tersambung (RPT)

Indikator *Response Time* atas Gangguan adalah upaya peningkatan pelayanan dengan memenuhi batas ketentuan yang berlaku untuk penanganan keluhan pelanggan karena gangguan, yang diukur dari rata-rata *response time* atas gangguan pada suatu periode berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui *response time* atas gangguan yang dirasakan pelanggan setiap tahunnya.

Realisasi *Response Time* atas Gangguan tahun 2025 adalah selama 22,58 menit, lebih rendah dari target yang ditetapkan selama 28,50 menit, sehingga pencapaian terhadap target adalah sebesar 110,00%.

Recovery Time atau Rata-rata Cepat Tersambung (RCT)

Indikator *Recovery Time* atas Gangguan upaya peningkatan pelayanan dengan memenuhi batas ketentuan yang berlaku untuk penanganan keluhan pelanggan karena gangguan, yang diukur dari rata-rata *recovery time* atas gangguan pada suatu periode berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui *recovery time* atas gangguan yang dirasakan pelanggan setiap tahunnya.

Realisasi *recovery time* tahun 2025 adalah selama 40,50 menit dimana lebih cepat dari target yang diharapkan yaitu 42,75 menit sehingga pencapaian yang didapat sebesar 105,26%.

Pencapaian SLA Pekerjaan Sesuai Penugasan

Pencapaian Kinerja Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) Pekerjaan sesuai Penugasan PLN Nusa Daya tahun 2025 adalah 99,23% dengan target 99,23%. Dari beberapa tantangan di tahun 2025 ini, Perusahaan telah mempersiapkan beberapa strategi di periode mendatang yaitu:

within the 6 Distribution/Regional Parent Units, referring to power plant asset data in the Asset Management Contract between PLN Nusa Daya and the Distribution/Regional Parent Units.

The actual SFC for AMC power stations in 2025 was 0.3171 litres/kWh, representing 99.46 per cent of the target of 0.3154 litres/kWh.

Response Time and Recovery Time Performance

In 2025, PLN Nusa Daya's fault recovery performance was reflected in the following indicators:

Response Time or Average Connection Recovery (RPT)

The Response Time to Faults indicator measures the Company's efforts to improve service quality by meeting the applicable time limits for handling customer complaints related to faults, based on the average response time to faults within a specific period. This indicator is used to assess the response time for faults experienced by customers each year.

In 2025, actual Response Time for Outages was recorded at 22.58 minutes, lower than the target of 28.50 minutes, resulting in a target achievement rate of 110.00%.

Recovery Time or Average Fast Connection (RCT)

The Recovery Time for Faults indicator measures the Company's efforts to improve service quality by meeting the applicable thresholds for handling customer complaints related to faults, based on the average recovery time within a specific period. This indicator is used to assess the recovery time for faults experienced by customers each year.

In 2025, actual recovery time was recorded at 40.50 minutes, faster than the target of 42.75 minutes, resulting in an achievement rate of 105.26%.

SLA Achievement for Assigned Work Order

In 2025, PLN Nusa Daya recorded an SLA achievement of 99.23% for assigned work, in line with the target of 99.23%. In response to several challenges encountered during the year, the Company has prepared a number of strategies for the coming period, as follows:

Pembangkit

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangkit, PLN Nusa Daya telah mengusulkan kepada UIW NTB perubahan nilai *Service Level Agreement* (SLA) serta penyempurnaan rumus perhitungan DKD. Selain itu, dilakukan penyesuaian kapasitas kontrak sewa mesin pembangkit, yaitu pada mesin Ampenan dari sebelumnya 10 MW menjadi 8 MW ditambah 1 MW kapasitas *backup*, serta pada mesin Tambora di *site* Ni'u dari 13 MW menjadi 10 MW ditambah 1 MW kapasitas *backup*, guna menyesuaikan kebutuhan operasional dan meningkatkan efisiensi layanan.

Transmisi

Untuk menjaga keandalan sistem transmisi dan gardu induk, PLN Nusa Daya melakukan berbagai upaya pencegahan gangguan yang disebabkan oleh faktor kelalaian personel, antara lain melalui penerapan skema denda dalam kontrak KHS pengadaan alat kerja yang disertai monitoring dan evaluasi berkala, serta memastikan kecukupan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional.

Distribusi

Dalam mendukung keandalan jaringan distribusi, PLN Nusa Daya melakukan penambahan tim *Contingency Right of Way* (ROW) dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ROW. Selain itu, dilakukan pemasangan penghalang hewan dan *cover* sambungan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan, percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan operasional, serta pemenuhan peralatan kerja dan armada untuk mendukung efektivitas layanan.

Pelayanan Pelanggan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, PLN Nusa Daya melaksanakan *Customer Management Control* (CMC) dan menerbitkan surat peringatan kepada *biller* yang belum mencapai target kinerja. Selain itu, dilakukan proses *filtering* terhadap pelanggan pascabayar yang belum terbaca selama dua bulan berturut-turut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembacaan ulang meter guna memastikan akurasi data dan penagihan pelanggan.

Power Plants

To improve the effectiveness of power plant management, PLN Nusa Daya has proposed changes to the Service Level Agreement (SLA) and refinements to the DKD calculation formula to UIW NTB. In addition, adjustments have been made to the contracted capacity of power generation units, namely the Ampenan unit, from the previous 10 MW to 8 MW plus 1 MW of backup capacity, and the Tambora unit at the Ni'u site, from 13 MW to 10 MW plus 1 MW of backup capacity. These adjustments were made to align with operational requirements and improve service efficiency.

Transmission

To maintain the reliability of the transmission system and substations, PLN Nusa Daya has implemented various measures to prevent disruptions caused by personnel negligence. These include the application of a penalty scheme under KHS contracts for the procurement of work equipment, supported by regular monitoring and evaluation, as well as ensuring adequate manpower in accordance with operational requirements.

Distribution

To support the reliability of the distribution network, PLN Nusa Daya has expanded its Contingency Right of Way (ROW) team and strengthened supervision of ROW works. In addition, animal barriers and joint covers have been installed at locations prone to disruptions, works have been accelerated in line with operational needs, and the required work equipment and vehicle fleet have been provided to support service effectiveness.

Customer Service

To improve customer service quality, PLN Nusa Daya has implemented Customer Management Control (CMC) and issued warning letters to billers who did not meet their performance targets. In addition, a filtering process was carried out for postpaid customers whose meters had not been read for two consecutive months, followed by meter re-reading to ensure data accuracy and accurate customer billing.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

PLN Nusa Daya memberikan fokus pada kegiatan pemasaran dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha Perusahaan secara berkelanjutan. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pasar, pemasaran juga menjadi instrumen yang berperan dalam mendorong peningkatan kinerja operasional maupun finansial Perusahaan, baik dalam horizon jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, PLN Nusa Daya secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan strategi pemasaran guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pasar serta prioritas strategis Perusahaan. Proses tersebut juga mencakup pengendalian dan pemantauan atas implementasi strategi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, responsif, dan mampu mengakomodasi berbagai peluang maupun tantangan bisnis yang berkembang. Sejumlah strategi pemasaran yang telah dijalankan oleh PLN Nusa Daya sepanjang tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Mengedepankan nilai tambah dan keunggulan layanan yang dimiliki PLN Nusa Daya;
2. Menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif guna menarik pelanggan baru;
3. Memperkuat hubungan dan kolaborasi jangka panjang dengan para pemangku kepentingan;
4. Melaksanakan kegiatan riset pasar serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru.

Pangsa Pasar

PLN Nusa Daya melaksanakan kegiatan operasional penyediaan jasa di berbagai wilayah strategis di Indonesia, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap posisi pangsa pasar pada industri jasa operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan di wilayah-wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah kontrak dan cakupan layanan yang dikelola, pangsa pasar rata-rata yang berhasil dikuasai oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, dengan rincian sebagai berikut:

Marketing Strategy

PLN Nusa Daya places focus on marketing activities to support the Company's sustainable business growth and development. Beyond serving as a means to expand the market, marketing also acts as an instrument that plays a role in driving improvements in the Company's operational and financial performance, both in the short and long term, in line with the targets outlined in the Company's business plan.

In its implementation, PLN Nusa Daya continuously evaluates and refines its marketing strategy to ensure alignment with evolving market needs and the Company's strategic priorities. This process also includes controlling and monitoring the implementation of the established strategy, so that it can be carried out optimally, responsively, and with the ability to accommodate various emerging business opportunities and challenges. The marketing strategies implemented by PLN Nusa Daya throughout 2025 included the following:

1. Prioritising the added value and service advantages offered by PLN Nusa Daya;
2. Implementing a competitive pricing strategy to attract new customers;
3. Strengthening long-term relationships and collaboration with stakeholders;
4. Conducting market research activities and promoting innovation in the development of new products and services.

Market Share

PLN Nusa Daya carries out service provision operations in various strategic regions across Indonesia, including Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua. As of 31 December 2025, PLN Nusa Daya had conducted a review and evaluation of its market share position in the electricity operation and maintenance services industry across these regions. In line with the increasing number of contracts and scope of services managed, the average market share secured by the Company by the end of 2025 showed positive development, with details as follows:

Tabel Pangsa Pasar
Table of Market Share

Uraian Description	2025 Keterangan Information	2025 Pangsa Pasar Market Share	2024 Keterangan Information	2024 Pangsa Pasar Market Share	2023 Keterangan Information	2023 Pangsa Pasar Market Share
Pembangkitan Power Plant	147 unit dari total 164 unit 147 out of a total of 164 units	89,63%	146 unit dari total 184 unit 146 out of a total of 184 units	895	180 unit dari total 181 unit 180 out of a total of 181 units	99,5%
Transmisi Transmission	43 unit dari total 43 unit 43 out of a total of 43 units	100%	41 unit dari total 41 unit 41 out of a total of 41 units	100%	38 unit dari total 38 unit 38 out of a total of 38 units	100%
Distribusi Distribution	255 unit dari total 281 unit 255 out of a total of 281 units	90,75%	245 unit dari total 279 unit 245 out of a total of 279 units	88%	204 unit dari total 279 unit 204 out of a total of 279 units	73%
Billing Management	189 unit dari total 281 unit 189 out of a total of 281 units	67,26%	182 unit dari total 279 unit 182 out of a total of 279 units	65%	180 unit dari total 279 unit 180 out of a total of 279 units	65%

Profitabilitas per Segmen
Profitability by Segment

Pada tahun 2024, PLN Nusa Daya berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp4,32 triliun, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar Rp3,25 triliun. Pendapatan pada tahun 2025 sebagian besar berasal dari pendapatan operasi dan pemeliharaan yang memberikan kontribusi sebesar Rp3,36 triliun atau 77,75% dari jumlah pendapatan. Sementara itu, pendapatan kontrak manajemen aset dan *ancillary services* berkontribusi sebesar 21,40% atau Rp925,42 miliar dan pendapatan lain-lain sebesar Rp36,53 miliar atau berkontribusi 0,84%.

In 2024, PLN Nusa Daya recorded revenue of Rp4.32 trillion, an increase from Rp3.25 trillion in 2024. The majority of this revenue was generated from operation and maintenance revenue, which contributed Rp3.36 trillion, or 77.75% of total revenue. Meanwhile, asset management contract and ancillary services revenue contributed Rp925.42 billion, or 21.40%, while other revenue amounted to Rp36.53 billion, or 0.84% of total revenue.

Tabel Profitabilitas Per Segmen
Table of Profitability by Segment

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Uraian	2025 Nominal Nominal	2025 Kontribusi Contribution	2024 Nominal Nominal	2024 Kontribusi Contribution
Operasi dan pemeliharaan Operation and Maintenance	3.361.702	77,75%	2.818.771	86,84%
Kontrak manajemen aset dan *ancillary services* Asset management contract and ancillary services	925.418	21,40%	385.837	11,89%
Lain-lain Others	36.528	0,84%	41.484	1,28%
Jumlah Pendapatan **Total Revenue**	**4.323.648**	**100,00%**	**3.246.092**	**100,00%**

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Pembahasan kinerja keuangan pada bagian ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Nusa Daya dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2026 dengan opini audit "wajar, dalam semua hal yang material".

PLN Nusa Daya memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Laporan Keuangan disajikan dalam bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

The discussion of financial performance in this section has been prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT PLN Nusa Daya and Subsidiaries for the period ended 31 December 2025. The financial statements were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PricewaterhouseCoopers global network, and issued on 12 June 2026 with an audit opinion of "fair, in all material respects".

PLN Nusa Daya ensures that its financial statements are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS). The Financial Statements are presented in a separate section of this Annual Report as an integral part.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Posisi keuangan PLN Nusa Daya pada tahun 2025 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp2,20 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp1,38 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp817,88 miliar.

Consolidated Statement of Financial Position

PLN Nusa Daya's financial position in 2025 comprised total assets of Rp2.20 trillion, total liabilities of Rp1.38 trillion and total equity of Rp817.88 billion.

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Perubahan 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Persentase
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.645.938	1.010.767	739.943	635.171	62,84%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	555.127	339.571	292.592	215.556	63,48%
Jumlah Aset Total Assets	**2.201.065**	**1.350.338**	**1.032.535**	**850.727**	**63,00%**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.247.090	684.065	535.734	563.025	82,31%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	136.092	68.375	55.783	67.717	99,04%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.383.182**	**752.440**	**591.517**	**630.742**	**83,83%**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**817.883**	**597.898**	**441.018**	**219.985**	**36,79%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**2.201.065**	**1.350.338**	**1.032.535**	**850.727**	**63,00%**

Uraian lebih lanjut terkait posisi keuangan Perusahaan dijelaskan sebagai berikut.

Further description of the Company's financial position is explained as follows.

Aset

PLN Nusa Daya mencatatkan jumlah aset tahun 2025 sebesar Rp2,20 triliun, yaitu mengalami peningkatan 63,00% atau Rp850,73 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1,35 triliun. Peningkatan jumlah aset ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pada komponen aset lancar dan tidak lancar.

Dampak dari peningkatan jumlah aset tersebut adalah adanya perubahan pada tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban.

Assets

In 2025, PLN Nusa Daya recorded total assets of Rp2.20 trillion, representing an increase of 63.00%, or Rp850.73 billion, compared with Rp1.35 trillion in 2024. This increase was mainly driven by growth in both current and non-current assets.

The increase in total assets reflected a change in the Company's ability to meet its obligations.

Tabel Jumlah Aset
Table of Total Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.645.938	1.010.767	739.943	635.171	62,84%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	555.127	339.571	292.592	215.556	63,48%
Jumlah Aset Total Assets	**2.201.065**	**1.350.338**	**1.032.535**	**850.727**	**63,00%**

Aset Lancar

Aset lancar Perusahaan mengalami peningkatan 62,84% atau 635,17 miliar menjadi Rp1,65 triliun pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,01 triliun. Peningkatan jumlah aset lancar ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pada keseluruhan komponen aset lancar Perusahaan, terutama pada piutang usaha, persediaan, serta kas dan setara kas.

Dampak dari peningkatan jumlah aset lancar tersebut berpengaruh pada tingkat likuiditas Perusahaan.

Current Assets

The Company's current assets increased by 62.84%, or Rp635.17 billion, to Rp1.65 trillion in 2025, compared with Rp1.01 trillion in 2024. This increase was mainly driven by growth across all components of the Company's current assets, particularly trade receivables, inventories, and cash and cash equivalents.

The increase in current assets had an impact on the Company's liquidity position.

Tabel Jumlah Aset Lancar
Table of Total Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	241.122	137.933	154.372	103.189	74,81%
Piutang usaha - pihak berelasi Trade receivables - related parties	997.612	690.692	422.192	306.920	44,44%
Piutang non-usaha, bagian lancar Non-trade receivables, current portion	43.348	32.411	21.747	10.937	33,74%
Persediaan Inventories	167.093	55.334	81.673	111.759	201,97%

Tabel Jumlah Aset Lancar
Table of Total Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pajak dibayar di muka, bagian lancar: Prepaid taxes, current portion:					
Pajak lainnya Other taxes	139.718	86.237	57.147	53.481	62,02%
Uang muka dan biaya dibayar di muka Advances and prepayments	10.297	8.160	2.812	2.137	26,19%
Piutang sewa - jangka waktu dalam satu tahun Lease receivables – within one year	46.748	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**1.645.938**	**1.010.767**	**739.943**	**635.171**	**62,84%**

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp555,13 miliar, mengalami peningkatan 63,48% atau Rp215,56 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp339,57 miliar. Peningkatan jumlah aset tidak lancar ini terutama didorong oleh adanya kenaikan pada aset tetap, aset hak guna, serta beberapa komponen lainnya.

Dampak dari peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut berkontribusi pada peningkatan jumlah aset secara korporat.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets in 2025 amounted to Rp555.13 billion, representing an increase of 63.48%, or Rp215.56 billion, from Rp339.57 billion in 2024. This increase was mainly driven by higher fixed assets, right-of-use assets, and several other components.

The increase in non-current assets contributed to the growth in total assets at the corporate level.

Tabel Jumlah Aset Tidak Lancar
Table of Total Non-Current Assets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang non-usaha, bagian tidak lancar Non-trade receivables, non-current portion:	-	12.805	25.315	(12.805)	(100,00)%
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar: Prepaid taxes, non-current portion:					
Pajak penghasilan badan Corporate income tax	11.808	17.084	36.327	(5.276)	(30,88)%
Piutang sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Lease receivables - net of current portion	67.693	-	-	-	-
Aset tetap Fixed assets	350.775	238.293	181.263	112.482	47,20%
Aset hak-guna Right-of-use assets	73.950	36.543	36.425	37.407	102,36%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	8.990	8.098	3.542	892	11,02%
Aset tidak lancar lain Other non-current assets	41.911	26.748	9.720	15.163	56,69%
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**555.127**	**339.571**	**292.592**	**215.556**	**63,48%**

Liabilitas

PLN Nusa Daya mencatatkan jumlah liabilitas tahun 2025 sebesar Rp1,38 triliun, yaitu mengalami peningkatan 83,83% atau Rp160,92 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp591,52 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama didorong oleh kenaikan pada komponen liabilitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak dari peningkatan jumlah liabilitas tersebut adalah berpengaruh pada tingkat solvabilitas Perusahaan.

Liabilities

PLN Nusa Daya recorded total liabilities of Rp1.38 trillion in 2025, representing an increase of 83.83%, or Rp160.92 billion, compared with Rp591.52 billion in 2023. This increase was mainly driven by growth in both current and non-current liability components.

The increase in total liabilities affected the Company's solvency position.

Tabel Jumlah Liabilitas
Table of Total Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.247.090	684.065	535.734	563.025	82,31%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	136.092	68.375	55.783	67.717	99,04%
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**1.383.182**	**752.440**	**591.517**	**630.742**	**83,83%**

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan mengalami peningkatan 82,31% atau Rp563,03 miliar menjadi Rp1,25 triliun pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp684,07 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek ini terutama didorong oleh kenaikan pada sebagian besar komponen liabilitas jangka pendek yaitu utang lain-lain, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas sewa.

Dampak dari peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek tersebut adalah berpengaruh pada tingkat likuiditas Perusahaan.

Current Liabilities

The Company's current liabilities increased by 82.31%, or Rp563.03 billion, to Rp1.25 trillion in 2025, compared with Rp684.07 billion in 2024. This increase was mainly driven by growth in most components of current liabilities, namely other payables, trade payables, accrued expenses and lease liabilities.

The increase in current liabilities affected the Company's liquidity position.

Tabel Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Table of Total Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Utang usaha Trade payables	385.795	293.081	189.703	92.714	31,63%
Utang lain-lain Other payables	555.931	203.571	204.713	352.360	173,09%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	198.037	148.345	106.961	49.692	33,50%
Liabilitas sewa, jangka pendek Lease liabilities, current portion	101.033	15.544	17.849	85.489	549,98%
Utang pajak Taxes payable	8.294	23.524	16.448	(15.230)	(64,74)%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**1.247.090**	**684.065**	**535.734**	**563.025**	**82,31%**

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp136,09 miliar, mengalami peningkatan 99,04% atau Rp67,72 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp68,38 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang ini terutama didorong oleh adanya kenaikan pada liabilitas sewa dalam jangka panjang.

Dampak dari peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut adalah berkontribusi pada peningkatan jumlah liabilitas secara korporat.

Non-Current Liabilities

The Company's non-current liabilities in 2025 amounted to Rp136.09 billion, representing an increase of 99.04%, or Rp67.72 billion, from Rp68.38 billion in 2024. This increase was mainly driven by higher long-term lease liabilities.

The increase in non-current liabilities contributed to the growth in total liabilities at the corporate level.

Tabel Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Table of Total Non-Current Liabilities

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas sewa, jangka panjang Lease liabilities, non-current portion	106.060	21.365	20.839	84.695	396,42%
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefits liabilities	30.032	47.010	34.944	(16.978)	(36,12)%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**136.092**	**68.375**	**55.783**	**67.717**	**99,04%**

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp597,90 miliar, mengalami peningkatan 35,57% atau Rp156,88 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp441,02 miliar. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama didorong oleh peningkatan saldo laba dan penghasilan komprehensif lain.
Dampak dari peningkatan jumlah ekuitas tersebut adalah berpengaruh pada kuatnya struktur modal dari komponen ekuitas.

Equity

The Company's equity in 2025 amounted to Rp597.90 billion, representing an increase of 35.57%, or Rp156.88 billion, from Rp441.02 billion in 2024. This increase was mainly driven by higher retained earnings and other comprehensive income.

The increase in equity supported the strength of the Company's capital structure in terms of its equity component.

Tabel Jumlah Ekuitas
Table of Total Equity

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Modal saham: Share capital:					
Modal dasar - 316.000.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh - 79.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham Authorised - 316,000,000 shares, issued and fully paid - 79,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share	79.000	79.000	79.000	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	25.593	25.593	25.593	-	-

Tabel Jumlah Ekuitas
Table of Total Equity

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Saldo laba: Retained earnings:					
Ditentukan penggunaannya Appropriated	15.076	15.076	15.076	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated	635.206	423.601	266.633	211.605	49,95%
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	63.006	54.626	54.714	8.380	15,43%
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**817.883**	**597.898**	**441.018**	**219.985**	**36,79%**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	4.323.648	3.246.092	2.360.997	1.077.556	33,20%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(3.725.236)	(2.839.074)	(2.031.832)	(886.162)	31,21%
Laba Bruto Gross Profit	**598.412**	**407.018**	**329.165**	**191.394**	**47,02%**
Beban usaha Operating expenses	(202.618)	(143.588)	(118.350)	(59.030)	41,11%
Penghasilan keuangan Finance income	752	985	1.032	(233)	(23,65)%
Beban keuangan Finance expenses	(34.063)	(22.080)	(10.538)	(11.983)	54,27%
Beban lain-lain, bersih Other expenses, net	(76.723)	(13.290)	(45.302)	(63.433)	477,30%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**285.760**	**229.045**	**156.007**	**56.715**	**24,76%**
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(71.155)	(70.077)	(47.579)	(1.078)	1,54%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**214.605**	**158.968**	**108.428**	**55.637**	**35,00%**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Other comprehensive income for the year	8.380	(88)	(1.824)	8.468	(9.622,73)%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**222.985**	**158.880**	**106.604**	**64.105**	**40,35%**

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	214.605	158.968	108.427	55.637	35,00%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	1	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	222.985	158.880	106.603	64.105	40,35%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	1	-	-

Pendapatan

PLN Nusa Daya mencatatkan jumlah pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp4,32 triliun, yaitu mengalami peningkatan 33,20% atau Rp1,08 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp3,25 triliun. Peningkatan jumlah pendapatan ini terutama didorong oleh peningkatan pada segmen pendapatan dari operasi dan pemeliharaan serta dari segmen kontrak manajemen aset dan *ancillary services.*

Dampak dari peningkatan jumlah pendapatan tersebut.

Revenue

In 2025, PLN Nusa Daya recorded revenue of Rp4.32 trillion, representing an increase of 33.20%, or Rp1.08 trillion, from Rp3.25 trillion in 2024. This increase was mainly driven by growth in revenue from the operation and maintenance segment, as well as from the asset management contract and ancillary services segments.

The increase in revenue strengthened the Company's ability to generate profit.

Tabel Jumlah Pendapatan
Table of Total Revenue

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance	3.361.702	2.818.771	542.931	19,26%
Kontrak manajemen aset dan *ancillary services* Asset management contract and ancillary services	925.418	385.837	539.581	139,85%
Lain-lain Others	36.528	41.484	(4.956)	(11,95)%
Jumlah Pendapatan **Total Revenue**	**4.323.648**	**3.246.092**	**1.077.556**	**33,20%**

Beban Pokok Pendapatan

Jumlah beban pokok pendapatan mengalami peningkatan 31,21% atau Rp886,16 miliar menjadi Rp3,73 triliun pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,84 triliun. Peningkatan jumlah beban pokok pendapatan ini terutama didorong oleh seiring meningkatnya pendapatan Perusahaan.

Cost of Revenue

Total cost of revenue increased by 31.21%, or Rp886.16 billion, to Rp3.73 trillion in 2025, compared with Rp2.84 trillion in 2024. This increase was mainly in line with the growth in the Company's revenue.

Dampak dari peningkatan jumlah beban pokok pendapatan tersebut adalah meningkatnya kapasitas operasional Perusahaan dalam mendukung pertumbuhan usaha seiring dengan pendapatan yang meningkat.

The increase in cost of revenue reflected the Company's higher operational capacity to support business growth in line with increased revenue.

Tabel Jumlah Beban Pokok Pendapatan
Table of Total Cost of Revenue

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kepegawaian Personnel	2.015.915	1.721.590	1.357.241	294.325	17,10%
Sewa pembangkit Generator lease	565.939	336.540	188.895	229.399	68,16%
Subkontraktor Subcontractor	449.104	221.855	135.681	227.249	102,43%
Alat kerja dan material Tools and materials	359.950	282.302	118.996	77.648	27,51%
Kendaraan operasional Operational vehicle	203.848	146.634	122.888	57.214	39,02%
Penyusutan aset hak-guna Depreciation of right-of-use assets	49.290	38.968	37.635	10.322	26,49%
Lain-lain Others	81.190	91.185	70.496	(9.995)	(10,96)%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	**3.725.236**	**2.839.074**	**2.031.832**	**886.162**	**31,21%**

Laba Bruto

Dengan perolehan pendapatan dan beban pokok pendapatan tersebut, Perusahaan mencatatkan perolehan laba bruto pada tahun 2025 sejumlah Rp598,41 miliar, yaitu meningkat 47,02% atau Rp191,39 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp407,02 miliar. Peningkatan jumlah laba bruto ini terutama didorong oleh adanya pertumbuhan pendapatan yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban pokok pendapatan.

Gross Profit

Based on the revenue and cost of revenue recorded, the Company posted gross profit of Rp598.41 billion in 2025, representing an increase of 47.02%, or Rp191.39 billion, compared with Rp407.02 billion in 2024. This increase was mainly driven by revenue growth that remained higher than the increase in cost of revenue.

Beban Usaha

PLN Nusa Daya mencatatkan beban usaha pada tahun 2025 sebesar Rp202,62 miliar, yaitu mengalami peningkatan 41,11% atau Rp59,03 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp143,59 miliar. Peningkatan beban usaha ini terutama didorong oleh meningkatnya seluruh beban usaha yaitu kepegawaian, penyusutan aset tetap, honorarium, dan lain-lain.

Dampak dari peningkatan beban usaha tersebut adalah meningkatnya dukungan sumber daya dan infrastruktur operasional Perusahaan.

Operating Expenses

PLN Nusa Daya recorded operating expenses of Rp202.62 billion in 2025, representing an increase of 41.11%, or Rp59.03 billion, from Rp143.59 billion in 2024. This increase was mainly driven by higher operating expenses across all components, namely employee expenses, depreciation of fixed assets, honoraria and others.

The increase in operating expenses reflected greater support for the Company's operational resources and infrastructure.

Penghasilan Keuangan

Pada tahun 2025, penghasilan keuangan Perusahaan adalah sebesar Rp752 juta, yaitu mengalami penurunan 23,65% atau Rp233 juta dari tahun 2024 sebesar Rp985 miliar.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp34,06 miliar, yaitu mengalami peningkatan 54,27% atau Rp11,98 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp22,08 miliar.

Beban Lain-Lain

Pada tahun 2025, beban lain-lain Perusahaan adalah sebesar Rp76,72 miliar, yaitu mengalami peningkatan 477,30% atau Rp63,43 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp13,29 miliar.

Laba Sebelum Pajak

PLN Nusa Daya membukukan jumlah laba sebelum pajak pada tahun 2025 sebesar Rp285,76 miliar, yaitu mengalami peningkatan 24,76% atau Rp56,72 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp229,05 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pendapatan Perusahaan pada tahun berjalan.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, beban pajak penghasilan Perusahaan adalah sebesar Rp71,16 miliar, yaitu mengalami peningkatan 1,54% atau Rp1,08 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp70,08 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan laba Perusahaan.

Laba Tahun Berjalan

PLN Nusa Daya membukukan jumlah laba tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp214,61 miliar, yaitu mengalami peningkatan 35,00% atau Rp55,64 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp158,97 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pendapatan Perusahaan pada tahun berjalan.

Dampak dari peningkatan laba tahun berjalan tersebut adalah meningkatnya kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mencerminkan pengelolaan usaha yang efektif.

Finance Income

In 2025, the Company's finance income amounted to Rp752 million, representing a decrease of 23.65%, or Rp233 million, from Rp985 billion in 2024.

Finance Expenses

The Company's finance expenses in 2025 amounted to Rp34.06 billion, representing an increase of 54.27%, or Rp11.98 billion, from Rp22.08 billion in 2024.

Other Expenses

In 2025, the Company's other expenses amounted to Rp76.72 billion, representing an increase of 477.30%, or Rp63.43 billion, from Rp13.29 billion in 2024.

Profit Before Tax

PLN Nusa Daya recorded profit before tax of Rp285.76 billion in 2025, representing an increase of 24.76%, or Rp56.72 billion, from Rp229.05 billion in 2024. This increase in profit for the year was mainly driven by the increase in the Company's revenue during the year.

Income Tax Expense

In 2025, the Company's income tax expense amounted to Rp71.16 billion, representing an increase of 1.54%, or Rp1.08 billion, from Rp70.08 billion in 2024. This increase was mainly driven by the growth in the Company's profit.

Profit for the Year

PLN Nusa Daya recorded profit for the year of Rp214.61 billion in 2025, representing an increase of 35.00%, or Rp55.64 billion, from Rp158.97 billion in 2024. This increase was mainly driven by growth in the Company's revenue during the year.

The increase in profit for the year strengthened the Company's ability to generate profit, reflecting effective business management.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Pada tahun 2025 PLN Nusa Daya mencatatkan beban komprehensif lain sebesar Rp8,38 miliar, yaitu mengalami peningkatan 9.622% atau Rp8,47 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp88 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja.

Other Comprehensive Income for the Year

In 2025, PLN Nusa Daya recorded other comprehensive expense of Rp8.38 billion, representing an increase of 9,622%, or Rp8.47 billion, from Rp88 million in 2024. This increase was mainly due to higher remeasurement of post-employment benefit liabilities.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

PLN Nusa Daya membukukan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp222,99 miliar, yaitu mengalami peningkatan 40,35% atau Rp61,11 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp158,88 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pendapatan Perusahaan pada tahun berjalan.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mencerminkan pengelolaan usaha yang efektif.

Total Comprehensive Income for the Year

PLN Nusa Daya recorded total comprehensive income for the year of Rp222.99 billion in 2025, representing an increase of 40.35%, or Rp61.11 billion, from Rp158.88 billion in 2024. This increase was mainly driven by growth in the Company's revenue during the year.

This increase strengthened the Company's ability to generate profit, reflecting effective business management.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yang secara keseluruhan mencerminkan pergerakan kas dan setara kas selama periode berjalan.

Jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp137,93 miliar, yaitu meningkat 74,81% atau Rp103,19 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp137,93 miliar. Peningkatan jumlah kas dan setara kas ini terutama didorong oleh adanya peningkatan penerimaan kas pada aktivitas pendanaan.

Dampak dari peningkatan jumlah kas dan setara kas tersebut adalah berpengaruh pada tingkat likuiditas Perusahaan.

Consolidated Statement of Cash Flows

The cash flow statement presents information on the sources and uses of the Company's cash, which are classified into three main activities, namely operating activities, investing activities, and financing activities. Collectively, these activities reflect movements in cash and cash equivalents during the reporting period.

Total cash and cash equivalents at the end of 2025 amounted to Rp137.93 billion, representing an increase of 74.81%, or Rp103.19 billion, compared with Rp137.93 billion in 2024. This increase in cash and cash equivalents was mainly driven by higher cash receipts from financing activities.

The increase in cash and cash equivalents had an impact on the Company's liquidity position.

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi Net cash (used in)/provided by operating activities	(88.119)	103.554	10.259	(191.673)	(185,09)%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(143.006)	(69.988)	(44.800)	(73.018)	104,33%

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Net cash provided by/(used in) financing activities	334.314	(19.511)	(50.743)	353.825	(1.813,46)%
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	103.189	(11.353)	(85.284)	114.542	(1.008,91)%
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	137.933	149.286	239.656	(11.353)	(7,60)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalence at The End of The Year	241.122	137.933	154.372	103.189	74,81%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp88,12 miliar. Sedangkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp103,55 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Net Cash Flows from Operating Activities

Total net cash used in operating activities in 2025 amounted to Rp88.12 billion, while net cash provided by operating activities amounted to Rp103.55 billion. This was mainly affected by the increase in payments to suppliers and employees.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan yaitu meningkat 104,33% atau Rp73,02 miliar menjadi Rp143,01 miliar pada tahun 2025 dari Rp69,99 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya kenaikan pembelian aset tetap.

Net Cash Flows from Investing Activities

Total net cash used in investing activities increased by 104.33%, or Rp73.02 billion, to Rp143.01 billion in 2025 from Rp69.99 billion in 2024. This increase was mainly driven by higher acquisitions of fixed assets.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp334,31 miliar. Sedangkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2024 adalah sebesar Rp19,51 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan *Notional Pooling*.

Net Cash Flows from Financing Activities

Total net cash provided by financing activities in 2025 amounted to Rp334.31 billion, while net cash used in financing activities in 2024 amounted to Rp19.51 billion. This was mainly due to proceeds from Notional Pooling.

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Kemampuan Membayar Utang

Untuk menilai tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, dilakukan pengukuran melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Kedua indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kondisi keuangan Perusahaan, khususnya dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun komitmen keuangan jangka panjang secara berkelanjutan dan tepat waktu.

Solvency

To assess the Company's ability to meet its financial obligations, liquidity and solvency ratios are used as measurement tools. These indicators serve as analytical instruments to evaluate the Company's financial condition, particularly its ability to fulfil both short-term obligations as they fall due and long-term financial commitments on a sustainable and timely basis.

Tabel Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Table of Liquidity and Solvency Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratio			
Rasio Lancar | Current Ratio	132%	148%	138%
Rasio Cepat | Quick Ratio	119%	140%	123%
Rasio Kas | Cash Ratio	19%	20%	29%
Rasio Solvabilitas | Solvency Ratio			
Rasio Liabilitas terhadap Aset | Debt to Asset Ratio	63%	56%	57%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | Debt to Equity Ratio	169%	126%	134%

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur likuiditas, Perusahaan menggunakan beberapa indikator utama, antara lain rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar diperoleh dari perhitungan atas perbandingan antara jumlah aset lancar terhadap jumlah kewajiban jangka pendek, rasio cepat diperoleh dari perbandingan jumlah aset lancar setelah dikurangi dengan jumlah persediaan terhadap jumlah kewajiban jangka pendek, serta rasio kas diperoleh dari perbandingan jumlah kas terhadap kewajiban jangka pendek.

Pada tahun 2025, rasio lancar Perusahaan tercatat sebesar 132%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 148%. Rasio cepat juga mengalami penurunan menjadi 119% dari 140% pada tahun sebelumnya, sedangkan rasio kas tercatat sebesar 19%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 20%. Meskipun rasio likuiditas menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat likuiditas Perusahaan masih berada pada level yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, sehingga mencerminkan kemampuan Perusahaan yang tetap baik dalam menjaga kelancaran operasional dan memenuhi komitmen keuangannya.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios reflect the Company's ability to meet its short-term obligations. To measure liquidity, the Company uses several key indicators, including the current ratio, quick ratio, and cash ratio. The current ratio is calculated by comparing total current assets with total short-term liabilities. The quick ratio is calculated by comparing current assets after deducting inventories with total short-term liabilities, while the cash ratio is calculated by comparing total cash with short-term liabilities.

In 2025, the Company's current ratio was recorded at 132%, lower than 148% in 2024. The quick ratio also decreased to 119% from 140% in the previous year, while the cash ratio was recorded at 19%, slightly lower than 20% in 2024. Although the liquidity ratios declined compared with the previous year, the Company's liquidity remained at an adequate level to meet its short-term obligations as they become due, reflecting the Company's continued ability to maintain smooth operations and fulfil its financial commitments.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk mengukur solvabilitas, Perusahaan menggunakan rasio liabilitas terhadap aset yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset, serta rasio liabilitas terhadap ekuitas yang diperoleh dari perbandingan jumlah aset terhadap jumlah ekuitas.

Rasio liabilitas terhadap aset Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 63%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 56%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas juga mengalami kenaikan menjadi 169% dari 126% pada tahun sebelumnya. Peningkatan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa proporsi pendanaan yang berasal dari liabilitas meningkat dibandingkan dengan aset maupun ekuitas Perusahaan. Meskipun demikian, struktur permodalan Perusahaan masih berada pada tingkat yang terkendali dan didukung oleh kemampuan Perusahaan.

Tingkat Kolektibilitas dan Umur Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan diukur melalui indikator periode penagihan (*collection period*). Ukuran ini memberikan gambaran mengenai efektivitas Perusahaan dalam mengelola dan menagih piutang usaha. Periode penagihan piutang pada tahun 2025 adalah selama 75,00 hari, yaitu lebih tinggi dari tahun 2024 selama 65,6 hari.

Sementara itu, umur piutang usaha mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi piutang menjadi kas. Indikator ini mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi piutang menjadi kas dan menjaga keseimbangan antara piutang dan kas yang tersedia untuk aktivitas operasional. Realisasi umur piutang usaha tahun 2025 adalah sebesar 71,26 hari, lebih lama dari target yang diterapkan sebesar 61,91 hari atau mencapai target sebesar 84,90%.

Kemampuan Menghasilkan Keuntungan

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam analisis ini, Perusahaan menggunakan beberapa indikator utama, antara lain rasio pengembalian ekuitas, rasio pengembalian aset, margin laba bruto, dan margin laba bersih.

Solvency Ratio

Solvency ratios are used to measure the Company's ability to meet its short-term and long-term obligations. To assess solvency, the Company uses the liabilities-to-assets ratio, which is calculated by comparing total liabilities with total assets, and the liabilities-to-equity ratio, which is calculated by comparing total liabilities with total equity.

In 2025, the Company's liabilities-to-assets ratio was recorded at 63%, an increase from 56% in 2024. The liabilities-to-equity ratio also rose to 169% from 126% in the previous year. The increase in both ratios indicates that the proportion of funding derived from liabilities increased relative to the Company's assets and equity. Nevertheless, the Company's capital structure remained at a manageable level and was supported by the Company's financial capacity.

Collectability and Ageing of Receivables

The Company measures receivables collectability using the collection period indicator. This indicator provides an overview of the Company's effectiveness in managing and collecting trade receivables. In 2025, the receivables collection period was recorded at 75.00 days, longer than 65.6 days in 2024.

Meanwhile, trade receivables ageing measures the average time required to convert receivables into cash. This indicator assesses how quickly the Company can convert receivables into cash while maintaining a balance between receivables and cash available for operational activities. In 2025, trade receivables ageing was recorded at 71.26 days, longer than the target of 61.91 days, with target achievement of 84.90%.

Profitability

Profitability ratios are used to evaluate the Company's ability to generate earnings. The primary indicators include, return on equity, return on assets, gross profit margin, and net profit margin.

Tabel Rasio Profitabilitas
Table of Profitability Ratio

Uraian Description	2025	2024	2023
Rasio Pengembalian Ekuitas | Return on Equity Ratio	26%	27%	25%
Rasio Pengembalian Aset | Return on Assets Ratio	10%	12%	11%
Margin Laba Bruto | Gross Profit Margin	14%	13%	14%
Margin Laba Bersih | Net Profit Margin	5%	5%	5%

Secara umum, tingkat profitabilitas Perusahaan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio pengembalian ekuitas (ROE) tercatat sebesar 26%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 27%. Rasio pengembalian aset (ROA) juga mengalami penurunan menjadi 10% dari 12% pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, margin laba bruto meningkat menjadi 14% dibandingkan 13% pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional. Sementara itu, margin laba bersih tetap terjaga pada tingkat 5%.

Overall, the Company's profitability in 2025 remained relatively stable compared with the previous year. Return on equity (ROE) was recorded at 26%, slightly lower than 27% in 2024. Return on assets (ROA) also declined to 10% from 12% in the previous year. Meanwhile, gross profit margin increased to 14% from 13% in 2024, reflecting improved efficiency in generating profit from operational activities. Net profit margin remained stable at 5%.

Struktur Modal
Capital Structure

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PLN Nusa Daya mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dengan mempertimbangkan masukan dan rekomenasi dari Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Management Policy on Capital Structure

PLN Nusa Daya manages capital risk to ensure that it is able to continue as a going concern. The Company's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Company's capital structure by taking into account input and recommendations from the Board of Commissioners. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Struktur Modal

Capital Structure

Tabel Struktur Modal
Table of Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | Total Current Liabilities	1.247.090	684.065	535.734
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | Total Non-Current Liabilities	136.092	68.375	55.783
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	1.383.182	752.440	591.517
Jumlah Ekuitas | Total Equity	817.883	597.898	441.018
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | Total Liabilities and Equity	**2.201.065**	**1.350.338**	**1.032.535**
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | Liabilities to Equity Ratio	**169%**	**126%**	**134%**

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Ketentuan Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen PLN Nusa Daya mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, Kebijakan dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terkait persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan. Informasi lebih lanjut mengenai RUPS yang dilaksanakan tahun 2024, dijelaskan pada Bab Tata Kelola (Governansi) Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen Tahun 2025 (Tahun Buku 2024)
Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2025, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024. Selanjutnya, melalui Surat Pemegang Saham mayoritas yaitu PT PLN (Persero) No. 68946/MNJ.01.02/F01000000/2025 tanggal 15 Desember 2025 ditetapkan bahwa pembagian dividen adalah sebesar Rp3,00 miliar.

Kebijakan Dividen Tahun 2024 (Tahun Buku 2023)
Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2024, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Selanjutnya, melalui Surat Pemegang Saham mayoritas yaitu PT PLN (Persero) No. 54729/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tanggal 24 September 2024 ditetapkan bahwa pembagian dividen adalah sebesar Rp2,00 miliar.

Kebijakan Dividen Tahun 2023 (Tahun Buku 2022)
Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Juni 2023, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2022. Selanjutnya, melalui Surat Pemegang Saham mayoritas yaitu PT PLN (Persero) ditetapkan bahwa pembagian dividen adalah sebesar Rp1,00 miliar.

Dividend Distribution Policy

PLN Nusa Daya's Dividend Policy refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Furthermore, the dividend policy is determined based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) concerning the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements. Further information regarding the GMS held in 2024 is presented in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Dividend Distribution

Dividend Policy for 2025 (Fiscal Year 2024)
Based on the Resolution of the Annual GMS dated 25 June 2025, the GMS authorised the majority Shareholder to determine the appropriation of net profit for the fiscal year 2024. Subsequently, through the letter from the majority Shareholder, PT PLN (Persero) No. 68946/MNJ.01.02/F01000000/2025 dated 15 December 2025, it was determined that the dividend distribution amounted to Rp3.00 billion.

Dividend Policy for 2024 (Fiscal Year 2023)
Based on the Resolution of the Annual GMS dated 28 June 2024, the GMS authorised the majority Shareholder to determine the appropriation of net profit for the fiscal year 2023. Subsequently, through the letter from the majority Shareholder, PT PLN (Persero) No. 54729/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR dated 24 September 2024, it was determined that the dividend distribution amounted to Rp2.00 billion.

Dividend Policy for 2023 (Fiscal Year 2022)
Based on the Resolution of the Annual GMS dated 13 June 2023, the GMS authorised the majority Shareholder to determine the appropriation of net profit for the financial year 2022. Subsequently, through the letter from the majority Shareholder, PT PLN (Persero), it was determined that the dividend distribution amounted to Rp1.00 billion.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	Satuan Unit	Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) Year 2025 (2024 Fiscal Year)	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) Year 2024 (2023 Fiscal Year)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) Year 2023 (2022 Fiscal Year)
Laba Tahun Berjalan Tahun Buku Profit for the Year for the Fiscal Year	Rp juta Rp million	158.968	108.428	81.429
Jumlah Dividen* **Total Dividend***	**Rp juta** **Rp million**	**3.000**	**2.000**	**1.000**

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	Satuan Unit	Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) Year 2025 (2024 Fiscal Year)	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) Year 2024 (2023 Fiscal Year)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) Year 2023 (2022 Fiscal Year)
Tanggal Pengumuman Dividen Dividend Announcement Date		15 Desember 2025 15 December 2025	24 September 2024 24 September 2024	2 Agustus 2023 2 August 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date		31 Desember 2025 31 December 2025	18 Oktober 2024 18 October 2024	31 Agustus 2023 31 August 2023

*) Usulan pembagian dividen ditetapkan oleh Perusahaan dalam nominal Rupiah sebelum pelaksanaan RUPS, sehingga rasio pembayaran dividen *(dividend payout ratio)* dan besaran dividen per saham dibandingkan dengan laba bersih belum dapat dipastikan sebelumnya.
*) The proposed dividend distribution is determined by the Company in nominal Rupiah prior to the GMS; therefore, the dividend payout ratio and dividend per share relative to net profit cannot be determined in advance.

Aspek Perpajakan
Taxation Aspects

Pengelolaan Perpajakan

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang berdomisili di Indonesia bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menetapkan atau melakukan penyesuaian atas jumlah pajak terutang dalam jangka waktu hingga lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

PLN Nusa Daya memandang pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional sekaligus perwujudan tanggung jawab Perusahaan dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko perpajakan yang *prudent*. Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya telah melaksanakan strategi perpajakan yang ditetapkan dan disetujui oleh Manajemen, yang mencakup:

1. Penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini, perusahaan menjadi satu-satunya entitas di lingkungan Grup PLN yang telah memperoleh status PKP Berisiko Rendah, sehingga memiliki keunggulan dalam memperoleh percepatan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Status ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi arus kas perusahaan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perpajakan.

Taxation Management

In accordance with prevailing tax regulations in Indonesia, companies domiciled in the country are responsible for calculating and remitting their own tax obligations. The Directorate General of Taxes (DGT) has the authority to determine or adjust the amount of tax payable within a period of up to five years from the date the tax becomes due.

PLN Nusa Daya views tax as a tangible contribution to national development and as a manifestation of the Company's responsibility to support the creation of a healthy, transparent and equitable business environment. In fulfilling its tax obligations, the Company consistently upholds the principles of compliance with the prevailing laws and regulations, good governance, and prudent tax risk management. Throughout 2025, PLN Nusa Daya implemented the tax strategy established and approved by Management, which included the following:

1. The designation as a Low-Risk Taxable Entrepreneur (PKP) represents a strategic measure to accelerate the Value Added Tax (VAT/PPN) refund process. The Company is currently the only entity within PLN Group to have obtained Low-Risk PKP status, providing it with an advantage in obtaining accelerated refunds for VAT overpayments in accordance with the prevailing tax regulations. This status is expected to support the optimisation of the Company's cash flow and improve the efficiency of tax management.

2. Digitalisasi penerbitan Faktur Pajak dilakukan untuk mendukung percepatan proses penagihan atas pendapatan PLN Nusa Daya. Penerbitan Faktur Pajak yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat administrasi penagihan kepada pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan serta mendukung pencapaian target pendapatan.
3. Digitalisasi proses pengumpulan Bukti Potong dilakukan untuk meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu dokumentasi perpajakan dalam rangka mendukung optimalisasi kredit pajak PLN Nusa Daya. Inisiatif ini diharapkan dapat memastikan pengakuan kredit pajak secara maksimal pada akhir tahun 2026 dengan nilai estimasi mencapai Rp90 miliar, sekaligus memperkuat tata kelola dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Strategi ini dievaluasi secara berkala, khususnya apabila terdapat pembaruan regulasi atau perubahan kebijakan perpajakan nasional.

Aturan Model Pilar Dua *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)

Peraturan Pilar Dua telah disahkan atau secara substansial disahkan di yurisdiksi tempat entitas grup beroperasi. Peraturan tersebut mulai berlaku untuk tahun fiskal Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2025.

Entitas induk utama (UPE) dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua. UPE telah melakukan penilaian atas potensi eksposur Grup terhadap pajak penghasilan Pilar Dua. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Setoran Pajak

Setoran pajak ini mencerminkan kontribusi signifikan PLN Nusa Daya terhadap penerimaan negara, baik dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun jenis pajak lainnya yang relevan. Sepanjang periode pelaporan, PLN Nusa Daya tidak menerima bentuk dukungan finansial dari pemerintah, termasuk pembebasan atau pengurangan pajak, kredit pajak, subsidi, hibah investasi, pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, ataupun insentif fiskal lainnya. Realisasi pembayaran pajak oleh Perusahaan. Pada tahun 2025 mencapai Rp521,98 miliar, lebih tinggi 20,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp394,45 miliar.

2. The digitalisation of Tax Invoice issuance was carried out to support the acceleration of the billing process for PLN Nusa Daya's revenue. The timely issuance of Tax Invoices in accordance with tax regulations is one of the key factors in accelerating billing administration to customers, thereby improving the Company's cash flow and supporting the achievement of revenue targets.

3. The digitalisation of the withholding tax slip collection process was carried out to improve the accuracy, completeness and timeliness of tax documentation in order to support the optimisation of PLN Nusa Daya's tax credits. This initiative is expected to ensure the maximum recognition of tax credits by the end of 2026, with an estimated value of Rp90 billion, while also strengthening the Company's tax governance and compliance.

This strategy is reviewed periodically, particularly in response to regulatory updates or changes in national tax policies.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Pillar Two Model Rules

The Pillar Two rules have been enacted or substantively enacted in the jurisdictions in which the Group's entities operate. These rules apply to the Company's fiscal years ending after 31 December 2025.

The Company's ultimate parent entity (UPE) falls within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applies the exception for the recognition and disclosure of information related to deferred tax assets and liabilities associated with Pillar Two income taxes. The UPE has assessed the Group's potential exposure to Pillar Two income taxes. Based on this assessment, the effective tax rate in the jurisdiction in which the Company operates is above 15%. Accordingly, no top-up tax is required for the year ending 31 December 2025.

Tax Payments

These tax payments reflect PLN Nusa Daya's significant contribution to state revenue, both in the form of Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT/PPN), and other relevant taxes. Throughout the reporting period, PLN Nusa Daya did not receive any form of financial support from the government, including tax exemptions or reductions, tax credits, subsidies, investment grants, research and development funding, or other fiscal incentives. The Company's realised tax payments in 2025 reached Rp521.98 billion, an increase of 20.85% compared with Rp394.45 billion in 2024.

Tabel Setoran Pajak
Table of Tax Payments

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan 2024-2025 Change 2024-2025	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
PPh Pasal 21 | Income Tax Article 21	26.476	22.956	6.350	3.520	13,26
PPh Pasal 23 | Income Tax Article 23	23.475	14.800	8.114	8.675	36,10%
PPh Pasal 29 | Income Tax Article 29	70.290	54.156	51.427	16.134	22,9%
PPh Pasal 4 Ayat 2 | Income Tax Article 4 paragraph 2	2.544	870	1.765	779	192,41%
PPN Keluaran | Output VAT	399.200	301.675	245.345	97.525	34,31%
Jumlah | Total	**521.985**	**394.457**	**313.182**	**208.803**	**20,85%**

Kepatuhan Perpajakan

PLN Nusa Daya senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, baik dalam hal penyetoran maupun pelaporan pajak. Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan tidak pernah menerima putusan bersalah dari otoritas peradilan pajak tertinggi terkait dengan sengketa atau permasalahan perpajakan apa pun.

Tax Compliance

PLN Nusa Daya consistently fulfils its tax obligations in a timely manner, both in terms of tax payment and reporting. Over the past three years, the Company has not received any adverse rulings from the highest tax court authority in relation to any tax disputes or issues.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investment

Pada tahun 2025, PLN Nusa Daya melaksanakan sejumlah investasi pada aset tetap dan barang modal sebagai bagian dari program pengembangan dan penguatan kapabilitas operasional. Investasi tersebut dilakukan melalui pengadaan dari berbagai pemasok yang dipilih berdasarkan kebutuhan bisnis dan operasional Perusahaan. Langkah ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja layanan, memperkuat keandalan proses operasional, serta menciptakan efisiensi yang lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Seluruh realisasi investasi tersebut didanai menggunakan kas internal Perusahaan yang telah dialokasikan dalam anggaran tahunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan investasi, PLN Nusa Daya menggunakan denominasi mata uang Rupiah Penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia. Karena secara kas mayoritas transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

In 2025, PLN Nusa Daya carried out a number of investments in fixed assets and capital goods as part of its programme to develop and strengthen operational capabilities. These investments were made through procurement from various suppliers selected based on the Company's business and operational requirements. This initiative was aimed at supporting improved service performance, strengthening the reliability of operational processes, and creating more optimal efficiency in the implementation of business activities. All realised investments were funded using the Company's internal cash, which had been allocated in the annual budget in accordance with the established plan.

In carrying out its investments, PLN Nusa Daya used Rupiah-denominated transactions, in compliance with Bank Indonesia Regulation (PBI) enacted on 31 March 2015, which requires the use of Rupiah for transactions within the territory of the Republic of Indonesia. As the majority of the Company's cash transactions were conducted in Rupiah, the impact of foreign exchange fluctuations was reduced. Accordingly, the Company considers its foreign exchange risk to be minimal.

Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan

Perusahaan dan PLN (Persero) menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian untuk pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan di wilayah Indonesia Timur. Perjanjian-perjanjian ini berakhir di tahun 2025 sampai dengan 2028.

Operation and Maintenance Services Agreements

The Company and PLN (Persero) entered into several agreements for operation and maintenance services in the Eastern Indonesia region. These agreements are valid from 2025 to 2028.

Investasi Barang Modal

Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kapasitas operasional dan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pengalokasian investasi tersebut diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan efektivitas proses bisnis, serta mendorong peningkatan produktivitas di berbagai lini operasional. Melalui investasi yang terencana, Perusahaan berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing dalam menghadapi dinamika bisnis di masa mendatang. Adapun jenis dan nilai investasi barang modal yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

The Company's realised capital goods investments formed part of its strategic measures to strengthen operational capacity and support sustainable business development. The allocation of these investments was directed towards the provision of facilities and infrastructure capable of improving service quality, optimising the effectiveness of business processes, and driving productivity improvements across various operational lines. Through well-planned investments, the Company aims to create sustainable added value while strengthening its competitiveness in addressing future business dynamics. The types and values of capital goods investments realised throughout 2025 are presented as follows:

Tabel Investasi Pengembangan Usaha Tahun 2025
Table of Business Development Investment in 2025

Program Utama/ Proyek Flagship Programme/Project	**Status**	**Sumber Dana** Source of Financing	**Realisasi Disburse Tahun 2025** **2025 Disbursement Realisation (Rp juta** | million**)**
Pembangunan Kantor Pusat PLN di Kota Balikpapan Construction of PLN Headquarters in Balikpapan City	Lanjutan Ongoing	Internal	8.567
Pembangunan Fasilitas Penunjang Kantor Pusat Construction of Head Office Supporting Facilities	Lanjutan Ongoing	Internal	1.414
Peralatan kerja O&M Distribusi O&M Distribution Work Equipment	Murni New	Internal	17.200
Peralatan Serpo Iconnet Serpo Iconnet Equipment	Murni New	Internal	2.416
Peralatan kerja O&M Transmisi O&M Transmission Work Equipment	Murni New	Internal	11.716
Pengadaan Genset *Mobile* Procurement of Mobile Generator Sets	Murni New	Internal	20.924
Penyediaan Gedung Kantor Unit Pelaksana Sulawesi 1 Provision of Office Building for Sulawesi 1 Implementing Unit	Murni New	Internal	7.477
Penyediaan Gedung Kantor Unit Pelaksana Maluku Provision of Office Building for Maluku Implementing Unit	Murni New	Internal	9.547
Pengadaan Peralatan IT PCN Procurement of PCN IT Equipment	Murni New	Internal	1.236
Pengadaan Unit pendukung keandalan kelistrikan (UGB & UPS) Procurement of Electricity Reliability Support Units (UGB & UPS)	Murni New	Internal	22.983

Tabel Investasi Pengembangan Usaha Tahun 2025
Table of Business Development Investment in 2025

Program Utama/ Proyek Flagship Programme/Project	Status	Sumber Dana Source of Financing	Realisasi Disburse Tahun 2025 2025 Disbursement Realisation (Rp juta | million)
Penyediaan *Reserve Margin* bergerak Tahap I Kapasitas 10 MW Provision of Mobile Reserve Margin Phase I with a Capacity of 10 MW	Murni New	Internal	77.735
Jumlah **Total**			**181.216**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025

Comparison between the Company's 2025 Performance Target and Realisation

Target dan Realisasi Kinerja Operasional Tahun 2025

2025 Operational Performance Target and Realisation

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Operasional Tahun 2025
Table of 2025 Operational Performance Target and Realisation

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realisation	Pencapaian Achievement
Keandalan dan Efisiensi Operasi Pembangkit AMC: AMC Power Plant Operational Reliability and Efficiency:				
Equivalent Availability Factor (EAF)	%	90,06	85,25	94,66%
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	%	6,23	6,18	100,80%
Specific Fuel Consumption	Liter/kWh	0,3154	0,3171	99,46%
Response Time atas Gangguan Response Time to Disturbances	Menit Minutes	28,50	22,58	110,00%
Recovery Time atas Gangguan Recovery Time to Disturbances	Menit Minutes	42,75	40,50	105,26%
SAIDI	Menit/ Pelanggan Minutes/Customer	213,41	154,26	110%
SAIFI	Kali/ Pelanggan Times/Customer	3,75	2,65	110%
Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) Pekerjaan Sesuai Penugasan Achievement of Service Level Agreement (SLA) for Assigned Work	%	100	99,23	99,23%
Lost Time Injury Frequency Rate	Indeks Index	0,126	0,074	110,00%

Target dan Realisasi Kinerja Profitabilitas Tahun 2025

2025 Profitability Performance Target and Realisation

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Pendapatan dan Laba Tahun 2025
Table of 2025 Revenue and Profit Performance Target and Realisation

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realisation	Pencapaian Achievement
Pendapatan Revenue	4.041.419	4.323.648	106,98%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	3.489.850	3.725.236	106,74%
Laba Bersih Net Profit	247.969	214.605	86,55%

Pada tahun 2025, realisasi jumlah pendapatan adalah sebesar Rp4,32 triliun, yaitu tercapai 106,98% dibandingkan target RKAP sebesar Rp4,04 triliun.

Realisasi jumlah laba bersih pada tahun 2025 adalah sebesar Rp214,61 miliar, yaitu tercapai 86,55% dibandingkan target RKAP sebesar Rp247,97 miliar.

In 2025, the Company recorded realised revenue of Rp4.32 trillion, achieving 106.98% of the WP&B target of Rp4.04 trillion.

The Company's realised net profit in 2025 amounted to Rp214.61 billion, achieving 86.55% of the WP&B target of Rp247.97 billion.

Target dan Realisasi Kinerja Posisi Keuangan Tahun 2025

2025 Financial Position Performance Target and Realisation

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Posisi Keuangan Tahun 2025
Table of 2025 Financial Position Performance Target and Realisation

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realisation	Pencapaian Achievement
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.124.090	1.645.938	146,42%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	604.411	555.127	91,85%
Jumlah Aset **Total Assets**	**1.728.501**	**2.201.065**	**127,34%**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	546.153	1.247.090	228,34%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	311.766	136.092	43,65%
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**857.918**	**1.383.182**	**161,23%**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**870.582**	**817.883**	**93,95%**

Realisasi jumlah aset Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,20 triliun, yaitu tercapai 127,34% dibandingkan target RKAP sebesar Rp1,73 triliun.

Realisasi jumlah liabilitas Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,38 triliun, yaitu tercapai 161,23% dibandingkan target RKAP sebesar Rp857,92 miliar.

Realisasi jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp817,88 miliar, yaitu tercapai 93,95% dibandingkan target RKAP sebesar Rp870,58 miliar.

The Company's realised total assets in 2025 amounted to Rp2.20 trillion, achieving 127.34% of the WP&B target of Rp1.73 trillion.

The Company's realised total liabilities in 2025 amounted to Rp1.38 trillion, achieving 161.23% of the WP&B target of Rp857.92 billion.

The Company's realised total equity in 2025 amounted to Rp817.88 billion, achieving 93.95% of the WP&B target of Rp870.58 billion.

Target dan Realisasi Kinerja Struktur Modal Tahun 2025

2025 Capital Structure Performance Target and Realisation

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Struktur Modal Tahun 2025
Table of 2025 Capital Structure Performance Target and Realisation

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realisation	Pencapaian Achievement
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	546.153	1.247.090	228,34%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	311.766	136.092	43,65%
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**857.918**	**1.383.182**	**161,23%**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**870.582**	**817.883**	**93,95%**
Jumlah Aset **Total Assets**	**1.728.501**	**2.201.065**	**127,34%**

Key Performance Indicator

Key Performance Indicator

Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) disepakati oleh Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). KPI Perusahaan tahun 2025 ditetapkan dalam RUPS tanggal 31 Januari 2025 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025, serta Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* Tahun 2025.

Penilaian hasil pencapaian KPI selama tahun berjalan didasarkan pada Petunjuk Teknis KPI PT PLN Nusa Daya yang disahkan oleh Executive Vice President (EVP) Pengendalian Kinerja Korporat (PKK) pada tanggal 2 Mei 2025 yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0007.P/DIR/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi serta PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Pencapaian KPI tahun 2025 adalah sebesar 102,26 yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 101,90.

The Company's Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) were agreed upon by the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (WP&B). The Company's 2025 KPI was stipulated at the GMS held on 31 January 2025 concerning the Approval and Ratification of the 2025 Corporate Work Plan and Budget, as well as the Approval and Ratification of the 2025 Management Contract/Key Performance Indicator.

The evaluation of KPI achievement during the year was carried out based on the KPI Technical Guidelines of PT PLN Nusa Daya, approved by the Executive Vice President (EVP) of Corporate Performance Control on 2 May 2025. These guidelines refer to PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation Number 0007.P/DIR/2022 dated 23 February 2022 concerning Corporate Performance Management and Organisational Performance Assessment, as well as SOE Minister Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Guidelines for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises.

In 2025, the Company achieved a KPI score of 102.26, an increase from 101.90 in the previous year.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2025
Table of KPI Achievement in 2025

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realisation	Pencapaian* Achievement*	Nilai Value
A.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						
1	EBITDA	Rp miliar Rp billion	12	430,72	475,61	110,00%	13,20
2	*Operating Ratio*	%	10	91,12	90,85	100,30%	10,02
3	ROIC	%	7	28,72	30,14	104,94%	7,34
4	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit AMC Equivalent Availability Factor (EAF) of AMC Power Plants	%	4	90,06	85,25	94,66%	3,78
5	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Pembangkit AMC Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of AMC Power Plants	%	3	6,23	6,18	100,80%	3,02
6	*Specific Fuel Consumption* (SFC) Pembangkit AMC Specific Fuel Consumption (SFC) of AMC Power Plants	Liter/kWh	3	0,3154	0,3171	99,46%	2,98

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2025
Table of KPI Achievement in 2025

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realisation	Pencapaian* Achievement*	Nilai Value
7	*Response Time* atas Gangguan Response Time to Disturbances	Menit Minutes	3	28,50	22,58	110,00%	3,30
8	*Recovery Time* atas Gangguan Recovery Time for Disturbances	Menit Minutes	3	42,75	40,50	105,26%	3,15
9	*Advancing in Sustainable Development Goals* (SDGs)	%	12	100% sesuai ketentuan: • Level 3,0, • Skor 100%, • 100%, • 30 Kontrak, • 100% Sesuai Milestone, • 2 PKS, • Skor 100%. 100% in accordance with the following: • Level 3.0, • Score 100%, • 100%, • 30 contracts, • 100% in accordance with Milestones, • 2 cooperation agreements, • Score 100%	99,65% sesuai ketentuan: • Level 2,58, • Skor 104,67%, • 100%, • 35 Kontrak, • 94,63% Sesuai Milestone, • 2 PKS, • Skor 102,26%. 99.65% in accordance with the following: • Level 2.58, • Score 104.67%, • 100%, • 35 contracts, • 94.63% in accordance with Milestones, • 2 cooperation agreements, • Score 102.26%	99,65%	11,96
10	Umur Piutang Usaha Ageing of Trade Receivables	Hari Days	3	61,91	71,26	84,90%	2,54
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation						
1	Pendapatan dari luar PLN Group (*beyond* kWh) Revenue from outside PLN Group (beyond kWh)	Rp miliar Rp billion	6	37,06	48,13	110%	6,60
2	Sinergi antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis Synergy among Subholdings, Other Subsidiaries and Pusharlis	Rp miliar Rp billion	4	309,92	412,17	110%	4,40
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership						
1	SAIDI sesuai kewenangannya SAIDI within Its Authority	Menit/ Pelanggan Minutes/ Customer	5	213,41	154,26	110%	5,50
2	SAIFI sesuai kewenangannya SAIFI within Its Authority	Kali/ Pelanggan Times/ Customer	5	3,75	2,65	110%	5,50
D.	Peningkatan Investasi Investment Enhancement						
1	Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) Pekerjaan Sesuai Penugasan Achievement of Service Level Agreement (SLA) for Assigned Work	%	6	100	99,23	99,23%	5,95

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2025
Table of KPI Achievement in 2025

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realisation	Pencapaian* Achievement*	Nilai Value
2	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 Control over the Use of Investment Budget in Accordance with the 2025 WP&B	%	4	95 - 100	99,45	108,90%	4,35
E.	**Pengembangan Talenta** Talent Development						
1	*Talent Diversity (Millenials and Women)*	%	3	100% sesuai: • Millenial: 18%, • Women: 24% 100% fulfilled: • Millenial: 18%, • Women: 24%	107,08% sesuai: • Millenial: 75%, • Women: 25% 107.08% fulfilled: • 1) Millennial: 75%, • 2) Women: 25%	107,08%	3,21
2	*Human Capital Readiness* (HCR) & *Organizational Capital Readiness* (OCR) dan Produktivitas Pegawai Human Capital Readiness (HCR) & Organisational Capital Readiness (OCR) and Employee Productivity	%	3	100%	102,57%	102,57%	3,07
	Lost Time Injury Frequency Rate	Indeks (per 1 juta jam kerja) Index per 1 million working hours	4	0,126	0,074	110,00%	4,40
F.	**Kepatuhan** Compliance						
1	*Compliance (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)* Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)	Nilai Pengurang Deduction Value	Max-10		-2,01		-2,01
	Jumlah **Total**		**100**				**102,26**

Keterangan | Notes:
* Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%.
* For achievement ≥ 110.00%, write 110.00%.

Prospek Usaha

Business Outlook

Prospek Perekonomian ke Depan

Memasuki tahun 2026, prospek perekonomian global diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari meningkatnya ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, serta tingginya volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi dunia diproyeksikan tetap bertumbuh dengan dukungan perkembangan teknologi, khususnya investasi pada *Artificial Intelligence* (AI), kondisi pasar tenaga kerja yang relatif solid, serta implementasi kebijakan ekonomi yang lebih adaptif di berbagai negara.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1% pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2027. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, tingkat pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata historis sebelum pandemi. Prospek tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian geopolitik, tingginya harga komoditas energi, serta kondisi pembiayaan global yang masih relatif ketat.

Di sisi lain, inflasi global diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2026 sebagai dampak kenaikan harga energi dan sejumlah komoditas strategis, sebelum kembali menunjukkan tren penurunan pada tahun berikutnya. Selain itu, berbagai risiko masih membayangi prospek perekonomian dunia, antara lain gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga energi, meningkatnya tensi geopolitik, serta perlambatan perdagangan internasional. Namun demikian, percepatan transformasi digital dan adopsi teknologi AI diyakini akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor.

Sementara itu, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap menunjukkan resiliensi di tengah dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5%, yang didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta akselerasi program hilirisasi industri dan transformasi digital.

Prospek positif tersebut juga didukung oleh besarnya pasar domestik, stabilitas sektor keuangan, inflasi yang tetap terjaga, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang responsif terhadap perkembangan ekonomi. Kendati demikian, sejumlah risiko eksternal tetap perlu diantisipasi, seperti meningkatnya ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi dan komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berpotensi

Future Economic Outlook

Entering 2026, the global economic outlook is expected to remain confronted by various challenges arising from heightened geopolitical uncertainty, inflationary pressures and high volatility in international financial markets. Nevertheless, global economic activity is projected to continue growing, supported by technological developments, particularly investment in Artificial Intelligence (AI), relatively solid labour market conditions, and the implementation of more adaptive economic policies across various countries.

The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth to reach 3.1% in 2026 and increase to 3.2% in 2027. Although this reflects an improving trend, these growth rates remain below the pre-pandemic historical average. This outlook is influenced by persistent geopolitical uncertainty, elevated energy and commodity prices, and global financing conditions that remain relatively tight.

Meanwhile, global inflation is projected to increase in 2026, driven by rising energy prices and the prices of several strategic commodities, before resuming a downward trend in the following year. Various risks also continue to weigh on the global economic outlook, including disruptions to global supply chains, fluctuations in energy prices, escalating geopolitical tensions, and a slowdown in international trade. Nevertheless, the acceleration of digital transformation and the adoption of AI technology are expected to serve as key drivers of economic growth by improving productivity, efficiency and innovation across various sectors.

The Indonesian economy, meanwhile, is projected to remain resilient amid global economic dynamics. National economic growth in 2026 is estimated to remain at around 5%, supported by robust domestic consumption, higher investment, continued infrastructure development, and the acceleration of industrial downstreaming programmes and digital transformation.

These positive prospects are further supported by the size of the domestic market, financial sector stability, well-managed inflation, and synergy between fiscal and monetary policies that remain responsive to economic developments. Nevertheless, a number of external risks must still be anticipated, including heightened geopolitical uncertainty, volatility in energy and commodity prices, and a slowdown in global economic growth, which could

memengaruhi kinerja ekspor maupun arus investasi. Oleh karena itu, penguatan daya saing nasional, peningkatan produktivitas, dan percepatan transformasi ekonomi menjadi agenda strategis untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Sumber: *World Economic Outlook (WEO),* International Monetary Fund (IMF), April 2026.

Prospek Industri Ketenagalistrikan ke Depan

Prospek industri ketenagalistrikan Indonesia pada tahun-tahun mendatang diperkirakan tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik dan komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi menuju sistem energi yang rendah karbon. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan sektor energi, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan terus diarahkan untuk menciptakan pasokan listrik yang andal, efisien, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai pedoman utama dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi pada energi bersih.

Pengembangan kapasitas pembangkitan diarahkan untuk meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk optimalisasi pemanfaatan *Variable Renewable Energy* (VRE) sebagai bagian dari bauran energi nasional. Di samping itu, peningkatan keandalan sistem kelistrikan terus dilakukan melalui pemenuhan standar *reserve margin* (RM) dan kriteria N-1, sehingga pasokan listrik dapat terjaga secara optimal sekaligus mendukung efisiensi operasional sistem.

Di sisi pemerataan akses energi, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) menargetkan tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2025–2029. Sejalan dengan target tersebut, penjualan listrik nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,29% per tahun hingga tahun 2029. Untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan tersebut, RUPTL menetapkan rencana pembangunan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 27 GW, jaringan transmisi sepanjang 32,5 ribu kilometer sirkuit (kms), serta gardu induk berkapasitas 70 ribu MVA pada lima tahun pertama periode perencanaan.

potentially affect export performance and investment flows. Therefore, strengthening national competitiveness, increasing productivity and accelerating economic transformation remain strategic priorities to ensure the long-term sustainability of Indonesia's economic growth.

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2026.

Future Outlook for the Electricity Industry

The outlook for Indonesia's electricity industry in the coming years is expected to remain positive, in line with increasing electricity demand and the Government's commitment to accelerating the transition towards a low-carbon energy system. Amid global economic dynamics and challenges in the energy sector, electricity infrastructure development continues to be directed towards establishing a reliable, efficient and sustainable electricity supply capable of supporting national economic growth.

As the primary guideline for electricity sector development, PT PLN (Persero) has established the 2025–2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). This document serves as a strategic reference for planning the development of the national electricity system, while supporting the achievement of the Net Zero Emissions (NZE) target through the development of integrated infrastructure focused on clean energy.

The development of power plant capacity is directed towards increasing the share of New and Renewable Energy (NRE), including the optimisation of Variable Renewable Energy (VRE) utilisation as part of the national energy mix. In addition, efforts to enhance electricity system reliability continue to be carried out through compliance with reserve margin (RM) standards and N-1 criteria, ensuring that electricity supply is maintained optimally while supporting system operational efficiency.

In terms of equitable access to energy, the Government, along with PT PLN (Persero), aims to achieve a 100% electrification ratio across all regions of Indonesia during the 2025–2029 period. In line with this target, national electricity sales are projected to grow by an average of 5.29% per year until 2029. To accommodate this increase in demand, the RUPTL sets out plans to develop an additional 27 GW of generation capacity, 32,500 circuit kilometres (kms) of transmission lines, and substations with a capacity of 70,000 MVA during the first five years of the planning period.

Seluruh rencana pengembangan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *demand driven*, yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik agar investasi yang dilakukan lebih efektif, efisien, dan mampu meminimalkan potensi kelebihan kapasitas. Dengan arah kebijakan tersebut, industri ketenagalistrikan nasional diharapkan semakin siap mendukung ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mempercepat terwujudnya sistem energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034

All of these development plans are being implemented using a demand-driven approach, whereby electricity infrastructure development is aligned with projected growth in electricity demand to ensure that investments are more effective and efficient, while minimising the potential for overcapacity. With this policy direction, the national electricity sector is expected to be better prepared to support energy security, enhance economic competitiveness, and accelerate the realisation of a sustainable energy system in Indonesia.

Source: Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2025–2034.

Kerangka Strategi Tahun 2026

Sebagai arah pengembangan Perusahaan pada tahun 2026, PLN ND menetapkan empat aspirasi utama yang menjadi landasan pencapaian sasaran strategis, yaitu:

Strategic Framework for 2026

To guide the Company's development in 2026, PLN Nusa Daya has established the following four key aspirations that serve as the foundation for achieving its strategic objectives:



Inisiatif Strategi Tahun 2026

Dari aspirasi tersebut, PLN Nusa Daya telah menetapkan program strategis tahun 2026 sebagai berikut:

Operasional & Pengembangan Usaha
1. Pelaksanaan Novasi AMC dari MCTN;
2. Penambahan lingkup layanan pada *core* bisnis inti;
3. Hibridisasi (PLTS+BESS), Utilisasi BESS pada PLTD *isolated, Hydrogen Power Generation* dan pengembangan pembangkit biogas skala kecil;
4. Pengayaan layanan OM Transmisi;
5. Akselerasi *Beyond* kWH;
6. Pengembangan layanan pelanggan.

Perbaikan Kinerja
1. Digitalisasi dan standardisasi proses bisnis;
2. Implementasi *operational excellence wave* 2 di semua lini bisnis;
3. Program peningkatan *revenue protection*;
4. Optimalisasi restitusi pajak;

Strategic Initiatives for 2026

Based on these aspirations, PLN Nusa Daya has established the following strategic programmes for 2026:

Operations and Business Development
1. Implementation of AMC Novation from MCTN;
2. Expansion of service scope within the core business;
3. Hybridisation (Solar PV + BESS), Utilisation of BESS in isolated DPP, Hydrogen Power Generation, and the development of small-scale biogas power plants;
4. Enhancement of Transmission O&M services;
5. Acceleration of the Beyond kWh;
6. Development of customer services.

Performance Improvement
1. Digitalisation and standardisation of business processes;
2. Implementation of operational excellence wave 2 across all business lines;
3. Enhancement of the revenue protection programme;
4. Optimisation of tax refunds;

5. Desain dan pilot skema *reward* tenaga kerja;
6. Peningkatan kapabilitas dan program *upskilling* tenaga kerja.

Perbaikan Kinerja ESG

1. *Environmental*: implementasi tata kelola lingkungan, program hibridisasi dan dukungan EV *ecosystem*;
2. *Social*: *optimizing community development*; optimalisasi tata kelola ESG; pengembangan talenta milenial dan perempuan;
3. *Governance*: implementasi tata kelola K3, *quality* management, optimizing roadmap *risk improvement* dan optimalisasi GCG & GRC.

Flagship Programs

Flagship programs adalah program yang berdampak signifikan (*high impact initiatives*) terhadap pencapaian visi, *strategic goal*, dan/atau yang memerlukan sumber daya signifikan, sebagaimana beberapa program berikut:

5. Design and piloting of an employee reward scheme;
6. Enhancement of workforce capabilities and upskilling programmes.

ESG Performance Improvement

1. Environmental: implementation of environmental governance, hybridisation programmes, and support for the EV ecosystem;
2. Social: optimisation of community development, optimisation of ESG governance, and development of millennial and female talent;
3. Governance: implementation of OHS governance, quality management, optimisation of the risk improvement roadmap, and optimisation of GCG and GRC.

Flagship Programmes

Flagship Programmes are programmes that deliver significant impact (high-impact initiatives) in supporting the achievement of the Company's vision and strategic goals, and/or require substantial resources, as outlined below:



Target Kinerja Perusahaan Tahun 2026

Company Performance Target for 2026

Target kinerja Perusahaan tahun 2026 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Penetapan kinerja operasional dan keuangan dalam RKAP tahun 2026 didasarkan pada Surat Direktur Keuangan Nomor 51328/KEU.00.02/F01070000/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penyampaian Update Perubahan Asumsi RAPBN 2026 untuk RKAP 2026 – 2027 bahwa pertumbuhan penjualan sebesar 5,4%, kurs terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar Rp16.500/USD, serta didasarkan pada Permenanker No. 16 tahun 2024 bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) adalah 6,5%.

The Company's performance targets for 2026 have been established in the 2026 Corporate Work Plan and Budget (WP&B). The operational and financial performance targets outlined in the 2026 WP&B are based on Letter of the Director of Finance No. 51328/KEU.00.02/F01070000/2025 dated 26 September 2025 concerning the Submission of Updates to Changes in the 2026 Draft State Budget Assumptions for the 2026-2027 WP&B, which states sales growth of 5.4% and an exchange rate of Rp16,500/USD. In addition, the targets also take into account Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2024, which stipulates a 6.5% increase in the Regency/ City Minimum Wage.

Target Kinerja Operasional Tahun 2026

2026 Operational Performance Target

Tabel Target Kinerja Operasional Tahun 2026
Table of 2026 Operational Performance Target

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2026 2026 Target
Keandalan dan Efisiensi Operasi Pembangkit AMC: AMC Power Plant Operational Reliability and Efficiency:		
• *Equivalent Availability Factor* (EAF)	%	90,23
• *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR)	%	11,47
• *Specific Fuel Consumption*	Liter/kWh	0,3157
Response Time atas Gangguan Response Time to Disturbances	Menit Minutes	30
Response Time atas Gangguan SPKLU Response Time to SPKLU Disturbances	Menit Minutes	45
Recovery Time atas Gangguan SPKLU Recovery Time for SPKLU Disturbances	Menit Minutes	180
Pengembangan Layanan Kontruksi dan Pemeliharaan Instalasi Pelanggan TT/ TM Development of Construction and Maintenance Services for HV/MV Customer Installations	Kontrak Contracts	12
Implementasi Digitalisasi Pemeliharaan Aset Transmisi Implementation of Digitalisation of Transmission Asset Maintenance	%	100
Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) Pekerjaan Sesuai Penugasan Achievement of Service Level Agreement (SLA) for Assigned Work	%	100
Lost Time Injury Frequency Rate	Indeks | Index	0,101

Target Kinerja Profitabilitas Tahun 2026

2026 Profitability Performance Target

Tabel Target Kinerja Pendapatan dan Laba Tahun 2026
Table of 2026 Revenue and Profit Performance Targets

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	Target 2026 2026 Target
Pendapatan Revenue	6.129.085
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	5.244.654
Laba Bersih Net Profit	379.280

Target Kinerja Posisi Keuangan Tahun 2026

2026 Financial Position Performance Target

Tabel Target Posisi Keuangan Tahun 2026
Table of 2026 Financial Position Target

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	Target 2026 2026 Target
Jumlah Aset Lancar | Total Current Assets	1.773.540
Jumlah Aset Tidak Lancar | Total Non-Current Assets	895.130
Jumlah Aset | Total Assets	**2.668.670**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | Total Current Liabilities	1.146.495
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | Total Non-Current Liabilities	332.217
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	**1.478.712**
Jumlah Ekuitas | Total Equity	**1.189.958**

Target Kinerja Struktur Modal Tahun 2026

2026 Capital Structure Performance Target

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Struktur Modal Tahun 2026
Table of 2026 Capital Structure Performance Target

Uraian Description	Target 2026 2026 Target	Komposisi Composition
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | Total Current Liabilities	1.146.495	42,96%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | Total Non-Current Liabilities	332.217	12,45%
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	**1.478.712**	**55,41%**
Jumlah Ekuitas | Total Equity	**1.189.958**	**44,59%**
Jumlah Aset | Total Assets	**2.668.670**	**100,00%**

Target Kebijakan Dividen Tahun 2026

Terkait kebijakan pembagian dividen untuk tahun buku 2026, Perusahaan telah memuat pembagian dividen dalam RKAP Tahun 2026 sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan pengelolaan modal. Meskipun demikian, penetapan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham tetap akan ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kebutuhan pengembangan usaha, kondisi arus kas Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2026 Dividend Policy Target

With regard to the dividend distribution policy for the 2026 fiscal year, the Company has included dividend distribution in the 2026 WP&B as part of its financial planning and capital management. Nevertheless, the amount of dividend to be distributed to shareholders will continue to be determined through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism by taking into account the Company's financial performance, business development needs, cash flow condition, and the prevailing laws and regulations.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Di sepanjang tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dalam Laporan Keuangan Audit tahun buku 2025 telah diungkapkan kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi, dan penyusunannya telah disesuaikan dengan standar PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Seluruh transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang wajar. Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada Catatan 19.

Tujuan dan Alasan Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Sifat Hubungan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat hubungan berelasi dalam transaksi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PLN merupakan entitas induk langsung Perusahaan.
2. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
3. Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Ketentuan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest

Throughout 2025, there were no transactions involving conflicts of interest.

Transactions with Affiliated or Related Parties

The Audited Financial Statements for the fiscal year 2025 disclosed the fairness of all transactions conducted by the Company with related parties, and were prepared in accordance with SFAS 224 concerning "Related Party Disclosures". All transactions with related parties were conducted on fair terms and conditions. More detailed information on related party transactions has also been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 19.

Purpose and Reasons for Related Party Transactions

These transactions are carried out to generate operating revenue and are conducted on a routine, recurring and/or continuous basis.

Nature of Transaction Relationships with Related Parties

The nature of related relationships in the transactions carried out by the Company is as follows:

1. PLN is the immediate parent entity of the Company.
2. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and other SOEs.
3. Commissioner and Board of Directors are the Company's key management personnel.

Terms of Transactions with Related Parties

Transactions with related parties are conducted based on terms agreed by both parties, which may differ from those applied to transactions with unrelated parties.

Nama, Sifat Hubungan, Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

Daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

The list of related parties with which the Company has transactions:

Tabel Nama, Sifat Hubungan, Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table of Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	Entitas induk Perusahaan. Parent entity of the Company.	Piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, piutang non-usaha, utang pihak berelasi, pendapatan, dan denda penyediaan tenaga listrik. Trade receivables, finance lease receivable, receivables from related parties, payable to related parties, revenue and penalty on supply electricity.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)	Entitas berelasi dengan Pemerintah. Government-related entity.	Penempatan kas dan setara kas. Placement of cash and cash equivalents.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Entitas berelasi dengan Pemerintah. Government-related entity.	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan bank garansi. Placement of cash and cash equivalents placement of bank guarantee.
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI)	Entitas berelasi dengan Pemerintah. Government-related entity.	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan deposito berjangka. Placement of cash and cash equivalents and placement of time deposits.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	Entitas berelasi dengan Pemerintah. Government-related entity.	Penempatan kas dan setara kas. Placement of cash and cash equivalents.
PT PLN Energi Gas (PLNEG)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha dan pendapatan. Trade receivables and revenue.
PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha, utang pihak berelasi dan pendapatan. Trade receivables, payable to related parties, and revenue.
PT PLN Indonesia Power	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha dan pendapatan. Trade receivables and revenue.
PT PLN Nusantara Power (PLN NP)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha dan pendapatan. Trade receivables and revenue.
PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PLN MCTN)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha dan pendapatan. Trade receivables and revenue.
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Piutang usaha dan pendapatan. Trade receivables and revenue.
PT PLN Electricity Services (PLN ES)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan. Entity under common control.	Utang pihak berelasi, piutang usaha, dan pendapatan. Payable to related parties trade receivables and revenue.

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Berikut disajikan tabel rincian nilai transaksi pihak berelasi:

Value of Transactions with Related Parties

The following table presents details of the value of transactions with related parties:

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table of Value of Transactions with Related Parties

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024
Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalents		
Kas di bank | Cash in Banks		
BNI	150.583	36.487
BRI	14.852	34.793
Mandiri	41.351	10.641
BSI	31	695
Subjumlah | Subtotal	206.817	82.616
Deposito berjangka | Time deposits		
BSI	25.000	50.000
Jumlah | Total	231.817	132.616
Piutang Usaha | Trade Receivables		
PLN	911.758	652.508
PLN NP	68.536	25.450
PLN IP	10.425	6.465
ICON+	3.960	5.235
PLN Enjiniring	1.710	-
PLNEG	1.223	574
PLN ES	-	460
Jumlah | Total	997.612	690.692
Piutang Sewa Pembiayaan | Finance Lease Receivables		
PLN	114.441	-
Utang lain-lain | Other Payables		
PLN	549.666	199.248
ICON+	5.896	2.685
PLN ES	10	10
Jumlah | Total	555.572	201.943
Pendapatan | Revenue		
PLN	3.862.903	2.996.513
PLN NP	310.265	182.202
PLN IP	69.135	46.127
ICON+	21.832	17.420
PLNEG	5.958	2.968
PLN Enjiniring	5.429	-
PT PLN MCTN	-	862
Jumlah | Total	4.275.522	3.246.092
Denda penyediaan tenaga kerja | Penalty on Manpower Services		
PLN	63.036	33.908

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle.*

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi

Perusahaan menerapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO), sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis. Kebijakan ini mencakup mekanisme *review* yang melibatkan evaluasi berkala terhadap proses transaksi, Audit Internal yang independen, serta penerapan prosedur verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan yang berlaku dan meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memastikan Kewajaran Transaksi

Direksi memastikan transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Adapun Dewan Komisaris dan Komite Audit telah melakukan *review* untuk memastikan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi tetap dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh kegiatan transaksi Perusahaan telah melalui prosedur yang memadai dan telah sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*). Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek kehati-hatian pada seluruh transaksi yang dilakukan, khususnya dengan memenuhi PSAK 224: terkait Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku

Perusahaan tidak menghadapi kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Fairness of Related Party Transactions

The fairness of all transactions conducted with related parties, whether carried out under terms and conditions similar to those with third parties or otherwise, has been disclosed in the financial statements in accordance with SFAS 224: Related Party Disclosures. In addition, the fairness assessment of related party transactions is based on the arm's length principle.

Company Policy on the Transaction Review Mechanism

The Company implements a policy to apply an internal control system using the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework, as part of its efforts to enhance accountability in every decision, as well as the transparency and accuracy of business transaction records. This policy includes a review mechanism involving periodic evaluations of transaction processes, independent internal audits, and the implementation of verification procedures to ensure compliance with applicable financial standards and to minimise the risk of errors or irregularities.

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Ensuring Transaction Fairness

The Board of Directors ensures that affiliated transactions have undergone adequate procedures in accordance with generally accepted business practices. The Board of Commissioners and the Audit Committee have conducted reviews to ensure that material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with related parties continue to be carried out in accordance with generally accepted business practices, fulfil the arm's length principle, and comply with the prevailing laws and regulations.

Fulfilment of Related Rules and Regulations

All Company transactions have undergone adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. The Company consistently observes prudence in all transactions conducted, particularly by complying with SFAS 224 concerning Related Party Disclosures.

Compliance with Applicable Regulations

The Company did not face any cases of non-compliance with laws, rules or regulations related to significant or material related party transactions, particularly over the past three years.

Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Information on Material Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Peraturan dan Kebijakan Terkait

Seluruh rencana dan pelaksanaan aksi korporasi yang mencakup investasi, pengembangan usaha, divestasi, akuisisi, maupun restrukturisasi di PLN Nusa Daya dilakukan berdasarkan kerangka tata kelola dan regulasi yang berlaku. Dalam proses tersebut, Perusahaan menjadikan Anggaran Dasar sebagai acuan utama untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis telah sesuai dengan kewenangan, tujuan, dan kepentingan jangka panjang Perusahaan.

Sebagai entitas yang tergabung dalam PLN Group, PLN Nusa Daya juga memperhatikan berbagai kebijakan korporat yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), termasuk Surat Direktur Perencanaan Bisnis Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) No. 59051/ORG.00.02/F01010000/2024 tanggal 14 Oktober 2024 mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan *Unrestricted Subsidiary* PLN Group. Selain itu, pengelolaan kebutuhan pendanaan yang mendukung pelaksanaan aksi korporasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Kebijakan Pendanaan Melalui Pinjaman.

Realisasi Tahun 2025

Informasi Material terkait Investasi

Di sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya tidak melakukan investasi berupa pembelian atau penambahan modal pada entitas anak, perusahaan asosiasi, serta ventura bersama.

Informasi Material terkait Ekspansi

Pada akhir tahun 2025, tidak terjadi ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan.

Informasi Material terkait Divestasi

Pada tahun 2025, tidak terjadi divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan.

Informasi Material terkait Akuisisi

Pada tahun 2025, tidak terjadi akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan.

Relevant Regulations and Policies

All planning and implementation of corporate actions, including investments, business development, divestments, acquisitions, and restructuring at PLN Nusa Daya, are carried out in accordance with the applicable governance framework and regulations. In this process, the Company refers to its Articles of Association as the primary reference to ensure that every strategic decision is aligned with the Company's authority, objectives, and long-term interests.

As an entity within the PLN Group, PLN Nusa Daya also complies with various corporate policies issued by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), including the Letter of the Director of Corporate Business Planning and Business Development of PT PLN (Persero) No. 59051/ORG.00.02/F01010000/2024 dated 14 October 2024 regarding the Guidelines for the Establishment and Management of Unrestricted Subsidiaries of the PLN Group. In addition, the management of financing requirements to support the implementation of corporate actions is carried out in accordance with PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0002.P/DIR/2018 dated 22 January 2018 concerning Financing Policy Through Borrowing.

2025 Realisation

Material Information related to Investment

Throughout 2025, PLN Nusa Daya did not make any investments in the form of acquisitions or capital injections into subsidiaries, associates or joint ventures.

Material Information related to Expansion

As at the end of 2025, the Company did not undertake any expansion activities. Therefore, there is no information to disclose regarding the purpose, value or amount of transactions, sources of financing, or proceeds from such activities.

Material Information related to Divestment

As of 2025, the Company did not undertake any divestment activities. Therefore, there is no information to disclose regarding the purpose, value or amount of transactions, sources of financing, or proceeds from such activities.

Material Information related to Acquisition

Throughout 2025, the Company did not undertake any acquisition activities. Therefore, there is no information to disclose regarding the purpose, value or amount of transactions, sources of financing, or proceeds from such activities.

Informasi Material terkait Restrukturisasi Hutang/ Modal

Pada tahun 2025, tidak terjadi restrukturisasi hutang/ modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan.

Material Information related to Debt/Capital Restructuring

Throughout 2025, the Company did not undertake any debt/capital restructuring activities. Therefore, there is no information to disclose regarding the purpose, value or amount of transactions, sources of financing, or proceeds from such activities.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Reporting Date

Pada rentang per 31 Desember 2025 hingga Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PT PLN Nusa Daya tahun 2025 dipublikasikan, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi.

During the period from 31 December 2025 until the publication of PT PLN Nusa Daya's 2025 Consolidated Audited Financial Statements, no material information or facts occurred.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Unusual Events

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan.

Throughout 2025, there were no extraordinary and unusual events that significantly affected the Company's financial condition.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Actual Use of Proceeds from Public Offering

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Nusa Daya bukan merupakan perusahaan terbuka (emiten) yaitu tidak melakukan penawaran umum perdana saham ataupun obligasi. Sehingga tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As at 31 December 2025, PLN Nusa Daya was not a publicly listed company or issuer and had not conducted an initial public offering of shares or bonds. Therefore, there is no further information to disclose regarding the actual use of proceeds from a public offering.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS).

Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada tanggal 1 Januari 2025

Penerapan dari standar baru dan amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

1. PSAK 117 "Kontrak Asuransi";
2. Amandemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan keterukaran.

Standar Akuntansi yang Belum Berlaku Efektif pada tanggal 1 Januari 2025

Standar akuntansi baru dan revisi tertentu yang telah diterbitkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2026

1. Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
2. Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam;
3. Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Efektif 1 Januari 2027

1. PSAK No. 119 dan Amandemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan"

2. PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"
   a. PSAK No. 118 menggantikan PSAK No. 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen ("UKTM"), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan Grup dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK No. 118.

Accounting Standards Effective as at 1 January 2025

The adoption of the following new standards and amendments to accounting standards which are effective from 1 January 2025 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current year:

1. SFAS 117 "Insurance Contracts";
2. Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability"

Accounting Standards Not Yet Effective as at 1 January 2025

Certain new and amended accounting standards which have been published that are not mandatory for the year beginning 1 January 2025 and have not been early adopted by the Group, are as follows:

Effective 1 January 2026

1. Amendments to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments;
2. Amendments to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity;
3. Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control".

Effective 1 January 2027

1. SFAS No. 119 and amendments to SFAS No. 119 "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures"
2. SFAS No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"
   a. SFAS No. 118 supersedes SFAS No. 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures ("MPMs"), allowing investors to understand management's view of the Group's financial performance and how these measures compare to those defined in SFAS No. 118.

b. Meskipun PSAK No. 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.
c. Manajemen saat ini sedang menilai dampak penerapan standar baru dan amandemen ini pada laporan keuangan Grup. Dari penilaian awal secara garis besar yang dilakukan, standar yang dapat berdampak signifikan terhadap Grup adalah PSAK No. 118, dengan dampak potensial yang teridentifikasi sebagai berikut:
   - Meskipun adopsi PSAK No. 118 tidak akan berpengaruh pada laba bersih Grup, Grup mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi.
   - Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama mungkin akan berubah akibat penerapan konsep "ringkasan terstruktur yang berguna" dan prinsip yang ditingkatkan mengenai agregasi dan disagregasi.
   - Grup tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam informasi yang saat ini diungkapkan dalam catatan, karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi material tetap tidak berubah; namun, cara pengelompokan informasi tersebut mungkin berubah sebagai akibat dari prinsip agregasi/disagregasi. Selain itu, akan ada pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan untuk:
     - UKTM;
     - rincian jenis beban untuk pos-pos yang disajikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi laporan laba rugi – rincian ini hanya diperlukan untuk beberapa jenis beban tertentu; dan
     - untuk periode tahunan pertama penerapan PSAK No. 118, rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara angka yang telah disajikan ulang berdasarkan penerapan PSAK No. 118 dan angka yang sebelumnya disajikan berdasarkan PSAK No. 201.
   - Dari perspektif laporan arus kas, akan ada perubahan cara penyajian bunga diterima dan bunga dibayar. Bunga dibayar akan disajikan sebagai arus kas pendanaan dan bunga diterima akan disajikan sebagai arus kas investasi, yang merupakan perubahan dari penyajian saat ini sebagai bagian dari arus kas operasi.

b. Even though SFAS No. 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.
c. Management is currently assessing the impacts of applying the new and amended standards on the Group's financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the standard which may have significant impact to the Group is SFAS No. 118, with the following potential impacts identified:
   - Although the adoption of SFAS No. 118 will have no impact on the Groups net profit, the Group expects that Grouping items of income and expenses in the statement of profit or loss into the new categories will impact how operating profit is calculated and reported.
   - The line items presented on the primary financial statements might change as a result of the application of the concept of 'useful structured summary' and the enhanced principles on aggregation and disaggregation.
   - The Group does not expect there to be a significant change in the information that is currently disclosed in the notes because the requirement to disclose material information remains unchanged; however, the way in which the information is grouped might change because of the aggregation/disaggregation principles. In addition, there will be significant new disclosures required for:
     - MPM;
     - a break-down of the nature of expenses for line items presented by function in the operating category of the statement of profit or loss – this break-down is only required for certain nature expenses; and
     - for the first annual period of application of SFAS No. 118, a reconciliation for each line item in the statement of profit or loss between the restated amounts presented by applying SFAS No. 118 and the amounts previously presented applying SFAS No. 201.
   - From a cash flow statement perspective, there will be changes to how interest received and interest paid are presented. Interest paid will be presented as financing cash flows and interest received as investing cash flows, which is a change from current presentation as part of operating cash flows.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Legislation and Their Impact on the Company

PLN Nusa Daya senantiasa memantau perkembangan regulasi yang relevan guna memastikan kepatuhan serta kesiapan implementasinya. Pada tahun 2025, terdapat beberapa perubahan regulasi yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan, sebagai berikut:

PLN Nusa Daya consistently monitors developments in relevant regulations to ensure compliance and implementation readiness. In 2025, several regulatory changes had a significant impact on the Company, as follows:

Tabel Perubahan Peraturan dan Peraturan Baru yang Berlaku di Tahun 2025
Table of Regulatory Changes and New Regulations Effective in 2025

No	Peraturan Regulation	Dampak terhadap Perusahaan dan/atau Tindak Lanjut yang Dilakukan Impact on the Company and/or Follow-up Actions Taken
1.	UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	**Dampak:** • Sebagai anak perusahaan PLN, arah pengelolaan perusahaan mengikuti kebijakan *holding* BUMN dan transformasi tata kelola. Potensi perubahan mekanisme pengawasan, investasi, pengelolaan aset, dan hubungan dengan induk perusahaan. **Tindak Lanjut:** • Review seluruh kebijakan internal yang mengacu pada UU BUMN lama. • Menyesuaikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG). • Mengikuti kebijakan baru dari PLN (Persero) sebagai *holding*. **Impact:** • As a subsidiary of PLN, the Company's management direction follows the policies of the SOE holding and governance transformation. This may result in potential changes to supervisory mechanisms, investment, asset management, and the relationship with the parent company. **Follow-up Actions:** • Review all internal policies that refer to the previous SOE Law. • Adjust the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines. • Follow the new policies issued by PT PLN (Persero) as the holding company.
2.	UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	**Dampak:** • PT PLN Nusa Daya sebagai anak perusahaan PLN perlu menyesuaikan tata kelola perusahaan dengan ketentuan terbaru yang berlaku di lingkungan BUMN. • Berpotensi mempengaruhi struktur pengawasan perusahaan, mekanisme pelaporan, pengelolaan investasi, dan tata kelola anak perusahaan sesuai arahan induk perusahaan. • Dokumen GCG, *Board Manual,* Pedoman Tata Kelola, serta kebijakan mengenai organ perusahaan mungkin memerlukan penyesuaian apabila terdapat kebijakan lanjutan dari PLN (Persero). **Tindak Lanjut:** • Melakukan kajian kesesuaian *(legal review)* terhadap seluruh kebijakan internal yang mengacu pada UU BUMN. • Memperbarui Register Persyaratan dan Perundang-undangan dengan menjadikan UU No. 16 Tahun 2025 sebagai perubahan terakhir UU BUMN. • Menyesuaikan Pedoman GCG, *Board Manual*, dan kebijakan tata kelola apabila terdapat arahan dari PLN (Persero) atau pemegang saham. • Melakukan monitoring terhadap peraturan pelaksana dan sosialisasi kepada unit terkait. **Impact**: • PT PLN Nusa Daya, as a subsidiary of PLN, needs to align its corporate governance with the latest provisions applicable within the SOE environment. • This may affect the Company's supervisory structure, reporting mechanisms, investment management, and subsidiary governance in accordance with directions from the parent company. • GCG documents, the Board Manual, Governance Guidelines, and policies concerning the Company's organs may require adjustment if further policies are issued by PT PLN (Persero). **Follow-up Actions:** • Conduct a legal review of all internal policies that refer to the SOE Law. • Update the Register of Requirements and Regulations by recognising Law Number 16 of 2025 as the latest amendment to the SOE Law. • Adjust the GCG Guidelines, Board Manual, and governance policies if directions are issued by PT PLN (Persero) or the shareholders. • Monitor implementing regulations and conduct socialisation for relevant units.

No	Peraturan Regulation	Dampak terhadap Perusahaan dan/atau Tindak Lanjut yang Dilakukan Impact on the Company and/or Follow-up Actions Taken
3.	Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara yaitu tentang ketentuan umum, Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen. Regulation of the Minister of EMR Number 2 of 2025 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of EMR Number 27 of 2017 concerning Service Quality Levels and Costs Related to the Distribution of Electricity by PT Perusahaan Listrik Negara, covering general provisions, electricity service quality levels, and reductions in electricity bills for customers.	**Dampak:** • Mempengaruhi standar mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik yang menjadi acuan PLN Group. • Berpotensi memengaruhi pelaksanaan pekerjaan operasi dan pemeliharaan (O&M) yang dilaksanakan PLN Nusa Daya. **Tindak Lanjut:** • Mengkaji perubahan standar mutu pelayanan. • Menyesuaikan SOP operasi dan pemeliharaan bila diperlukan. • Berkoordinasi dengan PLN (Persero) terkait implementasinya. **Impact:** • Affects the service quality standards for electricity supply used as a reference by PLN Group. • May affect the implementation of operation and maintenance (O&M) work carried out by PLN Nusa Daya. **Follow-up Actions:** • Review changes to service quality standards. • Adjust operation and maintenance SOPs if necessary. • Coordinate with PT PLN (Persero) regarding its implementation.
4.	Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. Regulation of the Minister of EMR Number 5 of 2025 concerning Guidelines for Power Purchase Agreements for Electricity from Power Plants Utilising Renewable Energy Sources.	**Dampak:** • Memberikan pedoman baru dalam penyusunan PJBL pembangkit EBT. • Membuka peluang bisnis pada pekerjaan EPC, *commissioning*, O&M, dan *asset management* pembangkit energi terbarukan. • Menjadi acuan apabila perusahaan terlibat dalam proyek EBT. **Tindak Lanjut:** • Mengidentifikasi peluang proyek EBT. • Menyesuaikan template kontrak dan dokumen kerja sama apabila terlibat dalam proyek EBT. • Meningkatkan kompetensi SDM di bidang energi terbarukan. **Impact:** • Provides new guidelines for the preparation of PPAs for NRE power plants. • Opens business opportunities in EPC, commissioning, O&M, and asset management for renewable energy power plants. • Serves as a reference if the Company is involved in NRE projects. **Follow-up Actions:** • Identify opportunities in NRE projects. • Adjust contract templates and cooperation documents if involved in NRE projects. • Enhance human capital competencies in renewable energy.

No	Peraturan Regulation	Dampak terhadap Perusahaan dan/atau Tindak Lanjut yang Dilakukan Impact on the Company and/or Follow-up Actions Taken
5.	Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan dan Konservasi Energi. Regulation of the Minister of EMR Number 8 of 2025 concerning Energy Utilisation and Conservation.	**Dampak:** • Mendorong penerapan sistem manajemen energi, audit energi, dan efisiensi penggunaan energi. • Dapat berlaku bagi fasilitas PLN Nusa Daya yang memenuhi ambang batas penggunaan energi. • Mendukung target efisiensi energi dan pengurangan emisi perusahaan. **Tindak Lanjut:** • Mengidentifikasi fasilitas yang wajib menerapkan manajemen energi. • Menyusun program konservasi energi. • Melakukan audit energi apabila diwajibkan. • Menunjuk Manajer Energi sesuai ketentuan jika memenuhi persyaratan. **Impact:** • Encourages the implementation of energy management systems, energy audits, and efficient energy use. • May apply to PLN Nusa Daya facilities that meet the energy utilisation threshold. • Supports the Company's energy efficiency and emissions reduction targets. **Follow-up Actions:** • Identify facilities required to implement energy management. • Prepare energy conservation programmes. • Conduct energy audits if required. • Appoint an Energy Manager in accordance with applicable provisions if the requirements are met.
6.	Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Regulation of the Minister of EMR Number 10 of 2025 concerning the Road Map for Energy Transition in the Electricity Sector.	**Dampak:** • Menjadi arah kebijakan transisi energi nasional menuju pembangkit yang lebih bersih sehingga membuka peluang bisnis pada proyek retrofit, dekarbonisasi, pembangkit EBT, battery energy storage, dan layanan O&M pembangkit ramah lingkungan. **Tindak Lanjut:** • Menyesuaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP. • Mengembangkan kompetensi SDM di bidang transisi energi. • Mengidentifikasi peluang bisnis baru. **Impact:** • Serves as the national energy transition policy direction towards cleaner power plant, thereby opening business opportunities in retrofit projects, decarbonisation, NRE power plants, battery energy storage, and environmentally friendly power plant O&M services. **Follow-up Actions:** • Align the Company's Long-Term Plan (LTP) and Work Plan and Budget (WP&B). • Develop human capital competencies in the energy transition sector. • Identify new business opportunities.
7.	Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL PLN 2025–2034. Decree of the Minister of EMR concerning the Approval of PLN's 2025-2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL)	**Dampak:** • Menjadi dasar pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional, pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, serta proyek O&M dan EPC yang menjadi potensi pasar PLN Nusa Daya. **Tindak Lanjut:** • Menyusun business pipeline berdasarkan proyek dalam RUPTL • Mengidentifikasi peluang EPC, O&M, *asset management,* dan *engineering*. • Menyelaraskan strategi pemasaran perusahaan dengan program PLN. **Impact:** • Serves as the basis for the development of the national electricity system, including the development of power plants, transmission lines, substations, as well as O&M and EPC projects that represent potential markets for PLN Nusa Daya. **Follow-up Actions:** • Develop a business pipeline based on projects set out in the RUPTL. • Identify opportunities in EPC, O&M, asset management, and engineering. • Align the Company's marketing strategy with PLN's programmes.

Informasi Kelangsungan Usaha

Going Concern Information

Penilaian Kelangsungan Usaha

Hasil evaluasi Manajemen menunjukkan bahwa Perusahaan tidak menghadapi kondisi maupun faktor material yang dapat memengaruhi kelangsungan usahanya pada tahun buku 2025. Penilaian ini didukung oleh prospek industri yang positif serta tidak adanya indikasi risiko *going concern* dalam Laporan Keuangan Audit.

Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Perusahaan telah menyusun arah pengembangan usaha melalui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta pemanfaatan teknologi yang tepat, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah Strategi Perusahaan ke Depan

Sebagai langkah awal dalam upaya pencapaian sasaran jangka panjang, PLN Nusa Daya menetapkan target utama Perusahaan untuk tahun 2025 yang difokuskan ke dalam empat aspirasi strategis, yaitu:

1. ***Efficient Process***
   Menghasilkan layanan ketenagalistrikan yang optimal dari aspek biaya dan risiko, mendukung unit PLN untuk menghasilkan tenaga listrik yang optimum, serta menstimulasi pertumbuhan melalui Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan layanan bisnis *beyond* kWh.
2. ***Excellent Performance***
   Peningkatan kinerja aset fisik yang dikelola oleh PLN Nusa Daya dalam aspek *Reliability, Availability,* dan *Maintainability* hingga mencapai kondisi *best practice.*
3. ***Elegant Atmosphere***
   Penciptaan lingkungan kerja yang aman, nyaman serta berwawasan lingkungan dengan tujuan melebihi standar peraturan K3L yang ada.
4. ***Establishing High Trust***
   Peningkatan keterikatan hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis PLN Nusa Daya melalui kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dan kesiapan organisasi.

Going Concern Assessment

The results of Management's evaluation indicate that the Company did not face any conditions or material factors that could affect its business continuity in the 2025 fiscal year. This assessment is supported by positive industry prospects and the absence of any indication of going concern risk in the Audited Financial Statements.

To support sustainable growth, the Company has formulated its business development direction through the Corporate Long-Term Plan (LTP) and the Work Plan and Budget (WP&B). Guided by the principles of good corporate governance and the appropriate use of technology, the Company is committed to continuously improving its performance and creating added value for all stakeholders.

Company's Future Strategic Direction

As an initial step towards achieving its long-term objectives, PLN Nusa Daya has established the Company's key targets for 2025, focusing on four strategic aspirations, including the following:

1. **Efficient Process**
   Deliver optimal electricity services in terms of cost and risk, support PLN units in generating optimum electricity, and stimulate growth through Decarbonisation Business Development and beyond kWh business services.
2. **Excellent Performance**
   Improve the performance of physical assets managed by PLN Nusa Daya in terms of Reliability, Availability and Maintainability to achieve best practice conditions.
3. **Elegant Atmosphere**
   Create a safe, comfortable and environmentally conscious work environment with the aim of exceeding existing Occupational Health, Safety and Environmental (OHSE) regulatory standards.
4. **Establishing High Trust**
   Strengthen the engagement between the Company and its workforce to support the achievement of PLN Nusa Daya's strategic objectives through the readiness of human capital capacity and capability, as well as organisational readiness.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE



Bagi PLN Nusa Daya, tata kelola yang baik merupakan kunci untuk membangun kinerja yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu Perusahaan terus memperkuat penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap pengambilan keputusan dan proses bisnis, guna menghadirkan keseimbangan antara keunggulan operasional, tanggung jawab sosial, hingga kelestarian lingkungan.

PLN Nusa Daya recognises good governance as the foundation of reliable and sustainable performance. The Company therefore continues to embed Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across its decision-making and business processes, balancing operational excellence with social responsibility and environmental preservation.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

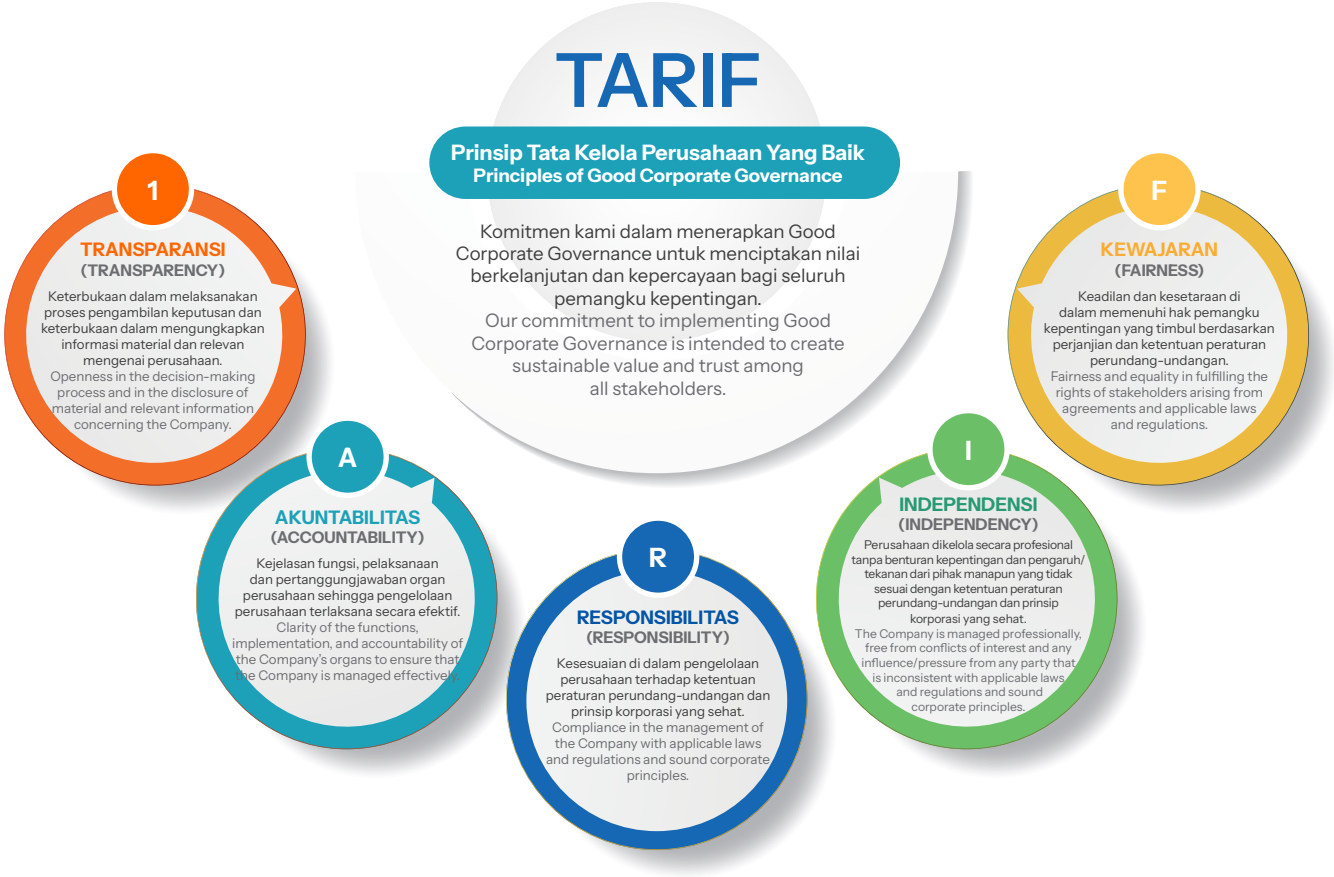
Implementation of Corporate Governance

PT PLN Nusa Daya berkomitmen untuk terus meningkatkan standar tata kelola keberlanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai fondasi dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan tema ARA "Meningkatkan Standar Tata Kelola Keberlanjutan: Transparansi *sebagai Fondasi Kepercayaan"*, PT PLN Nusa Daya meyakini bahwa transparansi merupakan elemen utama dalam membangun kepercayaan, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

PT PLN Nusa Daya is committed to continuously improving its sustainability governance standards through the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the foundation for creating long-term value for all stakeholders. In line with the ARA theme, "Enhancing Sustainability Governance Standards: Transparency as the Foundation of Trust", PT PLN Nusa Daya believes that transparency is a key element in building trust, strengthening accountability, and supporting business sustainability amid the ever-evolving dynamics of the business environment.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusa Daya menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran atau dikenal dengan prinsip TARIF. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara konsisten dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan dengan mengacu pada praktek terbaik *(best practices)* yang relevan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

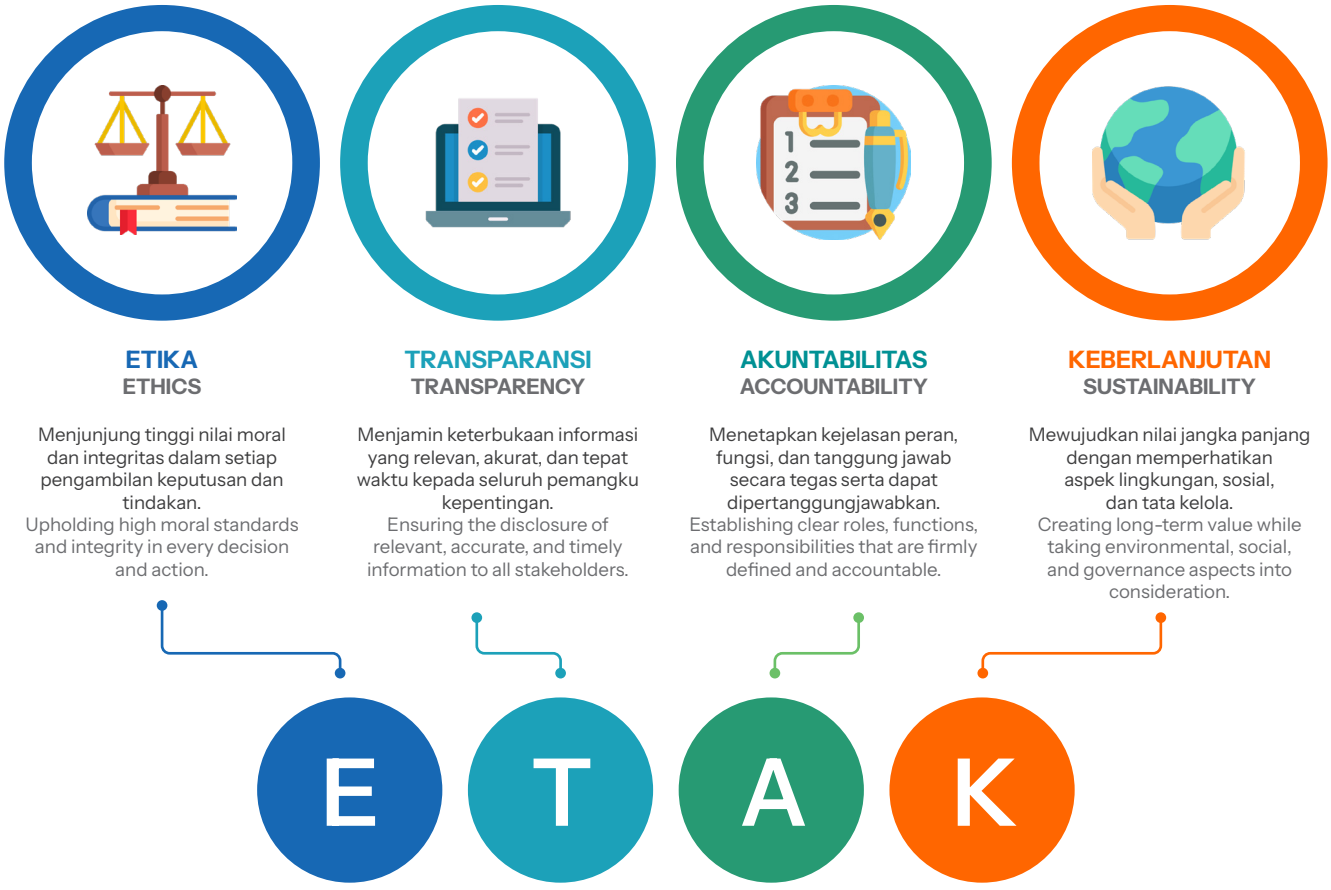
As a subsidiary of PT PLN (Persero), PT PLN Nusa Daya applies GCG principles comprising Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, collectively known as the TARIF principles. These principles are applied consistently in every business process and corporate decision-making process by referring to relevant best practices and complying with the applicable laws and regulations.



Selain mengimplementasikan prinsip TARIF, PT PLN Nusa Daya juga mengadopsi empat pilar Governansi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK). Integrasi prinsip ETAK ke dalam tata kelola perusahaan memperkuat komitmen Perseroan dalam membangun budaya integritas, meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat pertanggungjawaban, serta memastikan keberlanjutan menjadi bagian integral dari setiap proses pengambilan keputusan.

In addition to implementing the TARIF principles, PT PLN Nusa Daya has also adopted the four pillars of Indonesian Governance as stipulated in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), namely Ethics, Transparency, Accountability and Sustainability (ETAK). The integration of the ETAK principles into corporate governance strengthens the Company's commitment to building a culture of integrity, enhancing information disclosure, strengthening accountability, and ensuring that sustainability becomes an integral part of every decision-making process.

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI)
INDONESIAN GENERAL GUIDELINE FOR CORPORATE GOVERNANCE (PUG-KI)



Empat Pilar Governansi Korporat sebagai Landasan Prinsip-prinsip GCG PT PLN Nusa Daya.
Four Pillars of Corporate Governance as the Foundation of PT PLN Nusa Daya's GCG Principles



Tujuan Penerapan Governansi Perusahaan

PLN Nusa Daya telah menyusun tujuan dalam penerapan GCG. Implementasi GCG yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Objectives of Corporate Governance Implementation

PLN Nusa Daya has established the objectives of GCG implementation. The implementation of GCG has the following objectives:

1. To optimise the Company's value so that it has strong competitiveness, both nationally and internationally, enabling it to maintain its existence and operate sustainably in order to achieve the Company's purposes and objectives;
2. To encourage the professional, efficient and effective management of the Company, as well as to empower the functions and enhance the independence of the Company's Organs;
3. To encourage the Company's Organs to make decisions and take actions based on high moral values and compliance with the provisions of laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. To increase the Company's contribution to the national economy; and
5. To foster a conducive climate for the development of national investment.

Dasar Hukum Penerapan Governansi Perusahaan

PT PLN Nusa Daya memiliki dasar hukum dalam menerapkan GCG berdasarkan *best practices* dan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

Legal Basis for Corporate Governance Implementation

PT PLN Nusa Daya has a legal basis for implementing GCG based on best practices and the following laws and regulations:

Hirarki Peraturan Governansi PT PLN Nusa Daya
Hierarchy of Governance Regulations of PT PLN Nusa Daya



Kebijakan dan Pedoman Governansi Perusahaan

PLN Nusa Daya menerapkan kebijakan dan pedoman pendukung governansi Perusahaan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Informasi kebijakan dan pedoman governansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Governance Policies and Guidelines

PLN Nusa Daya implements supporting corporate governance policies and guidelines prepared based on the applicable laws and regulations. Information on the Company's corporate governance policies and guidelines is as follows:

Anggaran Dasar Articles of Association	**Anggaran Dasar PT PLN Nusa Daya** Articles of Association of PT PLN Nusa Daya
Pedoman Governansi Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Pedoman Governansi Perusahaan menjadi acuan bagi seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pedoman ini difokuskan pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan komite pendukung The Corporate Governance Guidelines serve as a reference for all Company Organs in carrying out their duties and obligations. These guidelines focus on the functions and responsibilities of the Company Organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and supporting committees.
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan Company Code of Conduct	Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) merupakan panduan bagi seluruh insan Perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan The Code of Conduct serves as a guideline for all Company personnel to behave in accordance with the Company's values.
Pedoman Anti penyuapan Anti-Bribery Guidelines	Kebijakan Anti Suap berlaku untuk semua pegawai di lingkungan PLN ND dan semua pihak ketiga yang dipekerjakan dan mewakili, atau bertindak atas nama PLN ND dalam kapasitas apa pun juga termasuk di dalamnya para subkontraktor, agen, perantara dan rekanan bisnis The Anti-Bribery Policy applies to all employees within PLN ND and all third parties employed by and representing, or acting on behalf of, PLN ND in any capacity, including subcontractors, agents, intermediaries and business partners.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Insan PT PLN Nusa Daya dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan PT PLN Nusa Daya This regulation is intended to provide guidance to PT PLN Nusa Daya personnel in understanding, controlling and managing gratification within PT PLN Nusa Daya.
Pedoman *Whistleblowing System* Whistleblowing System Guideline	Pedoman *Whistleblowing System* digunakan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran The Whistleblowing System Guidelines are used as the basis or implementation guidelines for handling violation reports.
Pedoman Organisasi atau SOP Organisational Guidelines or SOPs	Ditetapkan oleh manajemen di bawah Direktur Utama sesuai dengan tingkat kebijakannya Established by management under the President Director in accordance with the relevant policy level.
Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* Board Manual	Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) menjadi panduan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. The Board Manual serves as a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission.
Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	Piagam Dewan Komisaris merupakan petunjuk tatalaksana kerja Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. The Board of Commissioners Charter provides guidance on the work procedures of the Board of Commissioners, explaining the stages of activities in a structured, systematic, easily understandable and consistently implementable manner, thereby serving as a reference for the Board of Commissioners in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission.
Piagam Direksi Board of Directors Charter	Piagam Direksi merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. The Board of Directors Charter provides guidance on the work procedures of the Board of Directors, explaining the stages of activities in a structured, systematic, easily understandable and consistently implementable manner, thereby serving as a reference for the Board of Directors in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission.

Anggaran Dasar Articles of Association	Anggaran Dasar PT PLN Nusa Daya Articles of Association of PT PLN Nusa Daya
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Piagam Komite Audit menjadi pedoman bagi Komite Audit yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, serta hak Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. The Audit Committee Charter serves as a guideline for the Audit Committee, governing its position, duties, authority, obligations and responsibilities, as well as its rights in carrying out its duties and functions in assisting the supervisory duties of the Board of Commissioners.
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee Charter serves as a guideline for the Nomination and Remuneration Committee, governing its position, duties, authority, obligations and responsibilities, as well as its rights in carrying out its duties and functions in assisting the Board of Commissioners in relation to nomination and remuneration.
Piagam Pengawasan Internal Internal Audit Charter	Piagam Pengawasan Internal menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan independensi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal. The Internal Audit Charter serves as a guideline for the implementation of the duties, responsibilities, authority and independence of the Internal Audit Unit (IAU) in carrying out internal audit activities.
Buku Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Manual	Pedoman manajemen risiko agar Perusahaan selalu dalam koridor pengelolaan usaha dengan penuh kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, melalui pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan GCG. The risk management guidelines ensure that the Company remains within the corridor of prudent business management in every activity it undertakes, through compliance with the provisions of laws and regulations as well as internal regulations related to the implementation of GCG.

Struktur Governansi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Perusahaan memiliki mekanisme dalam mengimplementasikan GCG di lingkungan Perusahaan. PLN Nusa Daya telah menentukan organ Perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi. Setiap organ Perusahaan memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab.

- RUPS merupakan organ Perusahaan yang tertinggi. RUPS menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan keputusan RUPS sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing sebagai diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dalam menjalankan operasional Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan. Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, dan Satuan/ Unit Kerja lain yang menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Corporate Governance Structure

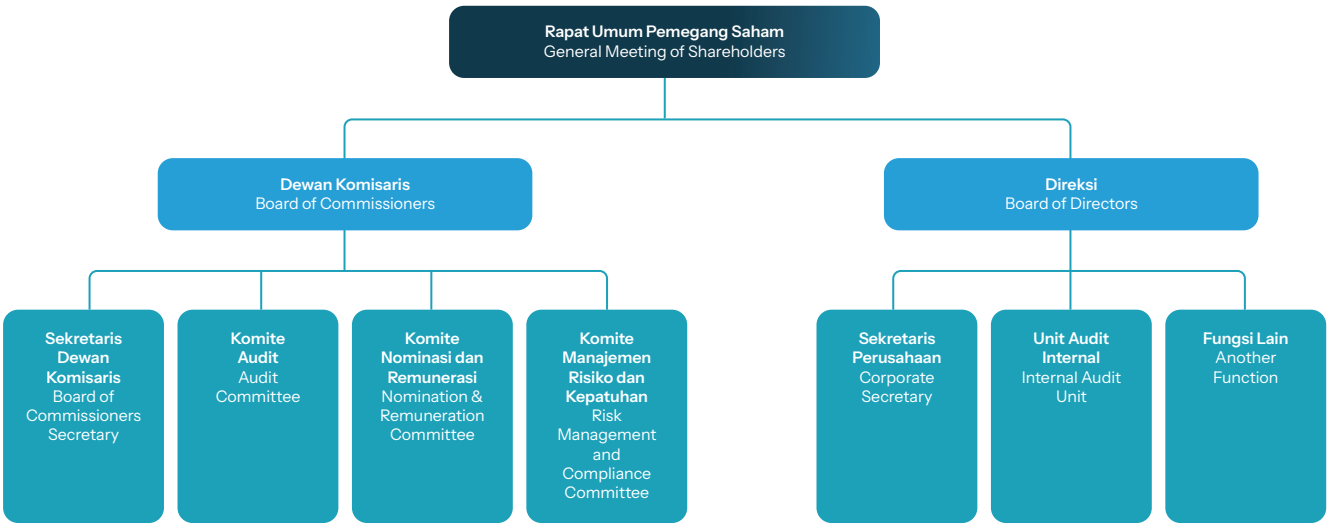
Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has a mechanism for implementing GCG within the Company. PLN Nusa Daya has determined the Company Organs, comprising the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each Company Organ has an important role in carrying out its functions, duties and responsibilities.

- The GMS is the highest Company Organ. The GMS delegates all authority for supervision and the implementation of its resolutions to the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors implement AGMS resolutions in accordance with their respective levels of authority as stipulated in the Company's Articles of Association.
- The Board of Commissioners performs the supervisory function over the Company's operations. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the organs of the Board of Commissioners, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.
- The Board of Directors is fully responsible for the implementation and management of the Company. The Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and other work units or organisational units that perform the Company's management functions.

Organ Perusahaan dibagi menjadi dua yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung. Yang termasuk dalam Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung Perusahaan adalah Komite Dewan Komisaris, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Auditor Eksternal. Berikut Informasi struktur governansi Perusahaan per 31 Desember 2025.

The Company Organs are divided into two categories, namely Main Organs and Supporting Organs. The Company's Main Organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meanwhile, the Company's Supporting Organs comprise the Board of Commissioners Committees, the Internal Audit Unit (IAU), the Secretary to the Board of Commissioners, the Corporate Secretary and the External Auditor. The following presents information on the Company's governance structure as at 31 December 2025.

Struktur Governansi PT PLN Nusa Daya
Corporate Governance Structure of PT PLN Nusa Daya



Penilaian Governansi Perusahaan

Pada tahun 2025, PT PLN Nusa Daya melaksanakan penilaian penerapan governansi atas periode Tahun Buku 2024 oleh pihak independen. Penilaian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan, sekaligus untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, penilaian menggunakan parameter atau standar penilaian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari KNKG

   Pemetaan implementasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dilakukan dengan mengacu pada 8 (delapan) prinsip dan 81 (delapan puluh satu) rekomendasi. Berdasarkan hasil pemetaan atas penerapan PUG-KI tersebut, PT PLN Nusa Daya memperoleh 43 rekomendasi yang berstatus *Apply*

Corporate Governance Assessment

In 2025, PT PLN Nusa Daya commissioned an independent party to conduct an assessment of its governance practices for the 2024 fiscal year. This assessment was carried out to evaluate the effectiveness of the implementation of GCG principles within the Company, as well as to identify opportunities for improvement and promote the continuous enhancement of corporate governance quality. In its implementation, the assessment used evaluation parameters or standards that had been established in accordance with applicable regulations, as follows:

1. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) from KNKG

   The mapping of the implementation of the Indonesian General Guidelines on Corporate Governance (PUG-KI) was carried out with reference to 8 (eight) principles and 81 (eighty-one) recommendations. Based on the results of the PUG-KI implementation mapping, PT PLN Nusa Daya recorded 43 recommendations with an "Apply"

sebagai rekomendasi yang telah diterapkan oleh Perusahaan, serta 38 rekomendasi yang berstatus *Explain* sebagai rekomendasi yang belum atau tidak diterapkan dengan disertai penjelasan sesuai kondisi dan karakteristik Perusahaan.

Dari 38 Rekomendasi berstatus *Explain*, terdapat 39 saran yang diberikan sebagai *Area of Improvement,* sedangkan 14 Rekomendasi tidak diberikan saran karena dianggap tidak relevan (*Not Applicable* (N/A)) sebagaimana dapat dilihat pada tabel status pemetaan PUG-KI PT PLN Nusa Daya Tahun Buku 2024 berikut:

status, indicating that they have been implemented by the Company, and 38 recommendations with an "Explain" status, indicating that they have not yet been implemented or have not been fully implemented, accompanied by explanations aligned with the Company's conditions and characteristics.

From the 38 recommendations with an "Explain" status, 39 suggestions were identified as "Areas of Improvement", while 14 recommendations were not accompanied by suggestions as they were considered irrelevant or not applicable (N/A). The mapping status of PUG-KI implementation at PT PLN Nusa Daya for the 2024 fiscal year is presented in the following table:

Tabel Status Hasil Pemetaan Pedoman Umum Korporat Governansi Indonesia (PUG-KI)
Table of Mapping Results Status of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI)

No	Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Status		Katagori Category	
				Apply[a]	Explain[b]	Saran[c]	N/A[d]
I.	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	7	31	21	10	7	5
II.	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2	11	2	9	10	3
III.	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	5	5	0	0	0
IV.	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Behaviour	3	4	3	1	3	0
V.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	4	6	4	2	2	0
VI.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	9	4	5	4	1
VII.	Hak-hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	3	11	1	10	12	5
VIII.	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Respect for Stakeholders	3	4	3	1	1	0
Total		28	81	43	38	39	14

Keterangan | Notes:
(a) Rekomendasi yang telah diterapkan | Recommendations that have been implemented
(b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum diterapkan | Explanation of recommendations that have not been implemented
(c) Saran atas rekomendasi berstatus *Explain* | Suggestions for recommendations with Explain status
(d) *Not Applicable* atas rekomendasi berstatus *Explain* | Not Applicable for recommendations with Explain status

2. Asean *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan tahun 2024
   Hasil skor GCG berdasarkan standar alat uji ACGS PT PLN Nusa Daya Tahun buku 2024 adalah Level 1 sebesar 64,85 poin dan Level 2 sebesar 8,33 poin, sehingga total skor keseluruhan (Level 1 dan Level 2) adalah sebesar 73,18 poin sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

2. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) published in 2024
   The GCG score based on the ACGS assessment standard for PT PLN Nusa Daya for Fiscal Year 2024 was Level 1 at 64.85 points and Level 2 at 8.33 points, resulting in an overall total score, comprising Level 1 and Level 2, of 73.18 points, as shown in the following table:

Tabel Skor Capaian Penilaian Governansi Perusahaan Berdasarkan ACGS
Table of Corporate Governance Assessment Achievement Scores Based on ACGS

Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard		Jumlah Pertanyaan Number of Questions	Skor Maksimal Maximum Score	Pemenuhan Fulfilment			Total Skor Total Score
				Not Applicable (N/A)	Tidak No	Ya Yes	
LEVEL 1							
Bagian A Part A	Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Rights and Equal Treatment of Shareholders	30	20,00	6	13	11	11,33
Bagian B Part B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	22	15,00	0	11	11	7,50
Bagian C Part C	Transparansi dan Pengungkapan Transparency and Disclosure	34	25,00	1	12	21	16,18
Bagian D Part D	Tanggung Jawab Dewan Board Responsibilities	63	40,00	4	16	43	39,84
TOTAL LEVEL 1		149	100,00	11	52	86	64,85
LEVEL 2							
Bonus		18	30	2	11	5	8
Penalti Penalty		26	(67)	4	22	0	0
TOTAL LEVEL 2		44	30,00	6			8,33
TOTAL		193	130,00	17			73,18

Penjelasan mengenai hasil penilai PUGKI dengan dengan pendekatan *"apply or explain"* dijelaskan lebih lanjut pada bab ini, sub bab Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Adapun penilaian penerapan governansi Perusahaan atas Tahun Buku 2025 masih dalam proses pelaksanaan *self-assessment* dengan didampingi oleh pihak independen. Penilaian tersebut menggunakan 3 (tiga) parameter, yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), parameter Tata Kelola Perusahaan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Further details on the PUG-KI assessment results, using the "apply or explain" approach, are presented in this chapter under the sub-chapter on the Application of Corporate Governance Aspects and Principles in this Annual Report.

The assessment of the Company's corporate governance implementation for the 2025 fiscal year is currently being conducted through a self-assessment process supported by an independent party. This assessment uses three parameters, namely the Indonesian General Guidelines on Corporate Governance (PUG-KI), Corporate Governance parameters based on the provisions of the Financial Services Authority (OJK), and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam menggunakan haknya untuk memberikan pendapat dan persetujuan serta memperoleh informasi berkaitan dengan kewenangannya dalam mempengaruhi dan mengarahkan Perusahaan.

Kewenangan Pemegang Saham

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 5 ayat 1 semua saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama. Perusahaan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mempengaruhi dan mengarahkan Perusahaan. Kewenangan Pemegang Saham di antaranya:

1. Menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
5. Memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris;
7. Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP;
8. Memberikan pengesahan RKAP;
9. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal;
10. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris;
11. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
12. Menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
13. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's highest organ and has authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits stipulated in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The GMS serves as a forum for Shareholders to exercise their rights to provide opinions and approvals, as well as to obtain information relating to their authority to influence and direct the Company.

Shareholders' Authority

In line with Article 5 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, all shares issued by the Company are registered shares. The Company recognises only 1 (one) individual or 1 (one) legal entity as the owner of a share. Shareholders have the authority to influence and direct the Company. The authority of Shareholders includes:

1. Establishing guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Conducting assessments of candidates for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Determining the appointment and composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations;
4. Establishing provisions on concurrent positions for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
5. Dismissing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations;
6. Responding to vacancies and/or temporary suspension of members of the Board of Directors by the Board of Commissioners;
7. Ratifying the Company's Long-Term Plan (RJPP) or revisions to the RJPP;
8. Ratifying the WP&B;
9. Providing approval/decisions on proposed corporate actions that require the approval/decision of the GMS/Capital Owner;
10. Assessing the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
11. Determining salaries/honoraria, allowances, facilities, and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
12. Appointing the external auditor to audit the Company's Financial Statements;
13. Approving the Annual Report, including the ratification of the financial statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board;

14. Menetapkan penggunaan laba bersih;
15. Memberikan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan secara tepat waktu;
16. Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris; dan
17. Merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Jenis Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
2. RUPS tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :
   a. RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
   b. RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan yang diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan dan menghasilkan risalah RUPS berupa hasil telaah pemegang saham terhadap Laporan Tahunan Perusahaan.
3. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
4. RUPS Lainnya, atau selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

Sejalan dengan anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25 Kuorum, hak suara dan keputusan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilakukan dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain;
2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan;

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

14. Determining the allocation of net profit;
15. Ratifying the Annual Report and approving the Financial Statements in a timely manner;

16. Providing direction/guidance on the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
17. Responding to information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners regarding indications of declining performance and significant losses suffered by the Company.

Type of GMS Implementation

The Company's GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS, as follows:

1. Annual GMS
2. The Annual GMS is held every year and includes:
   a. GMS on the Approval of the Company's Work Plan and Budget (WP&B), which is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year;

   b. GMS on the Approval of the Annual Report, which is held no later than June or 6 (six) months after the close of the relevant fiscal year and produces GMS minutes in the form of the Shareholders' review of the Company's Annual Report.

3. Extraordinary GMS
4. Other GMS, hereinafter referred to as the Extraordinary GMS, may be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or the Shareholders.

Quorum, Voting Rights and Resolutions

In line with Article 25 of the Company's Articles of Association, the quorum, voting rights and resolutions are as follows:

1. A GMS may be held if more than 51% of the total shares with voting rights are present or represented at the GMS, unless otherwise stipulated by the laws and regulations and/or these Articles of Association;

2. Shareholders, either in person or represented by proxy, are entitled to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares they own;
3. The chairperson of the meeting is entitled to request that the power of attorney authorising representation of a Shareholder be shown to them at the time the meeting is held;
4. At the meeting, each share grants its owner the right to cast 1 (one) vote;

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat; and
6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

5. Voting on matters concerning individuals is conducted by unsigned closed ballot, while voting on other matters is conducted orally, unless the chairperson of the meeting determines otherwise without objection from the Shareholders present at the meeting; and
6. All resolutions are adopted by deliberation to reach consensus.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan Tahun 2025

Pada tahun 2025, PLN Nusa Daya menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan RUPS Tahunan Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024 dengan keputusan dan realisasi/tindak lanjut atas keputusan RUPS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of the Company's 2025 Annual GMS

In 2025, PLN Nusa Daya held 2 (two) Annual GMS, namely the Annual GMS on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for 2025 and the Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Annual Accounts for Fiscal Year 2024. The resolutions and implementation/follow-up actions of the 2025 GMS are as follows:

RUPS Tahunan Tentang Pengesahan RKAP Tahun 2025
Annual GMS on the Ratification of the 2025 WP&B

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Invitation	**Tanggal Pelaksanaan RUPS** Date of GMS	**Lokasi** Location	**Pimpinan Rapat** Chairperson of the Meeting	**Pihak Independen** Independent Party
13 Januari 2025 13 January 2025	31 Januari 2025 31 January 2025	Jakarta (Indonesia)	Komisaris Utama President Commissioner	MONADHA

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Implementation
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025; Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget for 2025;	1 **Keputusan** | Resolution Menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025 Approved and ratified the 2025 WP&B **Realisasi** | Implementation Telah dilaksanakan di Tahun 2025 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung Implemented in 2025 during the Annual GMS
2	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* Tahun 2025 Approval and Ratification of the 2025 Management Contract/Key Performance Indicator	2 **Keputusan** | Resolution Mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2025 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan Ratified the 2025 Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company's Shareholders. **Realisasi** | Implementation Telah dilaksanakan di Tahun 2025 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung Implemented in 2025 during the Annual GMS.

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun 2025
Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Annual Accounts for 2025

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Invitation	Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS	Lokasi Location	Pimpinan Rapat Chairperson of the Meeting	Pihak Independen Independent Party
23 Mei 2025 23 Mei 2025	25 Juni 2025 25 June 2025	Jakarta (Indonesia)	Komisaris Utama President Commissioner	MONADHA

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Implementation	
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(Volledig Acquit et de Charge)* kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2024, as well as the granting of full discharge and release from responsibility (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for the management of the Company and to the Board of Commissioners for the supervision of the Company carried out during Fiscal Year 2024, provided that such actions did not constitute criminal offences and were reflected in the Company's books, including the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024;	1	**Keputusan** | Resolution Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan, termasuk menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 serta memberikan Pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. Approved and accepted the Annual Report on the condition and course of the Company during Fiscal Year 2024, consisting of the Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report, including approving and accepting the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2024, and granting full discharge and release from responsibility (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in accordance with their respective responsibilities and actions during Fiscal Year 2024, provided that such actions did not conflict with the applicable laws and regulations and were reflected in the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners. **Realisasi** | Implementation Telah dilaksanakan di Tahun 2025 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung Implemented in 2025 during the Annual GMS.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024; Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2024;	2	**Keputusan** | Resolution RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024. The GMS authorised the majority Shareholder to determine the allocation of Net Profit for Fiscal Year 2024. **Realisasi** | Implementation PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 melalui Surat Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) Nomor 68946/MNJ.01.02/F01000000/2025 tanggal 15 Desember 2025 PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the allocation of Net Profit for Fiscal Year 2024 through the Letter of the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)) Number 68946/MNJ.01.02/F01000000/2025 dated 15 December 2025.

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun 2025
Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Annual Accounts for 2025

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Invitation	Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS	Lokasi Location	Pimpinan Rapat Chairperson of the Meeting	Pihak Independen Independent Party

3	Persetujuan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024; Approval of Salaries/Honoraria, including Facilities and Allowances for Fiscal Year 2025, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for Performance in Fiscal Year 2024 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2024;	3	**Keputusan** | Resolution RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 The GMS authorised the majority Shareholder to determine Salaries/Honoraria, including Facilities and Allowances for Fiscal Year 2025, as well as Tantiem/ Performance Incentives/Special Incentives for Performance in Fiscal Year 2024 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2024. **Realisasi** | Implementation PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penghasilan Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2024 melalui Surat Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) Nomor 71800/ MNJ.01.02/F01000000/2025-SR tanggal 31 Desember 2025 PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the Tantiem for Fiscal Year 2024 and Remuneration for Fiscal Year 2025 for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as Employee Bonuses for Fiscal Year 2024, through the Letter of the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)) Number 71800/MNJ.01.02/F01000000/2025-SR dated 31 December 2025.
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2025. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025.	4	**Keputusan** | Resolution RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT PLN (Persero). The GMS appointed the Public Accounting Firm as the auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for Fiscal Year 2025, which is the same Public Accounting Firm that audits PT PLN (Persero). **Realisasi** | Implementation PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2025 melalui Surat Nomor 42756/DAN.01.02/ F01070400/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Implementation: PT PLN (Persero), as the Majority Shareholder, determined the appointment of the Public Accounting Firm as the auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for Fiscal Year 2025 through the Letter Number 42756/ DAN.01.02/F01070400/2025 dated 15 August 2025

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat penyelenggaraan RUPSLB di PT PLN Nusa Daya.

Implementation of the Company's 2025 Extraordinary GMS

Throughout 2025, no Extraordinary GMS was held at PT PLN Nusa Daya.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan Tahun 2024

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2023 yang diselenggarakan tahun 2024 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun buku 2023 yang diselenggarakan di tahun 2024 dan tindak lanjutnya:

Implementation of the Company's 2024 Annual GMS

All recommendations from the GMS Resolutions for Fiscal Year 2023 held in 2024 have been implemented. The following are the GMS Resolutions for Fiscal Year 2023 held in 2024 and their follow-up actions:

RUPS Tahun 2023 2023 GMS	**Realisasi/Tindal Lanjut Keputusan RUPS Tahun 2023** Implementation/Follow-Up on the 2023 GMS Resolutions
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Ratification of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for 2024	Semua Keputusan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya All resolutions have been fully followed up
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023 Approval of the Annual Report and Ratification of the Annual Accounts for Fiscal Year 2023	Semua Keputusan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya All resolutions have been fully followed up

Direksi
Board of Directors

Direksi memegang peranan penting dalam memimpin dan mengelola Perseroan guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT PLN Nusa Daya diatur dalam Piagam Direksi yang disahkan tahun 2024. Piagam Direksi telah diperbaharui seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN yang terbit di tahun 2023.

Piagam Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*. Dengan adanya piagam ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan bertindak dan bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku, kode etik, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Dewan Direksi diantaranya adalah:
1. Organisasi Direksi;
2. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak;
3. Mekanisme Kerja:
   a. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan;
   b. Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa;
   c. Rapat Direksi;
   d. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
   e. Program Peningkatan Kompetensi;
   f. Evaluasi Kinerja Direksi;
4. Etika Kerja:
   a. Standar Etika ;
   b. Benturan Kepentingan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga mengacu pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT PLN Nusa Daya tahun 2024. *Board Manual* merupakan pedoman yang mengatur tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

The Board of Directors holds an important role in leading and managing the Company to achieve its corporate objectives effectively and sustainably. In accordance with the applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors is authorised to represent the Company both in and and out of court.

Board of Directors Charter

The implementation of the Board of Directors' duties and conduct is governed by the Board of Directors Charter, which was approved in 2024. The Board of Directors Charter has been updated in line with the issuance of the Minister of SOEs Regulations in 2023.

The Board of Directors Charter was prepared based on corporate law principles, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Through this Charter, the Board of Directors is expected to perform its duties and conduct itself in accordance with the applicable rules, code of ethics, and GCG best practices.

The scope regulated under the Board of Directors Charter includes:
1. Organisation of the Board of Directors;
2. Duties, Responsibilities, Obligations, and Rights;
3. Work Mechanism:
   a. Principles of decision-making;
   b. Delegation of authority and granting of power of attorney;
   c. Meetings of the Board of Directors;
   d. Implementation of the Company's management duties by the Board of Directors;
   e. Competency development programme;
   f. Performance evaluation of the Board of Directors;
4. Work Ethics:
   a. Ethical standards;
   b. Conflicts of interest.

In addition, in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors also refers to the Board Manual of PT PLN Nusa Daya for 2024. The Board Manual serves as a guideline that regulates the stages of activities in a structured, systematic, clear, and consistently implementable manner, thereby serving as a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*. *Board Manual* ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Sejalan dengan yang diatur dalam Piagam Direksi Tahun 2024, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang antara lain meliputi:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar PT. PLN Nusa Daya dan/atau Keputusan RUPS;
3. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
4. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
5. Menelaah rancangan RJPP dan perubahannya yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RJPP serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu atau sesuai jadwal yang ditentukan untuk mendapatkan pengesahan RUPS. Direksi mensosialisasikan RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan.
6. Menelaah rancangan RKAP dan perubahannya yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. Direksi mensosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan;
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
8. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
9. Membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan

The Board Manual was prepared based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The Board Manual is intended to define the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in performing their duties, in order to support the professional, transparent, and efficient management of the Company.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In accordance with the 2025 Board of Directors Charter, the duties and responsibilities of the Board of Directors includes:

1. To carry out all actions relating to the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;
2. To represent the Company both in and outside the court of law in all matters and events, subject to the limitations stipulated in the applicable laws and regulations, the Articles of Association of PT PLN Nusa Daya, and/or GMS resolutions;
3. To be responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance;
4. To endeavour and ensure that the Company's business and activities are carried out in accordance with its purposes, objectives, and business activities;
5. To review the draft Corporate Long-Term Plan (RJPP) and its amendments prepared by the RJPP Preparation Team, follow up on and discuss the review results, responses, or opinions of the Board of Commissioners on the draft RJPP, and submit the draft to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner or in accordance with the specified schedule to obtain GMS approval. The Board of Directors shall disseminate the RJPP to all employees of the Company;
6. To review the draft Company Work Plan and Budget (RKAP) and its amendments prepared by the RKAP Preparation Team, follow up on and discuss the review results, responses, or opinions of the Board of Commissioners on the draft RKAP, and submit the draft to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain GMS approval. The Board of Directors shall disseminate the RKAP to all employees of the Company;
7. To provide explanations to the GMS regarding the Corporate Long-Term Plan and the Company Work Plan and Budget;
8. To prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meetings;
9. To prepare Quarterly Reports and Annual Reports as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
10. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
11. Menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
12. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
13. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya;
15. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
16. Menyiapkan struktur/susunan organisasi Perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi dan meminta persetujuan Dewan Komisaris terhadap struktur/susunan organisasi tersebut. Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; Spesifikasi pekerjaan menyebutkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (*knowledge, skill, ability*) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.

as referred to in the Law on Company Documents;
10. To prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit;
11. To submit the Annual Report, which includes, among others, the financial statements, report on the Company's activities, and report on the implementation of GCG, to the GMS for approval and ratification;
12. To provide explanations to the GMS regarding the Annual Report;
13. To submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement ratified by the GMS to the Minister responsible for Law and Human Rights in accordance with the applicable laws and regulations;
14. To maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Report, Company financial documents, and other Company documents;
15. To submit periodic reports in the manner and within the timeframe stipulated by the applicable provisions, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
16. To prepare the Company's organisational structure according to the Company's needs, including job descriptions, job specifications, and descriptions of duties for all position levels within the organisational structure, and to seek approval from the Board of Commissioners for such organisational structure. The job description shall specify the duties, obligations, and responsibilities of each position, while the job specification shall specify the knowledge, skills, and abilities required for each position.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Berikut adalah Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Piagam Direksi tahun 2024:

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, as stipulated in the 2024 Board of Directors Charter, are as follows:

Jabatan Direksi Position of the Board of Directors	**Tugas dan Tanggung Jawab** Duties and Responsibilities
Direktur Utama President Director	Memimpin, membina dan melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, senantiasa meningkatkan kinerja Perusahaan untuk mencapai Visi, dan mengurus kekayaan Perusahaan serta memastikan terlaksananya Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT PLN Nusa Daya. To lead, develop, and carry out the management of the Company for the benefit and objectives of the Company, continuously improve the Company's performance to achieve its Vision, manage the Company's assets, and ensure the implementation of Good Corporate Governance at PT PLN Nusa Daya.
Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	Memimpin, membina dan mengelola Direktorat Operasi dan Pengembangan Usaha yang meliputi perencanaan Korporat, pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk (GI), Distribusi, Pelayanan Pelanggan, dan mengembangkan usaha untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan tujuan Perusahaan. To lead, develop, and manage the Directorate of Operations and Business Development, covering corporate planning, operation and maintenance of power plants, transmission and substations, distribution, customer service, and business development, to ensure that the Company is able to grow towards the achievement of its Vision, Mission, and corporate objectives.

Jabatan Direksi Position of the Board of Directors	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Memimpin, membina dan mengelola Direktorat Keuangan dan Administrasi meliputi fungsi keuangan korporat, anggaran, perbendaharaan (*treasury*), akuntansi, pajak, asuransi, dan menyusun, menetapkan kebijakan pengembangan organisasi dan manajemen SDM secara efektif dan efisien serta menyelenggarakan administrasi secara tertib dan benar, serta memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan. To lead, develop, and manage the Directorate of Finance and Administration, covering corporate finance, budgeting, treasury, accounting, tax, and insurance functions, as well as to formulate and establish policies on organisational development and human capital management in an effective and efficient manner, administer corporate administration properly and accurately, and ensure that the Company is able to grow towards the achievement of its Vision, Mission, and corporate objectives.

Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi PT PLN Nusa Daya. Struktur dan jumlah anggota Direksi disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan. Berikut adalah komposisi Direksi PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025:

Composition of the Board of Directors

Throughout 2025, there was no changes in the composition of the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya. The structure and number of members of the Board of Directors are determined with due consideration to the Company's vision, mission, and strategic plan. The composition of the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya as of 31 December 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Feby Joko Priharto	Direktur Utama | President Director
Reny Wahyu Setiawan	Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha | Director of Operations and Business Development
Zulhendri	Direktur Keuangan dan Administrasi | Director of Finance and Administration

Masa Jabatan Direksi

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Direksi, masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum menetapkan pengganti Anggota Direksi tersebut, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.

Term of Office of the Board of Directors

Pursuant to the Company's Articles of Association and the Board of Directors Charter, each Board member serves for a term of 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) additional term. In the event that the term of office of a member of the Board of Directors expires and the GMS has not appointed a replacement, the duties of the vacant member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions on the filling of vacant positions of members of the Board of Directors.

Independensi Direksi dan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan selalu bertindak secara independen. Sesuai dengan Piagam Direksi, untuk menjaga independensi Direksi, Perusahaan mewajibkan:

1. Direksi membuat surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

2. Direksi menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.

Independence of the Board of Directors and Conflicts of Interest

In carrying out its duties and responsibilities, the Company's Board of Directors consistently acts independently. In accordance with the Board of Directors Charter, to maintain the independence of the Board of Directors, the Company requires the following:

1. Members of the Board of Directors shall prepare a statement declaring that they have no conflict of interest between their personal or family interests, other positions, or group interests and the interests of the Company upon initial appointment, which shall be updated at the beginning of each year.
2. Members of the Board of Directors shall submit reports on share ownership in the Company and other companies to the Company, through the Corporate Secretary, for recording in the Special Register.

3. Direksi menandatangani Pakta integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.

4. Bila ternyata Direksi mengalami (potensi) benturan kepentingan dan tidak menandatangani Pakta integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
5. Apabila terjadi kondisi di mana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Komisaris dan Direksi.

3. Members of the Board of Directors shall sign an Integrity Pact attached to the Proposed Actions of the Board of Directors that require approval from the Board of Commissioners and/or recommendations from the Board of Commissioners, as well as approval from the GMS/Capital Owner.
4. If a member of the Board of Directors experiences an actual or potential conflict of interest and does not sign the Integrity Pact, the relevant member of the Board of Directors shall submit a written statement to the Board of Commissioners, accompanied by the measures taken to avoid transactions containing conflicts of interest.
5. In the event that the duties and interests of the Company conflict with personal interests, the relevant member of the Board of Directors shall disclose such conflict or potential conflict of interest to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Kepemilikan Saham Direksi

Sejalan dengan Piagam Direksi, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan mewajibkan Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain. berikut informasi kepemilikan Saham Direksi PT PLN Nusa Daya hingga akhir Desember 2025:

Board of Directors' Share Ownership

In accordance with the Board of Directors Charter, and in order to prevent conflicts of interest, the Company requires members of the Board of Directors to report their and/or their family members' share ownership in the Company and other companies to the Company through the Corporate Secretary, for recording in the Special Register. Information on the share ownership of the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya as of the end of December 2025 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham** Share Ownership							
		Pribadi Pada Perusahaan Personal ownership in the Company		**Keluarga pada Perusahaan** Family ownership in the Company		**Pribadi Pada Perusahaan Lain** Personal ownership in other companies		**Keluarga pada Perusahaan Lain** Family ownership in other companies	
		2025	**2024**	**2025**	**2025**	**2025**	**2025**	**2025**	**2025**
Feby Joko Priharto	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Reny Wahyu Setiawan	Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Zulhendri	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direksi Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Rapat Direksi

Setiap keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan

Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2025

Throughout 2025, the Company's Board of Directors performed its duties and responsibilities as follows:

Board of Directors Meetings

Each Board of Directors resolution is adopted at a Board of Directors Meeting. Binding resolutions may also be adopted without holding a Board of Directors Meeting, provided that they are approved in writing and signed by

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi tentang cara dan materi yang diputuskan.

all members of the Board of Directors with respect to the matters resolved and the manner in which such resolutions are adopted.

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan rapat Direksi diatur dalam Piagam Direksi. Sejalan dengan kebijakan tersebut Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT. Namun demikian, penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
3. Atas permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Board of Directors Meeting Policy

The Board of Directors meeting policy is governed by the Board of Directors Charter. In accordance with this policy, Board of Directors Meetings shall be held periodically, at least once every month. Board of Directors Meetings are convened in accordance with the plan set out in the Annual Work Plan and Budget (RKAT). Nevertheless, Board of Directors Meetings may be convened at any time if:

1. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
2. Requested in writing by one or more members of the Board of Commissioners; or
3. Requested in writing by one or more Shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.

Board of Directors Meetings may be held through teleconference, video conference, or other electronic media that enable all participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Pelaksanaan Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi Dalam Rapat

Pada tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 28 yang terdiri dari 12 rapat internal Direksi, 12 kali rapat Bersama Dewan Komisaris dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PLN Nusa Daya dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Paguntaka Cahaya Nusantara Perusahaan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors convened 28 meetings, consisting of 12 internal Board of Directors meetings, 12 joint meetings with the Board of Commissioners, 2 Annual General Meetings of Shareholders of PT PLN Nusa Daya, and 2 Annual General Meetings of Shareholders of PT Paguntaka Cahaya Nusantara, with attendance levels as follows:

Nama/Jabatan Name/ Position	**Masa Jabatan** Term of Period	**Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi** BoD Attendance at the Internal BoD Meetings			**Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris** BoD Attendance at the Joint BoD-BoC Meetings			**Kehadiran Direksi dalam Rapat RUPS Tahunan** BoD Attendance at the Annual GMS		
		Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Wajib Rapat** Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Jumlah Wajib Rapat** Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Feby Joko Priharto Direktur Utama President Director	03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2027 3 August 2023 – 3 August 2027	12	12	100%	12	12	100%	2	2	100%
Reny Wahyu Setiawan Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2027 3 August 2023 – 3 August 2027	12	12	100%	12	12	100%	2	2	100%
Zulhendri Direktur Manrisk, Legal dan Human Capital* Director of Risk Management, Legal, and Human Capital*	12 November 2020 – 12 November 2024 3 August 2023 – 3 August 2027	12	12	100%	12	12	100%	2	2	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance Rate of the Board of Directors				100%			100%			100%

Keputusan Direksi

Pada tahun 2025, Direksi PT PLN Nusa Daya telah mengeluarkan berbagai keputusan diantaranya sebagai berikut:

1. Persetujuaan Perdir Batas Kewenangan;
2. Persetujuaan Penambahan KBLI (Pengembangan Usaha, Legal dan Management Risiko);
3. Persetujuaan Peraturan Pelaksana Pedoman *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR);
4. Persetujuaan Penambahan Modal dasar PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PT PCN);
5. Persetujuan Digitalisasi Penagihan Piutang;
6. Persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026;
7. Persetujuan Penetapan Organisasi Baru.

Pelatihan dan Program Orientasi Direksi

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam Piagam Direksi. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Adapun kebijakan program orientasi/pengenalan Direksi diatur dalam Board Manual tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan tersebut Program Pengenalan bagi Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang - kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan dan dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Program Pengenalan Direktur dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur tersebut. Program Pengenalan Komisaris dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

Board of Directors Resolutions

In 2025, the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya issued various resolutions, including the following:

1. Approval of the Board of Directors Regulation on Limits of Authority;
2. Approval of additional KBLI classifications for business development, legal affairs, and risk management;
3. Approval of the implementing regulation for the Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Guidelines;
4. Approval of the increase in authorised capital of PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PT PCN);
5. Approval of accounts receivable billing digitalisation;
6. Approval of the proposed Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2026;
7. Approval of the establishment of the new organisational structure.

Training and Induction Programme for the Board of Directors

The training policy for the Board of Directors is governed by the Board of Directors Charter. The Board of Directors carries out training programmes to enhance the competencies of Board members in accordance with their needs.

The policy on the orientation or induction programme for the Board of Directors is governed by the 2024 Board Manual. In accordance with this policy, the induction programme for newly appointed members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners shall at least cover:

1. The implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information on delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as prohibited matters.

The induction programme may take the form of presentations, meetings, visits to business units, and other programmes as required and deemed appropriate by the Company in which the programme is implemented. The induction programme for a Director shall be conducted no later than 1 (one) month after the Director's appointment. The induction programme for a Commissioner shall be conducted no later than 3 (three) months after the Commissioner's appointment.

Pelaksanaan Program Orientasi/Pengenalan Direksi

Selama tahun 2025, tidak terdapat pengangkatan Dewan Komisari baru sehingga tidak ada informasi terkait program pengenalan Dewan Komisaris Perusahaan.

Implementation of the Board of Directors Orientation/ Induction Programme

Throughout 2025, there were no appointments of new members of the Board of Commissioners; therefore, there was no information regarding the Company's Board of Commissioners induction programme.

Pelaksanaan Pelatihan Direksi

Berikut pelaksanaan pelatihan/peningkatan kompetensi Direksi selama tahun 2025:

Implementation of Board of Directors Training

The following sets out the implementation of training/ competency development for the Board of Directors during 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Training
Reny Wahyu Setiawan	Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	• Rumah Perubahan by Rhenal Kasali • Pemanfaatan Teknologi Hidorgen pada Sektor Pembangkit Listrik • Rumah Perubahan by Rhenald Kasali • Utilisation of Hydrogen Technology in the Power Generation Sector
Zulhendri	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	• Leaders Talk dan Workshop Sustainability Tahun 2025 • Workshop Aplikasi Motion dan Aplikasi Strategy Navigation Flightdeck • Workshop Risk Modelling Refreshment SH AP 2025 • Workshop Agregasi dan Integrasi Risiko • Workshop Transformasi HC 2.0 dan Organisasi HCBP • Leaders Talk and Sustainability Workshop 2025 • Workshop on Motion Application and Strategy Navigation Flightdeck Application • SH/AP Risk Modelling Refreshment Workshop 2025 • Risk Aggregation and Integration Workshop • HC 2.0 Transformation and HCBP Organisation Workshop

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir Desember 2025, Direksi PT PLN Nusa Daya belum memiliki Komite di bawah Direksi, mengingat Direksi belum memerlukan Komite untuk membantu dalam menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait prosedur penilaian kinerja dan kriteria yang digunakan, seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi, serta kehadiran dalam rapat Komite yang seharusnya berada di bawah Direksi.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

As of the end of December 2025, the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya had not established any committees under the Board of Directors, as the Board of Directors had not required any committee to assist in carrying out the Company's operations. Accordingly, there is no information regarding performance assessment procedures and the criteria used, such as performance achievements during the financial year, competencies, and attendance at meetings of committees that would otherwise be under the Board of Directors.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2026

Rencana rapat Direksi tahun 2026 sebagaimana yang telah dimuat dalam Agenda Direksi akan melakukan rapat sebanyak 28 kali rapat dengan agenda antara lain:

1. Rapat Direksi
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
3. Rapat RUPS RKAP Tahun 2026 PT PLN Nusa Daya
4. Rapat RUPS LPT Tahun 2026 PT PLN Nusa Daya
5. Rapat RUPS RKAP Tahun 2026 PT Paguntaka Cahaya Nusantara
6. Rapat RUPS LPT Tahun 2026 PT PLN Paguntaka Cahaya Nusantara

Board of Directors Meeting Plan for 2026

The Board of Directors' meeting plan for 2026, as set out in the Board of Directors' Agenda, comprises 28 meetings, with agenda items including the following:

1. Board of Directors Meeting
2. Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners
3. GMS Meeting on the 2026 WP&B of PT PLN Nusa Daya
4. GMS Meeting on the 2026 Annual Report of PT PLN Nusa Daya
5. GMS Meeting on the 2026 WP&B of PT Paguntaka Cahaya Nusantara
6. GMS Meeting on the 2026 Annual Report of PT PLN Paguntaka Cahaya Nusantara.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris berperan dalam memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS serta bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bekerja secara kolektif dan kolegial berdasarkan keputusan bersama. Dewan Komisaris juga menjaga independensi dengan menghindari benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan maupun operasional Perusahaan.

The Board of Commissioners carries out a supervisory role to ensure that the Company is managed in accordance with its objectives, the Articles of Association, and the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS and is responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners performs its functions collectively and collegially based on collective resolutions. The Board of Commissioners also maintains its independence by avoiding conflicts of interest that may compromise the objectivity of its supervisory function and the Company's operations.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang disahkan tanggal 15 Agustus 2024. Piagam Dewan Komisaris telah diperbaharui seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN yang terbit di tahun 2023.

Piagam Dewan Komisaris merupakan petunjuk tatalaksana kerja Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Piagam Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*. Dengan adanya piagam ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan bertindak dan bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku, kode etik, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris diantaranya adalah:
1. Organisasi Dewan Komisaris;
2. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak;
3. Mekanisme Kerja;
   a. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan;
   b. Penyelenggaraan Rapat;
   c. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
   d. Program Peningkatan Pengetahuan;
   e. Pelaporan Aktivitas Pengawasan Dewan Komisaris;

Board of Commissioners Charter

The implementation of the Board of Commissioners' duties and conduct is governed by the Board of Commissioners Charter, which was approved on 15 August 2024. The Board of Commissioners Charter has been updated following the issuance of the Minister of State-Owned Enterprises Regulations in 2023.

The Board of Commissioners Charter serves as a work reference that outlines the Board of Commissioners' work procedures in a structured, systematic, clear, and consistently implementable manner. Accordingly, the Charter serves as a reference for the Board of Commissioners in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission.

The Board of Commissioners Charter was prepared based on corporate law principles, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Through this Charter, the Board of Commissioners is expected to perform its duties and act in accordance with the applicable rules, code of ethics, and GCG best practices.

The scope regulated under the Board of Commissioners Charter includes:
1. Organisation of the Board of Commissioners;
2. Duties, Responsibilities, Obligations, and Rights;
3. Work Mechanism:
   a. Principles of decision-making;
   b. Meeting arrangements;
   c. Performance evaluation of the Board of Commissioners;
   d. Knowledge enhancement programme;
   e. Reporting of the Board of Commissioners' supervisory activities;

4. Etika Kerja:
   a. Standar Etika;
   b. Kerahasiaan Perusahaan;
   c. Benturan Kepentingan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga mengacu pada *Board Manual* PT PLN Nusa Daya Tahun 2024. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) adalah petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*. *Board Manual* ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sejalan yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris tahun 2024, Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan demi kepentingan Perusahaan. Dewan Komisaris bukan wakil Pemegang Saham sesuai pasal 85 ayat (4) UU PT yang melarang anggota Dewan Komisaris untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS.

2. Memberi nasihat kepada Direksi sesuai pasal 108 ayat (1) UU PT yang merupakan pencerminan sampai berapa jauh itikad baik dan kehati-hatian *(prudent)* Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk selalu menjalankan kegiatan usaha Perusahaan hanya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan (sebagai badan hukum) itu sendiri. Dewan Komisaris dilarang untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan untuk kepentingan Pemegang Saham tertentu atau pihak-pihak lainnya diluar dari kepentingan Perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan;

4. Work Ethics:
   a. Ethical standards;
   b. Company confidentiality;
   c. Conflicts of interest.

In addition, in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners also refers to the 2024 Board Manual of PT PLN Nusa Daya. The Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners serves as a working guideline for both boards by setting out the stages of activities in a structured, systematic, clear, and consistently applicable manner. Accordingly, the Board Manual serves as a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.

The Board Manual was prepared based on corporate law principles, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The Board Manual is intended to define the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in the performance of their duties, in order to support the professional, transparent, and efficient management of the Company.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners functions as a collegial organ, and no member may act individually other than based on resolutions of the Board of Commissioners. In accordance with the 2024 Board of Commissioners Charter, the Board of Commissioners has the following duties:

1. To supervise the Company for the benefit of the Company. The Board of Commissioners is not a representative of the Shareholders, in accordance with Article 85 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, which prohibits members of the Board of Commissioners from acting as proxies of Shareholders in voting at the GMS.
2. To provide advice to the Board of Directors in accordance with Article 108 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, which reflects the extent to which the Board of Commissioners exercises good faith and prudence in carrying out its supervisory function.

The Board of Commissioners is required to ensure that the Company's business activities conducted solely for the benefit of the Company and its business as a legal entity. The Board of Commissioners is prohibited from conducting the Company's business activities for the benefit of certain Shareholders or other parties outside the interests of the Company. Accordingly, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide direction to the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies;

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat. Hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti oleh Direksi;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS, termasuk kesimpulan mengenai keselarasan RKAP dengan RJPP;
4. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris disertai jumlah anggaran biaya, untuk menjadi bagian dari RKAP Tahunan yang disahkan dalam RUPS;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam:
   a. Kepatuhan Direksi menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
   b. Kepatuhan Direksi menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP;
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS atas gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut;
8. Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan, berdasarkan hasil telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi;
9. Mengusulkan remunerasi Direksi (gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta tantiem/insentif) kepada RUPS. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan perangkat di Komite Nominasi dan Remunerasi;
10. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
11. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi, kinerja Komite Dewan Komisaris serta melakukan *self assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham;
12. Mengusulkan calon Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usul dari Komite Audit;
13. Memastikan audit eksternal dan Audit Internal dilaksanakan secara efektif;

2. Examine, review, and sign the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Company Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors through internal discussions and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as recorded in the Minutes of Meetings. The review results on the draft RJPP shall be communicated to the Board of Directors for follow-up;
3. Provide opinions and recommendations to the GMS regarding the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Company Work Plan and Budget (RKAP) as consideration for GMS resolutions, including conclusions on the alignment between the RKAP and the RJPP;
4. Prepare the Board of Commissioners' work plan, together with the required budget, to form part of the Annual RKAP approved by the GMS;
5. Supervise the Board of Directors in relation to:
   a. The Board of Directors' compliance with the applicable laws and regulations and agreements with third parties;
   b. The Board of Directors' compliance in managing the Company in accordance with the RKAP and/or RJPP;
6. Monitor the development of the Company's activities and provide opinions and recommendations to the GMS on any matters deemed important to the management of the Company;
7. Immediately report to the GMS any indication of declining Company performance, together with recommendations for improvement that have been submitted to the Board of Directors to address the causes of such declining performance;
8. Propose candidates for members of the Board of Directors to the Shareholders in accordance with the established selection policies and criteria, based on the results of reviews and/or assessments conducted with the Nomination and Remuneration Committee;
9. Propose the remuneration of the Board of Directors, including salary, allowances, facilities, and tantiem/incentives, to the GMS. The proposal for performance-based tantiem/incentives takes into account the results of the Board of Directors' performance assessment (KPI) and the achievement of the Company's health level. The review process conducted by the Board of Commissioners is supported by the Nomination and Remuneration Committee;
10. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and sign the annual report;
11. Assess the performance of the Board of Directors, the performance of the Board of Commissioners Committees, and conduct a self-assessment of the Board of Commissioners' performance, and report the assessment results to the Shareholders;
12. Propose candidates for External Auditor to the GMS based on recommendations from the Audit Committee;
13. Ensure that external and internal audits are carried out effectively;

14. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) komisaris yaitu Komisaris Utama yang dijabat oleh Sdr. Agung Nugraha sehingga belum ada informasi mengenai pembagian tugas masing-masing Dewan Komisaris. Namun sebagai satu-satunya Komisaris di Perusahaan, beliau memiliki peran sentral dalam struktur Dewan Komisaris. Sebagai pemimpin Dewan Komisaris, Komisaris Utama bertanggung jawab untuk memimpin rapat Dewan Komisaris, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diterapkan oleh Direksi, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan pemegang saham serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta berperan aktif dalam memberikan arahan strategis kepada Direksi, menyarankan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan, dan menjaga komunikasi yang efektif antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, sehingga Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Sdr. Agung Nugraha sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 19 September 2023.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Komisaris selama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perusahaan selalu bertindak secara independen. Perusahaan telah menetapkan kriteria untuk pemenuhan independensi Komisaris Independen. Informasi terkait independensi Komisaris Independen Perusahaan adalah sebagai berikut:

14. Submit a report on the supervisory duties carried out during the previous financial year to the GMS.

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

As of the end of 2025, the Company had only 1 (one) Commissioner, namely the President Commissioner, held by Mr Agung Nugraha. Accordingly, there was no information regarding the division of duties among members of the Board of Commissioners. However, as the sole Commissioner of the Company, he holds a central role within the Board of Commissioners structure. As the leader of the Board of Commissioners, the President Commissioner is responsible for chairing Board of Commissioners meetings, supervising the implementation of policies carried out by the Board of Directors, and ensuring that resolutions adopted reflect the interests of Shareholders and comply with the applicable regulations. The President Commissioner also plays an active role in providing strategic direction to the Board of Directors, recommending corrective measures where necessary, and maintaining effective communication between the Board of Commissioners and the Shareholders.

Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2025, there was no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. Accordingly, the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya consisted of 1 (one) member, namely Mr Agung Nugraha as President Commissioner, pursuant to the Circular GMS dated 19 September 2023.

Term of Office of the Board of Commissioners

Pursuant to Article 14 paragraph 10 of the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners Charter, members of the Board of Commissioners serve a term of 4 (four) years, without prejudice to the authority of the GMS to discharge members of the Board of Commissioners at any time. Upon completion of their term of office, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) additional term.

Independence of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Company's Board of Commissioners consistently acts independently. The Company has established criteria to fulfil the independence requirements for Independent Commissioners. Information regarding the independence of the Company's Independent Commissioners is as follows:

1. Komisaris Independen bukan merupakan individu yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
2. Komisaris Independen tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen. Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait Pernyataan Independensi Komisaris Independen, terutama jika Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan, PT PLN Nusa Daya mengatur hal-hal berikut:
1. Dewan Komisaris harus memiliki kebijakan mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS. Surat pernyataan tersebut dibuat pada saat pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.
3. Dewan Komisaris membuat Pakta integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.
5. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dan dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Jika terjadi maka RUPS berhak memberhentikan salah satu dari mereka.

1. An Independent Commissioner is not an individual who has worked for, or has had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except in the case of reappointment as an Independent Commissioner for the following period.
2. An Independent Commissioner does not own shares, either directly or indirectly, in the Company.
3. An Independent Commissioner does not have any affiliation with the Company, the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.
4. An Independent Commissioner does not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Statement of Independence of the Board of Commissioners

As of the end of 2025, the Company did not have any Independent Commissioner. Accordingly, there is no relevant information regarding the Statement of Independence of Independent Commissioners, particularly for Independent Commissioners who have served for more than 2 (two) terms.

Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

In order to avoid conflicts of interest, PT PLN Nusa Daya regulates the following matters:
1. The Board of Commissioners shall have a policy on actual or potential conflicts of interest that may interfere with the implementation of its duties.
2. The Board of Commissioners shall sign a statement declaring that it has no conflict of interest and shall disclose in writing any matters that may potentially give rise to a conflict of interest concerning itself, and submit such statement to the GMS. The statement shall be prepared upon appointment and updated at the beginning of each year.
3. The Board of Commissioners shall prepare an Integrity Pact attached to the Proposed Actions of the Board of Directors that require recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS.
4. The Board of Commissioners is required to report to the Company, through the Corporate Secretary, its and/or its family members' share ownership in the Company and other companies, for recording in the Special Register.
5. Members of the Board of Commissioners, as well as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, are prohibited from having family relationships up to the third degree, whether in a direct or collateral line, including relationships arising from marriage. In the event that such relationship exists, the GMS has the right to discharge one of the relevant parties.

6. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi atau jabatan lainnya di perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

7. Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengalami (potensi) benturan kepentingan, terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

6. Commissioners are prohibited from concurrently serving as members of the Board of Directors or holding other positions in other companies, whether private or state-owned, if such positions may give rise to a conflict of interest.
7. If, during the performance of their duties, the Board of Commissioners experiences an actual or potential conflict of interest, a written statement regarding such matter shall be prepared by the Board of Commissioners and submitted to the Shareholders.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sejalan dengan Piagam Dewan Komisaris, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan mewajibkan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain. berikut informasi kepemilikan Saham Dewan Komisaris perusahaan hingga akhir Desember 2025:

Share Ownership of the Board of Commissioners

In accordance with the Board of Commissioners Charter, and in order to avoid conflicts of interest, the Company requires the Board of Commissioners to report their own and/or their family members' share ownership in the Company and other companies to the Company through the Corporate Secretary, to be recorded in the Special Register. Information regarding the share ownership of the Company's Board of Commissioners as of the end of December 2025 is presented as follows:

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership							
	Pribadi Pada Perusahaan Personal Ownership in the Company		Keluarga pada Perusahaan Family Ownership in the Company		Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal Ownership in Other Companies		Keluarga pada Perusahaan Lain Family Ownership in Other Companies	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Agung Nugraha	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan fungsinya dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap bulan dan apabila dipandang perlu dapat mengundang Direksi dan/atau narasumber dari luar Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam setahun. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dilaporkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Implementation of Board of Commissioners Duties in 2025

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners carried out its functions through the following duties and responsibilities:

Board of Commissioners Meetings

The Board of Commissioners meeting policy is stipulated in the Board of Commissioners Charter. In accordance with this policy, Board of Commissioners meetings are held at least once every month and, if deemed necessary, may invite the Board of Directors and/or external resource persons.

Each member of the Board of Commissioners is required to attend at least 75% of meetings in a year. The frequency of Board of Commissioners meetings and the attendance of Board of Commissioners members are disclosed in the Company's Annual Report.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat.

A Board of Commissioners meeting is valid and authorised to adopt binding resolutions if attended or represented by more than 1/2 of the total the Board of Commissioners members. Board of Commissioners meetings may be held through teleconference, video conference, or other electronic media that enable all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Pelaksanaan Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 46 yang terdiri dari 20 rapat internal Dewan Komisaris, 24 kali rapat Bersama Direksi dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners

In 2025, the Board of Commissioners held 65 meetings, consisting of 30 internal meetings of the Board of Commissioners, 33 joint meetings with the Board of Directors, and 2 Annual General Meetings of Shareholders of the Company, with the following attendance rate:

Nama/Jabatan Name/ Position	**Masa Jabatan** Term of Period	**Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris** BoC Attendance at the Internal BoC Meetings			**Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris mengundang Direksi)** BoC Attendance at the Joint Meetings (BoD Invitation by the BoC)			**Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat RUPS Tahunan** BoC Attendance at the Annual GMS		
		Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Atten-dances	**Tingkat Kehadiran** Atten-dance Rat	**Jumlah Wajib Rapat** Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Atten-dances	**Tingkat Kehadiran** Atten-dance Rat	**Jumlah Wajib Rapat** Total Required Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Atten-dances	**Tingkat Kehadiran** Atten-dance Rat
Agung Nugraha/ Komisaris Utama President Commissioner	19 September 2023-19 September 2027	20	20	100%	24	24	100%	2	2	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance Rate of the Board of Commissioners				100%			100%			100%

Rekomendasi, Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya telah mengeluarkan berbagai rekomendasi, keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris diantaranya terkait:

1. Penetapan Nominated Talent PT PLN Nusa Daya tanggal 25 Maret 2025.
2. Usulan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Tahun Buku 2025 tanggal 4 Juni 2025.
3. Rekomendasi Penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 tanggal 17 Juni 2025.
4. Rekomendasi Tantiem dan Bonus Tahun 2024 serta Remunerasi Direksi Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025.
5. Persetujuan RKAP Tahun 2026 PT PLN Nusa Daya tanggal 31 Oktober 2025.
6. Persetujuan Usulan Investasi Penambahan Modal PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) tanggal 17 November 2025.
7. Persetujuan Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2025 tanggal 16 Desember 2025.

Recommendations, Resolutions, and Approvals of the Board of Commissioners

Throughout 2025, the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya issued various recommendations, resolutions and approvals, including those relating to:

1. Determination of Nominated Talent of PT PLN Nusa Daya dated 25 March 2025.
2. Proposal for the Public Accounting Firm for the Audit of the 2025 Financial Year dated 4 June 2025.
3. Recommendation on the Determination of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year dated 17 June 2025.
4. Recommendation on Tantiem and Bonuses for 2024 and Remuneration of the Board of Directors for 2025 dated 17 June 2025.
5. Approval of the 2026 WP&B of PT PLN Nusa Daya dated 31 October 2025.
6. Approval of the Proposed Capital Injection Investment in PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) dated 17 November 2025.
7. Approval of the Management Report for the Third Quarter of 2025 dated 16 December 2025.

8. Rekomendasi Usulan Dewan Komisaris PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) tanggal 31 Desember 2025.

Pelatihan dan Program Orientasi Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang optimal, Perusahaan senantiasa memfasilitasi pelatihan dan orientasi bagi Dewan Komisaris.

Kebijakan Pelatihan dan Orientasi Dewan Komisaris

Kebijakan pelatihan dan orientasi/pengenalan Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Peningkatan pengetahuan anggota Dewan Komisaris dalam rangka mengikuti perkembangan dalam bidang industri terkait PLN Nusa Daya dan meningkatkan pengetahuan bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Adapun untuk program Orientasi/Pengenalan Dewan Komisaris diperuntukan untuk Dewan Komisaris yang baru diangkat. Sejalan dengan piagam Dewan Komisaris anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak pengangkatannya. Penyelenggaraan program pengenalan merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Program pengenalan harus dapat memberikan pemahaman yang memadai mengenai bidang usaha Perusahaan, proses bisnis yang dilakukan, pesaing usaha, *key success factor* serta hal-hal lain yang perlu diketahui oleh anggota Dewan Komisaris yang baru, yang mencakup namun tidak terbatas hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya, tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
5. Penjelasan mengenai *stakeholder* utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

8. Recommendation on the Proposed Board of Commissioners of PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) dated 31 December 2025.

Training and Orientation Programme for the Board of Commissioners

To support the optimal implementation of the Board of Commissioners' duties, the Company consistently facilitates training and orientation programmes for the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Training and Orientation Policy

The training and orientation/induction policy for the Board of Commissioners is stipulated in the Board of Commissioners Charter. Knowledge enhancement for members of the Board of Commissioners is carried out to enable them to keep updated of developments in industries relevant to PLN Nusa Daya and to strengthen the knowledge of each Board of Commissioners member.

The orientation/induction programme is intended for newly appointed members of the Board of Commissioners. In accordance with the Board of Commissioners Charter, newly appointed members of the Board of Commissioners are required to receive an induction programme on the Company no later than 1 (one) month after their appointment. The implementation of the induction programme is the responsibility of the Corporate Secretary. The Board of Commissioners shall notify the Board of Directors to organise an induction programme for newly appointed members of the Board of Commissioners.

The induction programme shall provide adequate understanding of the Company's business fields, business processes, competitors, key success factors, and other matters that newly appointed members of the Board of Commissioners need to understand, including but not limited to:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company;
2. Overview of the Company, including its vision and mission, values and culture, objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information on delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited matters;
5. Explanation of the Company's key stakeholders and corporate social responsibility.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan dengan pejabat-pejabat penting didalam dan diluar lingkungan Perusahaan, kunjungan ke unit usaha, dan program lain sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan Program Orientasi/Pengenalan Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, tidak terdapat pengangkatan Dewan Komisari baru sehingga tidak ada informasi terkait program pengenalan Dewan Komisaris Perusahaan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris serta Masing-Masing Dewan Komisaris

Hingga akhir 2025, Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya terdiri dari satu orang, yaitu Sdr. Agung Nugraha, yang menjabat sebagai Komisaris Utama. Oleh karena itu, informasi terkait penilaian kinerja masing-masing Dewan Komisaris mencakup prosedur, kriteria, dan pihak yang terlibat penilaian masih bersifat kolegial sebagai berikut:

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Sejalan dengan kebijakan tersebut, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris dan individu anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS. Evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self Assessment* kinerja Dewan Komisaris. *Self Assessment* kinerja Dewan Komisaris dijelaskan rinci dalam SK Penetapan Sistem *Self Assessment* Kinerja Dewan Komisaris. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

The induction programme may take the form of presentations, meetings with key officials within and outside the Company, visits to business units, and other programmes as required.

Implementation of the Board of Commissioners Orientation/Induction Programme

Throughout 2025, there were no appointments of new members of the Board of Commissioners. Accordingly, there is no information regarding the Company's Board of Commissioners induction programme.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Individual Members

As of the end of 2025, the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya consisted of 1 (one) member, namely Mr. Agung Nugraha, who served as President Commissioner. Accordingly, information on the performance assessment of individual Board of Commissioners members, including the procedures, criteria, and assessing parties involved, is still conducted on a collegial basis, as described below:

Board of Commissioners Performance Assessment Policy and Procedure

The policy on the performance assessment/evaluation of the Board of Commissioners is stipulated in the Board of Commissioners Charter. In accordance with this policy, the performance evaluation of the Board of Commissioners is set out in the form of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners and individual members, which are proposed by the Board of Commissioners for approval by the GMS. The performance evaluation of each member of the Board of Commissioners is conducted through the Board of Commissioners self-assessment mechanism. The Board of Commissioners self-assessment mechanism is further detailed in the Decree on the Determination of the Board of Commissioners Performance Self-Assessment System. In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations set out in the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and mandates from the Shareholders.

The evaluation results of the overall performance of the Board of Commissioners and the individual performance of each member of the Board of Commissioners form an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Commissioners. The individual performance evaluation results of each member of the Board of Commissioners also serve as one of the bases for Shareholders to consider the dismissal and/or reappointment of the relevant member of the Board of Commissioners. The performance evaluation results serve as a basis for assessing and improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sejalan dengan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk *Key Performance Indicators* (KPI), sehingga kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang terdapat pada KPI sebagai berikut:

1. *Review* dan Tanggapan atas Rencana Perusahaan;
2. *Review* dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan;
3. *Review* Kegiatan Audit Internal/eksternal, antara lain: PKPT, tindak lanjut hasil/temuan Audit Internal/ eksternal;
4. Memberi Tanggapan Tertulis/Persetujuan/Nasehat/ Saran terkait Rencana Strategis Perusahaan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris/RUPS;
5. Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan;
6. Menyampaikan Pendapat/Usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS;
7. Menyampaikan Laporan tentang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
8. Rapat Dewan Komisaris;
9. Pengenalan/Induksi/Peningkatan Kompetensi.

Pihak Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sejalan dengan piagam Dewan Komisaris, kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS yang dituangkan dalam risalah RUPS.

Penilaian kinerja Direksi serta Masing-Masing Direksi

Kebijakan dan Prosedur Penilaian kinerja Direksi serta Masing-Masing Direksi

Kebijakan penilaian kinerja Direksi (Kolegial) serta masing-masing Direksi (Individu) diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi dan *Board Manual*/ Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Sejalan dengan kebijakan tersebut, salah satu tugas komisaris adalah melakukan penilaian atas kinerja Direksi, kinerja Komite Dewan Komisaris dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham. Penilaian kinerja Direksi serta masing-masing Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dan individu dengan realisasi pencapaiannya.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

In accordance with the Board of Commissioners performance assessment policy as stipulated in the Board of Commissioners Charter, the performance evaluation of the Board of Commissioners is set out in the form of Key Performance Indicators (KPI). The Board of Commissioners performance assessment criteria, as reflected in the KPI, are as follows:

1. Review and response to the Company's plans;
2. Review and response to the Company's performance;
3. Review of internal/external audit activities, including the Annual Audit Work Programme (PKPT) and follow-up of internal/external audit results/findings;
4. Provision of written responses/approvals/advice/ recommendations related to the Company's strategic plans that require approval from the Board of Commissioners/GMS;
5. Submission of the annual work programme and KPI of the Board of Commissioners;
6. Submission of opinions/proposals of the Board of Commissioners to the Shareholders/GMS;
7. Submission of reports on the Board of Commissioners' supervisory duties;
8. Board of Commissioners meetings;
9. Orientation/induction/competency development.

Assessing Party for the Board of Commissioners Performance Assessment

In accordance with the Board of Commissioners Charter, the performance of the Board of Commissioners and its members is evaluated by the Shareholders through the GMS and documented in the minutes of the GMS.

Performance Assessment of the Board of Directors and Individual Directors

Policy and Procedure for the Performance Assessment of the Board of Directors and Individual Directors

The performance assessment policy for the Board of Directors collegially and for each Director individually is stipulated in the Board of Commissioners Charter, the Board of Directors Charter, and the Board Manual/ Work Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In accordance with these policies, one of the duties of the Board of Commissioners is to assess the performance of the Board of Directors and the performance of Board of Commissioners Committees, and to report the assessment results to the Shareholders. The performance assessment of the Board of Directors and each Director is based on a review of the criteria, targets, and key performance indicators set out in the Board of Directors Management Contract, both collegially and individually, against their actual achievements.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan khususnya bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

The evaluation results of the overall performance of the Board of Directors and the individual performance of each member of the Board of Directors form an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Directors. The individual performance evaluation results of each member of the Board of Directors also serve as one of the bases, particularly for the Shareholders, to consider the dismissal and/or reappointment of the relevant member of the Board of Directors. The performance evaluation results serve as a means to assess and improve the effectiveness of the Board of Directors.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Kolegial dan Individual

Sejalan dengan kebijakan penilaian kinerja Direksi yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi, Kriteria evaluasi kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) setidak-tidaknya sebagai berikut:

Collegial and Individual Performance Assessment Criteria for the Board of Directors

In accordance with the Board of Directors performance assessment policy as stipulated in the Board of Commissioners Charter and the Board of Directors Charter, the performance evaluation criteria for the Board of Directors are determined by the GMS based on Key Performance Indicators (KPI), which at least include the following:

Tabel Kriteria Penilaian Kinerja Direksi (Kolegial) dan Masing-Masing Direksi (Individual)
Table of Performance Assessment Criteria for the Board of Directors Collegially and Individual Directors

Kolegial dan Direktur Utama Collegial and President Director	Direktur Operasi & Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	Direktur Keuangan & Administrasi Director of Finance and Administration
1. ***Economic and Social Value:*** EBITDA; Operating Ratio; ROIC; EAF Pembangkit AMC; EFOR Pembangkit AMC; SFC Pembangkit AMC; Response Time atas Gangguan; Recovery Time atas Gangguan; Advancing in Sustainable Development Goals (SDGs); dan Umur Piutang Usaha. 2. ***Business Model Innovation:*** Pendapatan dari Luar PLN Group (beyond kWh; dan Sinergi antar Subholding dan Anak Perusahaan. 3. ***Technology Leadership:*** SAIDI dan SAIFI. 4. ***Energize Investment:*** Pencapaian SLA (Service Level Agreement); dan Pengendalian Penggunaan Anggaran Kas Investasi. 5. ***Unleash Talent:*** Talent Diversity (Millennials & Women); Human Capital Readiness (HCR) & Organizational Capital Readiness (OCR); dan Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) 6. ***Compliance:*** Implementasi GCG; Compliance (Zero Fatality, Kepatuhan K3L, SPI, Reporting, Busdev Alignment).	1. **KPI Bersama:** EBITDA, Operating Ratio, ROIC, Umur Piutang Usaha, Lost Time Injury Frequency Rate. 2. **KPI Direktorat:** EAF Pembangkit AMC; EFOR Pembangkit AMC; SFC Pembangkit AMC; Response Time atas Gangguan; Recovery Time atas Gangguan; Maturity Level Sustainability; Pengelolaan Komunikasi & TJSL; Penggunaan Kendaraan Operasional EV; Penambahan Kontrak Baru di Luar PLN Group; Penyelesaian Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi untuk Layanan off grid; Piloting/ Kerjasama Pengembangan Bisnis Bersama Startup; Pendapatan dari luar PLN Group (beyond kWh); Sinergi antar SUb Holding, Anak Perusahaal Lain & Pusharlis; SAIDI; SAIFI; SLA; Pengendalian penggunaan Anggaran Kas Investasi sesuai RKAP 2025; dan *Compliance* (GCG; Kepatuhan HSSE, Auditor; Repoerting; Busdev Alignment; PACA; Critical Event)	1. **KPI Bersama:** EBITDA, Operating Ratio, ROIC, Umur Piutang Usaha, Lost Time Injury Frequency Rate. 2. **KPI Direktorat:** Maturity Level Sustainability; Pengelolaan Komunikasi & TJSL; Pencapaian Pelaksanaan Roadmap Perbaikan Manajemen Risiko SH/AP; Pendapatan dari luar PLN Group (beyond kWh); Sinergi an tar Sub Holding. Anak Perusahaan Lain & Pusharlis; Pengendalian penggunaan Anggaran Kas Investasi sesuai RKAP 2025; Talent Diversity (Millenials. Women); Human Cap ital Readiness (HCR) & Organizational Capital Readiness (OCR) dan Produkt1fitas Peaawai; dan Compliance (GCG. Kepatuhan HSSE. Auditor. Reporting. Busdev Alignment. PACA. Critical Event)

Tabel Kriteria Penilaian Kinerja Direksi (Kolegial) dan Masing-Masing Direksi (Individual)
Table of Performance Assessment Criteria for the Board of Directors Collegially and Individual Directors

Kolegial dan Direktur Utama Collegial and President Director	Direktur Operasi & Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	Direktur Keuangan & Administrasi Director of Finance and Administration
3. Economic and Social Value: EBITDA; Operating Ratio; ROIC; EAF of AMC Power Plants; EFOR of AMC Power Plants; SFC of AMC Power Plants; Response Time for Disturbances; Recovery Time for Disturbances; Advancing in Sustainable Development Goals (SDGs); and Ageing of Trade Receivables. 4. Business Model Innovation: Revenue from Outside PLN Group (beyond kWh); and Synergy among Subholdings and Subsidiaries. 5. Technology Leadership: SAIDI and SAIFI. 6. Energize Investment: Achievement of SLA (Service Level Agreement); and Control over the Use of Investment Cash Budget. 7. Unleash Talent: Talent Diversity (Millennials & Women); Human Capital Readiness (HCR) & Organisational Capital Readiness (OCR); and Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR). 8. Compliance: GCG Implementation; Compliance (Zero Fatality, OHS Compliance, SPI, Reporting, and Business Development Alignment).	1. Shared KPIs: EBITDA, Operating Ratio, ROIC, Ageing of Trade Receivables, and Lost Time Injury Frequency Rate. 2. Directorate KPIs: EAF of AMC Power Plants; EFOR of AMC Power Plants; SFC of AMC Power Plants; Response Time for Disturbances; Recovery Time for Disturbances; Sustainability Maturity Level; Communication & CSR Management; Use of EV Operational Vehicles; Addition of New Contracts Outside PLN Group; Completion of Decarbonisation Business Development for Off-Grid Services; Piloting/Collaboration for Business Development with Startups; Revenue from Outside PLN Group (beyond kWh); Synergy among Subholdings, Other Subsidiaries & Pusharlis; SAIDI; SAIFI; SLA; Control over the Use of Investment Cash Budget in accordance with the 2025 WP&B; and Compliance (GCG, HSSE Compliance, Audit, Reporting, Business Development Alignment, PACA, and Critical Events).	1. Shared KPIs: EBITDA, Operating Ratio, ROIC, Ageing of Trade Receivables, and Lost Time Injury Frequency Rate. 2. Directorate KPIs: Sustainability Maturity Level; Communication & CSR Management; Achievement of the SH/AP Risk Management Improvement Roadmap; Revenue from Outside PLN Group (beyond kWh); Synergy among Subholdings, Other Subsidiaries & Pusharlis; Control over the Use of Investment Cash Budget in accordance with the 2025 WP&B; Talent Diversity (Millennials, Women); Human Capital Readiness (HCR) & Organisational Capital Readiness (OCR) and Employee Productivity; and Compliance (GCG, HSSE Compliance, Audit, Reporting, Business Development Alignment, PACA, and Critical Events).

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Hingga akhir Desember 2025, Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya dibantu oleh 3 (tiga) Komite:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan prosedur penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan piagam masing-masing Komite Dewan Komisaris. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite Audit mencakup poin-poin (1) efektivitas Komite; (2) pelaksanaan tugas Komite; (3) pengembangan profesi; (4) *review* Laporan Keuangan; (5) *review* manajemen risiko dan pengendalian internal; (6) *review* audit eksternal; (7) pelaksanaan rapat; (8) pengembangan kompetensi dan (9) *review* pengendalian internal.

Performance Assessment of Board of Commissioners Committees

As of the end of December 2025, the Board of Commissioners of PLN Nusa Daya was assisted by 3 (three) Committees:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee;
3. Risk Management and Compliance Committee.

Policy and Procedure for Performance Assessment of Board of Commissioners Committees

The policy and procedure for performance assessment of the Board of Commissioners Committees are stipulated in the Board of Commissioners Charter and the respective Charters of the Board of Commissioners Committees. In accordance with these policies, the Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Commissioners Committees and reports the assessment results to the Shareholders. The Board of Commissioners' assessment of the Audit Committee's performance covers the following aspects: (1) Committee effectiveness; (2) implementation of Committee duties; (3) professional development; (4) review of Financial Statements; (5) review of risk management and internal control; (6) review of external audit; (7) meeting implementation; (8) competency development; and (9) review of internal control.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja kinerja Komite Audit dijelaskan lebih lanjut pada masing-masing bab Komite Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Pihak Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Sejalan dengan Piagam Dewan Komisaris, pihak yang melakukan penilaian kinerja Komite adalah Dewan Komisaris Perusahaan yang selanjutnya hasil penilaian kimite tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham.

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2026

Sejalan dengan program Kerja Dewan Komisaris tahun 2026, Dewan Komisaris merencanakan rapat sebanyak 44 kali rapat dengan pembahasan agenda rapat antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2025;
2. Pembahasan PKPT tahun 2025;
3. Rapat Kerja tahun 2025 PLN Nusa Daya;
4. Diskusi Internal Dewan Komisaris (beberapa kali);
5. *Entry* Meeting dengan Auditor Eksternal;
6. Finalisasi tanggapan Dewan Komisaris terhadap RKAP 2025 PT PLN Nusa Daya;
7. Penyusunan Telaahan RKAP PLN Nusa Daya Tahun 2025;
8. Penyusunan Telaahan RJPP Tahun 2024–2028 PLN Nusa Daya;
9. Pembahasan Usulan RKAP 2026/RJPP (jika ada);
10. Menyampaikan *timeline* pembahasan RKAP 2026;
11. Pembahasan Usulan awal RKAP 2026;
12. Pembahasan Usulan RKAP 2026 (Hasil Pembahasan Teknis);
13. Evaluasi Pencapaian Kinerja bulanan;
14. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya;
15. Pembahasan Laporan Manajemen Tahun 2024;
16. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulanan dan Semesteran Tahun 2024;
17. Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan dan Semesteran Tahun 2024;
18. Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan III 2025;
19. Dan Isu Strategis Lainnya.

Performance Assessment Criteria for Board of Commissioners Committees

The performance assessment criteria for the Audit Committee are further described in the respective chapters on Board of Commissioners Committees in this Annual Report.

Assessing Party for the Performance Evaluation of Board of Commissioners Committees

In accordance with the Board of Commissioners Charter, the performance assessment of the Committees is conducted by the Company's Board of Commissioners, and the assessment results are subsequently submitted to the Shareholders.

Board of Commissioners Meeting Plan for 2026

In accordance with the Board of Commissioners Work Programme for 2026, the Board of Commissioners plans to hold 44 meetings with agenda items including:

1. Preparation of the 2025 Board of Commissioners meeting programme and agenda;
2. Discussion of the 2025 Annual Audit Work Programme (PKPT);
3. 2025 Work Meeting of PLN Nusa Daya;
4. Internal discussions of the Board of Commissioners on several occasions;
5. Entry meeting with the External Auditor;
6. Finalisation of the Board of Commissioners' response to the 2025 RKAP of PT PLN Nusa Daya;
7. Preparation of the Board of Commissioners' review of the 2025 RKAP of PLN Nusa Daya;
8. Preparation of the Board of Commissioners' review of the 2024–2028 RJPP of PLN Nusa Daya;
9. Discussion of the proposed 2026 RKAP/RJPP, if any;
10. Submission of the timeline for the 2026 RKAP discussion;
11. Discussion of the initial proposed 2026 RKAP;
12. Discussion of the proposed 2026 RKAP based on the technical discussion results;
13. Evaluation of monthly performance achievement;
14. Follow-up on previous meetings;
15. Discussion of the 2024 Management Report;
16. Discussion of quarterly and semi-annual Management Reports for 2024;
17. Discussion of quarterly and semi-annual Risk Management Reports for 2024;
18. Discussion of the Q3 2025 Risk Management Report;
19. Other strategic issues.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of The Board of Directors and The Board of Commissioners

Kebijakan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya mengacu pada berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, yang diterbitkan pada 20 Maret 2023;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Board Manual;
5. Piagam Direksi;
6. Piagam Dewan Komisaris.

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan Perusahaan sepenuhnya ditetapkan oleh Pemegang Saham. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya mengacu pada berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, yang diterbitkan pada 20 Maret 2023;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. *Board Manual;*
5. Piagam Direksi;
6. Piagam Dewan Komisaris;
7. Surat Pemegang Saham No.54729/MNJ.01.02/F010000000/2024-SR tanggal 24 September perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Penetapan Tantiem 2023, dan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya.

Policy on the Nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PT PLN Nusa Daya's policy on the nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the following policies:

1. Limited Liability Company Law;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, issued on 20 March 2023;
3. The Company's Articles of Association;
4. Board Manual;
5. Board of Directors Charter; and
6. Board of Commissioners Charter.

Procedures for the Nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is fully determined by the Shareholders. The appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must fulfil the requirements applicable at the time of appointment in accordance with the prevailing regulations. The nomination and selection process for the Board of Commissioners is carried out through proposals from the Shareholders to the General Meeting of Shareholders (GMS), taking into account recommendations from the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee.

Remuneration Policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners

PT PLN Nusa Daya's remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the following policies:

1. Limited Liability Company Law;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, issued on 20 March 2023;
3. The Company's Articles of Association;
4. Board Manual;
5. Board of Directors Charter;
6. Board of Commissioners Charter; and
7. Shareholders' Letter Number 54729/MNJ.01.02/F010000000/2024-SR dated 24 September concerning the Determination of the Allocation of Net Profit for 2023, Determination of Tantiem for 2023, and Remuneration for 2024 for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya.

Prosedur dan Indikator Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya dilakukan melalui prosedur yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini mencakup beberapa langkah, yaitu:

1. Evaluasi Kinerja: Penetapan remunerasi diawali dengan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan indikator sebagai berikut:
    a. Capaian kinerja tahunan yaitu KPI Kolegial/Individu baik KPI Direksi maupun Dewan Komisaris;
    b. Kinerja operasi dan keuangan Perseroan ;
    c. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
    d. Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya;
    e. Penghasilan tahun sebelumnya;
    f. Kondisi persaingan usaha (*competitiveness)*;
    g. Kompleksitas usaha; dan
    h. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usulan Direksi: hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk meminta rekomendasi dan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kajian Dewan Komisaris: Usulan Direksi tersebut dikaji ulang oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Dewan Komisaris yang selanjutnya rekomendasi ini disampaikan kepada RUPS untuk disetujui.
4. Persetujuan RUPS: RUPS memberikan persetujuan terhadap usulan remunerasi yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris.
5. Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Sejalan dengan surat Pemegang Saham No.71800/MNJ.01.02/F010000000/2025-SR tanggal 31 Desember 2025 perihal Penetapan Bonus Kinerja 2024, dan Gaji/Honorarium Serta Tunjangan dan Fasilitas Tahun 2025 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya, struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Procedures and Indicators for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya is carried out through transparent procedures in accordance with the applicable regulations. These procedures comprise several steps, namely:

1. Performance Evaluation: The determination of remuneration begins with an evaluation of the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the following indicators:
    a. Annual performance achievements, namely collegial/individual KPIs for both the Board of Directors and the Board of Commissioners;
    b. The Company's operational and financial performance;
    c. The Company's financial condition and capacity, including consideration of the Company's long-term objectives and strategies;
    d. Fairness compared with peer companies;
    e. Income in the previous year;
    f. Business competition conditions or competitiveness;
    g. Business complexity; and
    h. The applicable laws and regulations.
2. Proposal by the Board of Directors: the evaluation results are submitted to the Board of Commissioners to request recommendations and approval from the Board of Commissioners.
3. Review by the Board of Commissioners: the proposal of the Board of Directors is reviewed by the Board of Commissioners, after which the recommendation is submitted to the GMS for approval.
4. Approval by the GMS: the GMS grants approval for the remuneration proposal submitted by the Board of Commissioners.
5. Remuneration Structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Compensation Structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners

In accordance with Shareholder Letter No. 71800/MNJ.01.02/F010000000/2025-SR dated 31 December 2025 regarding the Determination of the 2024 Performance Bonus, and the 2025 Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya, the remuneration structure of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 was as follows:

Keterangan Description	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure for the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure for the Board of Directors
Struktur Remunerasi Jangka Pendek Short-Term Remuneration Structure	1. Honorarium 2. Tantiem 3. Tunjangan Hari Raya | Religious Holiday Allowance 4. Tunjangan Perumahan | Housing Allowance 5. Asuransi Purna Jabatan | Post-Employment Insurance 6. Fasilitas Kesehatan | Healthcare Facilities 7. Bantuan Hukum | Legal Assistance	1. Gaji 2. Tantiem 3. Tunjangan Hari Raya | Religious Holiday Allowance 4. Tunjangan Perumahan | Housing Allowance 5. Asuransi Purna Jabatan | Post-Employment Insurance 6. Fasilitas Kesehatan | Healthcare Facilities 7. Bantuan Hukum | Legal Assistance
Struktur Remunerasi Jangka Panjang Long-Term Remuneration Structure	Hingga akhir tahun 2025, PT PLN Nusa Daya belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka Panjang untuk Dewan Komisaris. As at the end of 2025, PT PLN Nusa Daya had not implemented remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Commissioners.	Hingga akhir tahun 2025, PT PLN Nusa Daya belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka Panjang untuk Direksi. As at the end of 2025, PT PLN Nusa Daya had not implemented remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Directors.

Komponen Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025

Remuneration Components for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2025

	Komponen Remunerasi Remuneration Component	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun 2025 (Rp juta) Amount Received in 2025 (Rp million)	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Honorarium/Gaji per tahun Annual Honorarium/Salary	669.600.000	4.017.600.000
2	Tantiem	378.625.000	2.114.700.000
3	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	55.800.000	334.800.000
4	Tunjangan Perumahan per tahun Annual Housing Allowance	0	810.000.000
5	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Asuransi (premi asuransi maks. 25% dari gaji/honorarium dalam 1 tahun). Insurance (insurance premium of a maximum of 25% of salary/honorarium in 1 year).	Asuransi (premi asuransi maks. 25% dari gaji/honorarium dalam 1 tahun). Insurance (insurance premium of a maximum of 25% of salary/honorarium in 1 year).
6	Fasilitas Kesehatan Healthcare Facilities	Rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat, dan medical check-up 1 (satu) kali setahun termasuk kepada seorang istri/suami dan maks. 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Outpatient care and medication, inpatient care and medication, and 1 (one) medical check-up per year, including for a spouse and a maximum of 3 (three) children under the age of 25, who are not employed and are unmarried.	Rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat, dan medical check-up 1 (satu) kali setahun termasuk kepada seorang istri/suami dan maks. 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Outpatient care and medication, inpatient care and medication, and 1 (one) medical check-up per year, including for a spouse and a maximum of 3 (three) children under the age of 25, who are not employed and are unmarried.
6	Bantuan Hukum Legal Assistance	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. In the event of any action/conduct carried out for and on behalf of their position in relation to the Company's purposes and objectives as well as business activities.	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. In the event of any action/conduct carried out for and on behalf of their position in relation to the Company's purposes and objectives as well as business activities.

Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025

Remuneration of Each Member of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah diterima dalam 1 Tahun 2025 (Rp Juta) Amount Received in 2025 (Rp million)			
			Honorarium/ Gaji Honorarium/ Salary	Tantiem	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Agung Nugraha	Komisaris Utama President Commissioner	19 September 2023-19 September 2027	669.600.000	378.625.000	55.800.000	-
Direksi Board of Directors						
Feby Joko Priharto	Direktur Utama President Director	03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2027 3 August 2023-3 August 2027	1.488.000.000	777.000.000	124.000.000	270.000.000
Reny Wahyu Setiawan	Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha Director of Operations and Business Development	03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2027 3 August 2023-3 August 2027	1.264.800.000	668.850.000	105.400.000	270.000.000
Zulhendri	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	12 November 2020 – 12 November 2024 3 August 2023-3 August 2027	1.264.800.000	668.850.000	105.400.000	270.000.000

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Nusa Daya.

Non-Performance Based Bonus and Stock Options

As at the reporting period, no non-performance bonuses or share option offers had been granted to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Nusa Daya.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of The Board of Commissioners and Board of Directors

PT PLN Nusa Daya tidak memiliki kebijakan formal terkait keberagaman dalam Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan ketentuan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya merupakan hak Pemegang Saham Mayoritas yaitu PT PLN (Persero). Namun, Perusahaan mengakui pentingnya keberagaman dalam pengelolaan Perusahaan, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun usia. Keberagaman ini mencakup berbagai bidang keahlian, seperti Teknik Mesin, Keuangan, Akuntansi, serta Teknik Listrik dan Elektro, yang diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, keberagaman tersebut dapat mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih efektif, objektif, dan responsif terhadap dinamika bisnis serta kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan latar belakang profesional, pendidikan, dan pengalaman yang beragam, Dewan Komisaris dan Direksi mampu memperkaya kualitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan sehingga mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Informasi mengenai pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada Bab Profil Perusahaan, khususnya pada Subbab Profil Dewan Komisaris dan Subbab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PT PLN Nusa Daya does not have a formal policy regarding diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners. This is because the determination of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is entirely the right of the Majority Shareholder, PT PLN (Persero). However, the Company recognises the importance of diversity in the management of the Company, both in terms of educational background and age. This diversity includes various fields of expertise, such as Mechanical Engineering, Finance, Accounting, and Electrical and Electrical Engineering, which are expected to enrich perspectives in strategic decision-making.

In addition, age diversity is also an important factor in organisational dynamics, with members of the Board of Commissioners and Board of Directors coming from various age ranges, allowing for a balance between experience and innovation. While there is no explicit policy on this, the company sets objective indicators that focus on utilising the expertise of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners to support more informed and efficient decisions and ensure better management effectiveness.

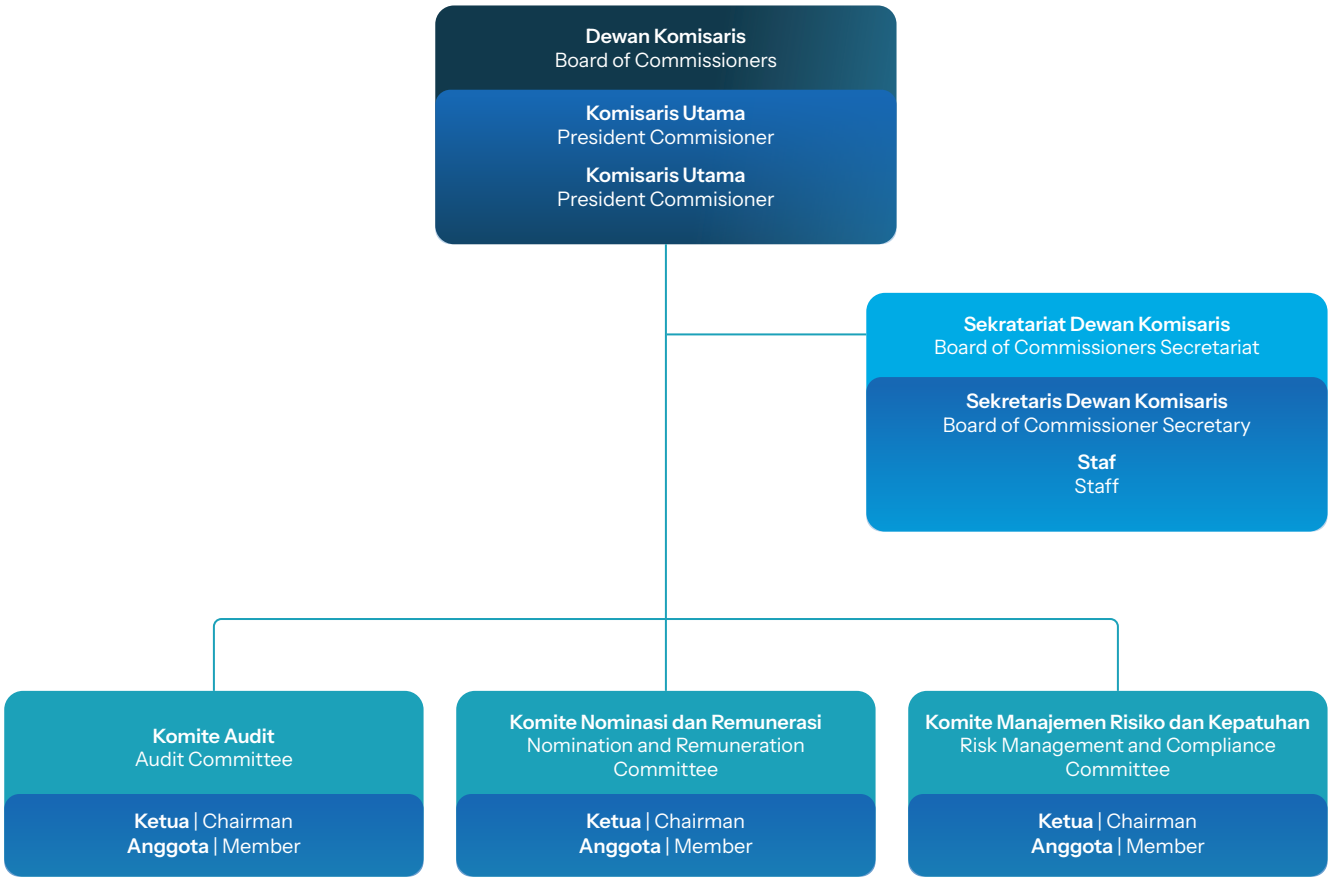
Information related to the Education, Age and Work Experience of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners can be seen in the Company Profile Chapter in the Directors Profile Sub Chapter and the Board of Commissioners Profile Sub Chapter in this Annual Report.

Komite Dewan Komisaris

Committees Under The Board of Commissioners

Hingga akhir 2025, PT PLN Nusa Daya memiliki 3 (tiga) komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagaimana yang dapat dilihat pada struktur organisasi Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025:

Until the end of 2025, PT PLN Nusa Daya has 3 (three) committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management and Compliance Committee as can be seen in the organisational structure of the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya as of 31 December 2025:



Komite Audit

Audit Committee

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, termasuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, menelaah pelaksanaan dan hasil audit, serta mengevaluasi kinerja auditor internal maupun eksternal. Selain itu, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait pengendalian internal, memastikan efektivitas prosedur evaluasi arus informasi Perusahaan, serta mengidentifikasi berbagai aspek yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan anggota Komite Audit apabila yang bersangkutan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar standar etika sebagai anggota Komite.

Anggota Komite Audit PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup dalam bidang tugasnya dan dalam industri/bisnis Perusahaan termasuk undang-undang, peraturan yang berlaku dan relevan;
2. Menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya;
3. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
4. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
5. Mempunyai mental dan perilaku yang baik serta tanggung jawab profesional yang tinggi;
6. Memiliki integritas yang tinggi dan komitmen dalam menjalankan tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Mengerti dan memahami fungsi Komite Audit.

To support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Company has established an Audit Committee, which reports directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory functions, including ensuring the effectiveness of the Internal Control System, reviewing the implementation and results of audits, and evaluating the performance of internal and external auditors. In addition, the Audit Committee provides recommendations on internal control, ensures the effectiveness of procedures for evaluating the Company's information flow, and identifies various matters requiring the attention of the Board of Commissioners.

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders. The Board of Commissioners has the right to dismiss a member of the Audit Committee if the relevant member is considered unable to perform their duties or has violated ethical standards as a member of the Committee.

Members of the Audit Committee of PT PLN Nusa Daya have fulfilled the following requirements:

1. Having sufficient knowledge and work experience in their field of duty and in the Company's industry/business, including applicable and relevant laws and regulations;
2. Allocating sufficient time to perform their duties;
3. Having no personal interests or affiliations that may create a negative impact or conflict of interest with the Company;
4. Being able to communicate effectively;
5. Having sound judgement, good conduct and a high level of professional responsibility;
6. Having high integrity and commitment in carrying out their duties and being able to communicate effectively;
7. Being willing to continuously improve their competence through education and training; and
8. Understanding the functions of the Audit Committee.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan pada jabatan yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Term of Office of the Audit Committee

The term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years in the same position, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time. The term of office of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, and they may be reappointed only for 1 (one) subsequent period.

Komposisi dan Struktur Komite Audit

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Audit memiliki kebijakan mengenai komposisi keanggotaan sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Anggota komite audit yang berasal dari luar Perusahaan tidak memiliki kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan atau memiliki pengalaman pada level manajerial minimal 5 (lima) tahun atau memiliki pemahaman mengenai proses bisnis perusahaan;

Composition and Structure of the Audit Committee

To support the effective performance of its duties and responsibilities, the Audit Committee has the following policy regarding membership composition:

1. The Audit Committee consists of at least 2 (two) members, who may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company. Audit Committee members from outside the Company have no affiliation with the management, ownership or business activities of the Company.
2. At least 1 (one) member of the Audit Committee has an educational background and expertise in accounting and finance, or has at least 5 (five) years of managerial-level experience, or has an understanding of the Company's business processes.

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan komposisi Komite Audit dengan adanya pemberhentian Anggota Komite Audit yaitu Sdr. Edy Kartono dan Sdr. I Made Suamba dan mengangkat Sdr. Mufid Ardani dan Sdri. Rahmawaty. Berikut adalah Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025:

In 2025, there was a change in the composition of the Audit Committee following the dismissal of Audit Committee members, Mr. Edy Kartono and Mr. I Made Suamba, and the appointment of Mr. Mufid Ardani and Mrs. Rahmawaty. The composition of the Audit Committee as at 31 December 2025 is as follows:

Nama Name	**Jabatan di Perusahaan** Position in the Company	**Jabatan di Komite** Position in the Committee	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment	**Periode Masa Jabatan** Term Period	**Masa Jabatan** Term of Office
Agung Nugraha	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	SK Dewan Komisaris No.06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 tanggal 20 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 dated 20 December 2024	Pertama First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris In accordance with the term of office of the Board of Commissioners
Mufid Ardan	Tidak ada None	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	SK Dewan Komisaris No.06/DK/PLN-NUSADAYA/2025 tanggal 1 Juli 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 06/DK/PLN-NUSADAYA/2025 dated 1 July 2025	Pertama First	2025-2028
Rahmawaty	Tidak ada None	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee		Pertama First	2025-2028

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit yang dari unsur Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut profil Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025:

Profil of the Audit Committee

The profile of the Audit Committee member from the Board of Commissioners is presented in the Company Profile chapter, under the Board of Commissioners Profile sub-chapter, in this Annual Report. The following presents the profiles of Audit Committee members who are not from the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya as at 31 December 2025:



Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

45 tahun | years old

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- S1 Industri Institut Teknologi Bandung (2003)
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung (2003)

Sertifikasi | Certifications

- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

Beliau memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 2007 dan hingga saat ini masih aktif sebagai Vice President Risiko Digital, Adopsi Teknologi, dan Human Capital (2024–sekarang). Sebelumnya, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis di PT PLN (Persero), antara lain:

- Vice President Kinerja Korporat (2022–2024);
- Senior Specialist II Pengelolaan Kinerja merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Vice President Kinerja Korporat (2022);
- Manager Kinerja Direktorat Korporat dan Unit Binaan (2021–2022); dan
- Manager Kinerja Unit (2018–2021).

He began his career at PT PLN (Persero) in 2007 and currently serves as Vice President of Digital Risk, Technology Adoption, and Human Capital (2024–present). Previously, he held various strategic positions at PT PLN (Persero), including:

- Vice President of Corporate Performance (2022–2024);
- Senior Specialist II of Performance Management, concurrently serving as Acting Vice President of Corporate Performance (2022);
- Manager of Corporate Directorate and Supervised Unit Performance (2021–2022); and
- Manager of Unit Performance (2018–2021).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

- PT PLN Nusa Daya
  - Tidak ada
- Perusahaan Lain
  - Vice President Risiko Digital, Adopsi Teknologi, dan Human Capital PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusa Daya
  - None
- Other Companies
  - Vice President of Digital Risk, Technology Adoption, and Human Capital at PT PLN (Persero)



Rahmawaty

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

46 tahun | years old

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Akuntansi Universitas Hasanuddin (2001)
- Magister Manajemen Lainnya Universitas Gadjah Mada (2004)
- Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Hasanuddin (2001)
- Master's Degree in Other Management, Universitas Gadjah Mada (2004)

Sertifikasi | Certifications

- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

Beliau memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 2007 dan hingga saat ini masih aktif berkarya sebagai Vice President Anggaran Operasi II (2023–sekarang). Sebelumnya, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis di PT PLN (Persero), antara lain:

- Vice President Konsolidasi Anggaran Operasi (2022–2023);
- Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum (2022);
- Senior Specialist II Sistem Manajemen Terintegrasi merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum (2021); dan
- Manager Pengelolaan Anggaran Kalimantan dan Nusa Tenggara (2021).

She began her career at PT PLN (Persero) in 2007 and currently serves as Vice President of Operating Budget II (2023–present). Previously, she held various strategic positions at PT PLN (Persero), including:

- Vice President of Operating Budget Consolidation (2022–2023);
- Senior Manager of Finance, Budget, and General Affairs (2022);
- Senior Specialist II of Integrated Management Systems, concurrently serving as Acting Senior Manager of Finance, Budget, and General Affairs (2021); and
- Manager of Budget Management for Kalimantan and Nusa Tenggara (2021).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

- PT PLN Nusa Daya
  - Tidak ada
- Perusahaan Lain
  - Vice President Anggaran Operasi II PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusa Daya
  - None
- Perusahaan Lain
  - Vice President of Operating Budget II at PT PLN (Persero)

Independensi Komite Audit

Komite Audit PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee of PT PLN Nusa Daya has fulfilled the independence requirements as reflected in the following table:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Agung Nugraha	Edy Kartono	I Made Suamba
Tidak menerima kompensasi apapun dari Perusahaan atau cabangnya ataupun afiliasinya lebih dari honorarium yang diterima sehubungan dengan tugas yang dijalankan sebagai Komite Audit. Does not receive any compensation from the Company, its branches or affiliates other than the honorarium received in connection with duties performed as a member of the Audit Committee.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan pegawai, Direktur atau Komisaris Perusahaan. Has no family or business relationship with employees, Directors or Commissioners of the Company.	✓	✓	✓
Bukan Pemegang Saham atau perwakilannya. Not a Shareholder or a representative of a Shareholder.	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Agung Nugraha	Edy Kartono	I Made Suamba
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not an insider of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm, or any other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Not a person who has worked for, or has had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months prior to appointment by the Board of Commissioners.	✓	✓	✓
Bukan seorang Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas dari mitra usaha. Not serving as a Commissioner or majority Shareholder of any business partner of the Company.	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Komite Audit memiliki pedoman kerja yaitu yang diatur dalam Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 04 Desember 2025. Piagam Komite Audit merupakan pembaharuan dari Piagam Komite Audit tahun 2024 dan telah merujuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Komite Audit tersebut antara lain mengatur:
1. Organisasi Komite Audit;
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan; dan
3. Etika dan Mekanisme Kerja yang terdiri dari:
   a. Kode Etik;
   b. Pelaksanaan Rapat;
   c. Program Kerja;
   d. Hubungan Kerja Komite Audit dengan Pihak-Pihak Terkait;
   e. Hubungan Kerja Komite Audit dengan SPI;
   f. Hubungan Kerja Komite Audit dengan Auditor Eksternal; dan
   g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Membantu tugas pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya adalah untuk:
   a. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan efektivitas auditor termasuk menilai hasil audit;

Audit Committee Charter

In carrying out its functions and roles, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter, which was approved in 4 December 2025. The Audit Committee Charter is an update of the 2024 Audit Committee Charter and has been revised in line with the issuance of Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023.

The Audit Committee Charter was prepared as a guideline to enable the Committee to carry out its duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, competently, independently and accountably, and in accordance with the applicable laws and regulations.

The scope regulated in the Audit Committee Charter includes, among others:
1. Audit Committee Organisation;
2. Duties, Responsibilities and Authority; and
3. Ethics and Working Mechanisms, comprising:
   a. Code of Ethics;
   b. Meeting Implementation;
   c. Work Programme;
   d. Working Relationships between the Audit Committee and Related Parties;
   e. Working Relationship between the Audit Committee and the Internal Audit Unit (IAU);
   f. Working Relationship between the Audit Committee and the External Auditor; and
   g. Reporting and Accountability.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. Assisting the Board of Commissioners in its supervisory and advisory duties, including:
   a. Ensuring the effectiveness of the Internal Control System and auditor effectiveness, including assessing audit results;

b. Memberikan rekomendasi tentang Sistem Pengendalian Internal; dan
c. Memastikan prosedur evaluasi arus informasi Perusahaan dan melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang harus diperhatikan oleh Dewan Komisaris.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa .
3. Melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan triwulanan dan tahunan Komite Audit secara kolektif bersama Komite lainnya kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Audit Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Rapat Komite Audit

Untuk memastikan bahwa Komite Audit dapat menjalankan tugasnya secara efektif, Komite Audit mengadakan rapat yang terjadwal dan terstruktur.

Kebijakan Rapat komite Audit

Kebijakan rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Rapat Komite Audit bersama Komite lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Rapat Komite Audit bersama Komite lainnya dan Dewan Komisaris dengan manajemen sekurang-kurangnya sekali dalam dalam sebulan. Rapat Komite Audit bersama Komite lainnya dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) sekurang-kurangnya sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dapat melakukan komunikasi langsung apabila diperlukan setiap saat. Rapat Komite Audit bersama Komite lainnya dengan Auditor Eksternal sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Tahun.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat Komite dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

b. Providing recommendations on the Internal Control System; and
c. Ensuring procedures for evaluating the Company's information flow and identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners.

2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the External Auditor based on independence, scope of assignment and service fees.
3. Reporting its activities and assignment results to the Board of Commissioners, accompanied by recommendations where necessary. The quarterly and annual reports of the Audit Committee, submitted collectively with other Committees to the Board of Commissioners, shall at least include a comparison between realised activities and the annual work programme, as well as the substance of activity results and the related recommendations.

Implementation of the Audit Committee's Duties in 2025

During 2025, the Company's Audit Committee carried out its duties and responsibilities as follows:

Audit Committee Meetings

To ensure that the Audit Committee can carry out its duties effectively, the Audit Committee holds scheduled and structured meetings.

Audit Committee Meeting Policy

The Audit Committee meeting policy is regulated in the Audit Committee Charter. In line with this policy, Audit Committee meetings with other Committees are held at least once a month. Audit Committee meetings with other Committees and the Board of Commissioners together with management are held at least once a month. Audit Committee meetings with other Committees and the Internal Audit Unit (IAU) are held at least once every 3 (three) months, and direct communication may be conducted at any time if required. Audit Committee meetings with other Committees and the External Auditor are held at least once a year.

Resolutions of Committee meetings shall be adopted through deliberation to reach consensus. A Committee meeting shall be deemed valid and may adopt resolutions if attended by more than 1/2 (one-half) of the total members of the Committee.

Pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan rapat internal Komite Audit sebanyak 20 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit 100%.

Telaah dan Rekomendasi Komite Audit

Pada tahun 2025, Komite Audit telah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap laporan keuangan serta aktivitas Audit Internal untuk memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga melakukan evaluasi terhadap tindakan yang diambil oleh Direksi yang memerlukan pengawasan lebih lanjut atau arahan dari Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit menyampaikan pendapatnya atas permintaan persetujuan atau rekomendasi dari Direksi terkait isu-isu tertentu, diantaranya mencakup hal-hal berikut:

1. Laporan Keuangan:
   a. Melakukan *review* atas keandalan semua informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
   b. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dan kebijakan tersebut apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit serta menghindari risiko terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

2. Komunikasi dengan Auditor Internal
   Melakukan *review* atas keandalan semua informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dan kebijakan tersebut apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit serta menghindari risiko terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

3. Manajemen Risiko dan Pengendalian:
   a. Mereview Laporan Manajemen Risiko Perusahaan secara periodik (triwulanan);
   b. Mereview Laporan Profil Risiko Perusahaan;
   c. Monitoring implementasi penerapan ERM (*Enterprise Risk* Manajemen) dan GCG;
   d. Mereview laporan Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa semua risiko dan pengendalian diperhatikan;
   e. Monitoring pelaksanaan rekomendasi yang terkait dengan risiko dan pengendalian, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal oleh Manajemen;

Frequency of Meetings and Attendance Rate of the Audit Committee

Throughout 2025, the Audit Committee held 20 internal meetings, with each member recording an attendance rate of 100%.

Audit Committee Review and Recommendations

In 2025, the Audit Committee conducted examinations and reviews of financial statements and internal audit activities to provide recommendations and/or approval to the Board of Commissioners. The Audit Committee also evaluated actions taken by the Board of Directors that required further supervision or direction from the Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee provided its views on requests for approval or recommendations from the Board of Directors regarding certain issues, including the following:

1. Financial Statements:
   a. Reviewing the reliability of all financial information issued by the Company;
   b. Re-examining whether the financial statements comply with the applicable PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards), whether the policies are consistent with other information known to Audit Committee members, and whether the risk of misstatement in the financial statements has been avoided.

2. Communication with the Internal Auditor
   Reviewing the reliability of all financial information issued by the Company and re-examining whether the financial statements comply with the applicable PSAK, whether the policies are consistent with other information known to Audit Committee members, and whether the risk of misstatement in the financial statements has been avoided.

3. Risk Management and Control:
   a. Periodically reviewing the Company's Risk Management Report on a quarterly basis;
   b. Reviewing the Company's Risk Profile Report;
   c. Monitoring the implementation of ERM (Enterprise Risk Management) and GCG;
   d. Reviewing reports from the Internal Auditor and External Auditor to ensure that all risks and controls are considered;
   e. Monitoring management's implementation of recommendations related to risks and controls made by internal and external auditors;

f. Memberikan masukan rekomendasi terkait kebijakan manajemen risiko, diantaranya strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan
g. Mereview pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dalam rangka Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko secara efektif.

4. *Corporate Governance*
   a. Melakukan review yang komprehensif mengenai kecukupan Pengawasan Internal perusahaan secara keseluruhan atas ketaatan terhadap kebijakan *Corporate Governance, Code of Conduct*, serta perundangan dan peraturan yang berlaku;
   b. Memonitor implementasi kebijakan perusahaan terkait dengan penerapan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
   Melakukan *review* atas penyusunan RJPP dan RKAP dan realisasinya.

6. Laporan Periodik Dewan Komite Kolektif
   Membuat Laporan Periodik Dewan Komite secara Kolektif (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan) Triwulanan dan Semesteran.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Komite Audit

Kebijakan pelatihan Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, apabila diperlukan, Komite Audit diberikan sebuah program pengenalan Perusahaan pada tahap awal masa penugasan dan diberikan pelatihan secara periodik selama masa penugasan.

Pada tahun 2025, Anggota Komite Audit PT PLN Nusa Daya yaitu Sdr. Rahmawaty dan Sdr. Mufid Ardani telah mengikuti pelatihan *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) tanggal 2 Desember 2025.

f. Providing input and recommendations on risk management policies, including risk management strategies and frameworks established in accordance with risk appetite and risk tolerance; and
g. Reviewing the accountability of the Board of Directors and providing direction for periodic improvements in the implementation of risk management policies to enable the Board of Directors to manage activities and risks effectively.

4. Corporate Governance
   a. Conducting a comprehensive review of the adequacy of the Company's overall internal oversight over compliance with Corporate Governance policies, the Code of Conduct, and applicable laws and regulations;
   b. Monitoring the implementation of Company policies related to the application of Information Technology to improve the Company's performance.

5. Company Long-Term Plan and Work Plan and Budget
   Reviewing the preparation of the LTP and WP&B and their realisation.

6. Periodic Reports of the Collective Board Committees
   Preparing quarterly and semi-annual Collective Board Committee Periodic Reports covering the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee.

Audit Committee Training Policy and Implementation

The Audit Committee training policy is regulated in the Audit Committee Charter. In line with this policy, to enable the Audit Committee to carry out its responsibilities effectively, if necessary, Audit Committee members are provided with a Company induction programme at the start of their assignment and receive periodic training during their term of assignment.

In 2025, members of PT PLN Nusa Daya's Audit Committee, Mrs. Rahmawaty and Mr. Mufid Ardani, participated in the Qualified Risk Governance Professional (QRGP) training held on 2 December 2025.

Penyampaian Laporan Komite Audit

Sejalan dengan piagam Komite Audit, secara berkala Komite Audit wajib menyampaikan laporan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Pada tahun 2025, Komite Audit menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Submission of Audit Committee Reports

In line with the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to periodically submit reports on its activities and the results of assignments received to the Board of Commissioners. Therefore, in 2025, the Audit Committee submitted reports to the Board of Commissioners as follows:

Laporan Audit Audit Report	**Tanggal Penyampaian** Submission Date
Triwulan I | First Quarter	21 April 2025
Triwulan II | Second Quarter	21 Juli 2025 | July 2025
Triwulan III | Third Quarter	22 Oktober 2025 | October 2025
Triwulan IV | Fourth Quarter	25 Januari 2026 | January 2026

Evaluasi Kinerja Komite Audit

Evaluasi kinerja anggota Komite Audit, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam sistem berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan dalam penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit pada tahun berikutnya, yang didasarkan pada kriteria capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi, serta kehadiran dalam rapat, sesuai dengan yang tercantum dalam piagam dan program Komite Audit.

Performance Evaluation of the Audit Committee

The performance evaluation of Audit Committee members, both individually and collectively, is conducted annually using the evaluation method established in the system based on the Board of Commissioners Decision. The evaluation results will be taken into consideration in assessing the extension of the term of office of Audit Committee members for the following year, based on criteria relating to performance achievements during the fiscal year, competence, and meeting attendance, as set out in the Audit Committee Charter and programme.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Perusahaan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite ini berperan membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan proses nominasi, evaluasi kinerja, serta sistem remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui perannya tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan objektif.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan anggota Komite apabila yang bersangkutan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar standar etika sebagai anggota Komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga terciptanya praktik tata kelola Perusahaan yang baik. Peran yang penting ini harus ditunjang dengan kapabilitas anggota-anggotanya. Oleh sebab itu, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, atau berpengalaman kerja di bidang sumber daya manusia dan/atau sistem remunerasi, atau pengalaman pada level manajerial atau memahami proses bisnis perusahaan;
2. Mempunyai integritas, objektivitas, etika, serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya;
3. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup dalam bidang tugasnya dan dalam industri/bisnis Perusahaan termasuk undang-undang, peraturan yang berlaku dan relevan;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
6. Mampu bekerjasama serta berkomunikasi dengan lancar, jelas, dan efektif;
7. Wajib mematuhi kode etik *(code of conduct)* yang ditetapkan oleh Perusahaan

To support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners, the Company has established the Nomination and Remuneration Committee, which reports directly to the Board of Commissioners. This Committee assists the Board of Commissioners in providing recommendations on nomination policies and processes, performance evaluation, and the remuneration system for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Through this role, the Nomination and Remuneration Committee supports the implementation of good, transparent and objective corporate governance.

Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners has the right to dismiss a Committee member if the person concerned is deemed unable to perform their duties or has violated the ethical standards as a Committee member.

The Nomination and Remuneration Committee plays a very important role in maintaining sound corporate governance practices. This important role must be supported by the capabilities of its members. Therefore, members of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Nusa Daya have met the following requirements:

1. Have adequate skills, knowledge and experience in accordance with their educational background, or work experience in human resources and/or remuneration systems, or managerial-level experience, or an understanding of the Company's business processes;
2. Have high integrity, objectivity, ethics and commitment in carrying out their duties;
3. Have no personal interests or connections that may create a negative impact or conflict of interest with the Company;
4. Have sufficient knowledge and work experience in their field of duty and in the Company's industry/business, including applicable and relevant laws and regulations;
5. Be able to allocate sufficient time to complete their duties;
6. Be able to cooperate and communicate fluently, clearly and effectively; and
7. Be required to comply with the Code of Conduct established by the Company.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan pada posisi yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years in the same position, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time. The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee must not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, and they may be reappointed for only 1 (one) subsequent term.

Komposisi dan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kebijakan mengenai komposisi keanggotaan sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
2. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya. Anggota lain tersebut dapat berasal dari:
3. Anggota Dewan Komisaris lainnya
4. Pihak yang berasal dari luar Perusahaan. Anggota Komite yang berasal dari pihak di luar Perusahaan yang tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
5. Pihak yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, atau berpengalaman kerja di bidang sumber daya manusia dan/atau sistem remunerasi, atau berpengalaman pada level manajerial atau memahami proses bisnis perusahaan.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan komposisi/susunan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan adanya pemberhentian Sdr. Setiawati dan mengangkat Sdr. Syamsul Arifin. Berikut adalah Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2025:

Composition and Structure of the Nomination and Remuneration Committee

In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee has a policy on membership composition as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee consists of at least 2 (two) members.
2. 1 (one) Chairperson concurrently serving as a member, who is a member of the Board of Commissioners, and other members. Such other members may come from:
3. Other members of the Board of Commissioners;
4. Parties from outside the Company. Committee members from outside the Company must have no connection with the management, ownership or business activities of the Company; and
5. Parties with adequate skills, knowledge and experience in accordance with their educational background, or work experience in human resources and/or remuneration systems, or managerial-level experience, or an understanding of the Company's business processes.

In 2025, there was a change in the composition/structure of the Nomination and Remuneration Committee, with the dismissal of Mrs. Setiawati and the appointment of Mr. Syamsul Arifin. The composition of the Nomination and Remuneration Committee as at 31 December 2025 is as follows:

Nama Name	**Jabatan di Perusahaan** Position in the Company	**Jabatan di Komite** Position in the Committee	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis for Appointment	**Periode Masa Jabatan** Term Period	**Masa Jabatan** Term of Office
Agung Nugraha	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	SK Dewan Komisaris No.06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 tanggal 20 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 dated 20 December 2024	Pertama First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Following the term of office of the Board of Commissioners
Syamsul Arifin	Tidak ada None	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	SK Dewan Komisaris No.07/DK/PLN-NUSADAYA/2025 tanggal 1 Juli 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 07/DK/PLN-NUSADAYA/2025 dated 1 July 2025	Pertama First	2025-2028

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi yang dari unsur Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025:

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

The profile of the Nomination and Remuneration Committee member from the Board of Commissioners can be found in the Company Profile Chapter, under the Board of Commissioners Profile sub-chapter, in this Annual Report. The following is the profile of the Nomination and Remuneration Committee member who is not from the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya as at 31 December 2025:



Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

39 tahun | years old

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Hukum Universitas Brawijaya (2007)
- Magister SDM Universitas Diponegoro (2018)
- Bachelor's Degree in Law, Universitas Brawijaya (2007)
- Master's Degree in Human Resources, Universitas Diponegoro (2018)

Sertifikasi | Certifications

- *Qualified Chief Risk* OFCR
- *Human Resources Management Professional* (CHRMP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

Beliau memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 2007 dan hingga saat ini masih aktif sebagai Vice President Hubungan Industrial (2025–sekarang). Sebelumnya, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis di PT PLN (Persero), antara lain:

- Vice President Legal (2024–2025)
- Vice President Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Kinerja (2022–2024)
- Manager Regulasi Kantor Pusat (2021–2022)
- Manager Regulasi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (2020–2021)

He began his career at PT PLN (Persero) in 2007 and currently serves as Vice President of Industrial Relations (2025–present). Previously, he held various strategic positions at PT PLN (Persero), including:

- Vice President of Legal Affairs (2024–2025)
- Vice President of Legal, Compliance, Risk Management, and Performance (2022–2024)
- Manager of Head Office Regulation (2021–2022)
- Manager of Java, Bali, and Nusa Tenggara Regulation (2020–2021)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

- PT PLN Nusa Daya
  - Tidak ada
- Perusahaan Lain
  - Vice President Hubungan Industrial PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusa Daya:
  - None
- Other Companies
  - Vice President Hubungan Industrial PT PLN (Persero)

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Nusa Daya has met the independence requirements as reflected in the following table:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Agung Nugraha	Setiawati
Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan Has no personal interests or connections that may create a negative impact or conflict of interest with the Company	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi termasuk hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, Pejabat atau Pemegang Saham utama Perusahaan Has no affiliation, including family relationships by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with the Company's Commissioners, Directors, Officers or major Shareholders	✓	✓
Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan tersebut; Does not concurrently serve as a member of any other committee of the Company	✓	✓
Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi Has no objection and is willing to prepare and sign a written statement relating to the independence requirements	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pedoman kerja yaitu yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada 04 Desember 2025. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pembaharuan dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 dan telah merujuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Piagam Komite Nominasi disusun sebagai pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk membantu Perusahaan dalam memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi tersebut antara lain mengatur:

1. Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan;
3. Mekanisme Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Sistem Informasi dan Remunerasi:
   a. Rapat
   b. Program Kerja
   c. Hubungan Kerja dengan Pihak-Pihak Terkait
   d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Etika Kerja.

Nomination and Remuneration Committee Charter

In carrying out its functions and roles, the Nomination and Remuneration Committee has working guidelines as regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was ratified on 4 December 2025. The Nomination and Remuneration Committee Charter is an update of the 2025 Nomination and Remuneration Committee Charter and has been revised in line with the issuance of Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023.

The Nomination Committee Charter has been prepared as a guideline for the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties, responsibilities and authority to assist the Company in fulfilling the interests of Shareholders and other Stakeholders.

The scope regulated in the Nomination Committee Charter includes, among others:

1. Organisation of the Nomination and Remuneration Committee;
2. Duties, Responsibilities and Authority;
3. Working Mechanism of the Nomination and Remuneration Committee;
4. Information and Remuneration System, comprising:
   a. Meetings
   b. Work Programme
   c. Working relationship with Related Parties
   d. Reporting and Accountability; and
5. Work Ethics.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG), Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris tentang sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam hal yang berkaitan dengan:

1. Fungsi nominasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; serta
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan anggota Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
      - Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan pengukuran kinerja yang berlaku;
      - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      - Memperoleh dan/atau menganalisa data bakal calon anggota Direksi dan *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
2. Fungsi remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In order to support the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Nomination and Remuneration Committee is tasked and responsible for continuously promoting the application of GCG principles in the management of the Company. In carrying out its function, the Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing independent professional opinions to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration systems for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. More specifically, the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are to assist the Board of Commissioners in matters relating to:

1. Nomination function
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
      - The policies and criteria required in the nomination process; and
      - The performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
      - Providing recommendations on the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners of Subsidiaries and members of the Board of Directors of Subsidiaries to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS);
      - Conducting performance evaluations of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the applicable performance measurement provisions;
      - Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programmes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
      - Reviewing and proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and
      - Obtaining and/or analysing data on prospective members of the Board of Directors and the talent pool of officers one level below the Board of Directors.
2. Remuneration function
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The remuneration structure for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

- Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; serta

- Besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

- Remuneration policies for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
- The amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

b. Conducting performance evaluations of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in relation to the suitability of remuneration received by each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat yang terjadwal dan terstruktur sebagai berikut:

Kebijakan Rapat komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi bersama Komite lainnya sekurang-kurangnya dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali. Dalam kondisi khusus dimana keanggotaan komite kurang dari 3 (tiga) orang dan atau dengan pertimbangan tertentu yaitu efektivitas dan kualitas hasil rapat, maka rapat komite dapat dilaksanakan bersama-sama komite lainnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersama Komite lainnya mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Komite Nominasi dan Remunerasi bersama Komite lainnya dapat mengadakan rapat di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau tempat lainnya yang disepakati sebelumnya. Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Komite hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 44 yang terdiri dari 20 rapat

Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee

During 2025, the Company's Nomination and Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities as follows:

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

To ensure that the Nomination and Remuneration Committee can carry out its duties effectively, the Nomination and Remuneration Committee holds scheduled and structured meetings as follows:

Nomination and Remuneration Committee Meeting Policy

The meeting policy of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. In line with this policy, meetings of the Nomination and Remuneration Committee together with other committees are held at least once every 4 (four) months. Under special conditions where committee membership is fewer than 3 (three) persons and/or based on certain considerations, namely the effectiveness and quality of meeting outcomes, committee meetings may be held jointly with other committees.

The Nomination and Remuneration Committee, together with other committees, holds meetings at least in accordance with the minimum provisions for meetings of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. The Nomination and Remuneration Committee, together with other committees, may hold meetings at the Company's place of business or at another place agreed in advance. A meeting may be held if more than 1/2 (one-half) of the Committee members are present at the meeting.

Frequency of Meetings and Attendance Rate of the Nomination and Remuneration Committee

During 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 44 meetings, consisting of 20 internal

internal Dewan Komisaris, 44 kali rapat Bersama Direksi dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

meetings of the Board of Commissioners and 44 joint meetings with the Board of Directors, with the attendance rates of members of the Nomination and Remuneration Committee as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Agung Nugraha	44	44	100%
Setiawati	44	44	100%

Telaah dan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan pendapatnya atas permintaan persetujuan atau rekomendasi dari Direksi terkait isu-isu tertentu, diantaranya mencakup hal-hal berikut:

1. Kriteria dan prosedur nominasi tenaga eksekutif
   a. Melakukan *review* kriteria seleksi pejabat yang layak untuk dinominasikan menjadi tenaga eksekutif;
   b. Melakukan *review* prosedur nominasi bagi para tenaga eksekutif;
   c. Melakukan *review* sistem penilaian bagi para tenaga eksekutif.
2. Komunikasi dengan Auditor Internal
   a. Melakukan *review* atas Program kerja pengawasan tahunan Auditor Internal;
   b. Melakukan *review* atas temuan dan issue terkait dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan kriteria, prosedur, dan penilaian dalam sistem pengendalian terkait nominasi dan remunerasi perusahaan dan tindak lanjut yang telah .dilaksanakan'
3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Bidang SDM
   a. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas kebijakan Direksi dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan kriteria, prosedur dan sistem penilaian nominasi dan remunerasi secara berkala dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola risiko-risiko secara efektif;
   b. Melakukan *review* dan evaluasi struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
4. *Corporate Governance*
   a. Melakukan *review* yang komprehensif mengenai kecukupan Pengawasan Internal perusahaan secara keseluruhan atas ketaatan terhadap kebijakan *Corporate Governance, Code of Conduct*, serta perundangan dan peraturan yang berlaku;
   b. Melakukan *review* dan evaluasi struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Reviews and Recommendations of the Nomination and Remuneration Committee

During 2025, the Nomination and Remuneration Committee provided opinions in response to requests for approval or recommendations from the Board of Directors on specific matters, including the following:

1. Criteria and Procedures for Executive Nomination
   a. Reviewed the selection criteria for officials eligible for nomination as executives;
   b. Reviewed executive nomination procedures;
   c. Reviewed the executive assessment system.
2. Coordination with the Internal Auditor
   a. Reviewed the Internal Auditor's Annual Audit Work Programme;
   b. Reviewed findings and relevant issues in the formulation and determination of criteria, procedures, and assessments within the Company's nomination and remuneration control system, as well as the follow-up actions undertaken.
3. Risk Management and Control in Human Capital Affairs
   a. Reviewed the Board of Directors' accountability and provided improvement recommendations on the Board of Directors' policies in the periodic formulation and determination of nomination and remuneration criteria, procedures, and assessment systems, to ensure the effective management of risks;
   b. Reviewed and evaluated the organisational structure, clear duties and responsibilities of each unit, as well as the adequacy of human capital, both in terms of quantity and quality, to support the Company's strategy in improving performance.
4. Corporate Governance
   a. Conducted a comprehensive review of the adequacy of the Company's overall internal supervision over compliance with Corporate Governance policies, the Code of Conduct, and applicable laws and regulations;
   b. Reviewed and evaluated the organisational structure, clear duties and responsibilities of each unit, as well as the adequacy of human capital, both in terms of quantity and quality, to support the Company's strategy in improving performance.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
   Melakukan review atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan realisasi RKAP tahun berjalan terkait dengan pelaksanaan tugas nominasi dan remunerasi;
6. Laporan Periodik Dewan Komite Kolektif
   Membuat Laporan Periodik Dewan Komite secara Kolektif (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan) Triwulanan dan Semesteran.

5. Company Work Plan and Budget
   Reviewed the preparation of the Company Work Plan and Budget (WP&B) and the realisation of the WP&B for the current year in relation to the implementation of nomination and remuneration duties.
6. Periodic Collective Reports of Board Committees
   Prepared quarterly and semi-annual periodic collective reports of the Board Committees, comprising the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management and Compliance Committee.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, peningkatan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilakukan melalui Pelatihan/Seminar/*Workshop*. Pada tahun 2025, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Nusa Daya telah mengikuti pelatihan QRGP *(Qualified Risk Governance Profesional).*

Policy and Implementation of Training for the Nomination and Remuneration Committee

The training policy of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. In line with this policy, competency development for the Nomination and Remuneration Committee may be carried out through training, seminars or workshops. In 2025, members of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Nusa Daya attended training QRGP (Qualified Risk Governance Profesional).

Penyampaian Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejalan dengan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, secara berkala Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Submission of Reports by the Nomination and Remuneration Committee

In line with the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Nomination and Remuneration Committee is required to periodically submit reports on its activities and the results of assignments received to the Board of Commissioners. Therefore, in 2025, the Nomination and Remuneration Committee submitted reports to the Board of Commissioners as follows:

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Triwulan I | First Quarter	21 April 2025
Triwulan II | Second Quarter	21 Juli 2025 | July 2025
Triwulan III | Third Quarter	22 Oktober 2025 | October 2025
Triwulan IV | Fourth Quarter	25 Januari 2026 | January 2026

Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi kinerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam sistem berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan dalam penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun berikutnya, yang didasarkan pada kriteria capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi, serta kehadiran dalam rapat, sesuai dengan yang tercantum dalam piagam dan program Komite Nominasi dan Remunerasi.

Performance Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

The performance of members of the Nomination and Remuneration Committee, both individually and collectively, is assessed annually using the evaluation methods established in accordance with a resolution of the Board of Commissioners. The evaluation results are taken into consideration in assessing the renewal of the terms of office of Nomination and Remuneration Committee members for the following year, based on criteria relating to performance achievements during the financial year, competence, and meeting attendance, as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter and work programme.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Risk Management and Compliance Committee

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite ini berperan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan anggota Komite apabila yang bersangkutan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar standar etika sebagai anggota Komite.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga terciptanya praktik tata kelola Perusahaan yang baik. Peran yang penting ini harus ditunjang dengan kapabilitas anggota-anggotanya. Oleh sebab itu, anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dipilih oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan pada jabatan yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan sewaktu- waktu.

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat

To support the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function, the Company has established the Risk Management and Compliance Committee, which is directly accountable to the Board of Commissioners. The Committee supports the Board of Commissioners in reviewing and providing recommendations on the implementation of risk management, the internal control system, and compliance with the applicable laws and regulations as well as the Company's policies.

Appointment and Dismissal of the Risk Management and Compliance Committee

Members of the Risk Management and Compliance Committee are appointed and discharged by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The Board of Commissioners is authorised to discharge members of the Committee if they are considered unable to properly perform their duties or are found to have violated the ethical standards applicable to Committee members.

The Risk Management and Compliance Committee plays a key role in supporting the implementation of sound corporate governance practices within the Company. This role must be supported by the capabilities of its members. Accordingly, members of the Risk Management and Compliance Committee of PLN Nusa Daya have fulfilled the following requirements:

1. Possess integrity, sufficient knowledge, and professional experience relevant to risk management and compliance duties;
2. Do not have any personal interests or relationships that may have a negative impact on, or give rise to conflicts of interest with, the Company;
3. Possess adequate knowledge of the Company's line of business and are able to devote sufficient time to perform their duties; and
4. Are able to cooperate and communicate effectively.

Term of Office of the Risk Management and Compliance Committee

The Chair of the Risk Management and Compliance Committee is appointed by the Board of Commissioners. The term of office of the Chairperson of the Risk Management and Compliance Committee is 3 (three) years and may subsequently be reappointed for a maximum of 2 (two) years in the same position, without prejudice to the authority of the Board of Commissioners to discharge them at any time.

The term of office of members of the Risk Management and Compliance Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and they

kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan pada jabatan yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komposisi dan Struktur Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memiliki kebijakan mengenai komposisi keanggotaan sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota.
2. Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memiliki hubungan fungsional dengan Divisi/Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan hubungan ini diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Sedangkan hubungan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan Direksi dilakukan melalui Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan terdiri dari para profesional dalam bidang yang terkait dengan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta bebas dari segala interest, sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan harus membuat surat pernyataan bebas dari conflict of interest.
4. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan komposisi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan adanya pemberhentian Sdr. Ubet Gunawan dan Sdr. Rino Gumpar Hutasoit sebagai yang digantikan oleh Sdr. Endhika Dollar Sanggragir dan Sdr. Noor Rahmania. Berikut adalah Komposisi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan per 31 Desember 2025:

may be reappointed for a maximum of 2 (two) years in the same position, without prejudice to the authority of the Board of Commissioners to discharge them at any time.

Composition and Structure of the Risk Management and Compliance Committee

To support the effective discharge of its duties and responsibilities, the Risk Management and Compliance Committee has established the following membership composition policy:

1. The Risk Management and Compliance Committee shall consist of at least 2 (two) members.
2. The organisational structure and membership of the Risk Management and Compliance Committee shall be selected and approved by the Board of Commissioners at a Board of Commissioners meeting. The Risk Management and Compliance Committee has a functional relationship with the Risk Management and Compliance Division/Department, as regulated in the Risk Management and Compliance Committee Charter. Meanwhile, the relationship between the Risk Management and Compliance Committee and the Board of Directors is carried out through the Board of Commissioners.
3. Members of the Risk Management and Compliance Committee comprise professionals in fields related to risk management and compliance and must be free from any interests that may compromise the objectivity of their opinions on matters under review. They are also required to submit a statement declaring that they are free from conflicts of interest.
4. Members of the Risk Management and Compliance Committee who are not members of the Board of Commissioners shall receive an honorarium borne by the Company, the amount of which is determined by the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions.

In 2025, there was a change in the composition of the Risk Management and Compliance Committee following the dismissal of Mr. Ubet Gunawan and Mr. Rino Gumpar Hutasoit, who were replaced by Mr. Endhika Dollar Sanggragir and Mrs. Noor Rahmania. The composition of the Risk Management and Compliance Committee as at 31 December 2025 was as follows:

Nama Name	**Jabatan di Perusahaan** Jabatan di Perusahaan	**Jabatan di Komite** Position in the Committee	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis for Appointment	**Periode Masa Jabatan** Term of Office Period	**Masa Jabatan** Term of Office
Agung Nugraha	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Chairman of the Risk Management and Compliance Committee	SK Dewan Komisaris No.06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 tanggal 20 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 06/DK/PLN-NUSADAYA/2024 dated 20 December 2024	Pertama First Term	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris In line with the term of office of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Jabatan di Perusahaan	Jabatan di Komite Position in the Committee	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office Period	Masa Jabatan Term of Office
Endhika Dollar Sanggragir	Tidak ada	Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Member of the Risk Management and Compliance Committee	SK Dewan Komisaris No.08/DK/PLN-NUSADAYA/2025 tanggal 1 Juli 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 08/DK/PLN-NUSADAYA/2025 dated 1 July 2025	Pertama First Term	2025-2028
Noor Rahmania	Tidak ada None			Pertama First Term	2025-2028

Profil Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Profil Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang dari unsur Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut profil Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya per 31 Desember 2025:

Profile of the Risk Management and Compliance Committee

Profiles of the Risk Management and Compliance Committee members from the Board of Commissioners are presented in the Company Profile Chapter, under the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report. The profiles of Risk Management and Compliance Committee members who are not from the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya as of 31 December 2025 are presented below:



Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

38 tahun | years old

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Hukum Universitas Diponegoro (2010)
- Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (2018)
- Bachelor's Degree in Law, Universitas Diponegoro (2010)
- Master's Degree in Law, Universitas Gadjah Mada (2018)

Sertifikasi | Certifications

- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

Beliau memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 2017 dan hingga saat ini masih aktif sebagai Vice President Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan (2025–sekarang). Sebelumnya, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis di PT PLN (Persero), antara lain:

- Manager Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan II (2023–2025)
- Senior Officer Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan II (2022–2023)
- Analyst Repositori dan Evaluasi Kebijakan (2021–2022)

He began his career at PT PLN (Persero) in 2017 and currently serves as Vice President of Policy Harmonisation and Monitoring (2025–present). Previously, he held various strategic positions at PT PLN (Persero), including:

- Manager of Policy Harmonisation and Monitoring II (2023–2025)
  Senior Officer of Policy Harmonisation and Monitoring II (2022–2023)
  Analyst of Policy Repository and Evaluation (2021–2022)

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

- PT PLN Nusa Daya
  - Tidak ada
- Perusahaan Lain
  - Vice President Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusa Daya
  - None
- Other Companies
  - Vice President of Policy Harmonisation and Monitoring at PT PLN (Persero)



Noor Rahmania

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Member of the Risk Management and Compliance Committee

Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

45 tahun per 31 Desember 2025 | 45 years old as at 31 December 2025

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- S1 Teknik Agro Industri, Institut Pertanian Bogor (2002)
- S2 Manajemen Marketing, Universitas Indonesia (2006)
- Bachelor's Degree in Agro-Industrial Engineering, IPB University (2002)
- Master's Degree in Marketing Management, Universitas Indonesia (2006)

Sertifikasi | Certifications

- CFRM
- CRGP

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

- Vice President Risiko Perencanaan Strategis, Pengembangan Bisnis, dan Portofolio Pada Bidang Risiko Perencanaan Strategis, Pengembangan Bisnis, dan Portofolio Divisi Manajemen Risiko Strategis, Regulasi dan Kebijakan Direktorat Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero)
- Vice President of Strategic Planning Risk, Business Development, and Portfolio, under the Strategic Planning Risk, Business Development, and Portfolio Department, and Strategic Risk Management, Regulation, and Policy Division, Risk Management Directorate at PT PLN (Persero) Head Office

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

- PT PLN Nusa Daya
  - Tidak ada
- Perusahaan Lain
  - Vice President Risiko Perencanaan Strategis, Pengembangan Bisnis, dan Portofolio Pada Bidang Risiko Perencanaan Strategis, Pengembangan Bisnis, dan Portofolio Divisi Manajemen Risiko Strategis, Regulasi dan Kebijakan Direktorat Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero).
- PT PLN Nusa Daya
  - None
- Other Companies
  - Vice President of Strategic Planning Risk, Business Development, and Portfolio, under the Strategic Planning Risk, Business Development, and Portfolio Department, and Strategic Risk Management, Regulation and Policy Division, Risk Management Directorate at PT PLN (Persero) Head Office.

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Nusa Daya telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

Independence of the Risk Management and Compliance Committee

The Risk Management and Compliance Committee of PT PLN Nusa Daya has fulfilled the independence requirements as reflected in the following table:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Agung Nugraha	Ubet Gunawan	Noor Rahmania
Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan Does not have any personal interests or relationships that may have a negative impact on, or give rise to conflicts of interest with, the Company	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi termasuk hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, Pejabat atau Pemegang Saham utama Perusahaan Does not have any affiliation, including family relationships by marriage or lineage up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Officers, or Major Shareholders of the Company	✓	✓	✓
Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan tersebut Does not hold concurrent positions as a member of other committees within the Company	✓	✓	✓
Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi Has no objection to, and is willing to prepare and sign, a written statement relating to the independence requirements	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memiliki pedoman kerja yaitu yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang disahkan pada 15 Agustus 2024. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tersebut merupakan pembaharuan dari Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2024 dan telah merujuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan disusun sebagai pedoman bagi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk membantu Perusahaan dalam memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tersebut antara lain mengatur:

1. Organisasi Komite Manajemen Risiko;
2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Kode Etik dan Mekanisme Kerja:
   a. Kode Etik;
   b. Rapat Komite;
   c. Program Kerja;

Risk Management and Compliance Committee Charter

In carrying out its functions and roles, the Risk Management and Compliance Committee performs its duties based on the Risk Management and Compliance Committee Charter, which was ratified on 15 August 2024. The Charter represents an update to the 2024 Risk Management and Compliance Committee Charter and has been aligned with the issuance of Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023.

The Risk Management and Compliance Committee Charter serves as a guideline for the Committee in carrying out its duties, responsibilities, and authorities in assisting the Company to fulfil the interests of Shareholders and other Stakeholders.

The scope regulated under the Risk Management and Compliance Committee Charter includes, among others:

1. Organisation of the Risk Management Committee;
2. Authorities, Duties, and Responsibilities;
3. Code of Conduct and Working Mechanism, covering:
   a. Code of Ethics;
   b. Committee Meetings;
   c. Work Programme;

d. Hubungan Kerja dengan Pihak-Pihak Terkait;
e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Tugas yang berkaitan dengan Dewan Komisaris
   a. Melakukan analisa dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem manajemen Risiko dan kepatuhan perusahaan.
   b. Melakukan analisa dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan yang dilakukan oleh perusahaan.
   c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bersama dengan Komite lainnya, melaksanakan rapat-rapat bersama dengan Komite lainnya, dan menyampaikan laporan kolektif bersama Komite lainnya pelaksanaan kegiatan Komite-Komite kepada Dewan Komisaris.
   d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
   e. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

2. Tugas Pokok yang berkaitan dengan Manajemen Eksekutif
   a. Bersama komite lainnya melakukan Analisa dan memberi masukan sesuai dengan bidang komitenya kepada Dewan Komisaris atas:
      - Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual perusahaan;
      - RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) jika ada;
      - RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
      - Laporan Tahunan dan Triwulan;
      - GCG (*Good Corporate Government*);
      - KPI Perseroan (*Key Performance Indicator*) Perusahaan;
   b. Melakukan analisa dan memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan:
      - Investasi;
      - Pengembangan Usaha;
      - Pengembangan Teknologi Informasi;
      - Melakukan analisa dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Laporan Tahunan, Laporan Manajemen, Laporan Kepatuhan;

d. Working Relationships with Relevant Parties;
e. Reporting and Accountability.

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee

1. Duties related to the Board of Commissioners
   a. To analyse and provide input to the Board of Commissioners on the Company's risk management and compliance policies, guidelines, strategies, and systems.
   b. To analyse and provide input to the Board of Commissioners on the implementation of risk management and compliance activities carried out by the Company.
   c. To prepare the activity plan and budget of the Risk Management and Compliance Committee together with other Committees, hold joint meetings with other Committees, and submit collective reports on the implementation of Committee activities to the Board of Commissioners.
   d. To identify matters requiring attention, ensure their completion, and carry out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the Committees under the Board of Commissioners.
   e. To maintain the confidentiality of Company data and information in accordance with the applicable provisions of the Board of Commissioners.

2. Main duties related to Executive Management
   a. To coordinate with other Committees in reviewing and providing input to the Board of Commissioners on matters relevant to each Committee's scope of duties, including:
      - Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
      - Corporate Long-Term Plan (RJPP), if any;
      - Company Work Plan and Budget (RKAP);
      - Annual and Quarterly Reports;
      - Good Corporate Governance (GCG);
      - Company Key Performance Indicators (KPI).
   b. To analyse and provide input and recommendations to the Board of Commissioners, particularly on policies and the implementation of activities related to:
      - Investment;
      - Business Development;
      - Information Technology Development.
      - To analyse and provide input to the Board of Commissioners regarding the Annual Report, Management Report, and Compliance Report;

c. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
d. Melakukan analisa dan memberi masukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan Anak perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Untuk memastikan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengadakan rapat yang terjadwal dan terstruktur sebagai berikut:

Kebijakan Rapat komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bersama Komite lainnya harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bersama Komite lainnya mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat mengadakan rapat di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau tempat lainnya yang disepakati sebelumnya. Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Komite hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 44 yang terdiri dari 20 rapat internal Dewan Komisaris, 24 kali rapat Bersama Direksi dengan tingkat kehadiran anggota Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai berikut:

c. To analyse and provide recommendations on strategic corporate actions that require approval or written response from the Board of Commissioners in relation to risk management and compliance aspects;
d. To analyse and provide input and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of Subsidiary management.

Implementation of Duties of the Risk Management and Compliance Committee

Throughout 2025, the Company's Risk Management and Compliance Committee carried out its duties and responsibilities as follows:

Meetings of the Risk Management and Compliance Committee

To ensure that the Risk Management and Compliance Committee is able to perform its duties effectively, the Committee holds scheduled and structured meetings, as follows:

Risk Management and Compliance Committee Meeting Policy

The meeting policy of the Risk Management and Compliance Committee is stipulated in the Risk Management and Compliance Committee Charter. In accordance with this policy, meetings of the Risk Management and Compliance Committee jointly with other Committees, shall be held periodically, at least once every four months. The Risk Management and Compliance Committee, jointly with other Committees, shall hold meetings at least in accordance with the minimum meeting requirements for the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. The Risk Management and Compliance Committee may hold meetings at the Company's business premises or at other venues as may be agreed in advance. A meeting shall be valid if attended by more than 1/2 (one-half) of the total members of the Committee.

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Risk Management and Compliance Committee

Throughout 2025, the Risk Management and Compliance Committee held 44 meetings, comprising 20 internal meetings of the Board of Commissioners and 24 joint meetings with the Board of Directors, with the attendance rate of Risk Management and Compliance Committee members as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Agung Nugraha	44	44	100%
Ubet Gunawan	44	44	100%
Rino Gumpar Hutasoit	44	44	100%

Telaah dan Rekomendasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyampaikan pendapatnya atas permintaan persetujuan atau rekomendasi dari Direksi terkait isu-isu tertentu, diantaranya mencakup hal-hal berikut:

1. Mereview Laporan Manajemen Risiko Perusahaan secara periodic (triwulanan).
2. Mereview Laporan Profil Risiko Perusahaan.
3. *Monitoring* implementasi penerapan ERM (*Enterprise Risk Manajemen*) dan GCG.
4. Mereview laporan Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa semua risiko dan pengendalian diperhatikan.
5. *Monitoring* pelaksanaan rekomendasi yang terkait dengan risiko dan pengendalian, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal oleh Manajemen.
6. Memberikan masukan rekomendasi terkait kebijakan manajemen risiko, diantaranya strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (risk tolerance).
7. Mereview pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dalam rangka Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko secara efektif.
8. Melakukan review atas: Temuan dan issue terkait dengan sistem pengendalian Internal dalam operasional perusahaan termasuk proses penyusunan laporan keuangan serta hasil pengendalian intern laporan keuangan perusahaan dan tindak lanjut hasil temuan pengendalian internal.
9. Melakukan *review* yang komprehensif mengenai kecukupan Pengawasan Internal perusahaan secara keseluruhan atas ketaatan terhadap kebijakan *Corporate Governance, Code of Conduct*, serta perundangan dan peraturan yang berlaku.
10. Memonitor implementasi kebijakan perusahaan terkait dengan penerapan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.
11. Melakukan review atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan realisasi RKAP tahun berjalan
12. Membuat Laporan Periodik Dewan Komite secara Triwulanan dan Semesteran.

Reviews and Recommendations of the Risk Management and Compliance Committee

Throughout 2025, the Risk Management and Compliance Committee provided opinions in response to requests for approval or recommendations from the Board of Directors on the following matters:

1. Reviewed the Company's quarterly Risk Management Report.
2. Reviewed the Company's Risk Profile Report.
3. Monitored the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and Good Corporate Governance (GCG).
4. Reviewed reports from the Internal Auditor and External Auditor to ensure that all risks and controls were properly considered.
5. Monitored the implementation of recommendations related to risks and controls issued by the Internal Auditor and External Auditor, as followed up by Management.
6. Provided input and recommendations on risk management policies, including the risk management strategy and framework established in line with the Company's risk appetite and risk tolerance.
7. Reviewed the accountability of the Board of Directors and provided improvement recommendations on the implementation of risk management policies on a periodic basis, in order to ensure that the Board of Directors managed activities and risks effectively.
8. Reviewed findings and issues related to the internal control system in the Company's operations, including the financial statement preparation process, the results of internal control over financial reporting, and the follow-up of internal control findings.
9. Conducted a comprehensive review of the adequacy of the Company's overall internal oversight of compliance with Corporate Governance policies, the Code of Conduct, and applicable laws and regulations.
10. Monitored the implementation of Company policies related to the application of Information Technology to improve the Company's performance.
11. Reviewed the preparation of the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the realisation of the RKAP for the current year.
12. Prepared quarterly and semi-annual Periodic Reports of the Committees.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Kebijakan pelatihan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Sejalan dengan kebijakan tersebut peningkatan kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilakukan dari pihak eksternal/ independen yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan apabila diperlukan atas biaya Perusahaan.

Pada tahun 2025, Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Nusa Daya telah mengikuti pelatihan QRGP *(Qualified Risk Governance Profesional).*

Training Policy and Implementation for the Risk Management and Compliance Committee

The training policy for the Risk Management and Compliance Committee is governed by the Risk Management and Compliance Committee Charter. In accordance with this policy, competency development for the Risk Management and Compliance Committee may be conducted by professional external or independent parties in order to support the implementation of duties and enhance the capabilities of members of the Risk Management and Compliance Committee, if deemed necessary, at the Company's expense.

In 2025, members of the Risk Management and Compliance Committee of PT PLN Nusa Daya participated in the following training programmes: QRGP (Qualified Risk Governance Profesional).

Penyampaian Laporan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Sejalan dengan piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, secara berkala Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Submission of Reports by the Risk Management and Compliance Committee

In accordance with the Risk Management and Compliance Committee Charter, the Risk Management and Compliance Committee is required to periodically submit reports on its activities and assigned duties to the Board of Commissioners. Accordingly, in 2025, the Risk Management and Compliance Committee submitted reports to the Board of Commissioners as follows:

Laporan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee Report	**Tanggal Penyampaian** Report Submission Date
Triwulan I | First Quarter	21 April 2025
Triwulan II | Second Quarter	21 Juli 2025 | July 2025
Triwulan III | Third Quarter	22 Oktober 2025 | October 2025
Triwulan IV | Fourth Quarter	25 Januari 2026 | January 2026

Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Evaluasi kinerja anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam sistem berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan dalam penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun berikutnya, yang didasarkan pada kriteria capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi, serta kehadiran dalam rapat, sesuai dengan yang tercantum dalam piagam dan program Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Performance Evaluation of the Risk Management and Compliance Committee

The performance evaluation of members of the Risk Management and Compliance Committee, both individually and collectively, is conducted annually using the evaluation method established under the system based on the Decree of the Board of Commissioners. The results of this evaluation serve as a consideration in assessing the extension of the term of office of members of the Risk Management and Compliance Committee in the following year, based on performance achievements during the financial year, competencies, and attendance at meetings, in accordance with the Risk Management and Compliance Committee charter and programme.

Komite Lain Di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi

Other Committees Under The Board of Commissioners and Board of Directors

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan belum membentuk Komite Lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi selain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Komite Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut Pasal 21 ayat 1 poin d, Komite Lain dapat dibentuk jika diperlukan, oleh karenanya Perusahaan merasa bahwa struktur organisasi Dewan Komisaris dan Direksi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mengelola perusahaan, sehingga belum perlu membentuk Komite Lain di bawah Dewan Komisaris maupun Komite Lain dibawah Direksi.

As at the end of 2025, the Company had not established any committees under the Board of Commissioners or the Board of Directors other than the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee. These committees comply with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023. As Article 21 paragraph (1) point d allows other committees to be established when necessary, the Company considers its current structure effective and has not deemed it necessary to establish additional committees.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of The Board of Commissioners

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan membentuk Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berperan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, dan layanan kesekretariatan guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Melalui fungsi tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris turut mendukung efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

In order to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions, the Company has appointed a Secretary to the Board of Commissioners who is directly accountable to the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners performs administrative, coordination, and secretarial functions to support the Board of Commissioners in carrying out its duties effectively. This role also contributes to the quality of decision-making and the consistent implementation of good corporate governance principles.

Pada tahun 2025, terdapat pergantian Sekretaris Dewan Komisaris yang semula dijabat oleh Sdr. Harya Sidharta dan digatikan oleh Sdri. Ira Verawaty dengan profil sebagai berikut:

In 2025, there was a change in the Secretary of the Board of Commissioners, with Mr. Harya Sidharta replaced by Mrs. Ira Verawaty. Her profile is presented below:



Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

59 tahun | years old

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

SK Dewan Komisaris No. 05/DK/PLN TARAKAN/2021 tanggal 28 Desember 2021
Board of Commissioners Decree No. 05/DK/PLN TARAKAN/2021 dated 28 December 2021

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- S1 - Teknik Mesin, di Universitas Indonesia (1991)
- S2 - Bidang Manajemen Lainnya, University of Abertay Dundee, Scotland (2006)
- S1 - Mechanical Engineering, University of Indonesia (1991)
- S2 - Other Management, University of Abertay Dundee, Scotland (2006)

Sertifikasi | Certifications

Executive Development Program: Live Virtual Training Business Acumen, PPM Manajemen

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir | Employment History/Work Experience for the Last 5 (five) Years

- Vice President GCG and Compliance pada Divisi Kepatuhan Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat
- Vice President Integrity Management pada Divisi Compliance Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat
- Senior Specialist I Corporate Planning pada Divisi Perencanaan Korporat Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat
- Vice President GCG and Compliance at the Compliance Division of the Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office
- Vice President Integrity Management at the Compliance Division of the Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office
- Senior Specialist I Corporate Planning at the Corporate Planning Division of the Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office

Pedoman dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Pengaturan tugas dan tanggung jawab sekretaris Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Sejalan dengan piagam tersebut tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai bebrikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
4. Menyusun Program dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Mengelola Keuangan Operasional Dewan Komisaris dan membuat laporan berkala Pertanggung Jawaban pengelolaan dana kepada Dewan Komisaris.
6. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan khusus Dewan Komisaris lainnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen terkait penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan baik di Perusahaan.
    a. Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib.
    b. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.

Guidelines and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the secretary of the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya are regulated in the Board of Commissioners Charter. In line with the charter, the duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Organising administrative and secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners.
3. Organising meetings of the Board of Commissioners and meetings/meetings between the Board of Commissioners and Shareholders/Capital Owners, Directors and other related parties, including but not limited to the preparation and delivery of invitations, submission of meeting materials and preparation of meeting minutes.
4. Prepare the Board of Commissioners Programme and Budget.
5. Manage the Operational Finance of the Board of Commissioners and make periodic reports on the accountability of fund management to the Board of Commissioners.
6. Preparing the Annual Report and other special reports of the Board of Commissioners.
7. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners.
8. In the context of orderly administration and good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that documents related to the implementation of the above activities are properly stored in the Company.
    a. The Secretary of the BOC administers outgoing and incoming letters to the BOC, and other documents in an orderly manner.
    b. The Secretary of the BOC has a document storage facility provided by the Company.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN Nusa Daya telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut.

1. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
2. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan;
3. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
5. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib;
6. Menyusun notulen rapat Dewan Komisaris termasuk rekapan kehadiran rapat Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan bahan-baran rapat Dewan Komisaris.

Implementation of Activities of the Secretary of the Board of Commissioners

Throughout 2025, the Secretary of the Board of Commissioners of PT PLN Nusa Daya has carried out various activities including the following.

1. Monitoring the follow-up of decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners;
2. Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the company;
3. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners in connection with company management activities carried out by the Board of Directors;
4. Collecting technical data from Committees within the Board of Commissioners and experts of the Board of Commissioners for the needs of the Board of Commissioners;
5. Administering outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners, and other documents in an orderly manner;
6. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings including attendance records of the Board of Commissioners meetings;
7. Preparing materials for Board of Commissioners meetings.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan menjalankan peran strategis sebagai organ pendukung Direksi yang berpedoman pada tata kelola yang baik serta regulasi korporasi yang berlaku. Fungsi ini dibentuk untuk memelihara citra positif Perusahaan sekaligus menjamin keterbukaan informasi yang akurat, dan akuntabel. Bertindak sebagai penghubung utama, Sekretaris Perusahaan berkontribusi aktif dalam menggerakkan sinergi internal serta membangun hubungan bisnis yang baik dengan Pemegang Saham Pengendali, otoritas regulator, dan mitra strategis. Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Sekretariat Perusahaan dan dipimpin Sdr. P. Gading Aji, N.P., yang diangkat oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan Direksi No. 0009.K/DIR/2024 tertanggal 01 Januari 2024. Penetapan tersebut dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan keselarasan kualifikasi pendidikan, rekam jejak pengalaman kerja, serta kompetensi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

The Corporate Secretary serves a strategic function as a supporting body to the Board of Directors in accordance with good corporate governance principles and applicable corporate regulations. This function is established to safeguard the Company's corporate image and ensure accurate, transparent, and accountable information disclosure. As the key liaison of the Company, the Corporate Secretary plays an active role in enhancing internal coordination and synergy, as well as maintaining constructive relationships with the Controlling Shareholder, regulators and relevant authorities, and strategic business partners. The Corporate Secretary function is performed by the Corporate Secretariat under the leadership of Mr P. Gading Aji, N.P., who was appointed by the President Director pursuant to Board of Directors Decree No. 0009.K/DIR/2024 dated 1 January 2024. The appointment was made having due regard to the suitability of his educational background, professional experience, and competencies required by the Company.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Kewarganegaraan
Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age
44 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Surat Keputusan Direksi No. 1886.K/SDM.02.02/DIR/2023 tanggal 27 Desember 2023
Board of Directors' Decision Letter No. 1886.K/SDM.02.02/DIR/2023 dated 27 December 2023

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Meraih gelar Sarjana Informatika, Universitas Gunadarma (2023).
Bachelor's degree in Informatics, Gunadarma University, 2023.

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Deputi Manajer Teknologi Informasi (2015)
- Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Rantau Rapat (2021)
- Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematang Siantar (2022)
- Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bintaro (2023)
- Deputy Manager of Information Technology (2015)
- Manager of Customer Service Unit in Rantau Rapat (2021)
- Manager of Customer Service Unit in Pematang Siantar (2022)
- Manager of Customer Service Unit in Bintaro (2023)

Sertifikasi | Certification

Qualified Chief Risk Officer (QCRO)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.
Has no affliation relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.

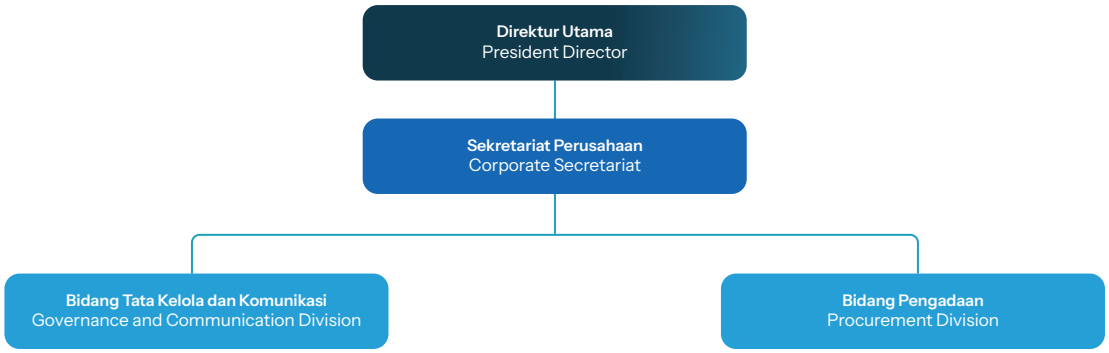
Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Kedudukan organisasi Sekretariat Perusahaan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama. Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, unit kerja Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa fungsi strategis dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusa Daya Nomor: 0044.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PLN Nusa Daya.

Organizational Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretariat is positioned directly under and fully accountable to the President Director. To ensure the effective discharge of its duties, the Corporate Secretary work unit supervises several strategic functions in accordance with PT PLN Nusa Daya Board of Directors Regulation No. 0044.P/DIR/2025 concerning the Organisation and Work Procedures of PLN Nusa Daya.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Organizational Structure



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mendukung efektivitas tata kelola organisasi, dalam rangka menegakkan prinsip GCG dan mengoptimalkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan mengemban tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
4. Memfasilitasi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris;
6. Sebagai penghubung (*liaison officer*), dengan menyampaikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder Perusahaan;
7. Mengelola penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan guna melindungi kepentingan perusahaan;
8. Menata usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
9. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan perusahaan;
10. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai perusahaan dari setiap unit kerja.
11. Mengelola media komunikasi internal termasuk penyiapan data dan statistik perusahaan secara berkala;

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary supports the effectiveness of organisational governance in order to uphold GCG principles and optimise relationships with stakeholders. The Corporate Secretary carries out the following main duties and responsibilities:

1. Ensure that the company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request;
3. Preparing the organization of the GMS;
4. Facilitate the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings and assist in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Attend Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
6. As a liaison officer, by delivering relevant, accurate and timely information to stakeholders and maintaining good relations with the Company's stakeholders;
7. Managing the handling of legal issues faced by the company, both inside and outside the company in order to protect the interests of the company;
8. Organizing and storing company documents including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and Minutes of the Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting and GMS;
9. Recording the Special Register related to the Board of Directors and their families and the Board of Commissioners and their families both in the company and its affiliates which include share ownership, business relationships, and other roles that pose a conflict of interest with the interests of the company;
10. Collecting all important information about the company from each work unit.
11. Managing internal communication media including the preparation of company data and statistics on a regular basis;

12. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai public document;
13. Koordinator untuk persiapan penyusunan laporan manajemen dan laporan-laporan lainnya seusai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan baik kepada pemerintah, Holding Company, maupun investor;
14. Mengkoordinasi kegiatan penyusunan kebijakan Perusahaan dalam perlindungan hukum, hubungan dengan Pemerintah, komunikasi dan hubungan Masyarakat dan pengembangan corporate branding;
15. Mengatur dan membina penyelenggaraan acara korporat yang berhubungan dengan tata kelola korporat termasuk mengkoordinir kegiatan protokoler Perusahaan;
16. Menyusun strategi dan mengkoordinir usaha-usaha dalam meredam isu-isu yang berkembang serta gejolak yang mungkin timbul yang dapat menurunkan citra Perusahaan;
17. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan dalam rangka pembinaan anggota Perusahaan yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan pembentukan identitas Perusahaan;
18. Mengelola sumber daya untuk kesekretariatan yang mencakup kegiatan pengaturan jadwal penugasan SDM dan upaya meningkatkan kapabilitas;
19. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama secara berkala.

12. Determining criteria regarding the type and material of information that can be submitted to stakeholders, including information that can be submitted as a public document;
13. Coordinator for the preparation of management reports and other reports in accordance with the obligations that must be fulfilled by the company both to the government, Holding Company, and investors;
14. Coordinate the preparation of Company policies in legal protection, government relations, communication and public relations and the development of corporate branding;
15. Organizing and fostering the organization of corporate events related to corporate governance including coordinating the Company's protocol activities;
16. Developing strategies and coordinating efforts in reducing developing issues and turmoil that may arise that can degrade the Company's image;
17. Provide recommendations to the Board of Directors and all employees of the Company in order to foster members of the Company who have high legal awareness and the formation of the Company's identity;
18. Managing resources for the secretariat which includes activities to organize HR assignment schedules and efforts to improve capabilities;
19. Reporting the implementation of his duties to the President Director on a regular basis.

Pengembangan Kompetensi Sekretariat Perusahaan

Guna senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mengawal tata kelola korporasi, Sekretaris Perusahaan bersama jajaran tim Divisi Sekretariat Perusahaan aktif mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Realisasi keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development of Corporate Secretary

In order to continuously strengthen capacity and professionalism in supporting corporate governance, the Corporate Secretary and the Corporate Secretariat Division team actively participated in various competency development programmes. The realisation of education and training participation throughout 2025 is presented as follows:

Pengembangan Kompetensi Sekretariat Perusahaan
Competency Development of Corporate Secretary

No	Topik Pelatihan Training Program	Tanggal Date
1	*Basic Infographic Slide Design.*	16 Januari 2025 | 16 January 2025
2	*Workshop* Penyusunan *Roadmap* dan Program Kerja *Moonshot* serta Penggunaan Aplikasi *Motion*. Workshop on the Formulation of Moonshot Roadmap and Work Program, and the Utilization of the Motion Application.	22 April 2025
3	Strategi CSR & Pengukuran Kinerja Berkelanjutan dengan SROI. CSR Strategy & Sustainability Performance Measurement using SROI.	06 Mei 2025 06 May 2025
4	*Leader as Coach.*	25 Mei 2025 | 25 May 2025
5	Audit Internal Iso 37001 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). ISO 37001:2016 Internal Audit for Anti-Bribery Management System (ABMS).	25 September 2025
6	Pengelolaan Pengembangan Usaha dan Bisnis Model. Business Development Management and Business Models.	22 Oktober 2025 22 October 2025

No	Topik Pelatihan Training Program	Tanggal Date
7	Evaluasi Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Pendokumentasian Proses PBJ. Evaluation of Agreement/Contract Drafting and Procurement Documentation Processes.	21 Oktober 2025 21 October 2025
8	Analisis dan Evaluasi RJPP. | Analysis and Evaluation of the Corporate Long-Term Plan.	8 Desember 2025 | 8 December 2025
9	Ketrampilan Komunikasi Lanjutan. | Advanced Communication Skills.	15 September 2025

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan Tahun 2025

Sekretaris Perusahaan telah merealisasikan berbagai program kerja strategis demi mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi serta memastikan penerapan prinsip GCG yang berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan rapat internal Direksi serta rapat gabungan bersama Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan Rapat Kerja Semester I dan II Tahun 2025;
3. Mendampingi dan mengkoordinasikan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris;
4. Menggordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham;
6. Menyusun dan melakukan peninjauan atas Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan Perusahaan;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan program TJSL Perusahaan sepanjang tahun 2025;
8. Sebagai Jembatan komunikasi antara Anak Perusahaan termasuk penyelenngaraan RUPS Anak Perusahaan;
9. Mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan Anak Perusahaan seperti Surat Keputusan Direksi PLN Nusa Daya selaku pemegang saham;
10. Memonitor dan mengawal proses pergantian maupun perpanjangan pengurus Anak Perusahaan;
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan maupun PLN Nusa Daya selaku pemegang saham;
12. Memonitor hal-hal yang mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
13. Melakukan kegiatan publikasi perihal Perusahaan yang tersebar melalui berbagai jenis media;
14. Menyelenggarakan *meeting* dengan para *stakeholder.*

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2025

The Corporate Secretary realised various strategic work programmes to support the effective implementation of the Board of Directors' duties and to ensure the continued application of GCG principles. The duties carried out throughout 2025 are presented as follows:

1. Coordinating and documenting internal meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners;
2. Organizing Work Meetings for Semester I and II of 2024;
3. Accompanying and coordinating working visits conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners;
4. Coordinating the organization of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held in 2024 and Circular Resolutions of Shareholders;
5. Prepare and submit periodic reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders;
6. Preparing and reviewing the Company's Letter Management and Archives Guidelines;
7. Coordinating the implementation of the Company's CSR program throughout 2024;
8. Serving as a communication bridge between subsidiaries, including organizing the GMS of subsidiaries;
9. Administering documents related to subsidiaries such as the Decree of the Board of Directors of PLN Nusa Daya as the shareholder;
10. Monitor and oversee the process of changing and extending the management of Subsidiaries;
11. Providing data/information required by the Board of Commissioners of Subsidiaries and PLN Nusa Daya as the shareholder;
12. Monitor matters that require approval or recommendation from the Board of Commissioners in relation to the Company's management activities carried out by the Board of Directors;
13. Conducting publication activities regarding the Company spread through various types of media;
14. Organizing meetings with stakeholders.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal adalah fungsi independen dalam perusahaan yang bertugas memberikan penilaian objektif terhadap aktivitas organisasi untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan tujuan perusahaan. Unit ini memberikan *assurance* kepada manajemen dan pemangku kepentingan, membantu mengidentifikasi kelemahan sistem, mengelola risiko, serta meningkatkan efektivitas operasional melalui evaluasi terhadap pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi.

The Internal Audit Unit (IAU) is an independent function within the Company responsible for providing objective assessments of the Company's activities to ensure that business processes are carried out in accordance with Company policies, regulations, and objectives. The IAU provides assurance to management and stakeholders, helps identify system weaknesses, manages risks, and improves operational effectiveness through the evaluation of internal controls and regulatory compliance.

Selain fungsi pengawasan, Unit Audit Internal juga berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan Perusahaan. Dalam tata kelola Perusahaan, unit ini mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sehingga membantu menciptakan organisasi yang sehat, transparan, dan mampu mencapai tujuan strategisnya secara berkelanjutan.

In addition to its oversight function, the IAU also acts as a strategic partner to management by providing recommendations to improve the efficiency, effectiveness, and quality of the Company's management. Within the Company's governance framework, the IAU supports the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, thereby helping to foster a sound and transparent organisation capable of achieving its strategic objectives on a sustainable basis.

Fungsi Unit Audit Internal dijalankan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan dipimpin oleh Kepala SPI. Direksi mengangkat Sdr. Supono sebagai kepala SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0362.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 26 April 2021. Pengangkatan Kepala SPI ini telah melalui persetujuan Dewan Komisaris dan memenuhi kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi yang ditetapkan oleh Perusahaan.

The functions of the IAU are carried out by the Internal Audit Unit (IAU) and led by the Head of IAU. The Board of Directors appointed Mr. Supono as Head of IAU pursuant to Board of Directors' Decree No. 0362.K/SDM.02.02/DIR/2021 dated 26 April 2021. The appointment of the Head of IAU has been approved by the Board of Commissioners and fulfils the educational qualifications, work experience, and competencies required by the Company.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Profil of Internal Audit Unit



Kewarganegaraan
Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia | Age

55 tahun | years old

Domisili | Domicile

Balikpapan

Dasar Hukum Pengangkatan | Decree of Appointment

Surat Keputusan Direksi No. 0362.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 26 April 2021
Board of Directors' Decree No. 0362.K/SDM.02.02/DIR/2021 dated 26 April 2021

Riwayat Pendidikan | Educational Background

S1 – Ekonomi Akuntansi, Universitas IBA (1999)
Bachelor's Degree in Accounting Economics, IBA University (1999)

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Manager Risiko Distribusi Lampung pada Bidang Risiko Regional Sumatera Kalimantan Divisi Manajemen Risiko Regional SUB Direktorat Manajemen Risiko Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021)
- Deputy Group Head Audit 19B pada Bidang Audit Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-2021)
- Deputy Group Audit Regional 17B pada Group Audit Regional 17 PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)
- Manager of Lampung Distribution Risk, Sumatra-Kalimantan Regional Risk Department, Regional Risk Management Division, Risk Management Sub-Directorate, Finance and Risk Management Directorate, PT PLN (Persero) Head Office (2021)
- Deputy Group Head Audit 19B, Bali and Nusa Tenggara Audit Department, PT PLN (Persero) Head Office (2018–2021)
- Deputy Regional Audit Group 17B, Regional Audit Group 17, PT PLN (Persero) Head Office (2018)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada
None

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan serta dengan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengangkatan maupun pemberhentian tersebut diawali dengan usulan dari Direktur Utama terkait posisi Senior Audit Executive yang kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan sebelum keputusan ditetapkan.

Unit Responsible for Appointing and Dismissing the Head of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (IAU) is led by the Head of IAU, who is appointed and dismissed by the President Director in accordance with the Company's applicable procedures and with the approval of the Board of Commissioners. The appointment and dismissal process begin with a proposal from the President Director for the position of Senior Audit Executive, which is then submitted to the Board of Commissioners for approval before a decision is finalised.

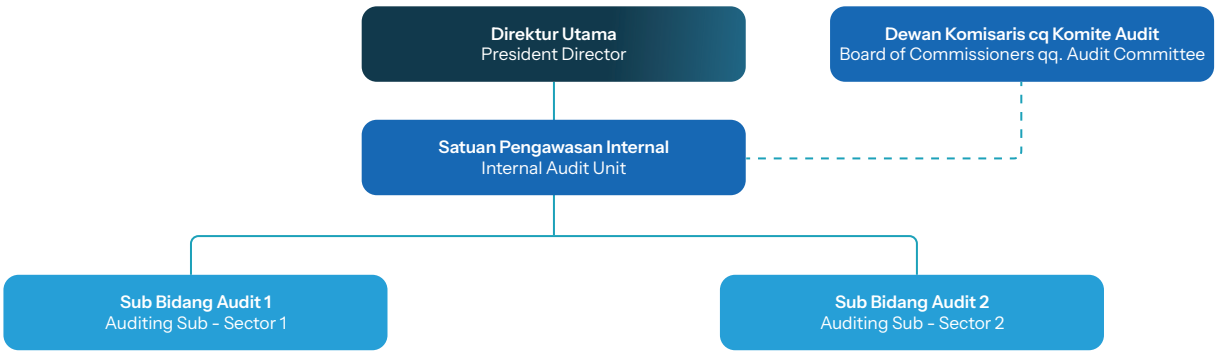
Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta melakukan koordinasi, komunikasi, dan penyampaian laporan terkait pelaksanaan tugas Pengawasan Internal. Di samping itu, secara fungsional SPI juga menyampaikan laporan dan berkoordinasi dengan Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas fungsi pengawasan Perusahaan. Kepala SPI dibantu oleh pejabat setingkat Supervisory Atas dan Staf disesuaikan dengan Peraturan Direksi mengenai Organisasi. Struktur Organisasi SPI mengacu pada Peraturan Direksi No. 0044.P/DIR/2025 tanggal 01 Oktober 2025.

Structure and Position of the Internal Audit Unit

The IAU is accountable to the President Director and is responsible for coordinating, communicating, and submitting reports on the implementation of internal audit duties. Functionally, the IAU also reports to and coordinates with the Audit Committee under the Board of Commissioners to support the effectiveness of the Company's audit function. The Head of IAU is assisted by officials at the Senior Supervisory level and staff in accordance with the Board of Directors' Regulation on Organisation. The organisational structure of the IAU is based on Board of Directors' Regulation No. 0044.P/DIR/2025 dated 1 October 2025.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal
Organizational Structure of the Internal Audit Unit



Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal ditetapkan dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dan pada tanggal 10 Januari 2025 sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan fungsi Audit Internal di lingkungan Perusahaan. Untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang, Piagam Audit Internal ditinjau dan dievaluasi secara berkala, serta dapat diperbarui atau disempurnakan apabila diperlukan guna menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal di Perusahaan.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter was adopted and signed by the President Commissioner and the President Director on 10 January 2025 as the official guideline for the implementation of the internal audit function within the Company. To ensure alignment with regulatory developments, good corporate governance practices, and the evolving needs of the organisation, the Internal Audit Charter is reviewed and evaluated periodically, and may be updated or refined as necessary to maintain the effectiveness of the Company's internal audit function.

Piagam Audit Internal secara garis besar mengatur landasan dasar, struktur, mekanisme kerja, dan standar mutu pengawasan di lingkungan Perusahaan. Muatannya mencakup latar belakang, dasar hukum, visi-misi, serta jenis layanan audit. Selanjutnya, Piagam Audit Internal juga menegaskan kedudukan formal SPI dalam organisasi, jaminan independensi dan objektivitas, serta kualifikasi wajib bagi para auditornya. Aspek operasional diatur melalui kejelasan mandat, tata cara pelaporan, integrasi sistem (SPIT), penggunaan jasa eksternal, dan pola komunikasi audit. Seluruh rangkaian ini disempurnakan dengan penetapan standar pelaksanaan tugas, kode etik profesional (termasuk untuk investigator), serta program jaminan mutu (*Quality Assurance and Improvement Program*/QAIP).

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Ruang lingkup penugasan Satuan Pengawasan Internal mencakup seluruh area operasional dan bisnis Perusahaan serta entitas anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal.
2. Memastikan pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai dengan rencana.
3. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
4. Memantau tindakan perbaikan atas temuan.
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
6. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
7. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Audit Internal secara periodik.
8. Melaksanakan evaluasi kualitas layanan asurans dan layanan konsultansi oleh jajaran SPI maupun pihak independen atas seluruh proses audit.
9. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha PT PLN Nusa Daya.
10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di internal SPI maupun dengan bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/ lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya.

The Internal Audit Charter broadly sets out the fundamental principles, structure, operating mechanisms, and quality standards for the Company's oversight activities. Its contents include the background, legal basis, vision and mission, as well as the types of audit services. Furthermore, the Internal Audit Charter also reaffirms the formal position of the Internal Audit Unit (IAU) within the organisation, guarantees its independence and objectivity, and sets out the mandatory qualifications for its auditors. Operational aspects are regulated through a clear mandate, reporting procedures, system integration through SPIT, the use of external services, and audit communication protocols. This framework is further supported by standards for the performance of duties, a professional code of ethics, including for investigators, and a Quality Assurance and Improvement Programme (QAIP).

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The scope of the Internal Audit Unit's (IAU) assignment covers all operational and business areas of the Company and its subsidiaries. In this regard, the IAU has the following duties and responsibilities:

1. Preparing the annual audit plan and allocating the budget for the implementation of the internal audit function.
2. Ensuring that internal audits are carried out in accordance with the established plan.
3. Reporting significant findings to the President Director and the Board of Commissioners to support prompt corrective action.
4. Monitoring corrective actions taken in response to audit findings.
5. Evaluating the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and regulations and Company policies.
6. Conducting examinations and assessments of efficiency and effectiveness in the areas of finance, commercial operations, operations, human resources, information technology, and other activities.
7. Periodically preparing and reviewing the Internal Audit Charter.
8. Conducting quality assessments of assurance and consulting services provided by IAU staff and independent parties across all audit processes.
9. Ensuring that IAU members undertake continuous professional development and other training in line with the increasing complexity and development of PT PLN Nusa Daya's business activities.
10. Coordinating and collaborating within the IAU and with other departments and units, as well as with other supervisory bodies or agencies, to facilitate the achievement of established targets and improve the performance of the IAU and the Company within its scope of authority.

11. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audiut internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
12. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangaan.

11. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data relating to the performance of internal audit duties and responsibilities, unless disclosure is permitted under the provisions of laws and regulations and/or court decisions.
12. Safeguarding confidential information obtained during the term of office in accordance with the provisions of laws and regulations.

Kualifikasi dan Sertifikasi Auditor Internal

Qualifications and Certifications of Internal Auditors

Pelaksanaan kegiatan audit di lingkungan Perusahaan dilakukan oleh tim auditor internal yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas 1 (satu) Kepala Satuan Pengawas Intern, 2 (dua) Assistant Manager Audit, dan 4 (empat) Auditor. Tim audit telah memiliki pengalaman dalam bidang audit dan telah tersertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dan sertifikasi lain yang relevan yang sesuai dengan *Global Internal Audit Standard* (GIAS) yang berlaku. Kualifikasi pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki tim auditor internal Perusahaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Audit activities within the Company are carried out by a team of 7 (seven) internal auditors, comprising 1 (one) Head of the Internal Audit Unit, 2 (two) Assistant Audit Managers, and 4 (four) Auditors. The audit team has experience in the field of auditing and holds Qualified Internal Auditor (QIA) certification, as well as other relevant certifications in accordance with the applicable Global Internal Audit Standards (GIAS). The educational qualifications and certifications held by the Company's internal audit team in 2025 are as follows:

Kualifikasi Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Internal
Educational Qualifications and Certifications of Internal Auditors

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Sertifikasi Certification
Supono Immanuel	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit	Sarjana Bidang Ekonomi AKuntansi Bachelor's Degree in Accounting Economics	• *Qualified Internal Auditor* Tingkat Manajerial • *Qualified Risk Management Professional* (QRMP) • *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) • Qualified Internal Auditor – Managerial Level • Qualified Risk Management Professional (QRMP) • Certified Internal Audit Executive (CIAE)
Nur Aziz Nashirudin	Assisstant Manager Audit 1 Assistant Audit Manager 1	Magister Teknik Master's Degree in Engineering	• *Certified Practicioner Internal Audit (CPIA)* • *Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar* • *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) • Certified Practitioner Internal Audit (CPIA) • Qualified Internal Auditor – Basic Level • Qualified Risk Management Officer (QRMO)
Ferro Hudson	Assisstant Manager Audit 2 Assistant Audit Manager 2	Magister Teknik Master's Degree in Engineering	• *Qualified Internal Auditor* Tingkat Lanjutan • *Certified Risk Management Officer* (CRMO) • *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) • Qualified Internal Auditor – Advanced Level • Certified Risk Management Officer (CRMO) • Certified Internal Audit Executive (CIAE)
Chani Anugerah A.H	Auditor	Sarjana Teknik Industri Bachelor's Degree in Industrial Engineering	• *Qualified Internal Auditor* Tingkat Lanjutan • *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) • Qualified Internal Auditor – Advanced Level • Qualified Risk Management Officer (QRMO)
Fitrie Cerriana Sari	Auditor	Sarjana Teknik Mesin Bachelor's Degree in Mechanical Engineering	• *Qualified Internal Auditor* Tingkat Lanjutan • *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) • Qualified Internal Auditor – Advanced Level • Qualified Risk Management Officer (QRMO)
Daniarsasiah Audina	Auditor	Sarjana Ekonomi Bachelor's Degree in Economics	-
Muhammad Akhyar Suwandi	Auditor	Sarjana Ekonomi Bachelor's Degree in Economics	*Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar* Qualified Internal Auditor – Basic Level

Program Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Sebagai upaya nyata dalam memenuhi kualifikasi wajib auditor serta menjaga mutu pengawasan yang adaptif terhadap dinamika bisnis, SPI melakukan penguatan kapabilitas internal. Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap auditor memiliki kompetensi yang memadai dan pemenuhan standar mutu *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP), sehingga SPI mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis manajemen. Berbagai program pengembangan kompetensi profesional yang diikuti sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Competency Development Programme

As part of its concrete efforts to fulfil the mandatory qualifications for auditors and maintain the quality of oversight in line with business dynamics, the IAU continues to strengthen its internal capabilities. This strategic initiative is undertaken to ensure that each auditor possesses adequate competencies and meets the quality standards set under the Quality Assurance and Improvement Programme (QAIP), thereby enabling the IAU to fulfil its role as a strategic partner to management. The professional competency development programmes carried out throughout 2025 were as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Auditor
Auditor Competency Development Programme

No	Program Pengembangan Development Programme	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
1	*Artificial Intelligence*: Inovasi dalam Audit Internal. Artificial Intelligence: Innovation in Internal Audit	10 Oktober 2025 10 October 2025
2	*Capacity Building* Audit Manajemen Risiko (2nd line). Capacity Building on Risk Management Audit (2nd Line)	22-24 Oktober 2025 22–24 October 2025
3	Audit *Emerging Risk* – Ernst & Young Indonesia. Emerging Risk Audit – Ernst & Young Indonesia	31 Oktober 2025 31 October 2025
4	*Capacity Building* Evaluasi Efektivitas GRC. Capacity Building on GRC Effectiveness Evaluation	19 November 2025 19 November 2025
5	*Upskilling* Pelaksanaan *Test of Design* (ToD). Upskilling on Test of Design (ToD) Implementation	18-19 Desember 2025 18–19 December 2025
6	*Upskilling* Pelaksanaan *Agile Audit.* Upskilling on Agile Audit Implementation	18-19 Desember 2025 18–19 December 2025

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Internal

Sepanjang tahun 2025, Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara konsisten menjalankan peran pengawasan yang terarah dan akuntabel berdasarkan Rencana Audit Tahun 2025 yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang (RJP) 2024–2028, Sasaran RKAP 2025, profil risiko Perusahaan, masukan konstruktif dari *Board of Directors* (BoD) dan *Board of Commissioners* (BoC), serta tata kelola pengawasan terbaik (*best practice*). Sebagai *strategic business partner*, SPI memposisikan diri untuk memahami secara mendalam rencana program kerja korporasi guna mengintegrasikan fungsi pengawasan dengan penguatan kemitraan (*partnership*) di seluruh lini operasional. Melalui pendekatan kemitraan yang kuat ini, SPI berkomitmen memberikan nilai tambah dalam memperkokoh budaya keandalan perusahaan serta memastikan pencapaian target bisnis yang patuh dan akuntabel, di mana realisasi pelaksanaan audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Report on the Implementation of the Internal Audit Unit's Duties

Throughout 2025, the Internal Audit Unit (IAU) consistently performed its oversight role in a focused and accountable manner, based on the 2025 Audit Plan. The plan was comprehensively prepared with reference to the 2024–2028 Long-Term Plan (LTP), the targets outlined in the 2025 Work Plan and Budget (WP&B), the Company's risk profile, constructive input from the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as best practices in oversight governance. As a strategic business partner, the IAU aims to develop an in-depth understanding of the Company's work programmes in order to integrate its oversight function with the strengthening of partnerships across all operational lines. Through this partnership-based approach, the IAU is committed to delivering added value by reinforcing the Company's culture of reliability and supporting the achievement of business targets in a compliant and accountable manner. The implementation of audit activities in 2025 was as follows:

No.	Jenis Audit Type of Audit	Jumlah Auditee Number of Auditees	Keterangan Description
1.	Audit Operasional Operational Audit	4	• Audit Operasional *Project* Pembangkit • Audit Operasional *Project* Transmisi & Pelayanan Pelanggan • Audit Operasional *Project* Distribusi • Audit Operasional PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PT PCN) • Operational Audit of Power Plant Projects • Operational Audit of Transmission and Customer Service Projects • Operational Audit of Distribution Projects • Operational Audit of PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PT PCN)
2.	Audit Tematik Thematic Audit	2	• Audit Tematik Pengembangan Bisnis (*Beyond* kWh) • Audit Tematik Implementasi K3L • Thematic Audit of Business Development (Beyond kWh) • Thematic Audit of HSSE Implementation
3.	Audit Lain-lain (*Adhoc*) Other Audits (Ad Hoc)	2	• Audit *Adhoc* Human Capital Implementasi HXMS bersama SPI PLN (Persero) • Audit *Adhoc* Manajemen Risiko • Ad Hoc Audit of Human Capital – HXMS Implementation with the IAU of PT PLN (Persero) • Ad Hoc Audit of Risk Management
4.	Audit Investigasi/ Khusus Investigative/ Special Audit	3	• Audit Investigasi pada Unit Pelaksana Kalimantan 3 • Audit Investigasi pada Unit Pelaksana Kalimantan 1 • Audit Investigasi Dugaan Penyalahgunaan Biaya Operasi di Unit Pelaksana Sulawesi 1 • Investigative Audit at Kalimantan 3 Implementation Unit • Investigative Audit at Kalimantan 1 Implementation Unit • Investigative Audit into Alleged Misuse of Operating Expenses at Sulawesi 1 Implementation Unit

Melengkapi penugasan audit, SPI juga menjalankan fungsi pemantauan (*monitoring*) atas penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh internal SPI maupun pihak Auditor Eksternal. Demi menjaga integritas dan akuntabilitas pengawasan, seluruh kegiatan ini diselenggarakan secara independen, objektif, dan sistematis. Pengawasan yang disiplin ini merupakan bagian dari komitmen SPI untuk memastikan bahwa pilar tata kelola, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko perusahaan berfungsi secara efektif dan mitigatif dalam mengawal keberhasilan target bisnis Perusahaan.

Rapat Audit Internal Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara aktif memperkuat perannya sebagai *strategic business partner* melalui partisipasi intensif dalam berbagai forum koordinasi dan diskusi strategis bersama manajemen serta organ pengawas perusahaan. Dalam upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola, SPI tercatat telah menghadiri sebanyak 4 (empat) kali rapat, baik yang diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun Komite Audit. Kehadiran aktif dalam forum-forum strategis tersebut menjadi sarana bagi SPI untuk menyampaikan progres dan hasil audit secara objektif, mendiskusikan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang solutif. Lebih dari sekadar fungsi pelaporan, keterlibatan ini juga ditujukan untuk memberikan pandangan profesional (*insight*) yang mitigatif terkait isu-isu terkini di bidang pengendalian internal, arsitektur manajemen risiko, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik demi mendukung pengambilan keputusan strategis korporasi.

In addition to its audit assignments, the Internal Audit Unit (IAU) also carries out a monitoring function over the resolution of findings and recommendations arising from audits, whether conducted by the IAU's internal team or by external auditors. To safeguard the integrity and accountability of its oversight activities, all such activities are carried out independently, objectively, and systematically. This rigorous oversight forms part of the IAU's commitment to ensuring that the pillars of corporate governance, the internal control system, and the Company's risk management function operate effectively and contribute to risk mitigation, thereby supporting the achievement of the Company's business objectives.

Joint Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee

Throughout 2025, the Internal Audit Unit (IAU) actively strengthened its role as a strategic business partner through intensive participation in various coordination forums and strategic discussions with Management and the Company's supervisory bodies. As part of its efforts to uphold transparency and accountability in corporate governance, the IAU attended a total of 4 (four) meetings organised by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee. The IAU's active participation in these strategic forums served as a platform to objectively present audit progress and findings, discuss measures to accelerate the completion of follow-up actions on audit findings, and provide practical recommendations for improvement. Beyond its reporting function, this involvement also enabled the IAU to provide professional insights aimed at mitigating current issues in internal control, risk management architecture, and good corporate governance practices, thereby supporting the Company's strategic decision-making.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perusahaan secara berkelanjutan membangun dan menyempurnakan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan adaptif di seluruh level organisasi, mulai dari kantor pusat hingga unit operasional di lapangan. Sistem ini diterapkan melalui kebijakan dan prosedur terstruktur untuk meminimalkan risiko usaha, mencegah penyimpangan, melindungi aset perusahaan, serta memastikan proses bisnis berjalan efisien, akuntabel, dan berintegritas. Melalui evaluasi berkala terhadap potensi risiko operasional, kedisiplinan, dan kepatuhan regulasi, Perusahaan berkomitmen menjaga keandalan laporan keuangan serta memperkuat budaya kepatuhan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, PLN Nusa Daya mengadopsi praktik tata kelola terbaik yang selaras dengan kerangka kerja internasional COSO (*Internal Control Framework*). Sistem pengendalian internal korporasi telah mengintegrasikan lima komponen utama dalam kerangka COSO tersebut, yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan Filosofi dan gaya manajemen; Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yang merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian kegiatan pada setiap tingkat unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan;
4. Sistem informasi dan komunikasi yang merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
5. Monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat Unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dan penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan disampaikan kepada Komite Audit.

The Company continuously develops and refines an effective and adaptive Internal Control System across all levels of the organization, from the head office to operational units in the field. This system is implemented through structured policies and procedures to minimize business risks, prevent irregularities, protect the Company's assets, and ensure that business processes run efficiently, accountable and with integrity. Through periodic evaluations of potential operational risks, discipline and regulatory compliance, the Company is committed to maintaining the reliability of its financial statements and strengthening a culture of compliance to support long-term business growth.

In its implementation, PLN Nusa Daya adopts best governance practices aligned with the international COSO Internal Control Framework. The Company's internal control system has integrated the five main components of the COSO framework, comprising:

1. A disciplined and structured internal control environment within the Company, consisting of employee integrity, ethical values and competence; management philosophy and style; the manner in which management exercises its authority and responsibilities; the organization and development of human resources; and the attention and direction provided by the Board of Directors;
2. Business risk assessment and management, which is a process for identifying, analyzing, assessing and managing business risks;
3. Control activities, which are actions carried out as part of the process of controlling activities at every unit level within the Company's organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, segregation of duties and security of the Company's assets;
4. Information and communication systems, which are processes for presenting reports on operational and financial activities, as well as compliance with applicable provisions and regulations; and
5. Monitoring, which is a process for assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function, at every unit level within the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally and any deviations that occur are reported to the Board of Directors, with a copy submitted to the Audit Committee.

Sistem Pengendalian Keuangan, Operasional dan Kepatuhan Perusahaan

Perusahaan menerapkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang ketat, otorisasi transaksi, serta sistem anggaran terintegrasi guna mencegah risiko kecurangan (*fraud*), menjaga akurasi pelaporan, dan mengamankan aset perusahaan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada aspek pengendalian keuangan. Sementara itu, Pengendalian Operasional difokuskan pada penguatan efektivitas dan efisiensi kegiatan kerja di kantor pusat maupun seluruh unit operasional melalui standardisasi prosedur, pengelolaan risiko lapangan, serta pemantauan indikator kinerja utama demi menjaga keselamatan kerja dan kontinuitas pelayanan. Melengkapi kedua aspek tersebut, Pengendalian Kepatuhan (*Compliance*) dijalankan untuk memastikan seluruh lini bisnis dan insan perusahaan tunduk pada regulasi eksternal serta kebijakan internal Perusahaan melalui internalisasi Etika Perilaku (*Code of Conduct*) dan optimalisasi *Whistleblowing System* (WBS) demi memitigasi risiko hukum secara preventif.

Dalam arsitektur tata kelola ini, Komite Audit memegang peran sentral dan strategis sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan (*oversight*) tertinggi terhadap efektivitas sistem pengendalian yang dijalankan oleh Direksi. Komite Audit secara berkala melakukan penelaahan mendalam atas integritas laporan keuangan perusahaan untuk memastikan validitasnya sebelum dipublikasikan, sekaligus mengevaluasi independensi dan mutu kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) agar senantiasa selaras dengan standar *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP). Selain itu, Komite Audit secara konsisten memantau komitmen manajemen dalam mempercepat tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi, baik dari hasil Pengawasan Internal maupun pemeriksaan Auditor Eksternal. Melalui sinergi pengendalian yang kokoh di tingkat manajemen dan pengawasan disiplin dari Komite Audit ini, PT PLN Nusa Daya berhasil membangun fondasi pengendalian internal yang andal, efisien, dan mitigatif demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

The Company's Financial, Operational, and Compliance Control Systems

The Company implements strict segregation of duties, transaction authorization and an integrated budgeting system to prevent fraud risk, maintain reporting accuracy and safeguard the Company's assets in accordance with the applicable Financial Accounting Standards in the area of financial control. Meanwhile, Operational Control focuses on strengthening the effectiveness and efficiency of work activities at the head office and across all operational units through procedure standardization, field risk management, and monitoring of key performance indicators to maintain workplace safety and service continuity. Complementing these two aspects, Compliance Control is implemented to ensure that all business lines and Company personnel comply with external regulations and the Company's internal policies through the internalization of the Code of Conduct and optimization of the Whistleblowing System (WBS), in order to mitigate legal risks preventively.

Within this governance architecture, the Audit Committee plays a central and strategic role as a supporting organ of the Board of Commissioners in carrying out the highest level of oversight over the effectiveness of the control system implemented by the Board of Directors. The Audit Committee periodically conducts in-depth reviews of the integrity of the Company's financial statements to ensure their validity before publication, while also evaluating the independence and quality of performance of the Internal Audit Unit (IAU) to ensure that it remains aligned with the standards of the Quality Assurance and Improvement Programme (QAIP). In addition, the Audit Committee consistently monitors management's commitment to accelerating follow-up actions on findings and recommendations, whether arising from internal oversight or External Auditor examinations. Through this strong synergy of control at management level and disciplined oversight by the Audit Committee, PT PLN Nusa Daya has succeeded in building a reliable, efficient and risk-mitigating internal control foundation to support long-term business growth.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, baik di tingkat entitas maupun pada level operasional di lapangan. Dalam menjaga keandalan sistem ini, Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan serta peninjauan berkala agar arsitektur pengendalian internal senantiasa adaptif terhadap perkembangan bisnis dan selaras dengan pencapaian sasaran strategis korporasi. Pengawasan di tingkat pengawas dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui pemberian nasihat strategis, evaluasi atas kecukupan laporan keuangan, serta penelaahan terhadap efektivitas manajemen risiko, dengan dukungan penuh dari komite-komite di bawahnya termasuk Komite Audit. Di sisi eksekutif, Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan sistem pengendalian internal secara konsisten melalui penguatan kebijakan, prosedur perusahaan, dan pemenuhan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini dieksekusi secara menyeluruh mencakup optimalisasi efisiensi operasional, mitigasi risiko yang preventif, penyelarasan perencanaan strategis, penegakan pemisahan tugas (*segregation of duties*), kejelasan pendelegasian wewenang, hingga penerapan kebijakan akuntansi yang andal dan akuntabel demi mengamankan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris secara resmi menegaskan komitmen tata kelola mereka melalui pernyataan bersama bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di seluruh lingkungan korporasi telah berjalan secara memadai, efektif, dan sepenuhnya selaras dengan standar internasional yang berlaku. Dalam implementasinya, efektivitas dan keandalan sistem pengawasan ini dicapai melalui internalisasi budaya kepatuhan yang melibatkan seluruh insan Perusahaan secara aktif di setiap tahapan proses bisnis, mencerminkan komitmen kokoh manajemen terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik serta arsitektur pengendalian risiko yang terstruktur dan mitigatif. Sebagai wujud nyata dari transparansi dan akuntabilitas publik, Perusahaan juga menerbitkan Laporan Pengendalian Internal Tahun 2025 yang menegaskan tanggung jawab penuh manajemen atas efektivitas pengendalian operasional serta keandalan pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit dan dinyatakan akuntabel oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia).

Evaluation and Effectiveness of the Internal Control System

The Company periodically conducts comprehensive evaluations of the effectiveness of its internal control system, both at the entity level and at the operational level in the field. To maintain the reliability of this system, the Board of Directors and the Board of Commissioners actively monitor and conduct periodic reviews to ensure that the internal control architecture remains adaptive to business developments and aligned with the achievement of the Company's strategic objectives. Oversight at the supervisory level is carried out by the Board of Commissioners through the provision of strategic advice, evaluation of the adequacy of financial statements, and review of the effectiveness of risk management, with full support from the committees under the Board of Commissioners, including the Audit Committee. At the executive level, the Board of Directors is fully responsible for consistently implementing the internal control system through the strengthening of policies, Company procedures, and compliance with applicable regulations. These measures are implemented comprehensively, covering the optimization of operational efficiency, preventive risk mitigation, alignment of strategic planning, enforcement of segregation of duties, clarity in the delegation of authority, and the implementation of reliable and accountable accounting policies to safeguard the Company's long-term growth.

Statement by the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

In 2025, the Board of Directors and the Board of Commissioners formally reaffirmed their governance commitment through a joint statement that the internal control system implemented across the Company had operated adequately and effectively, and was fully aligned with the applicable international standards. In its implementation, the effectiveness and reliability of this control system are achieved through the internalization of a culture of compliance that actively involves all Company personnel at every stage of the business process, reflecting management's strong commitment to good corporate governance practices and a structured, risk-mitigating control architecture. As a tangible form of transparency and public accountability, the Company also issued the 2025 Internal Control Report, which affirms management's full responsibility for the effectiveness of operational controls and the reliability of financial reporting, where the financial statements have undergone an audit process and were audited and certified by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC Indonesia).

Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management

Perusahaan menghadapi perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan strategis bagi Perusahaan. Berbagai aktivitas dan keputusan yang diambil Perusahaan memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi, baik dari aspek strategis, operasional, keuangan, maupun kepatuhan. Apabila tidak diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara tepat, risiko tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mitigasi untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi juga sebagai sarana dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.

The Company operates in an increasingly complex, dynamic, and uncertain business environment. Accordingly, effective risk management has become a strategic necessity for the Company. The Company's activities and decisions carry potential risks that may affect the achievement of organisational objectives, whether from strategic, operational, financial, or compliance perspectives. If not properly identified, analysed, and managed, these risks may have a significant impact on the Company's performance. Integrated and sustainable risk management not only serves as a mitigation mechanism to reduce potential losses, but also supports better decision-making, encourages innovation, enhances competitiveness, and creates sustainable added value for the Company.

Sistem dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

PLN Nusa Daya telah mengembangkan serta mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang terintegrasi pada seluruh proses bisnis Perusahaan. Penerapan sistem tersebut didukung oleh kebijakan, struktur organisasi, serta perangkat pendukung yang memadai guna memastikan pengelolaan risiko berjalan secara konsisten dan efektif di setiap jenjang organisasi. Dalam rangka memperkuat kapabilitas manajemen risiko perusahaan, PLN Nusa Daya melakukan penyempurnaan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Direksi Nomor 0017.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi. Kebijakan ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan menetapkan arah strategis, peran, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap unit kerja dalam proses pengelolaan risiko, sekaligus menegaskan bahwa seluruh insan PLN Nusa Daya memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, PLN Nusa Daya mengadopsi model Tiga Lini Pertahanan(*Three Lines of Defense*) sebagai kerangka pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Model ini memastikan adanya pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antara pemilik risiko sebagai lini pertama, fungsi pengawasan dan manajemen risiko sebagai lini kedua, serta fungsi Audit Internal yang independen sebagai lini ketiga. Selain itu, perusahaan menerapkan *Four Eyes Principle* untuk memastikan setiap keputusan dan proses yang bersifat material melalui mekanisme

Risk Management System and Policy

PLN Nusa Daya has established and implemented an integrated risk management system across all of the Company's business processes. The implementation of this system is supported by adequate policies, organisational structures, and supporting tools to ensure that risk management is carried out consistently and effectively at every organisational level. To strengthen its enterprise risk management capabilities, PLN Nusa Daya enhanced its policy framework by issuing Board of Directors Regulation No. 0017.P/DIR/2024 concerning the Strategic Policy on Integrated Risk Management. This policy was prepared pursuant to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Through this policy, the Company establishes clear strategic direction, roles, and responsibilities for each work unit in the risk management process. The policy also affirms that all PLN Nusa Daya personnel are responsible for identifying, managing, and monitoring risks in accordance with their respective functions and authorities.

In its implementation, PLN Nusa Daya adopts the Three Lines of Defence model as a framework for risk management and internal control. This model ensures a clear and complementary division of roles among risk owners as the first line, oversight and risk management functions as the second line, and the independent internal audit function as the third line. In addition, the Company applies the Four Eyes Principle to ensure that every material decision and process is subject to review and verification by more than one party. This principle is intended to improve

pemeriksaan dan verifikasi oleh lebih dari satu pihak, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas, serta meminimalkan potensi terjadinya konflik kepentingan.

Secara organisasi, fungsi manajemen risiko berada di bawah koordinasi Bidang Hukum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi identifikasi dan penilaian risiko, pemantauan pelaksanaan mitigasi, serta pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, struktur tata kelola yang jelas, dan partisipasi aktif seluruh unit kerja, PLN Nusa Daya terus mendorong penguatan budaya sadar risiko sebagai bagian integral dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta upaya menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis perusahaan di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang.

Peta Jalan Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola risiko yang berkelanjutan, PLN Nusa Daya telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2024–2028. *Roadmap* ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan manajemen risiko secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan perusahaan. *Roadmap* tersebut disusun untuk memastikan pengembangan kapabilitas manajemen risiko dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga mampu mendukung ketahanan organisasi, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, *roadmap* ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program kerja, dan inisiatif strategis yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi di seluruh lini organisasi.

PLN Nusa Daya menetapkan tema pengembangan dan sasaran strategis manajemen risiko untuk setiap tahun dalam *Roadmap* Manajemen Risiko Terintegrasi 2024–2028 sebagai tahapan menuju peningkatan tingkat kematangan (*risk maturity*) Perusahaan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah serta mendukung pencapaian tujuan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan. Adapun tema dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam *roadmap* tersebut adalah sebagai berikut:

the quality of decision-making, strengthen accountability, and minimise the potential for conflicts of interest.

Organisationally, the risk management function is coordinated under the Legal, Compliance, and Risk Management Division, which is responsible for policy formulation, facilitation of risk identification and assessment, monitoring of mitigation implementation, and supervision of compliance with applicable provisions. Supported by a strong policy framework, a clear governance structure, and the active participation of all work units, PLN Nusa Daya continues to strengthen risk awareness culture as part of Good Corporate Governance implementation, while safeguarding the Company's business sustainability and growth amid the evolving business landscape.

Risk Management Roadmap

As part of its efforts to strengthen sustainable risk governance, PLN Nusa Daya has developed the 2024–2028 Integrated Risk Management Roadmap. This roadmap serves as a strategic guideline for all work units in planning and implementing risk management development programmes in a focused, measurable manner and in alignment with the Company's objectives. The roadmap was prepared to ensure that risk management capabilities are developed gradually and continuously, thereby supporting organisational resilience, improving decision-making effectiveness, and strengthening the Company's ability to address various challenges and changes in the business environment. In addition, the roadmap serves as a reference in preparing policies, work programmes, and strategic initiatives related to the implementation of integrated risk management across all organisational levels.

PLN Nusa Daya has established risk management development themes and strategic objectives under the 2024–2028 Integrated Risk Management Roadmap as a phased pathway to enhance the Company's risk maturity. This approach is designed to ensure that risk management implementation does not focus solely on compliance aspects, but is also able to create added value and support the sustainable achievement of the Company's business objectives. The themes and strategic objectives set out in the roadmap are as follows:

Sasaran dan Strategi *Roadmap* Manajemen Risiko 2024-2028
Objectives and Strategies of the 2024–2028 Risk Management Roadmap

	Komitmen Commitment 2024	Keterpaduan Integration 2025	Konsistensi Consistency 2026	Keunggulan Excellence 2027	Keberlanjutan Sustainability 2028
Sasaran Objective	Tersedia komitmen Manajemen untuk mendukung program-program manajemen risiko sesuai *Roadmap* Management commitment is in place to support risk management programmes in accordance with the Roadmap	Terbangun kapasitas internal untuk melaksanakan program-program integrasi manajemen risiko Internal capacity is established to implement integrated risk management programmes	Terwujudnya integrasi manajemen risiko diseluruh organisasi sebagai stepping stone menuju kinerja berbasis manajemen risiko Risk management integration across the organisation is realised as a stepping stone towards risk management-based performance	Tersedianya sistem informasi manajemen risiko yang andal guna mendukung kinerja Manajemen Risiko A reliable risk management information system is available to support risk management performance	Tercapainya kapabilitas manajemen risiko pengembangan ketahanan dan keberlanjutan organisasi Risk management capabilities are achieved to support organisational resilience and sustainability
Strategi Strategy	Membangun komitmen Manajemen PLN Nusa Daya Build PLN Nusa Daya Management's commitment.	Membangun sinergi manajemen risiko di seluruh organisasi PLN Nusa Daya Build risk management synergy across PLN Nusa Daya's organisation	Meningkatkan kinerja manajemen risiko Improve risk management performance	Penguatan sistem informasi manajemen risiko Strengthen the risk management information system	Penguatan budaya risiko Strengthen risk culture
	Penguatan struktur organisasi manajemen risiko Strengthen the risk management organisational structure.	Penguatan proses pengambilan keputusan Strengthen the decision-making process	Meningkatkan dan meratakan keahlian manajemen risiko Enhance and broaden risk management expertise across the organisation	Penguatan budaya manajemen risiko Strengthen risk management culture.	Penguatan ketahanan dan keberlanjutan Perusahaan Strengthen the Company's resilience and sustainability

Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan manajemen risiko tercermin melalui pembentukan struktur tata kelola yang mendukung pengelolaan risiko secara efektif dan terintegrasi. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan kejelasan peran, tugas, dan tanggung jawab setiap fungsi dalam proses manajemen risiko, serta menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko di seluruh tingkat organisasi. Dengan dukungan struktur yang kuat, proses identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko dapat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan.

Active Role of the Board of Commissioners and Board of Directors in Risk Management Implementation

The commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors to risk management implementation is reflected in the establishment of a governance structure that supports effective and integrated risk management. This organisational structure is designed to ensure clarity of roles, duties, and responsibilities of each function in the risk management process, as well as to ensure the availability of competent and adequate human resources to support risk management implementation at all levels of the organisation. Supported by a strong structure, the processes of risk identification, assessment, mitigation, and monitoring can be carried out systematically in accordance with the Company's characteristics, complexity, and risk profile.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan risiko, Direksi bertanggung jawab menetapkan arah, kebijakan, dan strategi manajemen risiko yang selaras dengan tujuan serta rencana bisnis Perusahaan. Direksi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan usaha, dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan melalui penelaahan dan pemberian persetujuan atas kebijakan serta strategi manajemen risiko yang diajukan Direksi, sekaligus melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasinya. Sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif, memperkuat tata kelola Perusahaan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dan keberlanjutan bisnis PLN Nusa Daya.

In carrying out the risk management function, the Board of Directors is responsible for establishing risk management direction, policies, and strategies that are aligned with the Company's objectives and business plans. The Board of Directors also ensures that risk management principles are integrated into planning processes, business activity implementation, and strategic decision-making. Meanwhile, the Board of Commissioners performs its supervisory function by reviewing and granting approval for risk management policies and strategies proposed by the Board of Directors, while also monitoring the effectiveness of their implementation. This synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors serves as an important foundation for effective risk management implementation, the strengthening of corporate governance, and the achievement of PLN Nusa Daya's strategic objectives and business sustainability.

Struktur Organisasi Unit Manajemen Risiko Perusahaan

Organisational Structure of the Risk Management Unit

Struktur Organisasi Unit Manajemen Risiko
Organisational Structure of the Risk Management Unit



Pengelolaan manajemen risiko di PLN Nusa Daya dilaksanakan oleh Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang berada di bawah Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Human Capital. Fungsi ini berperan sebagai koordinator dalam penyusunan kebijakan, pengembangan metodologi, pemantauan implementasi, serta evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh lingkup Perusahaan. Untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi pada setiap proses bisnis, Perusahaan juga telah menetapkan *risk officer* pada masing-masing unit kerja. *Risk officer* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang terkait dengan aktivitas operasional di unitnya, sekaligus memastikan pelaksanaan mitigasi risiko berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Risk management at PLN Nusa Daya is carried out by the Risk Management and Compliance Division under the Directorate of Finance, Risk Management, and Human Capital. This function serves as the coordinating function in policy preparation, methodology development, implementation monitoring, and evaluation of risk management effectiveness across the Company. To ensure that risk management is carried out comprehensively and in an integrated manner across every business process, the Company has also appointed risk officers in each work unit. Risk officers are responsible for identifying, assessing, controlling, and monitoring risks related to operational activities in their respective units, while ensuring that risk mitigation is implemented in accordance with the applicable policies and procedures.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertindak sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan kerangka kerja, tata kelola, serta arah pengembangan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi ini berperan sebagai pendamping sekaligus *checker*, *reviewer*, dan pihak yang memberikan persetujuan sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap proses penilaian risiko maupun tindak lanjut mitigasi risiko Perusahaan. Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan juga memberikan masukan dan rekomendasi atas hasil penilaian risiko serta efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Kantor Pusat, Unit Region, maupun Anak Perusahaan, sehingga proses pengelolaan risiko dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis Perusahaan.

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis, PLN Nusa Daya secara berkelanjutan melaksanakan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Proses tersebut diawali dengan penetapan konteks, ruang lingkup, dan kriteria risiko yang selaras dengan strategi bisnis, karakteristik operasional, serta dinamika lingkungan usaha yang dihadapi Perusahaan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pengukuran risiko untuk menentukan risiko-risiko yang memerlukan perhatian dan pengelolaan secara prioritas.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi risiko, PLN Nusa Daya menetapkan sejumlah risiko utama yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja operasional, kepatuhan, maupun pencapaian sasaran strategis perusahaan. Risiko-risiko tersebut kemudian dikelola melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi guna memastikan tingkat risiko tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh perusahaan. Sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian risiko tersebut, PLN Nusa Daya menyusun Rencana Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation Plan*/RMP) yang menjadi bagian integral dari proses pengelolaan risiko perusahaan. Rencana mitigasi disusun berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi risiko yang terdokumentasi dalam *Risk Register* Korporat serta difokuskan pada upaya pengurangan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkannya.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana mitigasi dilakukan secara kolaboratif oleh *risk owner*, *risk champion*, dan PIC mitigasi pada unit kerja terkait. Melalui sinergi tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap risiko memiliki langkah pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat dipantau efektivitasnya secara berkelanjutan. Adapun

In carrying out its function, the Risk Management and Compliance Division serves as the function responsible for implementing Integrated Risk Management within the Company in accordance with the established framework, governance, and risk management development direction. In addition, this function acts as a facilitator as well as a checker, reviewer, and approver in accordance with the delegated authority mechanism for the Company's risk assessment process and risk mitigation follow-up. The Risk Management and Compliance Division also provides input and recommendations on risk assessment results and the effectiveness of follow-up actions implemented by Risk Leaders and Risk Champions at the Head Office, Regional Units, and Subsidiaries, thereby ensuring that the risk management process is carried out consistently, measurably, and in alignment with the Company's strategic objectives.

Company Risk Profile and Risk Mitigation

As part of its efforts to strengthen business resilience and sustainability, PLN Nusa Daya continuously carries out risk identification, analysis, and evaluation of various risks that may affect the achievement of the Company's objectives. This process begins with the determination of risk context, scope, and criteria that are aligned with the Company's business strategy, operational characteristics, and the dynamics of the business environment faced by the Company. Subsequently, risks are identified, assessed, and measured to determine risks that require priority attention and management.

Based on the results of risk identification and evaluation, PLN Nusa Daya has determined a number of key risks that may materially affect operational performance, compliance, and the achievement of the Company's strategic objectives. These risks are managed through a systematic and integrated approach to ensure that risk levels remain within the Company's risk tolerance limits.
As a follow-up to the risk assessment results, PLN Nusa Daya prepares a Risk Mitigation Plan (RMP), which forms an integral part of the Company's risk management process. The mitigation plan is prepared based on the risk identification and evaluation results documented in the Corporate Risk Register and focuses on reducing both risk likelihood and impact.

The preparation and implementation of the mitigation plan are carried out collaboratively by risk owners, risk champions, and mitigation persons in charge (PICs) in the relevant work units. Through this synergy, the Company ensures that each risk has clear, measurable control measures whose effectiveness can be monitored on an

mitigasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing risiko utama perusahaan adalah sebagai berikut:

ongoing basis. The mitigation measures established for each of the Company's key risks are as follows:

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Risk Mitigation

No.	Deskripsi Risiko Risk Description	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
1	Serangan Siber terhadap sistem teknologi informasi di PT PLN Nusa Daya. Cyberattack on the Company's information technology systems.	Mitigasi dilakukan dengan memasang *firewall*, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, serta pembaruan perangkat lunak berkala. Selain itu, dijalankan pemeliharaan *firewall* rutin dan sosialisasi (*awareness*) secara luring (*offline*). Mitigation measures include the installation of firewalls, intrusion detection systems, data encryption, and regular software updates. In addition, the Company conducts routine firewall maintenance and offline awareness programmes.
2	Ketidakpatuhan terhadap regulasi bisnis Perusahaan. Non-compliance with applicable business regulations.	Penanganan dilakukan melalui pencegahan seperti pendampingan dan pemberian pendapat hukum, standardisasi formulir *ceklis*/dokumentasi kontrak, reviu yuridis draf perjanjian, serta pendampingan negosiasi. Langkah pemulihannya mencakup identifikasi risiko hukum produk/aktivitas bisnis, penyesuaian kebijakan terhadap undang-undang baru, penyediaan forum komunikasi organisasi Anak Perusahaan untuk TAD, serta pemberian pengingat pembaruan regulasi ke divisi terkait. Preventive actions include legal assistance, provision of legal opinions, standardisation of contract checklist forms and documentation, legal review of draft agreements, and negotiation assistance. Corrective actions include identifying legal risks related to products or business activities, aligning internal policies with newly issued laws and regulations, providing communication forums for Subsidiaries regarding TAD, and issuing regulatory update reminders to the relevant divisions.
3	Keterlambatan Penerbitan Perizinan usaha. Delay in obtaining business licences.	Tindakan pencegahan melibatkan pembuatan lini masa pengajuan, pemantauan berkala proses izin, penyediaan *ceklis* dokumen, serta koordinasi awal dengan regulator. Untuk pemulihan, dilakukan peninjauan kembali (*review*) dokumen yang tertunda jika ada perubahan syarat dari regulator serta penyusunan SOP khusus manajemen perizinan agar proses terstruktur. Preventive actions include preparing submission timelines, periodically monitoring licensing processes, providing document checklists, and conducting early coordination with regulators. Corrective actions include reviewing delayed documents in the event of changes in regulator requirements, as well as preparing a dedicated SOP for licensing management to ensure a more structured process.
4	Kecelakaan Kerja yang menyebabkan *fatality.* Workplace accident resulting in fatality.	Strategi keselamatan kerja berfokus pada identifikasi area berisiko, pemasangan rambu peringatan yang menarik, penyediaan APD, inspeksi harian, manajemen jam kerja/kesehatan, dan pembentukan tim pemutakhiran dokumen keselamatan (SOP, IK, HIRAC, JSA). Selain itu, diterapkan sistem pelaporan insiden berbasis aplikasi, pelatihan K3 intensif untuk pengawas dan manajemen, audit K3L bagi mitra kerja dalam kontrak, kampanye keselamatan rutin (*safety day*), simulasi kondisi darurat, peningkatan kompetensi, serta pemenuhan sertifikasi bidang kerja. Mitigation efforts focus on identifying high-risk areas, installing clear warning signs, providing personal protective equipment (PPE), conducting daily inspections, managing working hours and employee health, and establishing a team to update safety documents, including SOPs, Work Instructions, HIRAC, and JSA. In addition, the Company implements an application-based incident reporting system, provides intensive OHS training for supervisors and management, conducts OHS and environmental audits for contracted partners, carries out regular safety campaigns through safety days, conducts emergency simulations, enhances competencies, and fulfils work-related certification requirements.
5	Kapasitas dan kapabilitas Tenaga Kerja *Project* belum memenuhi kualitas layanan yang diharapkan Pelanggan. Project workforce capacity and capability do not meet the service quality expected by customers.	Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan menetapkan kriteria atau persyaratan yang jelas bagi calon pegawai baru. Selain itu, dijalankan program peningkatan keterampilan (*upskilling*) melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemutakhiran BPM *Upskilling* TAD, serta pemantauan kepemilikan Sertifikat Kompetensi (Serkom) sebagai dasar pengusulannya. Workforce quality improvement is carried out by establishing clear criteria and requirements for prospective new employees. In addition, skills enhancement programmes are implemented through training, competency certification, updates to the TAD Upskilling BPM, and monitoring of competency certificate ownership as the basis for submission proposals.
6	Kapasitas dan kapabilitas Pegawai belum terpenuhi sesuai perkembangan bisnis dan regulasi. Employee capacity and capability have not kept pace with business and regulatory developments.	Langkah yang diambil mencakup pengajuan usulan pemenuhan Formasi Tenaga Kerja (FTK) Pegawai secara langsung kepada pihak PLN. Di samping itu, perusahaan merencanakan serta memantau program pengembangan pegawai secara berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis. Measures taken include submitting proposals to fulfil the Employee Workforce Formation (FTK) directly to PLN. In addition, the Company plans and monitors continuous employee development programmes to ensure alignment with business needs.

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Risk Mitigation

No.	Deskripsi Risiko Risk Description	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
7	Gagalnya proses pengadaan Barang/ Jasa. Disruption to the goods/ services procurement process.	Kelancaran pengadaan dijamin melalui riset pasar minimal dengan 3 referensi penyedia saat menyusun dokumen tender, evaluasi dan pembaruan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), serta usulan penambahan personel. Penanganan juga mencakup usulan sertifikasi pengadaan, rapat koordinasi mingguan dengan pengguna (*user*), sosialisasi proses bisnis pengadaan, serta kajian digitalisasi proses pengadaan. Procurement continuity is maintained through market research involving at least three provider references during tender document preparation, evaluation and updating of the Selected Provider List (DPT), and proposals to add personnel. Additional measures include procurement certification proposals, weekly coordination meetings with users, dissemination of procurement business processes, and studies on procurement process digitalisation.
8	Tidak terpenuhinya target pengembangan bisnis sesuai RKAP. Business development targets are not achieved in accordance with the WP&B.	Pencapaian target bisnis diantisipasi melalui peningkatan keterampilan personel, penyelarasan kualitas layanan dengan kebutuhan pelanggan, serta penerapan sistem *market intelligence* terstruktur untuk internal dan PLN. Penanganan tambahan melibatkan audit menyeluruh kinerja PCN (analisis KPI), manajemen pemangku kepentingan terkait penugasan/kontrak, koordinasi kebijakan internal dengan bidang Hukum & Kepatuhan, evaluasi tim, serta penambahan mitra penyedia yang memadai dari segi pendanaan, SDM, dan dukungan. Business target achievement is supported through personnel skills enhancement, alignment of service quality with customer needs, and implementation of a structured market intelligence system for both internal purposes and PLN. Additional measures include a comprehensive audit of PCN performance through KPI analysis, stakeholder management related to assignments and contracts, coordination on internal policies with the Legal and Compliance function, team evaluation, and the addition of adequate provider partners in terms of funding, human resources, and support.
9	Tidak terpenuhinya kinerja SLA AMC. AMC SLA performance is not achieved.	Risiko ini dimitigasi melalui penyediaan material cadangan keandalan yang dilakukan lewat skema Kontrak Harga Satuan (KHS) dan *join inventory*. This risk is addressed through the provision of backup reliability materials under the Unit Price Contract (KHS) scheme and joint inventory.
10	Pemenuhan SLA Transmisi dan Distribusi belum sesuai ekspektasi pelanggan. Transmission and distribution SLA fulfilment falls short of customer expectations.	Penanganan dilakukan melalui rekonsiliasi hasil pekerjaan beserta solusinya pada setiap masalah, alokasi biaya operasional (sewa perahu, HO), serta implementasi penggunaan *Drone* dengan LiDAR khusus untuk area dengan topografi sulit. Selain itu, pemantauan berkala terkait SOP kegiatan Pekerjaan Inspeksi terus diperketat. Mitigation measures include reconciliation of work results and solutions for each issue, allocation of operational costs, including boat rental and HO support, and implementation of Drone technology with LiDAR specifically for areas with challenging topography. In addition, periodic monitoring of SOPs for inspection activities is further strengthened.
11	Tingkat profitabilitas Perusahaan dibawah target RKAP 2025. Company profitability falls below the 2025 WP&B target.	Pengendalian finansial dilakukan via aplikasi *Cash In NEXT* untuk kontrol piutang usaha dan mendukung komunikasi percepatan kontrak kerja. Langkah ini diperkuat dengan pengakuan pendapatan sesuai jangka waktu kontrak, monitoring akrual kontrak baru dan laba rugi per proyek, melakukan *Budget Review* bulanan, mengendalikan realisasi anggaran sesuai RKAP, menyampaikan denda SLA bulanan, serta memantau realisasi SLA operasi di tiap pekerjaan. Di samping itu, dilakukan pengendalian COP mingguan di Unit Pelaksana, monitoring harian status tagihan/nilai *cash in* dan daftar bayar kebutuhan kas, serta pemberian dukungan dokumen penagihan. Financial control is strengthened through the Cash In NEXT application to manage trade receivables and support communication for accelerating work contracts. This measure is supported by revenue recognition in accordance with contract periods, monitoring of new contract accruals and project-level profit or loss, monthly budget reviews, control of budget realisation in accordance with the RKAP, submission of monthly SLA penalties, and monitoring of SLA realisation for each work activity. In addition, weekly COP control is carried out at Implementing Units, along with daily monitoring of billing status, cash-in value, payment lists for cash requirements, and the provision of supporting documents for billing.

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Risk Mitigation

No.	Deskripsi Risiko Risk Description	Rencana Mitigasi Risiko Risk Mitigation Plan
12	Implementasi program ESG tidak optimal. ESG programme implementation is not optimal.	Mitigasi risiko difokuskan pada empat pilar terintegrasi: (1) Operasional & Lingkungan – penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di pembangkit AMC dan kantor untuk menekan timbulan limbah dan biaya lingkungan; (2) Sosial – monitoring dan evaluasi ketat program TJSL untuk menjamin efektivitas penyaluran serta mencegah penyelewengan anggaran; (3) Tata Kelola – pemenuhan seluruh dokumen GCG secara akurat guna menghindari temuan audit dan sanksi regulator; serta (4) Kepatuhan Pelaporan – koordinasi aktif dengan Direktorat Pembangkitan, DIV TKK, dan HSSE *Holding* untuk memastikan akurasi pengisian *Climate Click* dan *Apple Gatrik*. Dengan langkah sinergis ini, risiko kesalahan pelaporan emisi, inkonsistensi kebijakan, serta gangguan reputasi dan hukum dapat diminimalisir secara menyeluruh. Mitigation efforts focus on four integrated pillars: (1) Operations and Environment, through the implementation of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) at AMC power plants and offices to reduce waste generation and environmental costs; (2) Social, through strict monitoring and evaluation of TJSL programmes to ensure effective distribution and prevent budget misuse; (3) Governance, through accurate fulfilment of all GCG documents to avoid audit findings and regulatory sanctions; and (4) Reporting Compliance, through active coordination with the Directorate of Generation, DIV TKK, and HSSE Holding to ensure the accuracy of Climate Click and Apple Gatrik data input. Through these integrated measures, the risks of emission reporting errors, policy inconsistencies, as well as reputational and legal disruptions can be comprehensively mitigated.
13	Keterlambatan penyelesaian administrasi penunjang dokumen tagihan kontrak (*addendum*, BA *ancilary service*, kontrak penugasan, BAPP, dokumen persyaratan pembayaran) untuk percepatan pemenuhan likuditas. Delay in completing supporting administrative documents for contract billing, including addendum, Minutes of Ancillary Service, assignment contracts, BAPP, and payment requirement documents, for accelerated liquidity fulfilment.	Mitigasi risiko difokuskan pada optimalisasi siklus penagihan dan pengelolaan likuiditas melalui tiga pendekatan terintegrasi. Pertama, akselerasi penyelesaian administratif dilakukan dengan memprioritaskan percepatan penyusunan adendum, Berita Acara (BA) *Ancillary Service*, kontrak penugasan, BAPP (Berita Acara Penetapan Progress), serta kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran, guna menghilangkan hambatan birokrasi yang berpotensi menahan pencairan tagihan. Kedua, pengendalian dan monitoring intensif diterapkan secara harian melalui pembuatan daftar bayar untuk memproyeksikan kebutuhan cash in secara akurat, sekaligus melakukan pengendalian COP (*Cost of Project*) di setiap Unit Pelaksana melalui *checkpoint* mingguan yang dipadukan dengan pemantauan status tagihan dan realisasi nilai *cash in* secara real-time. Ketiga, penguatan dukungan operasional dan sistem diwujudkan dengan memberikan asistensi aktif atas dokumen-dokumen penagihan kepada seluruh Unit Pelaksana, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi NEXT sebagai platform monitoring kontrak untuk mendukung komunikasi yang efektif dan mempercepat progres pembuatan kontrak pekerjaan. Melalui sinergi langkah-langkah ini, risiko keterlambatan arus kas masuk dan ketidakakuratan perencanaan keuangan proyek dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kepastian jadwal penyelesaian kontrak. Mitigation efforts focus on optimising the billing cycle and liquidity management through three integrated approaches. First, administrative completion is accelerated by prioritising the completion of addendum documents, Minutes of Ancillary Service, assignment contracts, BAPP, and payment requirement documents to remove bureaucratic obstacles that may delay receivables collection. Second, intensive control and monitoring are carried out daily through the preparation of payment lists to accurately project cash-in requirements, while controlling COP (Cost of Project) at each Implementing Unit through weekly checkpoints combined with real-time monitoring of billing status and cash-in realisation. Third, operational and system support is strengthened by providing active assistance for billing documents to all Implementing Units and maximising the use of the NEXT application as a contract monitoring platform to support effective communication and accelerate work contract progress. Through these integrated measures, the risk of delayed cash inflows and inaccuracies in project financial planning can be significantly reduced, while certainty over contract completion schedules can be improved.

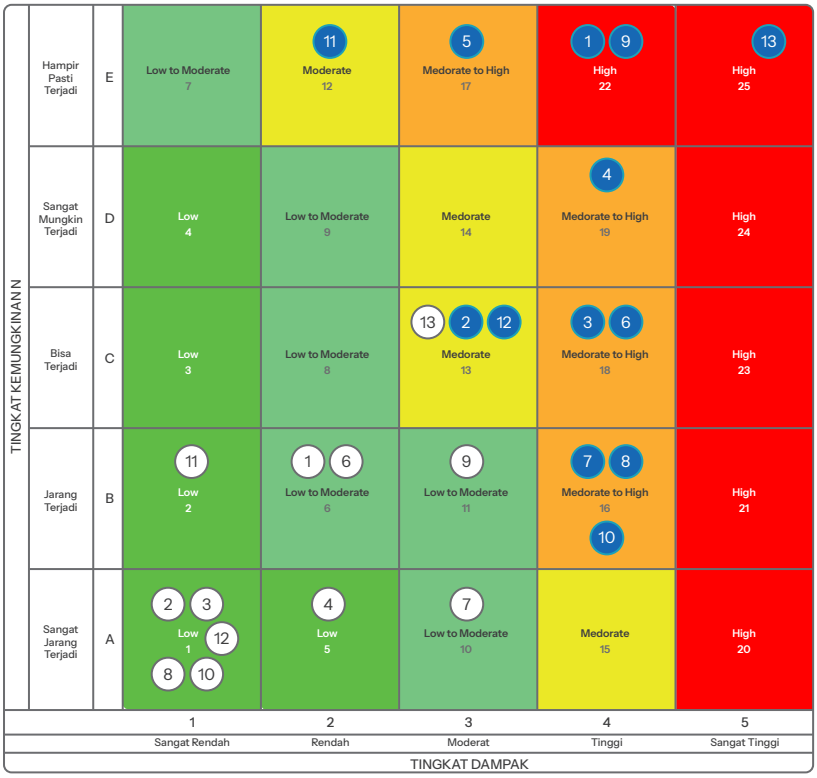
Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan sepanjang tahun 2025 mencakup proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta melakukan perlakuan terhadap berbagai risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Seluruh rangkaian proses tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan melalui koordinasi antar unit kerja, sehingga menghasilkan pengendalian risiko yang lebih terarah dan efektif. Hasil dari pelaksanaan manajemen risiko

The various efforts undertaken by the Company throughout 2025 covered systematic processes to identify, analyse, evaluate, and treat various risks inherent in the Company's business and operational activities. These processes were carried out continuously through coordination among work units, resulting in more focused and effective risk control. The results of risk management implementation are then reflected in the Company's residual risk profile at the end of the reporting period. The Risk Map prepared

tersebut kemudian direfleksikan dalam bentuk gambaran risiko residual perusahaan pada akhir periode pelaporan. Peta Risiko yang disusun tidak hanya menunjukkan kondisi risiko aktual Perusahaan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi mitigasi yang telah dilakukan sepanjang tahun. Dengan demikian, Peta Risiko ini menjadi dasar penting dalam proses evaluasi kinerja manajemen risiko serta acuan bagi Perusahaan dalam menetapkan langkah perbaikan dan penguatan sistem manajemen risiko secara berkelanjutan di masa mendatang.

not only presents the Company's actual risk condition, but also reflects the effectiveness of mitigation measures implemented throughout the year. Accordingly, the Risk Map serves as an important basis for evaluating risk management performance and as a reference for the Company in determining future improvement measures and continuously strengthening its risk management system.

Peta Risiko
Risk Map



Level Risiko Inheren | Level Risiko Inheren
Level Risiko Residu | Level Risiko Residu

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

PLN Nusa Daya secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan ketahanan organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan mampu mengendalikan risiko secara efektif, mengurangi potensi dampak negatif, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merespons perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Proses evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh pemilik risiko pada seluruh fungsi dan unit kerja, sehingga efektivitas pengendalian risiko dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Review of Risk Management System Effectiveness

PLN Nusa Daya continuously evaluates the effectiveness of risk management implementation as part of the Company's commitment to strengthening governance, enhancing organisational resilience, and supporting the achievement of strategic objectives. This evaluation aims to ensure that the mitigation measures implemented are able to control risks effectively, reduce potential negative impacts, and enhance the Company's ability to respond to changes in a dynamic business environment. The evaluation process is carried out periodically by risk owners across all functions and work units, enabling the effectiveness of risk controls to be monitored and improved on an ongoing basis.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko adalah pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Index*/RMI). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa PLN Nusa Daya memperoleh skor 2,71 yang menempatkan perusahaan pada Level 4 (*Managed*). Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan, serta didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berjalan secara efektif. Selain itu, keterlibatan dan dukungan manajemen dalam penerapan manajemen risiko telah menjadi faktor penting dalam mendorong penguatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi.

Hasil evaluasi tersebut juga menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan melalui penyusunan *Opportunity for Improvement* (OFI) dan *Action for Improvement* (AFI). Berbagai rekomendasi perbaikan yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas sistem manajemen risiko secara berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat semakin adaptif dalam menghadapi risiko serta mampu menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko di PLN Nusa Daya telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi terhadap efektivitas kerangka kerja, proses, dan tata kelola manajemen risiko yang telah diterapkan secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Kecukupan penerapan manajemen risiko tersebut tidak terlepas dari sinergi dan komitmen seluruh elemen perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko pada setiap aktivitas dan proses bisnis. Melalui kolaborasi yang erat antara manajemen, pemilik risiko, dan seluruh unit kerja, proses identifikasi, penilaian, mitigasi, pemantauan, serta pelaporan risiko dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung pengambilan keputusan, menjaga keberlangsungan operasional, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan secara berkelanjutan.

One of the instruments used to evaluate risk management implementation is the measurement of the Risk Maturity Index (RMI). The measurement results show that PLN Nusa Daya achieved a score of 2.71, placing the Company at Level 4 (Managed). This achievement reflects that risk management processes have been implemented consistently, integrated with the Company's business processes, and supported by effective monitoring and evaluation mechanisms. In addition, management involvement and support in risk management implementation have become important factors in strengthening risk awareness culture across the organisation.

The evaluation results also serve as the basis for the Company to identify areas requiring further strengthening through the preparation of Opportunity for Improvement (OFI) and Action for Improvement (AFI). The resulting improvement recommendations are subsequently used as a reference to continuously enhance the effectiveness, efficiency, and capability of the risk management system, enabling the Company to become more adaptive in facing risks and to create sustainable added value for all stakeholders.

Management Statement on Risk Management System Adequacy

In 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors stated that the implementation of risk management at PLN Nusa Daya was adequate and aligned with the needs and complexity of the Company's business activities. This statement was based on the evaluation of the effectiveness of the risk management framework, processes, and governance that have been consistently implemented across all all organisational levels.

The adequacy of risk management implementation is supported by the synergy and commitment of all elements of the Company in implementing risk management principles in every activity and business process. Through close collaboration among management, risk owners, and all work units, the processes of risk identification, assessment, mitigation, monitoring, and reporting can be carried out in a structured and continuous manner. Accordingly, risk management serves not only as a control mechanism, but also as an integral part of decision-making, maintaining operational continuity, and supporting the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.

Perkara Penting Perusahaan

Important Cases of The Company

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN Nusa Daya senantiasa mengelola setiap potensi risiko hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional, keuangan, reputasi, maupun keberlangsungan usaha Perusahaan menjadi perhatian khusus dan dipantau secara berkelanjutan oleh manajemen.

As part of the implementation of good corporate governance, PLN Nusa Daya consistently manages potential legal risks professionally, transparently, and in accordance with the applicable laws and regulations. Legal matters that could materially affect the Company's operations, financial condition, reputation, or business continuity are subject to close attention and are continuously monitored by Management.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2025

Perkara hukum yang dihadapi mencakup berbagai proses hukum yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan. Seluruh perkara tersebut ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui upaya mitigasi risiko hukum yang memadai. Adapun rincian perkara hukum yang dihadapi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Legal Cases Faced by the Company in 2025

Legal cases faced by the Company include various legal proceedings arising from the implementation of the Company's business activities. All such cases are handled in accordance with the prevailing laws and regulations, supported by adequate legal risk mitigation measures. Details of the legal cases faced during 2025 are as follows:

Permasalahan Hukum
Legal Matters

Permasalahan Hukum Legal Matters	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases
Perusahaan | Company		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with final and binding legal force	3	1
Dalam proses penyelesaian | In progress	0	0
Jumlah | Total	3	1
Dewan Komisaris dan Direksi | Board of Commissioners and Board of Directors		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with final and binding legal force	0	0
Dalam proses penyelesaian | In progress	0	0
Jumlah | Total	0	0
Entitas Anak | Subsidiary Entity		
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with final and binding legal force	0	0
Dalam proses penyelesaian | In progress	0	0
Jumlah | Total	0	0

Penyelesaian Permasalahan Hukum
Resolution of Legal Matters

No	Nama Perkara Case Name	Kasus Posisi Case Background	Para Pihak Parties Involved	Potensi Kerugian Potential Loss	*Progress*
1	Penyelidikan pelanggaran hukum pada pekerjaan pemeliharan jaringan transmisi dan operasi gardu induk serta *accessories* pengujian pemeliharaan transmisi dan GI tahun 2021-2024. Investigation into alleged legal violations in the maintenance of transmission networks and substation operations, including accessories for transmission and substation maintenance testing for the period of 2021–2024.	Terdapat dugaan pelanggaran hukum terkait pekerjaan pemeliharaan jaringan transmisi dan operasi gardu induk. There were allegations of legal violations relating to the maintenance of transmission networks and substation operations.	1. PT PLN (Persero) UIP3B Sulawesi 2. PT PLN Nusa Daya (Unit Pelaksana Sulawesi 2) 1. PT PLN (Persero) UIP3B Sulawesi 2. PT PLN Nusa Daya, Sulawesi 2 Implementation Unit	-	Kejati Sulsel sudah mengeluarkan SP2HP (Selesai) The South Sulawesi High Prosecutor's Office has issued the Notice of Investigation Progress (SP2HP)
2	Kasus Pencurian BBM di PLTD Padang Tikar. Fuel theft case at Padang Tikar Diesel Power Plant.	Pegawai PLN Nusa Daya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada kasus Pencurian BBM di PLTD Padang Tikar. Employees of PLN Nusa Daya were summoned and examined as witnesses in relation to the fuel theft case at Padang Tikar Diesel Power Plant.	1. PT PLN (Persero) 2. PT PLN Nusa Daya (Unit Pelaksana Kalimantan 1) PT Sewatama 1. PT PLN (Persero) 2. PT PLN Nusa Daya, Kalimantan 1 Implementation Unit 3. PT Sewatama	-	Selesai melalui Putusan Pengadilan Negeri Concluded by virtue of a District Court decision.
3	Klarifikasi kepada pihak Polda Papua terkait dugaan Kasus Tindak Pidana Bidang Minyak Bumi dan Gas di wilayah hukum Polda Papua, terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangki transportir yang digunakan dalam kegiatan operasional pembangkitan. Clarification to Papua Regional Police in relation to an alleged criminal offence in the oil and gas sector within the jurisdiction of Papua Regional Police, concerning the stockpiling of fuel oil in transporter tanks used for power generation operational activities.	Terdapat TAD dari Kontrak dengan PLN Nusa Daya yang merupakan Tenaga Kerja dari PCN yang dimintakan keterangan oleh Polda Papua. There were outsourced personnel under a contract with PLN Nusa Daya, who were employees of PCN, and were requested to provide statements by Papua Regional Police.	1. PT PLN Nusa Daya (Unit Pelaksana Papua) 2. Transportir 1. PT PLN Nusa Daya, Papua Implementation Unit 2. Transporter	-	Selesai melalui upaya persuasif Resolved through persuasive measures.
4	Asistensi permasalahan denda pada kontrak sewa kendaraan UL Bima di UP Nusra PT PLN Nusa Daya. Assistance in relation to penalty issues under the vehicle lease contract of UL Bima at PLN Nusa Daya's Nusra Implementation Unit.	Terjadinya perbedaan pemahaman antara UP Nusra dan PT Indorent mengenai selesainya pekerjaan sewa kendaraan pada Perjanjian / Kontrak. There was a difference in interpretation between the Nusra Implementation Unit and PT Indorent regarding the completion of vehicle lease work under the agreement/ contract.	1. PT PLN Nusa Daya (Unit Pelaksana NUSRA) 2. PT Indorent 1. PT PLN Nusa Daya, NUSRA Implementation Unit 2. PT Indorent	-	Selesai melalui proses Mediasi Resolved through mediation proceedings.

Sanksi Administratif

Sebagai bentuk komitmen PLN Nusa Daya dalam menerapkan prinsip kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan senantiasa memastikan seluruh kegiatan operasional dan bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator maupun instansi berwenang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, pemantauan kepatuhan secara berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran kepatuhan di seluruh lini organisasi. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat teguran, sanksi administratif, maupun tindakan korektif lainnya yang diberikan kepada Perusahaan oleh instansi atau lembaga yang berwenang terkait bidang usaha yang dijalankan Perusahaan.

Pelanggaran Hukum

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan PLN Nusa Daya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maupun Entitas Anak. Secara khusus, tidak terdapat kasus pelanggaran yang berkaitan dengan aspek perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, maupun hubungan industrial. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lini organisasi.

Administrative Sanctions

As a reflection of PLN Nusa Daya's commitment to upholding compliance with the applicable laws and regulations, the Company continuously ensures that all operational and business activities are carried out in accordance with the provisions stipulated by regulators and authorised institutions. These efforts are implemented through the strengthening of the internal control system, continuous compliance monitoring, and enhancement of compliance awareness across all levels of the organisation. Throughout 2025, there were no warnings, administrative sanctions, or other corrective measures imposed on the Company by authorised institutions or agencies in relation to the Company's line of business.

Legal Violations

Throughout 2025, there were no other legal violations involving PLN Nusa Daya, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, or the Subsidiary. In particular, there were no cases of non-compliance relating to taxation, environmental, employment, or industrial relations aspects. This reflects the Company's commitment to conducting its business activities in compliance with the applicable laws and regulations, as well as its consistency in implementing good corporate governance principles across all levels of the organisation.

Kode Etik Perusahaan

Company Code of Conduct

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PLN Nusa Daya menetapkan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Perusahaan. Kode Etik ini menjadi acuan utama dalam membentuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, Kode Etik Perusahaan juga memperkuat implementasi nilai-nilai AKHLAK BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang diinternalisasikan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Pokok-Pokok Kode Etik Perilaku

PLN Nusa Daya telah menetapkan Kode Etik Perusahaan sebagai pedoman perilaku dan etika bisnis bagi seluruh insan Perusahaan. Kode Etik tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor 017.P/DIR-TRK/2020 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Direksi Nomor 0037.P/DIR/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 017.P/DIR-TRK/2020 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Ketentuan ini menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, serta berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis memuat komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk menginternalisasikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan ke dalam setiap aktivitas operasional. Pedoman ini juga mengatur terkait penanganan benturan kepentingan, pengelolaan gratifikasi (hadiah, jamuan, hiburan, dan donasi), serta pembatasan aktivitas sosial dan politik pegawai. Perusahaan juga mengatur terkait integritas laporan keuangan, perlindungan aset fisik maupun *intangible assets*, serta pemenuhan hak karyawan melalui penerapan K3LH dan kesetaraan peluang kerja dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Guna menjaga hubungan yang adil dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), implementasi pedoman ini diperkuat oleh infrastruktur *Whistle Blowing System* (WBS) serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi tegas demi memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan patuh terhadap regulasi.

As part of its ongoing efforts to strengthen the implementation of Good Corporate Governance, PLN Nusa Daya has established the Company Code of Conduct as a behavioural guideline for all Company personnel. The Code of Conduct serves as the main reference in fostering a professional work culture with integrity, while upholding honesty and ethics in interactions with all stakeholders, both internal and external.

In line with this, the Company Code of Conduct also reinforces the implementation of the SOE AKHLAK values, namely Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative, which are internalized in every aspect of the implementation of duties and responsibilities. These values serve as the moral foundation for supporting the creation of a healthy, productive and sustainable working environment.

Key Points of the Code of Conduct

PLN Nusa Daya has established the Company Code of Conduct as a guideline for conduct and business ethics for all Company personnel. The Code of Conduct was established through Board of Directors Regulation Number 017.P/DIR-TRK/2020 concerning Guidelines for Conduct and Business Ethics, which was subsequently updated through Board of Directors Regulation Number 0037.P/DIR/2023 concerning Amendments to Board of Directors Regulation Number 017.P/DIR-TRK/2020 concerning Guidelines for Conduct and Business Ethics. These provisions serve as the foundation for building a work culture with integrity, professionalism and an orientation towards compliance with the applicable laws and regulations.

The Guidelines for Conduct and Business Ethics set out the commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to internalize the Company's Vision, Mission and Corporate Values in every operational activity. These guidelines also regulate the handling of conflicts of interest, the management of gratuities, including gifts, hospitality, entertainment and donations, as well as restrictions on employees' social and political activities. The Company also regulates matters relating to the integrity of financial reporting, the protection of physical and intangible assets, and the fulfillment of employees' rights through the implementation of HSE and equal employment opportunities under the Guidelines for Conduct and Business Ethics. To maintain fair relationships with stakeholders, the implementation of these guidelines is strengthened by Whistleblowing System (WBS) infrastructure, as well as enforcement mechanisms and strict sanctions, in order to ensure sound business growth that complies with regulations.

Pemberlakuan Kode Etik kepada Seluruh Insan Perusahaan

Pedoman Etika Perilaku bersifat mengikat bagi seluruh insan Perusahaan sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, baik sebagai bagian dari entitas bisnis maupun sebagai individu di lingkungan Perusahaan. Pedoman ini tidak hanya dipahami sebagai kebijakan internal semata, tetapi juga diharapkan dapat dihayati dan diinternalisasikan dalam setiap aspek perilaku, sehingga mencerminkan keteladanan di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penerapan Pedoman Etika Perilaku tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya integritas, meningkatkan profesionalisme, serta mendukung peningkatan kinerja dan citra positif Perusahaan secara berkelanjutan.

Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik

Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh insan Perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan serta penerapan Kode Etik terus dilakukan oleh PLN Nusa Daya melalui sosialisasi dan diseminasi Kode Etik Perusahaan di seluruh lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan memastikan nilai-nilai etika dan integritas dapat dipahami serta diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan penerapan GCG, seluruh karyawan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perilaku secara berkala. Sosialisasi Kode Etik dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Etika Perilaku kepada seluruh Insan Perusahaan dan pihak eksternal perusahaan serta melakukan penyegaran secara berkala.
2. Setiap Pegawai harus menandatangani pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada seluruh karyawan Perusahaan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik

Guna menjaga disiplin dan integritas di seluruh lingkungan kerja, PLN Nusa Daya secara konsisten menerapkan sanksi yang proporsional bagi insan Perusahaan yang terbukti melanggar kode etik, dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan Disiplin Pegawai. Sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, tidak terdapat kasus pelanggaran maupun sanksi etis yang dijatuhkan. Keberhasilan ini menegaskan komitmen kolektif seluruh insan Perusahaan dalam mematuhi standar etika perilaku yang ditetapkan.

Application of the Code of Conduct to All Company Personnel

The Guidelines for Ethical Conduct are binding on all Company personnel as a reference for their actions and behaviour, including in the decision-making process, both as part of a business entity and as individuals within the Company. These guidelines are not to be understood merely as an internal policy, but are also expected to be embraced and internalized in every aspect of behaviour, thereby reflecting exemplary conduct in the workplace and in social community life. The implementation of the Guidelines for Ethical Conduct is expected to strengthen a culture of integrity, enhance professionalism, and support the continuous improvement of the Company's performance and positive image.

Socialisation and Enforcement of the Code of Conduct

PLN Nusa Daya continues to enhance the understanding and awareness of all Company personnel regarding the importance of compliance with and implementation of the Code of Conduct through socialization and dissemination of the Company Code of Conduct across all workplaces. These activities aim to ensure that ethical values and integrity are understood and consistently implemented in every Company activity.

As a form of commitment to integrity and the implementation of GCG, all employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, are required to sign a statement of compliance with the Guidelines for Ethical Conduct periodically. Socialization of the Code of Conduct is carried out through various media and activities, including:

1. Conducting socialization of the Guidelines for Ethical Conduct to all Company personnel and external parties of the Company, as well as conducting periodic refresher session.
2. Requiring every employee to sign a statement of commitment to comply with and implement the Code periodically.
3. Assessing employees' comprehension and awareness of all Company employees, both during the orientation period and during employment.

Number of Violations and Sanctions of the Code of Conduct

To maintain discipline and integrity across all workplaces, PLN Nusa Daya consistently imposes proportionate sanctions on Company personnel proven to have violated the Code of Conduct, in accordance with the Company Regulations and Employee Disciplinary Regulations. Throughout the fiscal year ended 31 December 2025, there were no violations or ethical sanctions imposed. This achievement affirms the collective commitment of all Company personnel to complying with the established standards of ethical conduct.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Performance-Based Long-Term Compensation for Management and/or Employees

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN Nusa Daya belum menerapkan program kompensasi jangka panjang, baik berupa insentif jangka panjang maupun skema kepemilikan saham seperti *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Kebijakan imbalan saat ini difokuskan pada program jangka pendek sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi individu dan tim dalam mencapai target operasional sepanjang tahun buku.

Pemberian kompensasi ini dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI), efektivitas pelaksanaan tugas, serta kontribusi strategis masing-masing pegawai bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Meskipun demikian, PLN Nusa Daya terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan kompensasi agar tetap kompetitif, adil, dan senantiasa selaras dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

As at the end of 2025, PLN Nusa Daya had not implemented any long-term compensation program, whether in the form of long-term incentives or share ownership schemes such as the Employee Stock Ownership Programme (ESOP) and Management Stock Ownership Programme (MSOP). The current remuneration policy remains focused on short-term programs as a form of appreciation for individual and team contributions to the achievement of operational targets throughout the financial year.

This compensation is provided proportionally by taking into account Key Performance Indicator (KPI) achievements, the effectiveness in carrying out duties, and each employee's strategic contribution to the sustainability of the Company's business. Nevertheless, PLN Nusa Daya continues to conduct periodic evaluations of its compensation policy to ensure that it remains competitive, fair, and consistently aligned with Good Corporate Governance practices.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System (WBS)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan. *Whistleblowing System* (WBS) dirancang sebagai sarana pelaporan yang aman, transparan, dan terpercaya untuk mendukung upaya pencegahan, pendeteksian, serta penanganan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, benturan kepentingan, maupun perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan tata kelola Perusahaan.

Implementasi WBS menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam membangun budaya integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi. Selain berfungsi sebagai media pelaporan, WBS juga berperan sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) yang membantu Perusahaan mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap operasional maupun reputasi korporasi.

The Whistleblowing System (WBS), is one of the key instruments in strengthening the effectiveness of the Company's internal control system. The WBS is designed as a secure, transparent and trusted reporting channel to support the prevention, detection and handling of various forms of violations, including fraud, legal violations, conflicts of interest, and conduct that does not comply with the Company's ethical and governance standards.

The implementation of the WBS forms part of the Company's commitment to building a culture of integrity, openness and accountability across all levels of the organization. In addition to serving as a reporting channel, the WBS also functions as an early warning system that assists the Company in identifying and mitigating potential risks before they have a broader impact on operations or corporate reputation.

Melalui pengelolaan laporan yang terstruktur dan objektif, setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi dan evaluasi dilakukan secara profesional untuk memastikan bahwa setiap laporan memperoleh penanganan yang tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan *Whistleblowing System*

PLN Nusa Daya menyadari bahwa risiko terjadinya penyimpangan dapat muncul dalam setiap aktivitas operasional maupun proses bisnis. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Perusahaan menerapkan WBS sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang independen, aman, dan terpercaya. Pelaksanaan WBS mengacu pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 0016.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang menjadi pedoman dalam pengelolaan mekanisme pelaporan di lingkungan Perusahaan.

WBS berfungsi sebagai sarana pelaporan atas berbagai bentuk dugaan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, suap, benturan kepentingan, maupun tindakan kecurangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong terciptanya budaya keterbukaan, integritas, dan keberanian untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Efektivitas implementasi WBS terus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada seluruh insan Perusahaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi dan edukasi, antara lain pemasangan materi informasi di area kerja, penyebaran informasi melalui email blast, serta pelaksanaan forum diskusi dan sesi *sharing* yang terbuka bagi seluruh pegawai.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perusahaan berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya peran WBS sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang aman, transparan, dan terpercaya. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran secara bertanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kepatuhan, dan akuntabilitas.

Through structured and objective report management, every complaint received is followed up in accordance with the applicable provisions. The verification and evaluation processes are carried out professionally to ensure that every report is handled with due process, fairness, and accountability.

Whistleblowing System Policy

PLN Nusa Daya recognises that the risk of misconduct may arise in every operational activity and business process. Therefore, the Company is committed to ensuring that the violation reporting mechanism operates effectively, transparently and accountably. The Company implements the WBS as an independent, secure and trusted means of reporting violations. The implementation of the WBS refers to the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 0016.P/DIR/2022 concerning the Whistleblowing System, which serves as the guideline for managing the reporting mechanism within the Company.

The WBS serves as a channel for reporting various forms of suspected violations, including abuse of authority, corruption, bribery, conflicts of interest, and other fraudulent acts that may cause losses to the Company and its stakeholders. In its implementation, the Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and provides protection in accordance with the applicable provisions, thereby encouraging a culture of openness, integrity and the confidence to report any suspected violations.

Whistleblowing System Socialisation

The effectiveness of WBS implementation continues to be enhanced through socialization to all Company personnel. These socialisation activities are carried out continuously through various communication and educational media, including the display of information materials in work areas, dissemination of information through email blasts, and the organization of discussion forums and sharing sessions that are open to all employees.

Through these various activities, the Company seeks to improve employees' understanding and awareness of the importance of the WBS as a secure, transparent and trusted means of reporting violations. In addition, socialization also aims to encourage the active participation of all employees in reporting any indication of violations responsibly, thereby creating a working environment that upholds the values of ethics, compliance and accountability.

Sarana dan Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Untuk mendukung efektivitas implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan menyediakan berbagai saluran pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh insan Perusahaan maupun pemangku kepentingan. Melalui saluran tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan secara aman, mudah, dan terjaga kerahasiaannya. Adapun pelaporan dapat dilakukan melalui:

Channels and Mechanism for Submitting Complaints

To support the effective implementation of the Whistleblowing System, the Company provides various reporting channels that can be accessed by all Company personnel and stakeholders. Through these channels, any party may submit reports or complaints regarding alleged violations occurring within the Company in a secure, convenient and confidential manner. Reports may be submitted through:

wbs@pln-t.co.id www.plnnusadaya.co.id/wbs

Agar laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif, pelapor diharapkan menyampaikan informasi yang memadai, meliputi: (1) penjelasan terkait pelanggaran yang diadukan; (2) identitas atau pihak yang terlibat/terlapor; (3) waktu terjadinya pelanggaran; (4) lokasi atau tempat kejadian; (5) kronologis kejadian secara runtut dan faktual; (6) estimasi nilai kerugian baik secara finansial maupun non-finansial; serta (7) informasi tambahan lain berupa dokumentasi atau bukti pendukung jika tersedia. Penyampaian laporan yang lengkap akan membantu proses evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Pengelola WBS secara lebih akurat dan efisien.

To ensure that reports can be followed up effectively, whistleblowers are expected to submit adequate information, including: (1) an explanation of the reported violation; (2) the identity of the parties involved or reported parties; (3) the time the violation occurred; (4) the location or place of the incident; (5) a chronological and factual account of the incident; (6) an estimate of the financial and non-financial losses incurred; and (7) any additional information in the form of documentation or supporting evidence, where available. Submitting a complete report will enable the WBS Management Team to conduct a more accurate and efficient evaluation and follow-up process.

Pihak Pengelola Pengaduan

Perusahaan terus memastikan efektivitas pengelolaan WBS dengan membentuk Tim Pengelola WBS berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0288.K/DIR/2025 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN Nusa Daya. Pembentukan tim ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengelolaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang independen, objektif, dan akuntabel.

Tim Pengelola WBS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh proses pelaporan pelanggaran, mulai dari penerimaan, verifikasi, evaluasi, hingga penyampaian rekomendasi tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima. Keberadaan tim ini juga berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran, termasuk tindakan fraud, serta mendorong terciptanya budaya integritas dan kepatuhan di seluruh lingkungan Perusahaan. Struktur Tim Pengelola WBS terdiri atas seorang Ketua yang dijabat oleh Manager Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang dibantu Officer Kepatuhan sebagai Sekretaris serta Assistant Analyst Manajemen Risiko dan Officer Manajemen Risiko sebagai anggota yang berasal dari fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Complaint Management Party

The Company continues to ensure the effective management of the WBS by establishing the WBS Management Team based on Board of Directors Decision Number 0288.K/DIR/2025 concerning the Whistleblowing Management Team within PT PLN Nusa Daya. The establishment of this team reflects the Company's commitment to strengthening the implementation of good corporate governance through the management of an independent, objective and accountable violation reporting mechanism.

The WBS Management Team is responsible for managing the entire violation reporting process, from receipt, verification and evaluation to the submission of follow-up recommendations for every report received. The existence of this team also plays an important role in supporting the prevention and handling of alleged violations, including fraud, as well as encouraging the creation of a culture of integrity and compliance across the Company. The structure of the WBS Management Team consists of a Chairman, held by the Risk Management and Compliance Manager, assisted by the Compliance Officer as Secretary, and the Assistant Risk Management Analyst and Risk Management Officer as members from the Risk Management and Compliance function.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola WBS meliputi:

1. Menerima Pengaduan dan melakukan evaluasi Pengaduan yang termasuk tindakan *fraud* dan/atau pelanggaran atau tidak termasuk *fraud* dan/atau pelanggaran;
2. Pengaduan yang tidak termasuk kategori *fraud* dan/atau pelanggaran akan disampaikan kepada Satuan Kerja terkait dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya;
3. Melakukan analisa kecukupan pemenuhan indikasi *fraud* dan/atau pelanggaran serta bukti permulaan yang disampaikan oleh pelapor terkait laporan pengaduan yang termasuk kategori *fraud* dan/atau pelanggaran;
4. Apabila hasil analisa menyatakan terpenuhinya kecukupan atas indikasi *fraud* dan/atau pelanggaran akan disampaikan ke satuan Pengawasan Internal dengan tembusan direktur utama; dan
5. Tim WBS dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam proses evaluasi kecukupan indikasi *fraud* dan/atau pelanggaran termasuk menerima informasi tambahan atau bukti tambahan sesuai dengan kewenangannya.

Penanganan Pengaduan

Setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan Perusahaan ditindaklanjuti secara terstruktur, transparan, dan akuntabel oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System*. Proses penanganan laporan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, independensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan bahwa setiap pengaduan dapat diproses secara tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan pengaduan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan yang disediakan Perusahaan;
2. Tim WBS melakukan administrasi dan evaluasi awal serta membuat berita acara hasil evaluasi untuk diserahkan kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama sesuai dengan pihak yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran.
3. Direktur Utama atau Komisaris Utama melakukan penelaahan untuk memutuskan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran tersebut, yaitu:
   a. Dihentikan atau dinyatakan selesai karena pengaduan tidak terbukti atau tidak benar;
   b. Menugaskan dilakukannya investigasi atas laporan dugaan pelanggaran tersebut;
   c. Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

The duties and responsibilities of the WBS Management Team include:

1. Receiving complaints and evaluating whether the complaints constitute fraud and/or violations or do not constitute fraud and/or violations;
2. Forwarding complaints that do not fall under the category of fraud and/or violations to the relevant Work Unit for follow-up in accordance with its authority;
3. Analyzing the adequacy of indications of fraud and/or violations, as well as the preliminary evidence submitted by the whistleblower in relation to complaints that fall under the category of fraud and/or violations;
4. If the analysis concludes that sufficient indications of fraud and/or violations have been established, forwarding the matter to the Internal Audit Unit with a copy to the President Director; and
5. Taking any actions deemed necessary in the process of evaluating the adequacy of indications of fraud and/or violations, including receiving additional information or additional evidence in accordance with its authority.

Complaint Handling

Every report of alleged violations submitted through the reporting channels established by the Company is followed up in a structured, transparent and accountable manner by the Whistleblowing System Management Team. The complaint-handling process is carried out by upholding the principles of objectivity, independence, and compliance with the Company's internal provisions and the applicable laws and regulations, in order to ensure that every complaint can be processed appropriately, fairly and accountably. Complaint handling is carried out through the following stages:

1. Violation reports are submitted through the reporting channels provided by the Company;
2. The WBS Team carries out administration and initial evaluation, and prepares minutes of the evaluation results to be submitted to the President Director or President Commissioner, depending on the party reported to have allegedly committed the violation;
3. The President Director or President Commissioner reviews the report to determine the follow-up action on the alleged violation report, namely:
   a. The report is discontinued or declared closed because the complaint is not proven or is untrue;
   b. An investigation is assigned to be carried out on the alleged violation report;
   c. At the discretion of the Board of Directors, violation cases that cause losses may be submitted to the authorized parties for further processing in accordance with the applicable legal provisions;

4. Laporan hasil investigasi diselesaikan dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan.
5. Berdasarkan laporan hasil investigasi, Direktur Utama atau Komisaris Utama memutuskan:
   a. Laporan pelanggaran ditutup, jika tidak terbukti;
   b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti terkait dengan pelanggaran administratif;
   c. Meneruskan tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum.

Perlindungan Bagi Pelapor

Pedoman *Whistleblowing System* menetapkan ketentuan mengenai perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses penyampaian pengaduan, sebagai berikut:

1. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/ lembaga pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan internal di antaranya: Tekanan, Penundaan kenaikan pangkat/jabatan, Pemecatan, Gugatan hukum, Harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Sanksi dan Tindak Lanjut

Perusahaan menetapkan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, dengan kategori mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang terjadi. Penentuan sanksi dilakukan secara objektif berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang muncul secara tegas, konsisten, dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, serta mendukung terwujudnya budaya kepatuhan dan integritas di seluruh insan Perusahaan.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2025, terdapat 2 (dua) laporan yang diterima melalui WBS. Saat ini, seluruh laporan tersebut masih dalam proses penanganan dan penyelesaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

4. The investigation report is completed no later than 90 (ninety) days and may be extended if necessary;
5. Based on the investigation report, the President Director or President Commissioner decides to:
   a. Close the violation report if it is not proven;
   b. Impose sanctions in accordance with the applicable provisions if an administrative violation is proven;
   c. Forward criminal offences to law enforcement authorities.

Protection for Whistleblowers

The Whistleblowing System Guidelines set out provisions on the protection and confidentiality of whistleblowers' identities as part of the Company's efforts to ensure safety and comfort in the complaint-submission process, as follows:

1. Protecting the confidentiality of the whistleblower's identity;
2. Providing protection against retaliation by the reported party or reporting institution;
3. Providing protection against internal actions, including pressure, delays in promotion or appointment, dismissal, legal claims, damage to property, and physical acts. Protection may be extended to the whistleblower's family members.

Sanctions and Follow-Up

The Company imposes sanctions for every violation committed, with categories ranging from minor to severe sanctions according to the level and impact of the violation. Sanctions are determined objectively based on evaluation results and the provisions applicable within the Company. The Company is also committed to address every issue that arises in a firm, consistent and procedurally compliant manner. This reflects the Company's commitment to creating a safe and orderly working environment, as well as supporting the realization of a culture of compliance and integrity among all Company personnel.

Number of Violation Reports and Follow-Up Actions

Throughout 2025, there were 2 (two) reports received through the WBS. Currently, all reports are still in the process of being handled and resolved in accordance with the mechanisms and provisions applicable within the Company.

Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan

Company Anti-Corruption Policy

Integritas merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis PLN Nusa Daya. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan kebijakan anti korupsi secara konsisten untuk mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana korupsi lainnya. Kebijakan ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan tanpa pengecualian.

Integrity serves as the fundamental basis for every business activity of PLN Nusa Daya. Accordingly, the Company consistently implements an anti-corruption policy to prevent and address all forms of irregularities, bribery, gratuities, and other corruption-related offences. This policy applies to and must be complied with by all Company personnel without exception.



Kebijakan anti korupsi PLN Nusa Daya mencakup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Selain itu, Perusahaan menerapkan pengendalian gratifikasi guna mencegah penerimaan maupun pemberian hadiah, fasilitas, atau manfaat lainnya yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, PLN Nusa Daya juga menerapkan kebijakan Benturan Kepentingan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menghindari kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Di sisi lain, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaksanakan secara berkala sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari penguatan budaya integritas, PLN Nusa Daya menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjadi sarana bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pelanggaran etika, maupun penyimpangan lainnya. Melalui penerapan berbagai kebijakan dan mekanisme tersebut, PLN Nusa Daya berupaya membangun lingkungan kerja yang berintegritas serta mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, bersih, dan berkelanjutan.

The anti-corruption policy implemented includes an Anti-Bribery Management System, designed to prevent, detect, and respond to potential bribery in operational activities. In addition, the Company also implements gratification control as a form of prevention against the acceptance or giving of gifts that may influence objectivity in decision-making.

To maintain independence and professionalism, PLN Nusa Daya also implements a Conflict of Interest Policy as a guideline for identifying, managing, and avoiding circumstances that may give rise to conflicts between personal interests and the interests of the Company. In addition, the management of the State Officials Wealth Report (LHKPN) is carried out periodically as a manifestation of transparency and accountability.

As part of strengthening a culture of integrity, PLN Nusa Daya implements a Whistleblowing System as a channel for all stakeholders to report suspected acts of corruption, ethical violations, or other irregularities. Through the implementation of these policies and mechanisms, PLN Nusa Daya seeks to foster an integrity-based working environment and support the realisation of good, clean, and sustainable corporate governance.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PLN Nusa Daya terus membangun budaya Perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG serta penerapan prinsip 4 *NO's*, yaitu *No Bribery, No Kickback, No Gift,* dan *No Luxurious Hospitality* dalam seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.

Anti-Bribery Management System

PLN Nusa Daya remains committed to strengthening a corporate culture that is clean, transparent, and founded on integrity through the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS). This commitment is reflected in the Company's consistent application of Good Corporate Governance (GCG) principles, as well as the 4 NO's principles, comprising No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality, in all business processes.

Sebagai bentuk penguatan sistem pencegahan penyuapan, PLN Nusa Daya telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 yang menjadi standar internasional dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan risiko penyuapan. Implementasi SMAP didukung oleh struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 045.K/DIR-TRK/2020, dengan Direktur Utama sebagai Dewan Pengarah, Direksi sebagai Manajemen Puncak, serta Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko yang menjalankan fungsi sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

To reinforce its bribery prevention framework, PLN Nusa Daya has obtained SNI ISO 37001:2016 certification as an international standard for the prevention, detection, and management of bribery risks. The ABMS framework is supported by an organisational structure stipulated under Board of Directors Decree No. 045.K/DIR-TRK/2020. Under this structure, the President Director acts as the Steering Board, the Board of Directors serves as Top Management, while the Legal, Compliance, and Risk Management Division carries out the function of the Anti-Bribery Compliance Function (ABCF).



PLN Nusa Daya telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2020 dan terus melakukan pemeliharaan serta penyempurnaan SMAP guna memastikan efektivitas implementasinya. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Perusahaan melaksanakan audit sertifikasi ulang pada Oktober 2024 yang sekaligus menyesuaikan perubahan identitas perusahaan dari PT PLN Tarakan menjadi PT PLN Nusa Daya. Saat ini, cakupan sertifikasi SMAP telah meliputi Kantor Pusat serta anak perusahaan, yaitu PT Prima Citra Nusantara (PCN).

Penerapan SMAP menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan bebas dari praktik penyuapan. Melalui implementasi yang berkelanjutan, PLN Nusa Daya berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan beretika dalam setiap aktivitas operasionalnya.

PLN Nusa Daya has obtained certification for the Anti-Bribery Management System (ABMS) since 2020 and continues to maintain and enhance the system to ensure the effectiveness of its implementation. As part of this commitment, the Company conducted a recertification audit in October 2024, which also reflected the change in the Company's identity from PT PLN Tarakan to PT PLN Nusa Daya. Currently, the scope of ABMS certification covers the Head Office and the Company's subsidiary, namely PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN).

The implementation of ABMS serves as one of the key pillars in strengthening a culture of integrity, enhancing compliance with applicable regulations, and ensuring the implementation of good corporate governance that is free from bribery practices. Through the continuous implementation of ABMS, PLN Nusa Daya remains committed to fostering a transparent, accountable, and ethical business environment in every aspect of its operations.

Sebagai wujud implementasi SMAP, PLN Nusa Daya mewajibkan seluruh Insan Perusahaan serta pemangku kepentingan terkait untuk menandatangani Formulir Kepatuhan Kode Etik dan Pakta Integritas Anti Penyuapan. Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi SMAP guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap budaya integritas di seluruh unit kerja.

In implementing ABMS, PLN Nusa Daya requires all Company personnel and relevant stakeholders to sign the Code of Conduct Compliance Form and the Anti-Bribery Integrity Pact. The Company also conducts ongoing ABMS dissemination and internalisation activities to strengthen awareness, understanding, and commitment to integrity across all organisational levels.

Untuk memperkuat efektivitas pengendalian anti, PLN Nusa Daya juga menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko, antara lain pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara berkala, optimalisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran, partisipasi dalam program *e-learning* anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu, serta pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* pada setiap unit kerja. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, penyuapan, maupun kecurangan.

PLN Nusa Daya continues to enhance the effectiveness of its anti-corruption controls through various risk mitigation initiatives. These include periodic reporting of gratuities and conflicts of interest, optimisation of the Whistleblowing System, participation in anti-corruption e-learning organised by the Corruption Eradication Commission (KPK), timely submission of the State Officials Wealth Report (LHKPN), and Fraud Risk Assessment across all work units. Through these initiatives, the Company reaffirms its commitment to establishing a transparent, accountable, and integrity-based working environment that is free from corruption, bribery, and fraud.

Kebijakan Anti *Fraud*

PLN Nusa Daya juga menerapkan Kebijakan Anti *Fraud* yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 011.P/DIR-TRK/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud*. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif serta menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui kebijakan tersebut, PLN Nusa Daya menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko kecurangan, yang mencakup upaya pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut atas setiap indikasi maupun kejadian fraud. Implementasi kebijakan dilakukan melalui berbagai program penguatan pengendalian, peningkatan kesadaran dan pemahaman pegawai terhadap risiko fraud, pelaksanaan penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment*), serta optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran melalui WBS.

Selain itu, Perusahaan memastikan bahwa setiap dugaan kecurangan ditindaklanjuti secara objektif, independen, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PLN Nusa Daya juga menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk *fraud*, termasuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penggelapan aset, benturan kepentingan, maupun tindakan lain yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan.

Pengendalian Gratifikasi

PLN Nusa Daya menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun budaya integritas dan mencegah praktik korupsi melalui penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Perusahaan secara konsisten berpartisipasi dalam Program Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai landasan implementasi program tersebut, PLN Nusa Daya telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor 0005.P/DIR-TRK/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini mengatur prinsip, mekanisme, serta batasan terkait pemberian dan penerimaan gratifikasi bagi seluruh insan perusahaan. Perusahaan secara tegas melarang segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Larangan tersebut berlaku terhadap hubungan dengan pemangku kepentingan, mitra kerja, pelanggan, maupun antarpegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anti-Fraud Policy

PLN Nusa Daya has established an Anti-Fraud Policy as stipulated in Board of Directors Regulation No. 011.P/DIR-TRK/2019 concerning the Anti-Fraud Policy. This policy forms an integral part of the Company's commitment to strengthening its internal control system and fostering a work culture that upholds integrity, transparency, and accountability.

Through this policy, PLN Nusa Daya adopts a comprehensive approach to fraud risk management, covering prevention, detection, investigation, reporting, and follow-up actions on any indications or incidents of fraud. The policy is implemented through various initiatives, including the strengthening of internal controls, enhancement of employee awareness and understanding of fraud risks, implementation of Fraud Risk Assessment, and optimisation of the reporting mechanism through the Whistleblowing System (WBS).

Furthermore, the Company ensures that every suspected fraud case is handled objectively, independently, and in accordance with the applicable provisions. PLN Nusa Daya applies a zero-tolerance stance towards all forms of fraud, including abuse of authority, data manipulation, asset misappropriation, conflicts of interest, and other actions that may cause losses to the Company and its stakeholders.

Gratification Control

PLN Nusa Daya reaffirms its strong commitment to fostering a culture of integrity and preventing corruption-related practices through the implementation of the Gratification Control Programme (GCP). The Company consistently participates in the Gratification Control Programme organised by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of its efforts to strengthen clean, transparent, and accountable corporate governance.

As the basis for the implementation of this programme, PLN Nusa Daya has issued Board of Directors Regulation No. 0005.P/DIR-TRK/2021 concerning the Gratification Control Guidelines. This policy regulates the principles, mechanisms, and limitations relating to the offering and acceptance of gratification by all Company personnel. The Company strictly prohibits any form of gratification that may create or potentially lead to conflicts of interest, or compromise independence in the performance of duties and decision-making. This prohibition applies to relationships with stakeholders, business partners, customers, and fellow employees, whether directly or indirectly. Any violation of the applicable provisions shall be subject to sanctions in accordance with the Company's regulations and the prevailing laws and regulations.

Untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan tersebut, PLN Nusa Daya telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. UPG memiliki peran dalam menerima, mengelola, mengevaluasi, serta melaporkan seluruh penerimaan, penolakan, maupun pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK. Keberadaan UPG menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem Pengawasan Internal sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi.

Selain penguatan aspek kebijakan dan pengawasan, PLN Nusa Daya juga secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan edukasi terkait pengendalian gratifikasi. Sosialisasi internal dilakukan secara rutin setiap bulan maupun triwulan kepada seluruh insan perusahaan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Materi sosialisasi mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk gratifikasi, tata cara pelaporan, kewajiban pegawai, serta risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran kebijakan gratifikasi.

Di samping itu, Perusahaan juga menyelenggarakan sosialisasi eksternal secara berkala kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, mitra kerja, vendor, dan pelanggan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian gratifikasi serta mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, integritas, dan kepatuhan.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

PLN Nusa Daya secara konsisten melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Perusahaan. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara negara serta memitigasi potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN Nusa Daya telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor 0021.P/DIR/2021 tentang Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan, yang mencakup penetapan wajib lapor, mekanisme penyampaian laporan, peran dan tanggung jawab unit kerja pengelola serta administrator LHKPN, proses monitoring dan evaluasi kepatuhan, hingga penerapan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

To ensure the effective implementation of this policy, PLN Nusa Daya has established a Gratification Control Unit (GCU), which is directly accountable to the Board of Directors. The GCU is responsible for receiving, managing, evaluating, and reporting all acceptance, rejection, and disclosure of gratification to the Board of Directors and KPK. The presence of the GCU serves as an important element in strengthening the internal control system and ensuring compliance with gratification control provisions.

In addition to strengthening policy and supervisory aspects, PLN Nusa Daya actively conducts awareness and education programmes on gratification control. Internal awareness activities are carried out regularly, both monthly and quarterly, for all Company personnel to enhance their understanding, awareness, and compliance with the applicable provisions. The materials cover the forms of gratification, reporting procedures, employee obligations, as well as legal and reputational risks arising from violations of the gratification control policy.

Furthermore, the Company periodically conducts external awareness activities for various stakeholders, including regional governments, law enforcement authorities, business partners, vendors, and customers. These activities aim to promote a shared understanding of the importance of gratification control and foster a business ecosystem that upholds the principles of transparency, integrity, and compliance.

Management of State Officials' Wealth Reporting (LHKPN)

PLN Nusa Daya consistently complies with its obligation to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) as part of its efforts to strengthen transparency, accountability, and integrity within the Company. LHKPN reporting constitutes an important instrument in preventing corruption, supporting oversight of reporting officials' compliance, and mitigating potential conflicts of interest in the performance of duties and decision-making processes.

As part of its commitment to implementing good corporate governance, PLN Nusa Daya has issued Board of Directors Regulation No. 0021.P/DIR/2021 concerning the Standard Operating Procedure for the Management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN). This policy serves as a guideline for LHKPN management within the Company, covering the determination of officials subject to reporting obligations, reporting mechanisms, the roles and responsibilities of the managing work unit and LHKPN administrator, compliance monitoring and evaluation processes, as well as the imposition of sanctions on employees who do not comply with their reporting obligations in accordance with the applicable provisions.

Untuk memastikan kepatuhan pelaporan, PLN Nusa Daya secara aktif melakukan koordinasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap seluruh pejabat yang termasuk dalam kategori wajib lapor. Perusahaan juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara berkala guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan LHKPN sebagai bagian dari budaya integritas dan transparansi organisasi. Melalui pendekatan tersebut, proses pelaporan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Implementasi pengelolaan LHKPN yang efektif menjadi salah satu bentuk nyata komitmen PLN Nusa Daya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2025, seluruh pejabat yang termasuk kategori wajib lapor di PLN Nusa Daya telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan tingginya komitmen perusahaan dan para pejabatnya dalam menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan Perusahaan.

Pejabat yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN

PLN Nusa Daya mewajibkan seluruh Insan Perusahaan yang termasuk dalam kategori wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, lengkap, dan akurat melalui sistem pelaporan elektronik (e-LHKPN) yang dikelola oleh KPK. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi dan benturan kepentingan di lingkungan kerja.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, PLN Nusa Daya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaporan LHKPN oleh seluruh wajib lapor. Berdasarkan Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pihak-pihak yang termasuk dalam kategori wajib lapor di lingkungan PLN Nusa Daya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai PLN Nusa Daya pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, dan Manajemen Dasar;
2. Pegawai PLN Nusa Daya pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi:
   a. Fungsional 1;
   b. Fungsional 2; dan
   c. Fungsional 3.
3. Pejabat PLN Nusa Daya Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

To ensure reporting compliance, PLN Nusa Daya actively coordinates, provides assistance, and monitors all officials subject to LHKPN reporting obligations. The Company also conducts regular awareness and education programmes to enhance understanding of the importance of LHKPN reporting as part of the organisation's culture of integrity and transparency. Through this approach, the reporting process can be carried out in an orderly, timely, and compliant manner in accordance with the provisions stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK).

The effective implementation of LHKPN management reflects PLN Nusa Daya's tangible commitment to supporting the anti-corruption agenda and strengthening stakeholders' trust. In 2025, all officials subject to reporting obligations at PLN Nusa Daya submitted their LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK), with a compliance rate of 100%. This achievement reflects the strong commitment of the Company and its officials to upholding the principles of transparency, accountability, and integrity in every aspect of corporate management.

Officials Required to Submit LHKPN

PLN Nusa Daya requires all Company personnel classified as reporting officials to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) accurately, completely, and in a timely manner through the e-LHKPN electronic reporting platform administered by the Corruption Eradication Commission (KPK). This obligation represents part of the Company's efforts to strengthen transparency and accountability, as well as to support the prevention of corruption and potential conflicts of interest within the workplace.

To ensure compliance with these provisions, PLN Nusa Daya periodically monitors and evaluates the LHKPN reporting process of all reporting officials. Based on the Policy on the Submission and Management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN), the officials subject to reporting obligations within PLN Nusa Daya are as follows:

1. PLN Nusa Daya employees holding structural positions, comprising Senior Management, Middle Management, and Basic Management;
2. PLN Nusa Daya employees holding functional positions, comprising:
   a. Functional 1;
   b. Functional 2; and
   c. Functional 3; and
3. PLN Nusa Daya officials serving as Procurement Planners and Procurement Implementing Officers.

Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pengelolaan dan pelaporan LHKPN di PLN Nusa Daya dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penguatan integritas pegawai di lingkungan perusahaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perusahaan secara aktif melakukan pendampingan, sosialisasi, konsultasi, serta pemantauan berkala terhadap seluruh wajib lapor guna memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Provisions and Procedures for LHKPN Submission

The management and reporting of LHKPN at PLN Nusa Daya are coordinated by the Risk Management and Compliance Function, as the unit responsible for strengthening employee integrity within the Company. In performing this function, the Company actively provides assistance, conducts awareness activities, facilitates consultations, and carries out regular monitoring of all reporting officials to ensure that LHKPN reporting obligations are fulfilled accurately, completely, and in a timely manner in accordance with the applicable provisions.

LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

The LHKPN shall be submitted no later than three (3) months from the date of initial appointment/termination of office/retirement/reappointment after the end of the term of office or retirement as a State Administrator.

LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN during the term of office of State Officials is carried out periodically once every 1 (one) year on the assets as of 31 December of the reporting year and must be submitted no later than 31 March of the following year.



Sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan, PLN Nusa Daya juga melaksanakan monitoring secara berkelanjutan terhadap status pelaporan setiap wajib lapor, termasuk melakukan pengingat dan tindak lanjut apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian laporan. LHKPN disampaikan satu kali dalam setiap tahun kepada KPK melalui aplikasi elektronik e-LHKPN yang berbasis web. Proses penyampaian, pengelolaan, dan pemantauan pelaporan LHKPN di PLN Nusa Daya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

As part of its efforts to enhance compliance, PLN Nusa Daya also conducts continuous monitoring of the reporting status of each reporting official, including issuing reminders and following up on any obstacles encountered during the report submission process. LHKPN is submitted once a year to KPK through the web-based e-LHKPN application. The submission, management, and monitoring of LHKPN reporting at PLN Nusa Daya refer to Corruption Eradication Commission Regulation No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for the Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.

PLN Nusa Daya secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pejabat wajib lapor guna memastikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat disampaikan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan yang berlaku.

PLN Nusa Daya actively conducts awareness activities for all reporting officials to ensure that the State Officials' Wealth Report (LHKPN) is submitted accurately, completely, and in a timely manner. These activities also aim to enhance understanding of, and compliance with, the applicable reporting provisions.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Policy on The Procurement of Goods and Services

PLN Nusa Daya berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai acuan operasional utama dalam setiap proses penunjukan maupun kerja sama dengan mitra penyedia, Perusahaan secara konsisten berpedoman pada Peraturan Direksi No. 0019.P/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

Dalam menjalin hubungan bisnis dengan berbagai pemasok dan mitra kerja, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh tahapan dan mekanisme pengadaan dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk secara selaras merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN demi mewujudkan ekosistem rantai pasok (*supply chain*) yang sehat, adil, dan berintegritas.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

PLN Nusa Daya telah menetapkan standar etika yang ketat dan mengikat dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa guna membangun ekosistem bisnis yang bersih dan tepercaya. Penerapan etika ini wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan maupun mitra penyedia (*vendor*) demi mencegah segala bentuk praktik kecurangan, benturan kepentingan, serta intervensi tidak sah yang dapat merugikan korporasi. Melalui komitmen terhadap integritas dan keadilan pasar, Perusahaan memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara objektif serta profesional. Etika pengadaan yang diterapkan oleh Perusahaan di antaranya meliputi:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.

PLN Nusa Daya is fully committed to conducting the procurement of goods and services in an effective, efficient, transparent, accountable and sustainable manner. As the main operational reference in every appointment process and collaboration with supplier partners, the Company consistently refers to Board of Directors Regulation No. 0019.P/DIR/2024 concerning Standard Procedures for the Procurement of Goods and/or Other Services.

In establishing business relationships with various suppliers and business partners, the Company consistently upholds the principles of good corporate governance. All procurement stages and mechanisms are carried out in full compliance with the applicable regulations, including by referring to the provisions of Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, in order to realize a sound, fair and integrity-based supply chain ecosystem.

Ethics in the Procurement of Goods and Services

PLN Nusa Daya has established strict and binding ethical standards in every stage of the goods and services procurement process in order to build a clean and trusted business ecosystem. These ethical standards must be complied with by all Company personnel and supplier partners (vendors) to prevent all forms of fraud, conflicts of interest, and unauthorized intervention that may harm the corporation. Through its commitment to integrity and market fairness, the Company ensures that all selection processes are carried out objectively and professionally. The procurement ethics applied by the Company include, among others:

1. Performing duties in an orderly manner, with full responsibility for ensuring the smooth and timely achievement of the objectives of goods/services procurement.
2. Working professionally and independently, while maintaining the confidentiality of information which, by its nature, must be kept confidential in order to prevent irregularities in the procurement of goods and services.
3. Refraining from influencing one another, either directly or indirectly, in order to prevent and avoid unfair competition.
4. Accepting and being responsible for all decisions made in accordance with the agreement of the parties.
5. Avoiding and preventing conflicts of interest among the parties involved in the goods/services procurement process, whether directly or indirectly, which may be detrimental to the interests of the users of goods/services.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Kriteria dan Proses Seleksi Pemasok

Sistem seleksi pemasok di PLN Nusa Daya dijalankan melalui kriteria dan panduan baku guna memastikan seluruh proses pengadaan memenuhi pilar transparansi, akuntabilitas, dan keadilan usaha. Penentuan mitra kerja dilakukan secara objektif dengan mengukur pemenuhan kualifikasi teknis, kapabilitas manajerial, rekam jejak (*experience*), efisiensi biaya, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi. Melalui standardisasi seleksi yang komprehensif ini, Perusahaan berkomitmen untuk hanya membangun kemitraan strategis dengan penyedia yang mampu mendukung operasional secara andal dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai pengumuman, kriteria, dan mekanisme proses pengadaan Perusahaan dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Perusahaan pada laman: www.plnnusadaya.co.id/info-pengadaan.

Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

PLN Nusa Daya secara konsisten menerapkan metode dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai pilar utama operational. Seluruh proses penunjukan dan pengadaan dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap ketentuan internal korporasi serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini diterapkan guna menjamin terciptanya ekosistem pengadaan yang adil, kompetitif, serta mampu memberikan nilai optimal (*best value for money*) bagi Perusahaan.

Berikut adalah beberapa metode pengadaan barang dan jasa yang diterapkan di PLN Nusa Daya:

1. ***e-Purchasing,*** merupakan metode pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan melalui katalog elektronik. Barang/Jasa yang tercantum dalam katalog telah melalui proses evaluasi untuk memastikan kualitas dan harga yang kompetitif, sehingga mendukung

6. Avoiding and preventing wasteful spending and financial losses within the Company in the procurement of goods/services.
7. Avoiding and preventing abuse of authority and/or collusion for the purpose of personal gain, the gain of a group, or the gain of another party, which directly or indirectly harms the Company.
8. Not accepting, offering, or promising to give or receive gifts or rewards of any kind to or from anyone who is known or reasonably suspected to be related to the procurement of goods/services.

Supplier Selection Criteria and Process

The supplier selection system at PLN Nusa Daya is implemented based on standard criteria and guidelines to ensure that the entire procurement process fulfills the pillars of transparency, accountability and fair business practices. Business partners are selected objectively by assessing their fulfillment of technical qualifications, managerial capability, track record or experience, cost efficiency, and full compliance with regulations. Through this comprehensive standardisation of the selection process, the Company is committed to establishing strategic partnerships only with suppliers that are able to support its operations in a reliable and sustainable manner. Further information on the announcements, criteria and mechanisms of the Company's procurement process is publicly available on the Company's official website at: www.plnnusadaya.co.id/info-pengadaan.

Methods and Mechanisms for the Procurement of Goods and Services

PLN Nusa Daya consistently applies methods and mechanisms for the procurement of goods and services that place the principles of transparency, accountability, efficiency and effectiveness as the main operational pillars. All appointment and procurement processes are carried out in full compliance with the Company's internal provisions and the applicable laws and regulations. This approach is applied to ensure the creation of a fair and competitive procurement ecosystem that is capable of delivering optimal value, or best value for money, for the Company.

The following are several methods for the procurement of goods and services applied at PLN Nusa Daya:

1. **e-Purchasing** is a method for procuring Goods/Other Services through an electronic catalogue. The goods/services listed in the catalogue have undergone an evaluation process to ensure quality and competitive prices, thereby supporting the principle of value for

prinsip value for money. Metode ini diterapkan PLN Nusa Daya guna mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

2. **Pengadaan Langsung,** merupakan metode pengadaan Barang/Jasa dengan nilai maksimal Rp500.000.000 di Kantor Pusat dan Rp300.000.000 di Unit Pelaksana. Pelaksanaannya dilakukan melalui pembelian langsung kepada penyedia, termasuk melalui toko daring dengan bukti pembelian hingga Rp100.000.000,00, atau melalui permintaan penawaran disertai klarifikasi dan negosiasi harga kepada penyedia untuk nilai di atasnya. Metode ini diterapkan untuk memastikan proses pengadaan tetap efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan operasional.

3. **Penunjukan Langsung**, merupakan metode pengadaan dengan menetapkan satu penyedia Barang/Jasa secara langsung atau melalui *beauty contest*. Metode ini dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti pengadaan bersifat spesifik dengan teknologi khusus, hanya tersedia satu penyedia yang kompeten, atau untuk penyelesaian pekerjaan strategis dan darurat termasuk akibat bencana (*force majeure*). Penunjukan juga diperbolehkan untuk kebutuhan CSR, kerja sama dengan lembaga negara/perguruan tinggi, atau jika tender ulang mengalami kegagalan. Selain itu, metode ini dapat digunakan dalam bentuk repeat order terhadap penyedia yang telah memenangkan tender sebelumnya, dengan ketentuan tetap memperhatikan efisiensi, kualitas, dan batasan jumlah pengulangan.

4. **Pengadaan dengan metode open book,** merupakan penunjukan langsung kepada satu atau lebih perusahaan dengan tujuan memperoleh harga yang kompetitif, menjaga kualitas, serta memastikan ketepatan waktu pengadaan. Dalam mekanisme ini, Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa menyepakati struktur biaya yang terdiri dari biaya aktual dan margin yang ditambahkan secara transparan. Metode ini diterapkan atas persetujuan Direksi untuk pengadaan bernilai tinggi atau termasuk kategori kebutuhan strategis, khususnya terhadap pabrikan dalam negeri yang memenuhi spesifikasi teknis.

5. **Tender Cepat,** merupakan metode pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan terhadap penyedia yang telah terkualifikasi atau terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dengan proses yang lebih sederhana melalui pembandingan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi dan teknis, serta tanpa tahapan sanggah. Metode ini diterapkan untuk pengadaan dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang telah ditentukan secara rinci, termasuk kontrak kerja sama (KHS) dengan volume estimasi namun spesifikasi barang/jasa yang jelas.

money. This method is applied by PLN Nusa Daya to promote efficiency, transparency and accountability in the procurement process.

2. **Direct Procurement** is a method for procuring Goods/Services with a maximum value of Rp500,000,000 at the Head Office and Rp300,000,000 at Implementing Units. It is carried out through direct purchases from suppliers, including through online stores with proof of purchase of up to Rp100,000,000.00, or through requests for quotations accompanied by price clarification and negotiation with suppliers for values above that threshold. This method is applied to ensure that the procurement process remains efficient, transparent and aligned with operational needs.

3. **Direct Appointment** is a procurement method carried out by appointing one supplier of Goods/Services directly or through a beauty contest. This method may be used when certain criteria are met, such as procurement of a specific nature involving special technology, where only one competent supplier is available, or for the completion of strategic and emergency work, including work required as a result of disasters or force majeure. Direct Appointment is also permitted for CSR requirements, cooperation with state institutions or universities, or where a retender has failed. In addition, this method may be used in the form of a repeat order with a supplier that has previously won a tender, provided that efficiency, quality and limits on the number of repeat orders continue to be taken into account.

4. **Procurement using the open book method** is a direct appointment of one or more companies with the aim of obtaining competitive prices, maintaining quality, and ensuring timely procurement. Under this mechanism, the User and the Supplier of Goods/Services agree on a cost structure consisting of actual costs and a transparently disclosed margin. This method is applied with the approval of the Board of Directors for high-value procurement or procurement that falls under the category of strategic needs, particularly with domestic manufacturers that meet the technical specifications.

5. **Fast Tender** is a method for procuring Goods/Other Services from suppliers that have been qualified or registered in the List of Selected Suppliers (DPT), with a simpler process through price comparison, without requiring qualification assessment, administrative and technical evaluation, or an objection stage. This method is applied for procurement where the specifications and volume of work have been determined in detail, including cooperation contracts (KHS) with estimated volumes but clear specifications for goods/services.

6. **Tender Terbatas**, merupakan metode pengadaan yang tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kompetisi, dengan pelibatan penyedia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Metode ini dapat diterapkan apabila terdapat penyedia dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang relevan, jumlah penyedia kompeten sangat terbatas, pengadaan terkait teknologi baru yang belum pernah digunakan namun telah terbukti di pasar, atau untuk pekerjaan berisiko tinggi yang memerlukan penyedia berpengalaman.

7. **Tender Terbuka** merupakan metode pengadaan yang dilakukan melalui pengumuman terbuka guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penilaian kualifikasi terhadap penyedia melalui dua mekanisme, yaitu Prakualifikasi untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, dan Pascakualifikasi untuk pekerjaan dengan ruang lingkup yang lebih sederhana.

6. **Limited Tender** is a procurement method that continues to prioritize the principles of transparency and competition by involving suppliers with the required competence. This method may be applied where there are relevant suppliers in the List of Selected Suppliers (DPT), the number of competent suppliers is very limited, the procurement relates to new technology that has not previously been used but has been proven in the market, or for high-risk work that requires experienced suppliers.

7. **Open Tender** is a procurement method carried out through an open announcement to provide the widest possible opportunity for suppliers of goods/services that meet the requirements. In its implementation, supplier qualification assessment is carried out through two mechanisms, namely Pre-qualification for complex work, and Post-qualification for work with a simpler scope.

Perlindungan Hak Kreditur

Protection of Creditors' Rights

PLN Nusa Daya berkomitmen penuh untuk menghormati dan memenuhi seluruh hak serta kewajiban dalam setiap perikatan hukum dan bisnis, termasuk terhadap kreditur di masa mendatang. Komitmen ini merupakan manifestasi dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki kreditur maupun perikatan pembiayaan dengan pihak eksternal, sehingga belum menetapkan kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak kreditur. Meskipun demikian, prinsip perlindungan terhadap hak pihak ketiga telah terintegrasi dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*). Melalui pedoman tersebut, seluruh insan Perusahaan diwajibkan untuk senantiasa menjaga integritas dalam pemenuhan kewajiban kontraktual serta menghormati hak-hak mitra usaha maupun seluruh pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.

PLN Nusa Daya is fully committed to respecting and fulfilling all rights and obligations under every legal and business arrangement, including those involving prospective creditors. This commitment reflects the implementation of the prudence principle and good corporate governance practices. As of the end of 2025, the Company had no creditors and no financing arrangements with external parties. Accordingly, the Company had not established a specific policy governing the protection of creditors' rights. Nevertheless, the principle of protecting the rights of third parties has been embedded in the Company's Code of Conduct and Business Ethics. Through this guideline, all Company personnel are required to uphold integrity in fulfilling contractual obligations and to respect the rights of business partners and all parties having business relationships with the Company.

Governansi Perpajakan

Taxation Governance

PLN Nusa Daya menempatkan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang kredibel, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi perpajakan Korporasi dikelola secara terpusat oleh Divisi Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pajak, khususnya melalui Sub Bidang Pajak dan Asuransi yang dijalankan langsung oleh Assistant Manager Pajak dan Asuransi. Penataan struktur organisasi ini didasarkan pada Peraturan Direksi No. 0044.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Divisi ini memegang kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola berbagai kewajiban fiskal Perusahaan, meliputi PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), PPN, hingga PPh Badan Tahunan. Melalui pendekatan yang sistematis, Perusahaan memastikan terciptanya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (*tax compliance*) guna mendukung pelaporan fiskal yang akurat dan tepat waktu. Adapun tugas-tugas utama dalam pengelolaan pajak Perusahaan meliputi:

1. Memverifikasi tarif, perhitungan pajak, dan sesuai jenis transaksi (*Tax Code*);
2. Memverifikasi perhitungan pajak pada berkas tagihan;
3. Menyiapkan daftar penyetoran pajak ke Bank;
4. Melakukan rekonsiliasi pajak terutang dengan Sub Bidang Akuntansi;
5. Menyusun laporan SPT Masa dan Tahunan menggunakan aplikasi pajak yang berlaku;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

PLN Nusa Daya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan pengawasan berjenjang sebagai bagian dari sistem pengendalian internal guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Perusahaan juga memastikan seluruh proses perpajakan terdokumentasi dengan baik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat kasus perpajakan, pengenaan sanksi administratif, maupun temuan audit dari otoritas pajak yang dijatuhkan kepada Perusahaan. Capaian ini menegaskan efektivitas manajemen risiko fiskal dan komitmen tinggi Perusahaan dalam menjaga kepatuhan pajak yang bersih.

PLN Nusa Daya regards the fulfilment of tax obligations as an important pillar in establishing credible, transparent, and accountable financial governance in accordance with the applicable laws and regulations. The Company's corporate taxation function is managed centrally by the Finance Division under the Accounting and Tax Department, specifically through the Tax and Insurance Sub-Department, which is under the responsibility of the Assistant Manager of Tax and Insurance. This organisational structure is established pursuant to Board of Directors Regulation No. 0044.P/DIR/2025 concerning Organisation and Work Procedures.

The Division holds full authority and responsibility for managing the Company's various tax obligations, including Income Tax Article 21, Article 23, Article 4 paragraph (2), Value Added Tax (VAT), and Annual Corporate Income Tax. Through a systematic approach, the Company ensures a high level of tax compliance to support accurate and timely tax reporting. The main duties in the Company's tax management include:

1. Verifying rates, tax calculations, and according to the type of transaction (Tax Code);
2. Verifying tax calculations on billing files;
3. Prepare a list of tax deposits to the Bank;
4. Reconciling tax payable with Accounting Sub Division;
5. Prepare periodic and annual tax return reports using the applicable tax application;
6. Follow up the results of tax audits in accordance with applicable regulations; and
7. Carry out other official duties in accordance with their basic obligations and responsibilities.

PLN Nusa Daya applies the principles of prudence and multi-tiered oversight as part of its internal control system to minimise the risk of discrepancies in tax reporting. The Company also ensures that all taxation processes are properly documented in a systematic and accountable manner. Throughout the 2025 financial year, the Company did not record any tax disputes, administrative sanctions, or tax audit findings issued by the tax authorities. This achievement reflects the effectiveness of the Company's fiscal risk management and its strong commitment to maintaining robust tax compliance.

Kebijakan *Insider Trading*

Insider Trading Policy

Kebijakan terkait perdagangan orang dalam (*insider trading*) bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi material yang belum tersedia untuk publik oleh pihak internal, seperti Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai, demi keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Hingga akhir tahun 2025, PLN Nusa Daya belum berstatus sebagai perusahaan terbuka (*emiten*), sehingga belum memberlakukan regulasi khusus mengenai *insider trading*.

Meskipun demikian, Perusahaan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan informasi tersebut ke dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*). Melalui pedoman ini, seluruh insan Perusahaan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi internal yang berkaitan dengan Perusahaan, mitra usaha, maupun pihak ketiga lainnya, di mana setiap bentuk pengungkapan informasi tanpa wewenang dapat dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran maupun penyalahgunaan informasi non-publik, yang mencerminkan komitmen kuat Perusahaan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

The Company's policy on insider trading is intended to prevent the misuse of material information that has not been publicly disclosed by internal parties, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees, for personal interests or for the benefit of third parties. Until the end of 2025, PLN Nusa Daya had not yet obtained the status of a public company or issuer, and therefore had not adopted specific regulations governing insider trading.

Nevertheless, the Company has embedded the principles of information protection and confidentiality into its Code of Conduct and Business Ethics. Under this guideline, all Company personnel are required to safeguard the confidentiality of internal information relating to the Company, business partners, and other third parties. Any unauthorised disclosure of such information may be subject to strict sanctions in accordance with the applicable provisions. Throughout the 2025 fiscal year, there were no reports or complaints regarding alleged violations or misuse of non-public information. This reflects the Company's commitment to upholding integrity, maintaining information confidentiality, and ensuring compliance with the principles of good corporate governance.

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

Perusahaan secara berkelanjutan menjalankan delapan prinsip governansi korporat Indonesia sebagai landasan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, responsif, dan berorientasi pada nilai jangka panjang. Dengan demikian, PLN Nusa Daya menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan terpercaya di mata seluruh pemangku kepentingan.

PLN Nusa Daya melakukan penilaian dan evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dilaksanakan pada tahun 2025. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat tata kelola

The Company consistently implements the eight principles of Indonesian corporate governance as the foundation for establishing effective, responsive, and long-term value-oriented governance. Through this commitment, PLN Nusa Daya reaffirms its dedication to continuously developing and implementing governance practices that support sustainable corporate growth and enhance the Company's trustworthiness among all stakeholders.

PLN Nusa Daya conducted an assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). This effort was undertaken as part of the Company's commitment to strengthening good corporate governance in accordance with corporate

perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip governansi korporat yang relevan dengan konteks bisnis di Indonesia. Penilaian dan evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan melalui penerapan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan.

governance principles that are relevant to the business environment in Indonesia. The assessment and evaluation aimed to enhance investor and stakeholder confidence through the implementation of best practices in corporate governance.

Pemetaan Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Mapping of the Implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI)

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners			
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: a. to be competitive and focused on long-term performance; b. to be ethical and responsible in conducting business; c. to have positive contributions to the community and the environment; as well as d. to be able to survive and grow (corporate resilience).	*Apply*	Perusahaan telah memiliki sasaran strategi yang bertujuan untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Direksi menjalankan perannya dengan menetapkan kinerja jangka panjang, memastikan pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab, berkontribusi melalui program TJSL, serta mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. The Company has established strategic goals aimed at creating long-term sustainable value. The Board of Directors fulfills its role by setting long-term performance targets, ensuring ethical and responsible management, contributing through CSR (TJSL) programs, and promoting business sustainability and growth.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	*Apply*	Direksi telah memastikan seluruh perencanaan strategis, termasuk visi, misi, tujuan, dan strategi, disusun secara selaras dan konsisten dengan RJPP dan RKAP, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi terkini. Perusahaan juga telah meninjau visi dan misi agar selaras dengan RJPP 2024–2028. The Board of Directors ensures that all strategic planning, including the vision, mission, objectives, and strategies, are aligned with the LTP and WP&B, while leveraging innovation and the latest technology. The Company has also reviewed its vision and mission to ensure alignment with the 2024–2028 LTP.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies, as well as complying with applicable laws and regulations and standards.	*Apply*	Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui proses bisnis yang mencakup pengukuran maturitas risiko, pemantauan risiko, dan penguatan budaya risiko. Selain itu, Direksi menetapkan sistem pengendalian intern berbasis three lines model yang efektif dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Eksternal terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. The Board of Directors has implemented effective risk management through business processes that include risk maturity measurement, risk monitoring, and the reinforcement of a risk-aware culture. It has also established an internal control system based on the three lines model and evaluates its effectiveness, as reflected in the external auditor's report concerning internal controls and regulatory compliance.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.	*Apply*	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan setiap tahun. Laporan keuangan disampaikan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan kinerjanya diungkap secara transparan dalam Laporan Tahunan. The Board of Directors ensures the integrity of the Company's accounting and financial reporting system by signing the Statement of Responsibility for the Financial Statements annually. Financial statements are submitted on time to shareholders and disclosed transparently in the Annual Report.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	*Apply*	Laporan Keberlanjutan Perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengungkapan yang relevan untuk sektor utilitas listrik. Laporan ini mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). The Sustainability Report was prepared with reference to relevant disclosure principles for the electricity utility sector, covering economic, environmental, social, and governance (ESG) aspects.
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports corporate goals and strategies.	*Apply*	Perusahaan telah membangun kerangka governansi teknologi informasi yang mendukung operasional bisnis, termasuk kepemilikan IT Masterplan dan IT Disaster Recovery Management. Saat ini, Perusahaan sedang dalam tahap finalisasi IT Masterplan terbaru untuk periode 2024–2028. The Company has developed an information technology (IT) governance framework to support business operations, including an IT Masterplan and Disaster Recovery Management. The latest IT Masterplan for 2024–2028 is currently being finalized.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools, allowing the Sharia Supervisory Board to carry out its role effectively.	*Explain*	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. The Company does not operate under Sharia principles.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the delegation of roles for the Directors individually, which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	*Apply*	Piagam Direksi telah ditinjau secara periodik dan mencakup antara lain pengaturan pembagian peran masing-masing Direksi. The Board of Directors Charter is reviewed periodically and includes, among others, the division of responsibilities among the Directors.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	*Explain*	Kebijakan terkait pengunduran diri Direksi belum secara spesifik mengatur pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan atau terbukti melakukan kesalahan. Policies regarding Director resignation do not yet specifically address resignation in cases of financial crimes or proven misconduct.
1.2	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** Performance Evaluation of the Board of Directors and Its Members		
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation in an objective and independent manner to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	*Explain*	Dewan Komisaris secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan berdasarkan Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicator masing-masing. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pembahasan dalam RUPS Tahunan. Terkait pemberian remunerasi, karena Perusahaan bukan merupakan emiten yang terdaftar di bursa saham, maka tidak terdapat pemberian saham yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham (N/A). The Board of Commissioners regularly monitors and evaluates the performance of the Board of Directors on a monthly basis, based on Management Contracts and individual Key Performance Indicators (KPIs). Evaluation results are submitted to shareholders for discussion at the Annual GMS. As the Company is not a publicly listed entity, there is no issuance of shares requiring shareholder approval (N/A).
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with due observance of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance assessment criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	Setiap tahun, Dewan Komisaris bersama Komite melakukan penilaian atas pencapaian kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya terhadap target yang ditetapkan dalam KPI. Annually, the Board of Commissioners and relevant committees assess the performance of the President Director and other directors against the established KPIs.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice, and approves long-term business and financial plans and the Company's short-term financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporation, as regulated in the articles of association of the Company.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disusun oleh Direksi, serta memberikan arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. The Board of Commissioners has reviewed the LTP and WP&B drafts prepared by the Board of Directors and provided guidance accordingly. the Board of Commissioners was also involved in strategic decision-making in accordance with the Articles of Association.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	*Explain*	Laporan Tahunan Perusahaan belum memuat pengungkapan mengenai jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris The Annual Report does not yet disclose which types of Board of Directors' decisions require approval from the Board of Commissioners.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be resolved by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners takes into account the diversity, non-discriminatory elements, as well as provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures a formal and transparent selection and nomination process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.	*Explain*	Tidak terdapat proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris yang dilakukan pada tahun tersebut (N/A). No new Board of Commissioners appointments occurred (N/A).
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or Committees conducting the nomination function formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plans submitted by the President Director.	*Explain*	Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi belum menjalankan fungsi nominasi dan suksesi bagi Direksi. The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee has not yet executed nomination and succession planning functions for the Board of Directors.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a). submit to the GMS, which may be preceded by recommendation from Committees conducting the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris, melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan dan menelaah kebijakan pengusulan remunerasi dari Direksi serta menyampaikan usulan remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kerja, kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, has reviewed and recommended remuneration proposals—including salaries, benefits, facilities, and tantiem/bonuses—to the GMS for approval.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and the implementation, as well as proposing changes if necessary.	*Apply*	Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap struktur, proses, dan hasil governansi di Perusahaan, termasuk memberikan masukan jika terdapat usulan perbaikan. The Board of Commissioners periodically supervises governance structures, processes, and outcomes, and provides improvement recommendations.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the company to implement the appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporate goals, objectives and strategies as well as complying with laws and regulations, codes of conduct, and applicable standards.	*Apply*	Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi terkait efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memberikan arahan dalam rapat gabungan agar Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar yang berlaku yang dilakukan melalui rapat. The Board of Commissioners oversees and advises the Board of Directors on the effectiveness of risk management and internal controls, providing direction during joint meetings to ensure compliance with laws, codes of ethics, and standards.
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi Audit Internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan integritas pelaporan akuntansi dan Laporan Keuangan Perusahaan melalui review oleh Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau dipublikasikan dalam Laporan Tahunan. The Board of Commissioners has ensured the integrity of accounting reports and the Company's Financial Statements together with the Audit Committee before they are submitted to the Shareholders or published in the Annual Report.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the annual report and sustainability report of the Company, and ensures their integrity, as well as oversees the Company's disclosure and communication process.	*Apply*	Dewan Komisaris telah mereview dan menyetujui Laporan Tahunan, memastikan integritas isi serta mengawasi proses pengungkapan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan bersama Direksi. The Board of Commissioners has reviewed and approved the Annual Report, ensuring the integrity of its contents and the disclosure process through the joint signing of the Statement of Responsibility for the Annual Report and Sustainability Report with the Board of Directors.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The charter of the Board of Commissioners is periodically reviewed.	*Apply*	Piagam Dewan Komisaris telah secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.1.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	*Explain*	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris belum secara spesifik mengatur pengunduran diri jika terlibat dalam kejahatan keuangan atau terbukti melakukan kesalahan. Policies regarding the resignation of commissioners do not specifically address cases of financial crime or proven misconduct.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.	*Explain*	Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen. The Company does not yet have an Independent Commissioner.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of transparency and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there should also be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	*Explain*	Komisaris Utama telah bertugas mengoordinasikan tugas Dewan Komisaris dan memimpin rapat, serta berkoordinasi dengan Direksi. Namun, belum ada ketentuan terkait penugasannya mewakili Dewan Komisaris dalam urusan eksternal. The President Commissioner has coordinated the duties of the Board and led meetings, as well as liaised with the Board of Directors. However, there are no provisions regarding his assignment to represent the Board of Commissioners in external affairs.
1.4	Pembentukan Komite Establishment of Committees		
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners, consisting of at least: The Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	*Apply*	Saat ini, Perusahaan telah membentuk tiga Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dan kepatuhan. The Company has established three committees: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Compliance Committee.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles in an effective and independent manner.	*Explain*	Seluruh anggota Komite Audit saat ini bukan berasal dari pihak independen, namun memiliki keahlian dan kompetensi sesuai bidang masing-masing. All Audit Committee members are not independent but possess relevant expertise.
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure the monitoring on the implementation of duties of the Audit Committee is carried out in an objective and independent manner, the President Commissioner is not allowed to be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report.	*Explain*	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Utama. Hal ini dikarenakan jumlah Komisaris Perusahaan hanya terdiri dari satu orang yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. The Audit Committee is currently chaired by the President Commissioner due to the Company having only one Commissioner.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.5	**Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Evaluation – Board of Commissioners and Its Members		
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.	*Explain*	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara kolegial, termasuk terhadap komite. Namun, evaluasi tersebut belum melibatkan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners conducts collegial monitoring and evaluation, including of its committees. However, the evaluation process has not yet involved independent external consultants.
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflict of Interest		
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors with concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, prior to accepting a new appointment as Director or Commissioner of a public company, other Director positions or other positions with a significant time commitment.	*Apply*	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan. All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions.
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioners or affiliates of the Commissioners concerned.	*Apply*	Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani pernyataan bebas Benturan Kepentingan setiap tahun. Both the Board of Commissioners and the Board of Directors sign annual conflict of interest declarations.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Competency Development for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the required skills and knowledge to carry out their roles on the Board.	*Apply*	Perusahaan menyediakan program induksi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat, serta memfasilitasi pelatihan dan pengembangan tahunan, termasuk pelatihan keberlanjutan. The Company provides an induction program for newly appointed members of the Board of Commissioners and facilitates annual training and development programs, including sustainability-related training.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2. Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners			
2.1	**Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	*Explain*	Penentuan kandidat calon Direktur dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, tidak semata-mata berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris, manajemen, atau pemegang saham mayoritas. Namun, belum terdapat keterlibatan dari pihak independen dalam proses pencarian calon Direksi. Candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners are selected through the Nomination and Remuneration Committee, and not solely based on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. However, independent parties have not yet been involved in the candidate search process.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	*Explain*	Penentuan kriteria seleksi anggota Direksi belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberagaman. Komposisi Direksi saat ini belum mencerminkan keberagaman dari sisi gender. Selection criteria for Board of Directors do not yet fully consider diversity aspects, and current Board composition does not reflect gender diversity.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Explain*	Informasi keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan belum memuat target komposisi yang terukur maupun rujukan terkait upaya pencapaian keberagaman melalui perencanaan suksesi yang tepat. The information on the diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Annual Report does not include measurable composition targets or references related to efforts to achieve diversity through proper succession planning.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in order to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	*Explain*	Dewan Komisaris juga belum memanfaatkan sumber independen dalam menentukan kandidat yang memenuhi syarat sebagai calon Komisaris. The Board of Commissioners has not utilized independent sources to identify qualified candidates for the Board of Commissioners.
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.	*Explain*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi belum menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang mengacu pada matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui. The Board of Commissioners or Committee performing the nomination function has not established nomination procedures and criteria that refer to the approved Board of Commissioners competency matrix.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	*Apply*	Komposisi Dewan Komisaris secara kolegial telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender, yang mendukung pemenuhan peran Dewan Komisaris secara efektif. The Board of Commissioners, collectively, reflects diversity in terms of skills, expertise, experience, age, cultural background, and gender, supporting the effectiveness of its oversight role.
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potentials for conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and there is disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	*Explain*	Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen. The Company does not currently have an Independent Commissioner.
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective function of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the selection and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjunjung prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan sesuai Piagam Komite. Namun, tanggung jawabnya belum mencakup aspek penting seperti spesifikasi penunjukan, pengelolaan komitmen waktu, perencanaan suksesi, dan penunjukan konsultan independen. While the Nomination and Remuneration Committee upholds independence in addressing conflicts of interest, its responsibilities do not yet cover areas such as specification of appointments, time commitment management, succession planning, or the appointment of independent consultants.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioner		
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors and the economic situation as well as corporate performance.	*Explain*	Kebijakan remunerasi Direksi berfokus pada pengembangan Perusahaan yang berkelanjutan, namun belum sepenuhnya mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Perusahaan juga belum memiliki kebijakan remunerasi berbasis kinerja yang selaras dengan kepentingan jangka panjang, seperti mekanisme bonus yang ditangguhkan atau kebijakan *clawback*. The Board of Directors' remuneration policy is oriented toward sustainable corporate growth but does not yet fully encourage long-term goal achievement. The Company has not implemented a performance-based remuneration policy aligned with long-term interests, such as deferred bonuses or clawback mechanisms.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as corporate performance. In addition, consideration should also be given to his/her position as President Commissioner and chairman as well as membership in committees.	*Explain*	Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan, namun belum berbasis pada kinerja jangka panjang. The Board of Commissioners' remuneration policy also supports sustainable corporate development but lacks long-term performance-based elements.
	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications, and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the performance of corporate operations, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Explain*	Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga berbagai fungsi penting belum dijalankan, termasuk penentuan proporsi remunerasi yang seimbang, evaluasi kelayakan bonus dan insentif jangka panjang, serta pertimbangan kompensasi jika terjadi pemberhentian dini. The absence of a formal Nomination and Remuneration Committee has limited the execution of key functions, including setting a balanced remuneration structure, assessing bonus and long-term incentive eligibility, and handling compensation in early termination cases.
Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3. Working Relationship Between the Board of Directors and Board of Commissioners			
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Sifat Hubungan Kerja		
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to ensure that confidential information does not leak.	*Apply*	Telah terdapat diskusi terbuka antara Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk antar anggotanya, dengan tetap menjaga kerahasiaan untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Open discussions have taken place between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including among their respective members, while maintaining confidentiality to prevent the disclosure of sensitive information.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate missions, visions and strategies, and regularly discusses the implementation.	*Apply*	Direksi telah bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan visi, misi, dan strategi korporasi serta secara rutin membahas implementasinya sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. The Board of Directors has collaborated with the Board of Commissioners in formulating the Company's vision, mission, and corporate strategy, and regularly discusses the implementation in line with their respective duties.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan telah berperan dalam mendukung hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris serta mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik, termasuk komunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengangkatan Sekretaris Korporasi dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris. The Corporate Secretary has facilitated effective working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners and supported the implementation of good governance practices, including communication with shareholders and stakeholders. The Corporate Secretary is appointed with the approval of the Board of Commissioners.
3.2	Akses Informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners		
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request additional information to the Board of Directors.	*Apply*	Direksi telah memastikan Dewan Komisaris memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu secara rutin dan menyeluruh. Dewan Komisaris juga dapat meminta informasi tambahan kapan pun diperlukan. The Board of Directors ensures that the Board of Commissioners regularly receives accurate, relevant, and timely information, and the Board of Commissioners may request additional information whenever necessary.
3.3	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi. Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the Impact of Ownership Structure on the Corporation.		
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders, which may have an impact on corporate management and operations.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan tanggung jawabnya dengan memperhatikan struktur kepemilikan saham serta hubungan antar-pemegang saham yang dapat memengaruhi pengelolaan dan operasional korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners have taken into account their responsibilities by considering the Company's ownership structure and relationships among shareholders that could impact corporate governance and operations.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Principle 4. Ethical and Responsible Conduct			
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** Code of Ethics and Conduct		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi. c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya. e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi. f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi. g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, grati□kasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act in the best interests of the corporation; b. Act honestly and with a high standard of integrity; c. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence; d. Comply with laws and regulations that apply to the corporation and its operations; e. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; f. Not involved or participating in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or which will have a negative impact on the reputation of the corporation; g. Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporation and its customers;	*Apply*	Perusahaan telah memiliki Pedoman Etika dan Perilaku yang disahkan oleh Direktur Utama dan telah diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The Company has a Code of Conduct approved by the President Director and disclosed in the Annual Report.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
	h. Does not take advantage of the position or opportunities generated by the position for personal gain; i. Avoiding the act of asking for or receiving from third party payments, gratuities, or other benefits for themselves or for other people that will lead to conflicts of interest/ provide benefits to third parties by violating the laws and regulations; j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees; k. Ensuring full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to the national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	*Explain*	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti suap, antikorupsi, dan antifraud dengan mengacu pada standar nasional maupun internasional, termasuk kebijakan terkait keterlibatan politik. Namun, Perusahaan belum memiliki kebijakan dan praktik khusus terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. The Board of Directors has implemented anti-bribery, anti-corruption, and anti-fraud policies aligned with national and international standards, including policies on political involvement. However, specific policies addressing anti-money laundering and counter-terrorism financing have not yet been adopted.
4.2	**Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi** Organizational Values and Culture		
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, fosters, and discloses corporate culture and value.	*Apply*	Perusahaan telah menetapkan, menumbuhkan, dan mengungkapkan budaya serta nilai-nilai korporasi. Seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan telah dipastikan memahami dan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan pedoman etika dan perilaku yang berlaku. The Company has defined, promoted, and disclosed its corporate values and culture. The Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees are expected to understand and adhere to the Code of Ethics and Conduct.
4.3	**Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** Enforcement and Communication of the Code of Ethics, Values, and Culture		
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations, including risk management system and remuneration structure, as well as being enforced.	*Apply*	Pedoman Etika dan perilaku telah disosialisasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan, serta diintegrasikan dalam strategi, operasi, manajemen risiko, dan struktur remunerasi korporasi, dan telah ditegakkan secara konsisten. The Code of Ethics and Conduct has been communicated to all Directors, Commissioners, and Employees. It is integrated into the Company's strategy, operations, risk management, and remuneration structure and is consistently enforced.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5. Risk Management, Internal Control, and Compliance			
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance		
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the annual report of the Corporation.	*Apply*	Direksi secara berkala mereviu desain dan efektivitas sistem tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan, serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan. The Board of Directors periodically reviews the design and effectiveness of governance systems, risk management, internal controls, and compliance, and reports the findings to shareholders via the Annual Report.
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management		
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are intertwined, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	*Apply*	Strategi dan risiko dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait, diungkapkan secara transparan, dan menjadi bagian dari tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta dibahas dalam rapat gabungan. The Company treats strategy and risk as interconnected. These are disclosed transparently and considered the joint responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners, and are discussed in joint meetings.
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for oversight of corporate risk management.	*Explain*	Perusahaan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mendukung pengawasan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris. Namun, mayoritas anggota komite tersebut belum berasal dari pihak independen. A Risk Management and Compliance Committee has been established to support risk oversight by the Board of Commissioners. However, the majority of committee members are not independent.
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	*Apply*	Direksi telah membangun sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi untuk menangani ketidakpastian secara terpadu dan berintegritas tinggi, guna memastikan pencapaian tujuan Perusahaan. The Board of Directors has developed an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system to address uncertainty in a unified and high-integrity manner to support corporate objectives.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa unit yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak merangkap tugas lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors has ensured that the unit performing compliance functions does not perform other duties that could potentially cause conflicts of interest.
5.4	**Audit Internal** Internal Audit		

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi Audit Internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee oversees and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its goals through an objective and disciplined approach in order to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	*Explain*	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memastikan fungsi Audit Internal mendukung pencapaian tujuan Perusahaan melalui evaluasi yang objektif dan disiplin atas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola. Namun, Perusahaan belum menunjuk konsultan eksternal independen untuk melakukan kaji ulang atas kinerja Audit Internal. Through the Audit Committee, the Board of Commissioners ensures that the internal audit function contributes to corporate objectives by providing disciplined and objective evaluations of risk management, internal control, and governance. However, the Company has not yet engaged an independent external consultant to review internal audit performance.
Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi Principle 6. Disclosure and Transparency			
6.1	**Kebijakan dan Pengungkapan** Disclosure and Transparency		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information as well as corporate secrets.	*Apply*	Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengungkapan serta transparansi yang menjamin keterbukaan informasi material sekaligus menjaga kerahasiaan informasi sensitif, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi. The Company has established disclosure and transparency policies and procedures to ensure material information is available while maintaining confidentiality, as regulated by the Board of Directors' Decree.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and timely relevant material information regarding the corporation must be fulfilled.	*Apply*	Perusahaan telah mengatur hak pemegang saham untuk memperoleh informasi material yang relevan secara rutin dan tepat waktu, yang dipenuhi melalui kewajiban pengungkapan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual. The rights of shareholders to access relevant material information are protected through disclosure obligations stipulated in the Articles of Association and Board Manual.
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial Statements and Sustainability Reporting		
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.	*Apply*	Perusahaan telah memastikan akurasi dan kelengkapan laporan keuangan interim melalui pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta peran aktif fungsi manajemen risiko, kepatuhan, Audit Internal, dan Komite Audit dalam menjamin integritas informasi yang disampaikan kepada investor. The Company has ensured the accuracy and completeness of its interim financial statements through internal control over financial reporting and the active role of risk management, compliance, internal audit, and the Audit Committee in ensuring the integrity of information provided to investors.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audits on financial report carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	*Explain*	Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Namun, belum dilakukan dialog langsung antara Komite Audit dan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen. The Audit Committee has ensured the quality of financial audits by external auditors. However, direct dialogue between the Audit Committee and external auditors without management presence has not yet occurred.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Explain*	Laporan keberlanjutan telah disusun dan diungkapkan secara akurat sesuai dengan GRI Standards, POJK 51/2017, dan SEOJK 16/2021. Namun, laporan tersebut belum mendapatkan asuransi dari pihak eksternal yang independen dan kompeten. The Sustainability Report has been prepared in accordance with GRI Standards, POJK 51/2017, and SEOJK 16/2021. However, it has not yet undergone independent external assurance.
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation issues an integrated annual report that places historical performance into context and describes the risks, opportunities, and prospects of the corporation in the future, which will subsequently assist shareholders and stakeholders to understand the strategic goals of the corporation and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Tahunan yang menyajikan kinerja historis, analisis risiko dan peluang, serta proyeksi ke depan, termasuk perbandingan target dan realisasi kinerja keuangan tiga tahun terakhir. The Company has published an Annual Report containing historical performance, risk and opportunity analysis, and forward-looking projections, including comparisons of financial targets and realizations over the past three years.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.	*Explain*	Perusahaan telah menyediakan saluran informasi yang setara, tepat waktu, dan terjangkau melalui situs web dan media sosial. Namun Perusahaan belum menyelenggarakan pertemuan rutin dengan analis keuangan. The Company provides timely, accessible information through its website and social media. However, regular meetings with financial analysts have not yet been held.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that an annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including an explanation on the implementation of each Recommendation and Guideline is available on the website for a minimum period of five years.	*Explain*	Perusahaan belum melakukan penilaian penerapan PUGKI untuk tahun buku 2023. The Company has not conducted a PUG-KI implementation assessment for fiscal year 2023.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	*Explain*	Perusahaan bukan merupakan Perusahaan Terbuka atau tidak terdaftar (listed) di bursa manapun, sehingga tidak memiliki kewajiban terkait cross listing atau pengungkapan peraturan governansi korporat lintas yurisdiksi. (N/A) The Company is not a public company or listed on any stock exchange, and therefore has no obligations regarding cross listing or disclosure of cross-jurisdictional corporate governance regulations. (N/A)

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 7. Pengungkapan dan Transparansi Principle 7. Protection of Shareholders' Rights			
7.1	**Hak Pemegang Saham** Shareholders' Rights		
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Explain*	Perusahaan belum memiliki kebijakan komunikasi formal dengan pemegang saham atau investor. The Company does not yet have a formal communication policy with shareholders or investors.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which their investment is significant.	*Apply*	Perusahaan telah memastikan penerapan kebijakan governansi korporat yang konsisten di seluruh entitas anak melalui kerangka kerja dan kebijakan tertulis. Seluruh entitas anak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. The Company ensures consistent corporate governance practices across its subsidiaries through written frameworks and policies. All subsidiaries are established as Limited Liability Companies.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions, such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure the transactions occur in a transparent manner and under reasonable conditions as well as protecting the rights of all shareholders according to class.	*Explain*	Perusahaan belum mengungkapkan aturan dan prosedur terkait akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa, sehingga investor belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka termasuk hak atas kompensasi. The Company has not yet disclosed procedures and regulations regarding acquisitions, takeovers, or extraordinary transactions. As a result, investors may lack full understanding of their rights, including compensation rights.
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Equitable Treatment of Shareholders		
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure a. all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally; b. disclosure of said rules and procedures, as well as disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their shareholdings.	*Explain*	Perusahaan belum tercatat di bursa sehingga belum ada ketentuan informasi hak saham sebelum pembelian termasuk mekanisme ganti rugi efektif bagi pemegang saham atas pelanggaran hak sesuai aturan berlaku. The company is not listed on the stock exchange, so there are no provisions regarding shareholder rights prior to purchase, including effective compensation mechanisms for shareholders for violations of their rights in accordance with applicable regulations.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the corporation and shareholders.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait transaksi dengan pihak berelasi. Namun, Perusahaan belum memiliki kebijakan larangan transaksi yang merugikan pemegang saham dan belum mengungkapkan hasil kajian Komite Audit serta persetujuan Dewan Komisaris atas transaksi pihak berelasi dalam Laporan Tahunan. While the Company has policies and procedures for related-party transactions, it lacks specific prohibitions against harmful transactions to shareholders and does not yet disclose the Audit Committee's assessment or Board of Commissioners' approval of such transactions in the Annual Report.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has established and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	*Explain*	Perusahaan memiliki kebijakan dan aturan untuk mencegah terjadinya insider trading. Namun, karena Perusahaan saat ini tidak melakukan perdagangan saham, kebijakan khusus insider trading belum diterapkan (*Not Applicable*). There are internal policies to prevent insider trading. However, since the Company is not publicly traded, specific insider trading regulations are currently not applicable (N/A).
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation implement the notice for GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means, such as through the corporate website.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan pemanggilan RUPS tepat waktu dengan agenda dan materi lengkap, serta menyampaikan informasi relevan untuk pengambilan keputusan. The Company issues timely GMS invitations with full agendas and supporting materials and ensures relevant information is available for decision-making.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholders to participate and vote effectively at the GMS.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS yang diatur secara umum dalam Anggaran Dasar. The Company has rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at GMS, which are generally stipulated in the Articles of Association.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively to determine the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Explain*	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, pemungutan suara tidak dilakukan langsung untuk tiap kandidat, melainkan penetapan dilakukan oleh pemegang saham melalui Keputusan RUPS secara sirkuler. Shareholders participate in appointing the Board of Directors and Commissioners. However, voting is not conducted per individual candidate but through circular GMS resolutions.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	*Explain*	Undangan RUPS Tahunan belum mencantumkan penjelasan mengenai calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali. The GMS invitation does not yet include background information on nominated or reappointed external auditors.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	*Explain*	Perusahaan belum menyediakan dokumen lengkap RUPS, termasuk laporan tahunan, hasil pemungutan suara, dan agenda rapat secara terbuka dalam situs website Perusahaan. The Company does not yet provide full GMS documentation—such as the Annual Report, voting results, and meeting agenda—publicly on its website.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 8. Penghargaan Terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8. Appreciation for Stakeholders			
8.1	**Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*)** Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement)		
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders as well as involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan telah menjalankan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan utama. Perusahaan mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan kunci, menyediakan saluran seperti whistleblowing system untuk menyampaikan masukan dan keluhan, serta mengungkapkan pendekatan dan frekuensi penanganan keterlibatan mereka. The Corporate Secretary maintains effective communication with key stakeholders. The Company identifies and engages key stakeholders, provides channels like the whistleblowing system for feedback and complaints, and discloses its engagement approach and frequency.
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** Integration of Sustainability into the Business Model		
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including in terms of establishing corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including by developing and implementing corporate strategies, business plans, main action plans, and risk management.	*Apply*	Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan targetnya. Direksi memastikan komunikasi kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan dan didukung oleh Sub Bidang Komunikasi dan TJSL yang mengelola komunikasi, program CSR, serta event perusahaan guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan keberlanjutan Perusahaan. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for sustainability governance, including defining strategy, priorities, and targets. The Board of Directors ensures that sustainability performance is communicated to stakeholders and is supported by the Communications and CSR subunit in managing programs and events aligned with the Company's vision, mission, and sustainability goals.
8.3	**Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan** Protection of Stakeholders		
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	*Apply*	Direksi telah memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan etis, bertanggung jawab sosial dan lingkungan, transparan, serta menghormati hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that all business activities are ethical, socially and environmentally responsible, transparent, and respectful of stakeholder rights.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	*Explain*	Direksi senantiasa mendorong karyawan untuk fokus pada kepentingan jangka panjang Perusahaan serta memastikan remunerasi berbasis kinerja dengan memperhatikan unsur risiko. Namun belum terdapat kebijakan insentif jangka panjang (LTI). The Board encourages employees to prioritize the Company's long-term interests and ensures performance-based remuneration that considers risk. However, a formal long-term incentive (LTI) policy is not yet in place.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Nilai berkelanjutan PLN Nusa Daya dibangun melalui penerapan yang konsisten atas empat aspirasi utama, yaitu *Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere,* dan *Establishing High Trust.* Aspirasi tersebut diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara seluruh Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan, sehingga membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sinergi kolektif ini menjadi penggerak utama dalam menciptakan *value creation,* tidak hanya untuk memperkuat kinerja dan daya saing Perusahaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan, seluruh pemangku kepentingan dan generasi mendatang.

The sustainable value of PLN Nusa Daya is built upon the consistent implementation of four key aspirations: Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, and Establishing High Trust. These aspirations are brought to life through close collaboration among all Company personnel and stakeholders, creating a strong foundation for sustainable growth. This collective synergy drives value creation, strengthening the Company's performance and competitiveness while delivering broader benefits to the environment, stakeholders, and future generations.



Strategi Keberlanjutan

Sustainability Strategy

PLN Nusa Daya mengemban amanah dalam mendukung layanan PT PLN (Persero) melalui penyediaan jasa pengelolaan dan pemeliharaan aset ketenagalistrikan *(Power Asset Management)* yang andal di seluruh wilayah koridor Tengah dan Timur Indonesia, mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sebagai pemegang mandat penuh untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan dari hulu ke hilir, Perusahaan mengintegrasikan tiga pilar layanan utama yang meliputi Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Pembangkit guna menjamin ketersediaan pasokan daya, Pelayanan Teknik (Yantek) pada sektor transmisi dan distribusi untuk penanganan gangguan yang cepat, serta *Billing Management* (Billman) untuk pengelolaan administrasi dan penagihan pelanggan secara akurat. Dalam mengesekusi seluruh operasionalnya, PLN Nusa Daya berkomitmen penuh menghadirkan layanan yang andal, efisien, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

PLN Nusa Daya has been entrusted with supporting PT PLN (Persero)'s services by delivering reliable power asset management services throughout the Central and Eastern corridors of Indonesia, covering Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua. In fulfilling its mandate to maintain the reliability of the electricity system from upstream to downstream, the Company integrates three principal service pillars: Power Plant Operations and Maintenance (O&M) to ensure the availability of power supply; Technical Services (Yantek) in transmission and distribution to provide rapid fault handling; and Billing Management (Billman) to manage customer administration and billing accurately. In carrying out all operational activities, PLN Nusa Daya remains fully committed to delivering reliable, efficient, and sustainable services by integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

Tujuan Strategis Perusahaan

Untuk mengawal pertumbuhan jangka panjang, PLN Nusa Daya menetapkan visi besar untuk menjadi perusahaan pengelola aset ketenagalistrikan terkemuka di wilayah Tengah dan Timur Indonesia yang tumbuh berkelanjutan. Sebagai arah implementasi dari visi tersebut, Perusahaan merumuskan empat tujuan strategis utama yang dikenal sebagai prinsip 4E untuk memperkuat daya saing di industry, yaitu *Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere,* dan *Establishing High Trust*.

Efficient Process berfokus pada penyediaan layanan kelistrikan yang optimal dari segi biaya dan risiko, mendukung unit PLN dalam menghasilkan energi listrik berbiaya rendah, serta merangsang pertumbuhan melalui layanan bisnis "*beyond kWh*". *Excellent Performance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja aset fisik yang dikelola oleh PLN Nusa Daya dalam hal keandalan, ketersediaan, dan kemampuan pemeliharaan hingga mencapai praktik terbaik dan memenuhi *Service Level Agreement* 100%. *Elegant Atmosphere* Kerja menekankan penciptaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dalam instalasi kelistrikan PLN Nusa Daya, dengan tujuan melampaui standar peraturan K3L yang ada atau "*beyond compliance*". *Establishing High Trust*, berupaya meningkatkan keterikatan hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja guna mendukung pencapaian sasaran strategis PLN Nusa Daya, melalui kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kesiapan organisasi dalam aspek penyelarasan (*alignment*), kepemimpinan (*leadership*), budaya (*culture*), dan kerja tim (*team work*).

The Company's Strategic Objectives

In steering long-term growth, PLN Nusa Daya has defined its overarching vision to become a leading power asset management company in Central and Eastern Indonesia that grows sustainably. To implement this vision, the Company has established four principal strategic objectives under the 4E principles, namely Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, and Establishing High Trust.

Efficient Process focuses on delivering electricity services that are optimal in terms of cost and risk, supporting PLN units in producing low-cost electricity, and driving growth through "beyond kWh" business services. Excellent Performance aims to improve the performance of physical assets managed by PLN Nusa Daya in terms of reliability, availability, and maintainability, with the objective of achieving best practices and meeting the Service Level Agreement of 100%. Elegant Work Atmosphere emphasises the creation of a safe, comfortable, and environmentally conscious working environment within PLN Nusa Daya's electricity installations, with the aim of exceeding applicable OHS and environmental regulatory standards, or going "beyond compliance". Establishing High Trust seeks to strengthen engagement between the Company and its workforce to support the achievement of PLN Nusa Daya's strategic targets, through readiness in human capital capacity and capability, as well as organisational readiness in alignment, leadership, culture, and teamwork.

Strategic Goals PLN Nusa Daya

PLN Nusa Daya's Strategic Goals

VISI
Vision

Menjadi Perusahaan Pengelola Aset Ketenagalistrikan Terkemuka di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia dan tumbuh berkelanjutan

To be a Leading Electricity Asset Management Company in Central and Eastern Indonesia and Achieve Sustainable Growth

Strategic Goals	2024–2026 Jump to 2nd Curve	2027–2028 Accelerating Sustainable Growth
Efficient Process **2.5x increase** in Total Revenue **8x increase** in Beyond PLN Revenue **90%** Operating Ratio	• Inovasi Pengembangan Layanan dan Bisnis Model Baru: AMC KIT, AMC Transmisi & GI, Hyrbidisasi. • Diversifikasi Bisnis: LQ Premium, IPP EBT • *Accounting, Tax, Treasury & Budget Excellence* • Innovation in service and new business model development: AMC KIT, AMC Transmission & Substation, and Hybridization • Business diversification: LQ Premium and NRE IPP • Accounting, Tax, Treasury, & Budget Excellence	• Peningkatan Penetrasi Pasar • Optimalisasi Project Beyond PLN dan Beyond Indonesia • Pengembangan Bisnis IPP EBT • Increased market penetration • Optimization of Beyond PLN and Beyond Indonesia projects • NRE IPP business development
Excellent Performance **100%** SLA **91%** EAF **19** min/customer RPT **30** min/customer RCT	• Elevate Customer Satisfaction: CRM Optimisation & Customer Gathering • Optimisasi Manajemen Stakeholder • War room Operational Excellence • Generation, Transmission, Distribution, & Retail Excellence • Elevating customer satisfaction through CRM optimization and customer gathering • Stakeholder management optimization • Operational Excellence War Room for Generation, Transmission, Distribution, and Retail Excellence	• TJSL berbasis ISO 26000 • Keberlanjutan Inisiatif SLA 100% • Transformasi administrasi project • Strategic Partnership dengan Pabrikan • ISO 26000-based Social and Environmental Responsibility Program • Continuation of the 100% SLA initiative • Project administration transformation • Strategic partnerships with manufacturers
Elegance Atmosphere **Maturity K3 Level 5** OHS Maturity Level 5 **Maturity Lingkungan Level 4,5** Environmental Maturity Level 4.5	• Transformasi Tata Kelola K3 menuju Zero Fatality • Peningkatan Performa Pengelolaan Lingkungan • OHS governance transformation toward Zero Fatality • Improvement of environmental management performance	• Budaya Safety terinternalisasi dan didukung dengan digitalisasi • Sistem Monitoring Lingkungan berbasis digital • Pengelolaan Lingkungan AMC Pembangkit berbasis PROPER • Internalization of safety culture supported by digitalization • Digital-based environmental monitoring system • PROPER-based environmental management for AMC power plants
Establishing High Trust **World-Class Baldrige Risk Management Level: Optimizing**	• Implementasi Bisnis Ekselen secara berkelanjutan • Optimasi Risk Management • Optimalisasi Program Kepatuhan Terintegrasi • Peningkatan Tata Kelola ESG • Pengembangan Organisasi • Transformasi Digital dan Peningkatan Keamanan Siber • Sustainable implementation of Business Excellence • Risk Management optimization • Optimization of integrated compliance programs • Enhancement of ESG governance • Organizational development • Digital transformation and cybersecurity enhancement	• Bisnis Ekselen dengan level World Class • Risk Management dengan level Optimizing dengan dukungan Sistem Informasi terintegrasi • Peningkatan Kapabilitas SDM berkelanjutan yang mendukung strategi perusahaan • Perkuatan Tata Kelola Teknologi Informasi • Implementasi Management Information System menuju SSoT • Business Excellence at World-Class level • Risk Management at Optimizing level supported by an integrated information system • Sustainable enhancement of human capital capabilities to support the Company's strategy • Strengthening of Information Technology governance

Demi mengakselerasi pertumbuhan dan meningkatkan performa, PLN Nusa Daya memperkuat model bisnis melalui *Asset Management Contract* (AMC) yang berfokus pada ekstensifikasi serta intensifikasi usaha guna memperluas pangsa pasar dan efisiensi operasional. Untuk memastikan eksekusi strategi yang optimal, perusahaan mereformasi struktur organisasi dengan memberikan prioritas pada penguatan fungsi manajemen aset pembangkit, perencanaan strategis, pengembangan bisnis, serta kapasitas komersial.

Seluruh aspirasi ini kemudian diintegrasikan ke dalam 122 program strategis yang menjadi acuan pencapaian visi jangka panjang perusahaan. Hingga pertengahan 2026, progres implementasi menunjukkan hasil positif dengan 60% program telah selesai, 21% sedang berjalan, dan 19% sisanya dalam tahap persiapan. Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja utama perusahaan diproyeksikan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2025.

Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals

Perusahaan menyelaraskan setiap strategi bisnis dengan komitmen global dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peningkatan keunggulan operasional yang berbasis pada digitalisasi, standardisasi proses, serta kelayakan ekonomi berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan efisiensi industri, serta menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal bagi pembangunan nasional. Melalui komitmen tanggung jawab lingkungan dan sosial, Perusahaan memastikan setiap langkah operasionalnya berjalan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih guna menekan dampak perubahan iklim, sekaligus aktif memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kesenjangan sosial di masyarakat sekitar. Terakhir, melalui penguatan kapabilitas sumber daya manusia dan penegakkan tata kelola yang patuh regulasi, Perusahaan tidak hanya membangun kapasitas talenta yang unggul dan adaptif, tetapi juga mewujudkan kelembagaan korporasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi pertumbuhan jangka panjang.

To accelerate growth and enhance performance, PLN Nusa Daya has reinforced its business model through an Asset Management Contract (AMC), with a focus on business extensification and intensification to expand market share and improve operational efficiency. To ensure effective strategy execution, the Company has refined its organisational structure by strengthening the functions of power plant asset management, strategic planning, business development, and commercial capacity.

The Company has integrated these aspirations into 122 strategic programmes that provide the framework for achieving its long-term vision. As of mid-2026, implementation progress indicated positive outcomes, with 60% of programmes completed, 21% underway, and the remaining 19% in the preparation stage. Overall, the Company's key performance indicators are projected to surpass the targets set in the 2025 Long-Term Plan.

Supporting the Achievement of the Sustainable Development Goals

The Company aligns all business strategies with its global commitment to supporting the Sustainable Development Goals. Strengthening operational excellence through digitalisation, process standardisation, and economic viability contributes directly to inclusive economic growth, industrial efficiency, and the provision of reliable electricity infrastructure for national development. Through its environmental and social responsibility commitments, the Company ensures that its operational activities are conducted in an environmentally friendly manner by optimising clean energy utilisation to reduce climate change impacts, while creating added value for community welfare and the reduction of social inequality. In addition, by enhancing human capital capabilities and upholding regulatory-compliant governance, the Company develops excellent and adaptive talent while building a transparent, accountable, and high-integrity corporate institution for long-term growth.



Ekonomi: Mengoptimalkan Kinerja dan Dampak Ekonomi

Economic: Optimising Economic Performance and Impact



Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan dengan menghasilkan nilai ekonomi langsung sebesar Rp4,32 triliun (naik 33,18%) dan mendistribusikan Rp3,36 triliun kepada pemangku kepentingan (naik 39,59%) dibanding tahun lalu. Melalui penyediaan listrik di bawah 100 MW, Perusahaan menjadi penggerak utama ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, guna menyuplai sektor bisnis dan industri serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah. Kontribusi ini diperkuat melalui peran Perusahaan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar via setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada pemerintah setempat. Komitmen pembangunan inklusif ini diwujudkan secara nyata lewat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi infrastruktur, serta pemanfaatan tenaga kerja, pelaku usaha, dan pemasok lokal di seluruh wilayah operasional.

The Company achieved significant financial performance growth by generating direct economic value of Rp4.32 trillion, up 33.18%, and distributing Rp3.36 trillion to stakeholders, up 39.59% from the previous year. Through the supply of electricity below 100 MW, the Company has become an important driver of economic activity in Eastern Indonesia, encompassing Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, by serving business and industrial sectors and creating a multiplier effect for local economies. This contribution is reinforced by the Company's position as the largest contributor to Local Own-Source Revenue (PAD) through Street Lighting Tax (PPJ) payments to local governments. The Company's inclusive development commitment is demonstrated through community economic empowerment programmes, infrastructure optimisation, and the utilisation of local workers, business actors, and suppliers throughout its operational areas.



Lingkungan: Menjaga Keberlanjutan Lingkungan

Environment: Maintaining Environmental Sustainability



Dalam aspek energi dan emisi, Perusahaan mencatatkan konsumsi energi sebesar 2.186,02 gigajoule dengan intensitas 6,51 gigajoule/orang, yang didukung pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan PV *Rooftop* di kantor pusat serta langkah efisiensi lampu dan kendaraan operasional. Upaya ini berhasil menurunkan total emisi GRK Scope 1 dan Scope 2 sebesar 18,35% menjadi 356,24 kg CO_2eq, menekan intensitas emisi Scope 1 dan Scope 2 hingga 36,90% menjadi 1,06 ton CO_2eq/orang, serta mengurangi emisi sebesar 80,06 ton CO_2e tanpa adanya penggunaan zat Bahan Perusak Ozon (BPO).

Pada pengelolaan air dan limbah, Perusahaan mengambil air sebesar 45.945,72 m^3 dengan penggunaan air pada tahun 2025 tercatat sebesar 15.772,25 m^3, serta membuang air limbah sesuai Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Berdasarkan prinsip 3R, Perusahaan menyalurkan 625,72 ton limbah B3 kepada pihak ketiga berizin dan mengelola 16,45 ton limbah non-B3 tanpa adanya insiden tumpahan cair. Selain itu, meski operasional tidak bersinggungan dengan kawasan konservasi, Perusahaan tetap berkontribusi aktif melestarikan alam melalui program konservasi mangrove.

In the areas of energy and emissions, the Company recorded energy consumption of 2,186.02 gigajoules with an intensity of 6.51 gigajoule/person. This was supported by the use of renewable energy through the implementation of Rooftop system at the head office, as well as efficiency initiatives for lighting and operational vehicles. These efforts successfully reduced total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions by 18.35% to 356.24 kg CO_2eq, decreased Scope 1 and Scope 2 emissions intensity by 36.90% to 1.06 tonnes CO_2eq/person, and reduced emissions by 80.06 tonnes CO2e, without the use of ozone-depleting substances (ODS).

With regard to water and waste management, the Company withdrew 45,945.72 m^3 of water, with water consumption in 2025 recorded at 15,772.25 m^3, and discharged of wastewater in accordance with the Liquid Waste Discharge Permit (IPLC). Applying the 3R principles, the Company handed over 625.72 tonnes of hazardous waste (B3) to licensed third parties and managed 16.45 tonnes of non-hazardous waste (non-B3), with no liquid spill incidents. In addition, although its operations do not overlap with conservation areas, the Company actively contributes to environmental conservation through mangrove conservation programmes.



Sosial: Mengoptimalkan Peran Bagi Pembangunan Sosial

Social: Optimising Contribution to Social Development



Perusahaan melaksanakan rekrutmen secara inklusif dengan menerapkan prinsip keberagaman, serta menjamin pemenuhan hak karyawan melalui pemberian upah *entry level* di atas Upah Minimum Provinsi (UMP). Kompetensi dan karir karyawan terus ditingkatkan melalui program pelatihan, penilaian kinerja yang sistematis, serta evaluasi keterikatan pegawai via perangkat terpusat PLN yang berhasil mencatatkan skor tinggi sebesar 85%. Dari sisi tanggung jawab sosial, program TJSL dijalankan berbasis empat pilar yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan Pendidikan, yang dipantau serta dievaluasi secara berkala, lengkap dengan penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat sekitar.

Untuk aspek pelanggan, Perusahaan menjamin layanan yang setara dan mengevaluasi keamanan seluruh produk serta jasanya secara periodik, termasuk pasokan listrik jaringan, *genset mobile*, hingga sistem hibrida. Inovasi layanan kelistrikan yang berkelanjutan juga terus didorong untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, memperkuat ketahanan energi lokal, dan memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah 3T. Berbagai upaya ini berhasil mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan dalam kategori *Excellent* serta didukung oleh penyediaan layanan penanganan pengaduan pelanggan yang responsif.

The Company implements inclusive recruitment by applying diversity principles and safeguards employee rights by providing entry-level wages above the Provincial Minimum Wage (UMP). Employee competencies and career development continue to be strengthened through training programmes, systematic performance assessments, and employee engagement evaluations using PLN's centralised platform, which recorded a high score of 85%. In terms of social responsibility, CSR programmes are implemented based on four pillars - economic, environmental, health, and education - and are periodically monitored and evaluated, supported by complaint channels for surrounding communities.

For customers, the Company ensures equal service delivery and periodically evaluates the safety of all products and services, including grid electricity supply, mobile generators, and hybrid systems. Innovation in sustainable electricity services is also continuously encouraged to increase the electrification ratio, strengthen local energy resilience, and empower the community economy in 3T regions. These efforts have maintained customer satisfaction in the Excellent category, supported by responsive customer complaint handling services.



Tata Kelola: Menghadirkan Governansi Berkelanjutan

Governance: Presenting Sustainable Governance



Dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas, Perusahaan berkomitmen penuh pada implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 di seluruh lini operasional. Komitmen kepatuhan ini dibuktikan secara nyata melalui pencapaian tingkat pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib lapor yang berhasil mencapai 100%. Perusahaan juga secara konsisten meningkatkan kapasitas internal di bidang pengelolaan risiko melalui sertifikasi kompetensi manajemen risiko tingkat profesional, yang mencakup kualifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO), *Qualified Risk Management Professional* (QRMP), *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA), hingga *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

To uphold clean and high-integrity corporate governance, the Company is fully committed to implementing the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016 across all operational lines. This compliance commitment is reflected in the achievement of a 100% reporting rate for mandatory State Officials' Wealth Reports (LHKPN). The Company also continues to enhance its internal risk management capacity through professional-level competency certifications, including Qualified Chief Risk Officer (QCRO), Qualified Risk Management Professional (QRMP), Qualified Risk Management Analyst (QRMA), and Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Governansi Berkelanjutan

Sustainable Governance

Dinamika industri ketenagalistrikan dan dorongan akselerasi transisi energi saat ini, menjadikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak lagi sekadar berorientasi pada kepatuhan regulasi, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Integrasi antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) diwujudkan melalui pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) secara aktif, inklusif, dan transparan guna menyelaraskan ekspektasi bersama. Selaras dengan upaya tersebut, pendekatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) terintegrasi diterapkan secara konsisten melalui manajemen risiko yang prudent guna memitigasi ketidakpastian operasional serta mengantisipasi risiko transisi secara terukur. PLN Nusa Daya terus membangun fondasi bisnis yang resilien dan adaptif terhadap perubahan sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem energi bersih masa depan di Indonesia.

Amid the evolving dynamics of the electricity industry and the accelerated energy transition, the implementation of good corporate governance has progressed beyond regulatory compliance to become a fundamental basis for long-term business sustainability. The integration of Good Corporate Governance (GCG) principles and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects is carried out through active, inclusive, and transparent stakeholder engagement in order to align shared expectations. In support of this approach, the Company consistently applies an integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) framework through prudent risk management to mitigate operational uncertainties and anticipate transition risks in a measurable manner. PLN Nusa Daya continues to establish a resilient and adaptive business foundation, while contributing to the realisation of a future clean energy ecosystem in Indonesia.

Penanggung Jawab Penerapan Aspek Keberlanjutan

Struktur organ tata kelola Perusahaan menempatkan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pemegang mandat utama dalam membangun fondasi bisnis yang resilien. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan Direksi melaksanakan tugasnya secara akuntabel, terutama dalam mencapai target kinerja keberlanjutan. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab penuh dalam merumuskan strategi, menentukan kebijakan, dan mengoordinasikan program keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di setiap unit kerja. Direksi mengintegrasikan pengelolaan dampak operasional ke dalam seluruh proses bisnis Perusahaan, didukung oleh pendelegasian wewenang yang jelas ke tingkat divisi guna mendorong pelibatan pemangku kepentingan secara proaktif. Perkembangan isu material dan kinerja keberlanjutan dievaluasi secara berkala dalam rapat Direksi sebelum dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Sebagai wujud akuntabilitas, Direksi terlibat langsung dalam meninjau dan menyetujui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap keberlangsungan usaha jangka panjang.

Responsible Unit for the Implementation of Sustainability Aspects

The Company's governance structure assigns the Board of Commissioners and Board of Directors the primary mandate to build a resilient business foundation. The Board of Commissioners consistently carries out its supervisory role to ensure that the Board of Directors performs its duties in an accountable manner, particularly in meeting sustainability performance targets. The Board of Directors, in turn, holds full responsibility for formulating strategies, determining policies, and coordinating sustainability programmes that encompass economic, social, and environmental aspects across all work units. The Board of Directors integrates the management of operational impacts into all business processes of the Company, supported by clear delegation of authority to divisional levels to promote proactive stakeholder engagement. The development of material issues and sustainability performance is evaluated periodically in Board of Directors' meetings before being reported to the Board of Commissioners. As a demonstration of accountability, the Board of Directors is directly involved in reviewing and approving the Sustainability Report as part of management's commitment to long-term business sustainability.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Keberlanjutan

Perusahaan menyadari bahwa kompetensi seluruh insan Perusahaan, baik di tingkat strategis maupun operasional, merupakan penggerak utama dalam membangun fondasi bisnis yang resilien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kapasitas dilakukan secara konsisten, tidak hanya untuk menajamkan kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga diakselerasikan pada penguatan aspek tata kelola berkelanjutan (*sustainable governance*), manajemen risiko transisi energi, dan efisiensi lingkungan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai isu keberlanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), Perusahaan optimis dapat memitigasi ketidakpastian industri sekaligus menjaga keandalan operasional. Komitmen nyata atas peningkatan kapabilitas ini tercermin pada partisipasi aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Sekretaris Perusahaan dalam berbagai program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025, sebagaimana dipaparkan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

Penilaian Risiko Atas Penerapan Aspek Keberlanjutan

Penerapan aspek keberlanjutan di PLN Nusa Daya diperkuat melalui sistem penilaian risiko yang komprehensif guna memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara adaptif dan bertanggung jawab. Penilaian ini berfokus pada mitigasi dampak perubahan iklim, kepatuhan hukum lingkungan, isu sosial, serta keandalan pasokan energi. Mengingat peran strategis Perusahaan dalam mengelola jasa operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan di wilayah regional Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, pemetaan risiko berbasis keberlanjutan menjadi sebuah keharusan. Kerangka manajemen risiko yang *prudent* diterapkan untuk mengantisipasi kerentanan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta risiko sosial-kebencanaan di wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, Perusahaan mampu mempertahankan kontinuitas layanan, melindungi aset operasional, sekaligus mengoptimalkan pelibatan pemangku kepentingan di setiap daerah. Uraian lebih lengkap mengenai pengendalian risiko telah dipaparkan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis. Karakteristik wilayah kerja yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua membawa tantangan geografis dan dinamika sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan strategi pelibatan pemangku kepentingan secara proaktif melalui komunikasi yang transparan, dialog

Competency Development Related to Sustainability Aspects

The Company recognises that the competencies of all Company personnel, both at strategic and operational levels, are key drivers in building a resilient and sustainable business foundation. Accordingly, the Company consistently invests in capacity development, not only to strengthen technical and managerial capabilities, but also to accelerate the enhancement of sustainable governance, energy transition risk management, and environmental efficiency. With a comprehensive understanding of sustainability issues and stakeholder engagement, the Company is confident in its ability to mitigate industry uncertainties while maintaining operational reliability. This commitment to capability enhancement is demonstrated by the active participation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Corporate Secretary in various competency development programmes throughout 2025, as presented in the Corporate Governance Chapter.

Risk Assessment for the Implementation of Sustainability Aspects

The implementation of sustainability aspects at PLN Nusa Daya is reinforced by a comprehensive risk assessment system to ensure that all business processes operate in an adaptive and responsible manner. The assessment focuses on mitigating climate change impacts, ensuring compliance with environmental regulations, addressing social issues, and maintaining energy supply reliability. Considering the Company's strategic role in managing electricity operations and maintenance services across Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, sustainability-based risk mapping is critical. The Company applies a prudent risk management framework to anticipate geographical vulnerabilities, infrastructure limitations, and social and disaster risks in these regions. This enables the Company to maintain service continuity, safeguard operational assets, and optimise stakeholder engagement in each region. Further details on risk control are presented in the Corporate Governance Chapter.

Stakeholder Relations

The management of stakeholder relations is a key instrument in maintaining operational stability and business sustainability. The Company's operating areas, which cover Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, present considerable geographical challenges and complex social dynamics. Accordingly, the Company implements a proactive stakeholder engagement strategy through transparent communication, interactive dialogue,

interaktif, dan pemenuhan ekspektasi yang selaras dengan kearifan lokal. Kolaborasi erat yang dibangun bersama seluruh elemen, mulai dari instansi pemerintah, mitra bisnis, hingga komunitas lokal, menjadi pilar pendukung bagi kelancaran seluruh lini bisnis ketenagalistrikan Perusahaan. Langkah ini tidak sekadar berorientasi pada reputasi, melainkan ditujukan untuk memitigasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional sekaligus menumbuhkan dampak ekonomi yang inklusif. Berikut adalah peta pemangku kepentingan strategis beserta bentuk interaksi yang dijalankan oleh Perusahaan:

and the fulfilment of expectations aligned with local wisdom. Close collaboration with all parties, including government institutions, business partners, and local communities, provides an important foundation for the smooth operation of the Company's electricity business lines. This approach is not solely reputation-oriented, but is aimed at mitigating the social and environmental impacts of operational activities while generating inclusive economic benefits. The following presents the Company's strategic stakeholder map and forms of engagement:

Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholder Engagement

Pemangku Kepentingan Stakeholders	**Metode Pelibatan** Engagement Method	**Topik Prioritas** Priority Topics
Pemegang Saham Shareholders	• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Pertemuan lainnya • General Meeting of Shareholders (GMS) • Other meetings	• Keberlanjutan bisnis Perusahaan • Peningkatan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan • Penerapan Governansi Perusahaan yang baik • Company's business sustainability • Improvement of the Company's operational and financial performance • Implementation of good corporate governance
Pelanggan Customers	• Survei kepuasan pelanggan • *Customer Visit* • Customer satisfaction survey • Customer Visit	• Penyediaan layanan barang dan jasa • Provision of goods and services
Karyawan Employees	• Survei Kepuasan Karyawan • Pertemuan dengan Serikat Pekerja • Employee satisfaction survey • Meetings with Trade Unions	• Kepuasan pegawai, perilaku karyawan dan pengelolaan program • SDM yang baik • Pemenuhan perlindungan hak-hak tenaga kerja, dan kesejahteraan karyawan • Employee satisfaction, employee behaviour and program management • Good human resources • Fulfilment of labour rights protection, and employee welfare • employees
Pemasok Suppliers	• Pertemuan dan kerja sama • Sosialisasi dengan pemasok • Survei Kepuasan Pemasok • Meetings and cooperation • Socialization with suppliers • Supplier Satisfaction Survey	• Proses pengadaan barang dan jasa • Hubungan harmonis dan mutualisme • Procurement process • Harmonious and mutual relationship
Pemerintah dan Regulator Government and Regulators	• Pertemuan • Pelaporan kinerja Perusahaan • Pemenuhan kewajiban Pajak • Meetings • Company performance reporting • Fulfilment of tax obligations	• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku • Compliance with applicable laws and regulations
Masyarakat Public	• Pertemuan dan sosialisasi • Kegiatan CSR • Meetings and socialization • CSR activities	• Pemberian nilai kebermanfaatan Perusahaan • Pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat • Providing the value of the Company's benefits • Development and improvement of community quality of life
Media	• *Media Gathering* • *Press Conference* • *Media Visit*	• Keterbukaan informasi Perusahaan • Company Information Disclosure

Permasalahan Terhadap Penerapan Aspek Keberlanjutan

Penerapan bisnis berkelanjutan di PLN Nusa Daya dihadapkan pada tantangan transisi energi yang kompleks, terutama akibat ketergantungan historis operasional pada pembangkit berbasis fosil. Transformasi menuju operasional rendah emisi membutuhkan investasi awal yang signifikan serta adaptasi teknologi hijau, seperti *smart grid* dan infrastruktur EBT yang rantai pasoknya belum merata di seluruh wilayah kerja. Kondisi ini diperumit oleh fluktuasi regulasi pajak karbon dan target *Net Zero Emission*, serta munculnya *green skills gap* yang menuntut peningkatan kompetensi tenaga kerja secara masif. Menghadapi dinamika tersebut, Perusahaan secara responsif mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnis guna memitigasi risiko transisi secara *prudent*. Melalui percepatan *Green Operation*, penguatan budaya K3L (*zero-accident*), program TJSL berdampak, serta penegakan tata kelola yang transparan, Perusahaan berhasil menyeimbangkan beban biaya jangka pendek dengan profitabilitas, sekaligus mengubah tantangan dekarbonisasi menjadi peluang keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Ketebukaan Informasi Terkait Aspek Keberlanjutan

Keterbukaan informasi merupakan instrumen strategis dalam menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pada dimensi keberlanjutan. PLN Nusa Daya berkomitmen penuh untuk menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan, program, serta realisasi capaian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sebagai wujud akuntabilitas, diseminasi informasi keberlanjutan ini diintegrasikan melalui berbagai saluran komunikasi resmi, termasuk laporan keberlanjutan, situs web korporat, forum pemangku kepentingan, hingga publikasi berkala program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam menyusun pelaporan keberlanjutannya, Perusahaan senantiasa menjaga kepatuhan dan keselarasan dengan standar serta regulasi yang berlaku, yang mencakup GRI *Standards*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021, IFRS *Sustainability Disclosure Standards*, serta SASB *Standards*.

Challenges in the Implementation of Sustainability Aspects

The implementation of sustainable business practices at PLN Nusa Daya is confronted with complex energy transition challenges, mainly due to the Company's historical operational reliance on fossil-based power plants. The shift towards low-emission operations requires substantial upfront investment and adaptation to green technologies, such as smart grids and renewable energy infrastructure, whose supply chains are not yet evenly available across the Company's operating areas. These challenges are further intensified by fluctuations in carbon tax regulations and Net Zero Emission targets, as well as the emergence of a green skills gap that demands extensive workforce upskilling. In response, the Company proactively integrates ESG principles into its business strategy to prudently mitigate transition risks. Through the acceleration of Green Operations, strengthening of a zero-accident OHS and environmental culture, impactful CSR programmes, and enforcement of transparent governance, the Company continues to balance short-term cost pressures with profitability, while turning decarbonisation challenges into opportunities for sustainable competitive advantage.

Transparency of Information Related to Sustainability Aspects

Information disclosure is a strategic instrument for upholding the principles of good corporate governance, particularly in the area of sustainability. PLN Nusa Daya is fully committed to providing transparent, accurate, and timely information to all stakeholders concerning policies, programmes, and the realisation of achievements in environmental, social, and governance aspects. As a demonstration of accountability, sustainability information is disseminated through various official communication channels, including sustainability reports, the corporate website, stakeholder forums, and periodic publications on CSR programmes. In preparing its sustainability reporting, the Company consistently ensures compliance and alignment with applicable standards and regulations, including the GRI Standards, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017, OJK Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021, IFRS Sustainability Disclosure Standards, and SASB Standards.

Budaya Keberlanjutan pada Insan Perusahaan

Sustainability Culture Among the Company's Personnel

Transformasi menuju bisnis yang hijau diwujudkan melalui pembangunan budaya keberlanjutan yang kuat di seluruh lini operasional Perusahaan. Internalisasi ini diwujudkan melalui pembentukan pola pikir (*mindset*) yang adaptif terhadap transisi energi, di mana seluruh karyawan didorong untuk mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial ke dalam proses bisnis sehari-hari. Guna menjembatani kesenjangan keahlian baru (*green skills gap*), Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan program peningkatan kapasitas (*up-skilling*) yang berfokus pada tata kelola berkelanjutan, efisiensi energi, dan penguatan budaya K3L demi mewujudkan *zero-accident*. Melalui kesadaran kolektif dari jajaran manajemen hingga personel lapangan, budaya keberlanjutan ini menjadi fondasi utama dalam membangun operasional ketenagalistrikan yang andal, tangguh, dan resilien.

The transformation toward a green business is realized through the development of a strong sustainability culture throughout its operations. This is embedded by developing an adaptive mindset towards the energy transition, where all employees are encouraged to incorporate environmentally friendly principles and social responsibility into everyday business processes. To address the green skills gap, the Company consistently organises upskilling programmes focused on sustainable governance, energy efficiency, and the strengthening of HSSE culture to achieve zero accidents. Through collective awareness across management and field personnel, this sustainability culture forms the foundation for reliable, robust, and resilient electricity operations.



Sebagai motor penggerak transformasi, PLN Nusa Daya mengimplementasikan slogan kerja "AKU JAGO" untuk menginternalisasikan nilai keberlanjutan secara holistik. Slogan ini merepresentasikan identitas budaya, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh insan Perusahaan dalam memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan profesionalitas serta etika bisnis yang tinggi. Setiap elemen dalam "AKU JAGO" dirancang untuk menjawab dinamika industri energi, khususnya dalam mendorong transisi energi bersih dan efisiensi operasional yang andal. Dengan mengintegrasikan slogan ini ke dalam aktivitas kerja sehari-hari, Perusahaan mentransformasikan seluruh personel di lini lapangan maupun manajerial menjadi agen perubahan yang responsif terhadap standar keberlanjutan global, sekaligus memperkokoh semangat kolaborasi antarunit kerja di seluruh wilayah operasional.

As a key driver of transformation, PLN Nusa Daya has implemented the "AKU JAGO" work slogan to holistically internalise sustainability values. This slogan represents the cultural identity, discipline, and sense of responsibility of all Company personnel in delivering optimal services that demonstrate professionalism and high business ethics. Each element of "AKU JAGO" is designed to address energy industry dynamics, particularly in driving the clean energy transition and reliable operational efficiency. By embedding this slogan into daily work activities, the Company enables personnel across field and managerial functions to act as agents of change who are responsive to global sustainability standards, while reinforcing collaboration among work units across all operational regions.

Penerapan budaya keberlanjutan di PLN Nusa Daya juga diimplementasikan melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan strategis, peningkatan kapasitas, serta forum dialog internal yang dirancang untuk memperluas pemahaman insan Perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan. Seluruh upaya internalisasi ini diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai dasar (*core values*) BUMN, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang berfungsi sebagai kompas moral dalam membentuk perilaku kerja sehari-hari yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The sustainability culture at PLN Nusa Daya is further strengthened through strategic training programmes, capacity-building initiatives, and internal dialogue forums designed to deepen Company personnel's understanding of sustainability issues. These internalisation efforts are integrated with the core values of State-Owned Enterprises (BUMN), namely AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif), which serve as a moral compass in shaping daily work behaviour that upholds social and environmental responsibility.

Guna memperkokoh komitmen tersebut, Perusahaan secara konsisten mengadopsi dan menyelaraskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta panduan standar internasional ISO 26000 *Social Responsibility* ke dalam setiap tahapan proses bisnis dan mekanisme pengambilan keputusan strategis. Langkah integratif ini memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional ketenagalistrikan Perusahaan senantiasa dijalankan atas dasar etika bisnis yang kuat, berkeadilan, serta transparan. Melalui pendekatan yang holistik ini, PT PLN Nusa Daya tidak hanya berfokus pada pencapaian target finansial, melainkan juga berkomitmen untuk menciptakan nilai bersama (*creating shared value*), memitigasi risiko dampak lingkungan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan demi mendukung stabilitas sosial-ekonomi daerah secara berkelanjutan.

In strengthening this commitment, the Company consistently adopts and aligns Good Corporate Governance (GCG) principles and the international guidance standard ISO 26000 on Social Responsibility with all stages of its business processes and strategic decision-making mechanisms. This integrated approach ensures that the Company's electricity operations are always conducted on the basis of strong business ethics, fairness, and transparency. Through this holistic approach, PT PLN Nusa Daya is committed not only to achieving financial targets, but also to creating shared value, mitigating environmental impact risks, and strengthening stakeholder trust in support of sustainable regional socio-economic stability.

Kinerja Ekonomi dalam Pilar Keberlanjutan

Economic Performance in the Sustainability Pillar

Sebagai entitas strategis dalam ekosistem ketenagalistrikan nasional, PLN Nusa Daya memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan serta keberlanjutan pasokan listrik di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dalam mengeksekusi layanan operasi dan pemeliharaan untuk sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan, orientasi perusahaan tidak terbatas pada efisiensi operasional semata, melainkan juga pada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Capaian kinerja ekonomi ini didorong oleh penerapan tata kelola yang bertanggung jawab, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta komitmen berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja perusahaan.

PLN Nusa Daya plays a strategic role in the national electricity ecosystem by maintaining reliable and sustainable electricity supply across Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua. In carrying out operation and maintenance services across generation, transmission, distribution, and customer service, the Company is oriented not only towards operational efficiency, but also towards the creation of long-term economic value for all stakeholders. Its economic performance is supported by responsible governance, optimised resource utilisation, and an ongoing commitment to contributing to regional development and improving community welfare in its operational areas.

Pencapaian Target Kinerja Operasional dan Keuangan

Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola korporasi, khususnya pada pilar keberlanjutan ekonomi, PLN Nusa Daya secara berkala melakukan evaluasi serta pengukuran terhadap kinerja keuangan dan operasional. Dalam prosesnya, target-target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi strategis internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian performa secara menyeluruh. Adapun perincian komprehensif mengenai capaian tersebut telah dipaparkan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, khususnya pada sub bab Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 .

Achievement of Operational and Financial Performance Targets

To maintain transparency and accountability in corporate governance, particularly within the economic sustainability pillar, PLN Nusa Daya periodically evaluates and measures its financial and operational performance. In this process, the targets set out in the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) are formulated by taking into account various internal and external strategic assumptions that may affect overall performance achievement. A comprehensive breakdown of these achievements is presented in the Management Discussion and Analysis chapter, particularly in the subsection on Comparison between the Company's 2025 Performance Targets and Realisation.

Investasi pada Proyek Berwawasan Lingkungan

PLN Nusa Daya menempatkan investasi pada proyek-proyek berwawasan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung transisi energi nasional. PLN Nusa Daya berkomitmen mendukung kebijakan energi bersih melalui pengelolaan pembangkit berbasis energi terbarukan, mencakup PLTS dan PLTD Hybrid, serta peningkatan efisiensi sistem operasi.

Pelaksanaan inisiatif tersebut mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0002.P/DIR/2021 tentang Pedoman Layanan Total Solusi Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS) bagi Konsumen PT PLN (Persero), yang menjadi landasan Perusahaan dalam mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya pemanfaatan PLTS Atap. Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, PLN Nusa Daya telah melakukan penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) untuk proyek PLTS *Hybrid* Maratua, lalu terdapat MoU dengan PT Gree dan PT Fajar Saudar Kusuma untuk pengembangan pembangkit biogas di Kalimantan Barat, serta penyusunan KKP Pengembangan Hydrogen *Power Plant.*

Selain itu, PLN Nusa Daya juga telah membangun PV *Rooftop* atau PLTS Atap di Kantor Pusat PLN Nusa Daya Kota sebagai upaya penerapan energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Inisiatif ini mendukung penerapan konsep *Green Building,* memperkuat transformasi PLN melalui pilar *Green*, serta menjadi proyek percontohan pengembangan layanan PLTS Atap di lingkungan PLN Grup.

Alokasi investasi ini tidak hanya ditujukan untuk mengimplementasikan prinsip *Green Building*, melainkan juga diposisikan sebagai fondasi dalam mengembangkan portofolio layanan energi surya yang menyasar instansi pemerintah dan sektor swasta. Melangkah ke depan, PLN Nusa Daya berkomitmen penuh untuk memperkukuh sistem perencanaan serta eksekusi investasi yang sejalan dengan agenda dekarbonisasi global demi menyukseskan target *Net Zero Emissions* pada tahun 2060.

Kemitraan Dengan Pelaku Usaha dan Pemasok Lokal

PLN Nusa Daya terus memperkokoh keterlibatan pelaku usaha domestik sebagai bagian dari rantai pasok strategis korporasi. Pemanfaatan vendor lokal ini dioptimalkan bukan hanya demi efisiensi operasional, melainkan juga sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam menstimulasi kemandirian industri nasional. Sepanjang tahun 2025, keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa telah dialokasikan melalui pemasok lokal dengan akumulasi nilai kontrak mencapai Rp979 miliar. Melalui pendekatan ini, perusahaan memproyeksikan terciptanya

Investment in Environmentally Friendly Projects

PLN Nusa Daya prioritises investment in environmentally focused projects as part of its long-term strategy to support the national energy transition. PLN Nusa Daya is committed to supporting clean energy policies through the management of renewable energy-based power plants, including Solar Power Plants (PLTS) and Hybrid Diesel Power Plants (PLTD Hybrid), as well as enhancing operational system efficiency.

The implementation of these initiatives refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2021 concerning Guidelines for Total Solution Services for Rooftop Solar Power Plant (PLTS) Provision for PT PLN (Persero) Consumers, which serves as the Company's foundation in developing new and renewable energy (EBT) projects, particularly the utilization of Rooftop PLTS. As a concrete implementation of this commitment, PLN Nusa Daya has formulated a Project Feasibility Study (KKP) for the Maratua Hybrid PLTS project, signed an MoU with PT Gree and PT Fajar Saudara Kusuma for biogas power plant development in West Kalimantan, and drafted a KKP for Hydrogen Power Plant Development.

Furthermore, PLN Nusa Daya has installed a PV Rooftop system at the PLN Nusa Daya Kota Head Office as an effort to implement clean energy and reduce carbon emissions. This initiative supports the implementation of the Green Building concept, strengthens PLN's transformation through the Green pillar, and serves as a pilot project for the development of Rooftop PLTS services within the PLN Group.

This investment allocation is not only intended to implement Green Building principles, but also serves as a foundation for developing a solar energy service portfolio targeting government agencies and the private sector. Moving forward, PLN Nusa Daya is fully committed to strengthening its investment planning and execution systems in line with the global decarbonisation agenda to support the achievement of the Net Zero Emissions target by 2060.

Partnerships with Local Businesses and Suppliers

PLN Nusa Daya continues to reinforce the role of domestic businesses within the Company's strategic supply chain. The utilisation of local vendors is optimised not only to enhance operational efficiency, but also to contribute directly to strengthening national industrial self-reliance. Throughout 2025, all goods and services procurement was allocated through local suppliers, with a cumulative contract value reaching Rp979 billion. Through this approach, the Company seeks to generate a sustainable

efek domino ekonomi yang berkelanjutan, mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, eskalasi kapasitas usaha lokal, hingga penguatan ketahanan rantai pasok di seluruh wilayah operasional PLN Nusa Daya.

economic multiplier effect, including new job creation, improved local business capacity, and stronger supply chain resilience across all PLN Nusa Daya operational areas.

Memenuhi Harapan Pelanggan dan Inovasi Berkelanjutan

Meeting Customer Expectations and Sustained Innovation

Sebagai entitas yang memegang peran strategis dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. PLN Nusa Daya memahami bahwa mutu layanan operasi, pemeliharaan, serta pelayanan pelanggan merupakan aspek kunci untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Keselarasan antara peningkatan kepuasan pelanggan dan prinsip keberlanjutan diwujudkan perusahaan melalui peluncuran berbagai program serta inovasi terstruktur. Dalam pelaksanaannya, PLN Nusa Daya secara konsisten memacu performa pelayanan pelanggan melalui optimalisasi sistem respons cepat tanggap gangguan, digitalisasi mekanisme pelaporan, dan peningkatan kapabilitas teknis para personel di lapangan.

As an entity with a strategic role in maintaining the reliability of the national electricity system, particularly in Eastern Indonesia, PLN Nusa Daya recognises that the quality of operations, maintenance, and customer service is essential to meeting the expectations of communities and stakeholders. The Company aligns customer satisfaction improvement with sustainability principles through various structured programmes and innovations. In practice, PLN Nusa Daya consistently improves customer service performance by optimising rapid response systems for disruptions, digitalising reporting mechanisms, and strengthening the technical capabilities of field personnel.

Pelanggan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri, seperti kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan infrastruktur. Untuk itu, PLN Nusa Daya melakukan pemetaan kebutuhan pelanggan secara berkala dan menyesuaikan strategi layanan berbasis wilayah. Melalui survei kepuasan pelanggan dan umpan balik yang diterima dari kanal layanan, Perusahaan mengidentifikasi area perbaikan, potensi inovasi, keamanan produk dan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. PLN Nusa Daya percaya bahwa mendengarkan pelanggan adalah fondasi dari peningkatan berkelanjutan.

Customers across of Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua have distinct needs and regional challenges, particularly due to complex geographical conditions and infrastructure constraints. To ensure responsive and relevant service delivery, PLN Nusa Daya conducts periodic customer needs mapping and adjusts its service strategies based on regional characteristics. Through customer satisfaction surveys and feedback received through service channels, the Company identifies mprovement areas, service innovation opportunities, product and service safety aspects, as well as customer satisfaction with the services delivered. Through this approach, PLN Nusa Daya continues to strengthen its customer-centric culture as a foundation for continuous improvement, service reliability, and sustainable business growth.

Mempertimbangkan kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan infrastruktur, pelanggan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki karakteristik kebutuhan serta tantangan yang spesifik. Guna mengantisipasi hal tersebut, PLN Nusa Daya melakukan pemetaan kebutuhan pelanggan secara berkala dan menerapkan strategi layanan penyesuaian berbasis wilayah (*regional-based service*). Melalui instrumen survei kepuasan pelanggan serta pemanfaatan umpan balik dari berbagai kanal resmi, perusahaan secara aktif mengidentifikasi area perbaikan, potensi inovasi, tingkat keamanan produk, hingga kepuasan pelanggan atas jasa yang disajikan. Langkah ini merefleksikan keyakinan PLN Nusa Daya bahwa aspirasi pelanggan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Considering the challenging geographical conditions and infrastructure limitations in Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, customers in these regions have specific needs and challenges. To address these conditions, PLN Nusa Daya regularly maps customer needs and applies regional-based service strategies. Through customer satisfaction surveys and feedback from official service channels, the Company actively identifies areas for improvement, innovation potential, product safety levels, and customer satisfaction with the services provided. This approach reflects PLN Nusa Daya's belief that customer aspirations are the foundation of continuous quality improvement.

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan Jasa yang Setara kepada Konsumen

Sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pada sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, serta pelayanan pelanggan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, PLN Nusa Daya berkomitmen penuh untuk menyajikan layanan yang setara, adil, dan berkualitas tinggi bagi seluruh konsumen tanpa diskriminasi geografis maupun sosial ekonomi. Di tengah tantangan medan yang kompleks dan keterbatasan infrastruktur, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perusahaan memastikan pemenuhan akses kelistrikan yang andal dan aman bagi masyarakat. Perwujudan prinsip kesetaraan ini diimplementasikan melalui standardisasi pelayanan yang seragam, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta optimalisasi teknologi digital demi menghadirkan jangkauan layanan yang lebih luas dan inklusif.

Inovasi Produk dan Jasa Berkelanjutan

Inovasi memegang peranan krusial dalam memacu efisiensi serta keandalan sistem operasional PLN Nusa Daya. Guna meminimalkan potensi gangguan listrik, perusahaan mendorong pengintegrasian teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), *drone* inspeksi untuk jaringan transmisi dan distribusi, serta sistem pemantauan kondisi peralatan berbasis *Condition Based Maintenance* (CBM). Dalam dimensi keberlanjutan, perusahaan secara konsisten mengembangkan pendekatan pemeliharaan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Komitmen ini dibuktikan melalui implementasi layanan *Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply* (DRUPS) yang memiliki tingkat polusi jauh lebih rendah, serta peluncuran ListriQu, sebuah aplikasi *mobile* yang menyediakan solusi cepat dan bermutu tinggi untuk perbaikan instalasi kelistrikan pelanggan.

Pengembangan Produk dan Jasa

PLN Nusa Daya terus memperkuat lini bisnis operasi dan pemeliharaan (pembangkit, transmisi, distribusi) serta pelayanan pelanggan demi memacu keandalan sistem kelistrikan dan mutu layanan. Strategi pengembangan ini bertumpu pada penerapan teknologi terkini serta integrasi energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, transformasi ke arah model pelayanan pelanggan berbasis digital diterapkan secara intensif untuk mengakselerasi respons penanggulangan gangguan dan meningkatkan transparansi data, sehingga menciptakan efisiensi serta nilai tambah yang berkelanjutan bagi para *stakeholders*.

Commitment to Providing Equitable Products and Services to Consumers

As a provider of operation and maintenance services in power generation, transmission, distribution, and customer service across Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, PLN Nusa Daya is fully committed to delivering equal, fair, and high-quality services to all consumers without geographical or socio-economic discrimination. Amid complex terrain and infrastructure limitations, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions, the Company ensures reliable and safe access to electricity for communities. This commitment to service equality is implemented through consistent service standards, the enhancement of local human capital capabilities, and the optimization of digital technology to expand service coverage in a more inclusive manner.

Sustainable Product and Service Innovation

Innovation plays a critical role in improving the efficiency and reliability of PLN Nusa Daya's operational systems. To minimise potential electricity disruptions, the Company promotes the integration of advanced technologies, including the Internet of Things (IoT), inspection drones for transmission and distribution networks, and Condition-Based Maintenance (CBM)-based equipment monitoring systems. From a sustainability perspective, the Company consistently develops energy-efficient and environmentally friendly maintenance approaches. This commitment is reflected in the implementation of Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply (DRUPS) services, which generate significantly lower pollution levels, as well as the launch of ListriQu, a mobile application that provides fast and high-quality solutions for customer electrical installation repairs.

Product and Service Development

PLN Nusa Daya continues to strengthen its operation and maintenance business lines, covering power generation, transmission, and distribution, as well as customer service, to improve electricity system reliability and service quality. This development strategy is supported by the application of the latest technology and the integration of New and Renewable Energy (EBT). In addition, the transformation towards a digital-based customer service model is being intensively implemented to accelerate disruption response and improve data transparency, thereby creating efficiency and sustainable added value for stakeholders.

Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya secara konsisten mengimplementasikan serangkaian inovasi berkelanjutan demi menjamin mutu layanan kelistrikan yang andal, setara, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Langkah digitalisasi sektor pembangkitan diwujudkan melalui pengoperasian aplikasi Digikit V.2 untuk memantau kondisi unit, beban, konsumsi bahan bakar, serta jadwal pemeliharaan secara *real-time*. Inovasi strategis ini berhasil meningkatkan efisiensi sekaligus memperkokoh posisi perusahaan dalam menyajikan jasa ketenagalistrikan yang hijau dan berkelanjutan.

Throughout 2025, PLN Nusa Daya consistently implemented a series of sustainable innovations to ensure reliable, equitable, and customer satisfaction-oriented electricity services. Digitalisation in the generation sector was realised through the operation of the Digikit V.2 application to monitor unit condition, load, fuel consumption, and maintenance schedules in real time. These strategic innovations improved efficiency while strengthening the Company's position in delivering green and sustainable electricity services.

Produk/Jasa yang Dievaluasi Keamanannya

PLN Nusa Daya secara konsisten memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan memenuhi standar teknis serta ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka menjaga mutu jasa ketenagalistrikan, Perusahaan juga secara berkala memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman, antara lain melalui imbauan penggunaan peralatan berstandar resmi serta penyerahan pekerjaan instalasi kepada tenaga kerja lapangan bersertifikasi.

Upaya tersebut diperkuat dengan langkah-langkah preventif di lapangan untuk meminimalkan risiko keselamatan, khususnya di area bertegangan tinggi. PLN Nusa Daya memasang rambu peringatan dan indikator voltase pada titik-titik strategis, baik di fasilitas umum maupun di area yang berdekatan dengan jaringan distribusi listrik. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya listrik sekaligus memperkuat sistem pencegahan risiko. Evaluasi dan pengendalian keamanan produk dan layanan tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup perlindungan pelanggan sebagai pengguna akhir. Hal ini mencerminkan komitmen PLN Nusa Daya dalam menyediakan layanan ketenagalistrikan yang aman, andal, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

Products/Services Subject to Safety Assessment

PLN Nusa Daya consistently ensures that all products and services provided to customers comply with applicable technical standards and regulatory requirements, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. To maintain the quality of electricity services, the Company also regularly educates the public on the safe use of electricity, including by encouraging the use of officially standardised equipment and the engagement of certified field personnel for installation work.

These efforts are strengthened by preventive measures in the field to minimise safety risks, particularly in high-voltage areas. PLN Nusa Daya installs warning signs and voltage indicators at strategic points, including public facilities and areas adjacent to electricity distribution networks. This measure aims to increase public awareness of potential electrical hazards while strengthening the risk prevention system. Product and service safety evaluation and control cover not only technical and operational aspects but also the protection of customers as end-users. This reflects PLN Nusa Daya's commitment to providing safe and reliable electricity services in accordance with consumer protection principles.

Dampak Produk/Jasa bagi Pelanggan

Produk dan jasa yang disediakan PLN Nusa Daya memberikan berbagai dampak bagi pelanggan, baik positif maupun yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Layanan yang diberikan berkontribusi terhadap peningkatan keandalan sistem kelistrikan pelanggan, sehingga mendukung kelancaran operasional dan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, layanan pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang dilakukan secara profesional turut membantu meningkatkan efisiensi operasional pelanggan, mengurangi potensi gangguan, serta mendukung aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap standar K3L. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan serta terciptanya nilai tambah berupa efisiensi biaya dan keberlanjutan layanan.

Impact of Products/Services on Customers

The products and services provided by PLN Nusa Daya generate various impacts for customers, including positive impacts and potential impacts that must be managed on an ongoing basis. The Company's services contribute to improving the reliability of customers' electricity systems, thereby supporting smooth operations and productivity across various sectors. Professional maintenance and system management services also help improve customer operational efficiency, reduce potential disruptions, and support safety and compliance with K3L standards. Other positive impacts include higher customer satisfaction and the creation of added value through cost efficiency and service continuity.

Di sisi lain, terdapat pula potensi dampak yang perlu dimitigasi, seperti kemungkinan gangguan sementara selama proses pemeliharaan atau perbaikan sistem yang dapat memengaruhi kontinuitas layanan pelanggan. Selain itu, ketergantungan pada proses operasional yang kompleks juga dapat menimbulkan risiko keterlambatan layanan apabila tidak dikelola secara optimal. Untuk meminimalkan dampak tersebut, PLN Nusa Daya terus melakukan peningkatan koordinasi operasional, penerapan prosedur kerja yang ketat, serta optimalisasi perencanaan pemeliharaan agar dampak terhadap pelanggan dapat ditekan seminimal mungkin.

At the same time, certain potential impacts require mitigation, such as temporary disruptions during maintenance or system repair processes that may affect customer service continuity. Dependence on complex operational processes may also create a risk of service delays if not managed properly. To minimise these impacts, PLN Nusa Daya continues to strengthen operational coordination, implement strict work procedures, and optimise maintenance planning so that impacts on customers can be reduced as much as possible.

Produk yang Ditarik Kembali

PT PLN Nusa Daya, sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan di sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, serta pelayanan pelanggan, secara konsisten menjaga integritas layanannya. Sepanjang periode pelaporan hingga 31 Desember 2025, perusahaan mencatatkan nihil kasus penarikan kembali ataupun pembekuan terhadap produk dan jasa yang disajikan kepada konsumen. Pencapaian ini merefleksikan komitmen kuat manajemen dalam mempertahankan mutu layanan yang prima, sekaligus menegaskan kepatuhan korporasi terhadap regulasi operasional serta standar keselamatan yang berlaku.

Product Recalls

PT PLN Nusa Daya, as a provider of operation and maintenance services in the power generation, transmission, distribution, and customer service sectors, consistently maintains the integrity of its services. Throughout the reporting period up to 31 December 2025, the Company recorded zero cases of recalls or suspension of products and services provided to consumers. This achievement reflects management's strong commitment to maintaining excellent service quality and confirms the Company's compliance with applicable operational regulations and safety standards.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Berkelanjutan

Survei kepuasan pelanggan merupakan bagian dari upaya pengukuran dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi pelanggan terhadap kinerja layanan Perusahaan serta menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan ke depan. Pada tahun 2025, hasil survei menunjukkan *Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 93,40. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 2,06 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 95,46. Namun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori sangat puas (*excellent*), yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan pelanggan tetap tinggi terhadap layanan PLN Nusa Daya. Hasil survei tersebut menjadi referensi bagi Perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan proses kerja, serta optimalisasi sistem pelayanan agar semakin responsif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Customer Satisfaction Survey on Sustainable Products and/or Services

The customer satisfaction survey forms part of the Company's efforts to measure and improve the quality of its services. This activity aims to obtain an objective view of customers' perceptions of the Company's service performance and serves as a basis for preparing future improvement measures. In 2025, the survey results recorded a Customer Satisfaction Index (CSI) of 93.40. This represents a decrease of 2.06 points compared with 95.46 in 2024. Nevertheless, the score remained in the excellent category, indicating that customer satisfaction with PLN Nusa Daya's services remained high. The survey results serve as a reference for the Company in continuously improving service quality through strengthening human capital competencies, improving work processes, and optimising service systems to make them more responsive and aligned with customer needs.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan

Sebagai perusahaan strategis yang menjamin ketersediaan listrik di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, PT PLN Nusa Daya menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, serta pelayanan pelanggan. Selaras dengan peran strategis tersebut, perusahaan berkomitmen untuk menyajikan standar pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan dan mitra bisnis, termasuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen secara adil dan nondiskriminatif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas layanan, PLN Nusa Daya menyediakan fasilitas pengaduan melalui situs web www.plnnusadaya.co.id dan aplikasi SOE (*Safety on Essential*). Selain itu, program *Customer Insight* dan Survei Kepuasan Pelanggan rutin dilakukan untuk menjaring masukan langsung dari pengguna layanan. Hingga 31 Desember 2025, perusahaan tidak menerima pengaduan terkait ketidakpuasan pelanggan melalui kedua kanal tersebut.

Biaya Pengelolaan Pelanggan

Sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan layanan yang optimal, PLN Nusa Daya mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung berbagai kegiatan pengelolaan pelanggan. Salah satu inisiatif utamanya adalah pelaksanaan survei kepuasan pelanggan sebagai bentuk mendengarkan secara aktif suara dan aspirasi pelanggan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggan menerima layanan yang responsif, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, PLN Nusa Daya terus memperkuat hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

Customer Complaints Mechanism

As a strategic company that supports electricity availability in Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, PT PLN Nusa Daya provides operation and maintenance services for power generation, transmission, and distribution, as well as customer service. In line with this role, the Company is committed to delivering the best service standards to all customers and business partners, including ensuring the fulfilment of consumer rights fairly and without discrimination in accordance with applicable regulations.

To maintain service quality, PLN Nusa Daya provides complaint channels through its website, www.plnnusadaya.co.id, and the SOE (Safety on Essential) application. In addition, the Customer Insight programme and Customer Satisfaction Survey are conducted regularly to collect direct feedback from service users. As of 31 December 2025, the Company had received no complaints related to customer dissatisfaction through either channel.

Customer Management Costs

As part of its commitment to delivering optimal service, PLN Nusa Daya allocated a budget in 2025 to support various customer management activities. One of the main initiatives is the customer satisfaction survey, which serves as a means of actively listening to customers' voices and aspirations. This measure is carried out to ensure that every customer receives responsive, high-quality service in line with established operational standards. Through this approach, PLN Nusa Daya continues to strengthen customer relationships and improve service quality on an ongoing basis.

Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Employee Well-being and Protection

Stabilitas operasional ketenagalistrikan yang andal berakar dari terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan tingkat kesejahteraan karyawan (*employee well-being*) yang memadai. PLN Nusa Daya terus berupaya menghadirkan berbagai program perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup yang berimbang bagi seluruh karyawan di berbagai wilayah operasi. Melalui penguatan komunikasi dua arah, fasilitas kesehatan yang komprehensif, dan jaminan perlindungan hari tua, Perusahaan berupaya membangun ekosistem kerja yang kondusif di mana setiap individu merasa dihargai, dilindungi, dan didukung untuk tumbuh bersama Perusahaan. Komitmen tersebut direalisasikan lewat perencanaan tenaga kerja yang sistematis, pembekalan keahlian secara berkala, dan jaminan kesetaraan perlakuan di tempat kerja. Nilai-nilai inklusivitas serta penghormatan HAM dijunjung tinggi sebagai benteng pencegahan praktik diskriminasi di seluruh wilayah operasional.

The reliability of electricity operations is closely linked to harmonious industrial relations and the well-being of employees. PLN Nusa Daya therefore continues to implement work protection programmes and quality-of-life initiatives for all employees across its operational areas. By strengthening two-way communication, providing comprehensive health facilities, and ensuring retirement protection, the Company aims to create a supportive work environment where every employee is valued, protected, and able to grow with the Company. This commitment is supported by structured workforce planning, periodic skills development, and equal treatment in the workplace. Inclusivity and respect for human rights are consistently upheld to prevent discriminatory practices throughout the Company's operational areas.

Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perlindungan hak karyawan dan penyediaan ruang kerja yang inklusif merupakan wujud nyata kepatuhan PLN Nusa Daya terhadap pilar sosial dalam kerangka kerja ESG. Perusahaan secara konsisten mengeliminasi praktik diskriminatif di seluruh jenjang karier guna menjamin terciptanya meritokrasi yang sehat. Pengelolaan keberagaman tenaga kerja ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong inovasi, di mana keanekaragaman perspektif dihargai sebagai motor penggerak produktivitas. Melalui penguatan budaya inklusi ini, Perusahaan mampu mengoptimalkan potensi setiap talenta sekaligus memitigasi risiko operasional, seraya memastikan seluruh insan korporasi bergerak selaras menuju keberhasilan jangka panjang. Komitmen terhadap kesetaraan ini juga diwujudkan melalui komitmen PLN Nusa Daya dalam menyediakan akses dan kesempatan kerja yang adil bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk upaya pemenuhan hak bagi kelompok kerja minoritas atau penyandang disabilitas yang memiliki kapabilitas sesuai kebutuhan industri. Perusahaan percaya bahwa keberagaman latar belakang sosial budaya insan Perusahaan merupakan refleksi dari kekayaan wilayah operasional nasional yang harus dijaga secara inklusif.

Equal Employment Opportunities

Protecting employee rights and providing an inclusive workplace represent PLN Nusa Daya's tangible commitment to the social pillar of the ESG framework. The Company consistently eliminates discriminatory practices across all career levels to ensure a sound meritocracy. Workforce diversity is managed as a strategic instrument to encourage innovation, with diverse perspectives recognised as a driver of productivity. By strengthening this inclusive culture, the Company optimises the potential of each talent while mitigating operational risks and ensuring that all personnel move in alignment towards long-term success. This commitment is also reflected in the provision of fair access and employment opportunities for all segments of society, including efforts to fulfil the rights of minority groups and persons with disabilities who have capabilities aligned with industry needs. The Company believes that the socio-cultural diversity of its people reflects the richness of its national operational areas and must be inclusively preserved.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan pekerja merupakan pilar utama dalam kebijakan ketenagakerjaan PT PLN Nusa Daya. Komitmen ini diwujudkan melalui penolakan keras terhadap segala bentuk eksploitasi, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur dan mempraktikkan kerja paksa. Perusahaan secara konsisten menerapkan sistem seleksi pegawai yang akuntabel dengan kepatuhan penuh pada regulasi usia kerja minimum. Selain itu, pemenuhan hak fundamental karyawan seperti hak cuti tahunan dan hari libur keagamaan dijamin sepenuhnya sebagai perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai hukum. Melalui tata kelola sumber daya manusia yang etis ini, Perusahaan memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial global.

Child Labour and Forced Labour

PT PLN Nusa Daya places the protection of workers' human rights at the centre of its employment policy. The Company demonstrates this commitment by firmly prohibiting all forms of exploitation, including child labour and forced labour. PLN Nusa Daya consistently implements accountable recruitment and selection processes that fully comply with minimum working age regulations. The Company also guarantees the fulfilment of employees' basic rights, such as annual leave and religious holidays, as part of lawful and harmonious industrial relations. Through ethical human resources governance, the Company ensures that its operations remain consistent with global social sustainability principles.

Remunerasi Karyawan

Sistem remunerasi di PLN Nusa Daya dibangun di atas fondasi meritokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan gender untuk peran dan tanggung jawab yang setara. Penentuan kompensasi didasarkan pada parameter profesional yang terukur, termasuk kompetensi teknis, evaluasi kinerja, skala jabatan, masa bakti, serta kompleksitas tugas yang menghasilkan rasio upah pokok antara karyawan pria dan wanita mutlak 1:1. Sebagai wujud akuntabilitas terhadap hukum pengupahan nasional, Perusahaan menetapkan standar imbal jasa bagi karyawan entry level di atas ketentuan UMP. Tercatat pada tahun 2025, upah untuk golongan terendah adalah sebesar Rp6.909.000, yang merepresentasikan rasio perbandingan terhadap UMP terendah sebesar 1 :1,28 dan UMP tertinggi sebesar 1 :2,8. Kebijakan ini merefleksikan komitmen berkelanjutan Perusahaan dalam menghargai kontribusi talenta secara adil sekaligus meningkatkan daya saing organisasi.

Employee Remuneration

The remuneration system at PLN Nusa Daya is based on meritocracy and supports gender equality for roles and responsibilities of equal value. Compensation is determined based on measurable professional parameters, including technical competence, performance evaluation, position grade, length of service, and task complexity, resulting in a 1:1 basic salary ratio between male and female employees. As a form of accountability to national wage regulations, the Company sets remuneration standards for entry-level employees above the Provincial Minimum Wage (UMP). In 2025, the wage for the lowest grade was Rp6,909,000, representing a ratio of 1:1.28 to the lowest UMP and 1:2.8 to the highest UMP. This policy reflects the Company's commitment to recognising employee contributions fairly while strengthening organisational competitiveness.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di PLN Nusa Daya diarahkan secara terukur untuk mendukung efektivitas operasional dan pertumbuhan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan merancang program pengembangan kompetensi secara terstruktur dengan mengacu pada hasil evaluasi performa dan analisis kebutuhan riil di lapangan, baik untuk aspek keahlian teknis ketenagalistrikan maupun kompetensi kepemimpinan. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap lini kerja diisi oleh talenta yang kompeten, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tata kelola bisnis yang bersih. Rincian mengenai struktur, alokasi, dan realisasi program peningkatan kapasitas pegawai tersebut telah diuraikan pada bagian Sumber Daya Manusia di bab Tinjauan Pendukung Bisnis.

Employee Training and Competency Development Programme

The development of human capital capabilities at PLN Nusa Daya is carried out in a measured manner to support operational effectiveness and the Company's long-term growth. The Company designs structured competency development programmes based on performance evaluation results and analysis of actual needs in the field, covering both technical electricity-related skills and leadership competencies. This approach ensures that every line of work is supported by competent, responsive, and accountable talent in implementing clean business governance. Details on the structure, allocation, and realisation of these employee capacity-building programmes are presented in the Human Capital section of the Business Support Review chapter.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

PT PLN Nusa Daya menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas tertinggi dalam menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas layanan kelistrikan bagi masyarakat. Komitmen ini direalisasikan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara konsisten yang telah tersertifikasi standar SNI ISO 45001:2018. Penerapan ini merupakan bentuk kepatuhan mutlak terhadap regulasi Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012, yang mewajibkan integrasi pengawasan keselamatan bagi perusahaan dengan potensi risiko tinggi atau mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja. Ruang lingkup SMK3 ini mengikat seluruh lini bisnis layanan pemeliharaan operasi dan manajemen konstruksi pembangkit listrik, transmisi, distribusi, hingga layanan pelanggan, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Pelaksana (UP) yang tersebar di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Sulawesi.

Guna mencapai target nihil kecelakaan kerja (*zero accident*) serta mencegah risiko Penyakit Akibat Kerja (PAK), Perusahaan secara konsisten menginternalisasi budaya keselamatan (*safety culture*) melalui pemanfaatan teknologi pemantauan digital, pelaksanaan pelatihan berkala, serta penyelenggaraan Apel Bulan K3 Nasional. Budaya preventif ini diperkuat lewat prosedur wajib *safety briefing* sebelum memulai pekerjaan untuk menyamakan pemahaman mengenai potensi risiko, langkah mitigasi, dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan buku saku "Aku Jago" sebagai panduan perilaku wajib yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu *mindset, capabilities*, dan *leadership*. Landasan struktural K3 ini diperkokoh melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibentuk sejak 26 Agustus 2020 dengan pengesahan resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan mandat Permenaker No. Per.04/MEN/1987.

Melalui rapat bulanan yang digelar secara rutin sepanjang tahun 2025, P2K3 secara aktif mengevaluasi kinerja, merencanakan tindak lanjut, serta merumuskan aturan keselamatan operasional yang kondusif. Agenda strategis yang berhasil dilaksanakan meliputi koordinasi aspek K3L dengan unit pelaksana dan mitra kerja, pembenahan fasilitas operasional di Site Bolano 5 MW, standardisasi Alat Kerja (ALKER) dan Alat Pelindung Diri (APD), pengawasan kepatuhan pengisian izin kerja *(working permit),* edukasi keselamatan melalui *Digital Learning Series,* hingga mitigasi risiko pada rencana mobilisasi pembangkit. Kegiatan berkelanjutan ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan dalam memperkuat tata kelola keselamatan di seluruh lini bisnis.

A Decent and Safe Working Environment

PT PLN Nusa Daya places Occupational Health and Safety (OHS) as its highest priority to protect all workers while maintaining the stability of electricity services for the public. This commitment is realised through the consistent implementation of an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS), which is certified to SNI ISO 45001:2018. The implementation reflects the Company's compliance with Article 87 of Law Number 13 of 2003 and Article 5 of Government Regulation Number 50 of 2012, which require integrated safety supervision for companies with high-risk operations or at least 100 employees. The scope of the OHSMS covers all business lines, including operation maintenance services and construction management for power plants, transmission, distribution, and customer services, both at the Head Office and across all Implementing Units (UP) in Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, and Sulawesi.

To achieve the zero-accident target and prevent Occupational Diseases (PAK), the Company consistently internalises a safety culture through digital monitoring technology, regular training, and the National OHS Month Assembly. This preventive culture is reinforced through mandatory safety briefings before work begins, ensuring a shared understanding of potential risks, mitigation measures, and individual responsibilities in the field. The Company has also issued the "Aku Jago" pocketbook as a mandatory behavioural guide integrating three main pillars: mindset, capabilities, and leadership. The structural foundation of OHS is further strengthened through the Occupational Safety and Health Committee (P2K3), which was established on 26 August 2020 with official approval from the Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan Province, in line with Minister of Manpower Regulation Number Per.04/MEN/1987.

Through regular monthly meetings throughout 2025, P2K3 actively evaluated performance, planned follow-up actions, and formulated operational safety rules that support safe working practices. Strategic agendas implemented included coordination of OHS and environmental aspects (K3L) with implementing units and business partners; improvement of operational facilities at the Bolano 5 MW Site; standardisation of work equipment (ALKER) and personal protective equipment (PPE); monitoring compliance with working permit requirements; safety education through the Digital Learning Series; and risk mitigation for power plant mobilisation plans. These continuous activities reflect the Company's strong commitment to strengthening safety governance across all business lines.

Kesiapan dalam menghadapi situasi anomali didukung oleh prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang komprehensif di bawah kendali Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD). Sistem ini memastikan pelaporan yang cepat dari setiap karyawan, koordinasi taktis dengan pihak eksternal saat kondisi kritis berada di luar kendali internal, hingga penegakan akuntabilitas melalui pelaksanaan investigasi bersama fungsi manajemen dan Bidang K3L dalam waktu maksimal 1x24 jam pasca kejadian. Seluruh proses pemulihan serta dokumentasi hasil investigasi dikelola secara ketat berdasarkan Prosedur Pengendalian Rekaman demi memastikan perbaikan sistem yang andal dan akuntabel.

Preparedness for abnormal situations is supported by comprehensive emergency preparedness and response procedures under the control of the Emergency Preparedness and Response Team (TKTD). This system ensures rapid reporting by employees, tactical coordination with external parties when critical situations exceed internal control, and accountability through joint investigations by management and the OHS and Environment (K3L) function within a maximum of 1x24 hours after an incident. All recovery processes and documentation of investigation results are strictly managed in accordance with the Records Control Procedure to ensure reliable and accountable system improvements.

Biaya terkait Ketenagakerjaan

Realisasi biaya terkait ketenagakerjaan di PLN Nusa Daya sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp121,8 Miliar. Perusahaan juga mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp1,37 Miliar untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Selain itu, sebagai wujud prioritas pada aspek keselamatan, PLN Nusa Daya merealisasikan biaya pengelolaan K3 sebesar Rp10,86 Miliar untuk pemenuhan aspek preventif berupa penyelenggaraan diklat serta sertifikasi K3 bagi tenaga kerja guna memitigasi risiko operasional di lapangan serta pemeriksaan kesehatan.

Employment Costs

Throughout 2025, PLN Nusa Daya recorded employment costs of Rp121.8 billion. The Company also allocated Rp1.37 billion to support continuous employee training and competency development programs. In addition, as part of its safety priority, PLN Nusa Daya realised OHS management costs of Rp10.86 billion for preventive measures, including OHS training and certification for workers to mitigate operational risks in the field, as well as medical check-ups.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan

Community Empowerment for Sustainable Development

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar strategis bagi PLN Nusa Daya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara nyata. Mengingat luasnya bentang operasional Perusahaan yang mencakup wilayah timur Indonesia, program pelibatan dan pengembangan komunitas diarahkan untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi yang relevan di tingkat lokal. Dengan mengintegrasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam *core* strategi bisnis, Perusahaan berupaya aktif mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kelestarian ekosistem sekitar. Inisiatif berkelanjutan ini menegaskan kontribusi aktif PLN Nusa Daya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional secara transparan dan akuntabel.

Community empowerment is one of PLN Nusa Daya's strategic pillars in translating sustainability principles into concrete action. Given the Company's broad operational coverage across eastern Indonesia, its community engagement and development programmes are directed towards addressing relevant socio-economic challenges at the local level. By integrating Social and Environmental Responsibility (TJSL) programmes into its core business strategy, the Company actively seeks to foster community economic self-reliance, improve quality of life, and preserve surrounding ecosystems. These sustainable initiatives affirm PLN Nusa Daya's active contribution to supporting the achievement of the national Sustainable Development Goals (SDGs) in a transparent and accountable.

Dampak Operasional terhadap Masyarakat Sekitar

Sebagai entitas yang tumbuh dan beroperasi di tengah-tengah komunitas, PLN Nusa Daya memahami bahwa

Operational Impact on Surrounding Communities

As an entity that grows and operates within local communities, PLN Nusa Daya recognises that the presence

keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan Perusahaan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua membawa dampak langsung bagi ruang hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dampak operasional secara prudent melalui pelaksanaan studi amdal, pemantauan lingkungan berkala, serta penerapan standardisasi K3L yang ketat demi meminimalkan potensi gangguan sosial maupun lingkungan.

Di sisi lain, Perusahaan proaktif mengoptimalkan dampak positif operasional melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan keandalan pasokan listrik sebagai penggerak ekonomi daerah. Kontribusi ini diperkuat melalui penciptaan nilai bersama (*creating shared value*) melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dampak inisiatif ini secara nyata diwujudkan melalui peningkatan kemandirian ekonomi komunitas, transfer keahlian, peningkatan literasi energi, serta perluasan akses pasar bagi UMKM binaan di sekitar wilayah operasi. Melalui pengelolaan dampak yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang ini, PT PLN Nusa Daya berhasil memitigasi risiko sosial di lapangan secara prudent, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Perencanaan Program Terkait Aspek Masyarakat

Perumusan program TJSL PLN Nusa Daya bertumpu pada pendekatan berbasis data hasil pemetaan sosial (*social mapping*) di seluruh wilayah operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program tidak hanya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tetapi juga menjawab tantangan rill masyarakat lokal secara tepat sasaran. Melalui koordinasi lintas fungsi dan pelibatan aktif pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan menyusun cetak biru (*blueprint*) TJSL yang komprehensif. Seluruh inisiatif ini kemudian dimanifestasikan ke dalam empat pilar strategis yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan, baik melalui skema pemberdayaan rutin, program insidental, maupun aksi filantropi, demi menciptakan ekosistem sosial-lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.

of its electricity infrastructure across Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua has a direct impact on the living environment of surrounding communities. Accordingly, the Company is committed to managing operational impacts prudently through environmental impact assessment studies, regular environmental monitoring, and the implementation of strict HSSE standards to minimise potential social and environmental disturbances.

At the same time, the Company proactively optimises the positive impacts of its operations through local workforce absorption and improved reliability of electricity supply as a driver of regional economic activity. This contribution is strengthened through the creation of shared value under sustainable empowerment programmes. These initiatives are realised through enhanced community economic self-reliance, skills transfer, improved energy literacy, and expanded market access for assisted MSMEs around the operational areas. Through transparent, accountable, and long-term self-reliance-oriented impact management, PT PLN Nusa Daya prudently mitigates social risks in the field while strengthening stakeholder legitimacy and trust in the Company's business sustainability.

Programme Planning Relating to Community Aspects

The formulation of PLN Nusa Daya's TJSL programmes is based on a data-driven approach, using social mapping results from across its operational areas. This approach ensures that each programme is not only aligned with the Sustainable Development Goals, but also addresses the real challenges faced by local communities in a targeted manner. Through cross-functional coordination and active engagement with external stakeholders, the Company prepares a comprehensive TJSL blueprint. These initiatives are then implemented under four strategic pillars, namely economy, environment, health, and education, through regular empowerment schemes, incidental programmes, and philanthropic activities to create a resilient and sustainable socio-environmental ecosystem.

Pilar Program Tanggung Jawab Sosial
Pillars of Social Responsibility Programs



Ekonomi
Economy



Lingkungan
Environment



Kesehatan
Health



Pendidikan
Education

Biaya Program Terkait Aspek Masyarakat

Komitmen PLN Nusa Daya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui realisasi dana TJSL tahun 2025 yang mencapai Rp2,12 miliar. Berfokus pada pilar ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan, seluruh program yang dijalankan diarahkan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal yang berdampingan langsung dengan operasional Perusahaan.

Cost of Community Development Program

PLN Nusa Daya demonstrates its commitment to supporting sustainable development through the realization of Social and Environmental Responsibility (TJSL) in 2025, amounting to Rp2.12 billion. With a focus on the economy, environment, health, and education pillars, the programmes implemented were aimed at generating long-term positive impacts and enhancing the quality of life of communities surrounding the Company's operations.

Pelaksanaan Program Terkait Aspek Masyarakat

Implementation of Community Programs

Realisasi Program TJSL Perusahaan Tahun 2025 [OJK F.25]
Realisation of the Company's CSR Programmes in 2025

No.	Program Programme	Keterkaitan dengan SDGs Linkage with SDGs	Penjelasan Program Programme Description	Biaya Cost
1.	Bantuan Renovasi Pesantren/Masjid Assistance for the Renovation of Islamic Boarding Schools/ Mosques		Program ini sebagai bentuk kepedulian PLN Nusa Daya dalam meningkatkan kualitas sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan agar lebih aman, nyaman, dan layak digunakan oleh masyarakat. Melalui program ini, Perusahaan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan ibadah serta aktivitas pendidikan keagamaan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat. This programme represents PLN Nusa Daya's concern for improving the quality of worship facilities and religious education facilities so that they are safer, more comfortable and more suitable for use by the community. Through this programme, the Company supports the creation of a conducive environment for worship activities and religious education as part of its contribution to social development within the community.	Rp90.000.000
2.	Pembangunan Kampung Pelangi: Menghidupkan Warna di Tengah Masyarakat Development of Kampung Pelangi: Bringing Colour to the Community		Dilaksanakan sebagai upaya menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih tertata, bersih, dan nyaman melalui penataan kawasan berbasis partisipasi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, mempererat interaksi sosial, serta mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal. This programme was implemented as an effort to create a more orderly, clean and comfortable residential environment through community-based area improvement. In addition to improving environmental quality, the programme is also expected to strengthen community awareness of cleanliness, enhance social interaction, and support the development of local economic potential.	Rp100.000.000
3.	Program Edukasi Ekosistem *Green Energy* dengan Metode Pendidikan Lingkungan untuk Generasi Peduli Alam Green Energy Ecosystem Education Programme through Environmental Education for a Nature-Conscious Generation		Inisiatif edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya energi bersih, pelestarian lingkungan, serta penerapan gaya hidup berkelanjutan. Melalui pendekatan pendidikan lingkungan yang interaktif, program ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang peduli terhadap alam sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mendukung transisi menuju ekosistem yang lebih hijau. This educational initiative aims to increase the knowledge and awareness of younger generations regarding the importance of clean energy, environmental preservation and the adoption of sustainable lifestyles. Through an interactive environmental education approach, the programme is expected to help shape students' concern for nature while encouraging active participation in supporting the transition towards a greener ecosystem.	Rp100.000.000

Realisasi Program TJSL Perusahaan Tahun 2025 [OJK F.25]
Realisation of the Company's CSR Programmes in 2025

No.	Program Programme	Keterkaitan dengan SDGs Linkage with SDGs	Penjelasan Program Programme Description	Biaya Cost
4.	Penanaman Hutan Mangrove untuk Mengurangi dampak Perubahan Iklim Mangrove Forest Planting to Reduce the Impact of Climate Change		Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir guna membantu mengurangi abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kapasitas penyerapan karbon. Selain mendukung mitigasi perubahan iklim, program ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan. This environmental preservation initiative was carried out through mangrove planting in coastal areas to help reduce abrasion, preserve biodiversity and increase carbon absorption capacity. In addition to supporting climate change mitigation, the programme also encourages community involvement in sustainably protecting coastal ecosystems.	Rp100.000.000
5.	Program Binaan UMKM "Desa Singkong" Upaya. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Cindai Alus "Desa Singkong" MSME Development Programme as an Effort to Improve the Economy of the Local Community in Cindai Alus		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berfokus pada pengembangan usaha pengolahan singkong di Desa Cindai Alus melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan penguatan daya saing produk lokal. Program ini turut mendukung legalitas usaha, sehingga diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. This community economic empowerment programme focuses on developing cassava processing businesses in Cindai Alus Village by enhancing the capacity of MSME actors and strengthening the competitiveness of local products. The programme also supports business legality, which is expected to expand market access, increase product added value and promote sustainable community economic growth.	Rp100.000.000
6.	Pemberdayaan Masyarakat Peternak Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Empowerment of Livestock Farmers in Dete Village, Lape District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara		Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak melalui pemberian bantuan mesin pembuat pakan ternak yang memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan berkualitas. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan efisiensi usaha peternakan masyarakat di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. This programme aims to improve the productivity and welfare of livestock farmers by providing feed-making machines that utilise agricultural waste as quality animal feed. This initiative is expected to strengthen local food security while improving the efficiency of community livestock businesses in Dete Village, Lape District, Sumbawa Regency.	Rp90.000.000
7.	Pengolahan Limbah Botol Plastik PET di Lingkungan Kampung Santri Processing of PET Plastic Bottle Waste in Kampung Santri		Inisiatif pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah botol PET menjadi produk yang bernilai guna. Program ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus membangun budaya peduli lingkungan dan mendorong penerapan ekonomi sirkular di lingkungan masyarakat. This community empowerment initiative aims to raise awareness of plastic waste management by reusing PET bottle waste and turning it into useful products. The programme is expected to reduce plastic waste generation while fostering an environmentally conscious culture and encouraging the implementation of a circular economy within the community.	Rp77.000.000
8.	Kelompok Usaha Berdaya (Kelompok Usaha Peternakan Pedaging) Empowered Business Group: Broiler Livestock Business Group		Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung pengembangan usaha peternakan pedaging melalui penguatan kapasitas kelompok, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan kelompok usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing. This economic empowerment programme supports the development of broiler livestock businesses through capacity building for business groups, productivity improvement and sustainable business management. The programme is expected to increase community income, strengthen food security, and create more independent and competitive business groups.	Rp100.000.000

Realisasi Program TJSL Perusahaan Tahun 2025 [OJK F.25]
Realisation of the Company's CSR Programmes in 2025

No.	Program Programme	Keterkaitan dengan SDGs Linkage with SDGs	Penjelasan Program Programme Description	Biaya Cost
9.	Gerobak Berdaya Empowered Carts		Inisiatif pemberdayaan ekonomi yang mendukung pengembangan usaha mikro melalui penyediaan sarana usaha berupa gerobak dan peralatan pendukung bagi pelaku UMKM. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang memperoleh pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. This economic empowerment initiative supports the development of micro-enterprises by providing business facilities in the form of carts and supporting equipment for MSME actors. The programme is expected to increase business capacity, expand income-generating opportunities and encourage sustainable economic independence within the community.	Rp90.000.000
10.	Manado Kota Bebas Sampah Waste-Free Manado City		Inisiatif kepedulian lingkungan yang bertujuan meningkatkan kebersihan kawasan perkotaan melalui aksi bersih-bersih sampah dan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Program ini mendorong kolaborasi antara Perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas dalam membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. This environmental care initiative aims to improve urban cleanliness through waste clean-up activities and waste management education for the community. The programme encourages collaboration between the Company, local government and communities in building collective awareness to realise a clean, healthy, and sustainable environment.	Rp60.000.000
11.	Program Peningkatan Teknologi Pelajar Tomohon Tomohon Student Technology Enhancement Programme		Program pengembangan kapasitas yang bertujuan meningkatkan kompetensi pelajar melalui edukasi dan pelatihan di bidang teknologi serta inovasi yang relevan dengan perkembangan industri. Program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan peserta didik, meningkatkan literasi teknologi, serta mempersiapkan generasi muda yang adaptif terhadap transformasi digital dan transisi energi. This capacity-building programme aims to improve student competencies through education and training in technology and innovation relevant to industrial development. The programme is expected to strengthen students' skills, improve technological literacy, and prepare younger generations to adapt to digital transformation and the energy transition.	Rp100.000.000
12.	Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Sekolah Negeri Kurulu (SD & SMP) di Kabupaten Jayawijaya Educational Assistance for Kurulu Public Elementary and Junior High Schools in Jayawijaya Regency		Bentuk dukungan PLN Nusa Daya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana belajar bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan semangat belajar peserta didik, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jayawijaya. This programme reflects PLN Nusa Daya's support for improving access to and the quality of education through the provision of learning facilities and infrastructure assistance for elementary and junior high schools. The programme is expected to create a more conducive learning environment, increase students' enthusiasm for learning, and support human capital development in Jayawijaya Regency.	Rp110.150.000

Realisasi Program TJSL Perusahaan Tahun 2025 [OJK F.25]
Realisation of the Company's CSR Programmes in 2025

No.	Program Programme	Keterkaitan dengan SDGs Linkage with SDGs	Penjelasan Program Programme Description	Biaya Cost
13.	Bengkel Berdaya Empowered Workshops		Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung peningkatan kapasitas usaha bengkel melalui penguatan keterampilan teknis, penyediaan sarana pendukung, serta pengembangan tata kelola usaha. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas peluang usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha bengkel secara berkelanjutan. This economic empowerment programme supports the capacity enhancement of workshop businesses through the strengthening of technical skills, provision of supporting facilities and development of business governance. The programme is expected to improve service quality, expand business opportunities and encourage the sustainable economic independence of workshop business actors.	Rp95.000.000
14.	Pontianak Bebas *Stunting* Stunting-Free in Pontianak		Inisiatif kepedulian sosial yang bertujuan mendukung upaya pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* melalui pemberian dukungan gizi serta edukasi kepada keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas kesehatan anak serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas. This social care initiative aims to support efforts to prevent and reduce the prevalence of stunting through nutritional support and education for families with toddlers and pregnant women. The programme is implemented in collaboration with local governments and relevant stakeholders to improve children's health quality and support the realisation of a healthy and high-quality generation.	Rp45.000.000
15.	Qurban Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sustainable Qurban for Food Security and Welfare		PLN Nusa Daya menyalurkan total 120 hewan qurban yang terdiri dari 93 ekor sapi dan 27 ekor kambing melalui seluruh unit Perusahaan, mulai dari Sumatra hingga Papua sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. PLN Nusa Daya distributed a total of 120 sacrificial animals, consisting of 93 cattle and 27 goats, through all Company units from Sumatra to Papua. This initiative reflects the Company's commitment to strengthening the values of togetherness, social concern and mutual cooperation within the community.	Rp800.000.000
Jumlah Total				Rp2.057.150.000

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi PLN Nusa Daya dalam menjaga keberlangsungan layanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah kerja. Oleh karena itu, Perusahaan memfasilitasi saluran penyampaian aspirasi, kritik, dan pengaduan yang responsif melalui surel resmi plnnd@plnnusadaya.co.id sebagai wadah mitigasi dampak operasional terhadap lingkungan sosial. Proses penanganan keluhan diatur secara ketat melalui prosedur internal yang menjamin akuntabilitas serta transparansi penyelesaian bagi para pelapor. Melalui pengelolaan hubungan kemitraan yang harmonis dan penuh kehati-hatian (*prudent*), sepanjang tahun 2025 Perusahaan sukses mempertahankan rekam jejak kepatuhan yang bersih tanpa adanya klaim pengaduan sosial ataupun sanksi dari otoritas berwenang.

Handling of Community Complaints

Public trust is a key foundation for PLN Nusa Daya in maintaining the continuity of electricity services across all operational areas. Accordingly, the Company provides a responsive channel for submitting aspirations, criticism, and complaints through its official email address, plnnd@plnnusadaya.co.id, as part of efforts to mitigate operational impacts on the social environment. The complaint-handling process is governed by internal procedures that ensure accountability and transparency in resolving issues raised by complainants. Through harmonious and prudent partnership management, throughout 2025 the Company maintained a clean compliance record, with no social complaints or sanctions from the competent authorities.

Pengelolaan Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan

Environmental Management for a Sustainable Future

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu aspek utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab demi keberlanjutan jangka panjang. Sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PLN Nusa Daya menerapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) serta Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan yang berlaku, perusahaan secara konsisten melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas usaha. Upaya tersebut mencakup pelaksanaan program konservasi dan efisiensi energi, pengendalian serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pengelolaan limbah melalui prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, pengelolaan air dan air limbah secara efektif, serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasional. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Komitmen tersebut turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan target nasional menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060 serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan dan Sistem Manajemen Lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari strategi bisnis PLN Nusa Daya dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan operasional tidak hanya diukur dari pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga dari kemampuan dalam meminimalkan dampak lingkungan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PLN Nusa Daya menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) berbasis ISO 14001:2015 yang didukung oleh Keputusan Direksi Nomor: 0029.K/020/DIR/2021 tentang Kebijakan Lingkungan sebagai landasan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.

The concept of sustainable development places environmental management as one of the key aspects in safeguarding the continuity of life. Effective environmental management practices are implemented not only to minimise negative environmental impacts, but also to support the responsible use of resources for long-term sustainability. As a manifestation of its commitment to environmental preservation, PLN Nusa Daya implements an Occupational Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Policy and an Environmental Management System (EMS), which are integrated into all of the Company's operational activities.

In addition to ensuring compliance with applicable environmental regulations and standards, the Company consistently implements various programmes and initiatives to prevent, reduce, and control environmental impacts arising from its business activities. These efforts include energy conservation and efficiency programmes, control and reduction of greenhouse gas (GHG) emissions, waste management based on reduce, reuse, and recycle principles, effective water and wastewater management, and biodiversity protection and conservation around operational areas. These initiatives form part of the Company's strategy to support the transition towards more environmentally friendly and sustainable operations. This commitment also supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), the national Net Zero Emission target by 2060, and the creation of sustainable added value for all stakeholders.

Environmental Policy and Management System

Environmental management is an integral part of PLN Nusa Daya's business strategy in achieving sustainable and responsible growth. The Company recognises that operational success is measured not only by economic performance, but also by its ability to minimise environmental impacts and create long-term value for communities and stakeholders. Accordingly, PLN Nusa Daya implements an ISO 14001:2015-based Environmental Management System (EMS), supported by Board of Directors' Decision Number 0029.K/020/DIR/2021 on Environmental Policy, as the basis for structured, integrated, and sustainable environmental management across all work units.

Sebagai implementasi dari Kebijakan K3L dan Sistem Manajemen Lingkungan yang telah ditetapkan, PLN Nusa Daya secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan guna mengendalikan dampak yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi pemenuhan dokumen dan persetujuan lingkungan, penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan inspeksi dan pengawasan kepatuhan lingkungan, serta penyusunan dan penyampaian laporan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam implementasi *Environment, Social, and Governance* (ESG), khususnya pada pilar Environment, serta melakukan pelaporan kinerja dan kepatuhan lingkungan secara berkala kepada Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (DIV K3L). Melalui penerapan berbagai inisiatif tersebut, PLN Nusa Daya terus memperkuat tata kelola lingkungan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Biaya Lingkungan Hidup

Komitmen PLN Nusa Daya terhadap pengelolaan lingkungan juga tercermin dari peningkatan realisasi biaya lingkungan yang mencapai Rp18.483,65 juta pada tahun 2025, dibandingkan Rp8.335,94 juta pada tahun 2024. Biaya tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, termasuk kegiatan pemantauan lingkungan, penyediaan *oil spill dispersant,* serta pengelolaan limbah sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku. Dukungan anggaran ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk memperkuat kinerja lingkungan, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Pengelolaan Dampak Lingkungan

Pengelolaan dampak lingkungan merupakan bagian penting dari upaya PLN Nusa Daya dalam menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten menerapkan langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan perbaikan terhadap berbagai potensi dampak lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas usaha. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis kepatuhan, PLN Nusa Daya berupaya menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta meminimalkan risiko lingkungan bagi masyarakat dan ekosistem di sekitar wilayah operasional.

As part of the implementation of its HSSE Policy and established EMS, PLN Nusa Daya consistently carries out various environmental management programmes and activities to control impacts arising from the Company's operational activities. These activities include fulfilment of environmental documents and approvals, implementation of environmental protection and management measures, environmental compliance inspections and supervision, as well as preparation and submission of environmental reports in accordance with applicable provisions. In addition, the Company integrates environmental aspects into its ESG implementation, particularly under the Environment pillar, and regularly reports environmental performance and compliance to the HSSE Division. Through these initiatives, PLN Nusa Daya continues to strengthen effective and accountable environmental governance that is oriented towards creating sustainable value for the Company and its stakeholders.

Environmental Expenditure

PLN Nusa Daya's commitment to environmental management is also reflected in the increase in realised environmental expenditure, which reached Rp18,483.65 million in 2025, compared with Rp8,335.94 million in 2024. The expenditure supported environmental impact control and management activities, including environmental monitoring, provision of oil spill dispersant, and waste management in line with applicable principles and regulations. This allocation supports the Company's efforts to enhance environmental performance, strengthen compliance, and create sustainable value for stakeholders.

Environmental Impact Management

PLN Nusa Daya manages environmental impacts as an integral part of its sustainable operations. The Company consistently applies preventive, control, and corrective measures to address potential impacts arising from its business activities. Through a systematic and compliance-oriented approach, PLN Nusa Daya works to preserve environmental quality, optimise resource efficiency, and reduce environmental risks for surrounding communities and ecosystems.

Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Penggunaan material ramah lingkungan merupakan salah satu upaya PLN Nusa Daya dalam mendukung operasional yang berkelanjutan. Melalui pemilihan dan pemanfaatan material yang mempertimbangkan aspek lingkungan, perusahaan berupaya mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan, meminimalkan timbulan limbah, serta mendukung terciptanya proses bisnis yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan.

Dalam mendukung penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R), PLN Nusa Daya terus mendorong penggunaan material dan fasilitas yang lebih ramah lingkungan, khususnya di lingkungan perkantoran. Upaya tersebut diwujudkan melalui digitalisasi proses pengarsipan dan korespondensi internal melalui program paperless guna mengurangi penggunaan kertas, penggunaan tumbler oleh pegawai untuk mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan sekali pakai, serta penerapan metode prasmanan pada kegiatan rapat dan pertemuan untuk meminimalkan timbulan sampah kemasan makanan. Selain itu, perusahaan secara aktif mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik (*Electric Vehicle*/EV) sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi, yang juga diimplementasikan dalam aktivitas operasional perusahaan, khususnya pada layanan teknik dan *Billing Management.*

Komitmen Perusahaan terhadap penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan juga diwujudkan melalui pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap atau PV *Rooftop* di Kantor Pusat PLN Nusa Daya. Fasilitas ini memanfaatkan area atap bangunan sebagai lokasi pemasangan panel surya untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi terbarukan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PLN Nusa Daya berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi jejak lingkungan dari aktivitas operasional, serta mendukung transisi menuju praktik

Pengelolaan Energi

Pengelolaan energi menjadi salah satu fokus utama PLN Nusa Daya dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Sejalan dengan agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional, perusahaan menerapkan pendekatan berbasis ESG untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Berbagai inovasi dan inisiatif terus dikembangkan guna mendukung penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan energi, termasuk pemanfaatan sistem pemantauan energi berbasis digital (*smart energy management system*) yang memungkinkan pengawasan dan optimalisasi konsumsi energi secara lebih efektif.

Use of Environmentally Friendly Materials

The use of environmentally friendly materials is one of PLN Nusa Daya's efforts to support sustainable operations. Through the selection and use of materials that take environmental aspects into account, the Company seeks to reduce excessive resource consumption, minimise waste generation, and support more efficient and environmentally responsible business processes.

To support the implementation of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) principles, PLN Nusa Daya continues to promote the use of more environmentally friendly materials and facilities, particularly in the office environment. These efforts include digitalising archiving and internal correspondence through a paperless programme to reduce paper use, encouraging employees to use tumblers to reduce single-use bottled water consumption, and applying a buffet system for meetings and gatherings to minimise food packaging waste. In addition, the Company actively promotes the use of electric vehicles (EVs) as part of emissions reduction efforts, which are also implemented in operational activities, particularly in technical services and Billing Management.

The Company's commitment to more sustainable resource use is also demonstrated through the development of an environmentally friendly facility in the form of a rooftop solar power plant (PLTS) or PV Rooftop at PLN Nusa Daya's Head Office. This facility utilises the building's rooftop area for solar panel installation to generate electricity from renewable energy sources. Through these initiatives, PLN Nusa Daya seeks to improve resource efficiency, reduce the environmental footprint of its operational activities, and support the transition towards more sustainable practices.

Energy Management

Energy management is one of PLN Nusa Daya's main priorities in supporting the sustainability of the Company's operations. In line with the national decarbonisation and energy transition agenda, the Company applies an ESG-based approach to improve energy efficiency while reducing the environmental impacts of its operational activities. Various innovations and initiatives continue to be developed to support cleaner, more efficient, and sustainable energy use. These efforts include integrating digital technology into energy management, including the use of a digital energy monitoring system, or smart energy management system, to enable more effective monitoring and optimisation of energy consumption.

Selain itu, PLN Nusa Daya terus mendorong budaya efisiensi energi melalui berbagai program internal, termasuk kampanye digital dan edukasi kepada pegawai untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan energi yang lebih bijak. Penggunaan energi konvensional seperti listrik dari jaringan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi bagian dari operasional perusahaan, namun secara bertahap diimbangi dengan pemanfaatan energi bersih, salah satunya melalui instalasi PV *Rooftop* berkapasitas 48 kWp di kantor pusat. Berbagai langkah konkret efisiensi energi juga dilakukan, antara lain penggunaan lampu hemat energi di lingkungan kerja, pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan operasional untuk menjaga efisiensi penggunaan energi, serta kampanye penghematan energi listrik melalui imbauan kepada pegawai untuk mematikan lampu, pendingin udara (AC), dan perangkat komputer saat tidak digunakan. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi biaya, tetapi juga mendukung peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sejalan dengan agenda transformasi PT PLN (Persero).

PLN Nusa Daya also continues to promote an energy efficiency culture through various internal programmes, including digital campaigns and employee education to raise awareness of more prudent energy use. Conventional energy sources, such as grid electricity and fuel oil, remain part of the Company's operations; however, these are gradually being balanced with clean energy utilisation, including the installation of a 48 kWp PV Rooftop system at the Head Office. Concrete energy efficiency measures are also implemented, including the use of energy-saving lamps in the workplace, routine servicing and maintenance of operational vehicles to maintain energy efficiency, and electricity-saving campaigns encouraging employees to switch off lights, air conditioning, and computer equipment when not in use. These initiatives contribute not only to cost efficiency, but also to increasing the utilisation of New and Renewable Energy (NRE) in line with PT PLN (Persero)'s transformation agenda.

Pada tahun 2025, total konsumsi energi PLN Nusa Daya tercatat sebesar 2.186,02 gigajoule, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1.749,81 gigajoule. Intensitas energi di kantor pusat mengalami penurunan menjadi 6,51 gigajoule/orang dari sebelumnya 6,76 gigajoule/orang. Data ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus memperkuat program efisiensi energi dan meningkatkan optimalisasi penggunaan energi di masa mendatang.

In 2025, PLN Nusa Daya's total energy consumption was recorded at 2,186.02 gigajoules, an increase from 1,749.81 gigajoules in 2024. Energy intensity at the Head Office decreased to 6.51 gigajoule/person from 6.76 gigajoules/person in the previous year. This data serves as a basis for the Company to continue strengthening energy efficiency programmes and further optimise energy use going forward.

Pengendalian Emisi

Pengelolaan emisi merupakan bagian dari komitmen Perusahaan terhadap dekarbonisasi dan pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) nasional. Perusahaan menyadari bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas operasional berdampak pada perubahan iklim, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan bisnis, sehingga pengelolaannya diintegrasikan ke dalam strategi perusahaan berbasis data dan prinsip ESG. Dalam implementasinya, PLN Nusa Daya menerapkan sistem pengukuran, pemantauan, dan pelaporan emisi berbasis digital melalui *platform Climate Click* untuk memastikan transparansi dan akurasi data secara *real-time*. Upaya pengendalian emisi dilakukan melalui peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan seperti PV *Rooftop*, serta elektrifikasi peralatan operasional guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sepanjang tahun 2025, total emisi GRK Scope 1 dan Scope 2 tercatat sebesar 356,24 ton CO_2eq, turun 18,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar 436,30 ton CO_2eq, dengan intensitas emisi sebesar 1,06 ton CO_2eq/orang atau turun 36,90% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, emisi Scope 3 tercatat sebesar 2.878,93 ton CO_2eq/m^2. Perusahaan belum melakukan inventarisasi emisi non-GRK seperti NOx dan SOx hingga akhir 2025 karena keterbatasan data teknis dan metodologi yang terverifikasi.

Emissions Control

Emissions management forms part of the Company's commitment to decarbonisation and the achievement of the national Net Zero Emissions (NZE) target. The Company recognises that greenhouse gas (GHG) emissions from operational activities affect climate change, environmental quality, and business sustainability; therefore, emissions management is integrated into a Company strategy based on data and ESG principles. In its implementation, PLN Nusa Daya applies a digital emissions measurement, monitoring, and reporting system through the Climate Click platform to ensure real-time data transparency and accuracy. Emissions control efforts are carried out through improved energy efficiency, the use of renewable energy such as PV Rooftop, and the electrification of operational equipment to reduce dependence on fossil fuels. Throughout 2025, total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions were recorded at 356.24 tonnes CO_2eq, down 18.35% from 436.30 tonnes CO_2eq in 2024, with emissions intensity of 1.06 tonnes CO_2eq/person, a decrease of 36,90% from the previous year. Meanwhile, Scope 3 emissions were recorded at 2,878.93 tonnes CO_2eq. The Company had not conducted an inventory of non-GHG emissions such as NOx and SOx by the end of 2025 due to limitations in technical data and verified methodologies.

Perusahaan berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 80,06 ton CO_2e melalui berbagai inisiatif pengendalian emisi. Inisiatif tersebut mencakup pemantauan kualitas udara dan emisi secara berkala, pelaporan lingkungan sesuai regulasi, pengukuran kualitas limbah cair, penggunaan kendaraan operasional yang telah lulus uji emisi, pemeliharaan kendaraan secara rutin, pemanfaatan PV *Rooftop* di kantor pusat, serta kampanye internal penghematan energi. Melalui langkah-langkah tersebut, PLN Nusa Daya berkomitmen mendukung mitigasi perubahan iklim, menjaga kualitas lingkungan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

The Company reduced GHG emissions by 80.06 tonnes CO□e through various emissions control initiatives. These included regular air quality and emissions monitoring, environmental reporting in accordance with regulations, wastewater quality measurement, use of operational vehicles that passed emissions tests, routine vehicle maintenance, utilisation of PV Rooftop at the Head Office, and internal energy-saving campaigns. Through these measures, PLN Nusa Daya is committed to supporting climate change mitigation, maintaining environmental quality, and improving operational efficiency.

PLN Nusa Daya memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan tanpa penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO). Sepanjang tahun 2025, perusahaan tidak menggunakan, memproduksi, mengimpor, maupun mengekspor BPO dalam bentuk apa pun. Komitmen tersebut juga tercermin dari tidak digunakannya APAR berbasis halon serta penggunaan peralatan pendingin yang telah menggunakan refrigeran ramah lingkungan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan PLN Nusa Daya terhadap upaya perlindungan lapisan ozon secara global, sekaligus sejalan dengan agenda nasional penghapusan BPO serta Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022 tentang pengesahan Amendemen Kigali atas Protokol Montreal.

PLN Nusa Daya ensures that all operational activities are carried out without the use of Ozone-Depleting Substances (ODS). Throughout 2025, the Company did not use, produce, import, or export ODS in any form. This commitment is also reflected in the non-use of halon-based fire extinguishers and the use of cooling equipment with environmentally friendly refrigerants. This measure demonstrates PLN Nusa Daya's support for global efforts to protect the ozone layer and is aligned with the national ODS phase-out agenda as well as Presidential Regulation Number 129 of 2022 concerning ratification of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.

Pengelolaan Air dan Air Limbah

Perusahaan menerapkan manajemen sumber daya air secara menyeluruh, tidak hanya untuk mendukung kebutuhan operasional, tetapi juga untuk menjaga kualitas dan kuantitas air serta keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari mitigasi terhadap potensi dampak lingkungan, seperti penurunan kualitas air, gangguan ekosistem, risiko sanksi hukum, serta dampak sosial di masyarakat sekitar. Dalam implementasinya, PLN Nusa Daya mengoptimalkan efisiensi penggunaan air melalui pemanfaatan sistem pemantauan berbasis digital (*smart water management system*) yang memungkinkan pengendalian konsumsi air secara *real-time*. Perusahaan juga meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah dengan memastikan seluruh proses pengolahan memenuhi baku mutu yang berlaku, serta mengembangkan inisiatif pemanfaatan kembali air (*water recycling*) untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular. Pemantauan kualitas air limbah dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, didukung sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi, serta diperkuat melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Water and Wastewater Management

The Company implements comprehensive water resource management not only to support operational needs, but also to maintain water quality and quantity and the sustainability of surrounding ecosystems. These efforts also form part of mitigation against potential environmental impacts, such as declining water quality, ecosystem disruption, legal sanction risks, and social impacts on surrounding communities. In its implementation, PLN Nusa Daya optimises water use efficiency through a digital monitoring system, or smart water management system, which enables real-time control of water consumption. The Company also improves the effectiveness of wastewater management by ensuring that all treatment processes meet applicable quality standards and by developing water recycling initiatives to support circular economy principles. Wastewater quality is monitored and documented regularly, supported by a transparent and integrated reporting system and strengthened through collaboration with relevant stakeholders.

Sumber air yang digunakan perusahaan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air tanah, air hujan, air sungai, dan air laut untuk mendukung operasional kantor serta kegiatan penunjang lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip

The Company's water sources include the Regional Water Supply Company (PDAM), groundwater, rainwater, river water, and seawater to support office operations and other supporting activities. This approach is implemented while observing responsible water resource management

pengelolaan sumber daya air yang bertanggung jawab, termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada air tanah guna mencegah potensi penurunan muka tanah dan degradasi ekosistem. Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya melakukan pengukuran dan pencatatan penggunaan air secara berkala melalui data tagihan PDAM, pencatatan operasional, serta pengukuran pada fasilitas terkait. Total pengambilan air Perusahaan tercatat sebesar 45.945,72 m^3 atau 45,95 megaliter dan penggunaan air pada tahun 2025 tercatat sebesar 15.772,25 m^3 atau 15,77 megaliter.

Dalam mendukung efisiensi air, perusahaan juga menerapkan prinsip *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* (3R) melalui berbagai inisiatif, antara lain optimalisasi sistem pengolahan air laut dan air payau (SWRO/BWRO), peningkatan sistem demineralisasi (*Mixbed*), revitalisasi fasilitas pemantauan kualitas air, pembangunan infrastruktur *Water Treatment Plant* (WTP) dan *Sewage Treatment Plant* (STP), serta pemeliharaan berkala instalasi lingkungan di unit operasional. Inisiatif tersebut berkontribusi pada efisiensi penggunaan air dan peningkatan keandalan sistem pengelolaan air Perusahaan.

PLN Nusa Daya juga menerapkan pengelolaan air limbah secara bertanggung jawab untuk menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan telah memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, yang mengatur pembuangan air limbah ke badan air laut dengan ketentuan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009. Sepanjang tahun 2025, volume pembuangan air limbah tercatat sebesar 1.203,013 m^3 atau 1,20 megaliter.

Pengelolaan Limbah

Pengelolaan ini bertujuan menjaga kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, Perusahaan menerapkan prinsip *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (3R) untuk mengurangi timbulan limbah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen terhadap ekonomi sirkular (*circular economy*) yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan jangka panjang.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional meliputi limbah terkontaminasi B3, minyak dan pelumas bekas, kain majun, filter udara, *sludge* IPAL, aki bekas, wadah B3, serta filter solar dan oli. Pengelolaan dilakukan melalui tahapan identifikasi, pemilahan, penyimpanan sementara di

principles, including efforts to reduce dependence on groundwater to prevent potential land subsidence and ecosystem degradation. Throughout 2025, PLN Nusa Daya regularly measured and recorded water use through PDAM billing data, operational records, and measurements at relevant facilities. Total water withdrawal by the Company reached 45,945.72 m^3 or 45.95 megaliters, with 2025 water usage recorded at 15,772.25 m^3 or 15.77 megaliters.

To support water efficiency, the Company also applies Reduce, Reuse, and Recycle (3R) principles through various initiatives, including optimisation of seawater and brackish water treatment systems (SWRO/BWRO), improvement of the demineralisation system (Mixbed), revitalisation of water quality monitoring facilities, construction of Water Treatment Plant (WTP) and Sewage Treatment Plant (STP) infrastructure, and regular maintenance of environmental installations at operational units. These initiatives contribute to water use efficiency and enhance the reliability of the Company's water management system.

PLN Nusa Daya also implements responsible wastewater management to maintain environmental quality around its operational areas. As part of regulatory compliance, the Company holds a Liquid Waste Discharge Permit (IPLC) from the Balikpapan City Environmental Agency, which regulates wastewater discharge into seawater bodies in accordance with the quality standards under Minister of Environment Regulation Number 08 of 2009. Throughout 2025, the volume of wastewater discharge was recorded at 1,203.013 m^3 or 1.20 megaliters.

Waste Management

Waste management aims to maintain environmental quality, including water, air, and soil, and to ensure compliance with applicable provisions. In its implementation, the Company applies Reduce, Reuse, and Recycle (3R) principles to reduce waste generation while optimising the reuse of materials that still have useful value. This approach also reflects the Company's commitment to a circular economy, which focuses on resource efficiency and long-term sustainability.

Hazardous and Toxic Waste (B3) is managed responsibly in accordance with the prevailing laws and regulations. B3 waste generated from operational activities includes B3-contaminated waste, used oil and lubricants, rags, air filters, WWTP sludge, used batteries, B3 containers, and diesel and oil filters. Management is carried out through identification, sorting, temporary storage at the Hazardous and Toxic Waste Temporary Storage Facility

Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, hingga penyerahan kepada pihak ketiga berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk proses pengangkutan, pemanfaatan, atau pemusnahan. Seluruh proses juga dilaporkan secara berkala melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sebagai bentuk kepatuhan dan transparansi. Sepanjang tahun 2025, seluruh limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku melalui pihak ketiga berizin dengan total timbulan sebesar 625,72 ton. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap penggunaan *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs) pada seluruh peralatan, dan hasilnya tidak ditemukan penggunaan PCBs maupun timbulan limbah yang berasal dari senyawa tersebut. Hal ini menunjukkan dukungan perusahaan terhadap target penghapusan PCBs secara global sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi *Stockholm.*

(TPS Limbah B3), and handover to third parties licensed by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for transportation, recovery, or disposal. The entire process is also reported periodically through the Electronic Environmental Reporting Information System (SIMPEL) as a form of compliance and transparency. Throughout 2025, all B3 waste generated was managed in accordance with applicable provisions through licensed third parties, with total generation of 625.72 tonnes. In addition, inspections of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) use in all equipment found no PCB use or waste generation from these compounds. This demonstrates the Company's support for the global target to eliminate PCBs as mandated under the Stockholm Convention.

Untuk limbah non-B3, PLN Nusa Daya melaksanakan pengelolaan secara terstruktur melalui pemilahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Dinas Kebersihan Kota. Limbah non-B3 yang dihasilkan meliputi kertas, plastik, kardus, sampah makanan, kayu, logam, serta sampah kebun dan taman. Upaya pengurangan limbah juga dilakukan melalui penerapan prinsip 3R, antara lain penggunaan kembali kertas untuk keperluan internal, penggunaan botol minum pribadi *(tumbler),* optimalisasi pemakaian kertas dua sisi, serta penyajian konsumsi rapat dengan sistem prasmanan untuk mengurangi kemasan sekali pakai. Sepanjang tahun 2025, total limbah non-B3 yang dihasilkan tercatat sebesar 16,45 ton. Dari jumlah tersebut, 0,89 ton limbah berhasil dialihkan dari pembuangan akhir melalui upaya pemanfaatan ulang. Sementara itu, limbah non B3 yang dikirimkan ke pembuangan akhir tercatat sebesar 11,00 ton.

For non-B3 waste, PLN Nusa Daya carries out structured management through sorting at the Temporary Storage Site (TPS) and cooperation with third parties, including the City Sanitation Department. Non-B3 waste generated includes paper, plastic, cardboard, food waste, wood, metal, and garden and park waste. Waste reduction efforts are also carried out through 3R principles, including paper reuse for internal purposes, the use of personal tumblers, optimisation of double-sided paper use, and buffet-style meeting refreshments to reduce single-use packaging. Throughout 2025, total non-B3 waste generated was recorded at 16.45 tonnes. Of this amount, 0.89 tonnes were diverted from final disposal through reuse efforts, while 11.00 tonnes of non-B3 waste were sent to final disposal.

Penanganan Tumpahan

PLN Nusa Daya menerapkan berbagai upaya pengendalian secara preventif untuk mencegah terjadinya tumpahan limbah yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan operasional secara berkala, penerapan standar dan prosedur kerja yang aman, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam mengidentifikasi dan menangani potensi risiko lingkungan, baik yang berasal dari limbah cair maupun bahan kimia. Selain itu, perusahaan juga terus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan operasional melalui penerapan praktik kerja yang bertanggung jawab guna meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden lingkungan. Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat kejadian tumpahan limbah cair dari seluruh aktivitas operasional perusahaan.

Spill Management

PLN Nusa Daya implements various preventive control measures to prevent waste spills that may potentially affect the environment. These measures are carried out through regular operational monitoring, implementation of safe work standards and procedures, and enhanced preparedness in identifying and managing potential environmental risks, whether arising from liquid waste or chemicals. In addition, the Company continues to improve awareness and operational discipline through responsible work practices to minimise the possibility of environmental incidents. As of the end of 2025, there were no liquid waste spill incidents from any of the Company's operational activities.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan operasional dengan memastikan tidak adanya aktivitas yang dilakukan di kawasan konservasi maupun area bernilai konservasi tinggi. Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat kegiatan operasional yang bersinggungan langsung dengan wilayah tersebut, sehingga risiko gangguan terhadap habitat alami dapat diminimalkan.

Selain itu, PLN Nusa Daya secara berkelanjutan melaksanakan program penghijauan di lingkungan kantor maupun sekitar area operasional sebagai upaya meningkatkan tutupan vegetasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara, pengendalian iklim mikro, serta peningkatan ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan juga mengintegrasikan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15 mengenai ekosistem daratan. Sepanjang tahun 2025, PLN Nusa Daya melaksanakan kegiatan penanaman pohon di berbagai wilayah operasional dengan total sebanyak 4.500 pohon.

Biodiversity Conservation

Biodiversity plays an important role in maintaining ecosystem balance and environmental sustainability. The Company applies the precautionary principle across all operational activities by ensuring that no activities are carried out in conservation areas or areas of high conservation value. As of the end of 2025, there were no operational activities directly intersecting with such areas, thereby minimising the risk of disturbance to natural habitats.

In addition, PLN Nusa Daya continuously implements greening programmes within office areas and around operational areas as part of efforts to increase vegetation cover. These activities contribute to improved air quality, microclimate control, and the sustainable availability of natural resources. Within the framework of Social and Environmental Responsibility (TJSL), the Company also integrates biodiversity conservation activities as part of its support for Sustainable Development Goal (SDG) 15 on terrestrial ecosystems. Throughout 2025, PLN Nusa Daya carried out tree-planting activities in various operational areas, planting a total of 4,500 trees.

Pengaduan Terkait Lingkungan

PLN Nusa Daya berkomitmen untuk menjalankan tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel melalui penyediaan mekanisme pengaduan lingkungan bagi masyarakat serta pemangku kepentingan. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun informasi terkait dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan.

Environmental Complaints

PLN Nusa Daya is committed to implementing transparent and accountable environmental governance by providing an environmental complaints mechanism for the public and stakeholders. This mechanism serves as a two-way communication channel for submitting complaints, feedback, and information related to the environmental impacts of the Company's operational activities.

Saluran Pengaduan Terkait Lingkungan
Environmental Complaint Channels:

PT PLN Nusa Daya
Jl. Letjen ZA Maulani RT 41 No. 78
Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan, Kalimantan Timur

Email : plnnd@plnnusadaya.co.id Telp: (0542) 8703981, (0542) 8506674

Seluruh pengaduan yang diterima dikelola oleh Bidang K3L dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, dengan memastikan setiap isu lingkungan dapat diselesaikan secara tepat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat pengaduan terkait dampak lingkungan yang diterima perusahaan, serta tidak ditemukan sanksi administratif maupun denda atas pelanggaran ketentuan lingkungan.

All complaints received are managed by the HSSE Division and followed up in accordance with applicable procedures, ensuring that every environmental issue is resolved appropriately, promptly, and properly documented. As of the end of 2025, the Company had not received any complaints related to environmental impacts, nor were there any administrative sanctions or fines for violations of environmental provisions.

LAMPIRAN

ATTACHMENT



PLN
Nusa Daya



PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER 2025/ *31 DECEMBER 2025*

PLN Nusa Daya

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Feby Joko Priharto
Alamat	:	Jl. Letjen ZA Maulani RT.41 No.78 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur
Telepon	:	(0542) 8703981
Jabatan	:	Direktur Utama,
Nama	:	Zulhendri
Alamat	:	Jl. Letjen ZA Maulani RT.41 No.78 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur
Telepon	:	0811 1142 310
Jabatan	:	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

Name	:	*Feby Joko Priharto*
Address	:	*Jl. Letjen ZA Maulani RT.41 No.78 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur*
Telephone	:	*(0542) 8703981*
Position	:	*President Director,*
Name	:	*Zulhendri*
Address	:	*Jl. Letjen ZA Maulani RT.41 No.78 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur*
Telephone	:	*0811 1142 310*
Position	:	*Finance, Risk Management, and Human Capital Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya and subsidiary (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;*

   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

For and on behalf of the Board of Directors.

JAKARTA
12 Juni/*June* 2026



Feby Joko Priharto
Direktur Utama/
President Director

Zulhendri
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital
Finance, Risk Management, and Human Capital Director

Jl. Letjen Z.A. Maulani RT 41 No.78, Balikpapan (**Head Office**)
Jl. Adityawarman No. 55 - Gedung Recapital Lt.2, Jakarta Selatan (**Strategic Office**)
E - plnnd@plnnusadaya.co.id
T - (0542) 8703981 - (0542) 8506674
W - www.plnnusadaya.co.id

Laporan/*Report* No. 01056/2.1457/AU.1/02/1782-1/1/VI/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
12 Juni/*June* 2026

Dedy Lesmana, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1782

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya
01056/2.1457/AU.1/02/1782-1/1/VI/2026

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	241,122	137,933	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	5	997,612	690,692	*Trade receivables*
Piutang non-usaha, bagian lancar		43,348	32,411	*Non-trade receivables, current portion*
Persediaan	6	167,093	55,334	*Inventories*
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	12a			*Prepaid taxes, current portion*
- Pajak lainnya		139,718	86,237	*Other taxes -*
Uang muka dan biaya dibayar di muka		10,297	8,160	*Advances and prepayments*
Piutang sewa - jatuh tempo dalam satu tahun	8	46,748	-	*Lease receivables - current maturity*
Jumlah aset lancar		**1,645,938**	**1,010,767**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang non-usaha, bagian tidak lancar		-	12,805	*Non-trade receivables, non-current portion*
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	12a			*Prepaid taxes, non-current portion*
- Pajak penghasilan badan		11,808	17,084	*Corporate income tax -*
Piutang sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	8	67,693	-	*Lease receivables - net of current portion*
Aset tetap	7	350,775	238,293	*Fixed assets*
Aset hak-guna	11a	73,950	36,543	*Right-of-use assets*
Aset pajak tangguhan	12d	8,990	8,098	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lain		41,911	26,748	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**555,127**	**339,571**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**2,201,065**	**1,350,338**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	9	385,795	293,081	*Trade payables*
Utang lain-lain	13	555,931	203,571	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	10	196,037	148,345	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa, jangka pendek	11b	101,033	15,544	*Lease liabilities, current portion*
Utang pajak	12b	8,294	23,524	*Taxes payable*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**1,247,090**	**684,065**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa, jangka panjang	11b	106,060	21,365	*Lease liabilities, non-current portion*
Liabilitas imbalan pascakerja		30,032	47,010	*Post-employment benefit liabilites*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**136,092**	**68,375**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1,383,182**	**752,440**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham:				*Share capital:*
Modal dasar - 316.000.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh - 79.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham	14	79,000	79,000	*Authorised - 316,000,000 shares, issued and fully paid - 79,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share*
Tambahan modal disetor	14	25,593	25,593	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Ditentukan penggunaannya		15,076	15,076	*Appropriated -*
- Tidak ditentukan penggunaannya		635,206	423,601	*Unappropriated -*
Penghasilan komprehensif lain		63,006	54,626	*Other comprehensive income*
		817,881	**597,896**	
Kepentingan non-pengendali		2	2	***Non-controlling interests***
JUMLAH EKUITAS		**817,883**	**597,898**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2,201,065**	**1,350,338**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
Pendapatan	15	4,323,648	3,246,092	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	16	(3,725,236)	(2,839,074)	*Cost of revenue*
LABA BRUTO		**598,412**	**407,018**	***GROSS PROFIT***
Beban usaha	17	(202,618)	(143,588)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan		752	985	*Finance income*
Beban keuangan		(34,063)	(22,080)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih	18	(76,723)	(13,290)	*Other expenses, net*
LABA SEBELUM PAJAK		**285,760**	**229,045**	***PROFIT BEFORE TAX***
Beban pajak penghasilan	12c	(71,155)	(70,077)	*Income tax expenses*
LABA TAHUN BERJALAN		**214,605**	**158,968**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Surplus revaluasi aset tetap		-	6,481	*Fixed assets revaluation*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		10,743	(6,667)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait		(2,363)	98	*Related income tax*
		8,380	**(88)**	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**222,985**	**158,880**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				*Income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		214,605	158,968	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		-	-	*Non-controlling interests*
		214,605	**158,968**	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		222,985	158,880	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		-	-	*Non-controlling interests*
		222,985	**158,880**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to the owners of the parent entity*								
			Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*				
	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan komprehensif lain/*other comprehensive income*	Jumlah/*Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo per 1 Januari 2024	**79,000**	**25,593**	**15,076**	**266,633**	**54,714**	**441,016**	**2**	**441,018**	***Balance as at 1 January 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	158,968	-	158,968	-	158,968	*Profit for the year*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	-	(5,143)	(5,143)	-	(5,143)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, after tax*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	5,055	5,055	-	5,055	*Fixed assets revaluation*
Dividen	-	-	-	(2,000)	-	(2,000)	-	(2,000)	*Dividend*
Saldo per 31 Desember 2024	**79,000**	**25,593**	**15,076**	**423,601**	**54,626**	**597,896**	**2**	**597,898**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	214,605	-	214,605	-	214,605	*Profit for the year*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-		8,380	8,380	-	8,380	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, after tax*
Dividen	-	-	-	(3,000)	-	(3,000)	-	(3,000)	*Dividend*
Saldo per 31 Desember 2025	**79,000**	**25,593**	**15,076**	**635,206**	**63,006**	**817,881**	**2**	**817,883**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	3,902,287	2,977,592	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(3,997,813)	(2,900,033)	*Payments to suppliers and employees*
Penerimaan penghasilan keuangan	752	985	*Receipts of finance income*
Pembayaran beban keuangan	(34,062)	(22,080)	*Payments of finance costs*
Penerimaan restitusi pajak	121,404	81,938	*Receipts of tax refund*
Pembayaran pajak penghasilan	(80,687)	(60,256)	*Payments of income tax*
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	**(88,119)**	**78,146**	***Net cash (used in)/provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(143,006)	(69,988)	*Acquisitions of fixed assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(143,006)**	**(69,988)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan *Notional Pooling*	4,812,339	3,082,053	*Proceeds from Notional Pooling*
Pembayaran *Notional Pooling*	(4,431,249)	(3,058,699)	*Payment of Notional Pooling*
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(3,000)	(2,000)	*Dividend paid to owner of the parent entity*
Pembayaran liabilitas sewa	(43,776)	(40,865)	*Payments of lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**334,314**	**(19,511)**	***Net cash provided by/(used in) financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**103,189**	**(11,353)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**137,933**	**149,286**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**241,122**	**137,933**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 15 Desember 2003 dari H. Haryanto S.H., MBA, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03538HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Februari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 2004, Tambahan No. 410/2004. Pada tanggal 30 November 2023 dalam akta nomor 33 sesuai surat keputusan No. AHU-0076025.AH.01.02.TAHUN 2023, Perusahaan secara resmi berganti nama menjadi Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya.

Berdasarkan Surat No. S-392/MBU/2003, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") selaku pemegang saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") telah menyetujui pendirian Perusahaan yang sebelumnya merupakan salah satu unit di lingkungan PLN yaitu Unit Wilayah VI Kalselteng, Cabang Tarakan. Perusahaan didirikan dengan setoran saham berupa uang tunai dan pengalihan aset dan liabilitas yang sebelumnya dimiliki oleh PLN Unit Wilayah Cabang VI Kalselteng, Cabang Tarakan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 12 tanggal 30 November 2023 dari Novianti, S.H., M. Kn notaris di Balikpapan, tentang perubahan nama perseroan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0076025.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 06 Desember 2023.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya sejak tanggal 1 Januari 2004.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan penyediaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan di wilayah Indonesia Timur, yang mencakup Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Entitas induk Perusahaan adalah PLN. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan.

b. Lain-lain

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Agung Nugraha	
Direktur Utama	Feby Joko Priharto	
Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha	Reny Wahyu Setiaswan	
Direktur Keuangan dan SDM	Zulhendri	

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (the "Company") was established based on Deed No. 18 dated 15 December 2003 of H. Haryanto S.H., MBA, a notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-03538HT.01.01.TH.2004 dated 13 February 2004, and was published in State Gazette No. 35 dated 30 April 2004, Supplement No. 410/2004. On 30 November 2023, in deed number 33 according to decision letter no. AHU-0076025.AH.01.02.TAHUN 2023, the Company officially changed its name to Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya.

Based on letter No. S-392/MBU/2003, the Minister of State Capital Investment and Development of State-Owned Enterprise ("SOE") as the shareholder of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), has approved the establishment of the Company, which previously was one of the business unit of PLN, known as Unit Region VI Kalselteng, Tarakan Branch. The Company was established through subscription of shares paid through cash and transfer of assets and liabilities which were previously owned by PLN Unit Region VI Kalselteng, Tarakan Branch.

The Company's Article of Association has been amended several times, the latest by notarial deed No. 12 dated 30 November 2023 from Novianti, S.H., M. Kn, notary in Balikpapan, regarding the changes of the name of company, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0076025.AH.01.02. TAHUN 2023 dated 06 December 2023.

The Company started its commercial operations on 1 January 2004.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's objective is to providing Operation and Maintenance Services for Power Generation, Transmission, Distribution, and Customer Services in the Eastern Indonesia region, covering the islands of Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua.

The Company's parent entity is PLN. The Company's head office is domiciled and located in Balikpapan.

b. Others

The composition of the Company's Commissioner and Board of Directors as at 31 December 2025 and 2024 was as follows:

Commissioner	Agung Nugraha	
President Director	Feby Joko Priharto	
Operations and Business Development Director	Reny Wahyu Setiaswan	
Finance and HR Director	Zulhendri	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak

***1. GENERAL** (continued)*

c. Subsidiary

Entitas anak/ *Subsidiary*	Lokasi/ *Location*	Aktivitas bisnis/ *Business activities*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*	
				2025	2024	2025	2024
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*							
PT Paguntaka Cahaya Nusantara ("PCN")	Balikpapan	Perindustrian, perdagangan, pembangunan, jasa, pengangkutan dan perbengkelan/ *Industry, trading, construction,service, transportation and workshop*	2017	99.96%	99.96%	352,190	227,371

Pada tanggal 8 Desember 2017, Perusahaan mendirikan entitas anak, PCN, yang berlokasi di Balikpapan. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.499 dengan persentase kepemilikan sebesar 99,96%.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

On 8 December 2017, the Company established a subsidiary, PCN, located in Balikpapan. Total paid-up capital amounted to Rp2,499 with ownership percentage of the Company is 99.96%.

In these consolidated financial statements, the Company and the subsidiary are collectively referred to as the "Group".

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Berikut ini adalah kebijakan akuntasi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan akrual basis. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengakuan historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan kebijakan akuntansi terkait.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that are prepared in accordance with the related accounting policies.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar baru dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- PSAK 117 "Kontak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Standar akuntansi baru dan revisi tertentu yang telah diterbitkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and judgements. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. Those areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following new standards and amendments to accounting standards which are effective from 1 January 2025 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current year:

- *SFAS 117 "Insurance Contracts";*
- *Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability"*

Certain new and amended accounting standards which have been published that are not mandatory for the year beginning 1 January 2025 and have not been early adopted by the Group, are as follows:

Effective 1 January 2026

- *Amendments to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments*
- *Amendments to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity*
- *Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control"*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, dan yang tidak diterapkan dini oleh Grup, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2027

- PSAK No. 119 dan Amendemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan"

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

  PSAK No. 118 menggantikan PSAK No. 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen ("UKTM"), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan Grup dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK No. 118.

  Meskipun PSAK No. 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Manajemen saat ini sedang menilai dampak penerapan standar baru dan amendemen ini pada laporan keuangan Grup. Dari penilaian awal secara garis besar yang dilakukan, standar yang dapat berdampak signifikan terhadap Grup adalah PSAK No. 118, dengan dampak potensial yang teridentifikasi sebagai berikut:

- Meskipun adopsi PSAK No. 118 tidak akan berpengaruh pada laba bersih Grup, Grup mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")** (continued)*

New and amended accounting standards issued but not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2025, and which have not been early adopted by the Group, are as follows: (continued)

Effective 1 January 2027

- *SFAS No. 119 and amendments to SFAS No. 119 "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures"*

- *SFAS No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

  SFAS No. 118 supersedes SFAS No. 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures ("MPMs"), allowing investors to understand management's view of the Group's financial performance and how these measures compare to those defined in SFAS No. 118.

  Even though SFAS No. 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

Management is currently assessing the impacts of applying the new and amended standards on the Group's financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the standard which may have significant impact to the Group is SFAS No. 118, with the following potential impacts identified:

- *Although the adoption of SFAS No. 118 will have no impact on the Group s net profit, the Group expects that Grouping items of income and expenses in the statement of profit or loss into the new categories will impact how operating profit is calculated and reported.*

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Manajemen saat ini sedang menilai dampak penerapan standar baru dan amendemen ini pada laporan keuangan Grup. Dari penilaian awal secara garis besar yang dilakukan, standar yang dapat berdampak signifikan terhadap Grup adalah PSAK No. 118, dengan dampak potensial yang teridentifikasi sebagai berikut: (lanjutan)

- Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama mungkin akan berubah akibat penerapan konsep 'ringkasan terstruktur yang berguna' dan prinsip yang ditingkatkan mengenai agregasi dan disagregasi.

- Grup tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam informasi yang saat ini diungkapkan dalam catatan, karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi material tetap tidak berubah; namun, cara pengelompokan informasi tersebut mungkin berubah sebagai akibat dari prinsip agregasi/disagregasi. Selain itu, akan ada pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan untuk:

  - UKTM;
  - rincian jenis beban untuk pos-pos yang disajikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi laporan laba rugi – rincian ini hanya diperlukan untuk beberapa jenis beban tertentu; dan

  - untuk periode tahunan pertama penerapan PSAK No. 118, rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara angka yang telah disajikan ulang berdasarkan penerapan PSAK No. 118 dan angka yang sebelumnya disajikan berdasarkan PSAK No. 201.

- Dari perspektif laporan arus kas, akan ada perubahan cara penyajian bunga diterima dan bunga dibayar. Bunga dibayar akan disajikan sebagai arus kas pendanaan dan bunga diterima akan disajikan sebagai arus kas investasi, yang merupakan perubahan dari penyajian saat ini sebagai bagian dari arus kas operasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")** (continued)*

Management is currently assessing the impacts of applying the new and amended standards on the Group's financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the standard which may have significant impact to the Group is SFAS No. 118, with the following potential impacts identified: (continued)

- *The line items presented on the primary financial statements might change as a result of the application of the concept of 'useful structured summary' and the enhanced principles on aggregation and disaggregation.*

- *The Group does not expect there to be a significant change in the information that is currently disclosed in the notes because the requirement to disclose material information remains unchanged; however, the way in which the information is grouped might change because of the aggregation/disaggregation principles. In addition, there will be significant new disclosures required for:*

  - *MPM;*
  - *a break-down of the nature of expenses for line items presented by function in the operating category of the statement of profit or loss – this break-down is only required for certain nature expenses; and*
  - *for the first annual period of application of SFAS No. 118, a reconciliation for each line item in the statement of profit or loss between the restated amounts presented by applying PSAK No. 118 and the amounts previously presented applying SFAS No. 201.*

- *From a cash flow statement perspective, there will be changes to how interest received and interest paid are presented. Interest paid will be presented as financing cash flows and interest received as investing cash flows, which is a change from current presentation as part of operating cash flows.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Entitas anak

Konsolidasi

Entitas anak merupakan entitas (termasuk entitas bertujuan terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia (“Rp” atau “IDR”), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation

Subsidiary

Consolidation

Subsidiary is the entity (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiary have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

d. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the “functional currency”). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah (“Rp” or “IDR”), which is the Company’s functional currency and the Group’s presentation currency.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, masing-masing adalah sebesar Rp16.782 dan Rp16.162 untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS$").

e. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup telah mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan pihak berelasi, termasuk entitas berelasi dengan Pemerintah, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***d. Foreign currency translation** (continued)*

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The exchange rates used as at 31 December 2025 and 2024, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were Rp16,782 and Rp16,162 to 1 United States Dollars ("US Dollars" or "US$"), respectively.

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in SFAS 224, "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Group with the related parties, including Government-related entities, are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

Transactions with the related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of transactions between unrelated parties.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

- **Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran**

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi).

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kas tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

f. Financial instrument

i. Financial assets

- ***Classification, recognition and measurement***

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *those to be measured at amortised cost; and*
- *those to be measured subsequently at fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), or through profit or loss ("FVTPL").*

The classification depends on the Group's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition. As at 31 December 2025 and 2024, the Group only had financial assets measured at amortised cost.

Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments that are held under a "hold to collect" business model and that have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

- **Penghentian pengakuan**

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

- **Penurunan aset keuangan**

Grup menilai berdasarkan basis forward-looking untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("KKE") terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***f. Financial instrument** (continued)*

***i. Financial assets** (continued)*

- ***Derecognition***

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

- ***Impairment of financial assets***

The Group assesses, on a forward-looking basis, the expected credit losses ("ECL") associated with its financial assets carried at amortised cost. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that are indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

- **Penurunan aset keuangan** (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk saldo piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut

- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi).

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***f. Financial instrument** (continued)*

***i. Financial assets** (continued)*

- ***Impairment of financial assets** (continued)*

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for trade receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review of any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

ii. Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities in the following measurement categories:

- *financial liabilities measured at amortised cost; and*
- *financial liabilities measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").*

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. As at 31 December 2025, the Group had financial liabilities measured at amortised cost.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not restricted for use.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas KKE.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2f untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Perusahaan.

i. Persediaan

Persediaan dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang.

j. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, “Sewa”. Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216, “Aset tetap” yaitu tanah dan hak atas tanah diakui pada pengakuan awal sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

h. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less a provision for ECL.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2f for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Company’s receivables.

i. Inventories

Inventories are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage.

j. Fixed assets

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 116, “Leases”. If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 216, “Fixed assets” under which land and land rights are initially recognised at cost and not depreciated.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan;
- Instalasi dan mesin pembangkit; dan
- Perlengkapan transmisi.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION* *(continued)*

j. Fixed assets *(continued)*

Fixed assets are initially recognised at cost which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

The following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land and land rights;*
- *Buildings;*
- *Installations and power plant; and*
- *Transmission equipment.*

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("OJK"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the fixed assets

Increases in the carrying amount arising on revaluation of fixed assets that use the revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Fixed assets are depreciated to their residual value using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Instalasi dan mesin	12 - 40	*Installations and machinery*
Perlengkapan transmisi	20	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	3 - 4	*General equipment*
Kendaraan bermotor	4	*Motor vehicles*

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2l).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jika aset yang direvaluasi dihapuskan, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset non-keuangan yang diamortisasi atau disusutkan diuji untuk penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***j. Fixed assets** (continued)*

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2l).

The costs of repair and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When revalued assets are disposed, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Assets not used in operations consist of fixed assets that will be disposed. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the fixed assets.

Construction in progress

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of fixed assets. Construction in progress is transferred to the respective fixed assets account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

k. Impairment of non-financial assets

Non-current assets that are subject to depreciation or amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash generating unit).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Aset tersebut yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur dengan menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK yang lain.

l. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

m. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***k. Impairment of non-financial assets** (continued)*

Those assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal of impairment losses would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Any reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS.

l. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

m. Leases

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dan jika telah ditentukan sebelumnya:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***m. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used and if the use is predetermined:*
  1. *The Group has the right to operate the asset, or*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***m. Leases** (continued)*

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability are the fixed payments, including in-substance fixed payments, less any lease incentive receivable.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the consolidated statement of financial position.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***m. Leases** (continued)*

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup: (lanjutan)

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pemberi sewa

Ketika Grup bertindak sebagai pemberi sewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Selain itu, Grup menyewakan kembali beberapa aset yang diperoleh melalui sewa utama dengan masa sewa lebih dari 12 bulan pada saat dimulainya.

Ketika Grup bertindak sebagai pemberi sewa perantara, Grup harus mengklasifikasikan subsewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sebagai berikut:

- Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek dimana Grup, sebagai penyewa, subsewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi; dan
- Jika tidak, subsewa diklasifikasikan dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan merujuk pada aset yang mendasarinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group: (continued)

- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease, if not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease period.

In addition, the Group subleases several assets acquired under head leases with lease terms exceeding 12 months at commencement.

When the Group acts as an intermediate lessor, Group shall classify the sublease as a finance lease or an operating lease as follows:

- *If the head lease is a short-term lease that the Group, as a lessee, the sublease shall be classified as an operating lease; and*
- *Otherwise, the sublease is classified by reference to the right-of-use asset arising from the head lease, rather than by reference to the underlying asset.*

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pension berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

n. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the Manpower Regulations or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Regulations or the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana beban tersebut terjadi.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas dan bantuan kematian. Nilai imbalan yang diberikan didasarkan pada PKB Grup.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***n. Employee benefits** (continued)*

Post-employment benefits (continued)

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the consolidated statement of other comprehensive income in the period in which the expense arise.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to privately pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long-leave allowance, disability benefit and death benefit. The benefits paid are based on the Group's CLA.

Long-leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

o. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Grup mengidentifikasi beberapa kontrak dengan pelanggan dan memiliki pendapatan dari jasa operasi pemeliharaan dan *asset management.*

Pendapatan dari jasa operasi pemeliharaan diakui dengan berdasarkan pekerjaan yang sudah diselesaikan selama jangka waktu jasa tersebut diberikan. Untuk kontrak dengan harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan jasa aktual yang disediakan sampai akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total jasa yang akan disediakan.

Pendapatan kontrak manajemen aset dan *ancillary services* diakui sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan atas dasar pekerjaan yang diselesaikan kepada pelanggan. Perusahaan menggunakan metode keluaran untuk mengukur progres pekerjaan berdasarkan pekerjaan atau peta waktu yang sudah diselesaikan dengan pelanggan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

n. Employee benefits *(continued)*

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

o. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

p. Revenues and expenses recognition

The Group identified several contracts with customers and has revenue from operation maintenance services and asset management.

Revenue from operation maintenance service is recognised on the basis of the work completed over time in which the services are rendered. For fixed price contracts, revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided.

Revenue from asset management contract and ancillary services is recognised over time when the services are provided on the basis of work completed to customers. The Company uses output methods for measuring progress of works based on the delivered works/milestone with the customers.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

q. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

p. Revenues and expenses recognition *(continued)*

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrued basis.

q. Current and deferred income tax

The tax expense comprises current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas yang sama.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

q. Current and deferred income tax *(continued)*

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entity.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut Dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from those estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

***3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES** (continued)*

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements and estimates are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Estimated useful lives of fixed assets

The useful life of each item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of fixed assets.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah, (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan kerja didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

***3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES** (continued)*

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for employee benefits obligation benefits are based in part on current market conditions.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. *CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
Kas	9,210	5,317	*Cash on hand*
Kas di bank:			*Cash in banks:*
Pihak ketiga	95	-	*Third parties*
Pihak berelasi	206,817	82,616	*Related parties*
Deposito berjangka:			*Time deposits:*
Pihak berelasi	25,000	50,000	*Related parties*
Jumlah	**241,122**	**137,933**	***Total***

Lihat Catatan 19 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 19 for details of related party transactions.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi	997,612	690,692	*Related parties*

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

	2025	2024	
Balum jatuh tempo	951,440	503,542	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 s/d 90 hari	38,542	103,406	*1 to 90 days*
91 s/d 360 hari	6,731	71,395	*91 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	899	12,349	*More than 360 days*
	997,612	690,692	

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore, the allowance for ECL is not necessary.

Lihat Catatan 19 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 19 for details of related party transactions.

6. PERSEDIAAN / *6. INVENTORIES*

	2025	2024	
Peralatan kerja	86,087	25,209	*Work equipments*
Material	82,449	30,817	*Materials*
Subjumlah	168,536	56,026	*Subtotal*
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(1,443)	(692)	*Allowance for decline in value of inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**167,093**	**55,334**	***Total, net***

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	692	595	*Balance at beginning of year*
Penambahan	751	97	*Additions*
Saldo akhir tahun	**1,443**	**692**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2025 and 2024.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP / *7. FIXED ASSETS*

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	***Reklasifikasi. Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	65,195	10,345	-	75,540	*Land*
Bangunan	78,155	6,618	-	84,773	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	46,613	60,644	-	107,257	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	1,144	28,712	-	29,856	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	68,818	21,046	-	89,864	*General equipment*
Kendaraan bermotor	23,134	12,712	-	35,846	*Motor vehicles*
	283,059	140,077	-	423,136	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	5,609	2,929	-	8,538	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	25,562	-	-	25,562	*Assets not used in operations*
	314,230	143,006	-	457,236	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	-	(4,633)	-	(4,633)	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	(4,435)	-	(4,435)	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	(753)	-	(753)	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	(46,990)	(13,117)	-	(60,107)	*General equipment*
Kendaraan bermotor	(3,385)	(7,586)	-	(10,971)	*Motor Vehicles*
	(50,375)	(30,524)	-	(80,899)	
Aset tidak digunakan dalam operasi	(25,562)	-	-	(25,562)	*Assets not used in operations*
Nilai buku bersih	**238,293**			**350,775**	***Net book value***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	51,795	4,055	9,345	65,195	*Land*
Bangunan	82,132	10,281	(14,258)	78,155	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	47,883	27,420	(28,690)	46,613	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	3,804		(2,660)	1,144	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	60,996	7,822	-	68,818	*General equipment*
Kendaraan bermotor	8,333	14,801	-	23,134	*Motor vehicles*
	254,943	64,379	(36,263)	283,059	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	5,609	-	5,609	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	25,562	-	-	25,562	*Assets not used in operations*
	280,505	69,988	(36,263)	314,230	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	(7,079)	(4,159)	11,238	-	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	(26,859)	(1,978)	28,837	-	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	(2,520)	(149)	2,669	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	(36,537)	(10,453)	-	(46,990)	*General equipment*
Kendaraan bermotor	(685)	(2,700)	-	(3,385)	*Motor Vehicles*
	(73,680)	(19,439)	42,744	(50,375)	
Aset tidak digunakan dalam operasi	(25,562)	-	-	(25,562)	*Assets not used in operations*
Nilai buku bersih	**181,263**			**238,293**	***Net book value***

7. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban usaha (Catatan 17)	30,524	19,439	*Operating expenses (Note 17)*

Revaluasi aset

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00197/2.0012-00/PI/02/0428/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hirarki nilai wajar sesuai PSAK No. 113 dan berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2024. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

7. *FIXED ASSETS* *(continued)*

Depreciation expenses were allocated to the following:

Asset revaluation

On 31 December 2024, Management performed a revaluation of the fair value of its fixed assets which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK, in report No. 00197/2.0012-00/PI/02/0428/1/VI/2025 dated 3 June 2025.

The table below analyses the fixed assets that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 113 and based on valuation as at 31 December 2024. The different levels of fair value are defined as follows:

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2024 menggunakan/ *Fair value measurement at 31 December 2024 by level*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Pengukuran nilai wajar berulang					***Recurring fair value measurement***
Tanah	-	65,195	-	65,195	*Land*
Bangunan	-	89,393	-	89,393	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	56,142	19,308	75,450	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	-	3,813	3,813	*Transmissions equipment*
Jumlah	**-**	**210,730**	**23,121**	**233,851**	***Total***

Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

The different levels of fair value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no fixed assets which could be classified as Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the years.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah kosong dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar, sedangkan untuk tanah dan bangunan selain pembangkitan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar dan pendekatan biaya yaitu antara lain:
a. Harga jual;
b. Biaya pengganti baru;
c. Depresiasi, keusangan fungsional dan external; dan
d. Keuntungan pengembang.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan luas tanah, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

***7. FIXED ASSETS** (continued)*

The level 2 fair value of vacant land is calculated using the market approach, while for land and building except power plant is calculated using the cost approach. Data inputs that were used in the fair value determination using the market and cost approaches consist of:

a. Sales price;
b. Replacement cost new;
c. Depreciation, functional, and external obsolescence; and
d. Entrepreneurial profit.

Adjustments were made based on land area, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ *January 2024*	Depresiasi/ *Depreciation*	Keuntungan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Gain recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2024*	
Pengukuran nilai wajar berulang					***Recurring fair value measurement***
Instalasi dan mesin pembangkit	20,984	(1,823)	147	19,308	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	3,953	(149)	9	3,813	*Transmissions equipment*
Jumlah	**24,937**	**(1,972)**	**156**	**23,121**	***Total***

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, dan lainnya.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak yang terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak yang terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan atas nilai aset tetap.

The level 3 fair value is calculated through the cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants and others.

The revaluation surplus, less related income tax, has been credited to other comprehensive income and is presented as a revaluation surplus of fixed assets in the consolidation statements of changes in equity. The revaluation surplus, less related income tax, has been credited to other comprehensive income and is presented as a revaluation surplus of fixed assets in the consolidation statements of changes in equity.

As at 31 December 2025 and 2024, management believes that there was no impairment in the value of fixed assets.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *8. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian subsewa atas kendaraan dan mesin pembangkit dengan Grup PLN, dengan menggunakan aset yang sebelumnya disewa dari pihak ketiga. Perjanjian subsewa tersebut memiliki jangka waktu 2 hingga 3 tahun.

Throughout 2025, the Company entered into sublease agreements for vehicles and power plants with the PLN Group, utilising assets previously leased from third parties. These sublease agreements have lease terms ranging from 2 to 3 years.

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net lease receivables is as follows:

	2025	2024	
Piutang sewa bruto:			***Gross lease receivables:***
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	64,942	-	*Maturity within one years*
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	76,821	-	*Maturity within two to five years*
Dikurangi : pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	(27,322)	-	*Less: unrealised finance income from leases*
Piutang sewa neto	114,441	-	*Net lease receivables*
Dikurangi : bagian lancar	**(46,748)**	**-**	*Less : current portion*
Bagian tidak lancar	**67,693**	**-**	*Non-current portion*

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang sewa pembiayaan, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on finance lease receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore the allowance for ECL is not necessary.

Lihat Catatan 19 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 19 for details of related parties transactions.

9. UTANG USAHA / *9. TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak ketiga	385,795	293,081	*Third parties*

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian alat kerja, material, barang, dan jasa lainnya dalam kegiatan usaha biasa Grup.

This account represents payables to third parties arising from purchases of tools, materials, other goods and service in the Group's ordinary course of business.

10. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *10. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Kepegawaian	181,229	138,504	*Personnel*
Honorarium	11,985	6,904	*Honorarium*
Lain-lain	2,823	2,937	*Others*
	196,037	148,345	

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. SEWA / *11. LEASE*

a. Aset hak-guna / *a. Right-of-use assets*

Rincian aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the right-of-use assets as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	***Penambahan/ Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan	16,693	4,709	-	21,402	*Buildings*
Instalasi dan mesin	-	36,907	-	36,907	*Installation and machinery*
Kendaraan	92,344	45,081	(38,024)	99,401	*Vehicles*
	109,037	86,697	(38,024)	157,710	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	(12,993)	(3,885)	-	(16,878)	*Buildings*
Instalasi dan mesin	-	(4,087)	-	(4,087)	*Installation and machinery*
Kendaraan	(59,501)	(41,318)	38,024	(62,795)	*Vehicles*
	(72,494)	(49,290)	38,024	(83,760)	
Nilai buku bersih	36,543			73,950	***Net book value***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	***Penambahan/ Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan	12,333	4,360	-	16,693	*Buildings*
Kendaraan	92,865	34,726	(35,247)	92,344	*Vehicles*
	105,198	39,086	(35,247)	109,037	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	(9,535)	(3,458)	-	(12,993)	*Buildings*
Kendaraan	(59,238)	(35,510)	35,247	(59,501)	*Vehicles*
	(68,773)	(38,968)	35,247	(72,494)	
Nilai buku bersih	36,425			36,543	***Net book value***

Penyusutan dibebankan pada:

Depreciation expenses were charged to the following:

	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 16)	49,290	38,968	*Cost of revenue (Note 16)*

11. SEWA (lanjutan) / *LEASE (continued)*

b. Liabilitas sewa / *Lease liabilities*

Perusahaan membuat perjanjian atas atas kendaraan dan mesin pembangkit dengan jangka waktu sewa selama 2 sampai 3 tahun. Nilai yang akan datang dari pembayaran sewa minimum di dalam sewa guna usaha pembiayaan beserta nilai kini dari pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Company entered into agreements for vehicles and power generating equipment with lease terms ranging from 2 to 3 years. The future minimum lease payments under finance leases, together with the present value of such minimum lease payments as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

	2025	2024	
Sampai dengan 1 tahun	117,501	15,979	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	110,303	21,811	*1 to 5 years*
Jumlah pembayaran sewa minimum	227,804	37,790	*Total minimum lease payment*
Dikurangi: bunga	(20,711)	(881)	*Less: interest*
Nilai kini pembayaran sewa minimum	207,093	36,909	*Present value of minimum lease payments*
Dikurangi: porsi jangka pendek	(101,033)	(15,544)	*Less: current portion*
Porsi jangka panjang	106,060	21,365	*Non-current portion*
Beban keuangan yang dibebankan selama tahun berjalan	11,794	4,054	*Finance cost charged during the year*

12. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			***Corporate income tax***
Perusahaan			*The Company*
2025	4,969	-	*2025*
Entitas anak			*Subsidiary*
2025	3,086	-	*2025*
2024	3,094	3,721	*2024*
2023	659	3,251	*2023*
2022	-	1,558	*2022*
	11,808	8,530	
Pajak lainnya			***Other taxes***
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")			*Value Added Tax ("VAT")*
Perusahaan	139,718	92,282	*The Company*
Entitas anak	-	2,509	*Subsidiary*
	151,526	103,321	
Bagian lancar	(139,718)	(86,237)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	11,808	17,084	*Non-current portion*

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan) / *12. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			***Corporate income tax***
Perusahaan			*The Company*
2024	-	90	2024
2023	-	973	2023
Pajak lainnya			***Other taxes***
Perusahaan	7,523	17,624	*The Company*
Entitas anak	771	4,837	*Subsidiary*
	8,294	23,524	

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2025	2024	
Beban pajak kini	71,569	56,625	*Current tax expenses*
Beban pajak tangguhan	(3,255)	(1,215)	*Deferred tax expenses*
Penyesuaian pajak tahun lalu:			*Prior year adjustments:*
Pajak kini	2,841	17,910	*Current tax*
Pajak tangguhan	-	(3,243)	*Deferred tax*
	71,155	70,077	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense and the theoretical tax amount on consolidated profit before income tax is as follows:

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum pajak	286,541	229,045	*Consolidated profit before tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (22%)	63,039	50,390	*Income tax at applicable tax rate (22%)*
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(165)	(176)	*Finance income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5,440	5,196	*Non-deductible expenses*
Penyesuaian tahun lalu	2,841	14,667	*Prior year adjustments*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	71,155	70,077	*Consolidated corporate income tax expenses*

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of the deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ *January* 2025	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *(Credited)/ Charged to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2025	
Persediaan	575	(257)	-	318	*Inventories*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	10,342	(1,372)	(2,363)	6,607	*Employee benefits obligation*
Piutang sewa	-	(25,177)	-	(25,177)	*Lease receivables*
Aset tetap	(2,884)	849	-	(2,035)	*Fixed assets*
Aset hak-guna	(8,040)	(8,229)	-	(16,269)	*Right-of-use assets*
Sewa	8,105	37,441	-	45,546	*Leases*
	8,098	3,255	(2,363)	8,990	

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***12. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets** (continued)*

Details of the deferred tax assets are as follows: (continued)

	1 Januari/ *January* 2024	(dibebankan) ke laba rugi/ *(Credited)/ Charged to profit or loss*	Dikreditkan/ ke penghasilan komprehensif lain/*Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2024	
Persediaan	554	21	-	575	*Inventories*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7,688	1,130	1,524	10,342	*Employee benefits obligation*
Aset tetap	(5,188)	3,730	(1,426)	(2,884)	*Fixed assets*
Aset hak-guna	(8,014)	(26)	-	(8,040)	*Right-of-use assets*
Sewa	8,502	(397)	-	8,105	*Leases*
	3,542	4,458	98	8,098	

e. Pemeriksaan pajak

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan sedang dalam proses audit oleh DJP atas pajak penghasilan badan untuk tahun 2024. Entitas belum menerima hasil audit pajak tersebut. Manajemen berpendapat bahwa hasil audit tersebut tidak akan memberikan dampak yang akan merugikan posisi keuangan dan arus kas Grup secara material.

Pada tanggal 13 November 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pemeriksaan pajak tahun 2023 untuk pajak penghasilan badan sebesar Rp1,612. Perusahaan telah melakukan pelunasan dari seluruh nilai SKPKB tersebut pada tahun berjalan.

Pada tanggal 19 Juni 2025, Entitas anak Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") pajak badan untuk tahun pajak 2023 senilai Rp1.671 dari sejumlah Rp3.327 yang sebelumnya telah diklaim oleh Perusahaan. Pada tanggal 8 Juli 2025, Perusahaan telah menerima pelunasan sebesar Rp1.012 dari seluruh nilai SKPLB tersebut dan telah membebankan selisih dari putusan tersebut sebesar Rp1.656 dalam laba rugi tahun berjalan.

Selama tahun 2025, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ("SKPKPP") atas pajak pertambahan nilai (PPN) masing-masing sebesar Rp35.903 untuk masa pajak September sampai dengan Desember 2024 dan sebesar Rp84.489 untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2025. Seluruh jumlah pengembalian pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan dalam tahun berjalan.

e. Tax audits

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Company is being audited by the DGT for corporate income tax for the fiscal year 2024. The Company has not yet received the tax audit result. Management is of the opinion that the tax audit results will not have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

On 13 November 2025, the Company received a Tax Underpayment Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar or "SKPKB") resulting from the tax audit for fiscal year 2023 relating to corporate income tax amounting to Rp1,612. The Company has fully settled the SKPKB amount during the current year.

On 19 June 2025, the Company's subsidiary received a tax overpayment assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar or "SKPLB") for corporate income tax for the fiscal year 2023 amounting to Rp1,671 out of Rp3,327 previously claimed by the Company. On 8 July 2025, the Company received a refund of Rp1,012 from the total SKPLB amount and has recognised the difference arising from the assessment of Rp1,656 as an expense in the current year's profit or loss.

During 2025, the Company received Tax Overpayment Refund Assessment Letters (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak or "SKPKPP") of value-added tax (VAT) amounting to Rp35,903 for the September to December 2024 tax periods and Rp84,489 for the January to August 2025 tax periods. All such tax refunds were received by the Company during the year.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Grup telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp81.938 yang terdiri atas Restitusi Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 sebesar Rp3.258, PPN masa November tahun 2022 sebesar Rp4.619, PPN masa Januari – Desember tahun 2023 sebesar Rp32.898 dan PPN masa Januari – Agustus tahun 2024 sebesar Rp41.163 untuk Perusahaan.

f. Aturan Model Pilar Dua *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD")

Peraturan Pilar Dua telah disahkan atau secara substansial disahkan di yurisdiksi tempat entitas grup beroperasi. Peraturan tersebut mulai berlaku untuk tahun fiskal Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2025.

Entitas induk utama ("UPE") dari Perusahaan berada dalam lingkup autran model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua. UPE telah melakukan penilian atas potensi eksposur Grup terhadap pajak penghasilan Pilar Dua. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di yurisdiksi tempat Perushaan beroperasi berada diatas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anaknya menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

***12. TAXATION** (continued)*

***e. Tax audits** (continued)*

During the year ended 31 December 2024, The Group has received a tax refund amounting to Rp81,938, which consists of a Corporate Income Tax refund for the year 2022 of Rp3,258, VAT for November 2022 of Rp4,619, VAT for the period January – December 2023 of Rp32,898, and VAT for the period January – August 2024 of Rp41,163 for the Company.

f. Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in the jurisdictions in which the group entities operate. The legislation has become effective for the Company's financial year ended after 31 December 2025.

Ulitimate parent entity ("UPE") of the Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes. UPE has performed assessment of the Group's potential exposure to Pillar Two income taxes. Based on the assessment, the effective income tax rate in jurisdiction in which the Company operates is above 15%. Therefore, there was no top-up tax required for the year ended 31 December 2025.

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and its subsidiary submit tax returns on the basis of self-assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak ketiga	359	1,628	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 19)	555,572	201,943	*Related parties (Note 19)*
	555,931	203,571	

Pada tanggal 13 Agustus 2021, Grup mengadakan Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling dengan PLN dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). Adapun perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan layanan manajemen integrasi kas dalam rangka memfasilitasi pengelolaan likuiditas keuangan PLN Grup secara efisien. Saldo Notional Pooling Grup per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 465,215 (2024: Rp84,125). Perjanjian ini tidak mengatur pembatasan yang harus dipenuhi Grup dan tidak dijamin dengan aset tertentu yang dimiliki Grup. Suku bunga ditetapkan berdasarkan suku bunga *Lending Facility* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

On 13 August 2021, the Group entered into Notional Pooling Agreements with PLN and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). This agreement purpose is to provide integrated cash management services to facilitate the PLN Group's needs in managing financial liquidity efficiently. As at 31 December 2025, the Notional Pooling balance amounting to Rp465,215 (2024: Rp84,125) This agreement does not impose any restrictions on the Group and is not secured by any specific assets owned by the Group. The interest rate is determined based on the Lending Facility rate issued by Bank Indonesia.

Rincian mutasi *Notional Pooling* untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detailed movements of Notional Pooling for 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	84,125	60,861	*Personnel*
Arus kas:			*Cash flows*
- Penerimaan	4,812,339	3,082,053	*Receipts -*
- Bunga	26,015	18,026	*Interest -*
- Pembayaran kembali	(4,457,264)	(3,076,725)	*Repayments -*
	465,215	84,215	

14. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR / *14. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Pemegang saham/*Shareholders*	2025 dan/*and* 2024		
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*
PLN	78,975,000	99.97%	78,975
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	25,000	0.03%	25
Jumlah/*Total*	79,000,000	100%	79,000

Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah membentuk cadangan wajib sebesar Rp15.076.

Statutory reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 introduced in August 2007, requires the establishment of a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. As at 31 December 2025 and 2024, the Company has established the statutory reserve amounting to Rp15,076.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

Tambahan modal disetor / ***Additional paid-in capital***

Akun ini merupakan selisih antara nilai wajar aset bersih yang diterima sebagai modal disetor dengan jumlah nominal modal saham yang dikeluarkan dalam rangka pendirian Perusahaan.

This account represents the difference between the fair value of net assets which were received as paid-in capital and the total par value of capital stock which was issued during the Company's establishment.

15. PENDAPATAN / *REVENUE*

	2025	2024	
Operasi dan pemeliharaan	3,361,702	2,818,771	*Operation and maintenance*
Kontrak manajemen aset dan *ancillary services*	925,418	385,837	*Asset management contract and ancillary services*
Lain-lain	36,528	41,484	*Others*
	4,323,648	3,246,092	

Lihat Catatan 19 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 19 for details of related party transactions.

16. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *COST OF REVENUE*

	2025	2024	
Kepegawaian	2,015,915	1,721,590	*Personnel*
Sewa pembangkit	565,939	336,540	*Generator lease*
Subkontraktor	449,104	221,855	*Subcontractor*
Alat kerja dan material	359,950	282,302	*Tools and materials*
Kendaraan operasional	203,848	146,634	*Operational vehicle*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	49,290	38,968	*Depreciation of right-of-use assets (Note 11)*
Lain-lain	81,190	91,185	*Others*
	3,725,236	2,839,074	

17. BEBAN USAHA / *OPERATING EXPENSES*

	2025	2024	
Kepegawaian	121,835	84,304	*Personnel*
Penyusutan aset tetap (Catatan 7)	30,524	19,439	*Depreciation of fixed assets (Note 7)*
Honorarium	22,306	21,494	*Honorarium*
Lain-lain	27,953	18,351	*Others*
	202,618	143,588	

18. BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH / *OTHER EXPENSES, NET*

	2025	2024	
Denda penyediaan jasa tenaga kerja	63,036	33,908	*Penalty on manpower services*
Pendapatan denda dari vendor	(34,090)	(35,040)	*Penalty income from supplier*
Lain-lain	47,777	14,422	*Others*
	76,723	13,290	

Lihat Catatan 19 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 19 for details of related party transactions.

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

a. PLN merupakan entitas induk langsung Perusahaan.
b. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
c. Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

19. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Nature of relationships with related parties

a. PLN is the immediate parent entity of the Company.
b. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholders of PLN and other SOE.
c. Commissioner and Board of Directors are the key management personnel of the Company.

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat hubungan/*Nature of relationship*	Sifat transaksi/*Nature of transaction*
PLN	Entitas induk Perusahaan/ *Parent entity of the Company*	Piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, piutang non-usaha, utang pihak berelasi pendapatan dan denda penyediaan tenaga listrik/ *Trade receivables, finance lease receivable, receivables from related parties, payable to related parties, revenue and penalty on supply electricity*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/*Placement of cash and cash equivalents*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan bank garansi/*Placement of cash and cash equivalents and placement of bank guarantee*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan deposito berjangka/*Placement of cash and cash equivalents and placement of time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/*Placement of cash and cash equivalents*
PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas ("PLNEG")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/*Trade receivables and revenue*
PT Indonesia Comnet Plus ICON+ ("ICON+")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha, utang pihak berelasi dan pendapatan/ *Trade receivable, payable to related parties and revenue*
PT PLN Indonesia Power ("PLN IP")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/*Trade receivables and revenue*
PT PLN Nusantara Power ("PLN NP")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/*Trade receivables and revenue*
PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("PLN MCTN")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/*Trade receivables and revenue*
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLN Enjiniring")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/*Trade receivables and revenue*
PT PLN Electricity Services ("PLN ES")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Entity under common control*	Utang pihak berelasi, piutang usaha dan pendapatan /*Payable to related parties trade receivables and revenue*

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *19. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi / ***Balances and transactions with related parties***

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut:

Related party balances and transactions not disclosed elsewhere in these consolidated financial statements are as follows:

	2025	2024	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalent***
Kas di bank			*Cash in banks*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	150,583	36,487	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	14,852	34,793	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	41,351	10,641	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	31	695	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
Subjumlah	206,817	82,616	*Subtotal*
Deposito berjangka			*Time deposits*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	25,000	50,000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
Jumlah	**231,817**	**132,616**	***Total***

	2025	2024	
Piutang Usaha			***Trade Receivable***
PLN	911,758	652,508	*PLN*
PLN NP	68,536	25,450	*PLN NP*
PLN IP	10,425	6,465	*PLN IP*
ICON+	3,960	5,235	*ICON+*
PLN Enjiniring	1,710	-	*PLN Enjiniring*
PLNEG	1,223	574	*PLNEG*
PLN ES	-	460	*PLN ES*
Jumlah	**997,612**	**690,692**	***Total***

	2025	2024	
Piutang Sewa Pembiayaan			***Finance Lease Receivables***
PLN	114,441	-	*PLN*

	2025	2024	
Utang lain-lain			***Other Payables***
PLN	549,666	199,248	*PLN*
ICON+	5,896	2,685	*ICON+*
PLN ES	10	10	*PLN ES*
Jumlah	**555,572**	**201,943**	***Total***

19. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Balances and transactions with related parties*** *(continued)*

	2025	2024	
Pendapatan			***Revenue***
PLN	3,862,903	2,996,513	*PLN*
PLN NP	310,265	182,202	*PLN NP*
PLN IP	69,135	46,127	*PLN IP*
ICON+	21,832	17,420	*ICON+*
PLNEG	5,958	2,968	*PLNEG*
PLN Enjiniring	5,429	-	*PLN Enjiniring*
PT PLN MCTN	-	862	*PT PLN MCTN*
Jumlah	**4,275,522**	**3,246,092**	***Total***

	2025	2024	
Denda penyediaan tenaga kerja			***Penalty on manpower services***
PLN	63,036	33,308	*PLN*

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak antar pihak-pihak tersebut.

Transactions with the related parties are carried out based on contracts between the parties.

Kompensasi manajemen kunci / ***Key management compensation***

Jumlah kompensasi Komisaris dan Direksi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.863 dan Rp27.003.

Total remuneration of the Commissioner and Board of Directors in 2025 and 2024 amounted to Rp29,863 and Rp27,003, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All of the remunerations to the Company's Commissioner and Board of Directors represent short-term employee benefits.

20. PERJANJIAN SIGNIFIKAN / *SIGNIFICANT AGREEMENTS*

Perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan / ***Operation and maintenance services agreements***

Perusahaan dan PLN menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian untuk pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan di wilayah Indonesia Timur. Perjanjian-perjanjian ini berakhir di tahun 2025 sampai dengan 2028.

The Group and PLN entered into agreements for operation and maintenance services in East Indonesia region. These agreements are valid in 2025 until 2028.

21. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN / *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, ,piutang non-usaha dan piutang sewa sebesar Rp1.396.523 (2024: Rp873.841), yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

As at 31 December 2025, the Group's financial assets comprised cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables and lease receivables amounted to Rp1,396,523 (2024: Rp873,341), which are categorised as financial assets held at amortised cost.

Pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa dan utang pihak berelasi sebesar Rp1,151,642 (2024: Rp536.498), yang dikategorilkan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

As at 31 December 2025, the Group's financial liabilities comprised trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and payable to related parties that amounted to Rp1,151,642 (2024: Rp536,498), which are categorised as financial liabilities held at amortised cost.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Secara kas, mayoritas transaksi Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Grup menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman dari pihak berelasi. Risiko tingkat suku bunga dari kas pada bank tidak signifikan.

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup. Pinjaman yang diterima pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Grup terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank dan pinjaman dari pihak berelasi. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas di bank tidak signifikan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, piutang non-usaha dan piutang sewa.

Untuk piutang usaha dan piutang non-usaha, Grup menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang mayoritas berasal dari PLN dan entitas anaknya yang tidak memiliki sejarah gagal bayar di masa lalu. Untuk kas dan setara kas di bank, Grup meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank yang memiliki peringkat kredit yang baik untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign exchange risk, and interest rates risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

On a cash basis, the majority of the Group's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Group assesses the foreign exchange risk as minimal.

(ii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk mainly arises from loans from related parties. The interest rate risk from cash in banks is not significant.

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Group. Borrowings received at variable rates exposes the Group to cash flow interest rate risk.

As at 31 December 2025 and 2024, the financial assets and financial liabilities of the Group which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks and loans from related party. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks is not significant.

b. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents in banks, trade receivables, non-trade receivables and lease receivables.

For trade receivables and non-trade receivables, the Group has assessed that the credit risk is minimal as receivables mostly derived from PLN and its subsidiaries for which there was no history of default in the past. For cash and cash equivalents, the Group minimise credit risk by placing the funds in several banks that have a good credit rating or standing to avoid significant concentration with one institution.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

c. Risiko likuiditas / *Liquidity risk*

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Total	
2025						***2025***
Utang usaha	385,795	-	-	-	385,795	*Trade payables*
Utang lain-lain	592,043	-	-	-	592,043	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	2,823	-	-	-	2,823	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	117,501	110,303	-	-	227,804	*Lease liabilities*
	1,098,162	110,303	-	-	1,208,465	
2024						***2024***
Utang usaha	293,081	-	-	-	293,081	*Trade payables*
Utang lain-lain	214,881	-	-	-	214,881	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	2,937	-	-	-	2,937	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	15,979	21,811	-	-	37,790	*Lease liabilities*
	526,878	21,811	-	-	548,689	

d. Estimasi nilai wajar / *Fair value estimation*

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat asetdan liabilitas keuangan lancar yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Management considers that the carrying amounts of current financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities.

e. Manajemen risiko permodalan / *Capital risk management*

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Dewan Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern. The Group's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL NUSA DAYA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI ARUS KAS / *CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *Non-cash transactions*

Aktivitas investasi signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas / *Significant investing activities not affecting cash flows*

	2025	2024	
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	213,960	39,086	*Additions of right-of-used assets through lease liabilities*
Penambahan piutang sewa melalui aset hak guna	(127,263)	-	*Additions of lease receivables through right-of-used assets*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: / *The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024 as follows:*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used for financing activites*	Sewa baru/ *Additional lease*	Jumlah/ *Total*	
2025						***2025***
Liabilitas sewa	36,909		(43,776)	213,960	207,093	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	84,125	4,812,339	(4,431,249)	-	465,215	*Other payables*
	121,034	**4,812,339**	**(4,475,025)**	**213,960**	**672,308**	
2024						***2024***
Liabilitas sewa	38,688	-	(40,865)	39,086	36,909	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	60,861	3,082,053	(3,058,699)	-	84,215	*Other payables*
	99,549	**3,082,053**	**(3,099,564)**	**39,086**	**121,124**	

24. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / *MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 12 Juni 2026. / *These consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Board of Directors on 12 June 2026.*

2025
Laporan Tahunan
Annual Report

Menjaga Keandalan Energi Mendorong Masa Depan Berkelanjutan

Ensuring Energy Reliability Advancing a Sustainable Future

PLN Nusa Daya

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya

Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No.78
Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

T : (0542) 8703981
F : (0542) 8506674
E : plnnd@plnnusadaya.co.id

www.plnnusadaya.co.id